



**KABUPATEN
PRINGSEWU**



**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NO 11 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025**



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor XX tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 158);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 114);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 180);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

28. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);
29. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022 dan daerah otonom baru.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan serta mengharmoniskan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2025 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP
2. RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Juli 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-27
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-71
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan III Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2017-2022.....	II-198
2.2.1 Urusan Wajib	II-199
2.2.2 Urusan Pilihan	II-214
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-370
2.4 Permasalahan Pembangunan	II-389
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-389
2.4.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-392

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-4

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-7

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.....III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....IV-1

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan IV-10

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025.....IV-10

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung
Tahun 2025.....IV-14

4.2.3 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu
Tahun 2025.....IV-21

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1 Kerangka Pendanaan.....V-1

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas V-3

5.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Wajib Pelayanan V-4

5.2.2 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar V-5

5.2.3 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan V-8

5.2.4 Program dan Kegiatan Urusan Penunjang V-9

5.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025 V-9

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025.....VI-1

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun 2025 VI-3

BAB VII PENUTUP.....VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu.....	II-2
Tabel 2.2 Luas Tingkat Kelerengan Lahan di Kabupaten Pringsewu	II-4
Tabel 2.3 Luas Formasi Geologi di Kabupaten Pringsewu	II-6
Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Pringsewu	II-7
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023...	II-27
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023 Di Kabupaten Pringsewu.....	II-28
Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023	II-30
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-31
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-32
Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-36
Tabel 2.12 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-38
Tabel 2.13 Angka Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2023	II-55
Tabel 2.14 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pringsewu 2019-2023	II-57
Tabel 2.15 Angka IPM Kabupaten/kota se Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-64
Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pringsewu, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.17 Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	II-70
Tabel 2.18 Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023.....	II-72

Tabel 2.19 Jumlah SD/MI, SMP/MTs, Penduduk Usia 7-12 Tahun, dan Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-76
Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2. 21 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-136
Tabel 2. 25 Indeks Membangun Desa di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2. 26 Kelompok Binaan dan Tingkat Keaktifan PKK di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-142
Tabel 2. 27 Jumlah dan Kegiatan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	II-171
Tabel 2. 28 Jumlah Pengunjung, Koleksi Buku, dan Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-172
Tabel 2. 29 Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pringsewu	II-177
Tabel 2. 30 Luas Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (dalam ha) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023.....	II-178
Tabel 2. 31 Produksi Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-179
Tabel 2. 32 Produktivitas Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Kw/Ha) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-179
Tabel 2. 33 Produksi Buah-Buahan (Kwintal) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-180

Tabel 2. 34 Produksi Sayur-Sayuran (Kwintal) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-181
Tabel 2. 35 Produksi Perkebunan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-182
Tabel 2. 36 Populasi Ternak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-182
Tabel 2. 37 Produksi Daging (kg) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-183
Tabel 2. 38 Produksi Telur (kg) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-183
Tabel 2. 39 Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-187
Tabel 2. 40 Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-188
Tabel 2. 41 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-189
Tabel 2. 42 Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-190
Tabel 2. 43 Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-191
Tabel 2. 44 Tabel Kinerja Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-192
Tabel 2. 45 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-194
Tabel 2.46 Kinerja Sekretariat Daerah di Kab Pringsewu Tahun 2018-2023	II-194
Tabel 2. 47 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	II-195
Tabel 2. 48 Status Pekon Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-196
Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	II-200

Tabel 2. 50 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Tahun 2023 Dan Realisasi RPD	II-218
Tabel 2. 51 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan	II-370
Tabel 2.52 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-375
Tabel 2. 53 Kendala dan Rencana Tindaklanjuti Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 Yang Belum Tercapai	II-376
Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang kesehatan kabupaten Pringsewu tahun 2023	II-380
Tabel 2. 55 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan	II-381
Tabel 2. 56 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial	II-383
Tabel 2. 57 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pringsewu 2023	II-389
Tabel 2.58 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-390
Tabel 2.59 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-392
Tabel 3. 1 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Untuk Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
Tabel 3. 2 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026	III-16
Tabel 3. 3 Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026	III-20
Tabel 4. 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023 – 2026	IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Target Kinerja Sasaran Yang Akan Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026	IV-5
Tabel 4. 3 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2025 Terhadap RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026	IV-27

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025	IV-31
Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025	V-2
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	V-10
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025	VI-2
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu	1
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Pringsewu	5
Gambar 2. 3 Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu	8
Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Pringsewu	10
Gambar 2.5 Rata-Rata Suhu di Kabupaten Pringsewu	11
Gambar 2.6 Suhu Rata-Rata per Jam di Kabupaten Pringsewu.....	11
Gambar 2.7 Peluang Presipitasi Harian di Kabupaten Pringsewu	12
Gambar 2.8 Rata-Rata Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Pringsewu	12
Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu.....	13
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu.....	26
Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	29
Gambar 2. 12 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional (Persen) Tahun 2019-2023	34
Gambar 2. 13 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	40
Gambar 2. 14 Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019- 2023	41
Gambar 2. 15 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	42
Gambar 2. 16 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019- 2023	43
Gambar 2. 17 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	44

Gambar 2. 18 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Konstruksi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	44
Gambar 2. 19 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	45
Gambar 2. 20 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	46
Gambar 2. 21 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	47
Gambar 2. 22 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	48
Gambar 2. 23 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Pringsewu (Persen) 2019-2023	49
Gambar 2. 24 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Real Estate Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	50
Gambar 2. 25 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	51
Gambar 2. 26 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	51
Gambar 2. 27 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	52
Gambar 2. 28 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	53
Gambar 2. 29 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023	53

Gambar 2. 30 Grafik Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	54
Gambar 2. 31 Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	58
Gambar 2. 32 Grafik Perbandingan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	60
Gambar 2. 33 Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	61
Gambar 2.34 Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	62
Gambar 2.35 Grafik Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019- 2023	63
Gambar 2. 36 Grafik Perbandingan Angka IPM Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	64
Gambar 2. 37 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023	66
Gambar 2. 38 Grafik Rasio Murid PAUD dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	71
Gambar 2. 39 Grafik Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	73
Gambar 2. 40 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	75
Gambar 2. 41 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	75

Gambar 2. 42 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	76
Gambar 2. 43 Grafik Rasio Guru Terhadap Murid per 10.000 Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023 ...	77
Gambar 2. 44 Grafik Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	77
Gambar 2.45 Grafik Kondisi Ruang Kelas dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	78
Gambar 2. 46 Grafik Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	79
Gambar 2. 47 Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	80
Gambar 2. 48 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	80
Gambar 2. 49 Grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	81
Gambar 2. 50 Grafik Kualitas Guru Bersertifikat Mengajar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	81
Gambar 2. 51 Grafik Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	83
Gambar 2. 52 Grafik Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	84
Gambar 2. 53 Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	86
Gambar 2. 54 Grafik Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	87
Gambar 2. 55 Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	87
Gambar 2. 56 Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	88
Gambar 2.57 Grafik angka kematian ibu (AKI) di kabupaten pringsewu tahun 2019-2023	88

Gambar 2. 58 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten pringsewu tahun 2014-2023	89
Gambar 2.59 Grafik stunting di kabupaten pringsewu tahun 2021-2023..	90
Gambar 2.60 Jumlah Kasus HIV/AIDS Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2023	90
Gambar 2.61 Jumlah Penemuan Kasus Tb Paru Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2023	91
Gambar 2. 62 Grafik Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	93
Gambar 2. 63 Grafik Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	94
Gambar 2. 64 Grafik Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	94
Gambar 2. 65 Grafik Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	95
Gambar 2. 66 Grafik Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	95
Gambar 2. 67 Grafik Persentase Sempadan Sungai Yang Digunakan Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	96
Gambar 2. 68 Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	97
Gambar 2. 69 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023 ..	97
Gambar 2. 70 Grafik Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	100
Gambar 2. 71 Grafik Luasan RTH Publik 20 Persen dari Kawasan Perkotaan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	101
Gambar 2. 72 Grafik Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	102
Gambar 2. 73 Grafik Ketaatan Terhadap RTRW (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	103

Gambar 2.74 Grafik Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	104
Gambar 2. 75 Grafik Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	105
Gambar 2.76 Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	106
Gambar 2. 77 Grafik Persentase Permukiman Tertata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	107
Gambar 2. 78 Grafik Cakupan Perumahan yang Didukung PSU (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	108
Gambar 2. 79 Grafik Cakupan Perumahan yang Didukung PSU (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023	108
Gambar 2. 80 Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	109
Gambar 2. 81 Grafik Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	110
Gambar 2. 82 Grafik Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	111
Gambar 2. 83 Grafik Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	111
Gambar 2. 84 Grafik Persentase Penagakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	112
Gambar 2. 85 Grafik Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	113
Gambar 2. 86 Grafik Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	114
Gambar 2. 87 Grafik Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	114
Gambar 2. 88 Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	115
Gambar 2. 89 Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	116

Gambar 2. 90 Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	117
Gambar 2. 91 Grafik Persentase Panti Sosial Yang Memperoleh Bantuan KUBE di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	118
Gambar 2.92 Cakupan Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Kesehatan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	118
Gambar 2.93 Grafik Cakupan Korban Bencana Yang Memperoleh Bantuan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	119
Gambar 2.94 Grafik Cakupan Penyandang Cacat Yang Menerima Jaminan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	120
Gambar 2. 95 Grafik Perbandingan TPAK (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023	121
Gambar 2. 96 Grafik Perbandingan TPT (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023	122
Gambar 2. 97 Grafik Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	122
Gambar 2. 98 Grafik Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	123
Gambar 2. 99 Pekerja Yang Menjadi Peserta Jamsostek (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	124
Gambar 2. 100 Grafik Persentase Pekerja Yang Menerapkan K3 di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	125
Gambar 2. 101 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	126
Gambar 2. 102 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Swasta di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	126
Gambar 2. 103 Grafik Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	127

Gambar 2. 104 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	128
Gambar 2. 105 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023.....	128
Gambar 2. 106 Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023	129
Gambar 2. 107 Grafik Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023	130
Gambar 2. 108 Ketersediaan Pangan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	131
Gambar 2. 109 Grafik Ketersediaan Sektor Peternakan dan Perikanan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	131
Gambar 2. 110 Grafik Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	132
Gambar 2. 111 Grafik Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	133
Gambar 2. 112 Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022	134
Gambar 2. 113 Grafik Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL/SPPL (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	136
Gambar 2.114 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	137
Gambar 2. 115 Grafik Cakupan Penerbitan KTP (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	138
Gambar 2. 116 Grafik Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	139
Gambar 2. 117 Grafik Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	140

Gambar 2. 118 Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	140
Gambar 2. 119 Grafik Cakupan Kantor Pemerintahan Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	143
Gambar 2. 120 Grafik Cakupan Posyandu Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	144
Gambar 2. 121 Grafik Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	144
Gambar 2. 122 Grafik Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	145
Gambar 2. 123 Grafik Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	146
Gambar 2. 124 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	147
Gambar 2. 125 Grafik Cakupan Total Fertility Rate di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	147
Gambar 2. 126 Grafik Cakupan Unmet Need di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	148
Gambar 2. 127 Grafik Cakupan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	149
Gambar 2. 128 Grafik Cakupan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	149
Gambar 2. 129 Grafik Cakupan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	150
Gambar 2. 130 Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	151
Gambar 2. 131 Grafik Rasio Izin Trayek di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	152
Gambar 2. 132 Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	152
Gambar 2. 133 Grafik Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Umum di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	153

Gambar 2. 134 Grafik Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	154
Gambar 2. 135 Grafik Cakupan Pemberdayaan IKM di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	156
Gambar 2. 136 Grafik Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	157
Gambar 2. 137 Grafik Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	158
Gambar 2. 138 Grafik Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	159
Gambar 2. 139 Grafik Persentase UKM Non BPR/LKM UKM Yang Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	160
Gambar 2. 140 Grafik Persentase BPR dan LKM Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	160
Gambar 2. 141 Grafik Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	161
Gambar 2. 142 Grafik Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	162
Gambar 2. 143 Grafik Nilai Investasi Berskala Nasional (Juta Rupiah) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	163
Gambar 2. 144 Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN dan PMA di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	165
Gambar 2. 145 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	165
Gambar 2. 146 Grafik Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	166
Gambar 2. 147 Grafik Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	167
Gambar 2. 148 Grafik Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	168
Gambar 2. 149 Grafik Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	168

Gambar 2. 150 Grafik Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017- 2022	169
Gambar 2. 151 Grafik Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.....	170
Gambar 2. 152 Grafik Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	173
Gambar 2. 153 Grafik Jumlah Pengelola Kearsipan Yang Telah Dilatih di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	173
Gambar 2.154 Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018- 2023	174
Gambar 2.155 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	175
Gambar 2. 156 Grafik Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	175
Gambar 2. 157 Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	176
Gambar 2. 158 Grafik Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	177
Gambar 2. 159 Grafik Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	180
Gambar 2. 160 Grafik Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023	184
Gambar 2. 161 Grafik Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	185
Gambar 2. 162 Grafik Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	186
Gambar 2. 163 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018- 2023.....	189
Gambar 4. 1 Sasaran Indonesia Emas Tahun 2025	IV-13
Gambar 4. 2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

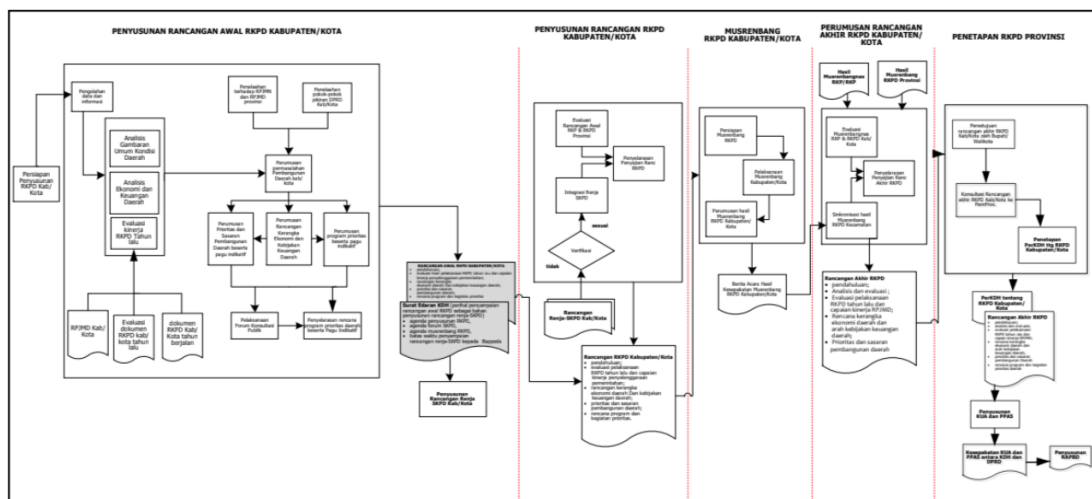
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Diketahui RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD tahun 2025 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Lampung, RPJPD Kabupaten Pringsewu, RPD Kabupaten Pringsewu dan RKPD Tahun sebelumnya terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Pada proses Penyusunan RKPD disusun dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Pasal 74, proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang

dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1. 1 Skema Alur Penyusunan RKPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah beberapa ketentuan yang mencakup sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 187);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
30. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

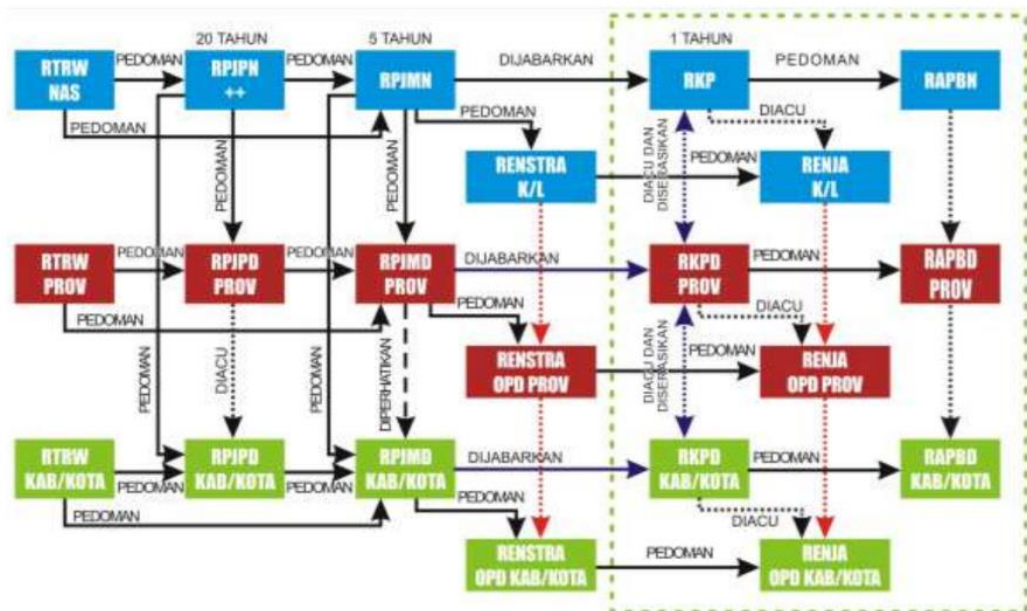
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 merupakan produk dokumen rencana yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai salah satu bagian dari sistem Perencanaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga ditegaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Kemudian proses penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Renstra juga mengacu pada Renstra di kementerian atau lembaga yang berada di atasnya masing-masing. Dengan kondisi tersebut maka keberadaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, merupakan bagian dari sistem perencanaan yang secara hirarki saling berkaitan, dimana dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih tinggi, menjadi rujukan bagi

penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Begitu juga pada tingkat pemerintahan, maka dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan di bawahnya.

Penjelasan lebih lanjut hubungan keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya secara diagramatis terjelaskan sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Kabupaten Pringsewu kedalam rencana prioritas, sasaran dan program kegiatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang berada di atasnya.
2. Sebagai instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Menciptakan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan yang mencakup antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.
5. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan strategi bagi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 1 (satu) tahun.



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pringsewu dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lampung, dan Kabupaten Pringsewu maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

B. Tujuan

Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.

C. Sasaran

Sasaran penyusunan dokumen RKPD ini yaitu :

1. Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah;
2. Teridentifikasinya rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Teridentifikasinya kapasitas riil keuangan daerah;
4. Dirumuskannya rancangan awal renja perangkat daerah;
5. Dirumuskannya permasalahan pembangunan daerah;

6. Dirumuskannya sasaran dan arah kebijakan rencana pembangunan daerah;
7. Teridentifikasinya kebijakan pemerintah pada rkp dan program strategis nasional;
8. Dirumuskannya pokok-pokok pikiran dprd;
9. Dirumuskannya prioritas pembangunan daerah;
10. Dirumuskannya rencana kerja program dan pendanaan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen.
- 1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran.
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

- 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- 4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

- 1.1 Kerangka Pendanaan
- 1.2 Program dan Kegiatan Prioritas

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama

6.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII : Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

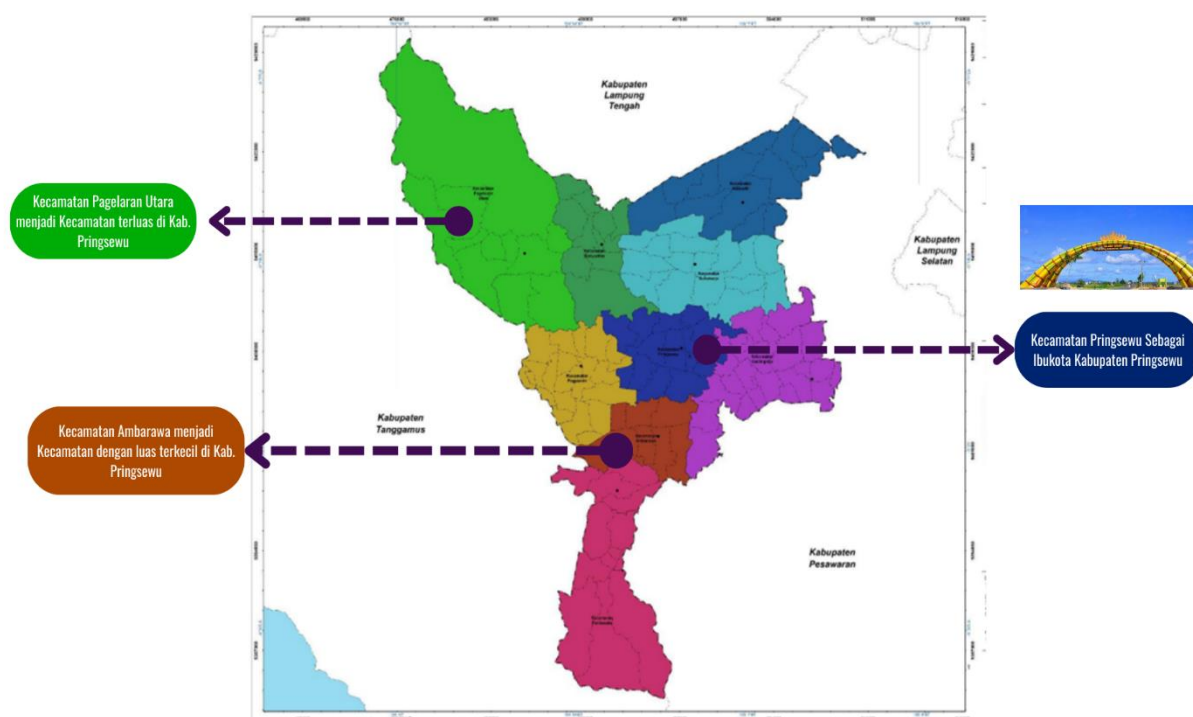
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas, dan Batas Administrasi

Secara geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terbentang antara $104^{\circ}46'16,91''$ - $105^{\circ}5'52,33''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}9'24,92''$ - $5^{\circ}34'35,10''$ Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Ketiga wilayah kabupaten tersebut, yaitu di sebelah utara wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Adapun peta orientasi wilayah Kabupaten Pringsewu dan peta wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Sumber: RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas sebesar 617,19 km². Secara administratif, Kabupaten Pringsewu terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang terbagi ke dalam 126 pekon (desa) dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pagelaran Utara dengan luas sekitar 158,19 km² atau 25,63% dari luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas sekitar 33,11 km² atau 5,36% dari luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Gadingrejo dengan jumlah 23 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Ambarawa dengan jumlah 8 (delapan) desa/kelurahan. Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Untuk mengetahui lebih jelas nama-nama kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu berikut luas wilayah dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jumlah Pekon/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Adiluwih	13	68,80	11,15%
2.	Ambarawa	8	33,11	5,36%
3.	Banyumas	11	42,71	6,92%
4.	Gadingrejo	23	67,79	10,98%
5.	Pagelaran	22	48,42	7,85%
6.	Pagelaran Utara	10	158,19	25,63%
7.	Pardasuka	13	87,31	14,15%
8.	Pringsewu	15	45,27	7,33%
9.	Sukoharjo	16	65,59	10,63%
Jumlah		131	617,19	100,00%

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

B. Kondisi Geografis

Kondisi fisik geografis wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada wilayah yang dapat dikembangkan bagi pengembangan kawasan budidaya secara optimal. Wilayah ini berada pada ketinggian daerah yang masih dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman sebagaimana halnya yang dapat dikembangkan pada daerah tropis. Secara morfologi, wilayah ini juga memiliki topografi yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kawasan terbangun dan lahan pertanian serta perkebunan. Namun begitu perlu diperhatikan keberadaan kawasan hutan di bagian selatan dan barat laut, sebagai hulu aliran sungai, agar tidak menimbulkan bahaya bagi kawasan dibawahnya.

Kondisi ketinggian Kabupaten Pringsewu memiliki dominasi ketinggian 100-200 Mdpl tersebar di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Gadingrejo. Sementara itu kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu > 400 Mdpl berada pada Kecamatan Pardasuka dengan luas 2.604 hektar dan Kecamatan Pringsewu dengan luas 1.106,72 hektar.

C. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan tingkat kemiringan lahannya dapat dibedakan menjadi enam bagian yang bervariasi, mulai dari kelas lereng 0-8% sampai dengan diatas 40%. Dari hasil perhitungan penggunaan metode interpolasi dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan lahan datar, yang memiliki tingkat kelerengan 0-8% seluas kurang lebih 263,50 km² atau 42,69% dari luas Kabupaten Pringsewu. Lahan datar ini umumnya tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan untuk lahan berbukit terjal, yang memiliki tingkat kelerengan diatas 25%, seluas kurang lebih 127,45 km² atau 20,65% dari luas Kabupaten Pringsewu. Lahan terjal ini terdapat di bagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di sebelah Barat Daya (Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas).

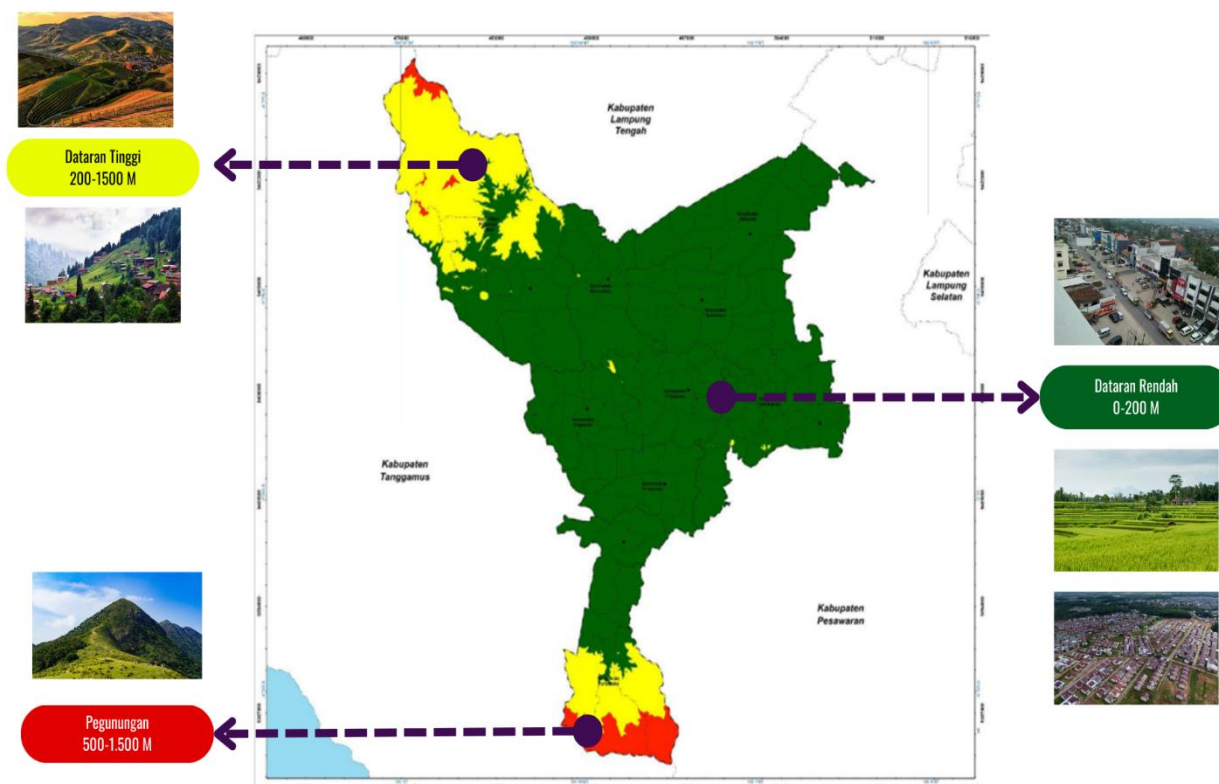
Sedangkan sisanya merupakan lereng berombak, yang memiliki tingkat kelerengan 8- 15% seluas kurang lebih 125,19 km² atau 20,28% dari luas Kabupaten Pringsewu dan didominasi pada wilayah Kecamatan Adiluwih. Kondisi topografi dan tingkat kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**, **Gambar 2.2** berikut ini.

Tabel 2.2 Luas Tingkat Kelerengan Lahan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kelas Lereng	Luas (km ²)	Persentase
1.	0 - 3%	107,33	18,21
2.	3 - 8%	156,17	25,30
3.	8 - 15%	125,19	20,28
4.	15 - 25%	101,05	16,37
5.	25 - 40%	15,08	2,44
6.	> 40%	112,37	18,21
Jumlah		617,19	100,00

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

Ditinjau dari segi elevasi, berdasarkan hasil interpretasi data *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM), maka elevasi lahan di wilayah kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0 – 100 mdpl, 100 – 200 mdpl, 200 – 300 mdpl, 300 – 400 mdpl, dan diatas 400 mdpl. Elevasi lahan untuk kelas 0 – 100 meter hampir keseluruhan berada di setiap kecamatan kecuali Banyumas. Elevasi lahan untuk kelas 100 – 200 meter banyak ditemui di masing-masing kecamatan. Elevasi 200 – 300 meter hanya ditemui di kecamatan Pardasuka, Pagelaran dan banyumas. Sedangkan elevasi 300 – 400 meter hanya di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Untuk elevansi di I-8 atas 400 meter dpl merupakan daerah pegunungan yang banyak dijumpai di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran Utara.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Pringsewu

D. Geologi

Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada muka bumi. Ditinjau dari geologi, di Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuartar. Formasi dalam hal ini adalah susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri yang nyata, baik dari satu macam jenis batuan maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di atas atau di bawah permukaan. Luasan masing-masing formasi geologis tersebut, tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan membentang membentuk satu kesatuan. Adapun formasi geologis secara lengkap di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Luas Formasi Geologi di Kabupaten Pringsewu

No.	Formasi	Luas (km ²)	Persentase
1.	Granit Kapur (Kgr)	19,74	3,20
2.	Formasi Menanga (Km)	2,93	0,47
3.	Diorit Sekampung Terdaunkan (Kds)	4,66	0,76
4.	Formasi Gading (Tomg)	4,01	0,65
5.	Formasi Hulusimpang (Tomh)	43,00	6,97
6.	Aluvium (Qa)	50,01	8,10
7.	Kompleks Gunung Kasih (Pzg)	197,30	31,97
8.	Batuan Gunungapi Kuarter Muda (Qhv)	45,25	7,33
9.	Formasi Lempung (Qtl)	250,29	40,55
Jumlah		617,19	100,00

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

Dari **Tabel 2.3** diketahui bahwa potensi formasi geologis terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Lempung (Qtl) dengan luas kurang lebih sebesar 250,29 km² atau sebesar 40,55% yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Potensi formasi geologis terbesar kedua adalah formasi Kompleks Gunung Kasih (Pzg) dengan luas sebesar kurang lebih 197,30 km² atau sekitar 31,97% yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Pardasuka. Sedangkan potensi formasi geologis terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Menanga (Km) dengan luas hanya sebesar 2,93 km² atau hanya sebesar 0,47% yang berada di Kecamatan Ambarawa. Kemudian ditinjau dari pembagian fisiografi maka wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dibagi kedalam empat jenis tanah terdiri dari aluvial, andosol, granit, dan kuarsit. Jenis tanah dan luasannya dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini.

Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Luas Grup Fisiografi (km ²)				Luas (km ²)	Persentase
		Aluvial	Andosol	Granit	Kuarsit		
1.	Pardasuka	31,170	56,142	0,000	0,000	87,312	14,15
2.	Ambarawa	30,506	25,965	0,000	0,001	33,104	5,36
3.	Pagelaran	18,867	29,557	0,000	0,000	48,424	7,85
4.	Pringsewu	44,338	9,325	0,000	0,000	45,271	7,33
5.	Gadingrejo	26,643	32,653	0,000	8,492	67,789	10,98
6.	Sukoharjo	31,105	0,000	34,487	0,000	65,593	10,63
7.	Banyumas	28,891	0,000	12,327	1,489	42,706	6,92
8.	Adiluwih	0,000	0,000	68,803	0,000	68,803	11,15
9.	Pagelaran Utara	53,368	0,000	2,386	102,437	158,192	25,63
Jumlah		264,890	121,882	118,004	112,419	617,195	100,00
Persentase		42,92	19,75	19,12	18,12	100,00	

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

Dari **Tabel 2.4** dapat diketahui persebaran jenis tanah di Kabupaten Pringsewu yang terluas adalah aluvial dengan luas sebesar kurang lebih 264,890 km² atau sekitar 42,92% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Kelompok fisiografis dataran tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Jenis tanah aluvial pada umumnya terdapat di dataran rendah, hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pringsewu didominasi dataran rendah. Pada jenis tanah ini hamparan terluas berada di Kecamatan Pagelaran Utara seluas kurang lebih 52,268 km². Sementara jenis tanah dengan luasan terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah kuarsit dengan luasan kurang lebih 112,419 km² atau sekitar 18,21% dari total luasan Kabupaten Pringsewu. Jenis tanah kuarsit pada umumnya memiliki lapisan tanah dan vegetasi yang tipis atau tidak ada sama sekali karena tingkat kekerasan dan sifat ketahanan kimianya.

Pada Kabupaten Pringsewu jenis tanah kuarsa paling besar terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara dengan luasan kurang lebih 102,437 km².

E. Hidrologi

Seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terletak dalam DAS Sekampung dan Sub DASnya terletak dalam beberapa Sub-DAS yaitu :

1. Sub DAS Way Sekampung Anak, dengan luas 12.575,90 Ha (20,12%)
2. Sub DAS Way Bulok, dengan luas 15.144,96 Ha (24,23%)
3. Sub DAS Way Semah, dengan luas 2.209,20 Ha (3,53%)
4. Sub DAS Mreabung Ilahan Suka, dengan luas 20.081,02 Ha (32,12%) dan
5. Sub DAS Way Tebu, dengan luas 12.498,92 Ha (20,00%)



Sumber: Dokumentasi Kementerian PUPR

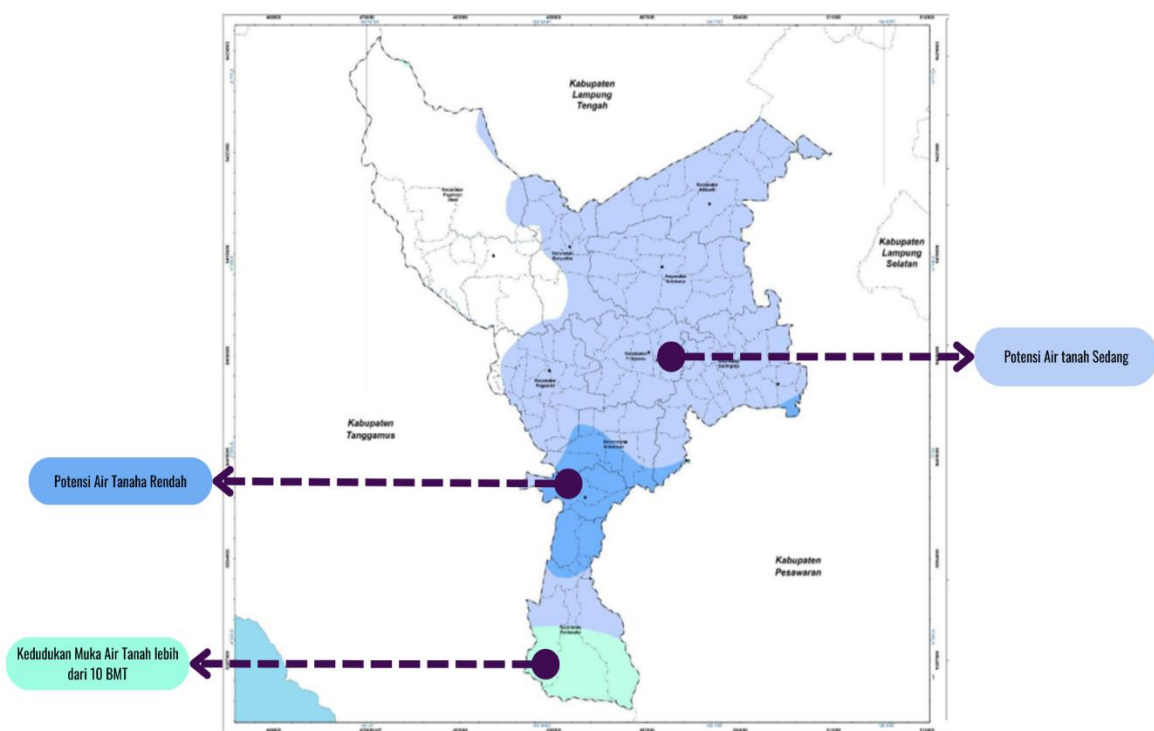
Gambar 2. 3 Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

Menurut data BPS dalam Pringsewu Dalam Angka 2017 diketahui bahwa Kabupaten Pringsewu dilintasi aliran sungai dan anak sungai sebagai berikut :

1. Way Sekampung Bagian Tengah, dengan panjang 24 km dan daerah aliran 600 km² ;
2. Way Gading, dengan panjang 7 km dan daerah aliran 56 km² ;
3. Way Apus, dengan panjang 6,8 km dan daerah aliran 5.440 km²;
4. Way Wonokoro, dengan panjang 8,8 km dan daerah aliran 7.040 km² ;
5. Way Wayah, dengan panjang 19 km dan daerah aliran 380 km² ;
6. Way Sangsep, dengan panjang 17 km dan daerah aliran 225 km² ;
7. Way Marga Harjo, dengan panjang 2,5 km dan daerah aliran 15 km².

Potensi hidrologi lain yang berada di Kabupaten Pringsewu adalah Cekungan Air Tanah (CAT). CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah merupakan dasar pengelolaan air tanah yang dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah. Di Kabupaten Pringsewu cekungan air tanah berupa CAT Metro-Kota Bumi yang berada pada wilayah Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Pringsewu, Gadingrejo, Ambarawa, serta sebagian Kecamatan Pagelaran, dan Pardasuka. Potensi sedang, dengan debit mata air kecil, < 5 ltr/dtk, kapasitas jenis sumur yang menyadap akuifer dalam adalah 60 ltr/menit per m surutan (*drawdown*)

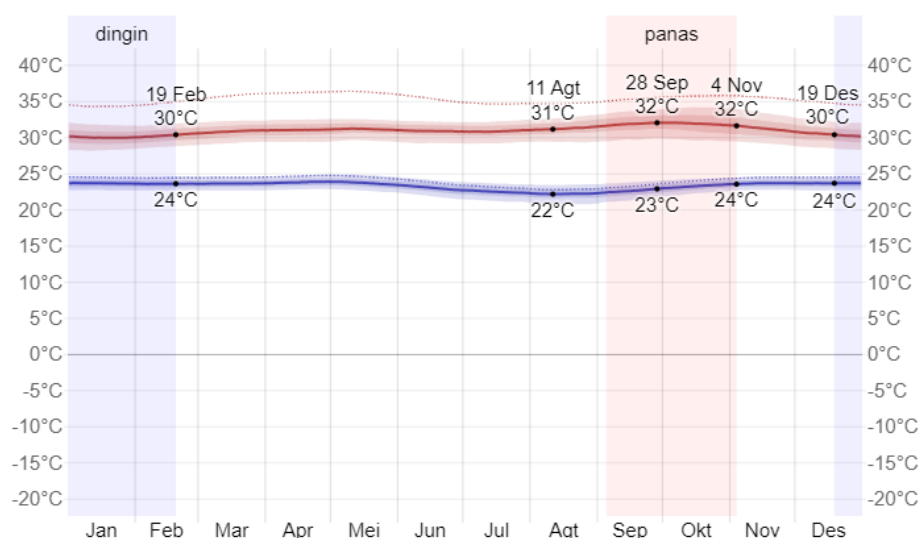
Cekungan air tanah merupakan dasar pengelolaan air tanah yang dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah. Di Kabupaten Pringsewu cekungan air tanah berupa CAT Metro-Kota Bumi yang berada pada wilayah Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Pringsewu, Gadingrejo, Ambarawa, serta sebagian Kecamatan Pagelaran, dan Pardasuka. Potensi sedang, dengan debit mata air kecil, $< 5 \text{ ltr/dtk}$, kapasitas jenis sumur yang menyadap akuifer dalam adalah 60 ltr/menit per m surutan (*drawdown*).



Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Pringsewu

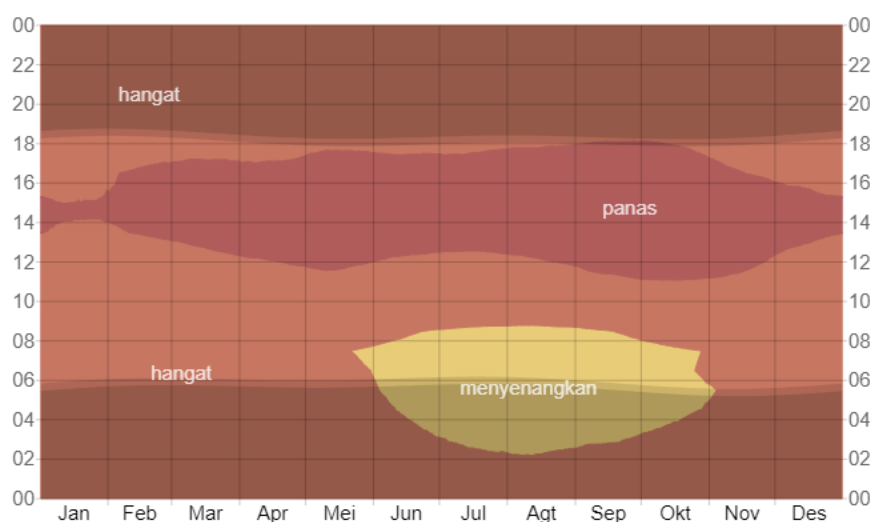
F. Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Pringsewu termasuk tropis basah. Sepanjang tahun, suhu di Kabupaten Pringsewu bervariasi dari 22°C hingga 32°C dan jarang di bawah 21°C atau di atas 34°C. Kondisi agroclimatic ini menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Pringsewu pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. Adapun grafik fluktuasi suhu di Kabupaten Pringsewu sepanjang tahun dan suhu per jam pada setiap harinya dapat dilihat pada **Gambar 2.5** dan **Gambar 2.6** berikut ini.



Sumber: Website *weatherspark.com*, 2024

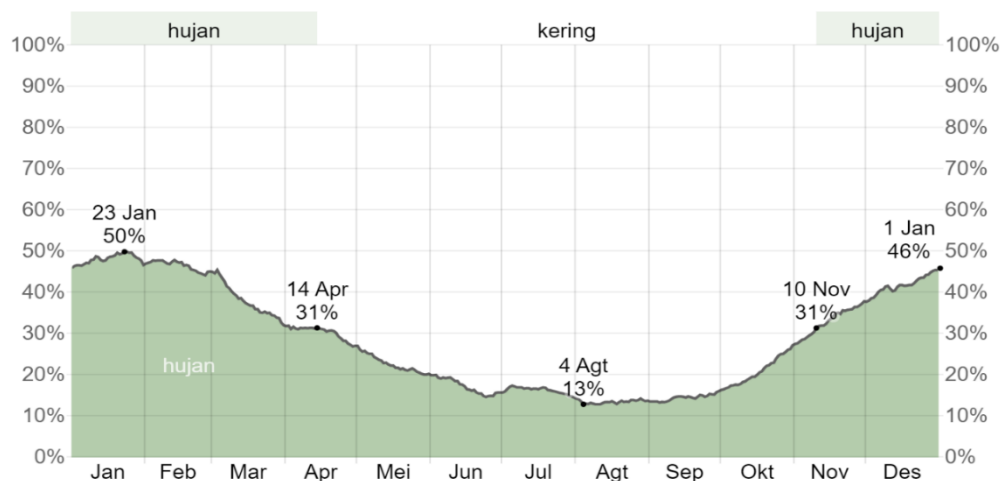
Gambar 2.5 Rata-Rata Suhu di Kabupaten Pringsewu



Sumber: Website *weatherspark.com*, 2024

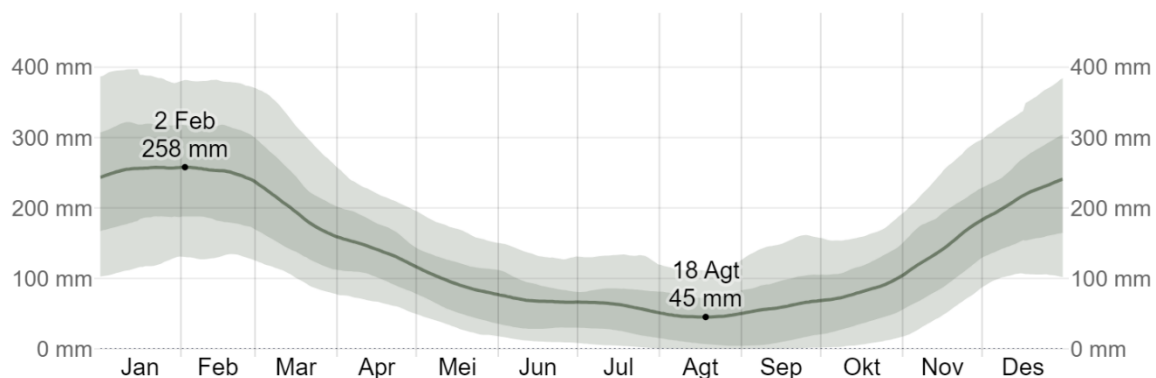
Gambar 2.6 Suhu Rata-Rata per Jam di Kabupaten Pringsewu

Hari hujan di Kabupaten Pringsewu juga bervariasi sepanjang tahun. Hari hujan terbanyak dalam 1 (satu) bulan di Kabupaten Pringsewu adalah 15 hari yaitu terjadi pada bulan Januari. Pada tahun ini, Kabupaten Pringsewu mengalami variasi musiman yang cukup ekstrim dalam curah hujan bulanan. Januari merupakan bulan dengan curah hujan paling tinggi di Pringsewu, dengan curah hujan rata-rata 10.1 inch atau sekitar 256,54 mm/bulan. Sedangkan bulan dengan hujan paling sedikit di Pringsewu yaitu Agustus, dengan curah hujan rata-rata 1.8 inch atau sekitar 45,72 mm/bulan. Adapun peluang presipitasi dan curah hujan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Gambar 2.7**, **Gambar 2.8** berikut ini.



Sumber: Website *weatherspark.com*, 2023

Gambar 2.7 Peluang Presipitasi Harian di Kabupaten Pringsewu

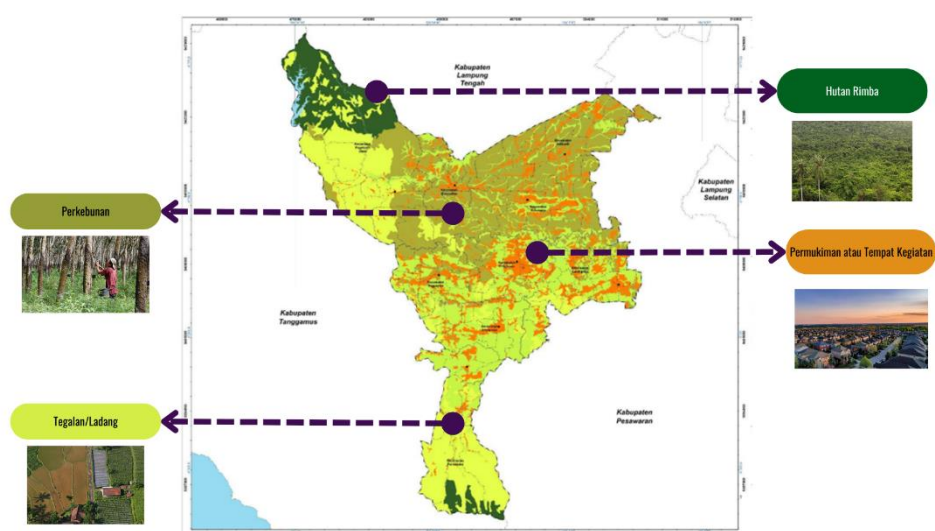


Sumber: Website *weatherspark.com*, 2023

Gambar 2.8 Rata-Rata Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Pringsewu

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 Ha atau sebesar 27,56%. Dari luas lahan yang digunakan untuk tegalan, 31,95% berada di Kecamatan Adiluwih. Sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Selain digunakan sebagai tegalan, sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu juga digunakan sebagai lahan sawah, tetapi luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih dibawah lahan tegalan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah seluas 12.197 Ha atau sebesar 19,51%, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.989 Ha atau 19,18%, hutan seluas 12.975 Ha atau 17,01%, permukiman seluas 9.547 Ha atau 15,27%, dan belukar seluas 917 Ha atau 1,47%. Secara umum Kabupaten Pringsewu dilihat dari tutupan lahannya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan dengan luasan sekitar 40.890 Ha atau sekitar 66,25%. Dimana luasan lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Gadingrejo, luasan lahan Kebun terbesar berada di Kecamatan Pagelaran, dan luasan lahan Tegalan terbesar berada di Kecamatan Adiluwih.



Sumber: RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu

2.1.1.2 Potensi Kawasan Sumber Daya

Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Pringsewu yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Sejahtera” dan selaras dengan visi penataan ruang Kabupaten Pringsewu yaitu “Mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian Wilayah yang maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing”, tentunya Kabupaten Pringsewu memiliki kekhasan kondisi yang berbeda dengan daerah lainnya dan berpotensi menjadi salah satu kabupaten yang unggul di Provinsi Lampung.

Secara umum, wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan kondisi lahan budidaya non-terbangun masih sangat luas, dimana kawasan pertanian dan perkebunan serta ruang terbukanya memiliki luas sekitar 66,25% dari total luas wilayah secara keseluruhan. Hal ini menjadi potensi yang akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, karena sebagai kawasan baru berkembang yang ingin memacu tingkat pertumbuhan ekonominya, sangat membutuhkan lahan yang dapat dikembangkan.

Secara geografis alami, wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada wilayah yang dapat dikembangkan bagi pengembangan kawasan budidaya secara optimal. Wilayah ini berada pada ketinggian daerah yang masih dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman sebagaimana halnya yang dapat dikembangkan pada daerah tropis. Secara morfologi, wilayah ini juga memiliki topografi yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kawasan terbangun dan lahan pertanian serta perkebunan. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan kawasan hutan di bagian selatan dan barat laut yang memiliki fungsi sebagai hulu aliran sungai. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Pringsewu tidak menimbulkan bahaya bagi kawasan dibawahnya.

Berdasarkan sistem pengembangan wilayah, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Lampung. Kondisi ini tidak terlepas dari Kabupaten Pringsewu memiliki prasarana dan sarana perekonomian wilayah skala regional. Secara perekonomian wilayah, Kabupaten Pringsewu masih ditopang oleh kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian daerah sekitar 45,51%. Hal ini sejalan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (primer). Namun pada masa mendatang hal tersebut tentu saja dapat bertransformasi atau menjalar ke sektor lainnya mengingat bahwa angka pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersier menunjukkan tren positif dan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan bergesernya pola mata pencaharian dan struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu dari yang semula berorientasi pada pertanian menjadi berorientasi pada non-pertanian seperti perdagangan, jasa, retail, atau industri. Kondisi tersebut tentunya akan merubah karakter wilayah dari pedesaan menjadi perkotaan. Hal ini perlu diakomodir dengan rencana fisik berupa rencana tata ruang wilayah.

Dalam upaya mencapai terwujudnya visi dan tujuan pembangunan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kebijakan dan langkah strategi yang dapat ditempuh sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan ruang wilayah kedepannya. Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan penataan ruang meliputi kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten, dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Strategis.

Pengembangan sistem pusat permukiman atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, pengaturan distribusi sistem kota-kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk dan potensi dan kegiatan ekonominya (strategi mikro) juga diperlukan suatu pengelolaan individual

kota atau daerah perkotaan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas (strategi makro). Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota ibukota kecamatan, dan kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang wilayah. Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Adapun pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Pringsewu berikut fungsi pelayanannya selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada uraian dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Ambarawa, Gadingrejo, Sukoharjo, dan Pagelaran akan dikembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
3. Adiluwih Pagelaran Utara, Banyumas dan Pardasuka, akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Sedangkan berdasarkan karakteristik dan lokasi wilayah Kabupaten Pringsewu, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2042, pengembangan wilayah atau kawasan budidaya mencakup bidang budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya tersebut, menjadi pedoman dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan pedoman bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya. Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang terletak pada wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. yang terdapat di Kabupaten Pringsewu meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana.

1. Badan Air

Badan air di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sungai dan waduk dengan total luasan sebesar kurang lebih 728 Hektar dengan luasan terbesar berupa Sungai Way Sekampung dan Bendungan Way Sekampung. Sungai dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pringsewu ini berada di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 3). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 jo SK.6618/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020, kawasan hutan lindung di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian Hutan Lindung Register 21 Perentian Batu (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pardasuka) seluas kurang lebih 3.014 Hektar.
- b. Sebagian Hutan Lindung Register 22 Way Waya (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas) seluas kurang lebih 10.025 Hektar.

Luasan total kawasan hutan lindung di Kabupaten Pringsewu kurang lebih seluas 13.039 Hektar atau sebesar 21,13% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Kriteria Penentuan Kawasan Lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lapangan 40% atau lebih dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dengan kemiringan lebih dari 25%; dan/atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu adalah berupa kawasan sempadan sungai yaitu adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai yang berada di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan adalah sekitar kurang lebih 23.307 Hektar atau sekitar 37,76% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Lahan yang berpotensi tersebut tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut dimungkinkan mengingat bahwa pada topografi wilayah di Kabupaten Pringsewu sebagian besar adalah relatif datar dan landai, sehingga sangat mendukung tersedianya ruang untuk pengembangan pertanian pangan.

Kawasan tanaman pangan sebagai bagian dari kawasan pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki luas kurang lebih 12.168 Hektar berada di seluruh Kecamatan. Sementara kawasan hortikultura yang juga merupakan bagian dari kawasan pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki luas kurang lebih 4.479 Hektar berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Sukoharjo. Kawasan pertanian lain di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 6.660 hektar berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo.

Pengembangan pertanian pangan pada masa mendatang diarahkan untuk tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Meskipun perkembangan kegiatan perkotaan diprediksi akan berlangsung pesat, namun pertimbangan bahwa daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan baik untuk Kabupaten Pringsewu, akan membatasi pengembangan karakter perkotaan di wilayah ini kedepannya.

Berbagai kegiatan karakter perkotaan akan dipertimbangkan pengembangannya apabila telah bersinggungan dengan pemanfaatan ruang lahan pertanian yang akan diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat erat hubungannya dengan ketahanan pangan. Dimana pada zaman sekarang ini ketahanan pangan tidak lagi dapat dipenuhi hanya berdasarkan usaha perorangan atau per keluarga, melainkan dicapai melalui usaha-usaha kolektif. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Lokasi lahan sawah abadi ditetapkan pada setiap lahan sawah yang pada saat ini diairi oleh sistem irigasi teknis maka sampai dengan 20 tahun mendatang akan dipertahankan sebagai lahan sawah. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan serta perkembangan sarana dan prasarana perkotaan di Kabupaten Pringsewu berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan salah satu penyebab semakin berkurangnya luas sawah. Dengan demikian sebelum dilakukan konversi harus dilakukan pengkajian-pengkajian yang dapat menekan lebih tingginya alih fungsi lahan.

Untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang pengembangan pertanian pangan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan peternakan dan perikanan. Dimana berdasarkan luasan lahan sawah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu direncanakan sampai dengan tahun 2031 luasan tersebut tidak berkurang terkecuali di Kecamatan Pringsewu.

2. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan perikanan budidaya yang difokuskan berada di Kecamatan Pagelaran seluas kurang lebih 651 Hektar.

Dimana kawasan perikanan ini merupakan kawasan strategis minapolitan untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pagelaran. Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan perlu dikembangkan khususnya pada kawasan minapolitan tersebut yang terdapat di Kecamatan Pagelaran. Hal tersebut diimbangi dengan pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan nila, ikan karper, ikan tawes, maupun ikan air tawar lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

3. Kawasan Pertambangan dan Energi

Berdasarkan data yang terdapat pada geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, di Kabupaten Pringsewu terdapat kawasan pertambangan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah keluar berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 236 Hektar yang berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, dan Kecamatan Sukoharjo. Kegiatan pertambangan yang dilakukan harus dilakukan melalui praktek pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan dan harus melakukan perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang.

4. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pringsewu terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata di Kabupaten Pringsewu. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pringsewu tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Pringsewu. Berikut jenis pariwisata yang direncanakan akan menjadi sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Pringsewu. Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata alam meliputi Bukit Pangonan Talang Indah Pajaresuk di Kecamatan Pringsewu, Bukit Tursina Bumiarum di Kecamatan Pringsewu, dan Talang Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran.
- b. Kawasan Pariwisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gadingrejo, Makam Kyai Haji Gholib di Kecamatan Pringsewu, Goa Maria Padang Bulan di Kecamatan Pringsewu, Rumah Adat Marga Kaya di Kecamatan Pringsewu dan Rumah Adat Saibatin di Kecamatan Pardasuka.

5. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan permukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk permukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- a. Memiliki sumber air yang terjamin keberlanjutannya.
- b. Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- c. Dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi-sosial.
- d. Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/ telepon, air bersih dan sebagainya.
- e. Risiko bencana alam kecil.
- f. Sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan sawah irigasi teknis (lahan pertanian pangan berkelanjutan).

Pola pengembangan perumahan/permukiman diselaraskan dengan pola ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengembangan kawasan permukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk permukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan permukiman. Identifikasi kawasan dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan permukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan permukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Kawasan permukiman di Kabupaten Pringsewu terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang berada di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 17.616 Hektar dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 6.010 Hektar berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Sukoharjo.

6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021, di Kabupaten Pringsewu terdapat kawasan pertahanan dan keamanan berupa:

- a. Kepolisian Resor Pringsewu dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu.
- b. Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar berada di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran Utara, dan Kecamatan Pringsewu.
- c. Kepolisian Sektor terdiri atas Kepolisian Sektor Gadingrejo di Kecamatan Gadingrejo, Kepolisian Sektor Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Kepolisian Sektor Pardasuka di Kecamatan Pardasuka,

Kepolisian Sektor Pringsewu Kota di Kecamatan Pringsewu, dan Kepolisian Sektor Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.

- d. Komando Rayon Militer terdiri atas Komando Rayon Militer 424-05/Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Komando Rayon Militer 424-06/Pringsewu di Kecamatan Pringsewu, Komando Rayon Militer 424-07/Gadingrejo di Kecamatan Gadingrejo, Komando Rayon Militer 424-09/Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo, dan Komando Rayon Militer 424-10/Pardasuka di Kecamatan Pardasuka.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

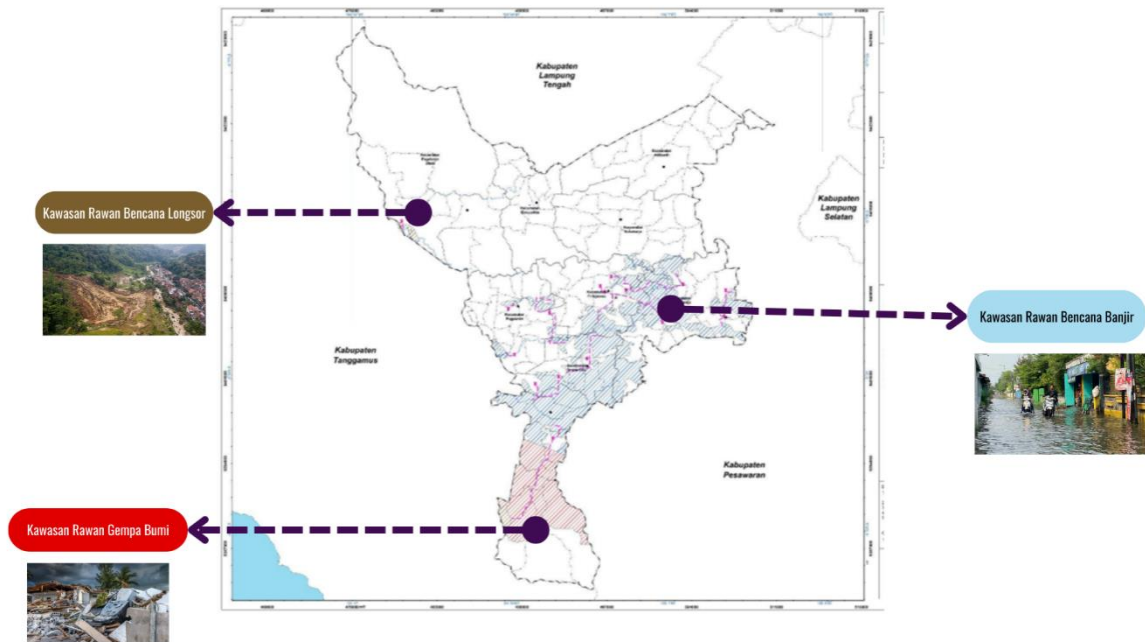
Wilayah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu maka diperlukan mitigasi bencana yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Kawasan rawan bencana merupakan salah satu kriteria yang akan dijadikan dasar untuk menentukan lokasi pembangunan permukiman penduduk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana, diantaranya tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Terhadap bencana sendiri ada empat penanganan yang dapat dilakukan yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang tidak terlepas dari ancaman bencana meliputi

kawasan rawan bencana banjir, potensi longsor dan potensi angin puting beliung. Sehingga sejak dini diperlukan perencanaan berbasis mitigasi bencana sebagai antisipasi dampak yang terjadi kedepannya. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Pringsewu meliputi:

- a. Kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai Way Sekampung diantaranya Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo dan Gadingrejo;
- b. Kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Banyumas;
- c. Kawasan rawan bencana puting beliung hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, terutama di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo; dan
- d. Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo.

Berdasarkan faktor kebencanaan wilayah Kabupaten Pringsewu sebagian besar berada pada tingkat kerawanan bencana yang cukup rendah, sehingga untuk mengantisipasinya dapat dilakukan pendekatan pembangunan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, tingkat ketahanan bangunan yang baik, maupun penggunaan bahan-bahan kimia yang rendah tingkat cemar lingkungannya.



Sumber: RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Kabupaten Pringsewu tahun 2023 adalah sebesar 437.222 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 223.750 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 213.472 jiwa. Wilayah yang sebaran penduduknya paling banyak adalah di Kecamatan Pringsewu, yang diikuti secara berturut turut Kecamatan Gadingrejo, Pagelaran dan Sukoharjo. Sedangkan sebaran penduduk yang paling kecil di Kecamatan Pagelaran Utara. Namun sejalan dengan perkembangan Kabupaten Pringsewu yang cukup pesat, maka di Kecamatan Pagelaran Utara sangat berpotensi terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi, mengingat di kecamatan tersebut terdapat Bendungan Way Sekampung dijadikan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru di Kabupaten Pringsewu. Secara rinci, jumlah dan sebaran penduduk di setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pardasuka	35.811	35.174	35.292	35.330	38.027
2.	Ambarawa	35.914	36.387	36.509	36.750	39.612
3.	Pagelaran	51.964	52.042	52.216	52.630	55.930
4.	Pagelaran Utara	15.446	15.301	15.352	15.370	16.530
5.	Pringsewu	81.745	81.776	82.050	82.100	87.331
6.	Gadingrejo	76.705	77.727	77.987	78.420	83.907
7.	Sukoharjo	50.019	49.704	49.870	50.080	53.827
8.	Banyumas	21.352	21.292	21.363	21.490	23.300
9.	Adiluwih	35.452	36.063	36.184	36.230	38.758
Jumlah		404.408	405.466	406.823	408.415	437.222

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

Pola persebaran penduduk di Kabupaten Pringsewu tidak merata di setiap Kecamatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap nilai kepadatan di Kabupaten Pringsewu menunjukkan cukup signifikan menunjukkan ketidakmerataan kepadatan di setiap kecamatan. Kecamatan paling padat berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Pringsewu menunjukkan kecamatan paling padat di Kabupaten Pringsewu dengan tingkat kepadatan 19 Jiwa/Hektar dan terpadat kedua yaitu Kecamatan Gadingrejo dengan tingkat kepadatan 12 jiwa per/hektar. Sementara itu kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dengan tingkat kepadatan 1 jiwa/hektar. Berikut tabel kepadatan penduduk per Kecamatan tahun 2023 di Kabupaten Pringsewu.

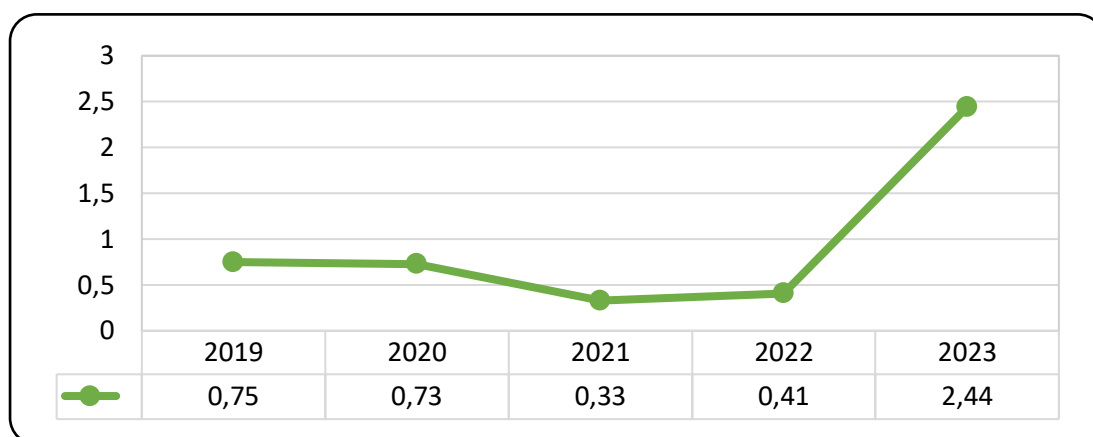
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023 Di Kabupaten Pringsewu

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per HA
1	Pardasuka	8.731	8,70	435,54
2	Ambarawa	3.311	9,06	1.196,38
3	Pagelaran	4.842	12,79	1.155,10
4	Pagelaran Utara	15.819	3,78	104,49
5	Pringsewu	4.528	19,97	1.928,69
6	Gadingrejo	6.779	19,19	1.237,75
7	Sukoharjo	6.559	12,31	820,66
8	Banyumas	4.271	5,33	545,54
9	Adiluwih	6.880	8,86	563,34
Jumlah				708,40

Sumber : Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2024

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi demografis lain yang perlu dicermati untuk menentukan proses pembangunan yaitu pertumbuhan penduduk. Dengan diketahuinya data pertumbuhan penduduk, maka dapat diantisipasi perkembangan penduduk pada suatu wilayah melalui program-program pembangunan. Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang tersedia di wilayah tertentu. Semakin besar laju pertumbuhan di suatu wilayah, maka semakin besar juga perhatian dari pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasarnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2021, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari yang semula pada tahun 2019 sebesar 0,75 persen hingga 0,33 persen pada tahun 2021. Mulai tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan dari 0,33 persen pada tahun 2021 menjadi 2,44 persen pada tahun 2023. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



**Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pardasuka	0,79	0,78	0,34	0,26	2,43
2.	Ambarawa	0,66	0,64	0,34	0,58	3,02
3.	Pagelaran	0,40	0,37	0,33	0,65	2,12
4.	Pagelaran Utara	0,90	0,87	0,33	0,23	2,56
5.	Pringsewu	0,95	0,93	0,34	0,27	2,00
6.	Gadingrejo	0,60	0,59	0,33	0,51	2,61
7.	Sukoharjo	0,93	0,91	0,33	0,43	2,49
8.	Banyumas	0,93	0,92	0,33	0,52	2,68
9.	Adiluwih	0,65	0,64	0,34	0,26	2,67
Kabupaten		0,75	0,73	0,33	0,41	2,44

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

2.1.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk. Semakin padat penduduknya, maka akan semakin cepat berkembang wilayah tersebut. Meskipun disisi lain juga banyak permasalahan yang harus ditangani sebagai dampak padatnya penduduk. Oleh karena itu, informasi yang cukup terhadap keberadaan demografi sangat diperlukan dalam rangka proses pembangunan. Salah satu informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pendukung dalam pembangunan adalah karakteristik dari penduduk berdasarkan kelompok umur. Dengan tersedianya informasi penduduk itu maka pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan suatu wilayah. Adapun karakteristik jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019-2023**

No	Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	0 - 4	34.144	34.636	34.197	33.835	30.837
2.	5 - 9	37.609	35.396	35.294	35.066	36.828
3.	10 - 14	36.733	32.451	32.511	32.701	38.602
4.	15 - 19	33.846	34.214	33.746	33.375	31.128
5.	20 - 24	28.964	34.408	33.804	33.200	36.224
6.	25 - 29	28.219	31.469	31.187	30.934	33.555
7.	30 - 34	29.322	30.615	30.443	30.226	31.993
8.	35 - 39	30.490	29.944	29.981	30.052	32.960
9.	40 - 44	31.155	29.152	29.321	29.436	33.624
10.	45 - 49	27.808	27.428	27.861	28.296	30.684
11.	50 - 54	23.895	24.311	24.809	25.326	27.668
12.	55 - 59	20.185	20.303	20.852	21.387	22.587
13.	60 - 64	15.595	15.368	15.888	16.444	18.590
14.	≥ 65	26.443	25.771	26.929	28.137	31.942
Jumlah		404.408	405.466	406.823	408.415	437.222

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

3.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi oleh penduduk, salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah, juga ditandai semakin kompleksnya permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang kompleks pula, sebagai langkahantisipasi munculnya konflik horizontal. Secara pola, persebaran penduduk di Kabupaten Pringsewu tidak merata di setiap Kecamatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap nilai kepadatan di Kabupaten Pringsewu menunjukkan cukup signifikan menunjukkan ketidakmerataan kepadatan di setiap kecamatan. Kecamatan paling padat berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Pringsewu

menunjukkan kecamatan paling padat di Kabupaten Pringsewu dengan tingkat kepadatan 1.928 jiwa/km² dan terpadat kedua yaitu Kecamatan Gadingrejo dengan tingkat kepadatan 1.237 jiwa per/km². Sementara itu kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dengan tingkat kepadatan 104 jiwa/km². Berikut tabel kepadatan penduduk per Kecamatan tahun 2019-2023 di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pardasuka	94,64	378	372	373	366	435
2.	Ambarawa	30,99	1.150	1.174	1.178	1.186	1.196
3.	Pagelaran	72,47	717	718	721	726	1.155
4.	Pagelaran Utara	53,29	1.534	1.535	1.540	1.541	104
5.	Pringsewu	85,71	895	907	910	915	1.928
6.	Gadingrejo	72,95	686	681	684	687	1.237
7.	Sukoharjo	39,85	536	534	536	539	820
8.	Banyumas	74,82	474	482	484	484	545
9.	Adiluwih	100,28	154	153	153	153	563
Kabupaten		625,00	647	649	651	653	708

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

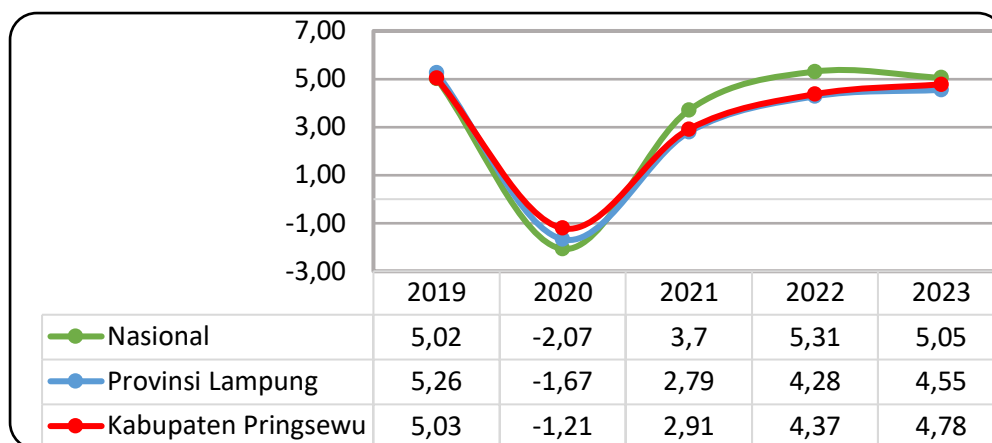
A. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2019-2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu sebelum pandemi Covid-19 memperlihatkan tren negatif dari 5,03% pada tahun 2019 menjadi -1,21% pada tahun 2020. Selama 2 tahun terakhir Kabupaten Pringsewu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Kabupaten Pringsewu mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai -1,21% dan mulai membaik tumbuh positif di tahun 2021 sebesar 2,91%.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (4,55%) dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05%). Adapun secara nominal, perekonomian Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 371.903,17 Miliar dan Rp. 247.001,67 Miliar.



Gambar 2. 12 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Lampung dan BAPPENAS, 2024

Jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu ditinjau dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pada tahun 2019 merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 5,03%. Kemudian pada tahun setelahnya hingga tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, Kabupaten Pringsewu masuk dalam 3 (tiga) besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang pertumbuhan ekonominya tertinggi dengan nilai yang sama didapatkan oleh Kota Metro yaitu sebesar 2,91%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten	Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	6,17	-1,88	3,10	4,95	4,99
Metro	5,57	-1,79	2,91	4,51	4,86
Pringsewu	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78
Lampung Tengah	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70
Lampung Timur	3,79	-2,26	0,24	2,02	3,51

Kabupaten	Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tulang Bawang	5,41	-1,34	2,88	3,92	4,27
Lampung Selatan	5,13	-1,73	2,68	4,91	4,82
Lampung Barat	5,18	-1,16	2,58	4,10	4,69
Lampung Utara	5,33	-1,45	2,82	3,16	4,22
Way Kanan	5,17	-1,16	2,90	4,41	4,63
Tanggamus	5,02	-1,77	2,34	4,16	4,70
Tulang Bawang Barat	5,36	-1,32	2,89	4,49	4,53
Pesawaran	5,00	-1,26	2,08	4,55	4,49
Pesisir Barat	5,47	-1,18	2,07	2,88	3,42
Mesuji	5,26	-1,35	2,84	3,49	4,06
Provinsi Lampung	5,26	-1,67	2,79	4,28	4,55
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS Provinsi Lampung dan BAPPENAS, 2024

b. Struktur Ekonomi

Kabupaten Pringsewu yang terletak tidak jauh dari Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi, seperti lahan pertanian yang masih cukup luas, banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Pringsewu, dan sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk mencapai 437.222 jiwa. Ditinjau dari struktur perekonomiannya, Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 14,01 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,16 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa kategori lapangan usaha dan adanya pengaruh inflasi daerah. Adapun nilai PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.728,00	2.805,34	2.806,84	3.069,86	3.239,86
B	Pertambangan dan Penggalian	11,89	12,35	11,77	12,37	13,31
C	Industri Pengolahan	1.742,50	1.667,98	1.786,11	1.860,10	1.955,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	7,90	8,48	8,98	9,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	6,26	6,87	7,23	7,38
F	Konstruksi	1.353,15	1.313,39	1.444,45	1.580,43	1.729,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.599,90	1.534,85	1.645,12	2.018,37	2.318,82
H	Transportasi dan Pergudangan	512,28	503,48	522,09	669,26	877,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299,95	293,35	292,11	332,38	384,53
J	Informasi dan Komunikasi	622,51	675,47	701,15	709,82	764,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	435,49	447,75	483,90	506,53	531,94
L	Real Estate	442,35	439,82	447,17	474,27	489,22
M,N	Jasa Perusahaan	27,57	27,40	27,90	33,60	36,23
O	Administrasi Pemerintahan,	465,70	491,93	501,54	516,84	525,05

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	605,78	634,24	653,15	690,94	730,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,75	176,67	185,37	188,58	201,80
R,S, T,U	Jasa Lainnya	135,85	127,97	126,03	163,23	194,58
Produk Domestik Regional Bruto		11.156,95	11.166,16	11.659,05	12.842,10	14.010,05

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi Kabupaten Pringsewu. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pringsewu terhadap kemampuan memproduksi dari setiap dari lapangan usaha.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Pringsewu didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yang utama diantaranya, yaitu kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), kategori C (Industri Pengolahan), dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor). Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tabel di atas.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 23,13%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2022. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang mencapai 16,55%.

Pada kategori ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,8%. Lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar ketiga yang mencapai 13,95%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu tidak lebih dari 6%, kecuali untuk kategori Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 12,35% dan kategori Transportasi dan Pergudangan yang memberikan kontribusi sebesar 6,26%.

Tabel 2.12 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,45	25,12	24,10	23,92	23,13
B	Pertambangan dan Penggalan	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
C	Industri Pengolahan	15,62	14,94	15,23	14,44	13,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
F	Konstruksi	12,13	11,76	12,37	12,29	12,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,34	13,75	14,15	15,75	16,55
H	Transportasi dan Pergudangan	4,59	4,51	4,49	5,22	6,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	2,63	2,51	2,59	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	5,58	6,05	6,02	5,53	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	4,01	4,16	3,95	3,80
L	Real Estate	3,96	3,94	3,84	3,69	3,49
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,24	0,26	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	4,17	4,41	4,38	4,03	3,75

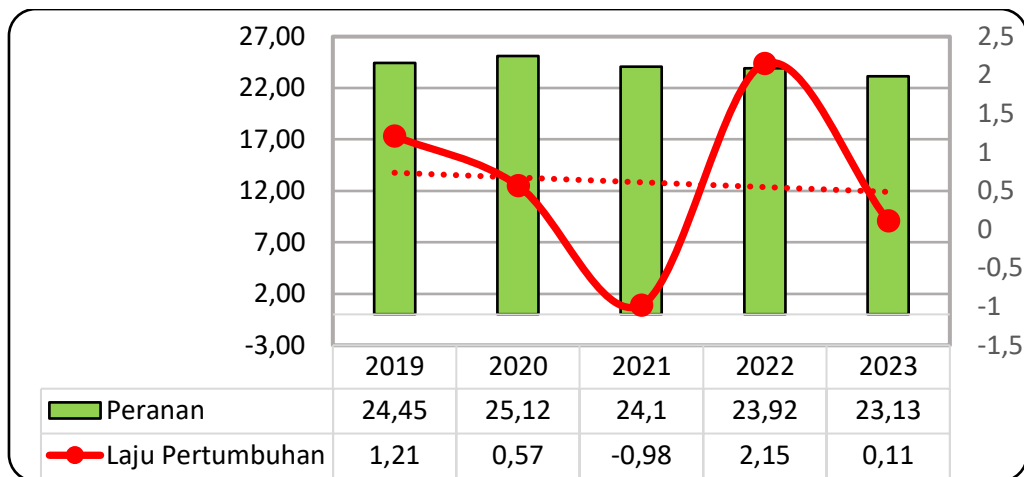
Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	5,43	5,68	5,61	5,38	5,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,58	1,59	1,47	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,22	1,15	1,08	1,27	1,39
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

PDRB Kabupaten Pringsewu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup sub kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat Pringsewu. Pada tahun 2023 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu mencapai sebesar 3,23 triliun atau sebesar 23,13%.



Gambar 2. 13 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami tren negatif pada tahun 2019-2021 dan mulai kembali membaik pada tahun 2022 namun kembali turun pada tahun 2023. Permasalahan paling krusial di Kabupaten Pringsewu khususnya bidang pertanian adalah sumber air yang terbatas. Debit air dari bendungan terdekat yang sangat kecil dan sehingga tidak mencukupi untuk mengairi seluruh areal persawahan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Pun juga semakin sempitnya lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu dan gencarnya isu alih fungsi lahan yang terjadi.

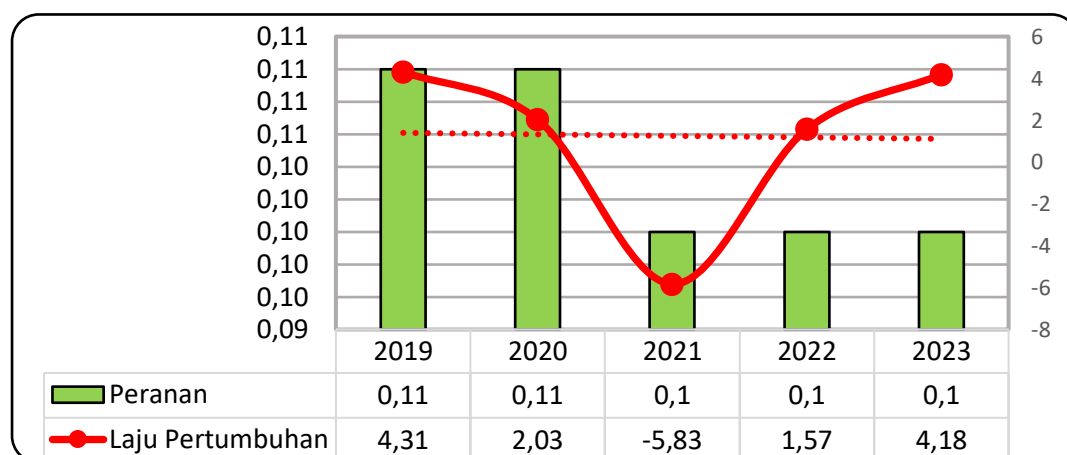
Selain permasalahan yang krusial, sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki produk unggulan yaitu produksi benih padi hasil dari kelompok penangkar binaan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. Saat ini Kabupaten Pringsewu memiliki sekitar 12 (dua belas) kelompok penangkar benih padi, yang telah memproduksi benih padi dan telah di pasarkan ke beberapa wilayah di Sumatera di luar Provinsi Lampung. Petani penangkar memberi nilai tambah (*value added*) komoditas padi, dari yang tadinya memproduksi padi untuk konsumsi menjadi memproduksi padi untuk benih. Produk unggulan lainnya yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah produksi bibit pisang hasil perbanyakan melalui kultur jaringan.

Laboratorium Kultur Jaringan yang ada di Kabupaten Pringsewu memproduksi bibit tanaman pertanian, khususnya bibit pisang. Bibit pisang yang dihasilkan oleh Laboratorium Kultur Jaringan telah dipasarkan ke beberapa wilayah di luar Kabupaten Pringsewu bahkan di luar Provinsi Lampung.

Secara umum artinya bahwa dengan kekurangan/kelemahan yang dimiliki Kabupaten Pringsewu yaitu keterbatasan lahan pertanian, akan tetapi tetap memiliki kekuatan dan peluang untuk mengembangkan komoditas unggulan bidang pertanian, yaitu dengan berperan secara aktif sebagai kabupaten penghasil benih/bibit tanaman pertanian yang unggul, berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi.

b) Pertambangan dan Penggalian

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, nilai tambah hanya berasal dari sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya yaitu sebesar 13,31 miliar rupiah pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 0,10% terhadap PDRB Pringsewu. Kontribusi ini merupakan yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2023, kategori pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 4,18%, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2021. Hal disebabkan oleh mulai meningkatnya penggunaan komoditi barang galian seperti pasir dan batu split dalam menunjang sektor konstruksi.

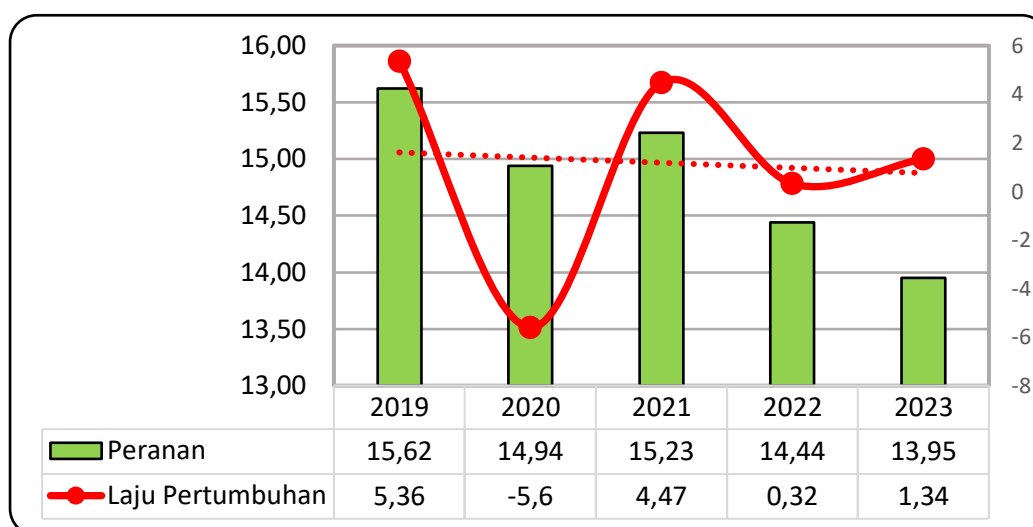


Gambar 2. 14 Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

c) Industri Pengolahan

Industri Pengolahan pada tahun 2023 memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor untuk PDRB Kabupaten Pringsewu. Pada kategori Industri Pengolahan, sub kategori yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman, berikutnya adalah Industri Barang Galian Bukan Logam dan Industri Karet. Secara keseluruhan, kategori Industri Pengolahan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,34%. Pertumbuhan ini berkembang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,32% karena adanya kenaikan harga bahan baku di pertengahan tahun yang berdampak pada produksi yang terganggu.



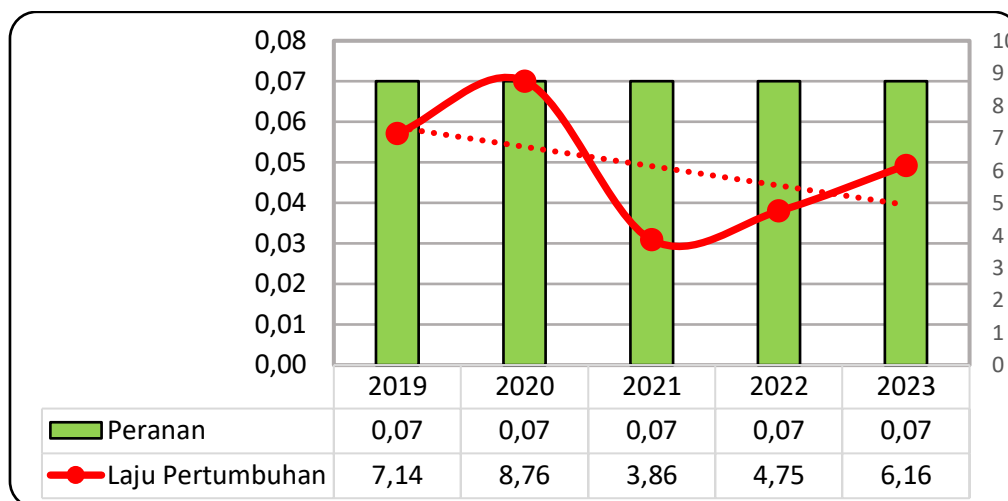
Gambar 2. 15 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

d) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,07% terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023. Dari kontribusi tersebut, seluruhnya disumbangkan oleh subkategori Ketenagalistrikan. Untuk laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2023 adalah sebesar 6,16%. Selama kurun waktu 5 tahun, terus laju pertumbuhan kategori Pengadaan Listrik dan Gas cenderung berfluktuatif namun cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir.

Hal ini terjadi karena penambahan pengguna ketenagalistrikan dan bertambahnya unit penunjang kelistrikan. Sedangkan untuk peranannya dalam PDRB selalu di bawah 1%.

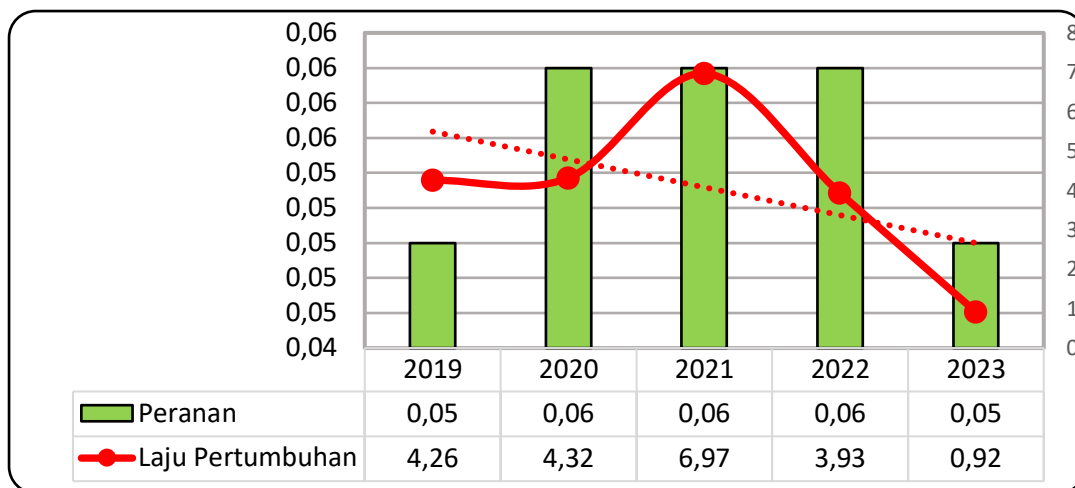


Gambar 2. 16 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak Termasuk Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini termasuk sangat kecil, hanya berkisar pada 0,05-0,06% selama kurun waktu 2019-2023. Laju pertumbuhan kategori ini sejak tahun 2019 sampai 2021 selalu meningkat, kemudian terjadi perlambatan hingga tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,92%.

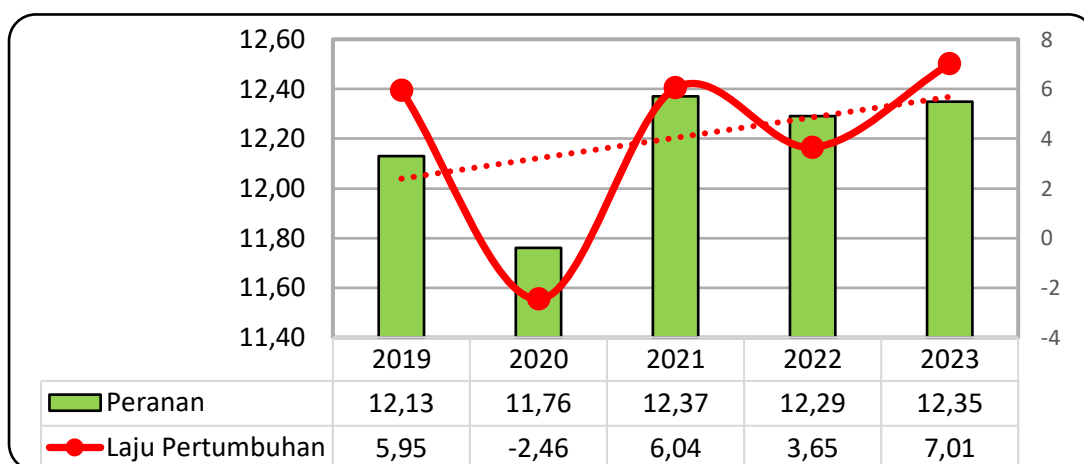


Gambar 2. 17 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

f) Konstruksi

Pada tahun 2023 kontribusi kategori konstruksi mencapai 1,73 triliun rupiah atau sebesar 12,35% terhadap total perekonomian Kabupaten Pringsewu. Tren pergerakan kontribusi kategori konstruksi terlihat cukup stabil, berada di sekitar 11-12%. Pada tahun 2022 pertumbuhan kategori konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 3,65% karena meningkatnya aktivitas konstruksi karena mulai pulihnya ekonomi masyarakat walaupun di awal tahun masih pandemi covid-19.

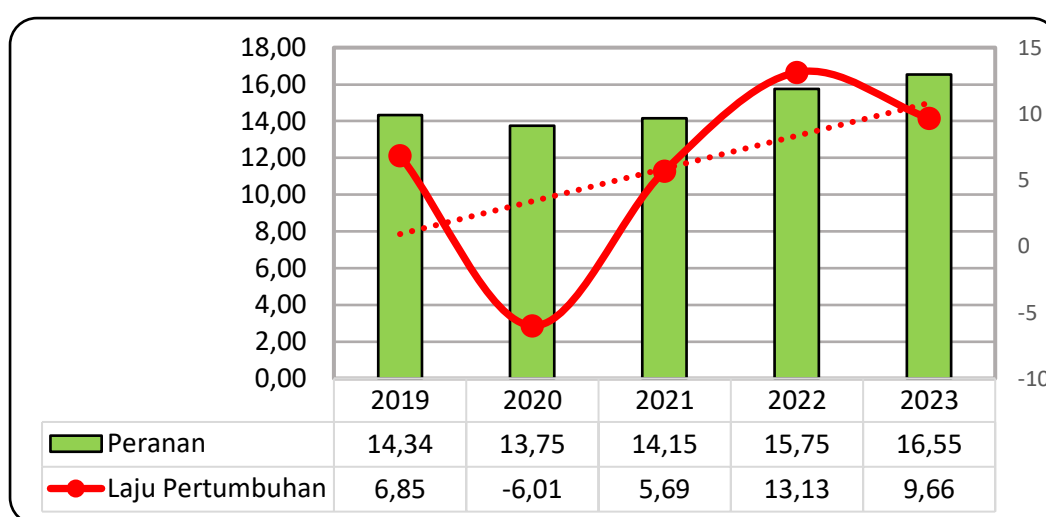


Gambar 2. 18 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Konstruksi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor menyumbang 2,31 triliun rupiah atau 16,55% dari total PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023. Jika dilihat dari pertumbuhannya, sebelum tahun 2020 kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu mengalami peningkatan. Hingga akhirnya covid-19 melanda, terjadilah kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -6,01%. Namun kondisi di 2023 sudah stabil sehingga kategori ini mampu tumbuh sebesar 9,66%.



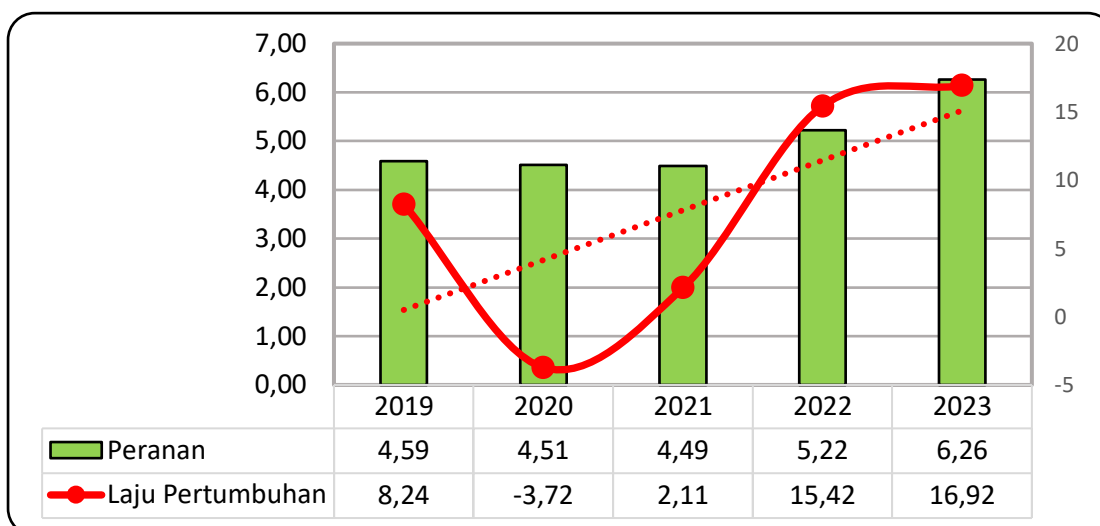
Gambar 2. 19 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

h) Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan peranan terhadap total PDRB sebesar 877,49 miliar rupiah atau mencapai 6,26%. Penyumbang utama pada kategori ini adalah angkutan darat, sedangkan pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir hanya memberikan kontribusi yang kecil walaupun sudah mulai meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Pringsewu mengalami pertumbuhan sebesar 16,92% pada tahun 2023.

Hal ini disebabkan oleh penggunaan berbagai alat transportasi yang sudah meningkat signifikan mengingat kondisi yang sudah normal dan tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat.



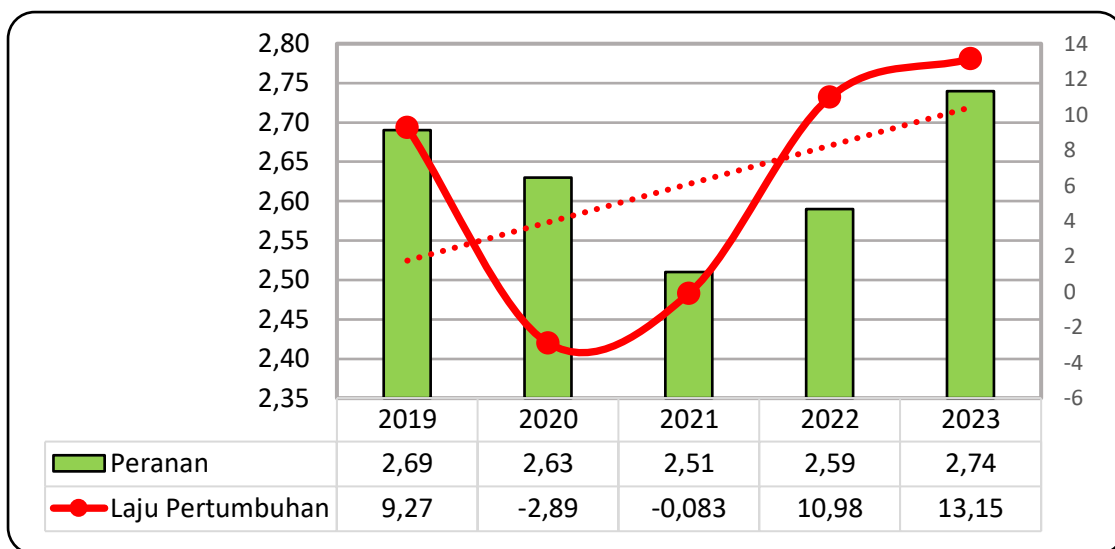
Gambar 2. 20 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2023, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu sebesar 384,53 miliar rupiah atau sebesar 2,74%, dimana sebagian besar kontribusinya berasal dari sub kategori Penyediaan Makan Minum. Besarnya peranan subkategori penyediaan makan minum sangat berhubungan dengan kategori industri makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, dan juga jasa hiburan.

Pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 13,15%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kembali ramainya tempat makan baik yang permanen seperti restoran dan rumah makan, maupun wisata kuliner jalanan yang sudah aktif kembali setiap minggu, bahkan pengunjungnya semakin meningkat. Begitu pula aktivitas hotel, penginapan dan kosan yang kembali naik tingkat penghunian kamarnya.

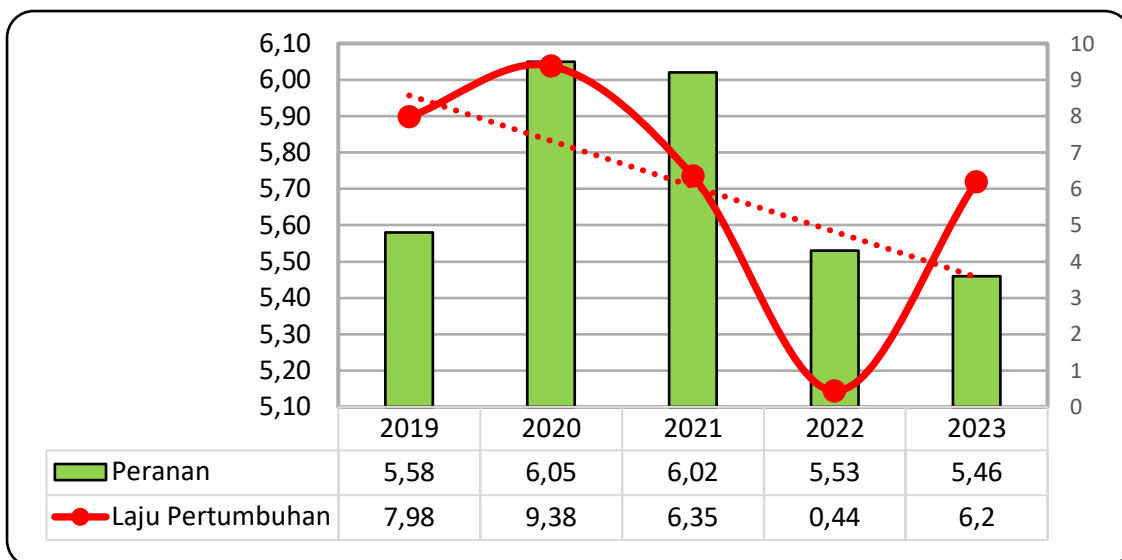


Gambar 2. 21 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

j) Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori Informasi dan Telekomunikasi terhadap perekonomian di Kabupaten Pringsewu selama tahun 2023 sebesar 764,54 miliar rupiah atau sekitar 5,46%. Bila ditinjau dari laju pertumbuhannya, kategori ini menunjukkan kenaikan, yaitu sebesar 5,76% pada tahun 2022 menjadi 6,2%. Hal ini terjadi karena menurunnya penggunaan akses internet sebagai dampak berkurangnya sistem pembelajaran jarak jauh dan pertemuan daring.



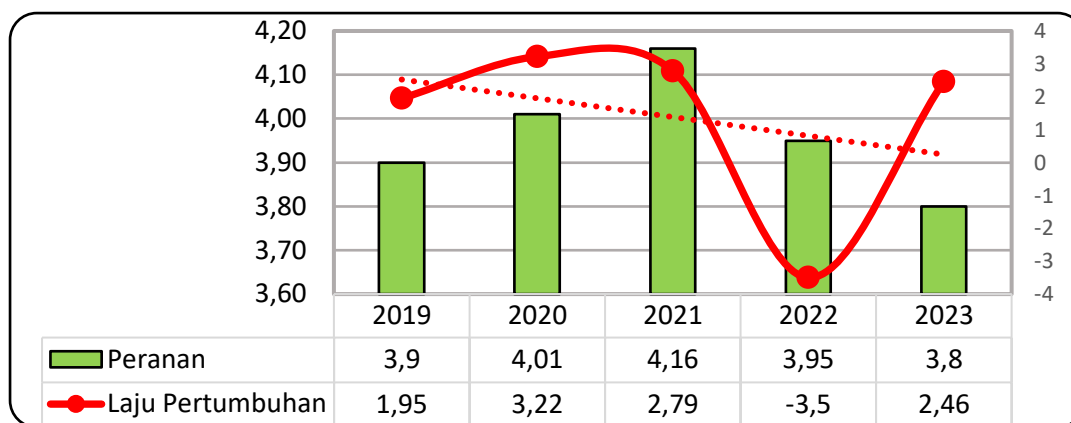
Gambar 2. 22 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

k) Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa keuangan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, bentuk umum dari lembaga keuangan adalah perbankan, koperasi, asuransi, pegadaian, dan lainnya. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyedia alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Pada tahun 2023, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu sebesar 531,94 milliar rupiah atau sebesar 3,80%. Berdasarkan laju pertumbuhannya, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami kontraksi sebesar -3,50% pada tahun 2022. Kontraksi ini disebabkan berkurangnya pendapatan sekunder bank umum dan penurunan pendapatan jasa keuangan lainnya. Namun kembali naik pada tahun 2023 sebesar 2,46%.



Gambar 2. 23 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Pringsewu (Persen) 2019-2023

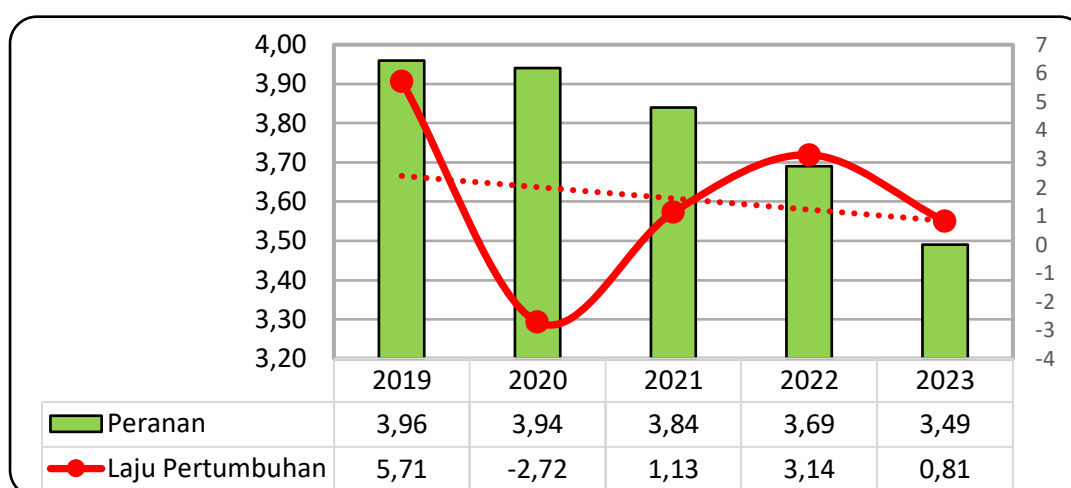
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

1) Real Estate

Seiring dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah, industri properti pada umumnya juga mengalami peningkatan yang searah. Menurunnya aktivitas pada industri properti dapat dijadikan acuan mulai membaiknya kembali kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan di bidang properti dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung. Industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena menurunnya kegiatan di bidang properti akan mendorong turunnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lain yang terkait. Dalam hal ini sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (*multiplier effect*) yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain.

Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan yang memberikan jasa keuangan juga masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau perdagangan maupun perkebunan/pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan demikian, kebutuhan akan produk properti akan terus menurun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah.

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Pringsewu dengan peranan sekitar tiga persen selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai sebesar 489,22 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cenderung berfluktuasi. Tahun 2022 pertumbuhannya mengalami pertumbuhan sebesar 3,14%. Hal ini terjadi karena mulai pulihnya minat masyarakat untuk membeli atau menyewa properti perumahan dan bangunan lain untuk tempat tinggal maupun untuk usaha. Namun pada tahun 2023 pertumbuhannya kembali turun hingga mencapai 0,81%.

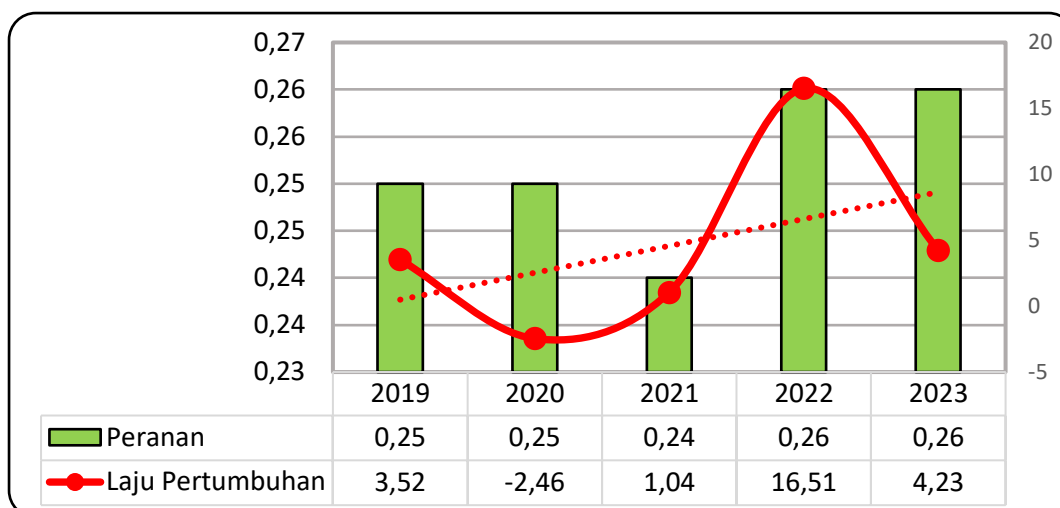


Gambar 2. 24 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Real Estate Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

m) Jasa Perusahaan

Kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan sebesar 36,23 miliar rupiah atau hanya sebesar 0,26% pada tahun 2023, cenderung stabil dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Pringsewu. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami pertumbuhan sebesar 4,23% pada tahun 2023.

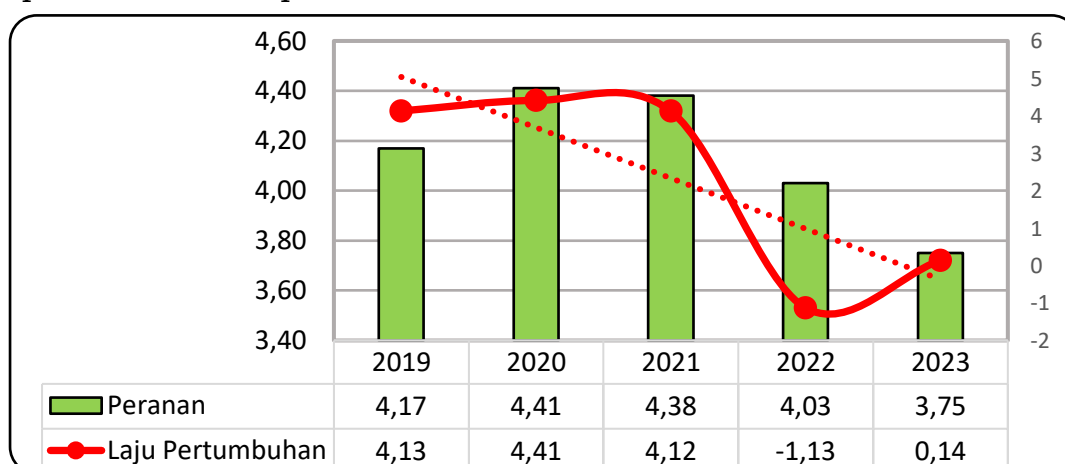


Gambar 2. 25 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

o) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Peranan kategori ini relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 525,05 miliar rupiah atau sebesar 3,75% pada tahun 2023. Kategori ini mengalami kontraksi pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,13%. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja pegawai baik pada APBD maupun APBN.

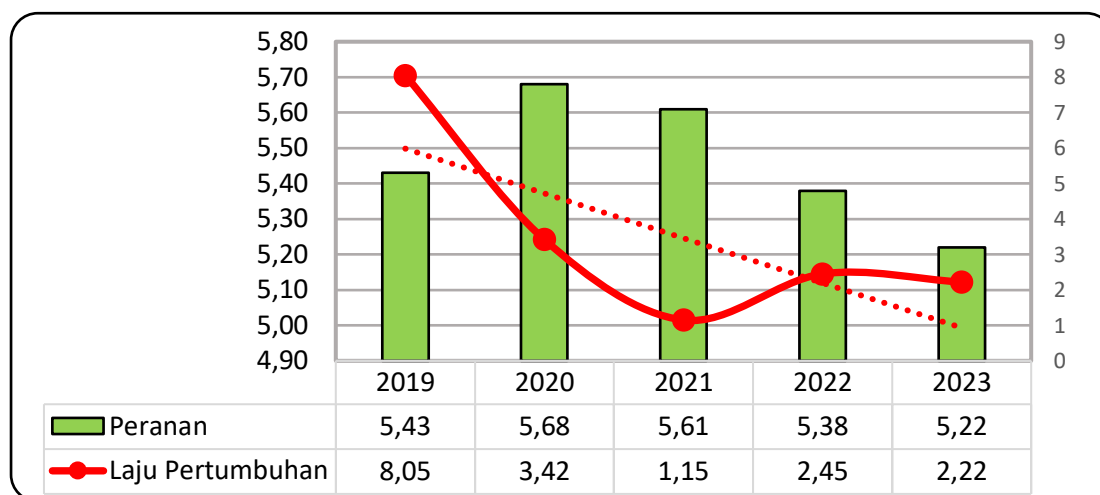


Gambar 2. 26 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

p) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2023 jasa pendidikan menyumbang sebesar 730,77 miliar rupiah atau sebesar 5,22% terhadap total perekonomian Kabupaten Pringsewu. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan dari 1,15% pada tahun 2020 menjadi 2,45% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan jadwal sekolah dan kampus yang sudah masuk tatap muka hampir seratus persen sehingga pendapatan sudah semakin meningkat.

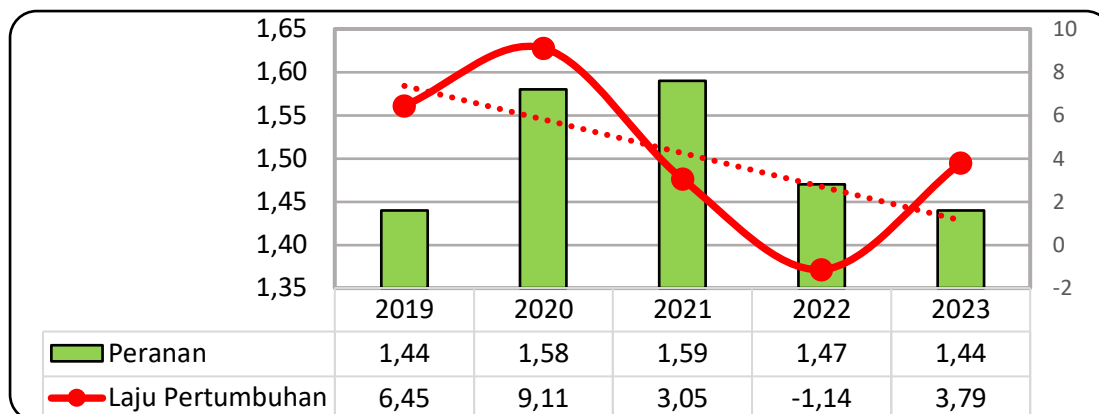


Gambar 2. 27 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa kesehatan sebesar 201,80 miliar rupiah atau sebesar 1,44% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Pringsewu. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami kontraksi yaitu dari sebesar -1,14%. Tahun 2022 pandemi covid-19 mulai pulih, sehingga sudah banyak aturan pemerintah yang mulai longgar terutama dalam hal aturan perjalanan dimana tidak semua orang yang melakukan perjalanan membutuhkan rapid test ataupun PCR. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan di lapangan usaha kesehatan.

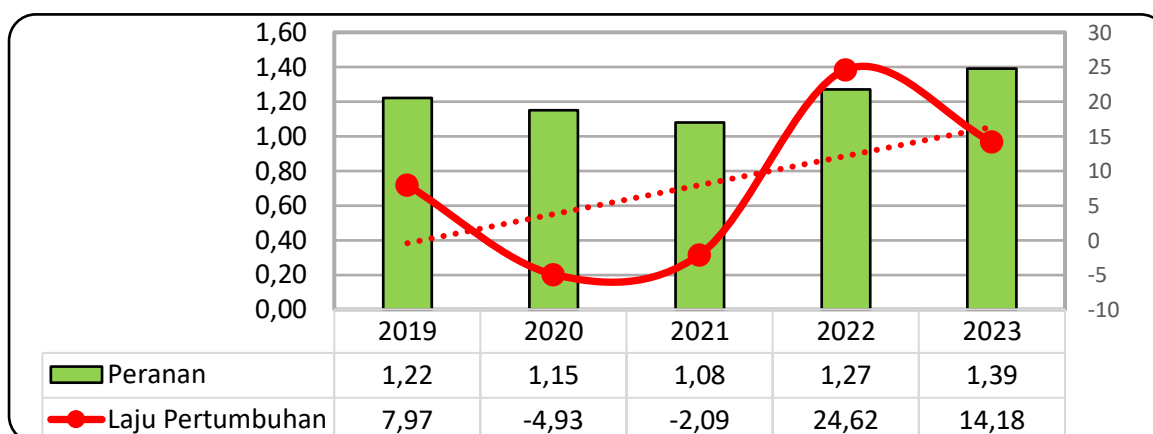


Gambar 2. 28 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

r) Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Pringsewu relatif kecil yaitu 194,58 miliar rupiah atau sebesar 1,39%, dimana peranan ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 24,62% pada tahun 2022. Hal ini karena tempat hiburan dan rekreasi yang mulai kembali ramai setelah dua tahun mengalami pembatasan akibat pandemi covid-19. Fasilitas jasa perorangan seperti salon, klinik kecantikan juga mengalami peningkatan pelanggan kembali. Selain itu banyak bermunculan jasa perorangan baru setelah pandemi berakhir.



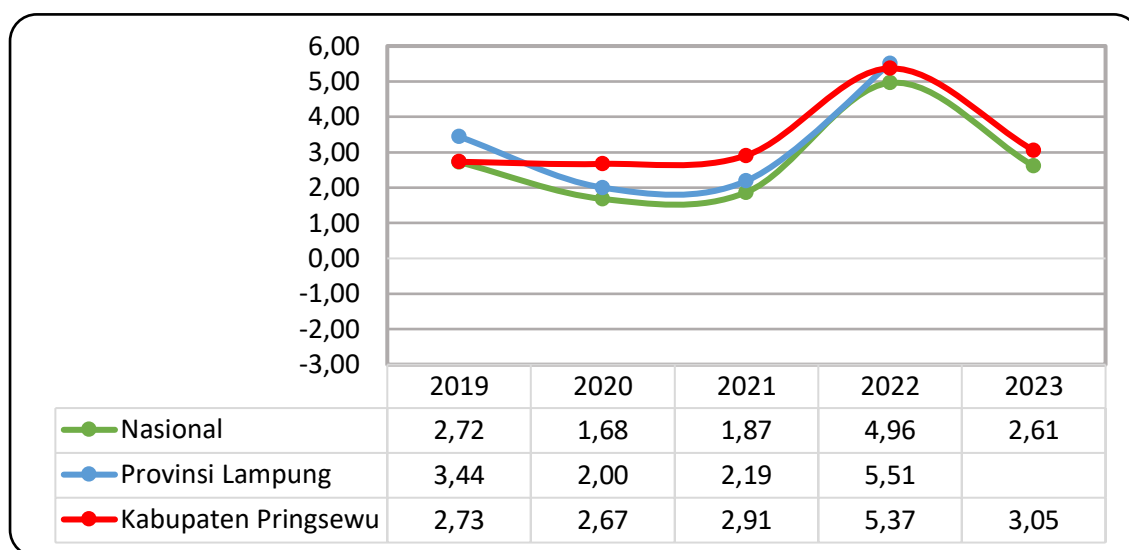
Gambar 2. 29 Grafik Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Pun juga inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Sepanjang periode 2019-2023 inflasi umum tahunan Kabupaten Pringsewu berada kisaran 2,73–5,37. Sementara Provinsi Lampung pada kisaran 2,00–5,51. Hal ini mendefinisikan bahwa inflasi Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Inflasi tertinggi Kabupaten Pringsewu terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 5,51% dan terendah pada tahun 2020 yang mencapai 2,67%. Selama 3 tahun terakhir, inflasi tahunan Kabupaten Pringsewu berada di atas angka inflasi nasional. Laju inflasi di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 30 Grafik Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Pusat, 2024

2.1.3.2 Kesejahteraan Sosial

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan sering diukur dalam bentuk persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bisa menjadi persentase populasi secara keseluruhan atau dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, lansia, atau kelompok penduduk lainnya. Kabupaten Pringsewu berdasarkan 2020-2023 diketahui angka kemiskinan mengalami fluktuasi. Penjabaran lebih detail terkait angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut.

Tabel 2.13 Angka Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2023

Indikator Kemiskinan	Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu			
	2020	2021	2022	2023
Angka Kemiskinan (P0)	9,97	10,11	9,34	9,14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,20	1,38	1,07	0,99
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,26	0,19	0,19
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	40,12	41,04	38,18	37,60
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	458.627	475.983	511.679	555.787

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2024

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu selama 4 tahun terakhir diketahui terjadi peningkatan dan penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan dibandingkan 4 tahun lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan yang cukup baik di angka 9,14 dibandingkan pada tahun 2020 yang berada pada angka 9,97. Jumlah penduduk miskin juga sudah berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020, yang mana kini berjumlah 37.600 jiwa.

Kabupaten Pringsewu telah memberikan bantuan kepada warga yang tergolong penduduk miskin. Pada tahun 2024, wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang mendapat bantuan terbanyak yaitu kecamatan Pardasuka sebanyak 263 kepala keluarga. Secara umum telah diberikan bantuan Bantuan Non Tunai Pangan (BNPT), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Prakerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Benih bantuan bibit ikan.

B. Pemerataan Ekonomi

a. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB perkapita tercatat 27,88 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 32,04 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

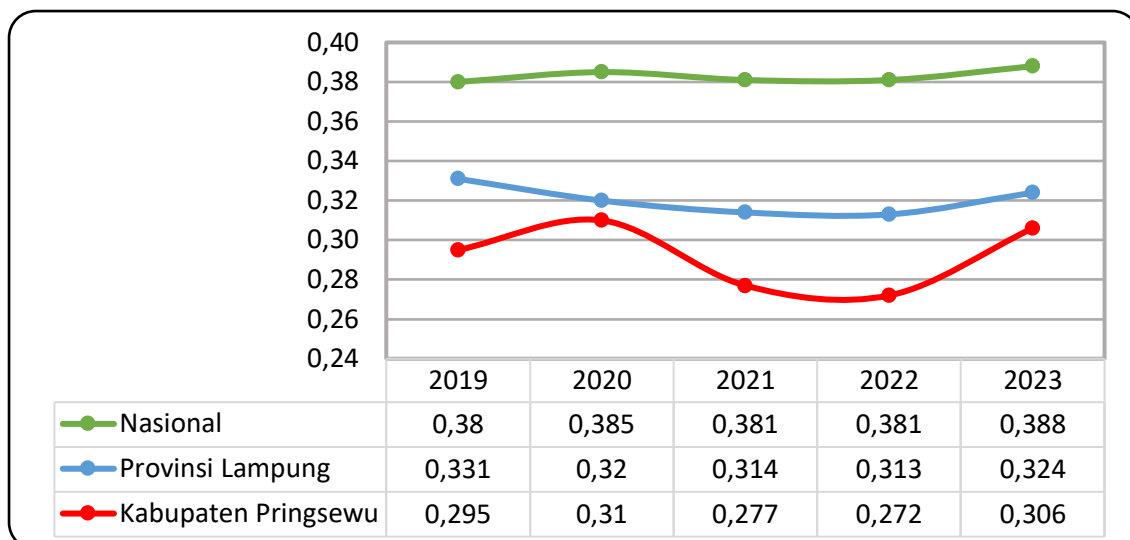
Tabel 2.14 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pringsewu 2019-2023

Indikator Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pringsewu (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	11.156.953,24	11.176.953,62	11.659.049,85	12.842.103,86	14.010.045,58
Pendapatan Perkapita (PDRB/Jumlah Penduduk) per orang per Tahun (Dalam Juta Rupiah)	27,88	27,57	28,66	31,44	32,04

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Selama tahun 2019-2023 angka Indeks Gini di Kabupaten Pringsewu mengalami fluktuasi yang berarti bahwa pada kurun waktu tersebut pendapatan penduduk di Kabupaten Pringsewu pada kurun waktu tersebut belum merata antar kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :



Gambar 2. 31 Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2024

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kabupaten Pringsewu masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2023 lebih tinggi, menunjukkan indeks gini yang meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan potensial di Kabupaten Pringsewu.

C. Pembangunan Manusia

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

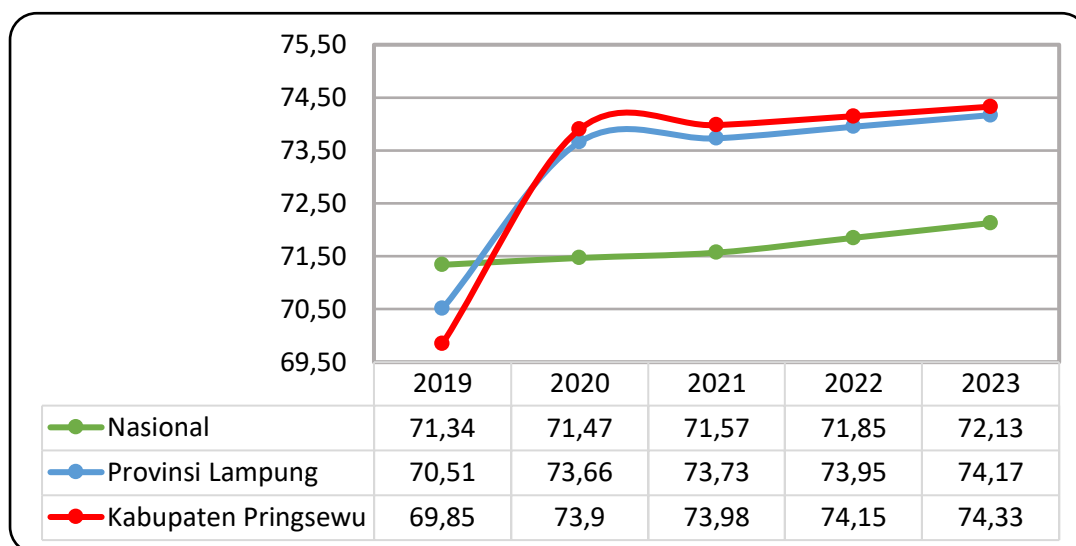
Pembangunan manusia merupakan konsep yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia mengandung beberapa komponen seperti produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);

2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan
3. IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Pringsewu tahun 2019 sebesar 69,85, tahun 2020 sebesar 70,08, tahun 2021 sebesar 70,45, tahun 2022 sebesar 70,65 dan tahun 2023 sebesar 74,33. Angka harapan hidup saat lahir tersebut, berada di bawah provinsi dan nasional. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Pringsewu dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dapat diketahui dari tabel dan gambar di bawah ini.

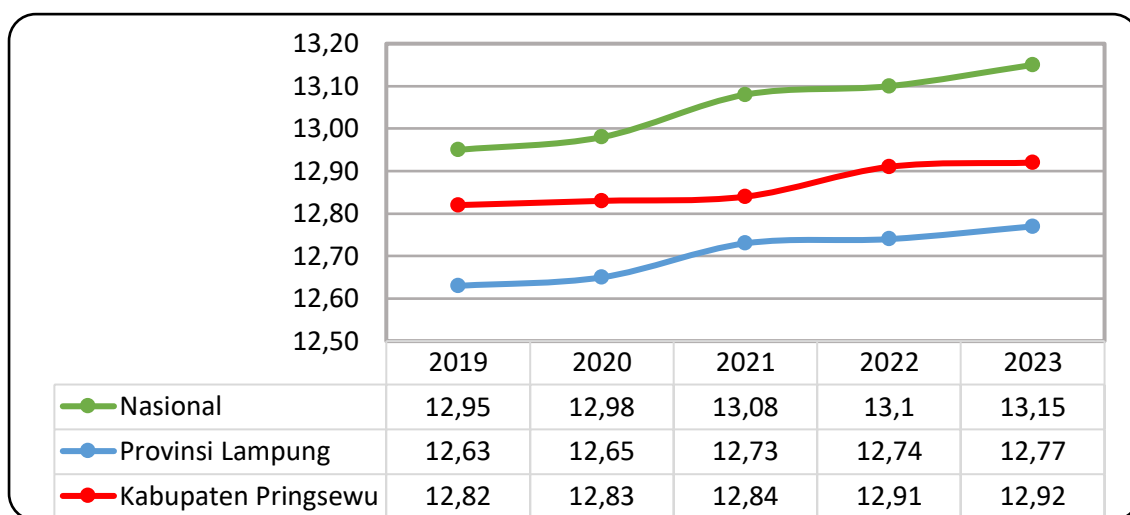


Gambar 2. 32 Grafik Perbandingan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Data angka harapan lama sekolah dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Posisi angka harapan lama sekolah Kabupaten Pringsewu berada diatas Provinsi Lampung, namun dibawah Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan, telah mampu menunjukkan hasilnya dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang saat ini telah mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan di atas 20%. Adapun perbandingan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Pringsewu dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dapat diketahui dari tabel dan gambar di bawah ini.



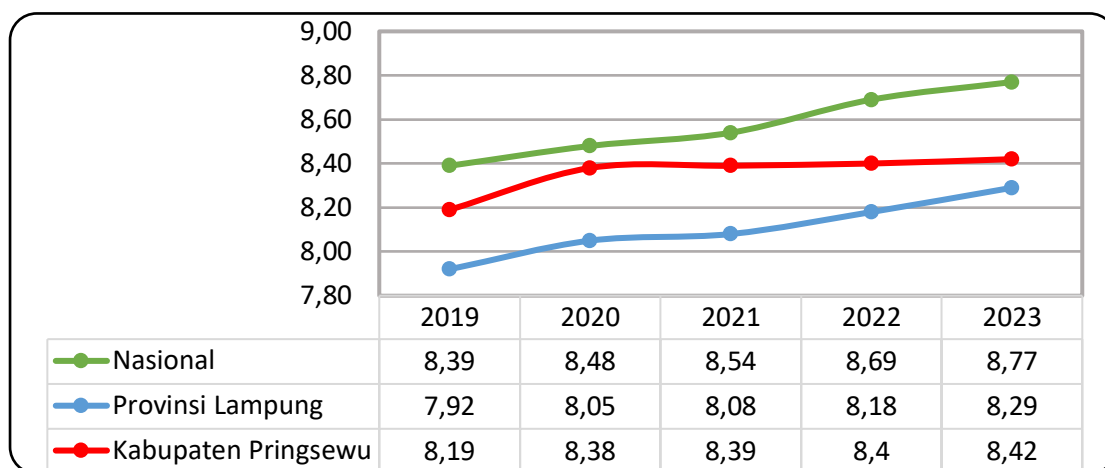
Gambar 2. 33 Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Sedangkan untuk indikator kedua dimensi pengetahuan pada IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah.

Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Data rata-rata lama sekolah berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif atau tahun standar yang harus dijalani untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut dan sesuai data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu, disatu sisi cenderung naik pada setiap tahunnya. Namun disisi lain seluruh daerah juga akan senantiasa untuk memperbaiki kondisinya masing-masing. Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu selalu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dari tingkat Nasional. Adapun perbandingan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan nasional, dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

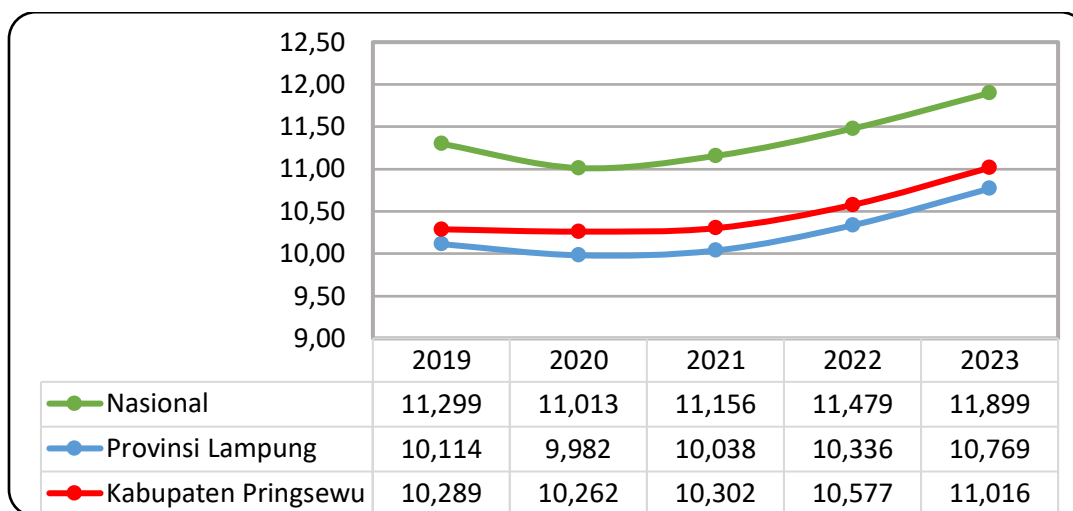


Gambar 2.34 Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Untuk pengeluaran per kapita penduduk kabupaten pringsewu selama lima tahun terakhir juga cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat untuk membiayai kehidupannya cenderung terjaga. Posisi angka pengeluaran per kapita masyarakat

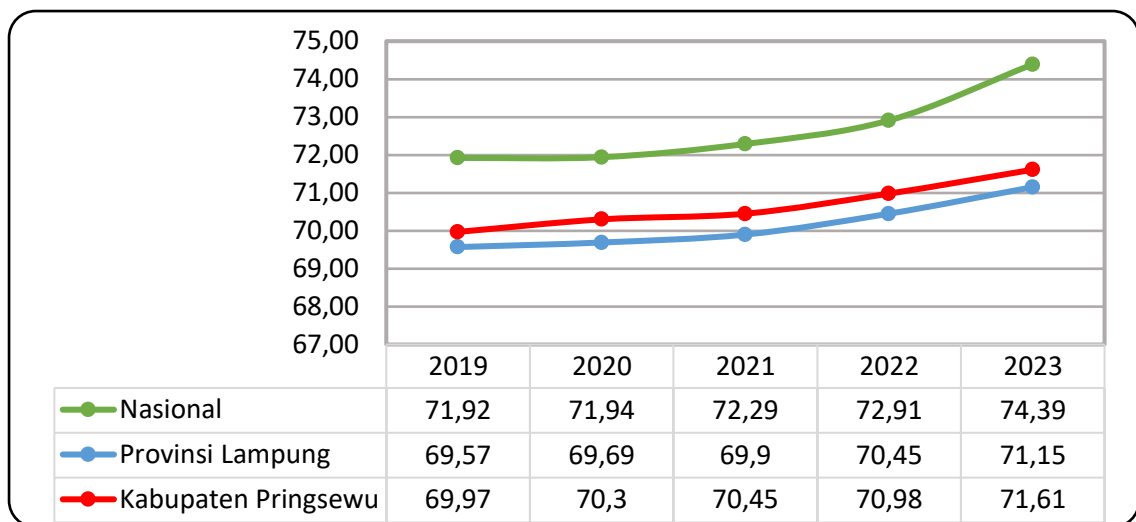
Kabupaten Pringsewu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Adapun perbandingan pengeluaran per kapita masyarakat Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan nasional, dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.



Gambar 2.35 Grafik Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung, namun relatif rendah jika dibandingkan IPM Nasional. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Pada tahun 2023 angka IPM Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 71,61 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 70,98. Angka IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan ketiga setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.



Gambar 2. 36 Grafik Perbandingan Angka IPM Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BAPPENAS, 2024

Tabel 2.15 Angka IPM Kabupaten/kota se Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	77,33	77,44	77,58	78,01	78,56
Metro	76,77	77,19	77,49	77,89	78,36
Pringsewu	69,97	70,30	70,45	70,98	71,61
Lampung Tengah	70,04	70,16	70,23	70,80	71,60
Lampung Timur	69,34	69,37	69,66	70,58	71,21
Tulang Bawang	68,23	68,52	68,73	69,53	70,02
Lampung Selatan	68,22	68,36	68,49	69,00	69,63
Lampung Barat	67,50	67,80	67,90	68,39	69,11
Lampung Utara	67,63	67,67	67,89	68,33	68,95
Way Kanan	67,19	67,44	67,57	68,04	68,63

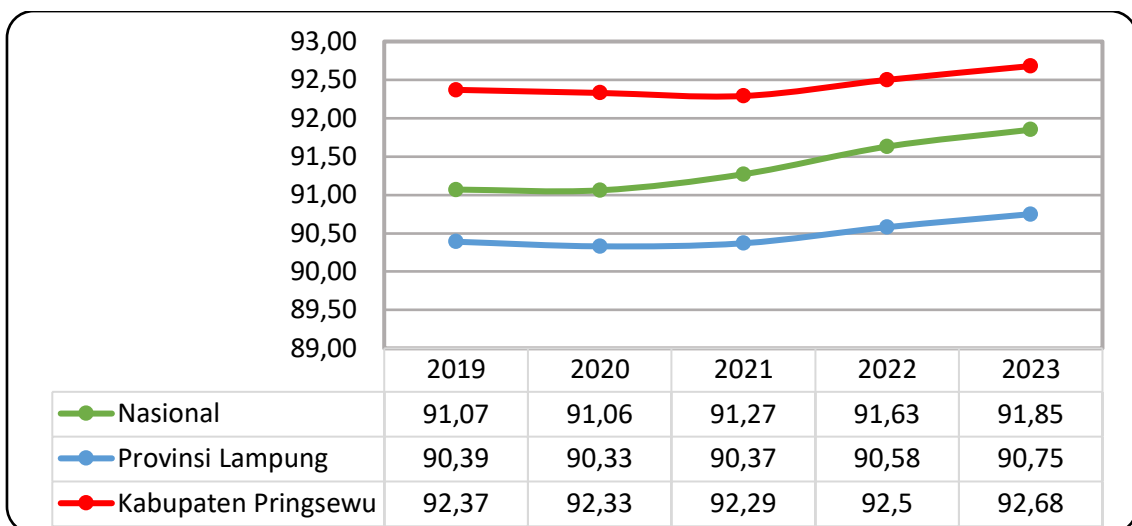
Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	66,37	66,42	66,65	67,22	67,86
Tulang Bawang Barat	65,93	65,97	66,22	67,13	67,81
Pesawaran	65,75	65,79	66,14	66,70	67,67
Pesisir Barat	63,79	63,91	64,30	65,14	66,00
Mesuji	63,52	63,63	64,04	64,94	65,64
Provinsi Lampung	69,57	69,69	69,90	70,45	71,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Peningkatan angka IPM Kabupaten Pringsewu ternyata juga diikuti dengan kenaikan dari masing-masing komponennya. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil Per Kapita setiap tahun selalu mengalami peningkatan takterkecuali Angka Harapan Hidup (AHH) yang tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini sebagai hasil dari program pembangunan manusia yang telah dilaksanakan, seperti pendidikan dan perekonomian. Terkait Angka Harapan Hidup di sektor kesehatan yang mengalami kenaikan, sebagian besar adalah dampak dari berakhirnya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia pada tahun 2021 yang lalu.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Pringsewu dengan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2. 37 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pringsewu, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Metro	95,02	95,55	95,89	95,90	95,99
Kota Bandar Lampung	93,96	93,86	93,93	94,02	94,14
Pesisir Barat	93,22	93,21	93,51	93,95	94,14
Lampung Barat	92,55	92,95	93,00	93,40	93,47
Pringsewu	92,37	92,33	92,29	92,50	92,68
Tanggamus	90,88	91,13	90,98	91,10	91,27
Tulang Bawang	89,17	89,31	89,56	90,18	90,26
Lampung Tengah	89,88	89,87	89,94	90,11	90,02

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Selatan	89,54	89,60	89,61	89,78	89,96
Lampung Utara	89,48	89,46	89,58	89,74	89,79
Lampung Timur	88,78	88,83	88,78	89,22	89,60
Tulang Bawang Barat	88,45	88,56	88,96	89,04	89,01
Way Kanan	88,22	88,19	88,32	88,50	88,64
Pesawaran	87,30	87,20	87,22	87,77	88,04
Mesuji	84,22	84,17	84,37	84,47	84,63
Provinsi Lampung	90,39	90,33	90,37	90,58	90,75
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2024

D. Pelayanan Publik

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status ini, maka akan menghasilkan kinerja sasaran dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian WTP Tahun 2023, merupakan capaian kesembilan secara beruntun.

Pencapaian ini telah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2022 yaitu opini WTP dan awal tahun RPD yaitu tahun 2023. Realisasi ini pun merupakan capaian bagus yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023. Dengan adanya komitmen Penjabat Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Pringsewu, diperkuat pula dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan reguler terhadap objek pemeriksaan. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2023, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Predikat SAKIP

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam Prioritas 4, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi pemerintah bukan hanya dalam penyelesaian urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 66,77 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu juga menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki Nilai Akuntabilitas tertinggi.

Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2020 sedang berada pada jalur *uptrend*-nya yang ditunjukkan oleh meningkatnya Nilai SAKIP secara gradual berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian nilai secara berurutan sebesar 63,27; 65,23; 66,35 dan 66,77. Hal positif ini akan terus didorong untuk lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.17 Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP				Predikat
		2020	2021	2022	2023	
1.	Lampung Barat	67,15	67,97	68,65	66,41	B
2.	Metro	66,97	67,90	68,04	68,48	B
3.	Pringsewu	63,27	65,23	66,35	66,77	B
4.	Lampung Selatan	63,03	63,98	65,80	66,43	B
5.	Lampung Tengah	63,52	64,35	65,28	65,98	B
6.	Tanggamus	63,61	64,25	64,69	64,99	B
7.	Pesawaran	60,04	61,25	62,08	63,38	B
8.	Tulang Bawang	60,47	61,71	61,88	62,46	B
9.	Tulang Bawang Barat	58,64	59,01	60,08	60,67	B
10.	Way Kanan	57,64	58,62	60,06	60,52	B
11.	Lampung Timur	57,00	58,02	58,33	57,80	CC
12.	Bandar Lampung	57,09	58,71	57,59	57,49	CC
13.	Mesuji	56,96	57,22	57,60	60,51	B
14.	Pesisir Barat	51,10	52,04	52,83	53,35	CC
15.	Lampung Utara	45,73	50,04	52,00	53,53	CC

Sumber: LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

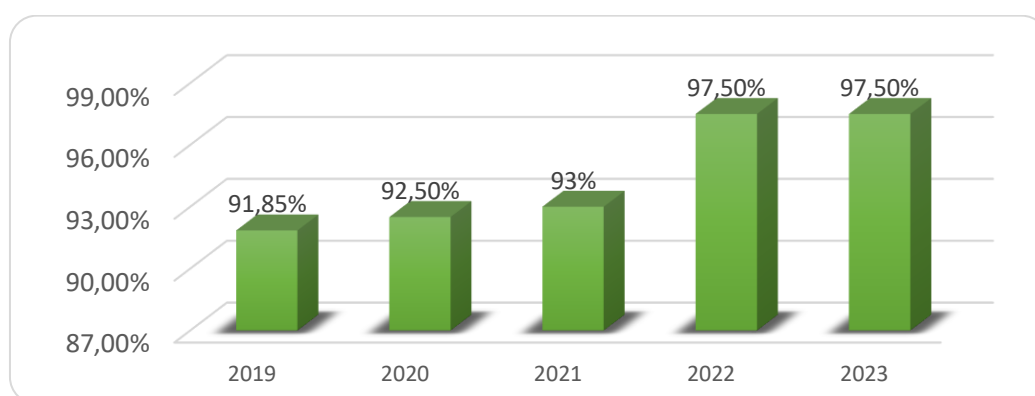
2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Rasio murid PAUD merupakan perbandingan antara jumlah murid PAUD dengan jumlah anak usia 4-6 tahun. Rasio murid PAUD dengan jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren positif yang ditandai dengan kenaikan rasio dimana pada tahun 2019 sebesar 91,85 persen kemudian terus bertambah dan pada tahun 2023 mencapai 97,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia 4-6 tahun memperoleh atau mengenyam pendidikan anak usia dini. Adapun secara rinci rasio murid PAUD dengan jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 38 Grafik Rasio Murid PAUD dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

Selain PAUD, terdapat banyak wadah pendidikan anak usia dini baik secara formal maupun non formal. Sejak tahun 1990-an dunia pendidikan mulai terbuka akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang paling awal yang diselenggarakan sejak anak dilahirkan hingga memasuki pendidikan dasar. Taman Kanak-kanak yang baik diyakini dapat melejitkan perkembangan anak di masa emas perkembangannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, “Pendidikan di Taman Kanak-kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Hal ini menjadikan TK dan RA turut serta sebagai wadah untuk membina anak usia dini dalam jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kabupaten Pringsewu. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah siswa TK/RA di Kabupaten Pringsewu cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2022 meningkat. Jumlahnya menurun pada tahun 2019 dan 2021. Namun di tahun 2022 mulai kembali menunjukkan tren positif, semula 5.979 siswa menjadi 6.831 siswa. Adapun secara rinci jumlah siswa TK/RA di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18 Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

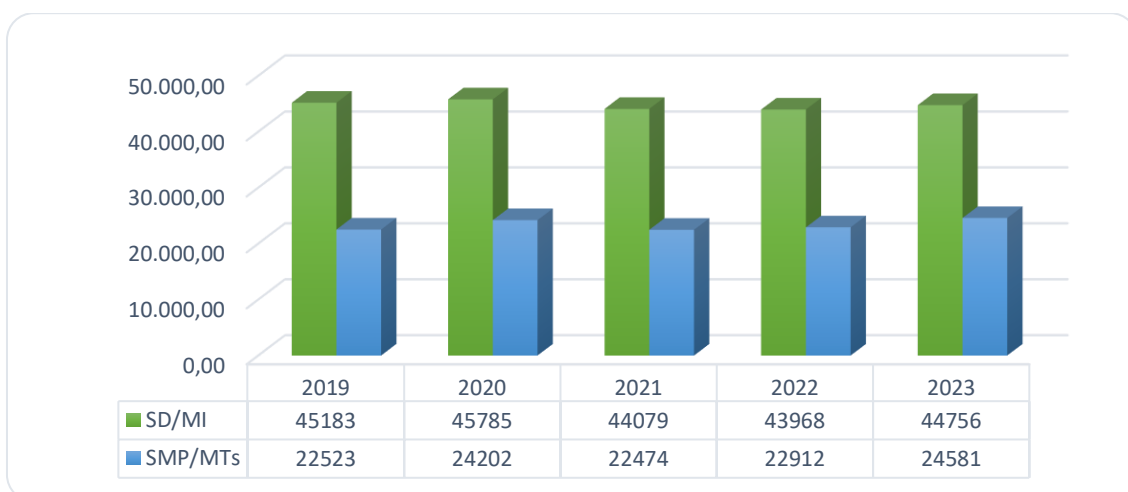
Kecamatan	Jumlah Siswa TK/RA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kec. Pringsewu	1.499	1.652	1.241	1.480	54
Kec. Gadingrejo	1.242	1262	856	1050	48

Kecamatan	Jumlah Siswa TK/RA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kec. Pagelaran	789	1049	842	660	27
Kec. Ambarawa	558	574	725	1021	20
Kec. Sukoharjo	724	771	947	1036	29
Kec. Pardasuka	551	560	349	431	24
Kec. Adiluwih	900	1044	483	529	22
Kec. Banyumas	346	271	363	458	18
Kec. Pagelaran Utara	271	303	173	166	15
Kabupaten Pringsewu	6.878	7.486	5.979	6.831	257

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2024

b) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan pada jenjang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada penduduk dalam rentang usia tersebut memasuki jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Untuk jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi. Adapun jumlah siswa pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 39 Grafik Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

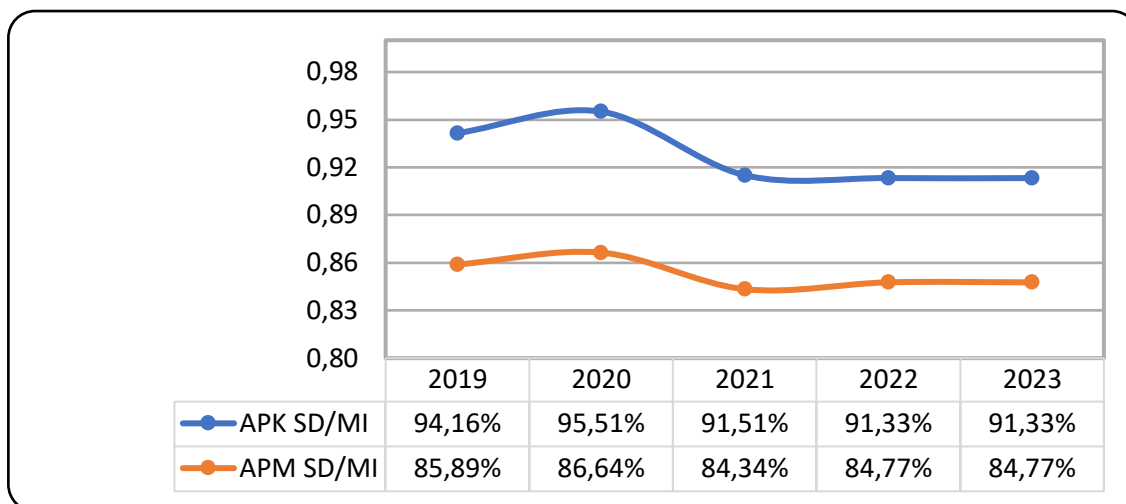
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

c) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

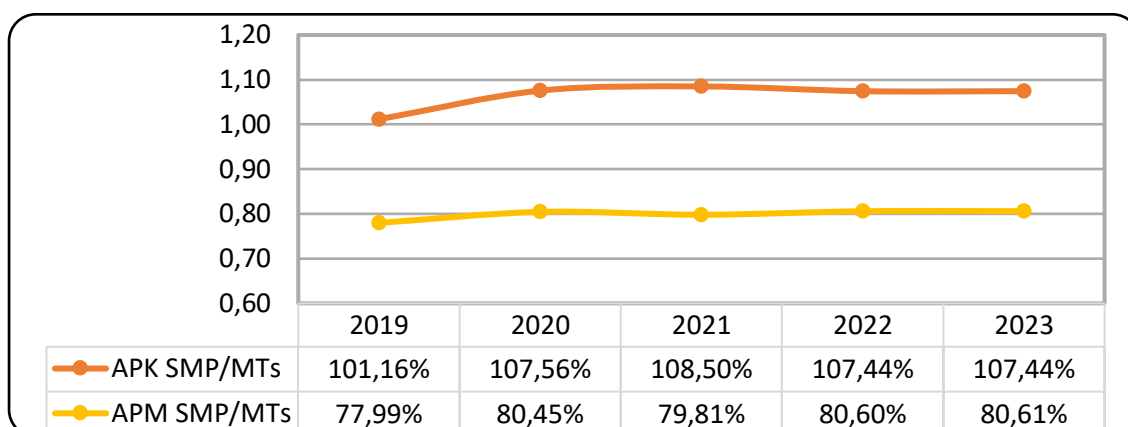
Pencapaian nilai APK diatas 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Sedangkan untuk APM SD yaitu jumlah murid SD usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan SMP adalah jumlah murid SMP usia 13-15 tahun. Apabila semua anak sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan usianya, maka nilai APM nya akan mencapai 100 persen. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Adapun APK dan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 40 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2024



Gambar 2. 41 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2024

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

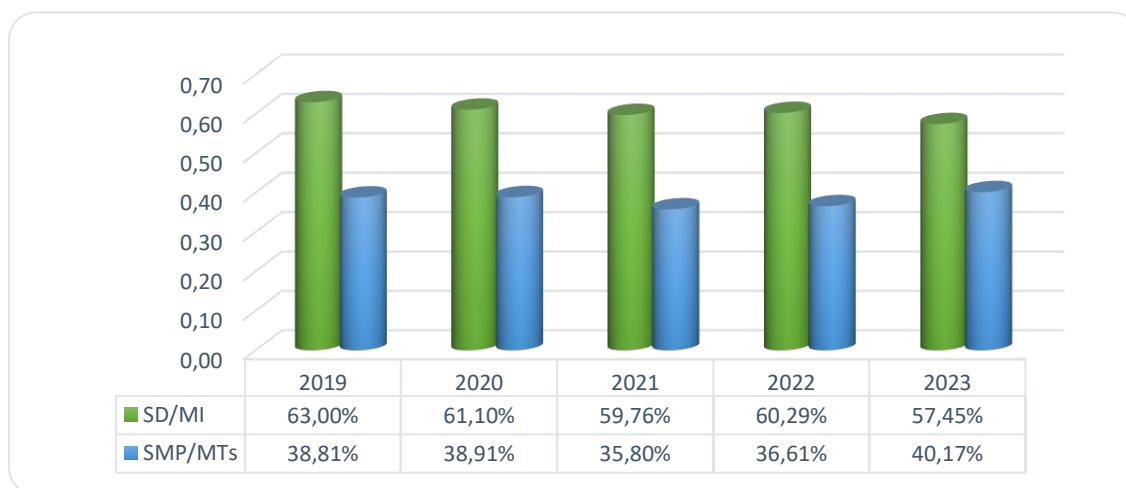
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung turun namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 307 sekolah dan di tahun 2021 sebanyak 297

sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung fluktuatif hingga tahun 2023 sebanyak 95 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.19 Jumlah SD/MI, SMP/MTs, Penduduk Usia 7-12 Tahun, dan Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SD/MI	307	300	297	297	302
Jumlah SMP/MTs	89	91	83	87	95
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	48.731	49.098	49.697	49.262	49.007
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	22.932	23.385	23.184	23.764	22.879

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

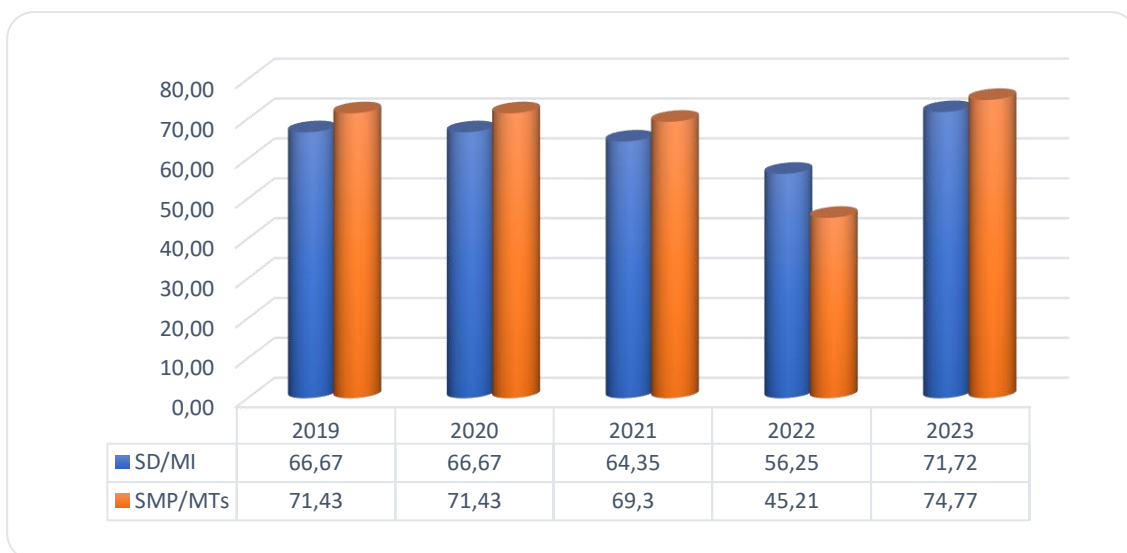


Gambar 2. 42 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang optimal. Rasio guru dan murid juga perlu di dukung oleh pemerataan.

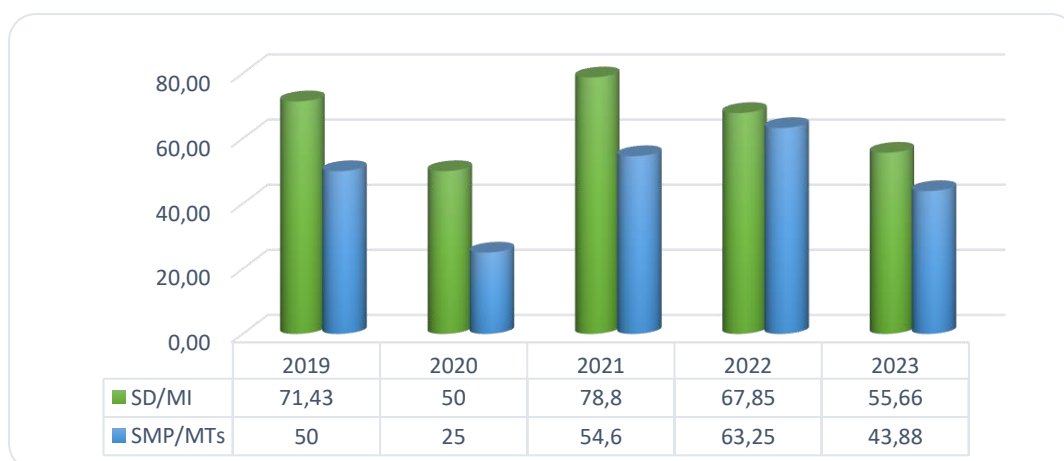


Gambar 2. 43 Grafik Rasio Guru Terhadap Murid per 10.000 Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru yang tersedia per kelas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

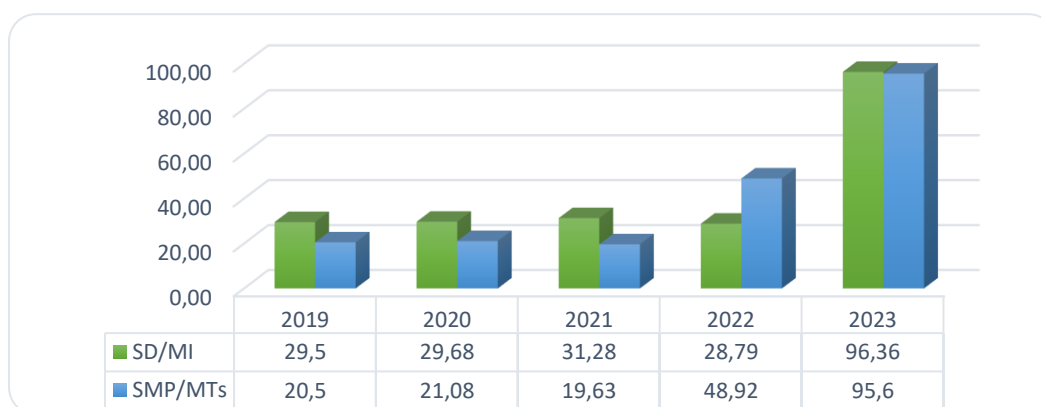


Gambar 2. 44 Grafik Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi ruang kelas yang rusak atau kurang memadai dapat berdampak pada kurang konsentrasinya murid dalam menerima bahan pelajaran. Kondisi ruang kelas dalam keadaan baik merupakan proporsi kondisi kelas yang baik, dalam jenjang pendidikan tertentu, terhadap jumlah ruang kelas seluruh sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.



Gambar 2.45 Grafik Kondisi Ruang Kelas dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

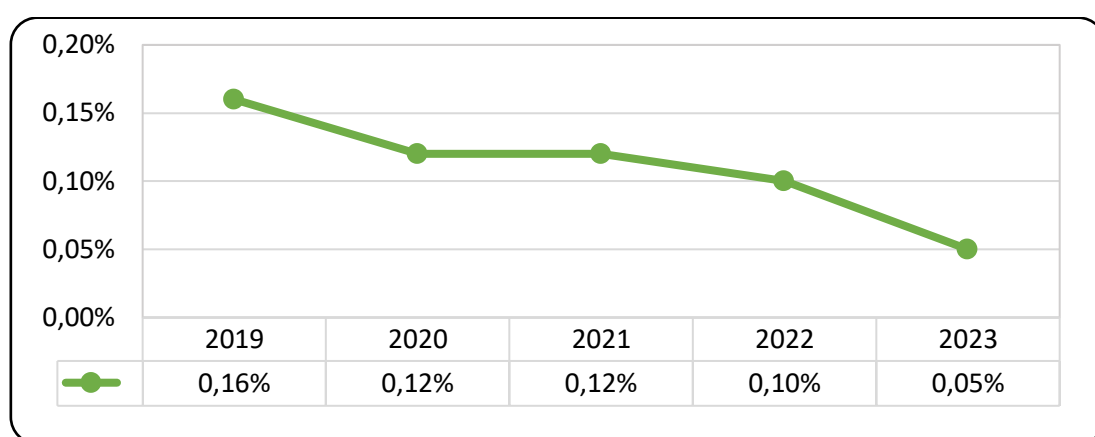
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Angka Putus Sekolah

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan dan faktor anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pendidikan melalui Jaminan Pendidikan Daerah dan menyalurkan anak tersebut ke sekolah formal maupun non formal sesuai minat dan kesesuaian anak. Kemudian Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pendidikan Inklusi untuk menanggulangi anak putus sekolah karena faktor anak berkebutuhan khusus. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor sosial di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu pada perencanaan kedepan Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan bersinergi dengan perangkat RT/RW dan PKK di wilayah

untuk mendampingi anak putus sekolah agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang terakhir.

Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari 0,16 persen pada tahun 2019 menjadi 0,12 persen pada tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya, APS di Kabupaten Pringsewu secara konsisten menurun dari 0,12 persen pada tahun 2020 menjadi 0,05 persen pada tahun 2023. Adapun secara rinci Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

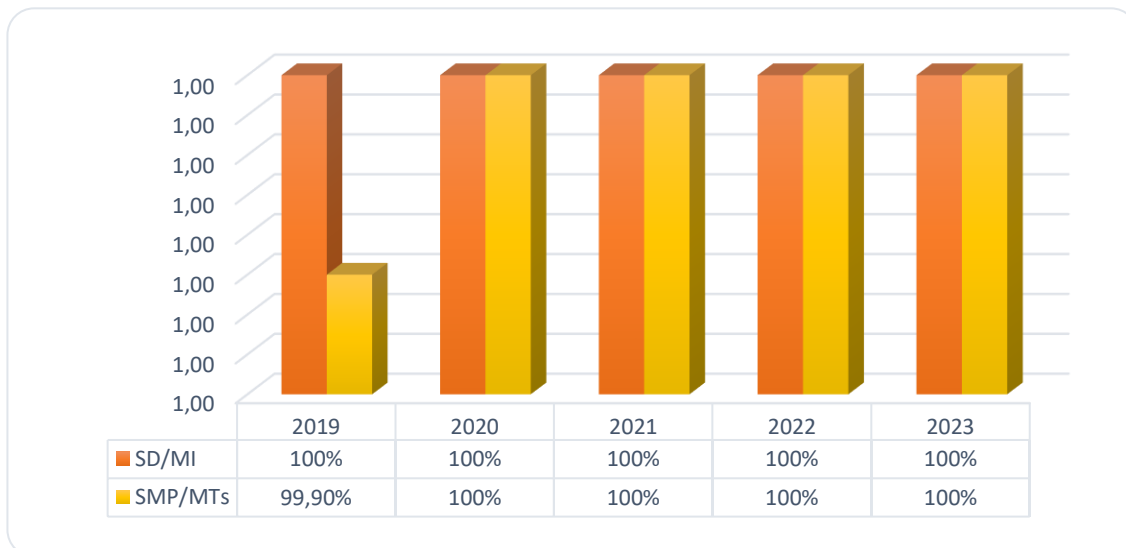


Gambar 2. 46 Grafik Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Angka kelulusan yang semakin tinggi, mencerminkan semakin berhasilnya sistem pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan. Perhitungan angka kelulusan adalah merupakan persentase jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tersebut.

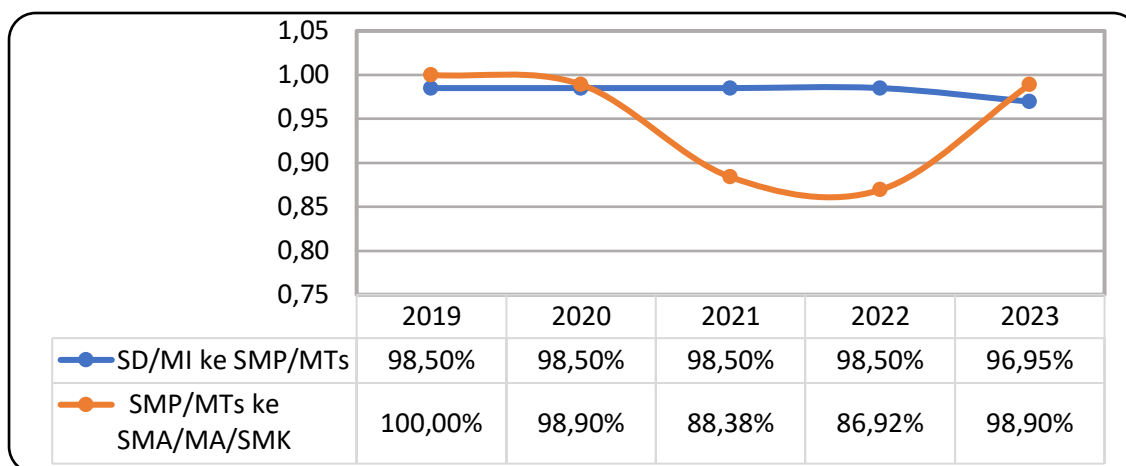


Gambar 2. 47 Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi angka melanjutkan sekolah, maka semakin baik kinerja dalam bidang pendidikan.

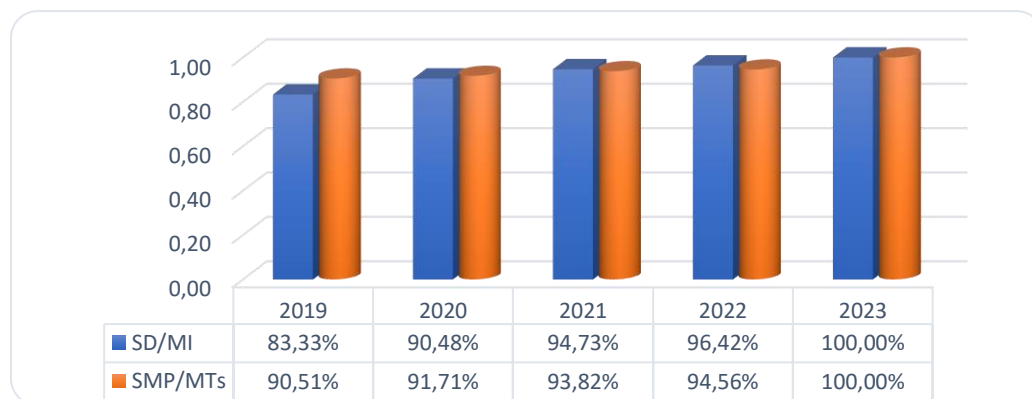


Gambar 2. 48 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV merupakan indikator yang mencerminkan kelayakan guru dalam mengajar. Hal ini karena kualitas pendidikan, ditentukan oleh guru yang berkualitas. Kondisi guru di Kabupaten Pringsewu yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

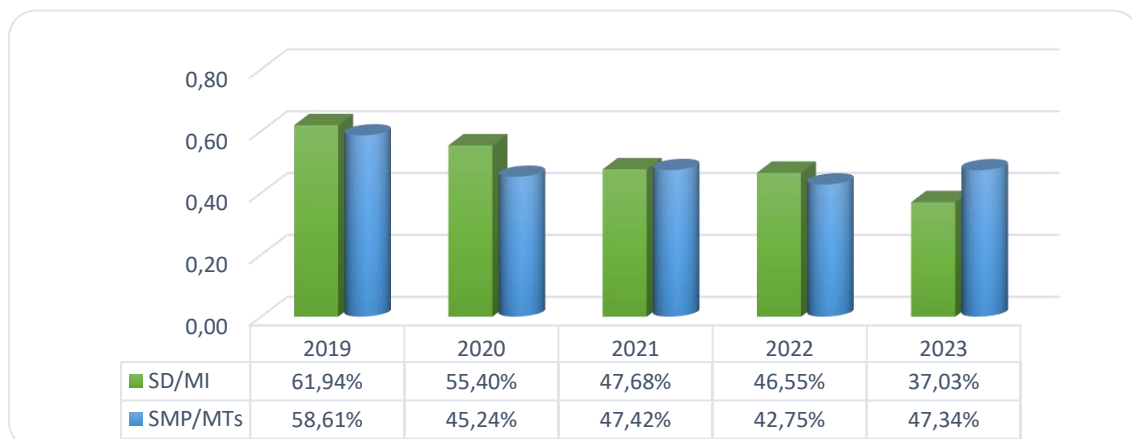


Gambar 2. 49 Grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

j. Kualitas Guru Bersertifikat Mengajar

Sertifikasi mendidik merupakan bukti formal atau pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional. Semakin banyak guru yang telah memiliki sertifikasi mengajar, menjadi indikator terhadap kualitas pendidikan suatu daerah, karena sebelumnya telah ditempa keilmuannya.



Gambar 2. 50 Grafik Kualitas Guru Bersertifikat Mengajar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

B. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan tersebut perlu ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Fasilitas kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik atau balai kesehatan serta fasilitas apotik. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	7	7	7	7	7
Jumlah Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	13	13	13	13	13
Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	33
Jumlah Fasilitas Poliklinik/Rumah Bersalin	22	23	22	24	27
Jumlah Fasilitas Apotek/Toko Obat	45	47	67	85	95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang sangat penting dalam mendukung perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas juga berperan membina masyarakat di wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Dalam hal jangkauan Puskesmas yang luas, maka perlu ditunjang Puskesmas Pembantu dan klinik.

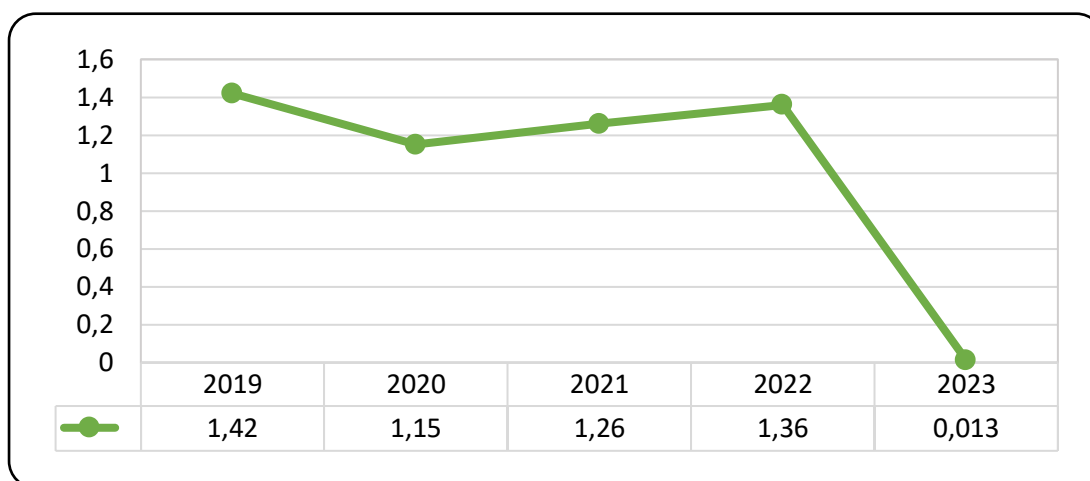
Tabel 2. 21 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Puskesmas per 20.000 Penduduk	0,65	0,65	0,65	0,61	0,63
Rasio Puskesmas Pembantu per 6.000 Penduduk	0,57	0,57	0,57	0,47	0,189
Jumlah Fasilitas Poliklinik/Rumah Bersalin per 6.000 Penduduk	0,37	0,34	0,33	0,34	0,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan, dan keluarga berencana yang memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.



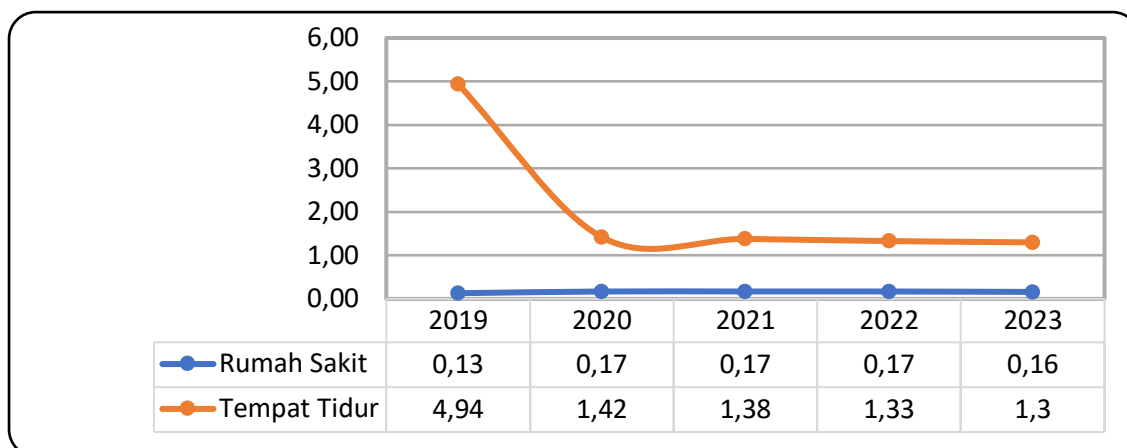
Gambar 2. 51 Grafik Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien

Keberadaan rumah sakit menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja pelayanan kesehatan. Rasio rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk.

Lalu untuk Rasio tempat tidur rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah tempat tidur per 1.000 penduduk.



Gambar 2. 52 Grafik Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan mencakup tenaga dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang dimaksud dengan tenaga medis terdiri dari perawat dan bidan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tenaga Dokter	222	279	269	200	253
Tenaga Bidan	461	497	619	580	590
Tenaga Perawat	708	773	830	858	821
Tenaga Kesehatan Lainnya	892	992	880	981	869

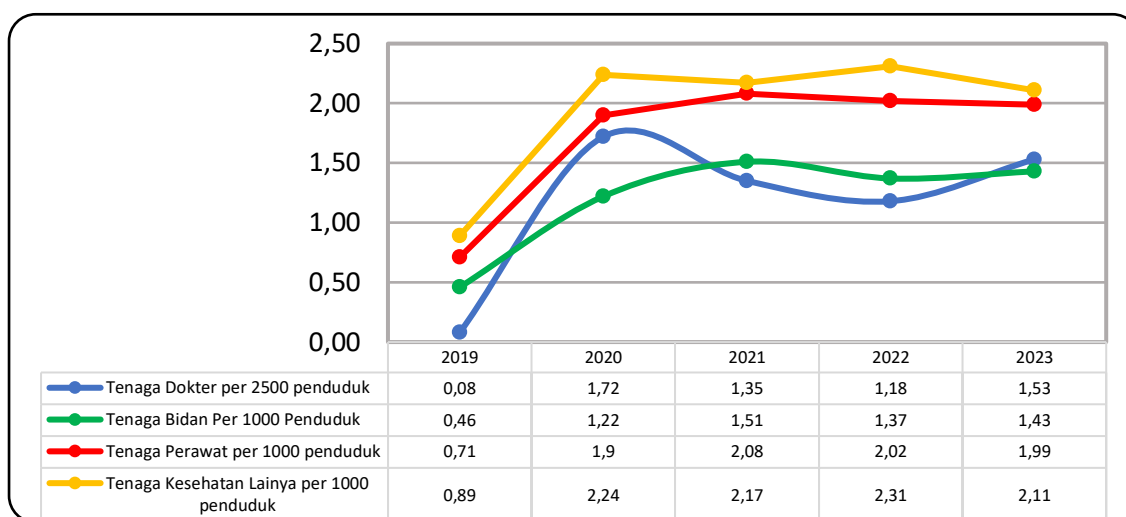
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2023

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat dan bidan perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga paramedis. Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat dan bidan) di Kabupaten Pringsewu dari Tahun 2019-2023 semakin membaik. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Lalu untuk rasio tenaga bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, dihitung per 1.000 penduduk.

Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami tren positif dari 0,08 pada tahun sebelumnya menjadi 1,72. Pada tahun berikutnya kembali menurun dari 1,72 menjadi 1,35 pada tahun 2021. Dua tahun terakhir (2022-2023) kembali mengalami fluktuatif dengan rasio dari 1,35 (2021), 1,18 (2022), hingga menjadi 1,53 (2023). Rasio tenaga bidan per 1.000 penduduk juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio bidan per 1.000 penduduk mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,46 menjadi 1,22. Pada tahun 2021 hingga 2023, rasio bidan per 1.000 penduduk mengalami penurunan dari 1,51 (2021) menjadi 1,37 (2022). Dan pada tahun 2023 kembali naik mencapai 1,43.

Rasio tenaga perawat per 1.000 penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 hingga 2021, rasio tenaga perawat per 1.000 penduduk mengalami kenaikan dari 0,71 (2019), 1,90 (2020) hingga 2,08 (2021). Pada tahun berikutnya, rasio tenaga perawat per 1.000 penduduk mengalami penurunan dari yang sebelumnya 2,08 pada tahun 2021 menjadi 1,99 pada tahun 2023. Sedangkan untuk rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk dalam

5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dari 0,89 (2019) menjadi 2,24 (2020). Pada tahun 2021, rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk sempat menurun mencapai 2,17 dan setelahnya kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 2,31 namun kembali turun menjadi 2,11 pada tahun 2023. Adapun secara lengkap rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

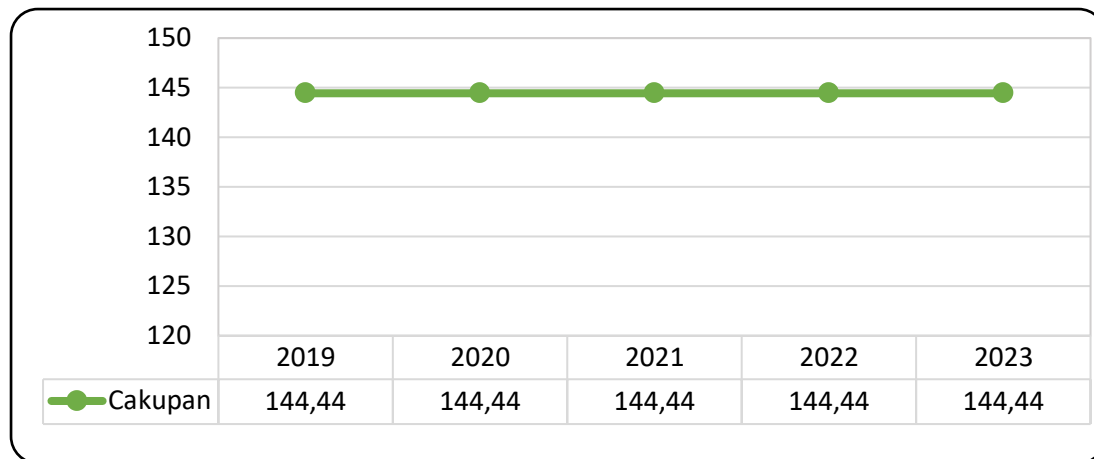


Gambar 2. 53 Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Keberadaan puskesmas berfungsi sebagai pusat menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata I, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

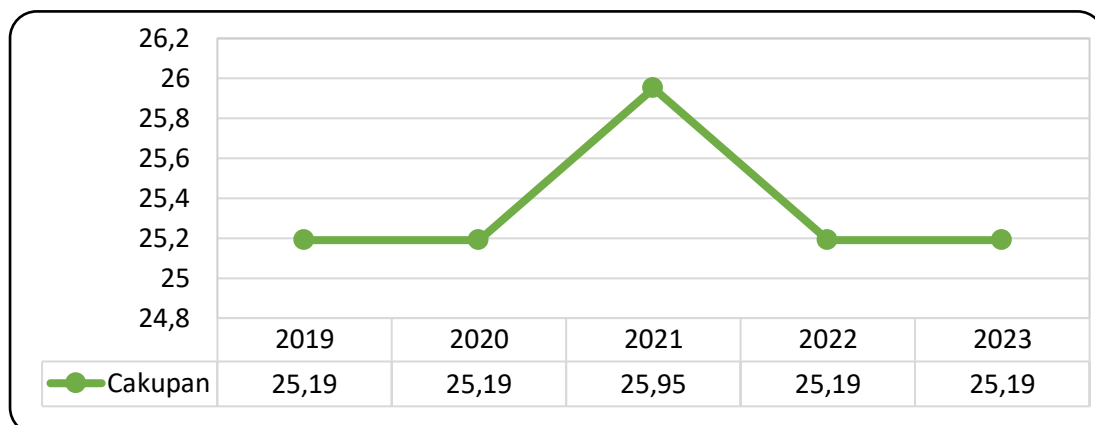


Gambar 2. 54 Grafik Cakupan Puskesmas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu unit pelayanan kesehatan sederhana untuk menunjang dan membantu kegiatan puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil. Wilayah kerja Pustu berkisar antara 2 atau 3 pekon, dengan sasaran sekitar 10,000 jiwa penduduk.

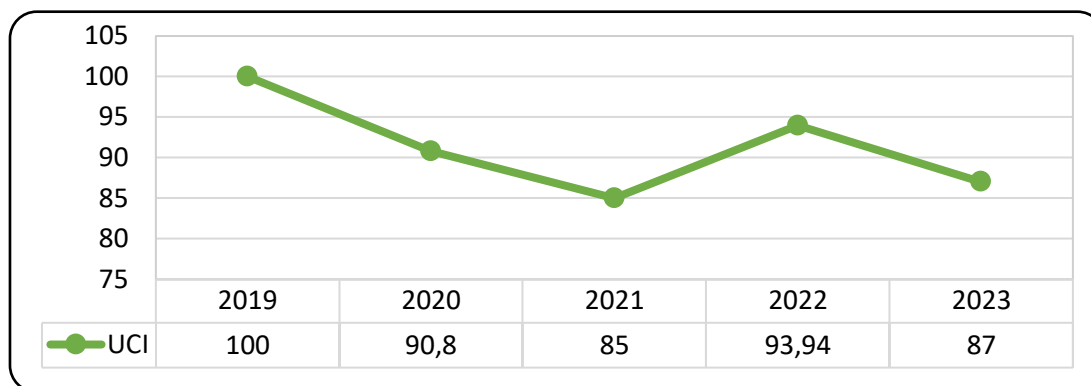


Gambar 2. 55 Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

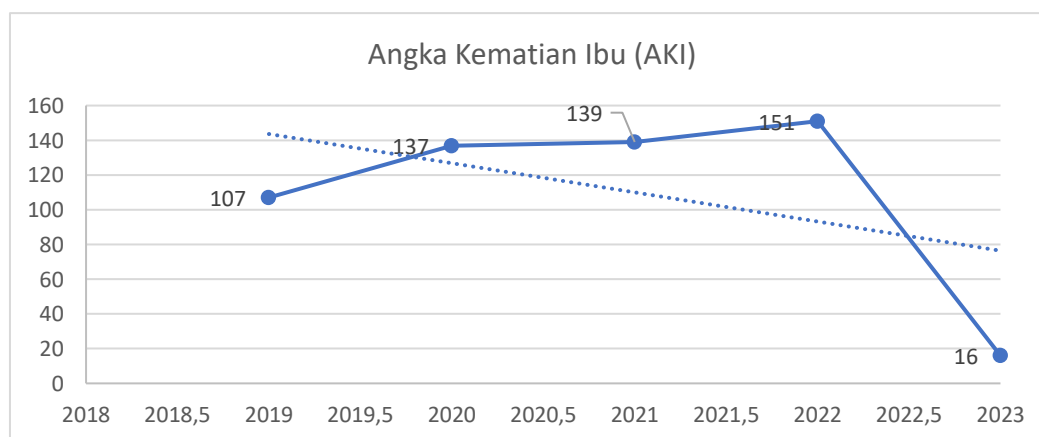
Salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan atau kematian ibu dan anak serta upaya pengendalian penyakit infeksi adalah melalui imunisasi. Oleh karena itu maka cakupan imunisasi menjadi indikator capaian UCI pada desa-desa yang terdapat pada daerah.



Gambar 2. 56 Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Angka Kematian Ibu (AKI)

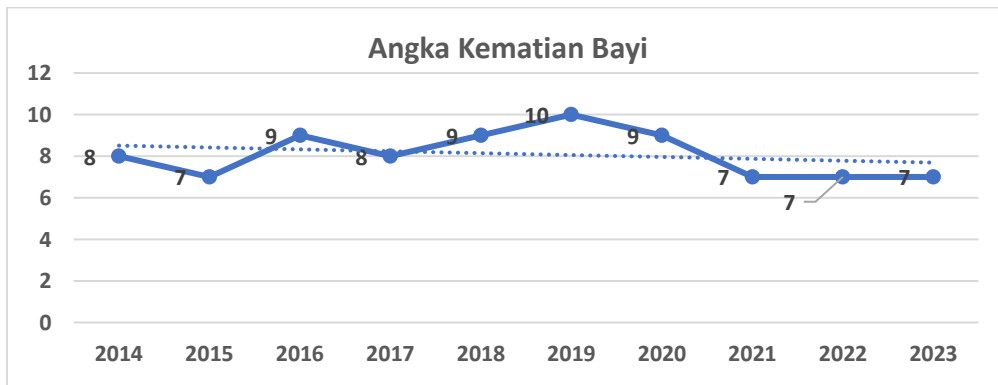


Gambar 2.57 Grafik angka kematian ibu (AKI) di kabupaten pringsewu tahun 2019-2023

Mortalitas atau angka kematian ibu secara umum sangat berhubungan erat dengan angka kesakitan ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas adalah sosial ekonomi, pendidikan, perilaku hidup sehat, lingkungan, upaya kesehatan dan fertilitas.

AKI dirumuskan dengan jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100.000. Angka kematian ibu di Kabupaten Pringsewu adalah 16 yang mengartikan terdapat 16 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

i. Angka Kematian Bayi (AKB)

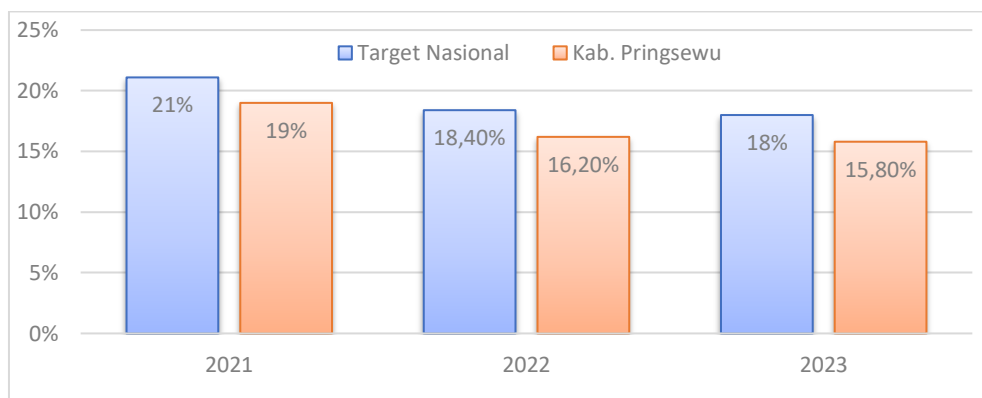


Gambar 2. 58 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten pringsewu tahun 2014-2023

Grafik di atas menunjukkan angka kematian bayi dalam 10 (Sepuluh) tahun terakhir, tetapi jika dibandingkan dengan indikator SDGs 2030 yaitu 12/1000 KH, pencapaian AKB Kabupaten Pringsewu masih di bawah indikator tersebut. Pada Tahun 2023 sebesar 7/1000 kelahiran hidup, AKB ini mengalami penurunan kasus dibandingkan tahun 2022 akan tetapi untuk angka kematian tidak berubah.

j. Stunting

Stunting (kerdil) adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Adanya stunting menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama (kronis). Bila dibandingkan dengan target nasional Kabupaten Pringsewu memenuhi target yang diharapkan dan mengalami tren penurunan dari capaian 2021 ke 2022. Berikut data Stunting Kabupaten Pringsewu dibandingkan target Nasional.

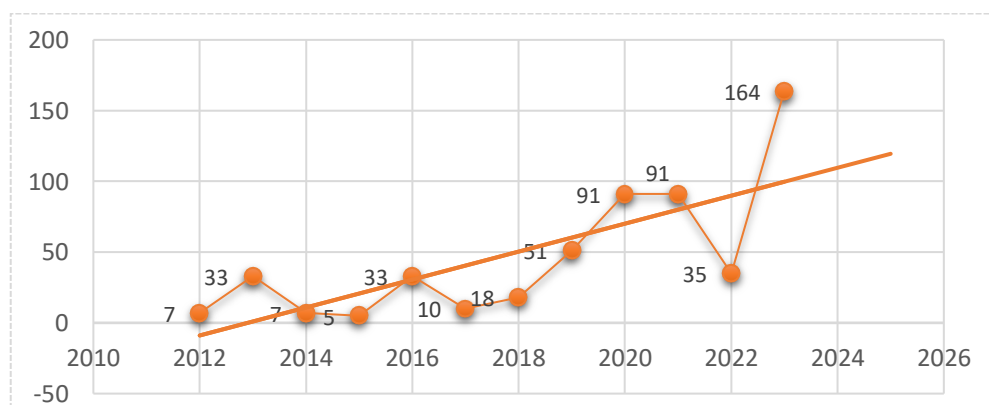


Gambar 2.59 Grafik stunting di kabupaten pringsewu tahun 2021-2023

k. Data Kesakitan

- HIV/AIDS

Salah satu tujuan program Pemberantasan Penyakit Menular Langsung adalah menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial dari penyakit. Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular seksual yang belum ditemukan obatnya dan mempunyai dampak sosial yang sangat berat. Kegiatan dalam penanggulangan penyakit ini dilaksanakan dengan penemuan dan pengobatan penderita baik secara pasif maupun secara aktif dengan melakukan survei dengan sasaran kelompok resiko tinggi. Gambaran persentase kumulatif kasus HIV yang diobati di Kabupaten Pringsewu tahun 2012 sampai dengan 2023.



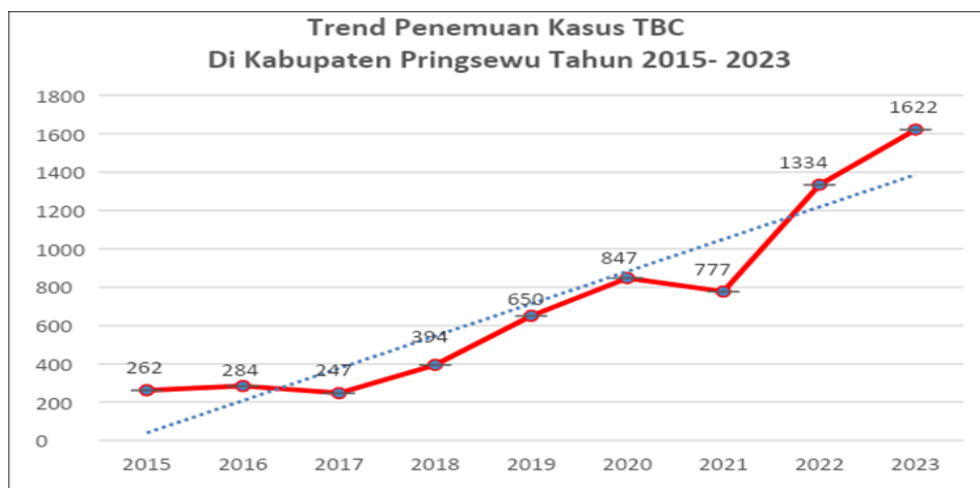
Gambar 2.60 Jumlah Kasus HIV/AIDS Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2023

Sumber: Seksi P2 Dinkes Pringsewu 2023

- Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang sampai dengan saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penemuan dan penatalaksanaan tuberkulosis di Kabupaten Pringsewu telah dilakukan sesuai dengan target nasional. Berdasarkan data dari dashboard sistem informasi tuberkulosis (SITB) tahun 2023, orang dengan terduga TBC yang terjaring di Kabupaten Pringsewu sebanyak 9.496 orang (111,7%), hal ini melebihi prediksi sasaran yaitu 8.505 orang hal ini disebabkan karena banyaknya pasien dari Kabupaten lain seperti Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Tengah yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan TBC di Kabupaten Pringsewu.

Adapun kasus TBC yang ditemukan (Treatment Coverage) di Kabupaten Pringsewu sebanyak 1.622 kasus (92,7%) dari perkiraan kasus TBC sebanyak 1.750 kasus. Diantaranya TBC Anak yang ditemukan di Kabupaten Pringsewu sebanyak 521 kasus dari perkiraan kasus TBC Anak sebanyak 120 kasus. Angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate/TSR) tuberkulosis tahun 2023 (data kohort 2022) adalah 90,85%. Sebanyak 1.122 orang dengan pengobatan lengkap dan sembuh, 26 orang meninggal, dan 13 orang yang putus berobat (loss to follow up), hal ini menunjukkan telah memenuhi target nasional.



Gambar 2.61 Jumlah Penemuan Kasus Tb Paru Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2023

Sumber: Seksi P2 Dinkes Pringsewu 2023 dan Dashboard SITB 2024

1. Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Cakupan Universal Health Coverage Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,71%.

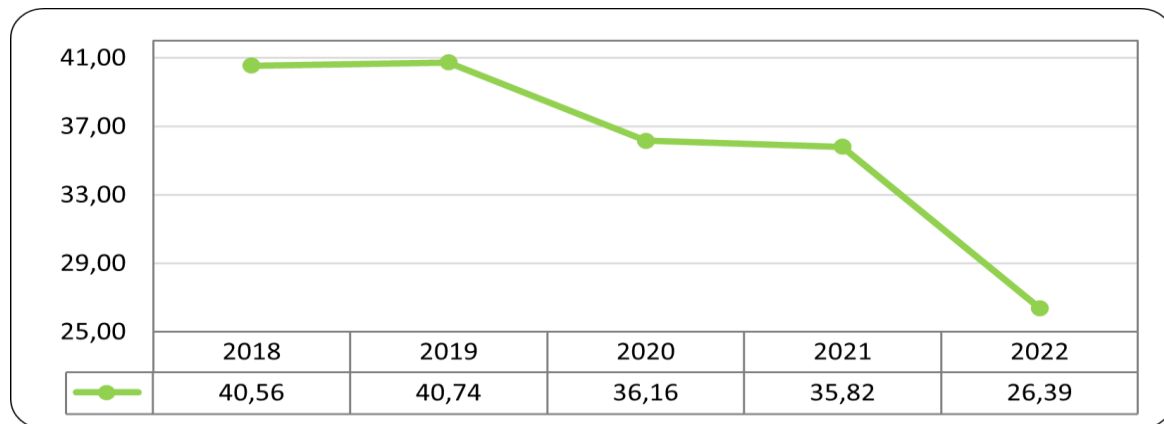
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, lingkungan perumahan dan penataan ruang. Capaian indikator kinerja urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut.

a. Proporsi Panjang Jalan dalam Keadaan Baik

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan

barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya. Proporsi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, dari 40,56 persen pada tahun 2018 menjadi 26,39 persen pada tahun 2022. Adapun kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, dengan tingkat kerusakan $\leq 6\%$ adalah sebagaimana tertera pada gambar di bawah.

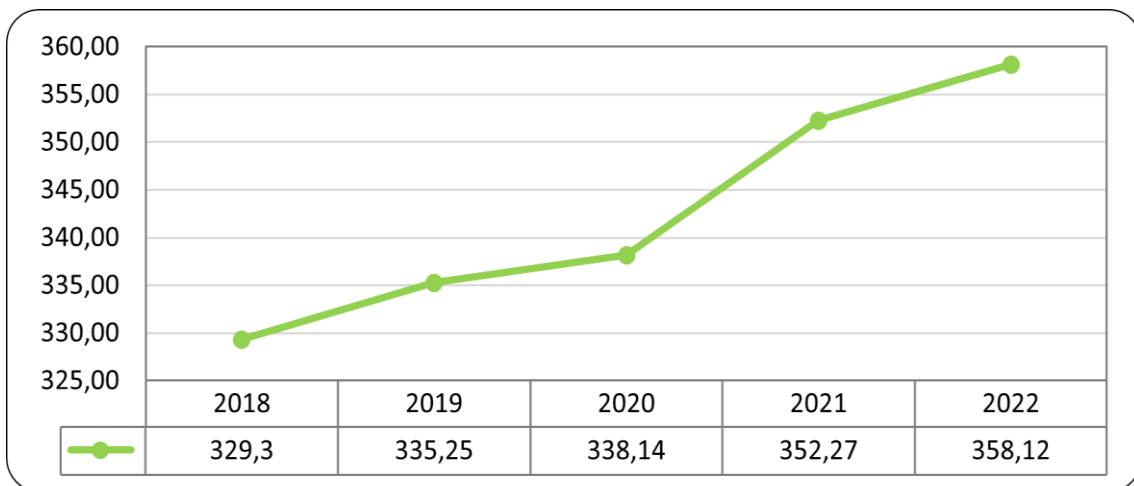


Gambar 2. 62 Grafik Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

b. Rasio Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Pringsewu yang terlayani akses jalan. Adapun rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

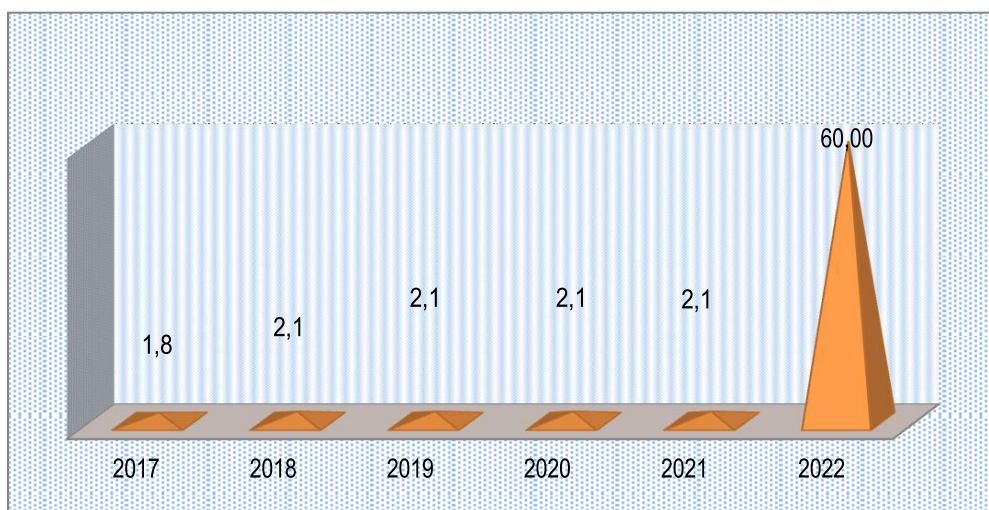


Gambar 2. 63 Grafik Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

c. Panjang Jalan yang Memiliki Drainase

Sistem drainase adalah rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air (sungai dan danau) atau ke tempat resapan buangan, sehingga kawasan itu dapat difungsikan maksimal.

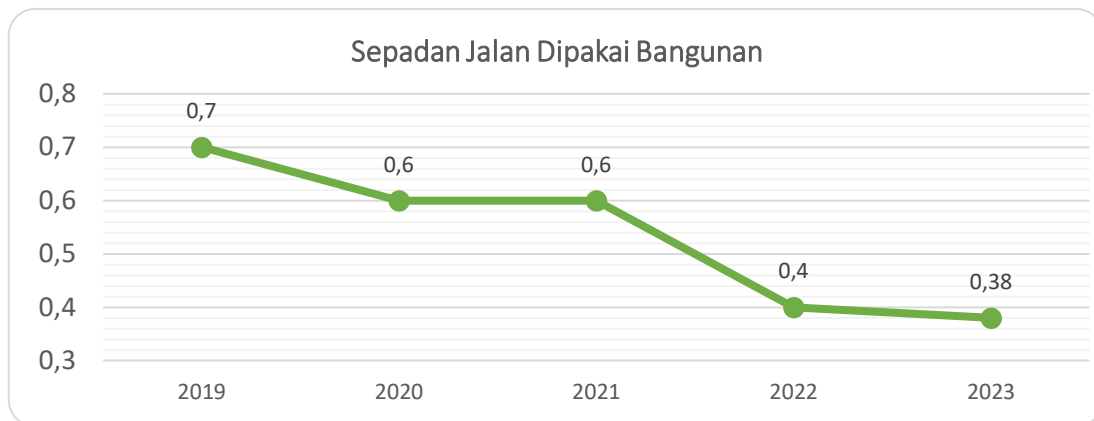


Gambar 2. 64 Grafik Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

d. Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar

Garis sempadan jalan diperlukan untuk mengatur jarak pandang lalu lintas dan estetika tata ruang, sehingga bila dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar, maka dapat menghilangkan fungsi tersebut, dan indikator ini merujuk pada ketaatan terhadap keamanan warga.

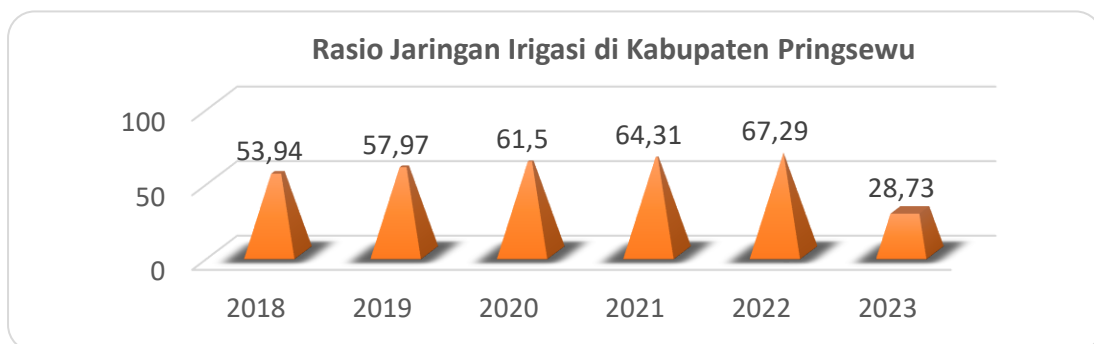


Gambar 2. 65 Grafik Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan beserta bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam rangka untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

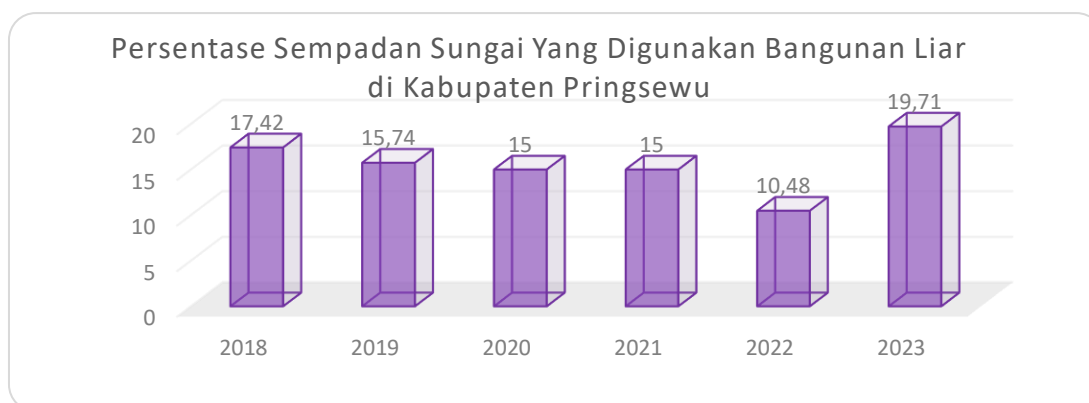


Gambar 2. 66 Grafik Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai merupakan batas luar pengamanan sungai yang ada di sisi kiri dan kanan, Oleh karena itu maka diperlukan penertiban terhadap bangunan liar, karena keberadaan bangunan tersebut, selain dapat membahayakan dirinya sendiri, juga dapat memunculkan penggundulan terhadap sempadan sungai.

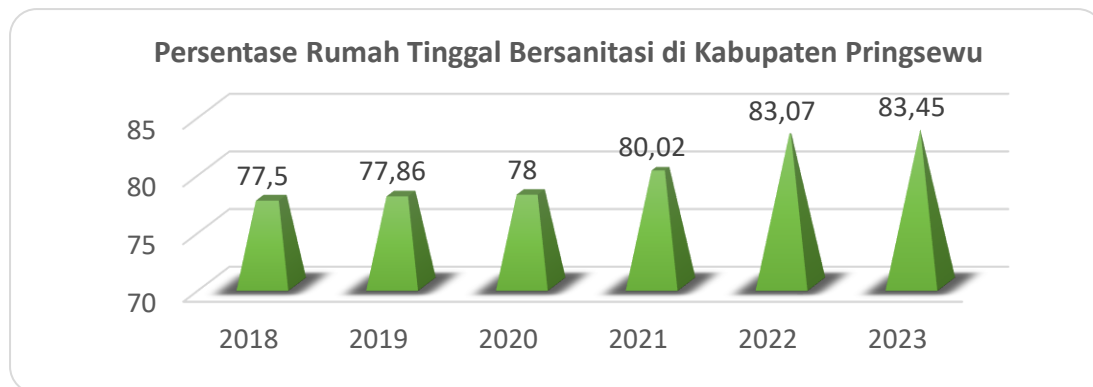


Gambar 2. 67 Grafik Persentase Sempadan Sungai Yang Digunakan Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya punya akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, tempat pembuangan tinja, tempat pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Prosentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.

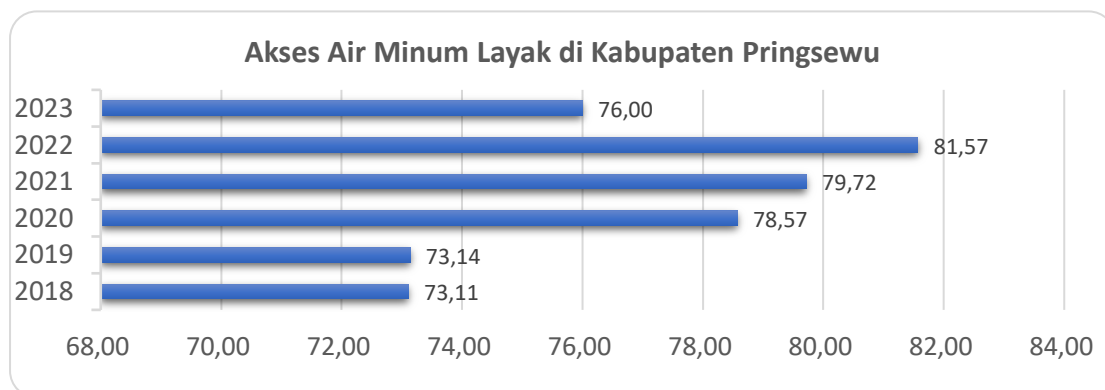


Gambar 2. 68 Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Akses Air Minum yang Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.



Gambar 2. 69 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

i. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam penataan ruang terkandung proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdaya guna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun dalam penataan ruang di Kabupaten Pringsewu antara lain terdapat 4 (empat) indikator dalam rencana pembangunan seperti yang termaktub dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

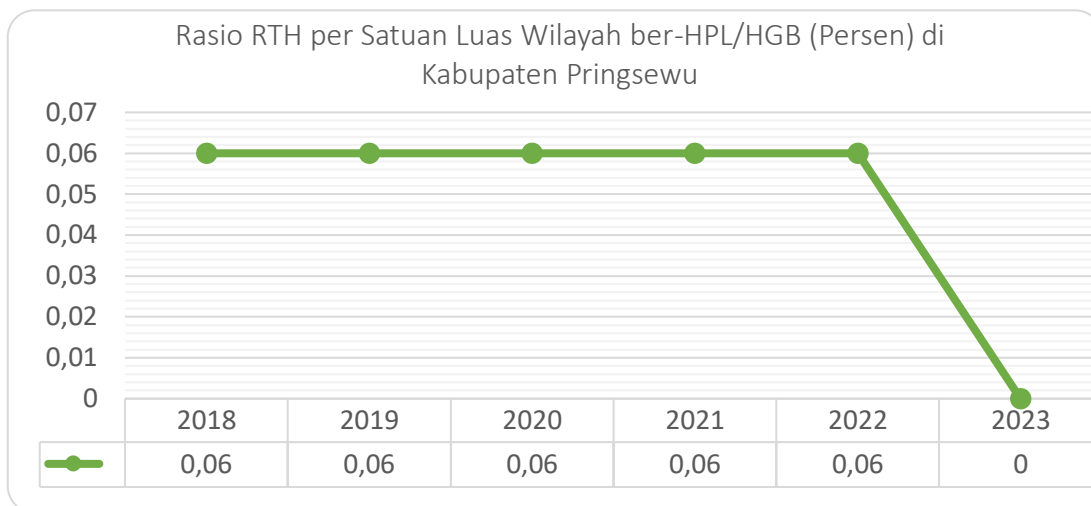
Indikator	Capaian Indikator (dalam Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,06	0,06	0,06	0,06	0
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	0,75	0,75	0,75	0,75	0.75

Indikator	Capaian Indikator (dalam Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan	44,75	44,87	44,87	40,00	34
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	60,99	61,75	74,00	80,79	80.79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana yang termaktub pada tabel di atas. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun yang sengaja ditanam.

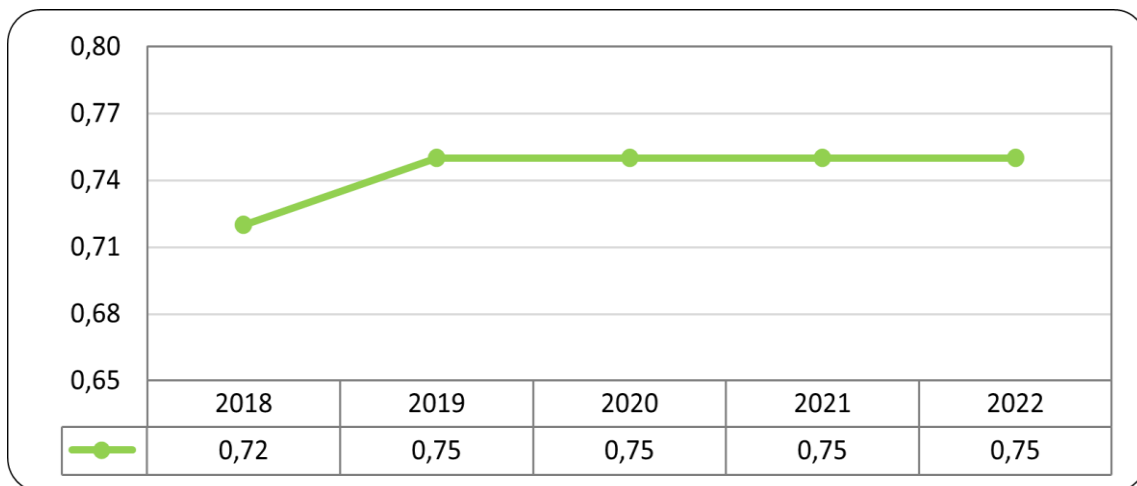
Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria lahan dengan luasan paling sedikit 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk suatu hamparan atau berbentuk jalur, atau kombinasi dari keduanya, serta didominasi oleh komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB stagnan dan cenderung konstan yaitu berada di 0,06 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini tentu saja menandakan bahwa perlu adanya peningkatan Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan jumlah RTH di masa mendatang. Adapun grafik Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 70 Grafik Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Penyediaan RTH memiliki tujuan untuk (a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (b) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu sempat mengalami peningkatan pada 2019, dari yang semula 0,72 persen pada tahun sebelumnya menjadi 0,75 persen. Setelah mengalami kenaikan tersebut, luasan RTH publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu stagnan hingga tahun 2022. Hal ini tentu saja perlu ditingkatkan untuk memenuhi ketercapaian luasan RTH publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu. Adapun grafik luasan RTH publik sebanyak 20 persen di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

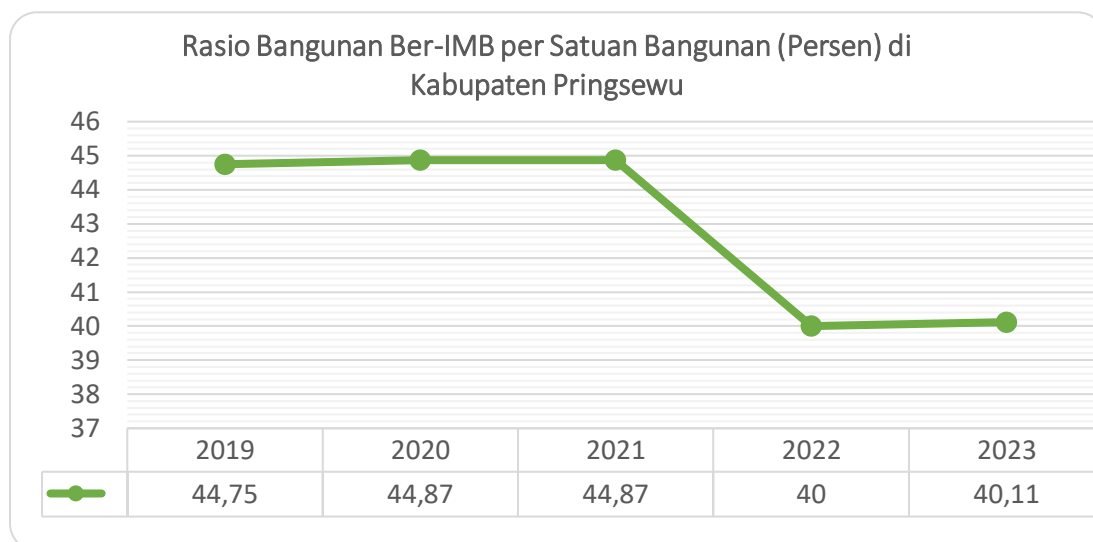


Gambar 2. 71 Grafik Luasan RTH Publik 20 Persen dari Kawasan Perkotaan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Capaian indikator urusan Penataan Ruang berikutnya adalah rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian/ seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memberikan pelayanan terhadap penduduk berupa jaminan terciptanya lingkungan hidup yang teratur, aman dan nyaman sesuai dengan peruntukan ruang.

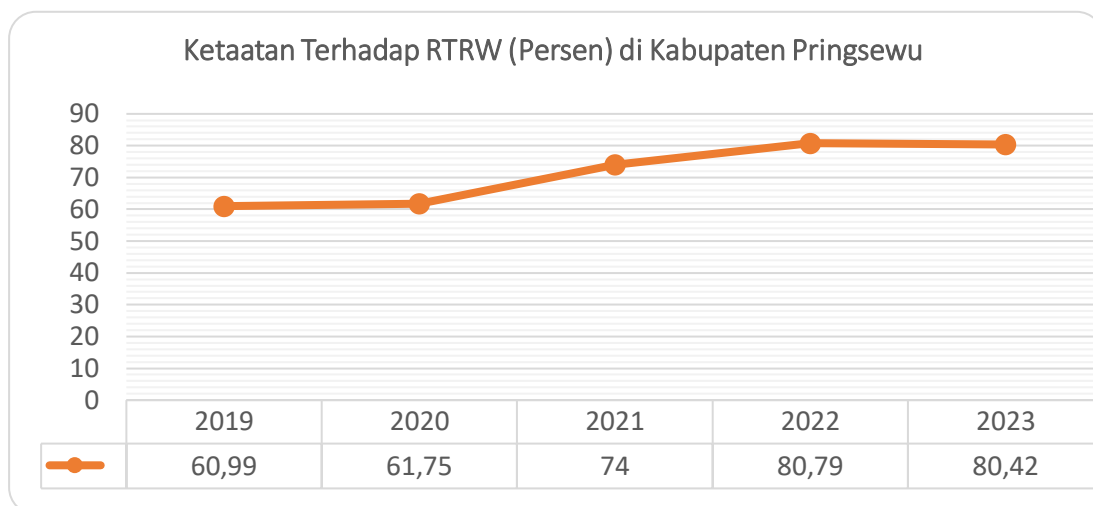
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2020, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mengalami tren positif, dari 44,75 persen pada tahun 2019 hingga mencapai 44,87 persen pada tahun 2020. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan sempat stagnan pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022 dari 44,87 persen menjadi 40,00 persen namun kembali naik pada tahun 2023 hingga mencapai 40,11 persen. Hal ini menandakan bahwa menurunnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangun Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalam izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Adapun grafik rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 72 Grafik Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Capaian indikator urusan Penataan Ruang terakhir adalah ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu. Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Karena itu sedang dilakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pringsewu, yang disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2019-2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun grafik ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 73 Grafik Ketaatan Terhadap RTRW (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

D. Perumahan dan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan bagi penghuninya dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator penduduk yang mempunyai rumah layak huni, menunjukkan semakin mampu daerah tersebut menyediakan kehidupan yang lebih layak kepada warga masyarakatnya, dan sekaligus menunjukkan kepedulian kepada setiap warganya dalam mengutamakan kesehatan lingkungan perumahan. Rasio rumah layak huni di kabupaten pringsewu mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 cenderung stabil namun mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya untuk menaikkan angka rasio rumah layak huni di kabupaten pringsewu. Data tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.74 Grafik Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas permukiman yang layak huni.

Grafik dibawah menunjukkan rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2019 hingga 2023. Rasio pemukiman layak huni didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air minum bersih, sanitasi yang layak, dan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Secara keseluruhan, rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan.

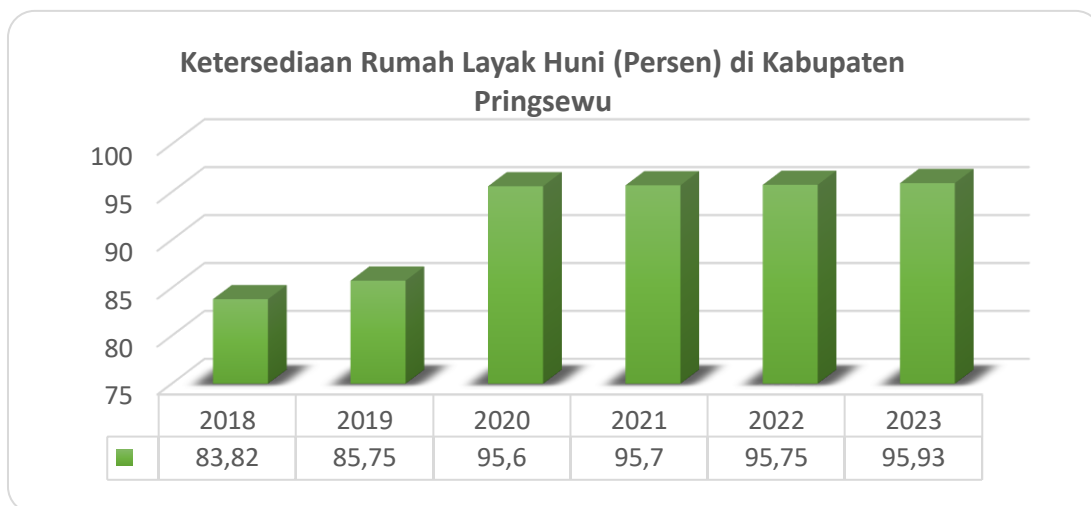


Gambar 2. 75 Grafik Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah merupakan bangunan berfungsi tempat tinggal yang layak, sarana pembinaan keluarga, cerminan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Oleh karena itu, rumah tinggal membutuhkan syarat tertentu supaya nyaman. Diantaranya ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah, ventilasi, akses yang mudah dijangkau, sarana transportasi dan komunikasi, sarana rekreasi, pendidikan, kesehatan, drainase dan lain-lain. Indikator ini menunjuk pada kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan rumah layak huni.

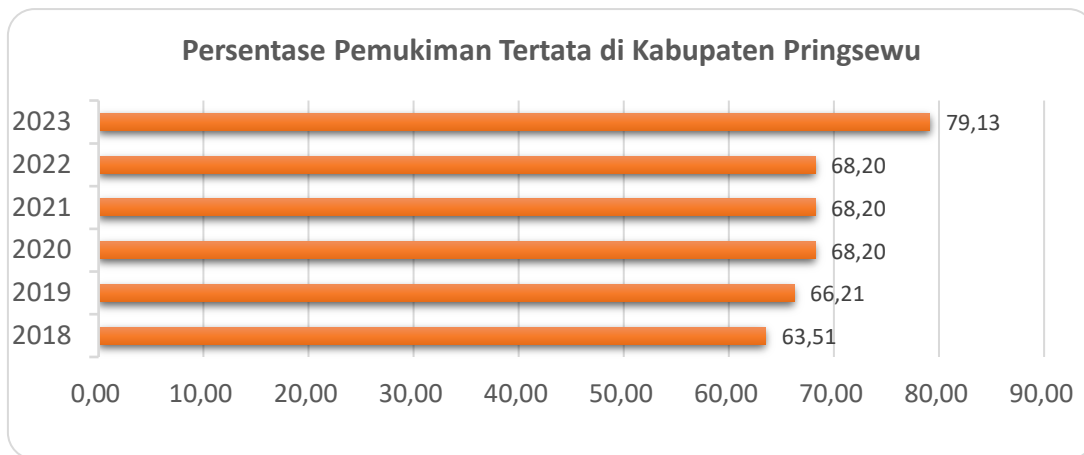


Gambar 2.76 Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman yang tertata merupakan kawasan lingkungan penghunian yang telah tertata, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan, sehingga membuat nyaman bagi penghuninya. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan penyediaan air minum bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan yang terjangkau. Upaya tersebut telah membuahkan hasil, dengan peningkatan persentase permukiman tertata dan rasio permukiman layak huni yang stabil.

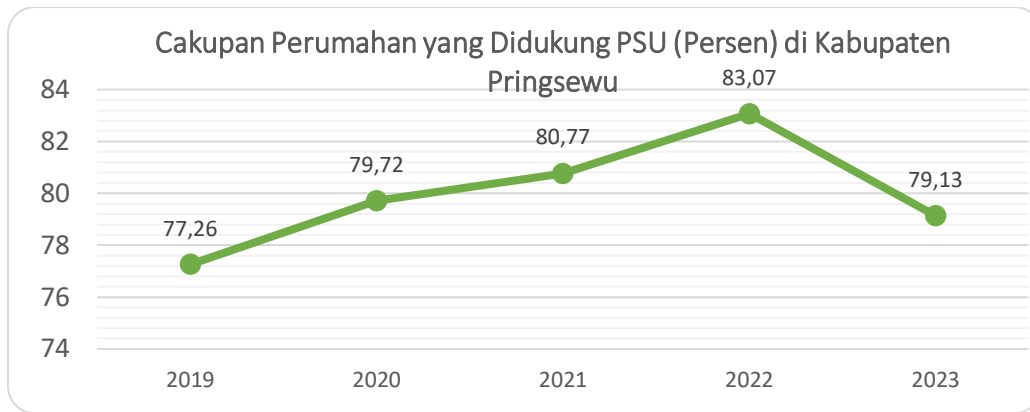


Gambar 2. 77 Grafik Persentase Permukiman Tertata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Cakupan Perumahan yang Didukung PSU

Perumahan merupakan kumpulan dari beberapa rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Grafik ini menunjukkan cakupan perumahan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2019 hingga 2023. PSU didefinisikan sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat di suatu kawasan perumahan. Dapat dilihat dari grafik bahwa ada penurunan grafik yang awalnya ditahun 2022 yaitu 83,07 menjadi 79,13 di tahun 2023.

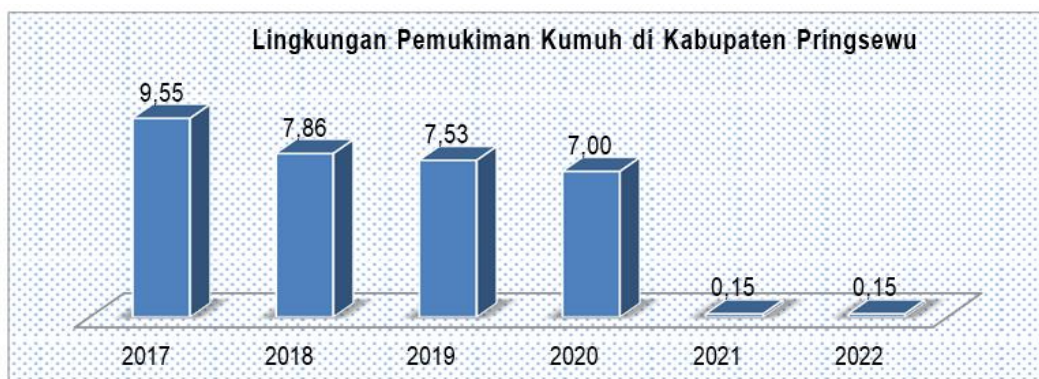


Gambar 2. 78 Grafik Cakupan Perumahan yang Didukung PSU (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

f. Kawasan Permukiman Kumuh

Pemukiman kumuh ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, jalan sempit, cenderung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan, drainase kurang memadai, fasilitas pembuangan limbah tidak memadai, fasilitas air bersih sangat minim, tata bangunan tidak teratur dan rawan terhadap penularan penyakit. Semakin kecil lingkungan pemukiman kumuh, maka semakin baik kinerja dalam pengelolaan lingkungan pemukiman kumuh.



Gambar 2. 79 Grafik Cakupan Perumahan yang Didukung PSU (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

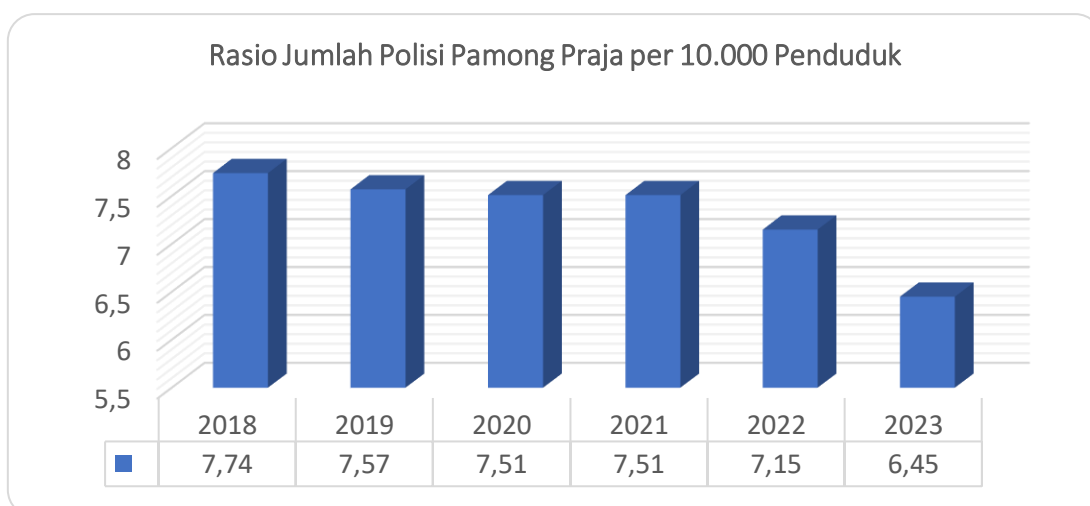
**) Tahun 2021 dilakukan penetapan ulang SK Kumuh, untuk luasan wilayah kumuh terdapat penambahan luasan*

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat terhadap tumbuh kembangnya investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik kita adalah memelihara kebhinekaan agar tetap menjadi faktor yang mampu menginspirasi, memperkaya dan menguatkan ikatan persatuan dan kesatuan. Sistem penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara rasa aman bagi masyarakat.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah proporsi jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat kemampuan daerah untuk menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah.

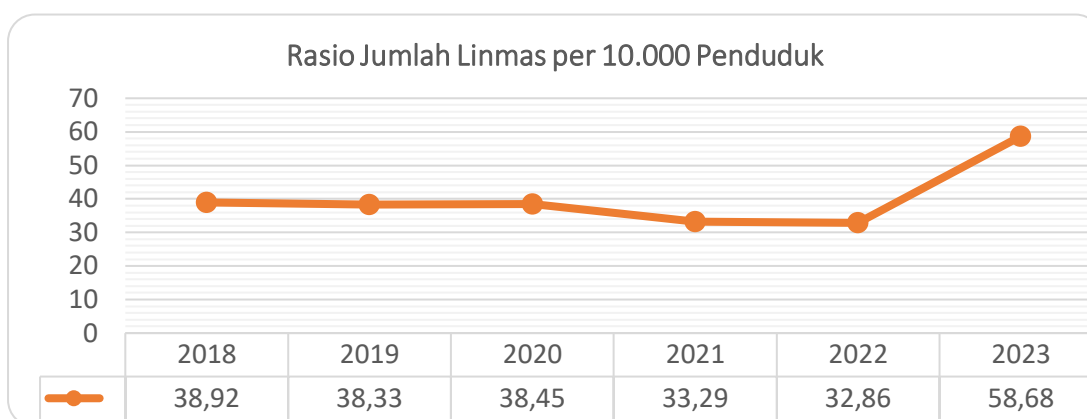


Gambar 2. 80 Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Jumlah LINMAS adalah proporsi jumlah perlindungan masyarakat per jumlah 10.000 penduduk. Rasio jumlah linmas ini menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

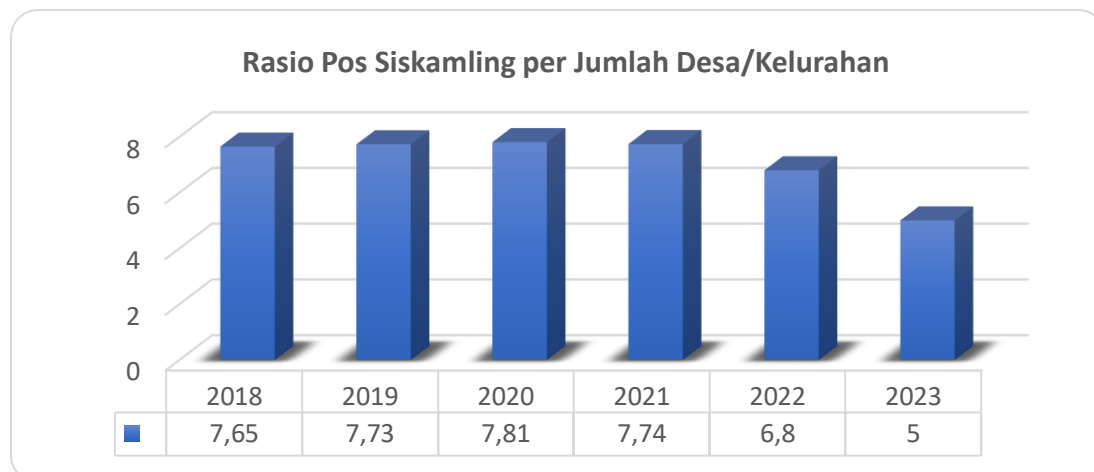


Gambar 2. 81 Grafik Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Semakin besar rasio pos siskamling, semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

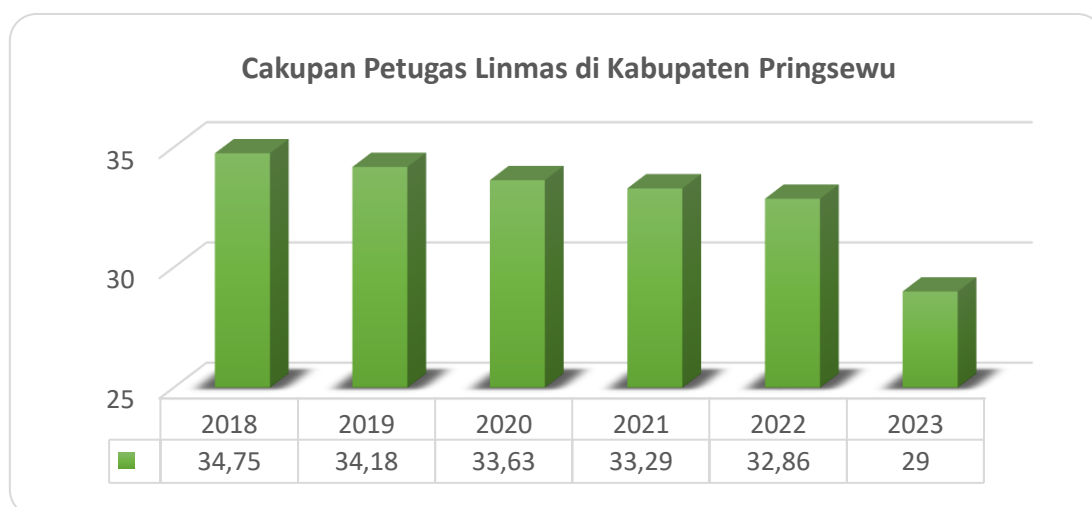


Gambar 2. 82 Grafik Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara bagi keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

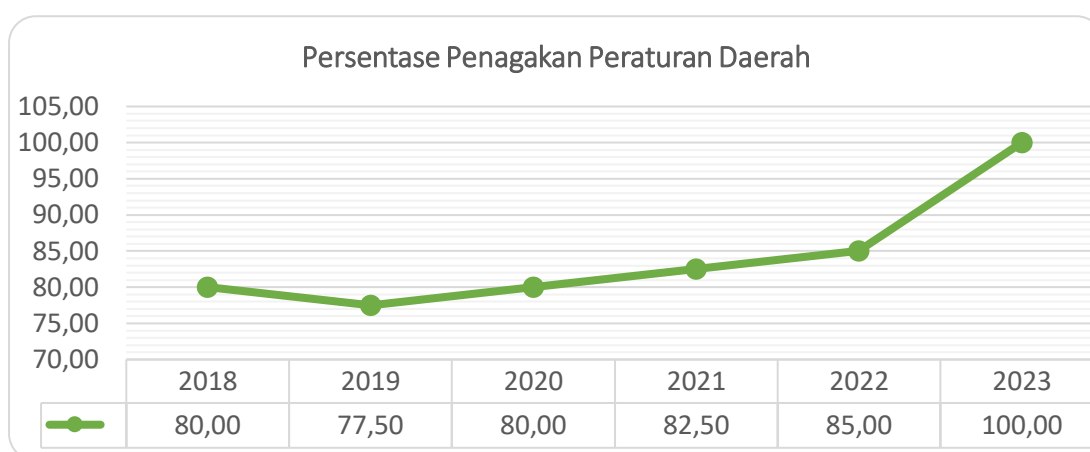


Gambar 2. 83 Grafik Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Prosentase Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu maka perlu untuk dipastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Dalam rangka memastikannya maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menegakannya melalui operasi yustisi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jika dilihat dari grafik disetiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 menyentuh angka 100,00.

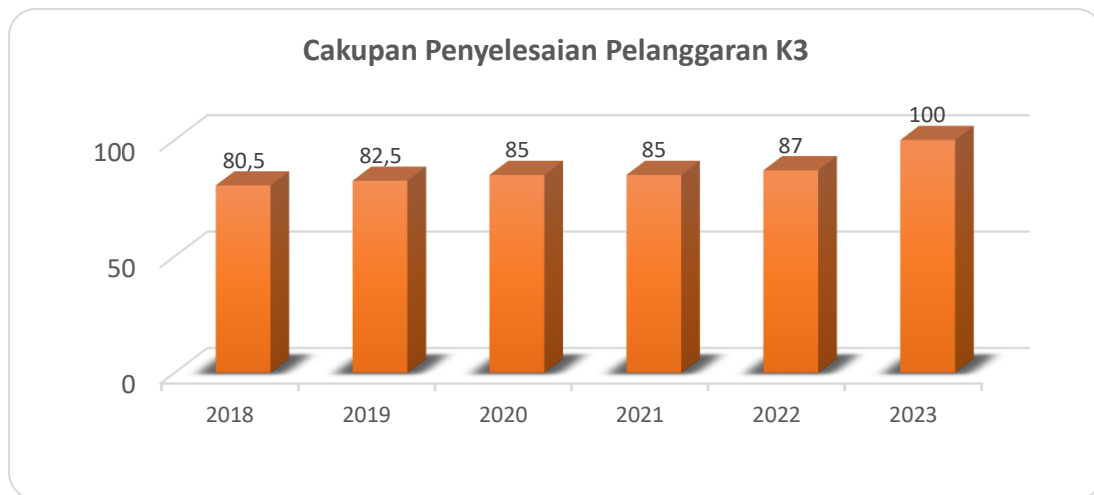


Gambar 2. 84 Grafik Persentase Penagakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3

Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) merupakan merupakan hak bagi semua masyarakat. Dengan terjaganya K3 maka aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan tercipta kehidupan yang harmonis. Karena itu maka setiap aktivitas yang dapat mengganggu K3, harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



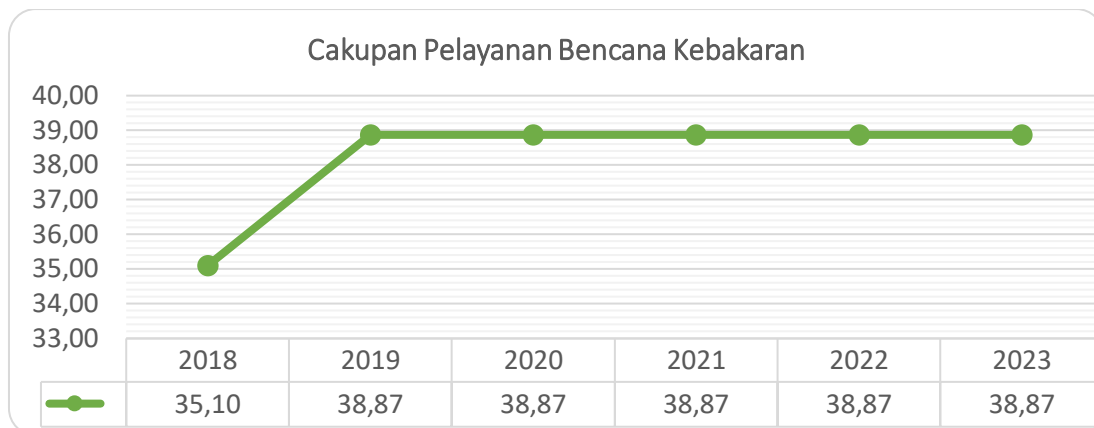
Gambar 2. 85 Grafik Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

Grafik diatas menggambarkan keberhasilan yang progresif dalam menangani pelanggaran K3, dengan pencapaian sempurna pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas grafik yang menekankan pentingnya K3 bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan nyaman.

g. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki dengan mengoptimalkan sarana yang ada. Meski ada peningkatan di awal periode, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pringsewu cenderung stabil namun masih terbatas, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan pelayanan di masa mendatang.



Gambar 2. 86 Grafik Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. *Response Time Rite* ini telah ditentukan dalam waktu 15 menit, dihitung sejak diterimanya laporan bencana kebakaran.



Gambar 2. 87 Grafik Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

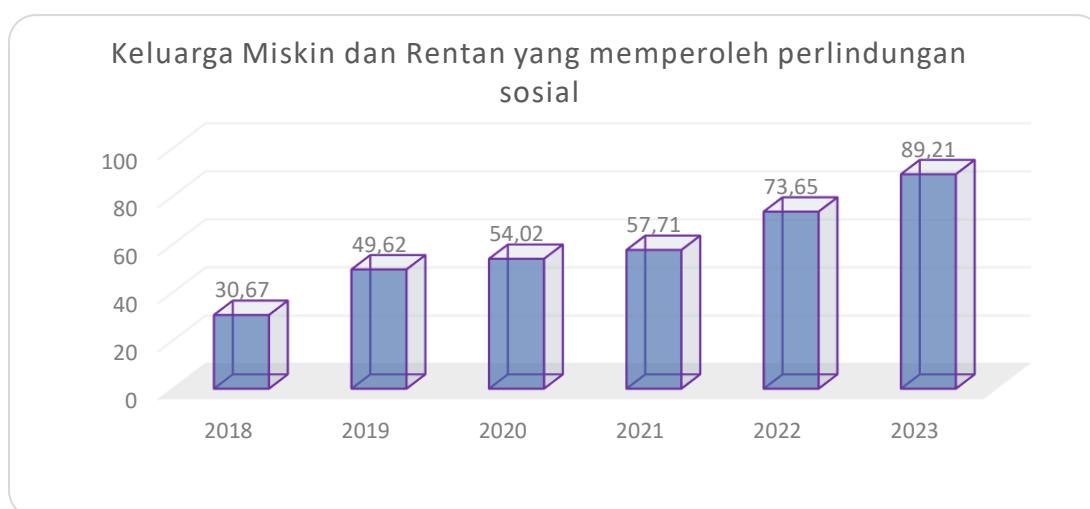
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

F. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

a. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh karena itu maka PMKS merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga membutuhkan bantuan. Salah satu bentuk penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan dengan memberikan bantuan kepada PMKS.



Gambar 2. 88 Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Cakupan PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang dapat tertangani, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



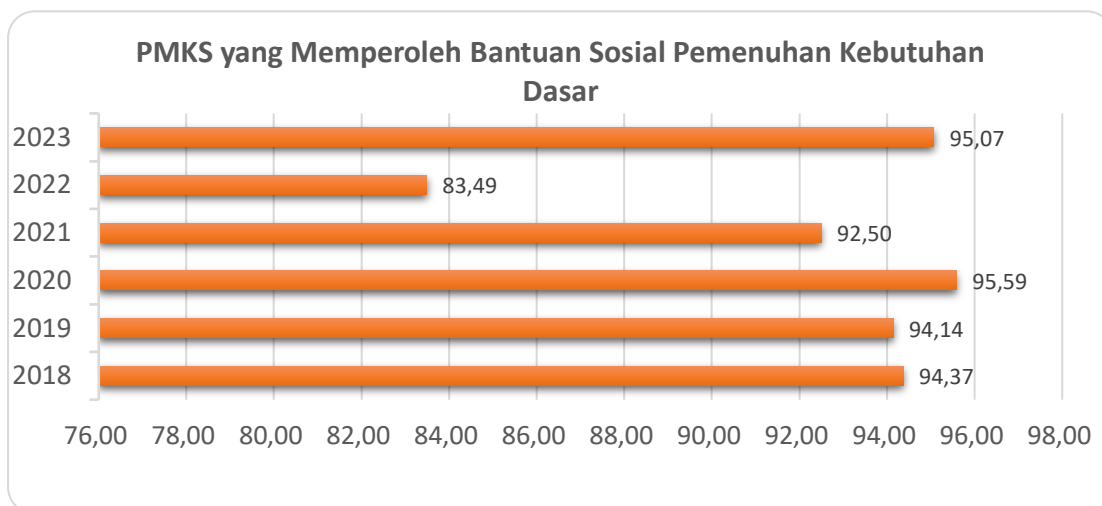
Gambar 2. 89 Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

Grafik menunjukkan peningkatan substansial dalam cakupan bantuan sosial untuk PMKS di Kabupaten Pringsewu selama periode 6 tahun, dengan pencapaian tertinggi pada 2021 dan mempertahankan tingkat yang tinggi hingga 2023. Ini menggambarkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun ada sedikit penurunan di tahun-tahun terakhir.

c. Cakupan PMKS Memperoleh Bantuan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.



Gambar 2. 90 Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

Meskipun ada fluktuasi, khususnya penurunan di tahun 2022, cakupan bantuan sosial untuk PMKS di Kabupaten Pringsewu tetap tinggi selama periode 2018-2023. Pemulihan cepat di tahun 2023 menunjukkan upaya yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar PMKS, sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijelaskan dalam paragraf pengantar.

d. Cakupan Panti Sosial Memperoleh Bantuan KUBE

Panti sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Prosentase panti sosial di Pringsewu yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat dari presentase dibawah dari tahun 2018-2022 menyentuh angka 100, akan tetapi di tahun 2023 terdapat penurunan yang sangat signifikan.



Gambar 2. 91 Grafik Persentase Panti Sosial Yang Memperoleh Bantuan KUBE di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Cakupan Panti Sosial Menyediakan Sarana Kesehatan

Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan pada panti sosial sangat penting, untuk memberikan pelayanan kepada para penghuninya. Terutama bagi para Lansia yang rentan terhadap penyakit, maupun kepada penghuni panti sosial lainnya.

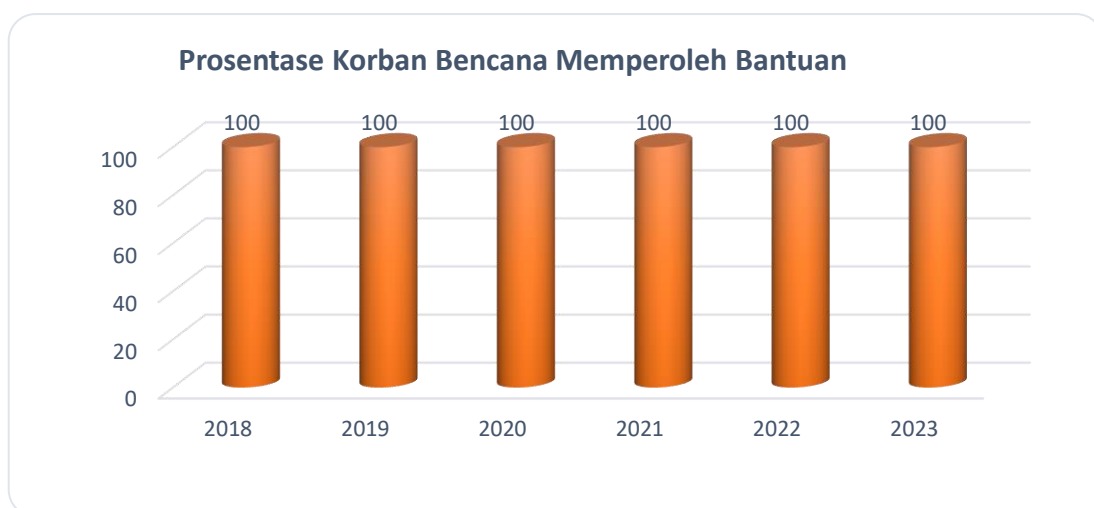


Gambar 2.92 Cakupan Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Kesehatan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Cakupan Korban Bencana Memperoleh Bantuan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Dapat dilihat dari presentase dibawah untuk bantuan bencana tersalurkan sampai dengan 100



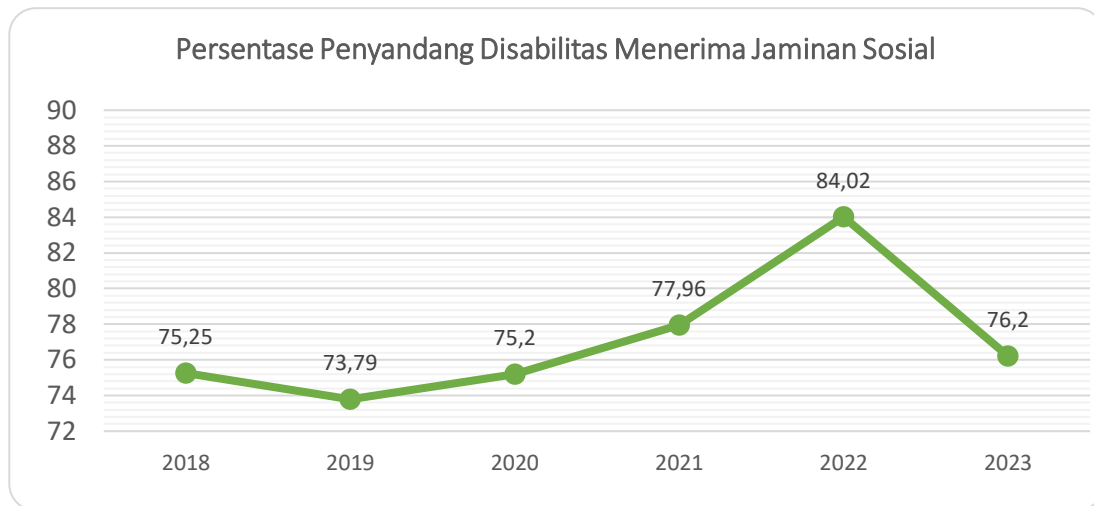
Gambar 2.93 Grafik Cakupan Korban Bencana Yang Memperoleh Bantuan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Cakupan Penyandang Cacat Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat fisik ataupun mental, selalu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Meskipun hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Karena ini maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Adapun realisasi pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan penyediaan air minum bersih, sanitasi yang layak, perumahan yang terjangkau, dan penataan lingkungan. Upaya tersebut telah membuahkan

hasil, dengan peningkatan persentase pemukiman tertata, rasio pemukiman layak huni, cakupan perumahan yang didukung PSU, dan persentase cakupan KBKS yang stabil.



Gambar 2.94 Grafik Cakupan Penyandang Cacat Yang Menerima Jaminan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

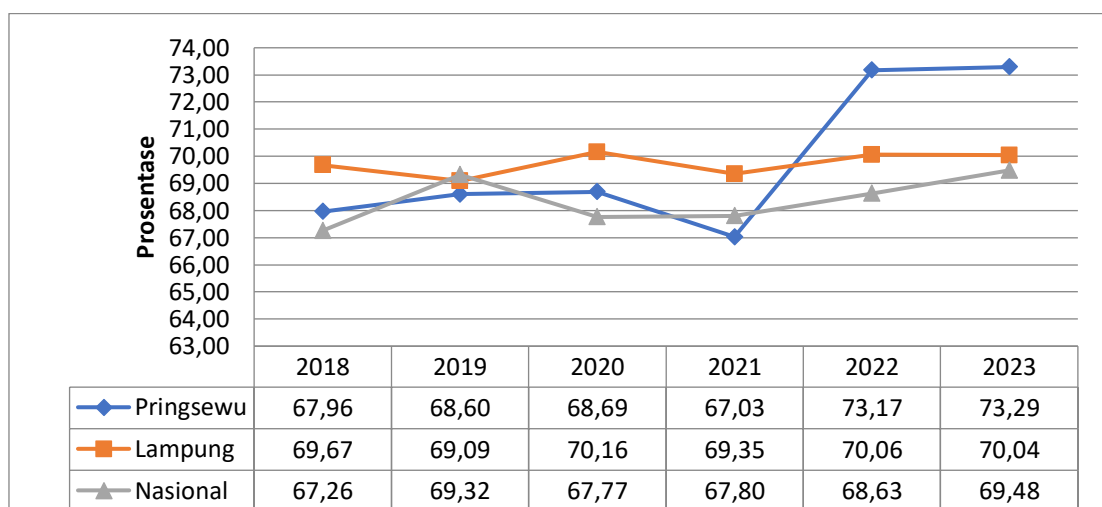
A. Ketenagakerjaan

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun kinerja pengelolaan urusan wajib tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab

seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per 1.000 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

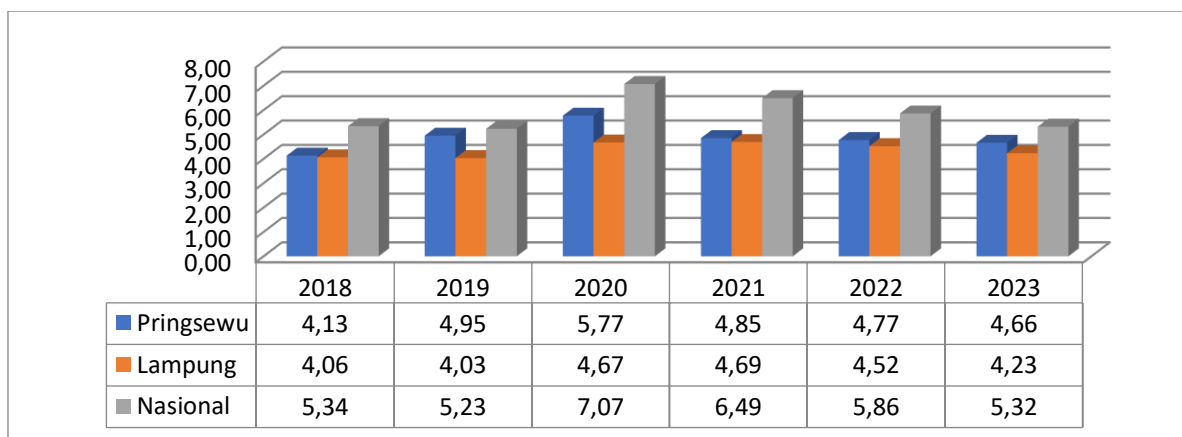


Gambar 2. 95 Grafik Perbandingan TPAK (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Ekonomi di Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan TPT yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Pemerintah daerah telah melakukan upaya yang signifikan untuk menciptakan lapangan kerja. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan TPT yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023.

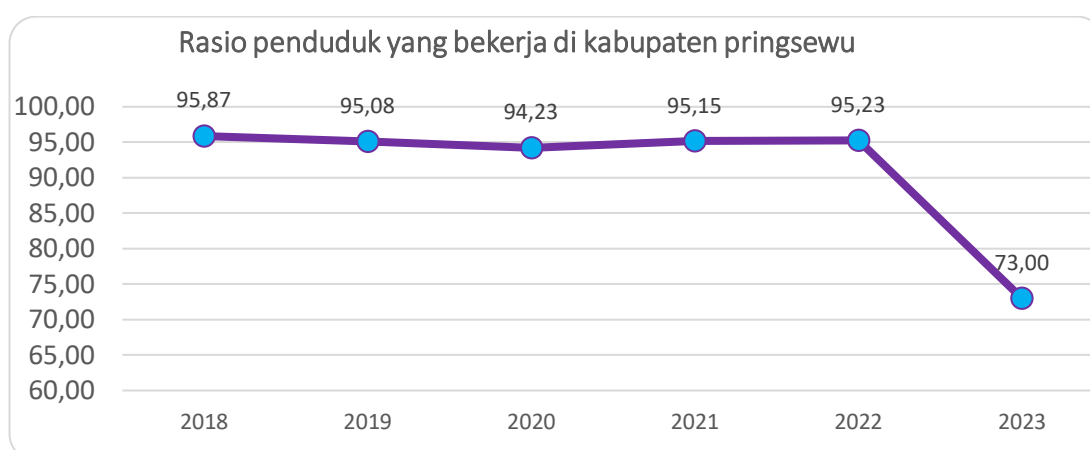


Gambar 2. 96 Grafik Perbandingan TPT (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang berada di suatu daerah. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pringsewu selengkapnya disajikan pada gambar berikut. Grafik menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam rasio penduduk yang bekerja, dari sekitar 95.87% pada tahun 2018 menjadi sekitar 73.00% pada tahun 2023.

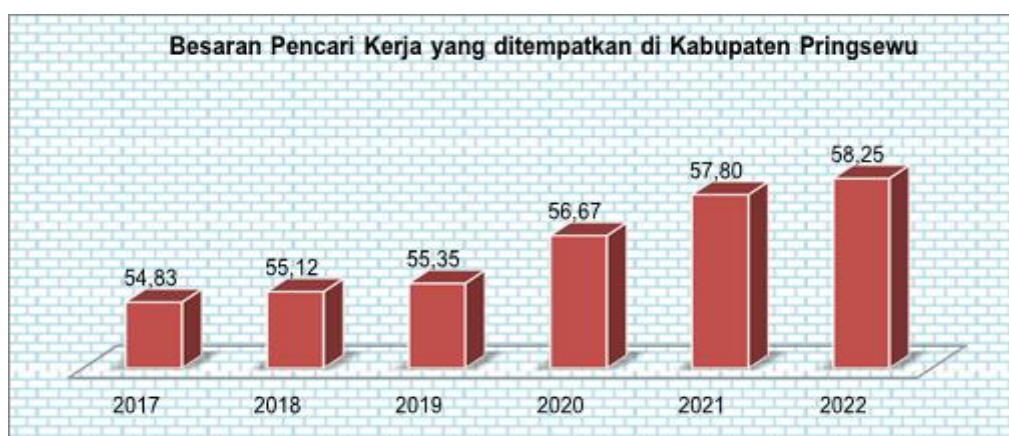


Gambar 2. 97 Grafik Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Pringsewu disajikan pada gambar berikut. Setiap tahun, ada peningkatan bertahap dalam persentase pencari kerja yang ditampung, menunjukkan upaya yang konsisten dalam menampung pencari kerja di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 2. 98 Grafik Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2023

e. Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (peserta BPJS ketenagakerjaan) dengan jumlah pekerja atau buruh di suatu wilayah. Grafik menunjukkan peningkatan persentase pekerja yang menjadi peserta Jamsostek dari 39.14% pada tahun 2017 hingga 55.30% pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020, dengan persentase meningkat dari 42.31% pada tahun 2019 menjadi 53.20%. Setelah itu, persentase peserta Jamsostek terus meningkat secara stabil hingga mencapai 55.30% pada tahun 2022.

Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 99 Pekerja Yang Menjadi Peserta Jamsostek (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2023

f. Keselamatan Tenaga Kerja

Indikator yang digunakan mengukur keselamatan dan perlindungan tenaga kerja adalah jumlah pekerja/buruh yang menerapkan K3 dengan jumlah pekerja atau buruh dalam suatu wilayah. Grafik menunjukkan persentase pekerja yang menerapkan K3 di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2017 hingga 2022. Terlihat adanya fluktuasi dengan peningkatan dari 70.15% pada tahun 2017 menjadi 76.88% pada tahun 2018, kemudian penurunan tajam ke 55.75% pada tahun 2019. Persentase kembali naik menjadi 70.05% pada tahun 2020, namun mengalami penurunan signifikan hingga 50.23% pada tahun 2021 dan 2022. Data ini mencerminkan perubahan dalam penerapan K3 di daerah tersebut selama periode tersebut. Capaian kinerja keselamatan tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 100 Grafik Persentase Pekerja Yang Menerapkan K3 di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

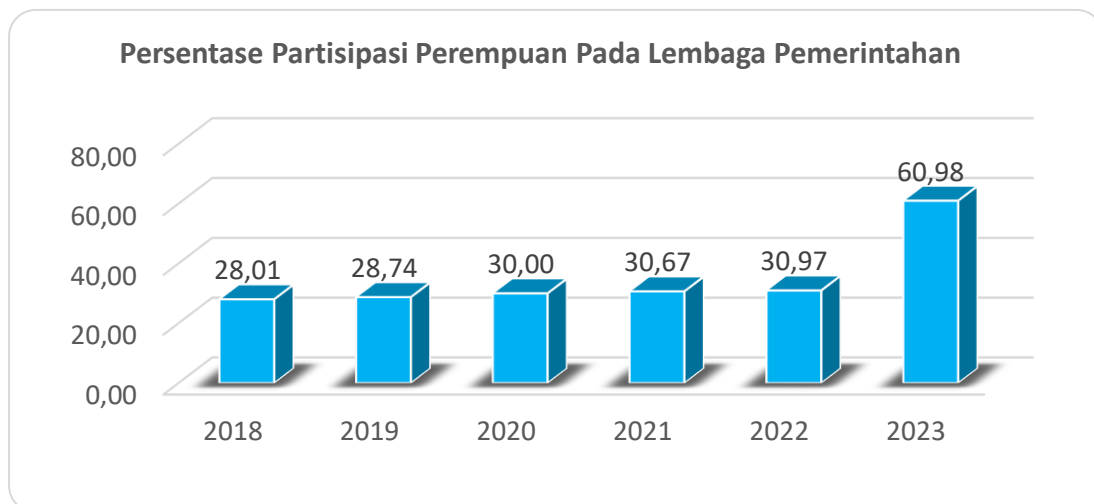
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2023

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender. Sedangkan perlindungan anak, terkait dengan upaya mendorong daerah sebagai kabupaten layak anak yang mencakup 5 klaster dan pemenuhan 31 indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah pekerja perempuan. Indikator ini mengukur proporsi keterlibatan kaum perempuan di lembaga pemerintahan sebagai cerminan dari tingkat ketimpangan gender, baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan diskriminatif, maupun yang dihasilkan dari budaya masyarakat.

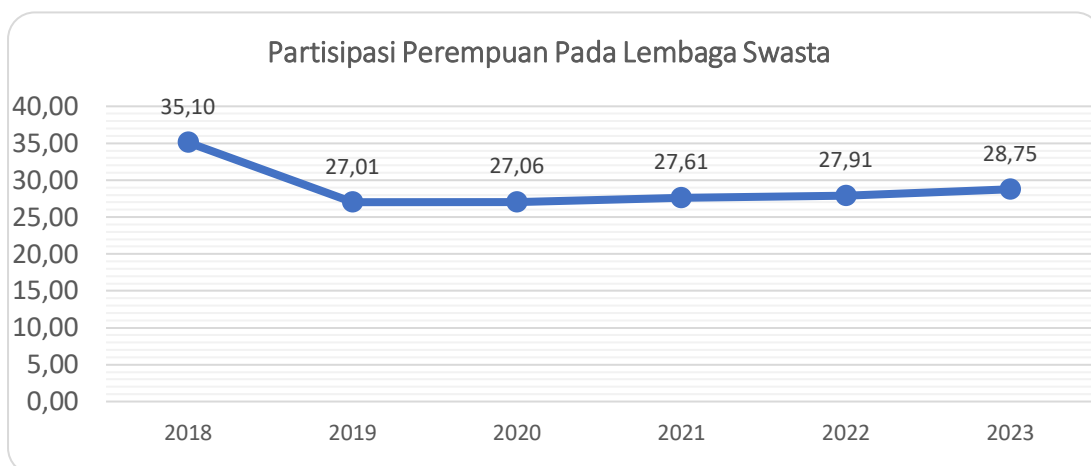


Gambar 2. 101 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Partisipasi Perempuan pada Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketimpangan gender, baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang diskriminatif, maupun yang dihasilkan dari budaya masyarakat.

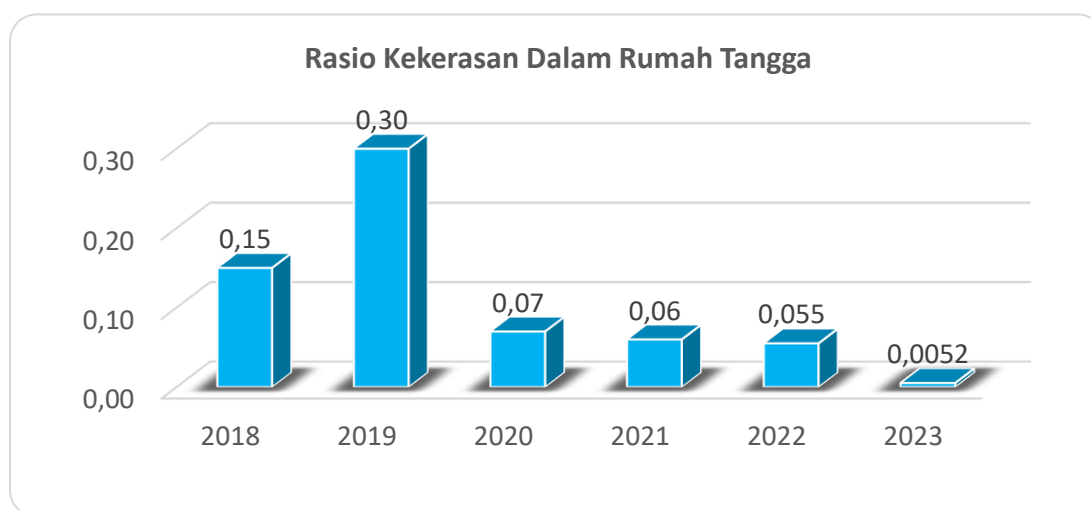


Gambar 2. 102 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Swasta di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini mengukur jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per 1.000 rumah tangga.



Gambar 2. 103 Grafik Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah perempuan yang lebih besar dari laki-laki, merupakan potensi untuk digunakan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu maka penyediaan lapangan usaha bagi wanita perlu mendapat perhatian serius dengan pertimbangan yang khusus. Grafik menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2022. Partisipasi ini mengalami peningkatan dari 38.96% pada tahun 2018 menjadi 56.94% pada tahun 2022. Terlihat adanya lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan 2021, di mana partisipasi mencapai 50.27%. Data ini mencerminkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di daerah Kabupaten Pringsewu.

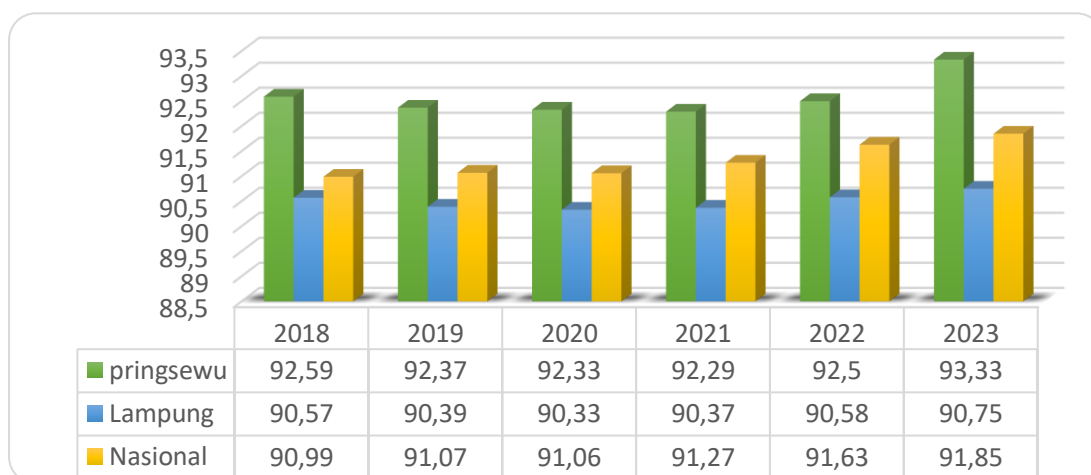


Gambar 2. 104 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Pringsewu dengan Nasional, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

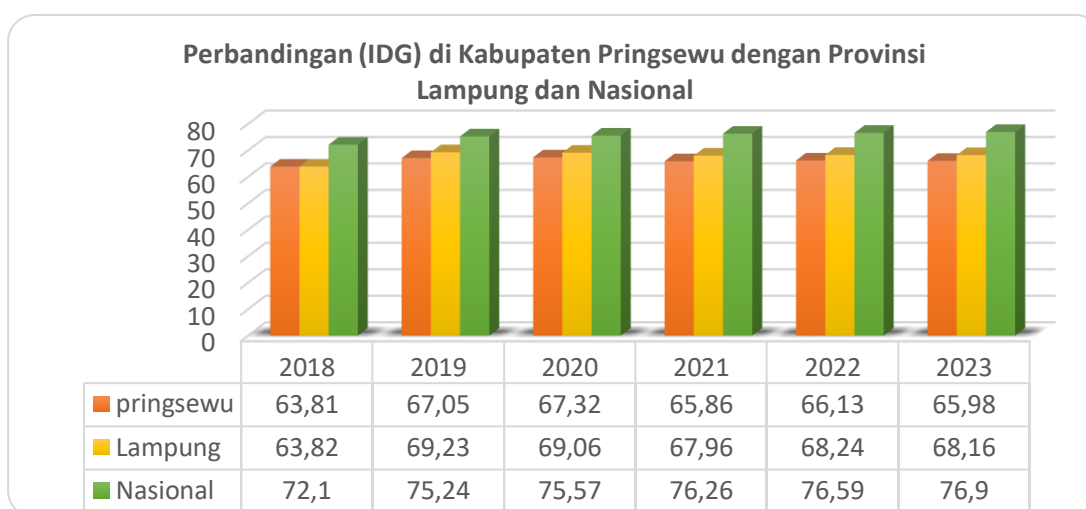


Gambar 2. 105 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG didapat dari rata-rata aritmatik indeks tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.

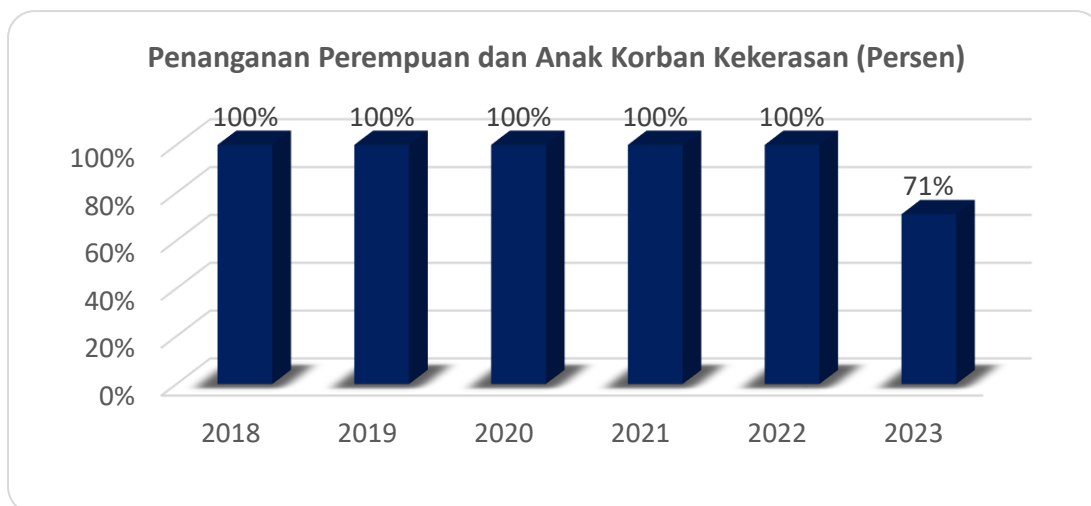


Gambar 2. 106 Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk turun langsung dalam penanganannya. Adapun cakupan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Pringsewu, sebagaimana dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 107 Grafik Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Persen) di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

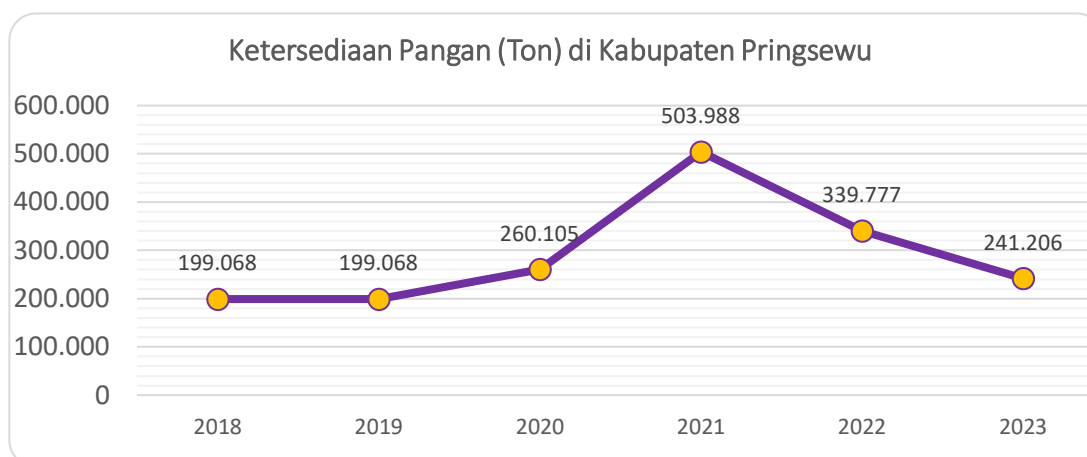
C. Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

a. Ketersediaan Pangan Utama Sektor Pertanian

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Perhitungannya dengan cara membandingkan ketersediaan pangan utama dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Grafik menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023. Ketersediaan pangan

meningkat dari sekitar 199.068 ton pada tahun 2018 menjadi sekitar 260.105 ton pada tahun 2020. Namun, setelah itu terjadi penurunan, dengan proyeksi sekitar 241.206 ton pada tahun 2023.

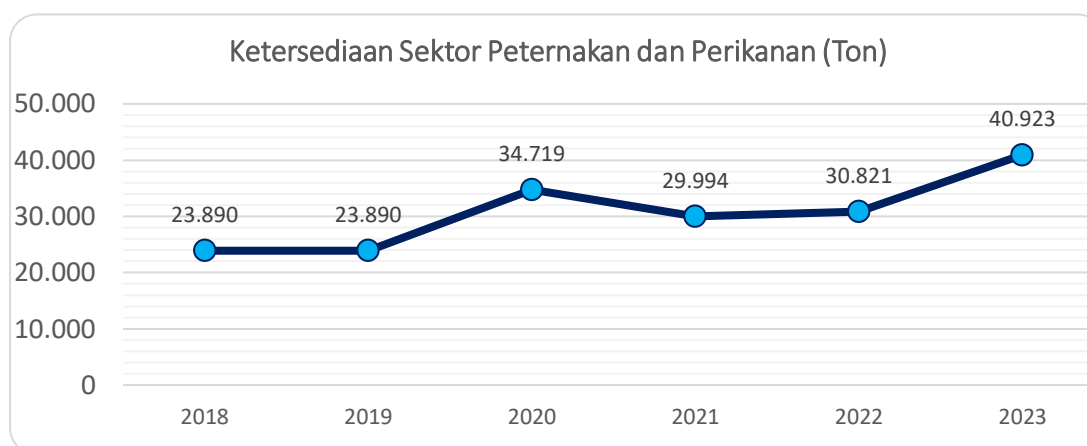


Gambar 2. 108 Ketersediaan Pangan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Ketersediaan Pangan Sektor Peternakan dan Perikanan

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan energi per kapita, meningkatkan konsumsi pangan per kapita, mengurangi penduduk yang rawan pangan, meningkatkan kemandirian pangan melalui swasembada, meningkatkan rasio lahan pertanian, dan peningkatan cadangan pangan, dan meningkatkan jangkauan distribusi.

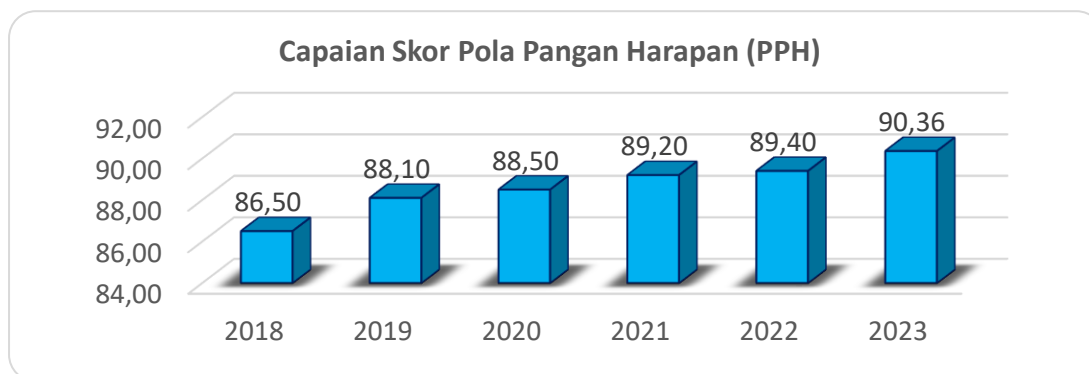


Gambar 2. 109 Grafik Ketersediaan Sektor Peternakan dan Perikanan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

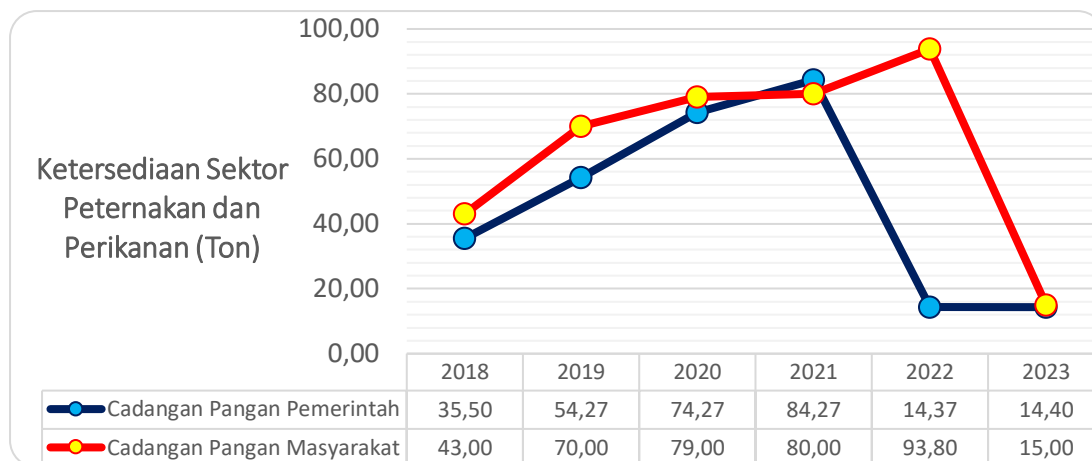


Gambar 2. 110 Grafik Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Grafik menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023, dengan dua garis yang mewakili cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah menunjukkan tren fluktuatif dengan puncak pada tahun 2021, sementara cadangan pangan masyarakat menunjukkan peningkatan keseluruhan dengan sedikit fluktuasi. Data ini memberikan wawasan tentang tren cadangan pangan di daerah Kabupaten Pringsewu selama periode tersebut, yang dapat berguna untuk analisis kebijakan atau ekonomi.



Gambar 2. 111 Grafik Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

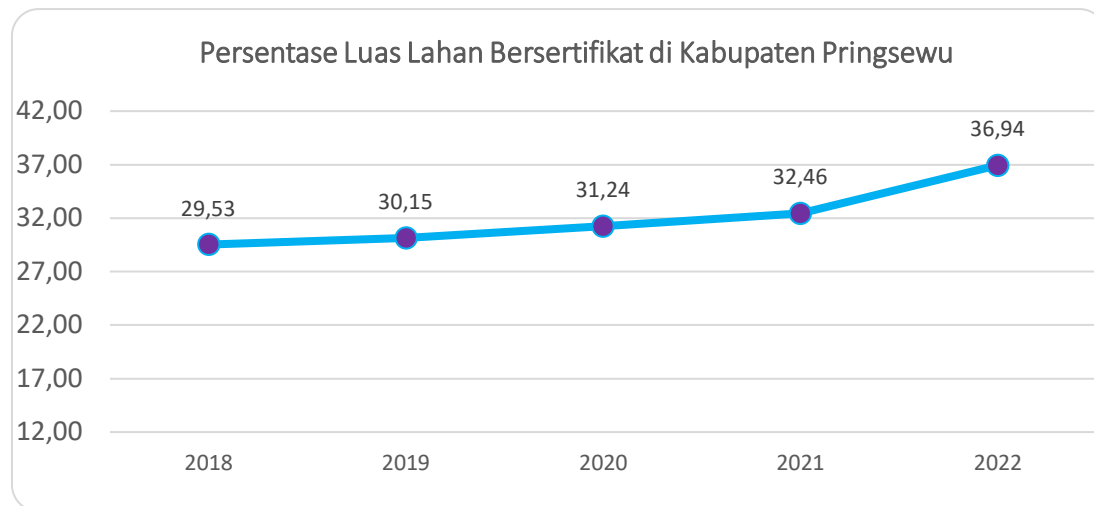
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, 2024

D. Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pelayanan umum kepada masyarakat pada urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain memberikan legalitas penguasaan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, dan pemberian izin lokasi bagi investasi atau pengembangan usaha.

a. Luas Lahan Bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Grafik menunjukkan persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2022. Persentase ini meningkat dari sekitar 29.53% pada tahun 2018 menjadi sekitar 36.94% pada tahun 2022. Tren peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam sertifikasi lahan di daerah tersebut, yang dapat berdampak positif pada kepemilikan dan hak penggunaan lahan. Peningkatan sertifikasi lahan juga dapat meningkatkan keamanan hukum bagi pemilik lahan dan mendorong investasi di sektor pertanian dan properti.



Gambar 2. 112 Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikast di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Sertifikat tanah merupakan bukti tanda hak atas tanah. Akan tetapi adakalanya seseorang menempati maupun membangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya. Karena itu maka pemerintah wajib untuk menyelesaikannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Selama enam tahun terakhir (2017 – 2022) di Kabupaten Pringsewu belum pernah terjadi sengketa kepemilikan tanah negara. Tanah negara atau tanah yang dikuasai negara dalam hal ini adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Dikuasai dalam makna ini bukan berarti negara sebagai pemilik, namun sebagai penguasa tanah yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraannya demi untuk kemakmuran masyarakat.

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau berusaha yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Kewenangan pemberian izin lokasi di Kabupaten Pringsewu telah di limpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meskipun demikian, sebelum diberikan Izin Lokasi, dilakukan

rapat pleno oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, untuk mencermati kesesuaian ruang. Jika lokasi yang dimohonkan telah sesuai dengan tata ruang, maka TKPR memberikan rekomendasi untuk diberikan Izin Lokasi. Sebaliknya bila lokasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan tata ruang, maka permohonan izin lokasi di tolak, serta diberikan alternatif lokasi lainnya. Selama enam tahun terakhir (2017 – 2022) proses pemberian Izin Lokasi selalu dapat diselesaikan 100%, baik yang diterima untuk diberikan Izin Lokasi, maupun yang ditolak karena tidak sesuai dengan tata ruang.

E. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%; dan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%. Indeks kualitas lingkungan hidup mencakup lima kategori, yaitu Sangat baik ($IKLH > 80$); Baik ($70 < IKLH \leq 80$); Cukup Baik ($60 < IKLH \leq 70$); Kurang Baik ($50 < IKLH \leq 60$); dan Waspada ($40 < IKLH \leq 50$). Adapun capaian Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

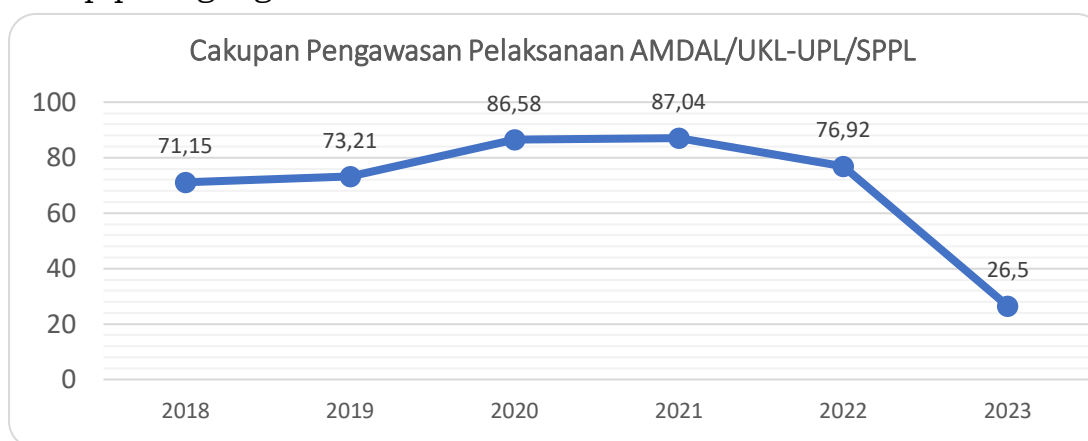
**Tabel 2. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks kualitas Air	47,14	35,71	63,34	63,33	50,65	52.22
2	Indeks kualitas Udara	80,08	86,95	47,40	86,03	86,76	88.98
3	Indeks kualitas lingkungan (Tutupan Lahan)	26,83	26,83	26,83	23,63	23,50	35.00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		48.90	47.53	48.88	63,83	59,33	63,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL/SPPL

Salah satu penyebab munculnya gangguan lingkungan hidup adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Karena itu maka setiap izin lingkungan yang telah dikeluarkan harus dilakukan pengawasan supaya tidak disalahgunakan dan dalam rangka untuk memberikan pembinaan terhadap pemegang izin tersebut.

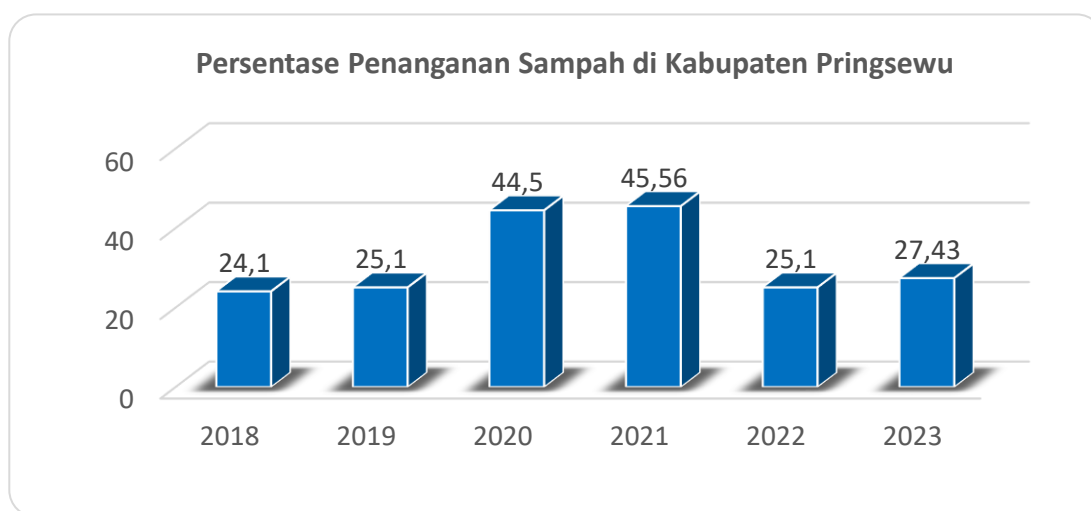


Gambar 2. 113 Grafik Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL/SPPL (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Persentase Penanganan Sampah

Sampah merupakan sumber penyakit yang banyak dijumpai di lingkungan pemukiman. Selain dapat menimbulkan bau tidak sedap, keberadaan sampah dapat menjadi salah satu indikator kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu maka diperlukan penanganan sampah yang memadai. Grafik menunjukkan persentase penanganan sampah di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023. Persentase ini meningkat dari 24.1% pada tahun 2018 menjadi sekitar 25.1% pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, tren ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Pringsewu, yang penting untuk kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pencatatan pengelolaan sampah pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) baru secara sistematis dimulai di 2019. Data pengelolaan sampah di tahun 2020 tidak tersedia dikarenakan saat itu system mengalami perawatan di saat pandemic menerpa. Pencatatan kembali normal di tahun 2021 hingga 2023 dengan terus mengalami peningkatan seiring dengan beberapa pendirian TPS 3R maupun TPST bantuan dari pemerintah pusat.



Gambar 2.114 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

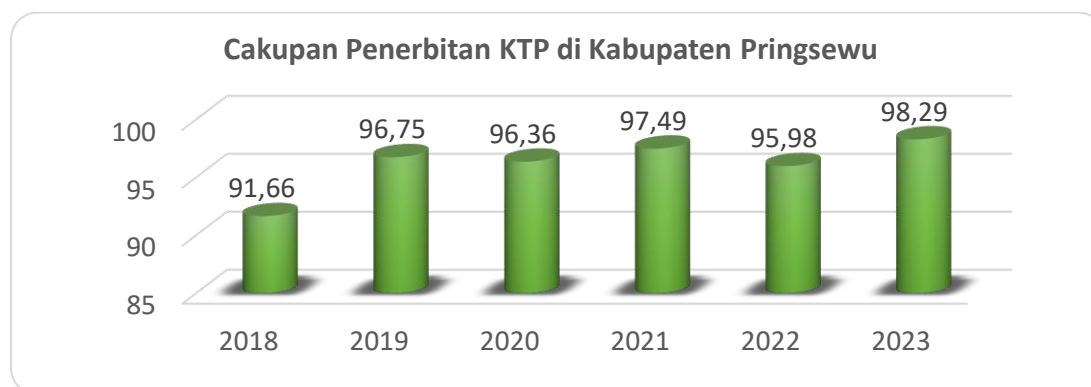
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, 2024

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan penerbitan KTP merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Grafik menunjukkan persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023. Persentase penerbitan KTP meningkat dari sekitar 85% pada tahun 2018 menjadi hampir 100% pada tahun 2023. Tren peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan pendaftaran dan dokumentasi penduduk di daerah Kabupaten Pringsewu, yang penting untuk administrasi kependudukan dan pelayanan publik.

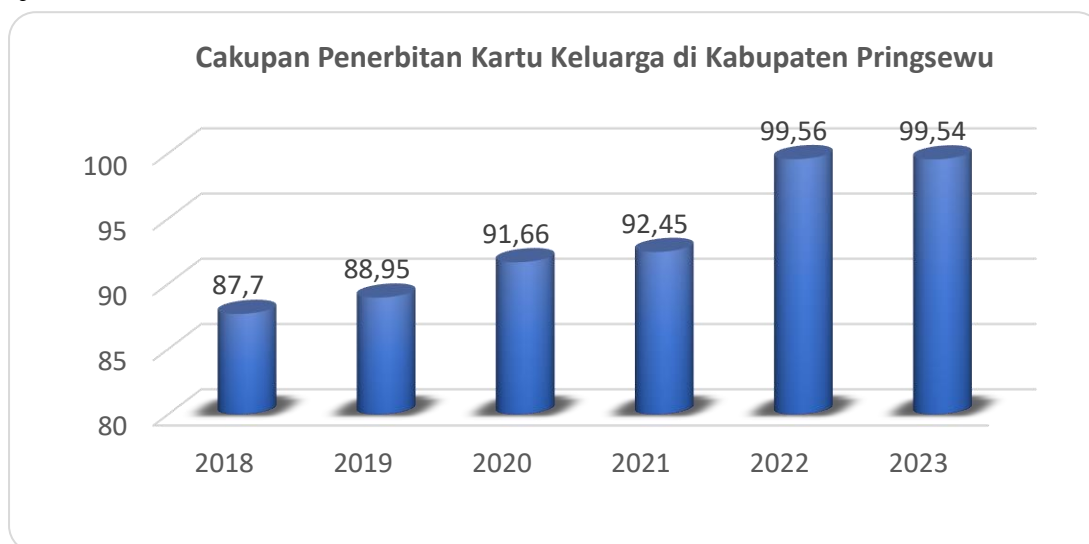


Gambar 2. 115 Grafik Cakupan Penerbitan KTP (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data susunan, hubungan serta jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan kelengkapan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

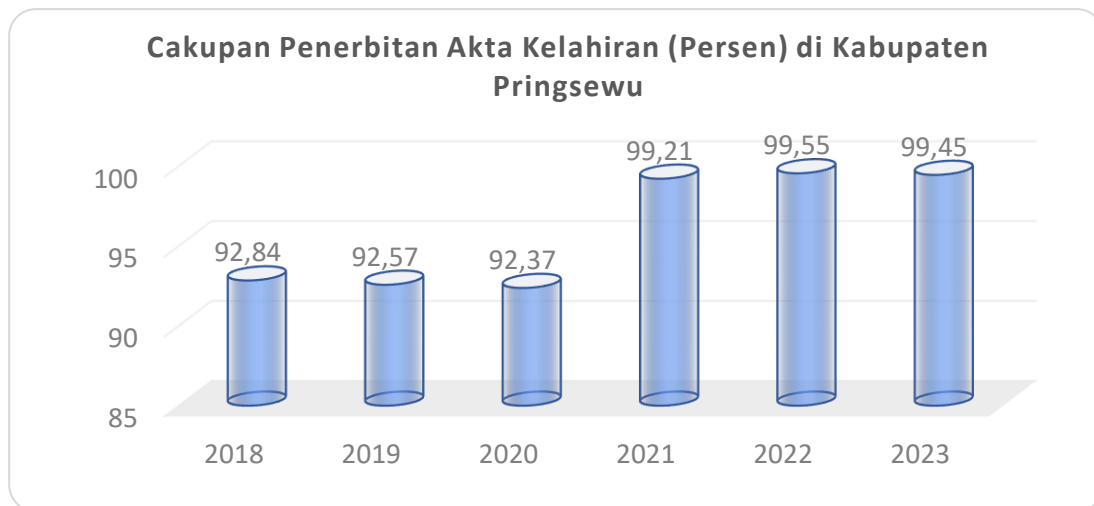


Gambar 2. 116 Grafik Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akte kelahiran merupakan perbandingan jumlah bayi lahir dalam satu tahun yang ber-akte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Adapun cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

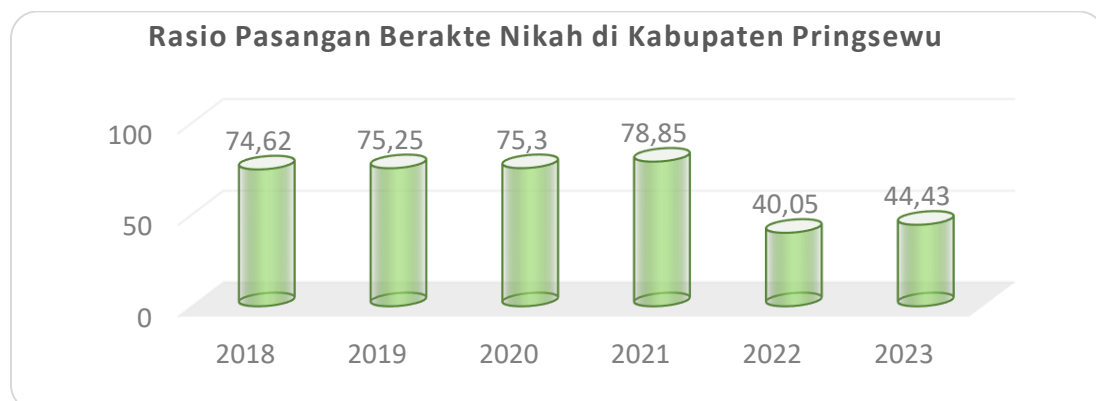


Gambar 2. 117 Grafik Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan ber-akte nikah yaitu perbandingan jumlah pasangan nikah dalam satu tahun yang ber-akte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan tata administrasi kependudukan yang baik, khususnya dalam pencatatan pernikahan, dan pelayanan daerah terhadap penduduk yang melangsungkan pernikahan di daerah tersebut.



Gambar 2. 118 Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, 2024

G. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Sementara sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan kewenangan lokal skala desa.

a. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun mencakup 5 (lima) klasifikasi, yaitu Desa Sangat Tertinggal (< 0,491), Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599), Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707), Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815), Desa Mandiri (> 0,815). Adapun capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 25 Indeks Membangun Desa di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

No.	Status Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Mandiri	1	3	6	12	19
2	Maju	19	37	64	82	82

No.	Status Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Berkembang	95	86	56	32	25
4	Tertinggal	11	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah		126	126	126	126	126

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan dalam satu tahun dibagi jumlah PKK.

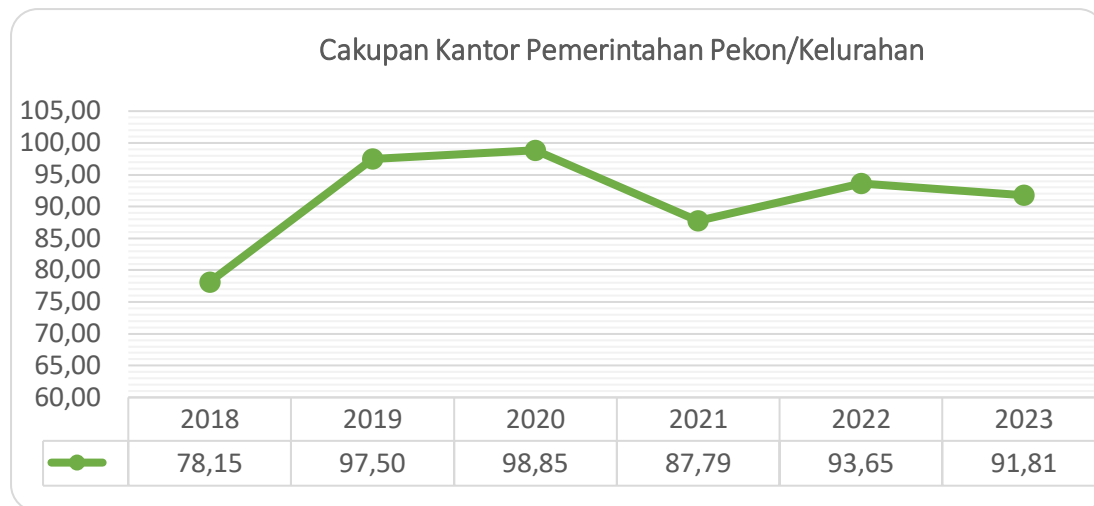
Tabel 2. 26 Kelompok Binaan dan Tingkat Keaktifan PKK di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3,50	3,50	4,00	4,20	4,50	93,50
2	Prosentase PKK aktif	77,78	78,15	79,00	81,90	82,00	93,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Pekon

Keberadaan kantor pemerintahan pekon/kelurahan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana pendukungnya.

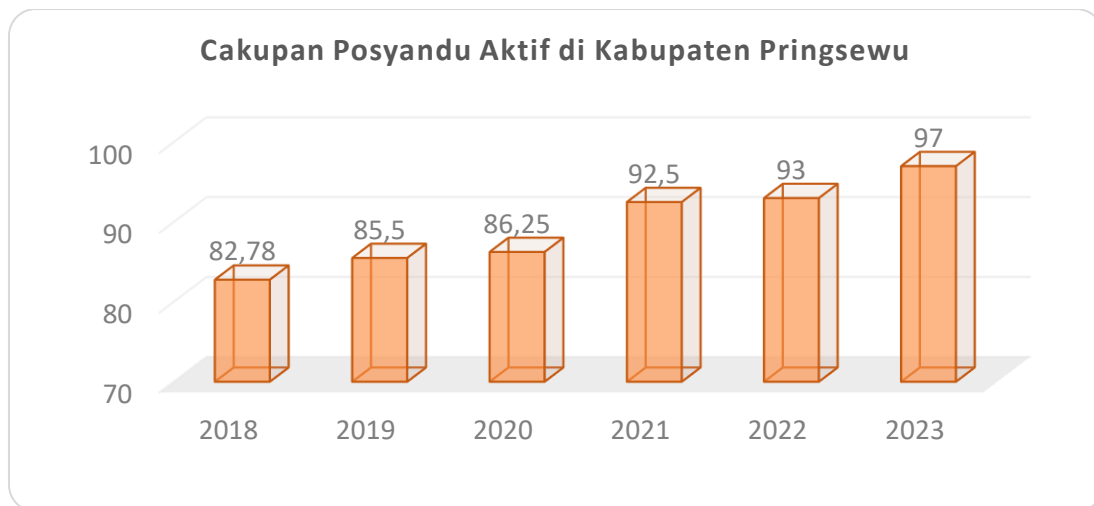


Gambar 2. 119 Grafik Cakupan Kantor Pemerintahan Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Grafik menunjukkan cakupan Posyandu aktif di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023. Persentase cakupan ini meningkat dari 82.75% pada tahun 2018 menjadi sekitar 93% pada tahun 2022, dengan proyeksi mencapai hampir 97% pada tahun 2023. Tren peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di daerah Kabupaten Pringsewu, yang penting untuk kesejahteraan dan kesehatan komunitas.

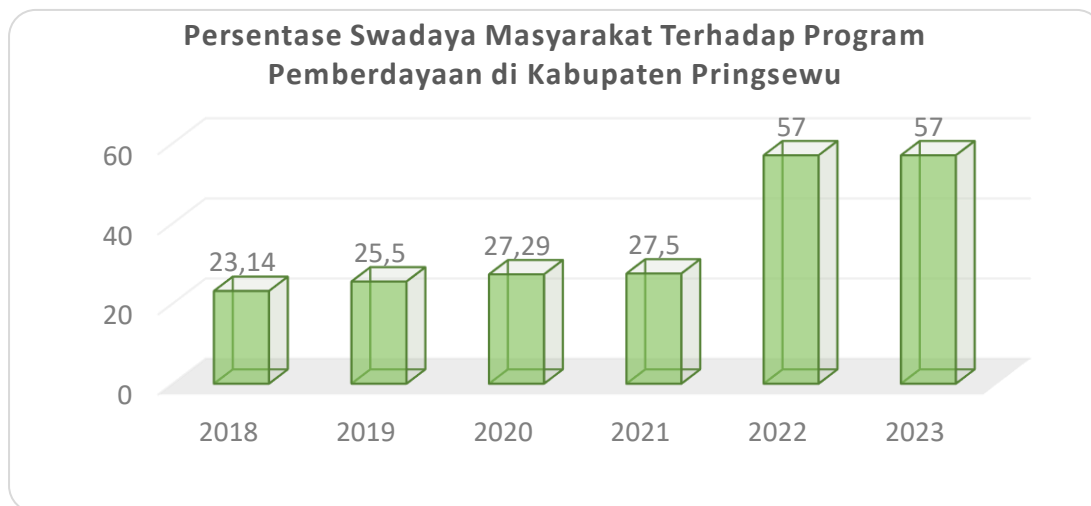


Gambar 2. 120 Grafik Cakupan Posyandu Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan bentuk partisipasi langsung dari warga masyarakat terhadap pembangunan yang di laksanakan. Indikator ini mengukur jumlah program swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat pada tahun berkenaan.



Gambar 2. 121 Grafik Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

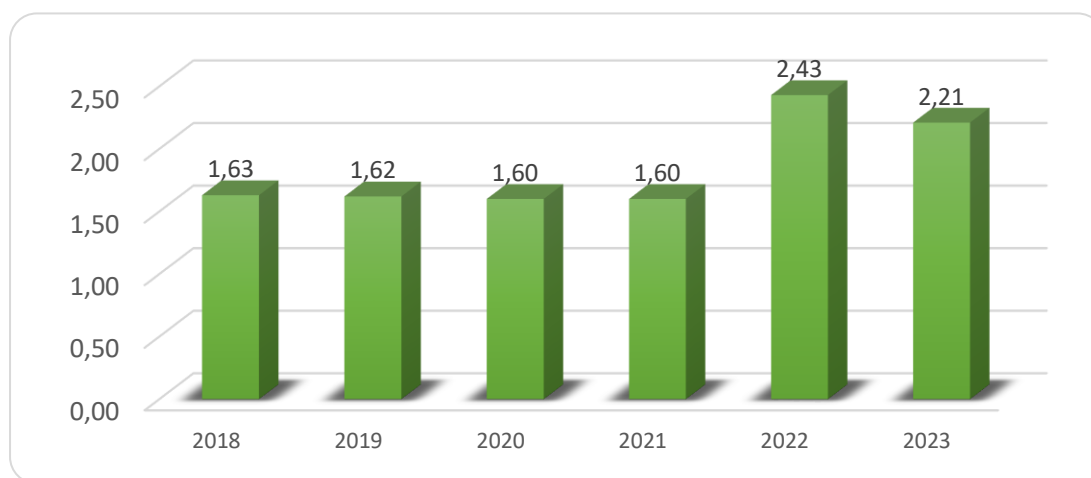
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk melalui penggiatan program Keluarga Berencana. Selain upaya pengendalian, juga dilakukan peningkatan kualitas kehidupan keluarga melalui program Keluarga Berencana, yang melibatkan suami istri untuk proaktif.

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah anak pada keluarga merupakan cerminan dari pandangan orang tuanya dalam mengatur masa depan anak. Selain itu sebagai indikator keberhasilan program Keluarga Berencana. Seperti diketahui bahwa dalam rangka untuk menekan angka kelahiran, maka telah dikeluarkan himbauan supaya setiap keluarga memiliki anak sesuai dengan kemampuan dalam mengarahkan masa depan anak yang bersangkutan. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah angka rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Angka idealnya rata-rata jumlah anak per keluarga di Indonesia adalah 2,1 anak. Nilai indikator ini mengukur jumlah anak dalam setiap keluarga yang mencerminkan tercapai atau tidaknya norma keluarga kecil bahagia dengan ukuran rata-rata jumlah anak per keluarga.

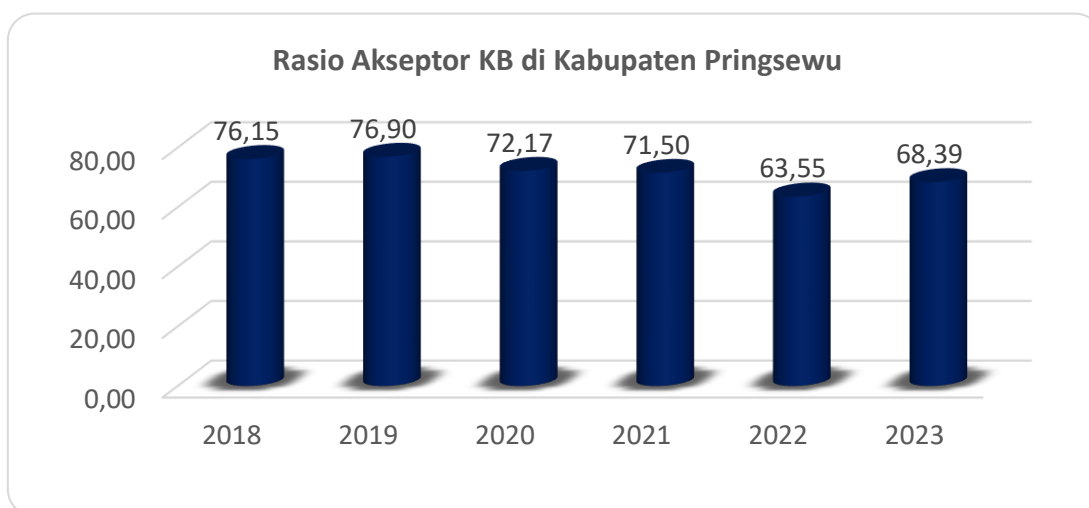


Gambar 2. 122 Grafik Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Indikator rasio akseptor KB digunakan untuk mengukur jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000. Nilai indikator ini mencerminkan keberhasilan daerah mengendalikan jumlah penduduk sehingga semakin tinggi indikator ini, maka semakin tinggi tingkat juga keberhasilan daerah dalam mengendalikan jumlah penduduk.

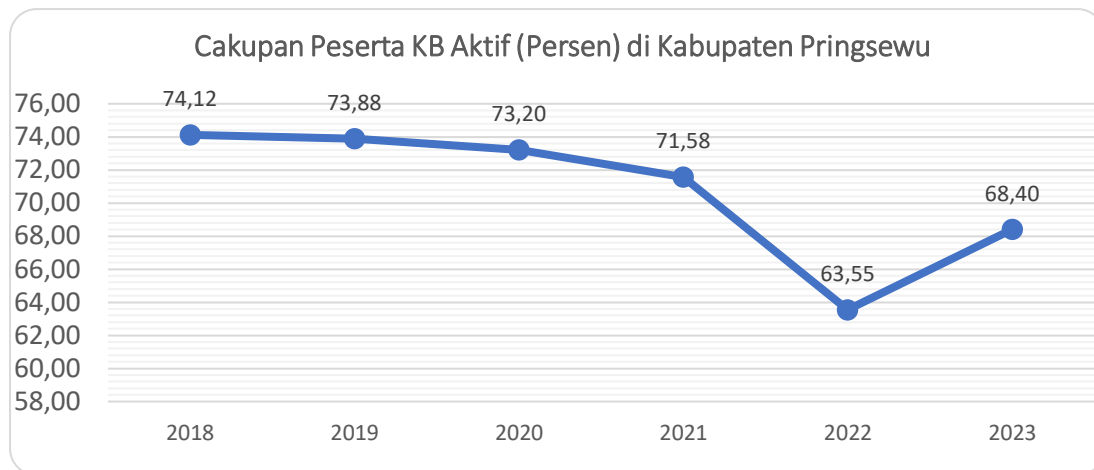


Gambar 2. 123 Grafik Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif merupakan jumlah peserta KB aktif di bandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur pada suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, Peserta KB aktif dalam hal ini adalah PUS yang salah satu pasangannya masih menggunakan atau terlindungi oleh alat kontrasepsi, dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program.

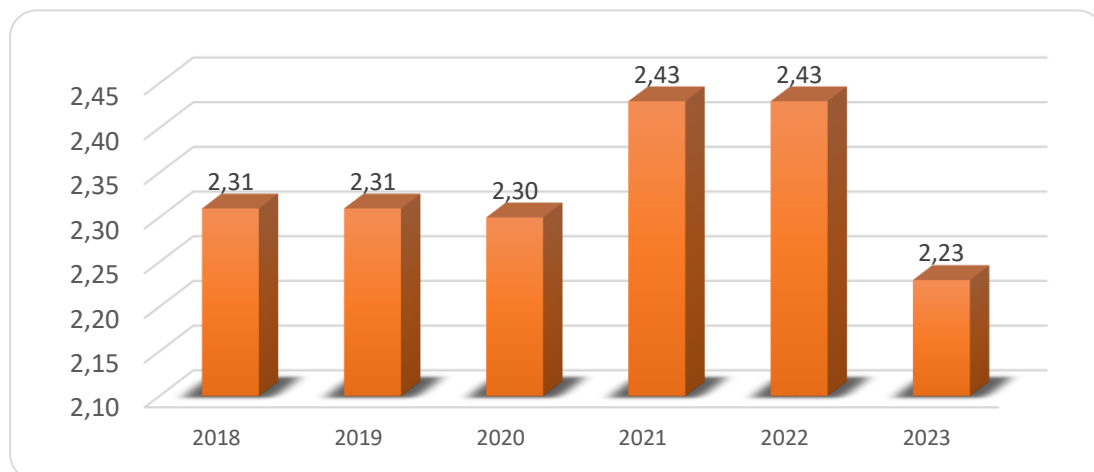


Gambar 2. 124 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Cakupan Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Indikator ini sangat penting untuk mengetahui keberhasilan daerah dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Angka standar dari TFR adalah 2,1 dimana usia produktif hanya akan melahirkan 2 anak.

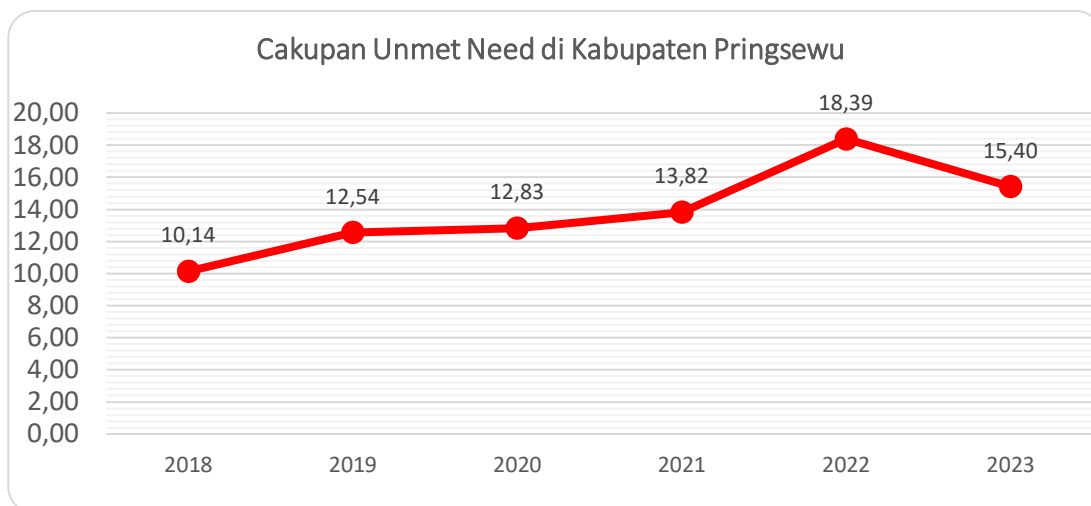


Gambar 2. 125 Grafik Cakupan Total Fertility Rate di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Cakupan *Unmet Need*

Unmet need KB adalah PUS yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. *Unmet need* ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi. Indikator ini berguna untuk mengetahui program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin rendah *unmeet need* menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

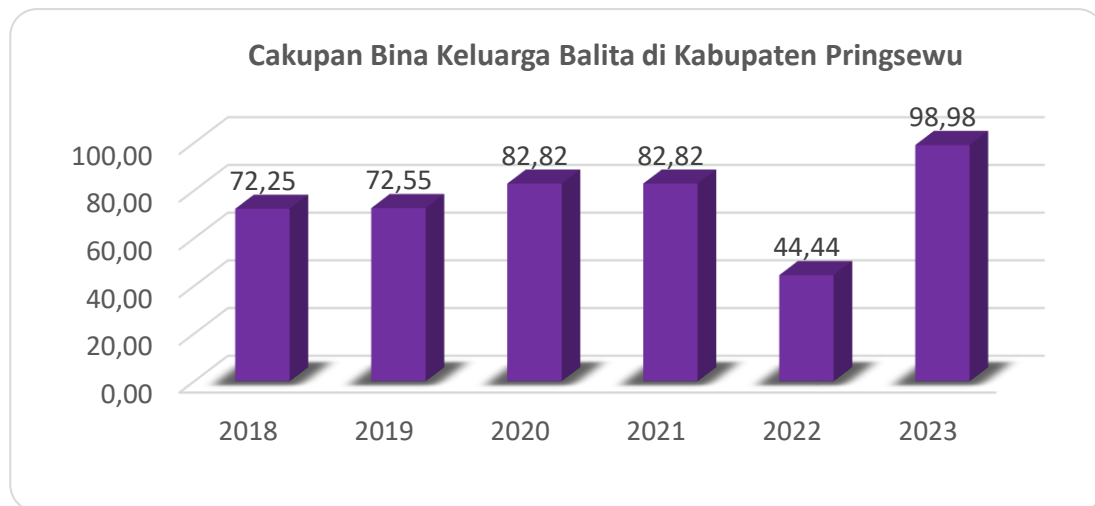


Gambar 2. 126 Grafik Cakupan Unmet Need di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita merupakan layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas demi meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian berKB bagi pasangan usia subur.

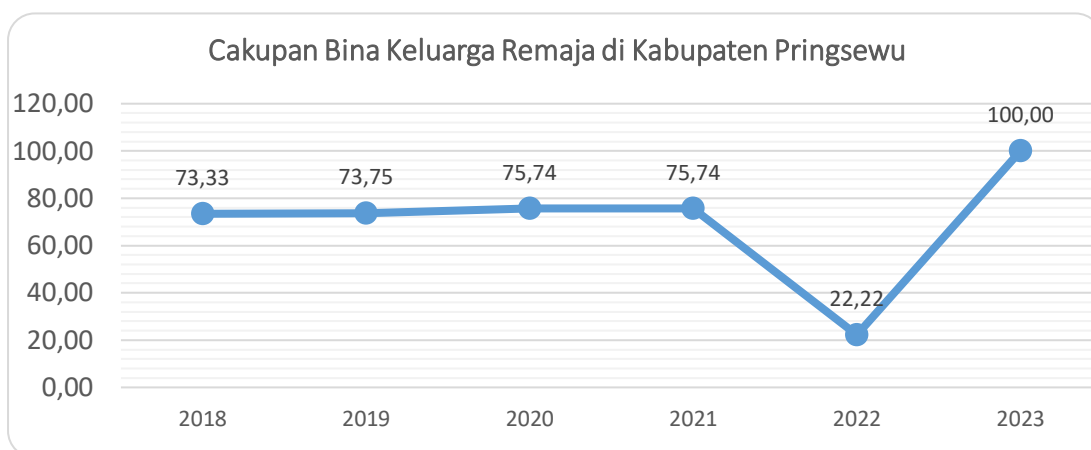


Gambar 2. 127 Grafik Cakupan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/ wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai anak remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian untuk mengikuti program KB bagi Pasangan Usia Subur.

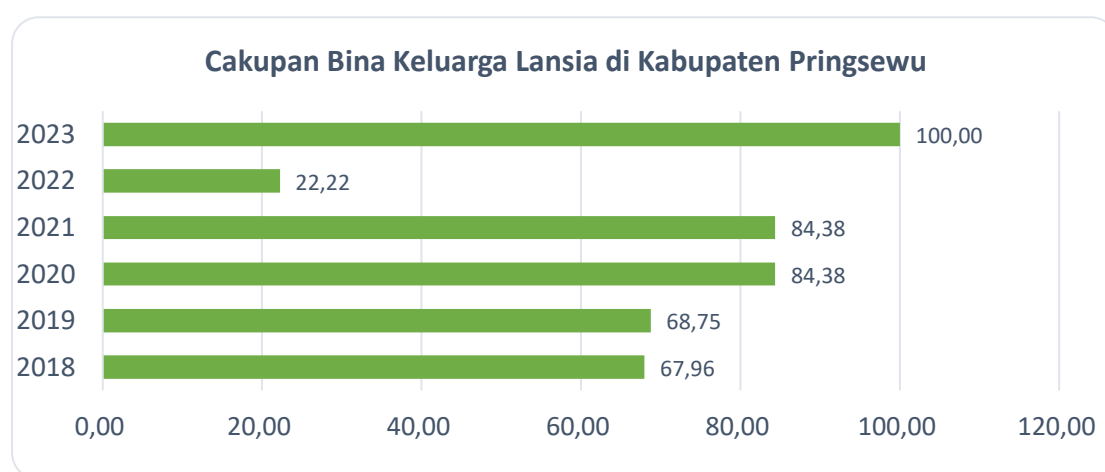


Gambar 2. 128 Grafik Cakupan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat. Pada umumnya kaum lansia mengalami beberapa masalah, seperti keterbatasan fisik, kecemasan, dan kurang percaya diri, mudah tersinggung dan perasaan kesepian. Melalui BKL, kaum lansia diberi berbagai pengetahuan dan keterampilan, sehingga masih bisa aktif berperan dalam masyarakat.



Gambar 2. 129 Grafik Cakupan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

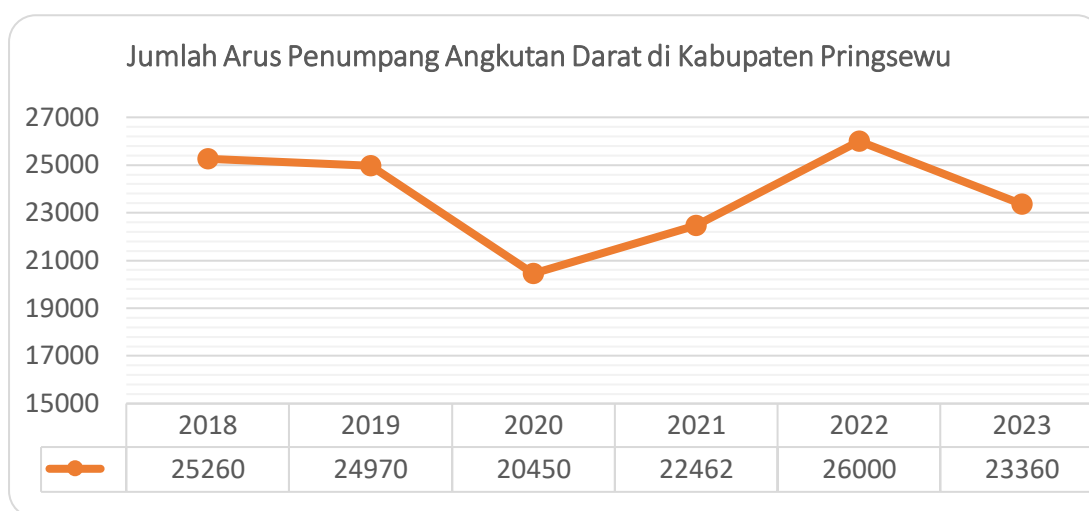
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu, 2024

I. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan perhubungan mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta untuk mendukung pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya. Ketersediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur transportasi diharapkan dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Meskipun infrastruktur perhubungan sangat penting dalam aksesibilitas namun unsur keselamatan para pengguna jalan, juga perlu mendapat perhatian serius. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan kendaraan yang dipergunakan oleh para pengendaranya.

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah penumpang bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang dari daerah mana saja yang tinggi frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin mampu suatu daerah menyediakan sarana angkutan umum, dan semakin tinggi pula daerah itu dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

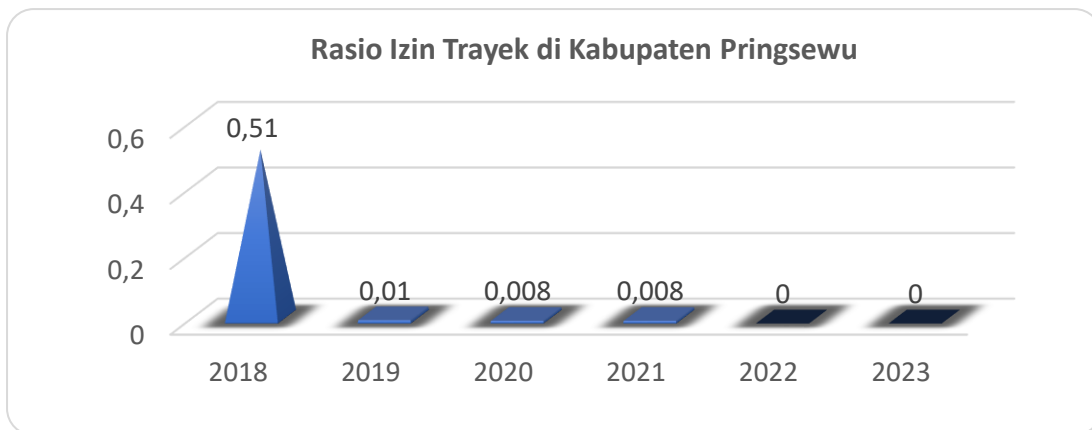


Gambar 2. 130 Grafik Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.

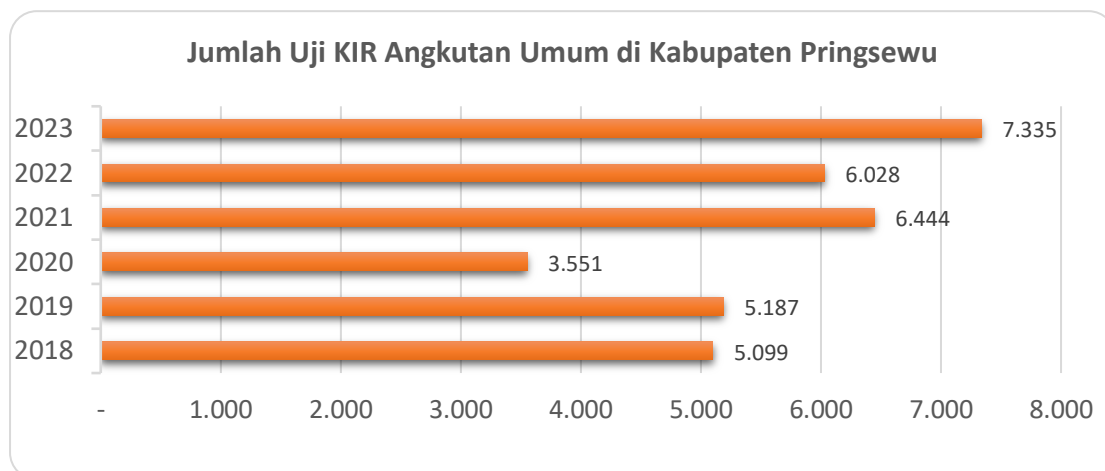


Gambar 2. 131 Grafik Rasio Izin Trayek di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Uji KIR Angkutan Umum

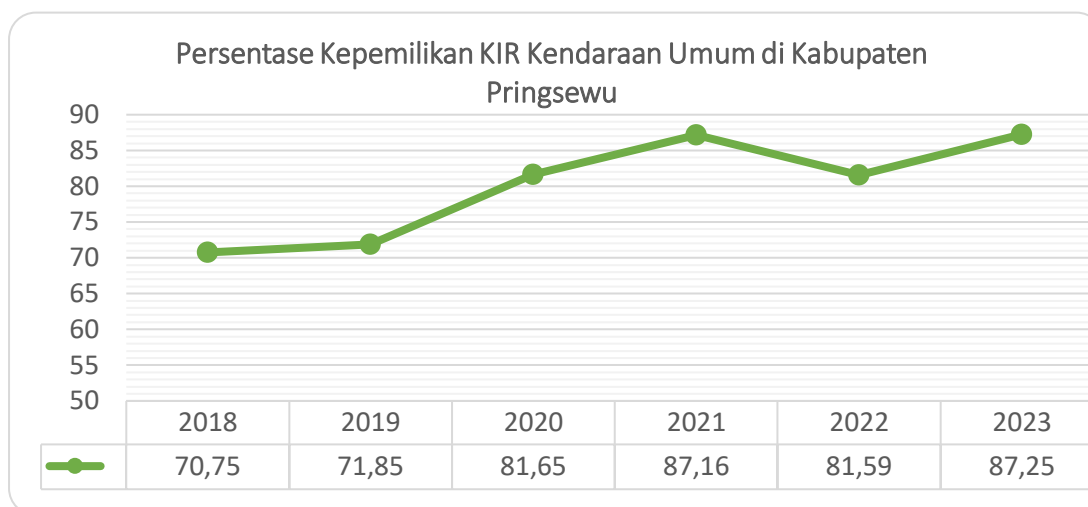
Jumlah uji KIR angkutan umum adalah jumlah uji KIR selama 1 (satu) tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menjamin kelayakan dan keamanan alat transportasi yang digunakan untuk layanan umum. Oleh karena itu semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan layanan umum, dan sekaligus semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adapun jumlah pelayanan uji KIR di Kabupaten Pringsewu adalah berikut.



Gambar 2. 132 Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, 2024

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memiliki sarana dan prasarana Uji KIR yang memadai, di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang telah memiliki kemampuan teknis. Adapun prosentase kepemilikan KIR kendaraan umum di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 133 Grafik Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Umum di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Jumlah Terminal Bus

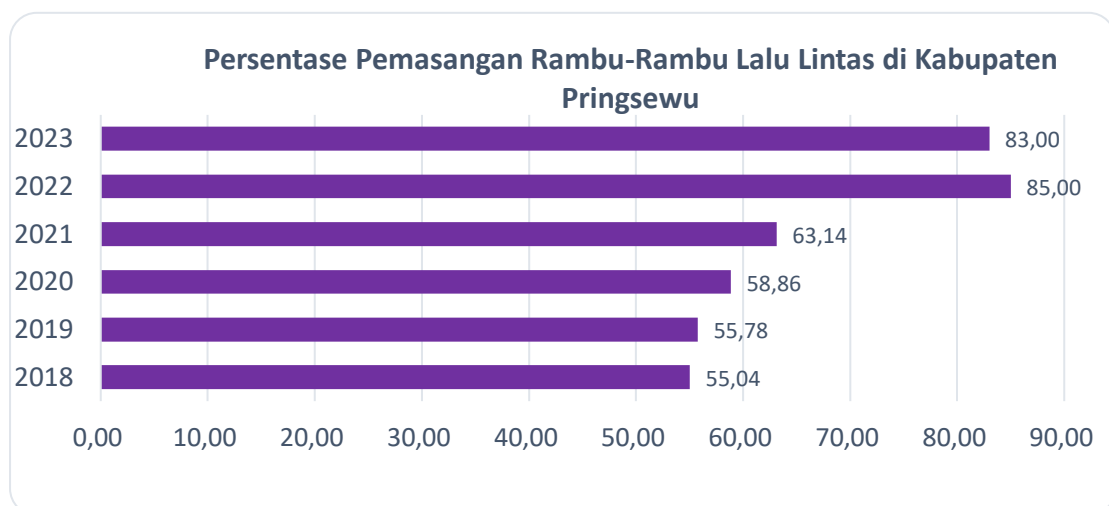
Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyediakan sarana transportasi. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap akses transportasi, dan makin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan transportasi. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, jumlah terminal di Kabupaten Pringsewu adalah 2 (dua) buah.

e. Perlengkapan Jalan Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para

pengguna jalan. Adapun prosentase ketersediaan rambu-rambu jalan kabupaten di Pringsewu, terlihat bahwa persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 55,04%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut telah meningkat hingga mencapai 83,00%.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayahnya. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang memadai dapat membantu para pengguna jalan untuk memahami peraturan dan kondisi lalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 134 Grafik Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, 2024

J. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah telah diwujudkan melalui *website* <https://www.pringsewukab.go.id>. Selanjutnya pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, juga telah memiliki *website* masing-masing, sehingga masyarakat sudah dapat melihat program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan informasi-informasi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut.

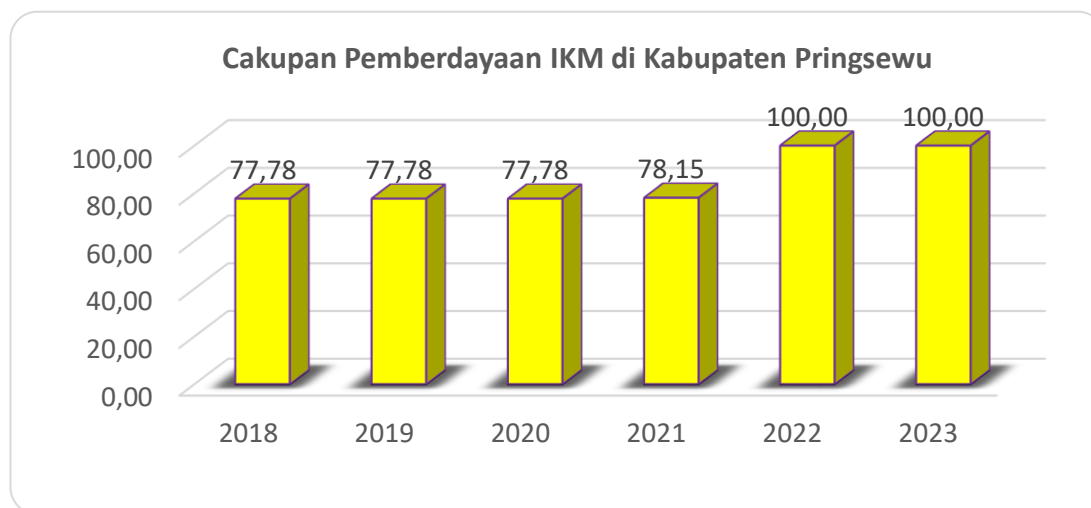
a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Telekomunikasi adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik. Indikator ini mengukur tentang jumlah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan penduduk suatu daerah berhubungan dengan penduduk di daerah lain. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin tinggi kemungkinan akses penduduk suatu daerah berhubungan dengan dunia luar, sehingga terbebas dari isolasi yang menjadi salah satu hambatan terjadinya kemajuan. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2022, semua wilayah di Kabupaten Pringsewu telah diakses jaringan telekomunikasi (100%), sehingga masyarakat dapat melakukan komunikasi melalui telepon seluler atau sejenisnya dalam rangka mendukung aktivitasnya.

b. Cakupan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Kelompok Informasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi terutama dalam menyampaikan informasi yang positif bagi masyarakat. Artinya KIM yang dibentuk oleh masyarakat harus dapat

berguna juga bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan Pemberdayaan KIM guna mengembangkannya. Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 135 Grafik Cakupan Pemberdayaan IKM di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

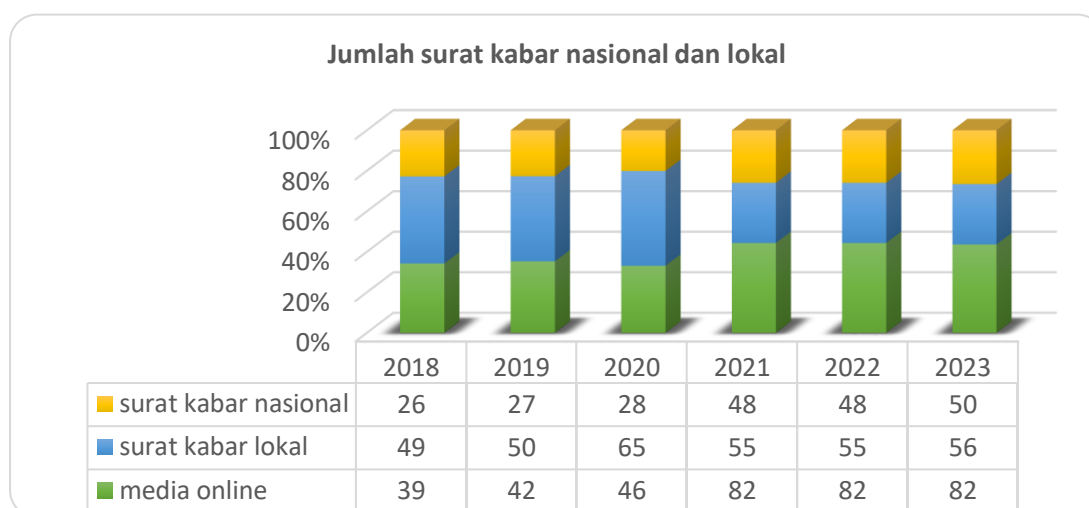
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Jumlah Penyiaran Radio

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, di Kabupaten Pringsewu telah beroperasi 4 (empat) Stasiun Radio. Dari keempat stasiun radio tersebut, sebanyak 3 (tiga) stasiun radio milik swasta dan 1 (satu) stasiun radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Ketiga stasiun radio milik swasta adalah 93.3MHz Sabaputra Pringsewu; 106.3MHz Saburai FM Pringsewu; dan 100,8MHz Radio Swara Dwi Amanda. Sedangkan stasiun radio milik pemerintah daerah adalah 107,2MHz Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

d. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang Masuk ke Daerah

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan, berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan, dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/ lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional/lokal yang masuk daerah. Selain surat kabar cetak, di Kabupaten Pringsewu juga berkembang media online yang sangat membantu dalam menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Adapun perkembangan surat kabar cetak lokal dan nasional serta online yang masuk ke Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



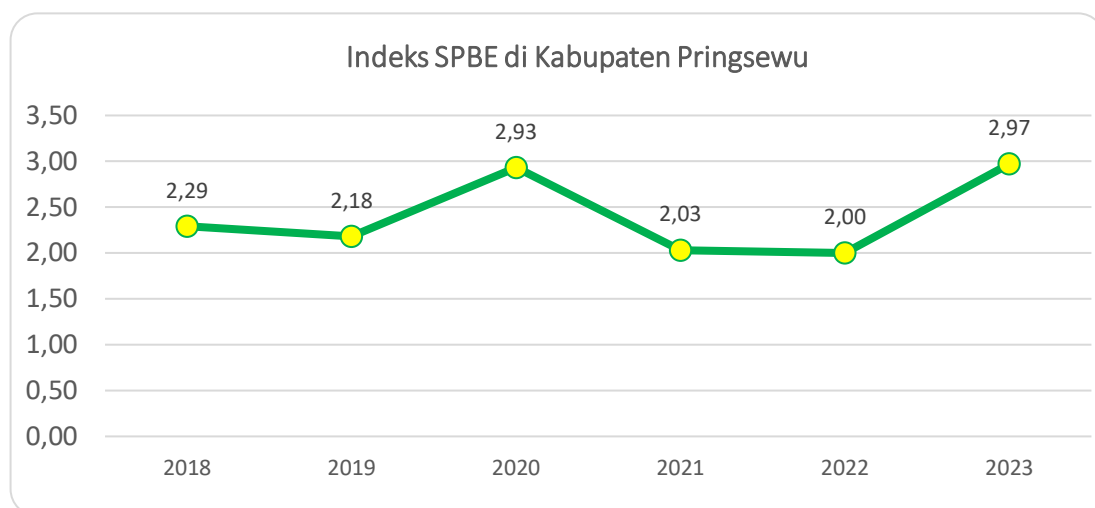
Gambar 2. 136 Grafik Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan

penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Dengan diterapkannya SPBE, diharapkan daerah (a) memiliki birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis dan inovatif; (b) pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah di akses; (c) inovasi TIK yang efektif, efisien dan terintegrasi, dan (d) SDM yang memiliki kepemimpinan (kolaboratif, inovatif dan kompeten). Dari hasil penilaian SPBE di setiap daerah, Pemerintah memberikan predikat Indeks SPBE kedalam 5 (lima) kategori, yaitu Memuaskan (4,2 – 5,0); Sangat Baik (3,5 - < 4,2); Baik (2,6 - < 3,5); Cukup (1,8 - < 2,6); dan kurang (<1,8). Adapun capaian Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 137 Grafik Indeks SPBE di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

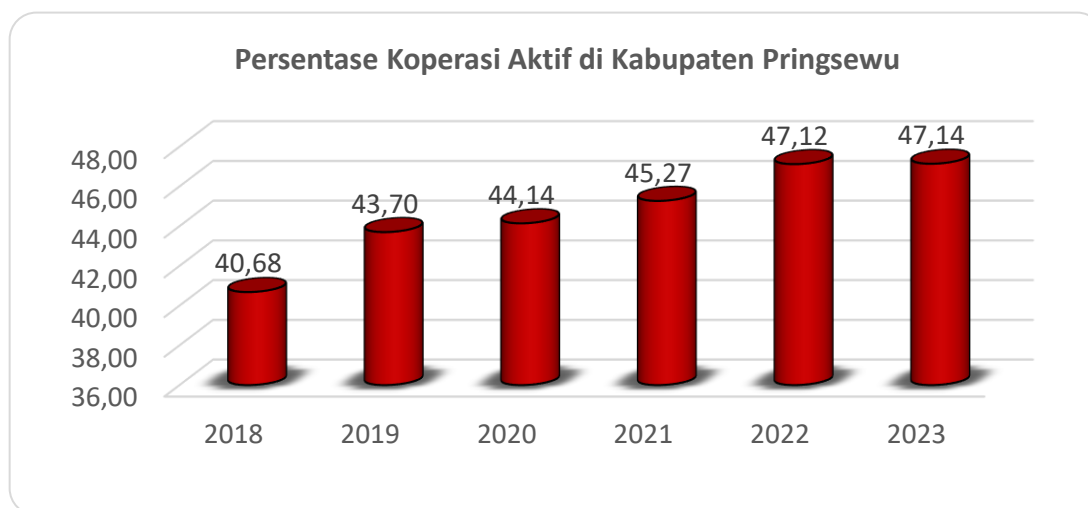
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, 2024

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran serta dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Beberapa capaian indikator dalam urusan wajib ini adalah sebagai berikut.

a. Persentase Koperasi yang Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi secara partisipatif bagi penduduk di daerah tersebut.

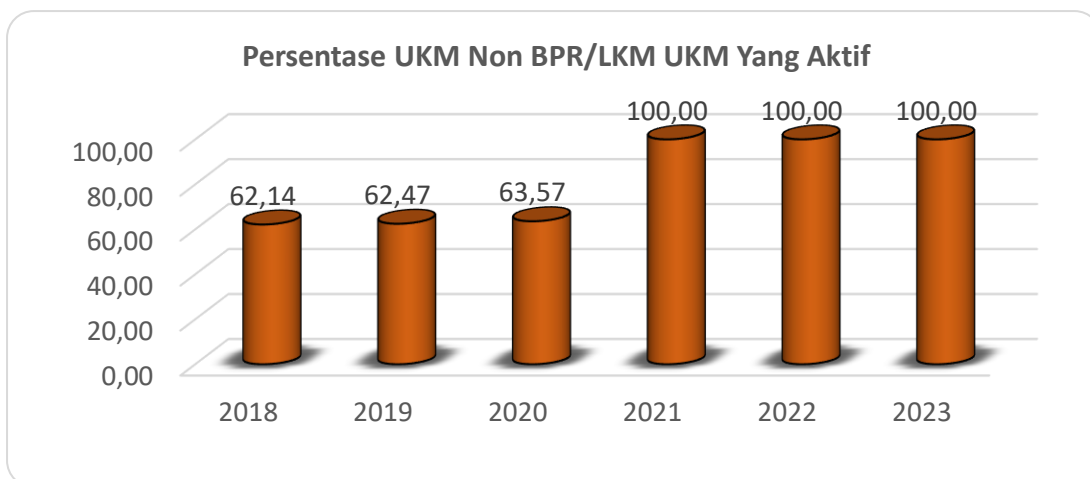


Gambar 2. 138 Grafik Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Prosentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah terjadi perubahan penggolongan kriteria usaha kecil menengah, dimana klasifikasi usaha kecil dan usaha menengah adalah kriteria UKM yang permodalannya pada kisaran 1 s.d 10 milyar rupiah, atau penghasilan pertahun 2 s.d 50 milyar. Jumlah UKM non BPR/LKM yaitu jumlah UKM non BPR/LKM yang aktif.

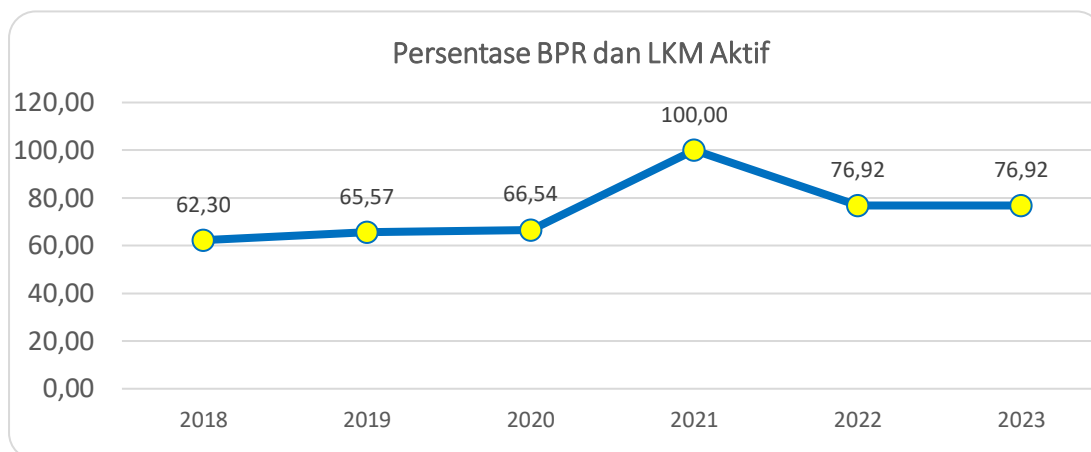


Gambar 2. 139 Grafik Persentase UKM Non BPR/LKM UKM Yang Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Prosentase BPR dan LKM Aktif

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah BPD dan LKM di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

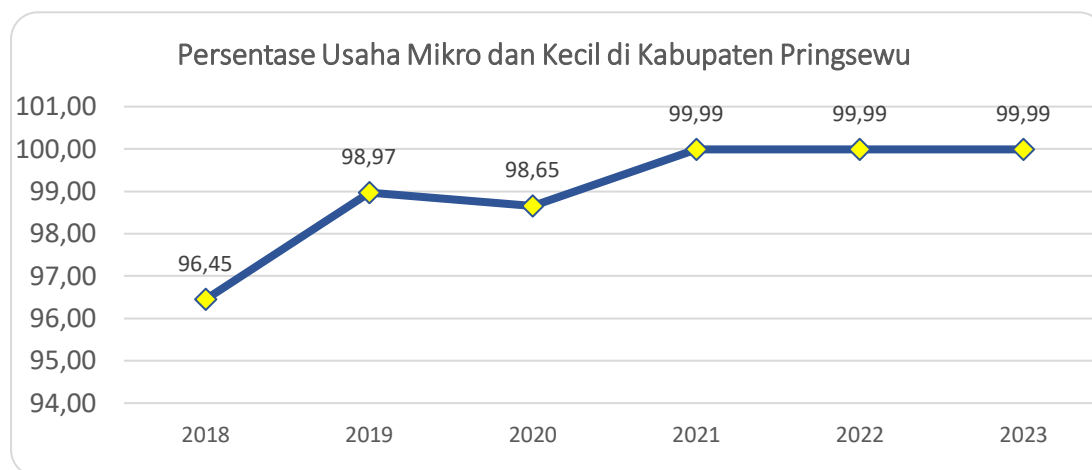


Gambar 2. 140 Grafik Persentase BPR dan LKM Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Prosentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal sama dengan/kurang dari 1 (satu) milyar diluar tanah dan bangunan atau memiliki penjualan per tahun sama dengan/dibawah 2 (dua) milyar. Sedangkan usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil yaitu memiliki modal 1 s.d 5 milyar diluar tanah dan bangunan dan penjualan pertahun 2 s.d 15 milyar. Adapun prosentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pringsewu dibandingkan dengan jumlah UMKM, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 141 Grafik Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2024

L. Penanaman Modal

Pengelolaan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP). Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN, dan

pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Selain itu juga ditunjukkan melalui indikator dalam penyelenggaraan proses perizinan berusaha.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Jumlah investor tertinggi tercatat pada tahun 2018 dengan 122 investor. Pada tahun 2019, jumlah investor mengalami penurunan hingga menjadi 88 investor. Namun, pada tahun 2020, jumlah investor kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 93 investor. Pada tahun 2021, jumlah investor kembali mengalami penurunan hingga menjadi 83 investor. Pada tahun 2022, jumlah investor kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 95 investor.

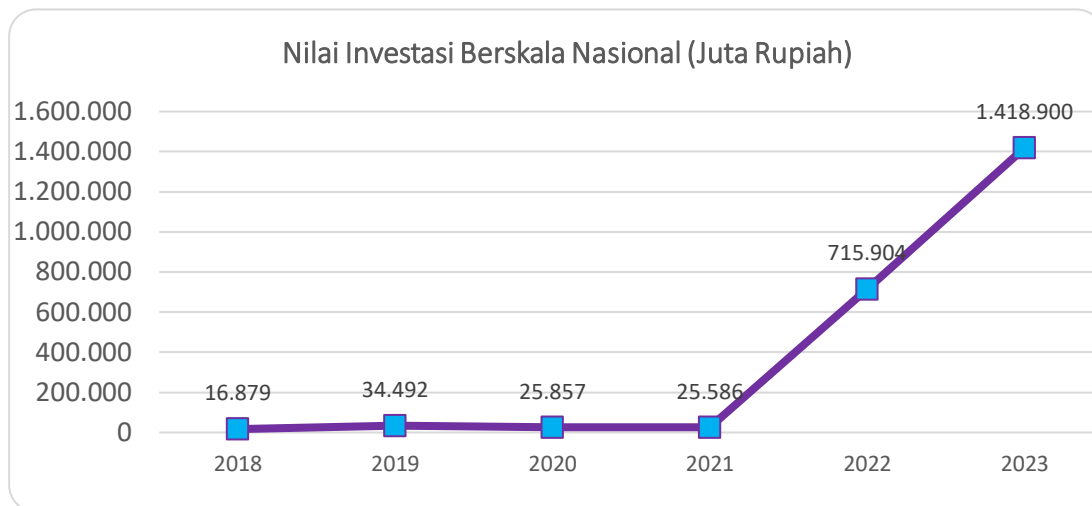


Gambar 2. 142 Grafik Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, 2023

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Indikator ini mencerminkan daya tarik suatu daerah bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah untuk menarik investor.



Gambar 2. 143 Grafik Nilai Investasi Berskala Nasional (Juta Rupiah) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMDN/PMA

Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah seluruh tenaga kerja yang ada. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi yang terealisasi pada suatu tahun. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN tertinggi tercatat pada tahun 2014 dengan 27,12%. Pada tahun 2015, rasio daya serap tenaga kerja PMDN mengalami penurunan hingga menjadi 22,48%. Pada tahun 2016, rasio daya serap tenaga kerja PMDN kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 24,49%. Pada tahun 2017, rasio daya serap tenaga kerja PMDN kembali mengalami penurunan hingga menjadi 23,76%. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja PMDN

kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 24,92%. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja PMDN mengalami penurunan hingga menjadi 23,87%. Pada tahun 2020, rasio daya serap tenaga kerja PMDN kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 24,69%. Pada tahun 2021, rasio daya serap tenaga kerja PMDN kembali mengalami penurunan hingga menjadi 24,13%. Pada tahun 2022, rasio daya serap tenaga kerja PMDN kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 24,44%.

Rasio daya serap tenaga kerja PMA tertinggi tercatat pada tahun 2011 dengan 13,71%. Pada tahun 2012, rasio daya serap tenaga kerja PMA mengalami penurunan hingga menjadi 8,40%. Pada tahun 2013, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 10,20%. Pada tahun 2014, rasio daya serap tenaga kerja PMA mengalami penurunan hingga menjadi 7,71%. Pada tahun 2015, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 8,88%. Pada tahun 2016, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami penurunan hingga menjadi 7,91%. Pada tahun 2017, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 8,07%. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami penurunan hingga menjadi 7,32%. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 7,59%. Pada tahun 2020, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami penurunan hingga menjadi 7,28%. Pada tahun 2021, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 7,41%. Pada tahun 2022, rasio daya serap tenaga kerja PMA kembali mengalami penurunan hingga menjadi 7,12%.

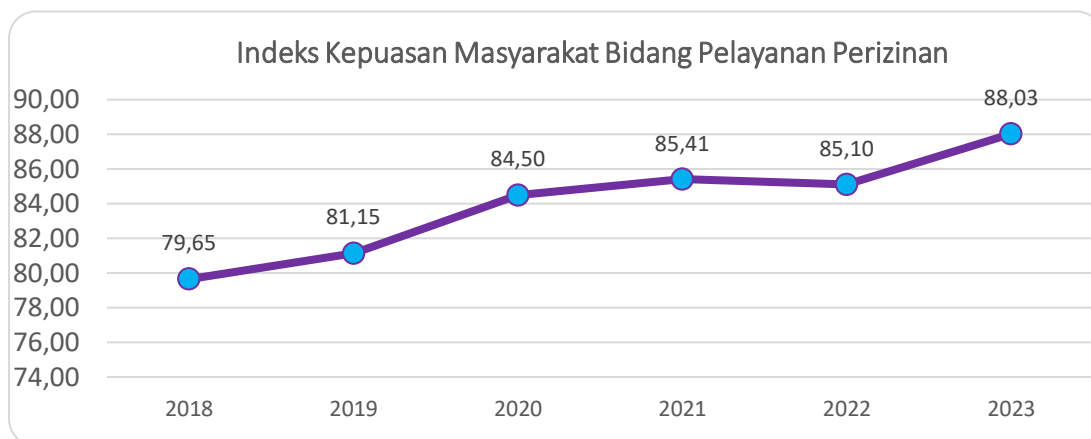


Gambar 2. 144 Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN dan PMA di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, 2023

d. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ruang lingkup subyek yang di survei adalah masyarakat yang telah menerima pelayanan dalam mengurus perizinan dan non perizinan berusaha dari Dinas PM PTSP, berdasarkan sampel yang telah ditentukan.



Gambar 2. 145 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, 2024

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan serta kebangsaan, Sedangkan pembangunan bidang olahraga lebih diposisikan pada motivasi dan memfasilitasi masyarakat supaya menjadi gaya hidup, yang pada akhirnya dapat berprestasi.

a. Prosentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Presentase kegiatan pemuda yang aktif, dihitung dengan membandingkan antara jumlah organisasi pemuda yang terdaftar dengan jumlah organisasi pemuda yang telah melakukan kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

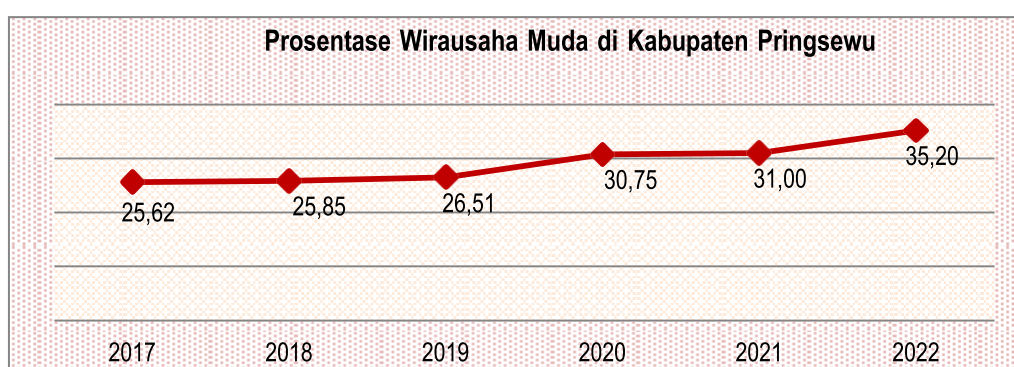


Gambar 2. 146 Grafik Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Prosentase Wirausaha Muda

Secara harfiah, makna dari kata 'wirausaha' adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga dalam mengatur permodalan serta pemasarannya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa prosentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat di Kabupaten Pringsewu terus meningkat dari 72,00% pada tahun 2018 menjadi 88,00% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan sanitasi di kabupaten tersebut.

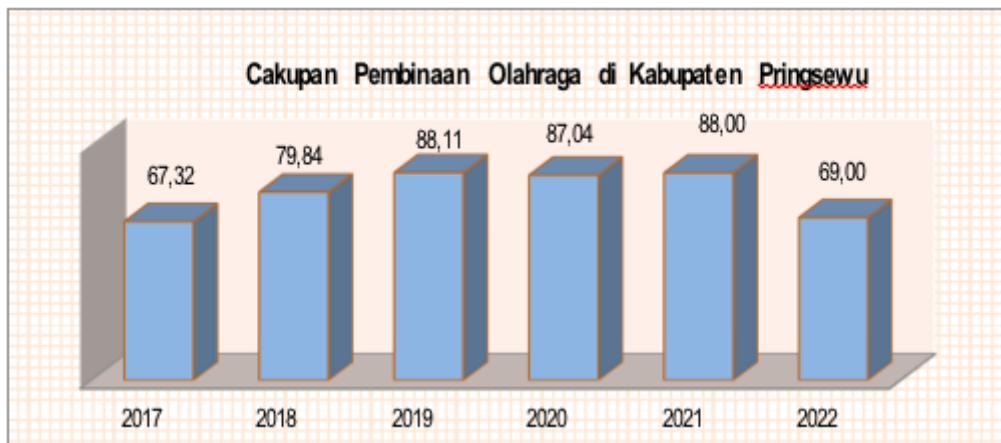


Gambar 2. 147 Grafik Prosentase Wirausaha Muda di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2023

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Cakupan pembinaan olahraga adalah prosentase jumlah organisasi olahraga dengan jumlah organisasi yang mendapat bantuan pembinaan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa prosentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat di Kabupaten Pringsewu terus meningkat dari 72,00% pada tahun 2018 menjadi 88,00% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan sanitasi di kabupaten tersebut.

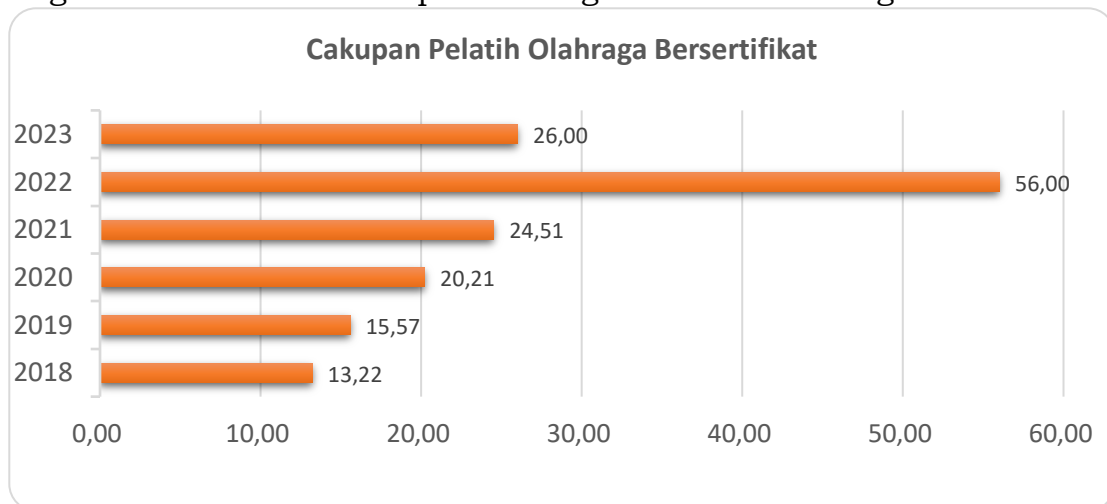


Gambar 2. 148 Grafik Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2023

d. Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat

Seorang pelatih olahraga bertanggung jawab dalam menyusun menu latihan olahraga dengan pengetahuan spesialis yang dimiliki seperti membimbing atlet untuk meningkatkan kinerja fisik tubuh, kekuatan otot, dan sebagainya. Oleh karena itu maka seorang pelatih olahraga harus memiliki sertifikat atau lisensi yang memadai. Adapun cakupan pelatih olahraga bersertifikat di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 149 Grafik Cakupan Pelatih Olahraga Bersertifikat (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Melahirkan juara merupakan proses panjang mulai dari menemukan atlet melalui *talents scouting* yang tepat dalam mendapatkan bibit atlet yang berkualitas, perkembangan multilateral, tahap spesialisasi sampai memasuki prestasi puncak. Dibutuhkan pemahaman, pengetahuan dan kesabaran dari pelatih dalam pembinaan atlet muda potensial, agar prestasi yang diinginkan bisa terwujud.

f. Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Cabang Olahraga

Di Kabupaten Pringsewu selama ini memiliki pusat pembinaan atlet olahraga angkat besi bertaraf nasional dan telah banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik secara nasional maupun internasional. Selain angkat besi, beberapa cabang olahraga juga mampu melahirkan atlet berprestasi yang menjadi juara dalam event-event olahraga.



Gambar 2. 150 Grafik Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2023

N. Statistik

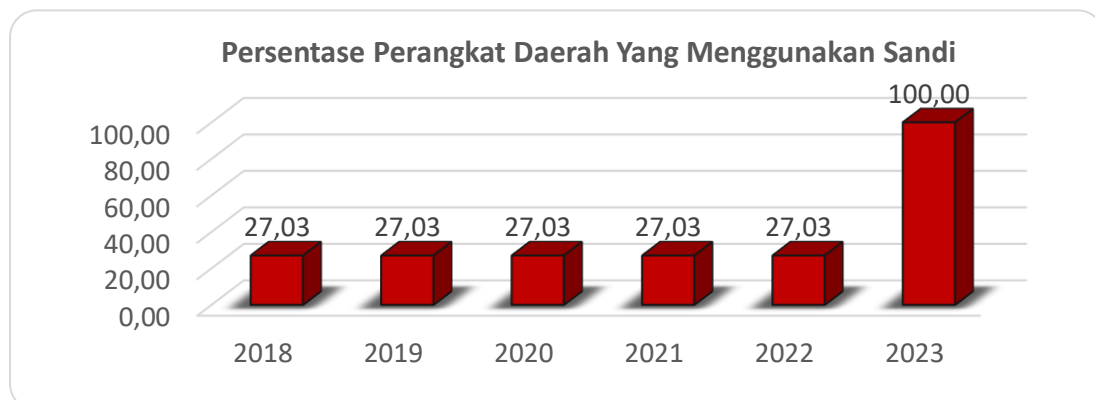
Kegiatan statistik bertujuan menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien guna untuk mendukung pembangunan. Oleh sebab itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Adapun beberapa dokumen penyediaan data dalam rangka mendukung proses

perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan BPS Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

1. Buku Kabupaten Dalam Angka.
2. Buku Produk Domestik Regional Bruto.
3. Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
4. Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.
6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu.

O. Persandian

Pengamanan persandian pada hakekatnya merupakan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi. Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail. Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan hash function. Sementara untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan. Khusus untuk pengiriman dalam bentuk hardcopy, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan. Pengelolaan urusan wajib persandian mencakup, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kabupaten, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten. Layanan yang perlu dilakukan terkait Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian, meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Capaian kinerja urusan wajib Persandian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2. 151 Grafik Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pringsewu, 2024

P. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional. Kebudayaan di kabupaten Pringsewu didominasi oleh kebudayaan asli Lampung dan Percampuran kebudayaan dari Jawa. Hal tersebut dikarenakan kabupaten Pringsewu merupakan lokasi tujuan masyarakat bertransmigrasi pada tahun 1970an. Penjabaran lebih detail terkait jumlah kegiatan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 27 Jumlah dan Kegiatan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	1	2	2	3
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	6	6	6	6	6
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	1	1	2	365
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	2	2	2	2	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka, yang disusun menurut sistem tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang bidang pendidikan. Beberapa indikator yang diwujudkan dalam melaksanakan kewenangan itu antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. 28 Jumlah Pengunjung, Koleksi Buku, dan Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

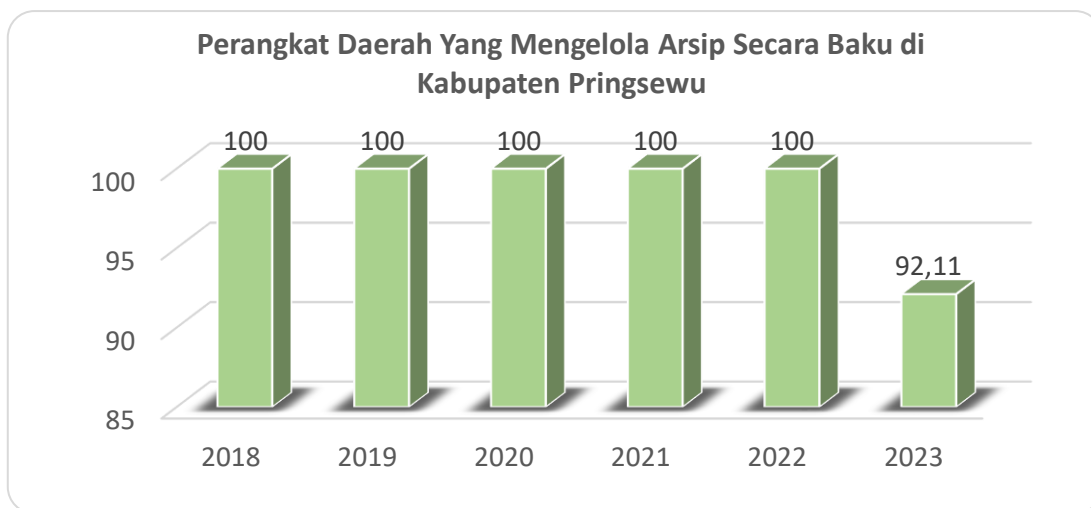
No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.257	1.302	393	2.987	3.027	3.425
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.212	13.728	14.122	16.250	16.755	16.755
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,07	1,11	1,11	1,11	1,30	1,73
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	1.257	1.302	393	2.987	3.027	3.425
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3.369	3.539	3.683	4.566	4.894	4.894
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	225	265	265	300	335	335

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

R. Kearsipan

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan kearsipan menjadikan aktivitas organisasi dapat dikontrol bila terjadi permasalahan dapat menjadi bukti otentik, menjadi sarana komunikasi secara tertulis, dapat menghemat waktu dan tenaga, sebagai alat pengingat, bahan dokumentasi, alat penyimpan warkat, dan menjadi alat bantu bagi pemimpin dalam mengambil keputusan.



Gambar 2. 152 Grafik Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan merujuk pada pendidikan yang berfokus pada kemampuan, pemahaman dan penerapan prinsip manajemen secara baik dan benar, kemampuan teknologi informasi, keterampilan pengorganisasian informasi dalam konteks kearsipan, pemahaman akan nilai dan dampak informasi, sistem administrasi atau manajemen perkantoran, keuangan dan akuntansi, keterampilan komunikasi, dan bahasa asing. Selain itu peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang manajemen kearsipan yang paripurna akan mengantarkan staf kearsipan akan pemahaman pentingnya kontribusi kearsipan dalam konteks penerapan administrasi institusi dan manajemen itu sendiri.



Gambar 2. 153 Grafik Jumlah Pengelola Kearsipan Yang Telah Dilatih di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

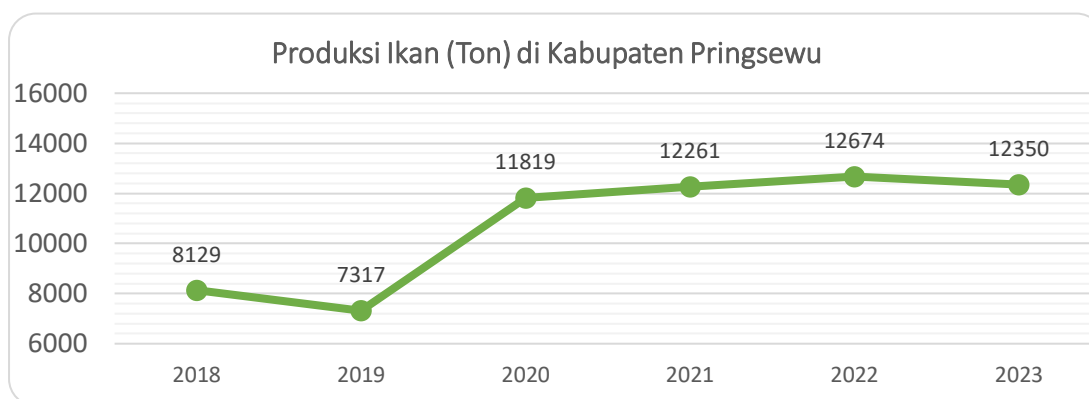
2.1.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan dan Kelautan

Urusan pilihan perikanan semakin penting peranannya secara nasional maupun global, karena kontribusinya dalam penyediaan bahan makanan berprotein, lapangan kerja, pendapatan, lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan program pada Urusan Pilihan Perikanan dan diarahkan pada Peningkatan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan secara Optimal, dengan menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan potensi perikanan secara optimal.

a. Produksi Perikanan

Pengembangan perikanan di Kabupaten Pringsewu lebih didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Produksi perikanan adalah jumlah produksi ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap dan budidaya. Produksi Perikanan dalam hal ini menyangkut perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

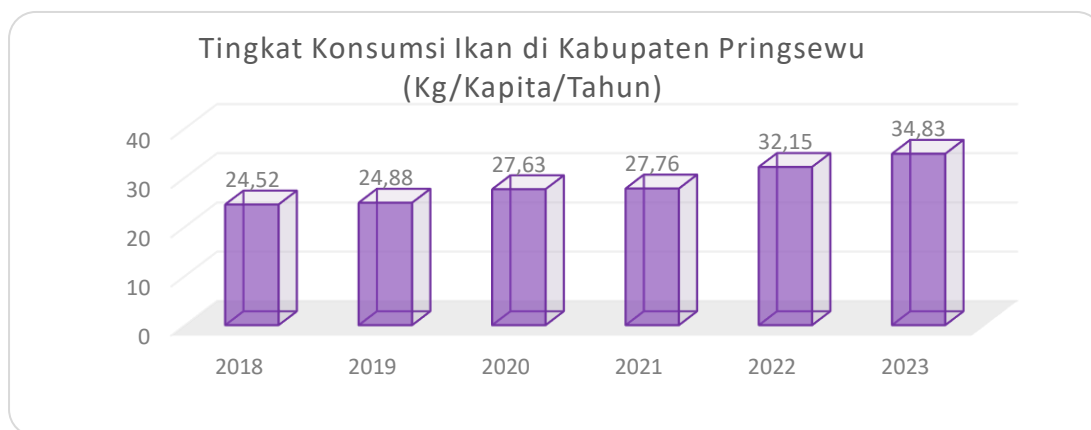


Gambar 2.154 Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Kandungan protein ikan tidak kalah dengan kandungan protein yang berasal dari daging atau telur. Selain itu ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam. Dengan demikian sangat beralasan bila kita mendukung program pemerintah dengan gerakan makan ikan.

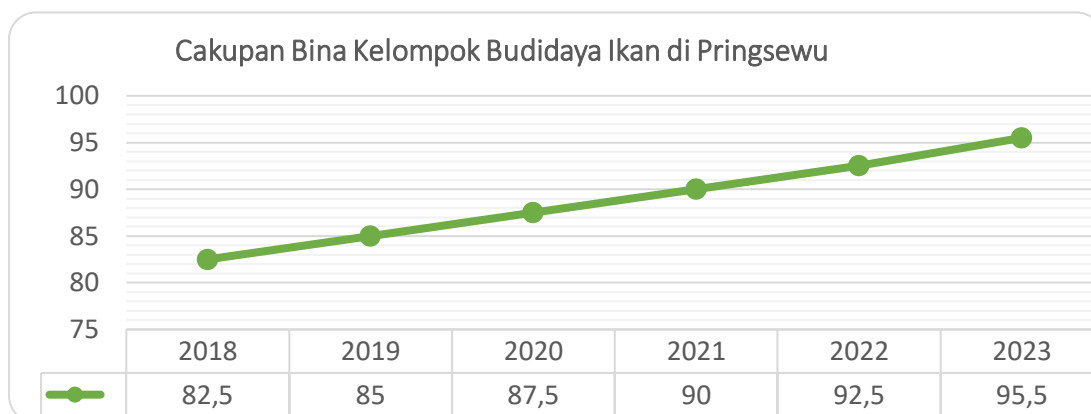


Gambar 2.155 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan

Budidaya ikan adalah bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di kolam ikan atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan pemancingan, yang dilakukan dalam bentuk perorangan maupun kelompok.



Gambar 2. 156 Grafik Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

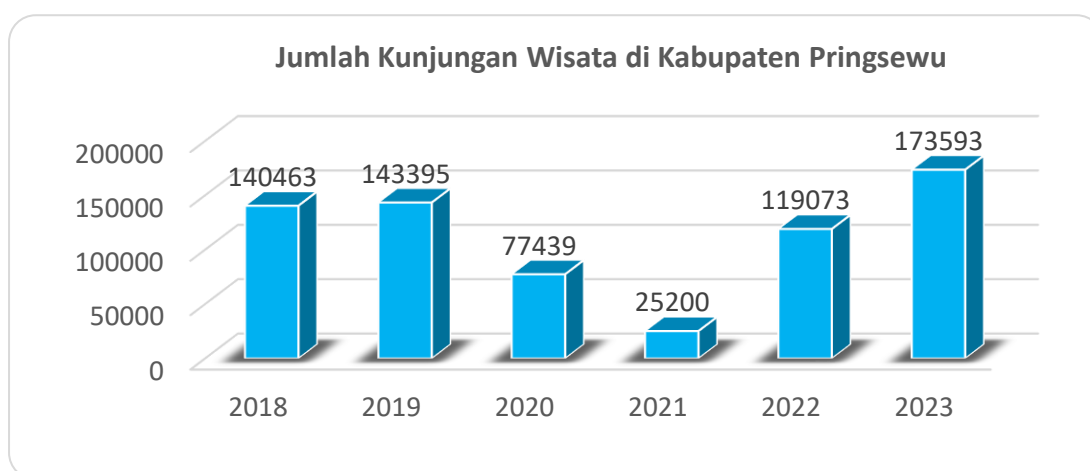
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, 2024

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan, karena dinilai cukup berpotensi bagi perkembangan perekonomian rakyat. Secara ekonomi sektor ini memiliki jaringan ke depan yang luas apabila dikembangkan, karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata dan industri jasa serta berdampak pada ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja.

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisatawan merupakan indikator yang menggambarkan besarnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap obyek wisata yang ada. Dalam hal ini adalah persentase realisasi jumlah kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu.

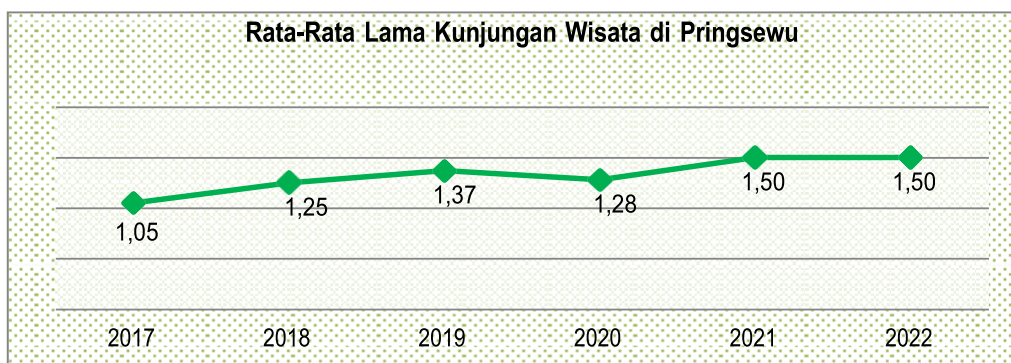


Gambar 2. 157 Grafik Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Olahraga, Pemuda, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan untuk tinggal di suatu daerah kunjungan wisata. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi penginapan selama tinggal. Karena itu maka Pemerintah memiliki peran yang tinggi untuk memberikan rasa nyaman dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi wisatawan. Apalagi sektor pariwisata ternyata juga mampu untuk menjadi pintu masuk dalam menggerakkan UMKM di sekitar objek wisata yang ada.



Gambar 2. 158 Grafik Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Olahraga, Pemuda, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, 2023

c. Objek Wisata

Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai objek wisata bila memiliki sesuatu yang menarik untuk dilihat dan khas untuk dibeli, dan sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Tabel 2. 29 Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Pringsewu

No	Objek Wisata	Luas (ha)	Lokasi
A	Wisata Alam		
1	Cekdam Tegalsari	1,50	Gadingrejo
2	Telaga Gupit	1,75	Gadingrejo
3	Bendungan Way Ngison	2,00	Pagelaran
4	Bendungan Bumiratu	1,50	Pagelaran
5	Air Terjun Way Kunyir	1,00	Pagelaran
B	Wisata Religius		
1	Pura Giri Sutramandala	0,75	Gadingrejo
2	Makam Kyai Haji Gholib	0,50	Pringsewu
3	Goa Maria Padang Bulan	1,00	Pringsewu
C	Wisata Buatan		
1	Bukit Silitonga	3,50	Sukoharjo
2	Bukit Sari Nongko	1,75	Sukoharjo
3	Villa Novi	0,75	Sukoharjo
4	Balong Kuring	0,75	Pringsewu
5	Kolam renang Grojogan Sewu	0,50	Pringsewu
6	Taman Kota Terpadu	1,00	Pringsewu

Sumber: Dinas Olahraga, Pemuda, dan Pariwisata, 2023

C. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian daerah. Paradigma pembangunan pertanian ke depan yaitu pertanian yang berkelanjutan yang menempatkan pembangunan berorientasi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tani sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat akan terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu maka kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian. Adapun capaian kinerja dalam pengelolaan urusan pilihan Pertanian di Kabupaten Pringsewu, adalah sebagai berikut.

a. Luas Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Luas panen padi dan bahan pangan utama lokal lainnya menjadi faktor penentu terhadap ketersediaan pangan daerah. Semakin luas atau besarnya produksi yang dihasilkan maka akan semakin baik. Adapun kondisi luas panen tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 30 Luas Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
(dalam ha) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Padi	24,907	21,439	23,041	24,842	26,659	21,752
2	Jagung	6,249	8,309	8,038	7,215	6,498	6,879
3	Kedelai	1,002	897	121	50	11	109,5
4	Kacang Tanah	42	11	16	2	0	14
5	Kacang Hijau	314	19	12	2	17	0,25
6	Ubi Jalar	54	48	20	47	7	0,5
7	Ubi Kayu	1,054	707	579	702	522	420

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produksi padi adalah jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang diukur dalam satuan ton.

Tabel 2. 31 Produksi Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Padi	138,421	112,699	130,867	142,254	150,865	124,652
2	Jagung	34,260	44,696	45,615	37,532	33,803	44,105
3	Kedelai	1,319	1,182	193	67	15	147
4	Kacang Tanah	64	14	23	3	0	17
5	Kacang Hijau	273	16.53	13	2	15	0,23
6	Ubi Jalar	829	794	323	517	77	6
7	Ubi Kayu	23,301	14,771	15,294	16,085	11,958	17950

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas padi merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat produksi padi per hektar di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka semakin produktif usaha tanamannya. Dalam hal tersebut adalah perbandingan produksi padi dengan luas panen (Kw/Ha).

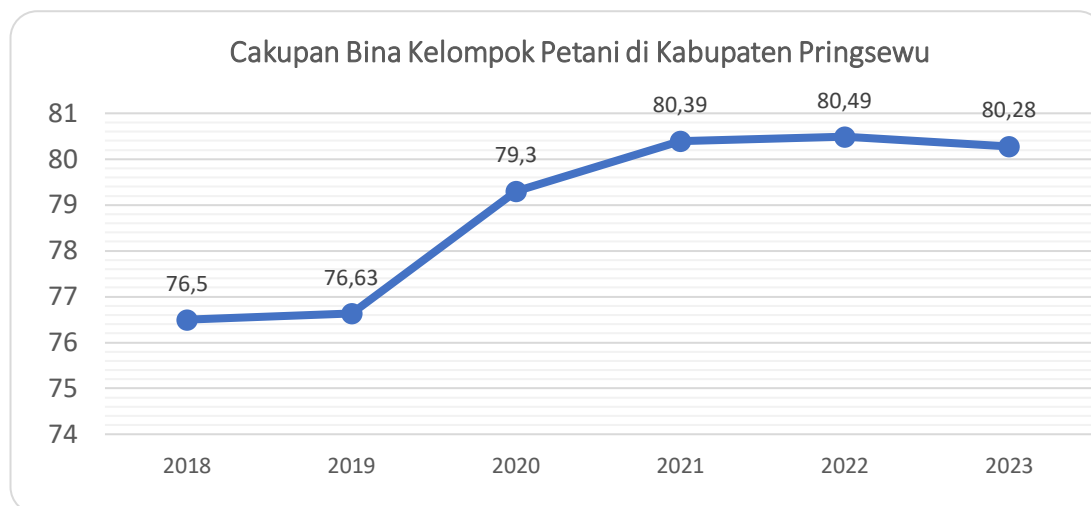
Tabel 2. 32 Produktivitas Panen Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Kw/Ha) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Padi	55.5	52.5	56.8	56,6	56,5	57,31
2	Jagung	54.8	53.7	56.75	52,0	52,0	64,12
3	Kedelai	13.1	13.1	16.04	13,4	13,4	13,42
4	Kacang Tanah	15.1	12.8	14.36	12,4	0,0	12,14
5	Kacang Hijau	8.7	8.7	10.25	8,78	9,0	9,20
6	Ubi Jalar	152.9	165	161.69	183.53	110,70	120,00
7	Ubi Kayu	221	208.9	264.16	213,07	229,30	427,38

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

d. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok Tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani yang terikat secara formal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama. Sementara cakupan bina kelompok tani, merupakan kontribusi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap kelompok tani, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian, sehingga memperoleh hasil pertanian yang maksimal.



Gambar 2. 159 Grafik Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Produksi Buah-Buahan

Produksi buah-buahan merupakan jumlah output atau hasil panen buah-buahan dari luas lahan petani selama satu kali musim dalam bentuk buah siap konsumsi yang diukur dalam satuan ton. Semakin besar produksi buah-buahan, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Tabel 2. 33 Produksi Buah-Buahan (Kwintal) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Alpokad	910	2,363	30,802	18,946	5,412	27,930
2	Mangga	8,549	13,828	24,211	32,848	6,628	86
3	Rambutan	244	1,755	1,162	3,214	4,7976	1,589
4	Durian	139	1,300	4,589	4,245	1,119	1,978
5	Jambu Biji	509	19,050	8,354	32,752	1,742	1,511

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6	Sawo	528	7,254	37,918	29,840	2,835	1,731
7	Pepaya	4,675	27,213	97,960	89,800	49,516	26,383
8	Pisang	7,127	73,024	253,956	236,514	47,976	47,322
9	Belimbing	85	439	2,469	1,893	1,223	1,291
10	Nangka	189	1,738	27,547	16,381	1,788	3,105
11	Sirsak	155	647	8,865	5,403	1,410	435
12	Sukun	520	1,462	1,704	3,045	494	255

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Produksi Sayur-Sayuran

Produksi sayur-sayuran merupakan jumlah output atau hasil panen sayur-sayuran dari luas lahan petani selama satu kali musim yang siap dikonsumsi dan diukur dalam satuan kwintal.

Tabel 2. 34 Produksi Sayur-Sayuran (Kwintal) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Bawang Daun	631	536	5,325	1,165	450	1,496
2	Petsai/sawi	682	1,575	3,341	6,242	9,259	8,012
3	Cabe	8,743	41,907	79,924	18,340	74,605	53,059
4	Terong	3,855	7,258	37,480	12,460	10,110	8,662
5	Tomat	1,353	1,777	62,671	9,564	11,352	4,273
6	Mentimun	2,667	5,465	4,691	2,977	3,131	1,240
7	Kacang Panjang	2,338	1,315	3,226	2,202	2,521	2,426
8	Buncis	270	70	93	120	450	1,390
9	Kangkung	1,899	3,817	3,287	6,415	7,395	4,994
10	Bayam	1,918	2,300	2,042	1,141	986	516

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

g. Produksi Perkebunan

Produksi perkebunan merupakan jumlah output atau hasil panen perkebunan dari luas lahan petani selama satu kali musim dalam bentuk buah siap konsumsi yang diukur dalam satuan ton.

Tabel 2. 35 Produksi Perkebunan (Ton) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kopi	705	707	703	696	694	693
2	Lada	163	155	158	159	157	157
3	Kelapa	3.408	3,395	3,357	3,313	3,295	3,287
4	Karet	350	285	487	487	510	511
5	Kakao	2,693	2,631	2,626	2,655	3,029	2,482
6	Aren	50	48	49	49	50	5
7	Kelapa Sawit	834	834	817	818	910	910
8	Tembakau	53	66	67	73	101	99
9	Cengkeh	34	34	37	42	54	54

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

h. Populasi Ternak

Pangan asal ternak ini dibutuhkan manusia selain sebagai bahan pangan yang memiliki cita rasa, utamanya dijadikan sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh sebagai protein fungsional maupun sebagai pembangun struktur (pertumbuhan), terutama pada anak-anak di bawah 5 (lima) tahun, dimana laju pertumbuhan dan pengembangan sel-sel otaknya sangat tinggi. Adapun perkembangan populasi ternak di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Populasi Ternak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sapi	12.159	13.138	15.073	16.326	17,883	17.435
2	Kerbau	1.366	1.110	1.032	1.012	750	705
3	Kambing Domba	50.798	51.339	60.028	77.987	85.626	90.026
4	Babi	616	763	631	448	465	595
5	Ayam kampung	394.847	372.682	324.116	343.370	335.245	294.748
6	Ayam potong	1.096.170	1.673.915	2.986.400	3.258.400	4.378.400	4.917.323
7	Ayam petelur	727.750	732.300	793.250	799.748	678.184	688.048
8	Ayam kalkun	1100	450	459	459	NA	NA
9	Itik	120.151	120.045	151.666	188.548	159.928	159.642

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

i. Produksi Daging

Ketersediaan daging sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya yang merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi. Daging umumnya dapat diperoleh dari daging sapi, daging kambing/domba, daging babi, daging ayam, dan daging hewan lainnya yang dikonsumsi masyarakat tertentu. Terpenuhinya kebutuhan daging dan susu sebagai bahan pangan untuk memenuhi konsumsi protein hewani.

Tabel 2. 37 Produksi Daging (kg) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sapi	424.515,00	513.560,52	579.448,98	605.927,52	559.333,50	529.160
2	Kerbau	7.521,15	4.309,20	1.755,60	2.852,85	3.291,75	2.594
3	Kambing Domba	101.828,18	153.215,18	151.762,76	180.778,45	186.143,44	192.200
4	Babi	6.580,35	10.603,76	15.642,43	15.291,48	19.001,55	19.002
5	Ayam Buras	96,708.29	102.507,38	97.360,94	111.353.37	112.147,01	118.008
6	Ayam Ras	1.224,896.04	1.230,024.28	2.189.031.18	2.388.407.2	3.209.367,20	3.604.397
7	Itik	163,780.96	78.736,21	58.789.74	87.329.28	82.650,26	66.252

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

j. Produksi Telur

Telur adalah produk peternakan yang kaya akan gizi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber protein, lemak, dan mineral yang murah dan dapat dijangkau kalangan masyarakat. Produksi telur di Kabupaten Pringsewu, sangat besar dan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal juga telah memenuhi kebutuhan telur untuk masyarakat di Kabupaten lain. Adapun produksi telur di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 38 Produksi Telur (kg) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Ayam buras	263,792.81	314,806.82	285,796.05	281,671.0	275,006	241.785
Ayam ras	7,101,806.42	7,322,036.91	7,650,627.83	8,024,096.0	7,808,339	7.921.909
Itik	695,567.00	688,925.00	824,599.62	1,027,191.0	884,896	775.291

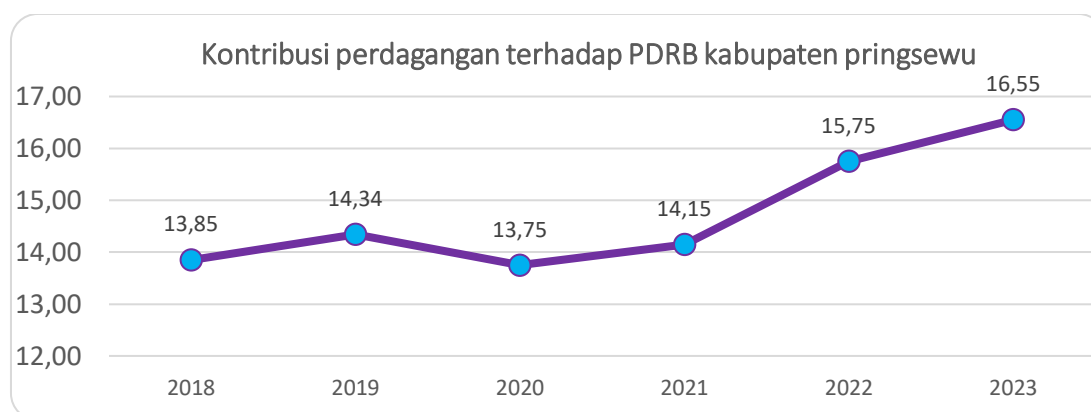
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2024

D. Perdagangan

Peran urusan perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

a. Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Tujuan pembangunan sektor perdagangan antara lain, peningkatan akses pasar, perbaikan iklim usaha perdagangan, peningkatan daya saing produk perdagangan, peningkatan kinerja sektor perdagangan dan peningkatan perlindungan konsumen. Kontribusi perdagangan sendiri di Kabupaten Pringsewu cenderung meningkat, sejalan upaya Pemerintah Daerah yang konsen untuk mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan dan jasa. Grafik ini menunjukkan kontribusi sektor perdagangan terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 hingga 2023. Tren kontribusi mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat secara keseluruhan. Dimulai dari 13,85% pada 2018, nilai ini naik ke 14,34% di 2019, lalu turun sedikit ke 13,75% di 2020. Setelah itu, terjadi peningkatan konsisten setiap tahun: 14,15% (2021), 15,75% (2022), hingga mencapai puncaknya di 16,55% pada 2023. Data ini menggambarkan pertumbuhan signifikan peran sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu selama periode enam tahun tersebut, dengan kenaikan total sebesar 2,7 poin persentase dari 2018 ke 2023.

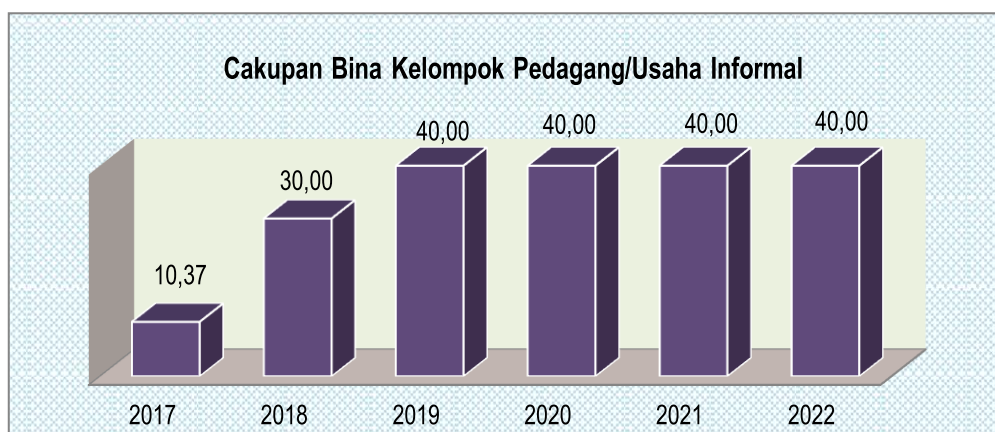


Gambar 2. 160 Grafik Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak berkembang di masyarakat. Usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Namun pada kenyataannya justru kelompok pedagang ini di Kabupaten Pringsewu selalu eksis dan banyak melakukan inovasi. Grafik ini menunjukkan perkembangan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2017 hingga 2022. Terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2017 yang hanya 10,37% menjadi 30% pada tahun 2018. Selanjutnya, cakupan meningkat lagi menjadi 40% pada tahun 2019 dan bertahan stabil pada angka tersebut hingga tahun 2022. Hal ini menggambarkan adanya upaya konsisten dari pemerintah daerah dalam membina dan mendukung sektor usaha informal di Kabupaten Pringsewu. Meskipun sektor ini umumnya terdiri dari masyarakat dengan pendidikan dan modal terbatas, data menunjukkan bahwa mereka tetap eksis dan inovatif, sesuai dengan keterangan yang tercantum di grafik.



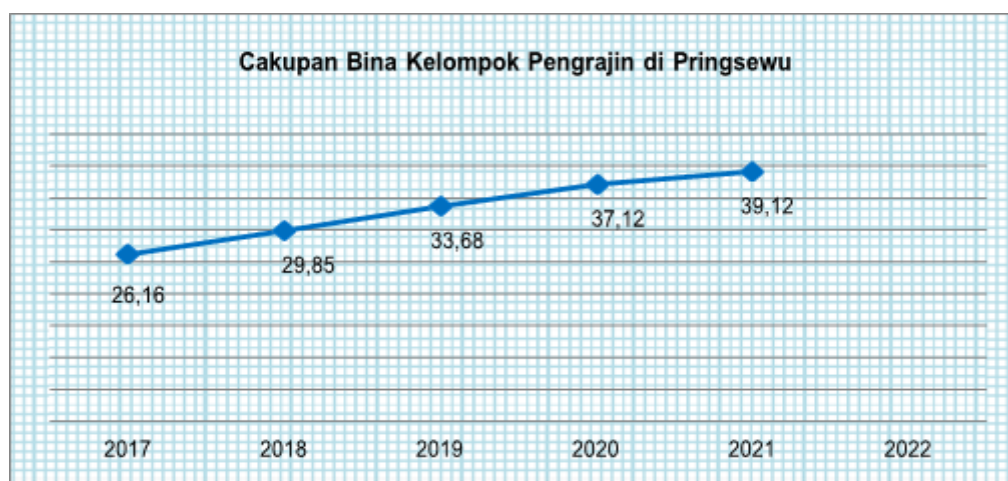
Gambar 2. 161 Grafik Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2023

E. Perindustrian

Pembangunan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PRDB sangat berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Adapun data bina kelompok pengrajin, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 162 Grafik Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 2023

F. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi sangat mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan transmigrasi dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan daerah otonom lain dalam program transmigrasi. Terutama di luar Kabupaten Pringsewu untuk menempatkan para transmigran.

Kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi, baik daerah pengirim transmigran maupun penerima transmigran memegang peranan sangat penting bagi keberhasilan program transmigrasi. Kebijakan transmigrasi, bukan hanya pemindahan penduduk, namun lebih berorientasi pada pengembangan wilayah. Adapun paradigma baru yang dipakai program transmigrasi yaitu mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung kebijakan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi, mendukung ketahanan pangan nasional dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Adapun data jumlah calon transmigran dan yang diberangkatkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 39 Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah rumah tangga calon transmigran	0	76	0	0	5	0
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan,	0	5	0	0	5	0
3	Prosentase transmigran yang diberangkatkan	0	6,56	0	0	100,00	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu, 2024

2.1.4.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Penunjang Perencanaan

Pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dengan baik. Agar keempat aspek tersebut dapat berjalan secara efektif, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kondisi mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efektif yaitu dengan adanya akselerasi pembangunan dengan mampu melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien dan efektif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan, meningkatnya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, prasarana wilayah, penataan ruang, sosial, budaya, sumber daya alam dan buatan yang tanggap terhadap perubahan, partisipatif dan berdasarkan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerja sama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah.

Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

**Tabel 2. 40 Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Ketersediaan dokumen RPJPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Konsistensi Penjabaran Program RKPD Ke dalam Rancangan APBD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

B. Penunjang Keuangan

Urusan penunjang keuangan dilaksanakan untuk membantu kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengurus keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Adapun kinerja urusan pengelolaan keuangan daerah, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

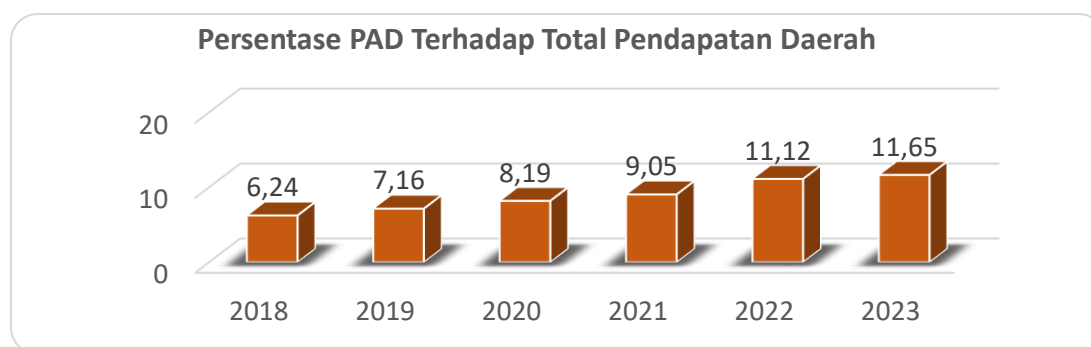
**Tabel 2. 41 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	2,93	3,76	1,00	3,80	5,01	3,98%
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	33,23	33,54	30,10	30,63	32,29	30,22%
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	11,13	11,39	18,69	15,88	15,93	11,78%
5	Perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja daerah.	66,74	67,49	70,04	66,90	72,60	74,29%
6	Bagi hasil kabupaten dan desa	14,98	16,55	14,68	15,88	14,54	14,98%
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah

Kualitas Pendapatan diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan. Sudah menjadi hal yang umum bahwa masih banyak Kabupaten yang total APBD-nya masih bergantung pada Dana Transfers dari Pemerintah Pusat, sehingga dari sisi keuangan daerah, belum bisa mandiri. Padahal semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan, maka dapat mengindikasikan kemandirian pemerintah kabupaten atas keuangannya. Adapun perkembangan persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 163 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah menjadi aspek yang sangat fundamental bagi suatu pemerintah daerah, hal ini dikarenakan aset daerah merupakan pilar utama sebagai pendapatan asli daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun kinerja pengelolaan aset daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 42 Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Aset Tanah	1.724	1.728	1.750	1.750	1.021	2.093
2	Jumlah Aset Tanah yang sudah bersertifikat.	178	283	505	622	819	1.138
3	Prosentase Aset Tanah yang sudah bersertifikat	10,32	16,38	28,86	35,54	80,22	95,5

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

C. Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan izin belajar untuk studi lanjut pada jenjang pendidikan formal (sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi serta doktoral). Selain itu juga memberi kesempatan kepada para ASN untuk mengikuti pendidikan non formal, melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, semiloka dan lain-lain, serta diklat fungsional dan diklat teknis.

a. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Kepegawaian merupakan seluruh aktivitas untuk mendayagunakan sumber daya manusia pegawai dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pendayagunaan tersebut mencakup fungsi manajerial maupun teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan pemanfaatan pikiran, mencakup pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi teknis berkaitan dengan pendayagunaan fisik yang meliputi proses pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi dan pemeliharaan, maupun pemensiunan. Manajemen kepegawaian secara umum memiliki prosedural tetap. Pada tahap awal didahului oleh proses pengadaan pegawai; proses pengembangan pegawai; pengelolaan kinerja dan pemeliharaan hubungan kerja. Dari siklus tersebut maka Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian harus konsisten juga dalam memberikan pelayanan kepada ASN yang ada.

**Tabel 2. 43 Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah seluruh ASN	4.631	4.793	4.666	4544	4880	4.672
2	Jumlah ASN Golongan I	4	2	2	2	2	-
3	Jumlah ASN Golongan II	491	534	523	494	502	403
4	Jumlah ASN Golongan III	2.041	2.292	2.290	2462	3006	3.095
5	Jumlah ASN Golongan IV	2.095	1.965	1.851	1586	1370	1.174
6	Jumlah SK kenaikan pangkat yang tepat waktu	800	506	437	565	464	558
7	Jumlah penerbitan SK gaji berkala yang tepat waktu	2.576	3.023	1.967	2359	2026	2.032
8	Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan Satya Lencana (10 thn, 20 thn, 30 thn)	75	87	92	51	49	64
9	Jumlah pegawai yang mendapat sanksi disiplin	5	4	4	3	3	2
10	Jumlah penerimaan ASN baru dan pindahan.	376	321	15	163	563	25
11	Jumlah penerbitan SK pensiun yang tepat waktu	71	170	225	307	254	295
12	Jumlah SK kenaikan pangkat yang tepat waktu	800	506	437	565	464	558
13	Jumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama pada instansi pemerintah Daerah.	28	29	27	34	34	29

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
14	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	132	142	139	138	137	130
15	Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah	454	470	429	436	184	174
16	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.395	3.533	3.451	3375	3978	3.777

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan SDM melalui diklat memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan mencapai tujuan. Terutama keberhasilan dalam rangka mengelola pemerintahan dan pembangunan secara baik. Melalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan para ASN dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan kata lain bahwa salah satu bentuk pengelolaan SDM yang paling penting adalah terkait pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Cakupan dari pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan melainkan juga dari proses pengembangan karier individu, pengembangan kinerja, serta perencanaan suksesi.

Tabel 2. 44 Tabel Kinerja Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim II)	21,88	8,75	17,13	50,0	76,47	
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim III)	9,02	4,10	1,42	29,2	50,36	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim IV)	17,98	11,78	0,48	43,15	46,31	
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	0,37	0,12	0,54	0	1,19	
5	Jumlah ASN berpendidikan jenjang ≤SLTA	1207	1095	1025	422	348	273
6	Jumlah ASN berpendidikan jenjang Diploma	424	518	525	901	849	768
7	Jumlah ASN berpendidikan jenjang Sarjana S-1	2675	2860	2802	2889	3297	3240

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Jumlah ASN berpendidikan jenjang Pasca Sarjana S-2 / dokter spesialis	325	320	314	332	386	391

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pringsewu, 2024

D. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Inovasi merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan saing, yang pada akhirnya berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang dimaksud tersebut adalah semua bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Peningkatan Pelayanan Publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Inovasi Daerah harus berpedoman pada prinsip inovasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yakni peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Indikator kinerja pengelolaan urusan penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pringsewu, antara lain:

- Penerbitan Jurnal Kelitbangan secara rutin berkala, untuk umum dan pelajar.
- Melaksanakan Kompetisi Karya Inovasi dan IPTEK (KOMPAS IPTEK) Kabupaten Pringsewu, dengan kategori peserta umum, pelajar, desa, dan pemerintah daerah.
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendorong upaya peningkatan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dari hasil pengelolaan berbagai inovasi ini, terdapat peningkatan pada Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Penilaian indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri, dimana pada tahun 2021 Pringsewu memperoleh peringkat ke-94 dari 415 Kabupaten dengan skor 50,35 (kategori inovatif) dan pada Tahun 2022 menjadi peringkat ke-51 dengan skor 56,83 (kategori inovatif).

E. Penunjang Pengawasan

Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada hasil pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Inspektorat daerah. Selain itu Inspektorat

juga menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Lampung agar Laporan Hasil Pemeriksaan semakin baik hasilnya.

Tabel 2. 45 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase tindak lanjut temuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%
2	Jumlah pelanggaran pegawai(sangsi disiplin)	5	5	3	1	4	0
3	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	24	31	47	13	5	100%
4	Jumlah temuan BPK	13	10	6	9	On Proses	95.7%
5	Level APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

F. Penunjang Pemerintahan Umum

Fungsi ini dilaksanakan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah berperan membantu dan pemberian pelayanan pada kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan Sekretariat DPRD berperan memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

a. Pengelolaan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada perangkat daerah. Dengan kata lain bahwa fungsi sekretariat lebih mengarah kepada fungsi staf dalam rangka menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang di disposisikan oleh pimpinan. Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah juga memiliki target kinerja tertentu.

Tabel 2.46 Kinerja Sekretariat Daerah di Kab Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	CC	CC	B	B	B	B
2	Prosentase tempat peribadatan yang mendapat pembinaan (bantuan)	89,55	89,70	90,15	100	99,86	
3	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan.	6	10	9	14	7	23
4	Jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan.	67	74	52	40	33	7

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, 2024

b. Pengelolaan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2. 47 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam RPJM dan RKPD, serta Dokumen Anggaran Setwan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Prosentase realisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda)	100	75.00	70.00	80.00	80.00	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Penunjang Kewilayahan (Kecamatan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Kinerja pengelolaan urusan penunjang kewilayahan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 48 Status Pekon Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2019-2023**

NO	KECAMATAN	STATUS PEKON	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	ADILUWIH	Mandiri	1	1	1	2	2
		Maju	3	5	8	8	9
		Berkembang	9	7	4	3	2
		Tertinggal	0	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
2	AMBARAWA	Mandiri	0	0	1	1	2
		Maju	1	1	5	7	6
		Berkembang	7	7	2	0	0
		Tertinggal	0	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
3	BANYUMAS	Mandiri	0	0	0	0	0
		Maju	2	7	9	10	10
		Berkembang	9	4	2	1	1
		Tertinggal	0	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
4	GADINGREJO	Mandiri	0	0	0	4	5
		Maju	4	12	19	18	17
		Berkembang	19	11	4	1	0
		Tertinggal	0	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
5	PAGELARAN	Mandiri	0	1	1	2	4
		Maju	4	4	9	15	15
		Berkembang	18	17	12	5	3
		Tertinggal	0	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
6	PAGELARAN UTARA	Mandiri	0	0	0	0	0
		Maju	0	1	1	1	0
		Berkembang	7	9	9	9	10
		Tertinggal	3	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
7	PARDASUKA	Mandiri	0	0	0	0	0
		Maju	0	0	3	6	7
		Berkembang	5	13	10	7	7
		Tertinggal	8	0	0	0	0
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
8	PRINGSEWU	Mandiri	0	1	2	2	4
		Maju	4	4	5	6	4
		Berkembang	6	5	3	2	4
		Tertinggal	0	0	0	0	0

NO	KECAMATAN	STATUS PEKON	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, 2024

G. Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, ditegaskan bahwa fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan III Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2017-2022

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengukur, menilai dan keberhasilan suatu program. Evaluasi dinilai menjadi cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Jenis evaluasi *ex-post* atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (*output/outcome/impact*) mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Untuk dapat menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD, maka dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada program-program kegiatan yang menjadi bagian dari urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk program

kegiatan non urusan (administrasi umum), tidak masuk dalam evaluasi. Adapun hasil evaluasi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.2.1 Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pelaksanaan urusan wajib pendidikan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, yang mencakup pendidikan non formal (PAUD), SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan munculnya prestasi-prestasi dari peserta didik, mewujudkan rasio ketersediaan sekolah yang ideal dengan jumlah penduduk, dan mewujudkan rasio guru dan murid yang ideal sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI	65,34	68,97	63,1	66,50	57,45
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs	33,33	33,44	37,81	33,83	40,17
3	Rasio guru terhadap murid SD/MI	66,67	66,67	64,35	45,21	71,72
4	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs.	71,43	71,43	69,30	56,25	74,77
5	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	71,43	50	78,88	67,85	55,66
6	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	50	25	54,6	63,25	43,88
7	Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	29,5	29,68	31,28	28,79	96,36
8	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	20,5	21,08	19,63	48,92	95,60
9	Rasio murid Pendidikan Anak Usia Dini terhadap anak usia 4-6 tahun.	91,85	92,5	93	97,50	97,5
10	Rasio guru Pendidikan Anak Usia Dini	7,14	5,56	5,47	10,10	10,62
11	Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,59	0,05
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,03	0,03	0,03	0,59	0,01
13	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100,00	100,00
14	Angka kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100,00	100,00
15	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs	100	98,9	88,38	86,92	96,95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pelaksanaan urusan wajib kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka umur harapan hidup, menekan angka kematian bayi, menekan angka kematian ibu melahirkan, menanggulangi gizi buruk dan mengelola angka kesakitan agar dapat terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan program antara lain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan penyakit menular, program standarisasi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kondisi jalan yang dalam kondisi baik, menyediakan sarana irigasi yang ideal dengan lahan persawahan, dan mewujudkan pemukiman warga masyarakat yang bersanitasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, program pembangunan jalan lingkungan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program pemeliharaan jalan dan jembatan serta yang lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu.

4. Urusan Wajib Perumahan

Pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kondisi jalan yang dalam kondisi baik, menyediakan sarana irigasi yang ideal dengan lahan persawahan, dan mewujudkan pemukiman warga masyarakat yang bersanitasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, program pembangunan jalan lingkungan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program pemeliharaan jalan dan jembatan serta yang lainnya. Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Pengelolaan urusan penataan ruang dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan penggunaan ruang sesuai dengan peruntukannya melalui pemberian IMB secara selektif dan mewujudkan ruang terbuka hijau yang ideal dengan jumlah penduduk, sebagai sarana bersosialisasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perencanaan partisipatif terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7. Urusan Wajib Perhubungan

Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana lalu lintas, manajemen transportasi dan terminal merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang aktivitas perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Penataan jalur transportasi yang dilalui oleh kendaraan umum merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan pusat-pusat perekonomian masyarakat. Selain itu, pengujian kendaraan umum secara rutin, juga perlu dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada para penumpang. Begitu juga dalam hal penerangan jalan, hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif yang signifikan dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan. Untuk menjaga agar penerangan jalan umum tetap berfungsi dengan baik diperlukan pemeliharaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan.

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari bahwa kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk maksud itu dilaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program pengelolaan ruang terbuka hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Urusan Wajib Pertanahan

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Oleh karena itu maka pemerintah daerah selalu berupaya untuk memenuhi hak-haknya masyarakat melalui program-program legalisasi di bidang pertanahan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Sehubungan masih terdapatnya status kependudukan ganda antar kabupaten di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih banyak data penduduk yang tidak akurat maka pemerintah mencanangkan pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Adapun maksud dari program nasional tersebut adalah untuk pembentukan akurasi data kependudukan skala nasional serta mewujudkan Nomor Induk Kependudukan tunggal bagi penduduk Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan kuantitas perempuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di Kabupaten Pringsewu. SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengelolaan urusan KB dan Keluarga Sejahtera dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan rata-rata anak dalam keluarga yang ideal, rasio akseptor KB yang ideal, cakupan peserta KB aktif, dan penurunan angka keluarga prasejahtera dan Sejahtera I. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilaksanakan program pengembangan BKP-Posyandu-PADU, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, program komunikasi informasi dan edukasi, program peningkatan sarana dan prasarana pendukung KB. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

13. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial diarahkan untuk merealisasikan prioritas pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan rumah tangga, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Untuk itu maka dilaksanakan program pemberdayaan fakir miskin, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. SKPD yang menyelenggarakan urusan sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

14. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Manajemen ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi perselisihan perburuhan, membantu pencari kerja, dan meningkatkan keamanan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, program perluasan kesempatan kerja, dan program perlindungan tenaga kerja. Satuan

kerja daerah yang menangani masalah ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Migrasi.

Namun pada proses pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yaitu :

- a. Kesempatan kerja yang terbatas yang kemudian berimplikasi terhadap rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi ekonomi yang belum menguntungkan
- b. Kurang memadainya kualitas pelamar kerja sehingga tidak mampu memenuhi permintaan lowongan pekerjaan yang telah tersedia.
- c. Kurang terpantaunya tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan sehingga mempengaruhi data angka pengangguran yang mengalami peningkatan.
- d. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah sebagai lembaga yang diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja terdidik.

15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sektor koperasi dan usaha, kecil, dan menengah (UKM) sering kali menjadi fokus dalam konteks pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sering menetapkan urusan wajib terkait dengan koperasi dan UMKM untuk memberikan dukungan dan meningkatkan peran sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi

Program yang dilaksanakan untuk mengembangkan koperasi dan UKM antara lain program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha, dan program peningkatan kualitas koperasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan :

- a. Daya saing koperasi lokal yang kurang kompetitif, sehingga ketika muncul kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi lokal.
- b. Masih dijumpai adanya pendirian koperasi yang hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan pihak lain, sehingga ketika bantuan dihentikan, maka dengan sendirinya kegiatan koperasi menjadi tidak aktif.
- c. Adanya pengelolaan koperasi yang tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai, baik dalam pengelolaan manajemen maupun yang lainnya.
- d. Pengembangan usaha kecil masih bersifat gradual, atau sebatas mengelola tempat usaha yang telah dirintis oleh masyarakat dan belum sampai pada upaya untuk menciptakan lokasi-lokasi UMKM yang baru.

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Sektor koperasi dan usaha, kecil, dan menengah (UKM) sering kali menjadi fokus dalam konteks pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sering menetapkan urusan wajib terkait dengan koperasi dan UMKM untuk memberikan dukungan dan meningkatkan peran sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi

Program yang dilaksanakan untuk mengembangkan koperasi dan UKM antara lain program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha, dan program peningkatan kualitas koperasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan :

- a. Daya saing koperasi lokal yang kurang kompetitif, sehingga ketika muncul kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi

yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi lokal.

- b. Masih dijumpai adanya pendirian koperasi yang hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan pihak lain, sehingga ketika bantuan dihentikan, maka dengan sendirinya kegiatan koperasi menjadi tidak aktif.
- c. Adanya pengelolaan koperasi yang tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai, baik dalam pengelolaan manajemen maupun yang lainnya.
- d. Pengembangan usaha kecil masih bersifat gradual, atau sebatas mengelola tempat usaha yang telah dirintis oleh masyarakat dan belum sampai pada upaya untuk menciptakan lokasi-lokasi UMKM yang baru.

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan wajib kebudayaan mencakup berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan keberagaman budaya suatu masyarakat. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, urusan wajib kebudayaan termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam bidang kesenian, Kabupaten Pringsewu mengupayakan pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompok kesenian dan memberikan dorongan kepada masyarakat supaya terus melestarikan budaya yang sedang berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan sejumlah kegiatan antara lain pembinaan kesenian daerah, workshop tari penata daerah, gelar seni daerah dan peningkatan sanggar budaya. Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Dari hasil pelaksanaan urusan kebudayaan, masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan.
- b. Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi yang cukup.
- c. Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap para pelaku budaya.

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Urusan wajib kepemudaan dan olahraga merujuk pada kewenangan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemuda (muda-mudi) serta sektor olahraga. Di Indonesia, kewenangan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Untuk maksud tersebut maka dilakukan sejumlah program, antara lain program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, program pemuda dan olahraga dan program keimanan dan ketaqwaan pemuda.

Salah satu hasil peran para pelaku olahraga adalah diperolehnya beberapa prestasi baik di tingkat regional maupun internasional. Bahkan khusus untuk cabang olahraga Angkat Berat, keberadaan atlet dari Kabupaten Pringsewu, telah mampu membawa nama harum bangsa Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar nasional dan internasional.

- b. Masih kurangnya reward yang diterima oleh para atlet yang berprestasi, sehingga menurunkan minat untuk selalu menempa diri.
- c. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peran serta nyata dalam proses pembangunan daerah.
- d. Masih terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, hal ini merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Pringsewu yang kondusif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik maka telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah. Upaya lain yang ditempuh untuk deteksi dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan melalui pengamanan kegiatan penting seperti pemilihan kepala pekon, hari-hari besar dan siskamling.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam pengelolaan urusan ini antara lain program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan kebangsaan, program pendidikan politik masyarakat, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih ada beberapa permasalahan antara lain,

- a. Semakin beragamnya modus yang dilakukan para pelaku kejahatan yang menuntut adanya penyesuaian kembali terhadap pola deteksi dini.
- b. Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis IT (*cyber crime*).
- c. Derasnya informasi budaya luar yang kurang diimbangi peningkatan pada ideologi bangsa bisa berpengaruh terhadap munculnya kelompok radikal.
- d. Masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang disinyalir menjalankan syariat agama yang kurang sesuai dengan tuntunan sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih intensif.

20. Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu mencakup kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola administrasi pemerintahan, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Urusan wajib tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif di tingkat lokal.

Keberhasilan dalam mengelola urusan ini akan berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di tingkat daerah.

21. Urusan Ketahanan Pangan.

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk. Ketahanan pangan menjadi aspek penting untuk mencapai keamanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah. Urusan ketahanan pangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan ketahanan pangan dapat membantu mengurangi ketidakpastian pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya lokal, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Beberapa aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dan lainnya. Urusan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan desa secara holistik, dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Program pemberdayaan masyarakat desa juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

23. Urusan Statistik.

Urusan statistik adalah kewenangan pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan statistik untuk memperoleh data yang akurat, kredibel, dan terkini mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Data statistik ini penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Urusan statistik memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah, pengembangan kebijakan, serta evaluasi program dan proyek di berbagai sektor. Data statistik yang akurat dan andal sangat penting untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.

24. Urusan Kearsipan.

Urusan kearsipan mencakup kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan arsip atau dokumen dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kearsipan sangat penting untuk memastikan informasi dan dokumen-dokumen yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah, aman, dan teratur. Urusan kearsipan bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, organisasi dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan memenuhi kewajibannya terkait dengan keberlanjutan dan transparansi administrasi.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, Kabupaten Pringsewu mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga penyebaran layanan digital. Urusan komunikasi dan informatika menjadi kunci dalam mendorong transformasi digital suatu negara atau wilayah.

Dengan memadukan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

26. Urusan Perpustakaan.

Urusan perpustakaan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi dan pengetahuan. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, riset, dan akses masyarakat terhadap bahan pustaka. Urusan perpustakaan sangat penting untuk mendukung pendidikan, pengembangan masyarakat, dan penelitian. Dengan menyediakan akses terhadap informasi, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

2.2.2 Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Pertanian

Melalui pengelolaan urusan pertanian, diharapkan terjadi peningkatan dalam hal produktivitas padi. Sebagai tantangan yang tidak bisa dielakan dalam mengelola urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan. Namun disisi lain, harus di embangu dengan program intensifikasi pertanian. Selain bahan pokok padi, melalui pengelolaan urusan pertanian juga diarahkan pada peningkatan produktivitas non beras, seperti sayuran, palawija, jagung, kedelai dan lain-lain. Penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

2. Urusan Pilihan Kehutanan

Pengelolaan urusan kehutanan dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan kelestarian hutan yang ada. Memang di Kabupaten Pringsewu hanya memiliki luas hutan lindung yang tidak begitu luas. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada pengurangan debit air yang ada di bawahnya dan bahkan bisa

menimbulkan bencana. Melalui program ini, pengelolaan hutan dilaksanakan dengan menanami kembali kondisi hutan yang gundul dan mengambil manfaat keberadaan hutan dengan mengembangkan usaha lebah madu. Penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

3. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pengelolaan urusan energi dan sumberdaya mineral telah dilaksanakan beberapa program, antara lain program pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, pembinaan dan pengembangan energi dan ketenagalistrikan dan program pengembangan sumber potensi energi baru terbarukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

4. Urusan Pilihan Pariwisata

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka menggairahkan sektor pariwisata diantaranya adalah dengan melaksanakan program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Urusan Pilihan Perikanan dan Peternakan

Urusan pilihan perikanan dan peternakan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan untuk memastikan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat peternak, dan keberlanjutan lingkungan. Keduanya, perikanan dan peternakan, memiliki peran kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang bijak, inklusif, dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor-sektor ini dalam jangka panjang.

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran barang dan jasa antarnegara, baik dalam konteks regional maupun global. Dalam tingkat regional tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan , mendorong pertumbuhan ekonomi. Urusan perdagangan menjadi kunci dalam membentuk posisi ekonomi suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dan program perdagangan yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan membawa manfaat ekonomi kepada masyarakat.

7. Urusan Perindustrian

Dalam penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Pringsewu memiliki cakupan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan sektor industri suatu daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri suatu daerah. Urusan perindustrian sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan dan peningkatan sektor industri dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perubahan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RPJMD dilaksanakan terhadap tiga hal utama, yaitu :

- 1) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu. Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum

terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- 2) Review Capaian Kinerja RPJMD. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.
- 3) Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan. Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD, dapat dilihat pada tabel 2.50

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN PRINGSEWU
s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/ d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/ d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/ d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				DINAS PENDIDIKAN																	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	1.228.777.788.300	BB	284.491.031.863	BB	323.937.048.891	BB	154.447.028.049	47,68		BB	438.938.059.912		35,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pendidikan	60,00	1.879.258.400	15	598.217.951	15,00	548.394.300	11,00	243.373.365	73,33	44,38	26,00	841.591.316	43,33	44,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36,00	209.788.000	9	50.906.400	9,00	59.673.000	6,00	38.921.900	66,67	65,23	15,00	89.828.300	41,67	42,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,00	463.254.400	6	131.639.301	6,00	115.813.600	5,00	110.100.215	83,33	95,07	11,00	241.739.516	45,83	52,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	1.206.216.000	4	415.672.250	2,00	372.907.700	1,00	94.351.250	50,00	25,30	5,00	510.023.500	62,50	42,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56,00	1.221.369.321.500	14	281.980.516.852	14,00	322.768.181.091	8,00	153.891.926.466	57,14	47,68	22,00	435.872.443.318	39,29	35,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	11280,00	1.219.402.196.900	2820	281.512.457.202	14,00	322.282.159.641	8,00	153.677.896.466	57,14	47,68	2828,00	435.190.353.668	25,07	35,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.898.400.000	1	451.210.000	12,00	468.840.000	6,00	214.030.000	50,00	45,65	7,00	665.240.000	175,00	35,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	68.724.600	1	16.849.650	1,00	17.181.450	0,00	-	0,00	0,00	1,00	16.849.650	25,00	24,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1128,00	885.000.000	574	224.602.475	282,00	124.108.000	282,00	118.019.500	100,00	95,09	856,00	342.621.975	75,89	38,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1128,00	885.000.000	574	224.602.475	282,00	124.108.000	282,00	118.019.500	100,00	95,09	856,00	342.621.975	75,89	38,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Pendidikan	400,00	1.311.628.000	100	454.634.933	100,00	282.280.500	0,34	96.861.600	0,34	34,31	100,34	551.496.533	25,09	42,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	48.980.000	1	11.876.600	1,00	12.245.000	0,00	3.901.000	0,00	31,86	1,00	15.777.600	25,00	32,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						APM PAUD	72,20		71,95		69,88		71,95		102,96		143,90		199,31				
						APM SD	96,70		96,55		84,77		96,55		100,00		193,10		100,00				
						APM SMP	80,80		80,65		80,60		80,65		100,00		161,30		199,63				
						Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95		94,80		94,21		94,80		100,63		189,60		199,68				
						Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94,00		93,85		95,98		93,85		97,78		187,70		199,68				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	400,00	160.223.136.000	100	41.678.125.846	100,00	53.906.088.000	16,53%	8.909.034.568	0,17	16,53	100,17	50.587.160.414	25,04	31,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8,00	1.560.000.000	2	390.000.000	1,00	438.400.000	-	0,00	0,00	2,00	390.000.000	25,00	25,00				
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12,00	1.020.000.000	3	255.000.000	1,00	-	-	0,00		3,00	255.000.000	25,00	25,00				
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4,00	780.000.000	1	195.000.000	1,00	215.500.000	-	0,00	0,00	1,00	195.000.000	25,00	25,00				
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48,00	4.629.444.000	12	841.997.840	1,00	578.400.000		23.908.290	0,00	4,13	12,00	865.906.130	25,00	18,70			
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12,00	2.553.420.000	3	638.355.000		-	-				3,00	638.355.000	25,00	25,00			
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00	-	-	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	48,00	1.240.000.000	12	310.000.000	10,00	1.187.500.000	-	0,00	0,00	12,00	310.000.000	25,00	25,00				
					Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4,00	80.000.000	1	873.646.000	1057,00	1.050.000.000	-	0,00	0,00	1,00	873.646.000	25,00	1092,06				
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8,00	1.000.000.000	2,00	248.352.500	30,00	1.228.500.000	-	0,00	0,00	2,00	248.352.500	25,00	24,84				
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0,00	-	-	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16,00	317.500.000	4	59.725.800	4,00	250.000.000	1,00	64.099.750	25,00	25,64	5,00	123.825.550	31,25	39,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	-	-	1480,00	2.664.000.000		-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00	-	-	262,00	59.834.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	16,00	143.475.368.000	4	36.262.614.750	262,00	35.716.500.000	262,00	8.395.519.328	100,00	23,51	266,00	44.658.134.078	1662,50	31,13			
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				262,00	150.000.000	262,00	113.674.000	100,00	75,78	262,00	113.674.000						
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	12,00	2.520.000.000	3	630.000.000	1,00	926.000.000	0,00	-	0,00	0,00	3,00	630.000.000	25,00	25,00			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	16,00	192.780.000	4	42.393.000	262,00	55.000.000	262,00	49.427.500	100,00	89,87	266,00	91.820.500	1662,50	47,63		
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	20,00	615.288.000	9	357.078.400	2,00	350.000.000	1,00	91.914.500	50,00	26,26	10,00	448.992.900	50,00	72,97		
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru					2,00	3.057.854.000	0,00		0,00	0,00	0,00	-				
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1,00	176.600.000	0,00		0,00	0,00	0,00	-				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8,00	239.336.000	4	573.962.556	2,00	375.000.000	1,00	170.491.200	50,00	45,46	5,00	744.453.756	62,50	311,05		
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					2,00	110.000.000	0		0,00	0,00	0,00	-				
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					28,00	5.317.000.000	0		0,00	0,00	0,00	-				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400,00	100.958.208.000	100	24.888.539.400	100,00	26.987.611.620	13,49%	3.639.501.674	0,13	13,49	100,13	28.528.041.074	25,03	28,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	0,00	-		-	2,00	534.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20,00	4.940.000.000	5	1.206.390.950	2,00	763.420.620		31.699.763	0,00	4,15	5,00	1.238.090.713	25,00	25,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	72,00	10.471.276.960	18	2.617.819.240	31,00	2.617.000.000	0,00	-	0,00	0,00	18,00	2.617.819.240	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8,00	1.940.000.000	2	485.000.000	2,00	-	0,00	-	0,00		2,00	485.000.000	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00	1.002.800.000	1	250.700.000	3,00	789.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	250.700.000	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00	102.699.040	1	25.674.760	2,00	169.256.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	25.674.760	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	96,00	2.920.000.000	24,00	710.000.000	32,00	964.625.000	0,00	-	0,00	0,00	24,00	710.000.000	25,00	24,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0,00	-		-			-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0,00	-		-			-		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20,00	354.000.000	5,00	79.772.100	5,00	250.000.000	1,00	53.332.500	20,00	21,33	6,00	133.104.600	30,00	37,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	280,00	120.240.000	70,00	29.880.000	140,00	30.060.000	0,00	-	0,00	0,00	70,00	29.880.000	25,00	24,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,00	-		-	55,00	19.733.600.000	55,00	3.335.660.411	0,00	0,00	55,00	3.335.660.411	5500,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55,00	78.384.632.000	4,00	19.206.905.750	140,00	150.000.000	100,00	121.569.000	71,43	81,05	104,00	19.328.474.750	189,09	24,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8,00	207.600.000	2,00	44.409.000	2,00	58.750.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	44.409.000	25,00	21,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					1,00	225.650.000										
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	16,00	514.960.000	4,00	231.987.600	4,00	200.000.000	2,00	97.240.000	50,00	48,62	6,00	329.227.600	37,50	63,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						1,00	112.250.000	0,00									
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						1,00	100.000.000	0,00									
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						2,00	290.000.000	0,00									
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1036,00	24.970.077.400	100,00	7.663.034.649	100,00	12.529.323.000	0,14	1.752.303.725	0,14	13,99	100,14	9.415.338.374	9,67	37,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0,00	-		-	5,00	485.780.000		10.000.000	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD					1,00	50.000.000	0,00		0,00	0,00						
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					90,00	1.957.500.000	0,00		0,00	0,00						
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					45,00	1.700.000.000	45,00	1.609.000.000	0,00	0,00						
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	259,00	172.093.000	10709,00	38.663.925	259,00	43.023.250	0,00	-	0,00	0,00	10709,00	38.663.925	4134,75	22,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	259,00	90.674.000	259,00	21.298.500	0,00	-	0,00	-			259,00	21.298.500	100,00	23,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	259,00	309.734.400	259,00	76.922.465	245,00	57.658.600	0,00	-	0,00	0,00	259,00	76.922.465	100,00	24,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	8,00	24.060.000.000	8,00	7.459.546.259	8,00	5.888.400.000	0,00	-	0,00	0,00	8,00	7.459.546.259	100,00	31,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					245,00	22.668.500	245,00	20.737.000								
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					245,00	191.721.850	245,00	77.198.005								
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	10,00	337.576.000	5,00	66.603.500	3,00	136.346.000		21.446.000	0,00	15,73	5,00	88.049.500	50,00	26,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU					4	432.096.000		13.922.720								
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					2500	1.564.128.800										
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	92	6.970.020.000	11 PKBM	1.712.609.500	11	4.929.424.000	0	280.903.540	0,00	5,70		1.993.513.040		28,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2452	6.779.200.000	peserta d	1.694.800.000	1	1.708.600.000		-	0,00	0,00		1.694.800.000		25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan					5	625.000.000										
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2452	190.820.000	peserta d	17.809.500		-	0	-				17.809.500		9,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					4	1.379.419.000	2	270.032.200								
					Penyelenggaraan Proses bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses bagi Peserta Didik					145	47.405.000										
					Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium					7	1.019.000.000		10.871.340								
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah					5	150.000.000										
					PROGRAM PENDIDIK DAN BERKUALIFIKASI SD	Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95	5.701.104.000	94,80	1.218.824.000	94,21	1.604.816.000	94,80	865.602.500	100,63	53,94	189,60	2.084.426.500	199,68	36,56	Dinas Pendidikan dan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94,00	5.701.104.000	93,85	-	95,98	1.604.816.000	93,85	865.602.500	97,78	865.602.500	187,70	2.084.426.500	199,68	36,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	24	5.701.104.000	6,00	1.218.824.000	6	1.604.816.000	4	865.602.500	66,67	53,94	10,00	2.084.426.500	41,67	36,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	2.787.840.000	3,00	553.983.000	3	952.517.000	2	605.813.500	66,67	63,60	5,00	1.159.796.500	41,67	41,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	2.913.264.000	3,00	664.841.000	3	652.299.000	2	259.789.000	66,67	39,83	5,00	924.630.000	41,67	31,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio murid PAUD terhadap anak usia 4 s.d 6 tahun	95,00	91.248.000	95,00	17.844.400	71,67	22.412.000	95,00	-	132,55	0,00	190,00	17.844.400	200,00	19,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD	400,00	91.248.000	100,00	17.844.400	100,00	22.412.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	17.844.400	25,00	19,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400,00	91.248.000	100,00	17.844.400	100,00	22.412.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	17.844.400	25,00	19,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Lestari	87,50	2.992.972.000	55,00	783.801.191	55,00	1.625.311.000	55,00	365.368.000	100,00	22,48	110,00	1.149.169.191	125,71	38,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan objek pemajuan Kebudayaan Daerah	8,00	354.552.000	2,00	87.035.000	2,00	483.329.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	87.035.000	25,00	24,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8,00	354.552.000	2,00	87.035.000	2,00	483.329.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	87.035.000	25,00	24,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah Berupa Event dan Pembinaan Sumber daya manusia pelaku seni	16,00	886.620.000	4,00	275.929.000	4,00	598.234.000	0,00	29.600.000	0,00	4,95	4,00	305.529.000	25,00	34,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8,00	650.700.000	2,00	219.086.000	2,00	300.959.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	219.086.000	25,00	33,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	8,00	235.920.000	2,00	56.843.000	2,00	297.275.000		29.600.000	0,00	9,96	2,00	86.443.000	25,00	36,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana melalui pembinaan kelompok sanggar/komunitas seni lembaga adat	200,00	1.751.800.000	50,00	420.837.191	50,00	543.748.000	35,00	335.768.000	70,00	61,75	85,00	756.605.191	42,50	43,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/fasilitasi	200,00	1.751.800.000	50,00	420.837.191	50,00	543.748.000	35,00	335.768.000	70,00	61,75	85,00	756.605.191	42,50	43,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang terpelihara	12,00	35.600.000	26,00	4.900.000	50,00	49.507.000	26,00	-	52,00	0,00	52,00	4.900.000	433,33	13,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya	20,00	35.600.000	5,00	4.900.000	5,00	49.507.000	0,00	-	0,00	0,00	5,00	4.900.000	25,00	13,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20,00	35.600.000	5,00	4.900.000	5,00	49.507.000	0,00	-	0,00	0,00	5,00	4.900.000	25,00	13,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					DINAS KESEHATAN																DINAS KESEHATAN	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP	78,53	298.827.729.000	B	62.652.492.845	B	79.423.673.605		36.210.673.035		45,59		98.863.165.880	33,08		Dinas Kesehatan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	537.816.000	96,21	77.346.050	100	150.342.000	40,00	60.860.813	40,00	40,48	136,21	138.206.863	100,00	25,70	Dinas Kesehatan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	115.967.000	2,00	13.888.050	2	13.920.000	1,00	1.950.000	50,00	14,01	3,00	15.838.050	37,50	13,66	Dinas Kesehatan	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56,00	279.616.000	14,00	33.102.000	14	80.186.000	6,00	44.800.813	42,86	55,87	20,00	77.902.813	35,71	27,86	Dinas Kesehatan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	71.116.000	1,00	15.108.000	1	39.816.000	-	12.070.000		30,31		27.178.000		38,22	Dinas Kesehatan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	71.117.000	1,00	15.248.000	1	16.420.000	-	2.040.000		12,42		17.288.000		24,31	Dinas Kesehatan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,00	293.706.621.000	78,39	60.568.651.589	100	78.268.211.605	59	35.799.177.717	59,00	45,74	137,39	96.367.829.306	100,00	32,81	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3246,00	290.167.610.000	964,00	59.988.838.944	1113	77.910.923.605	1.110	35.678.383.717	99,73	45,79	2074,00	95.667.222.661	63,89	32,97	Dinas Kesehatan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	3.483.120.000	12,00	556.937.545	12	333.000.000	6	116.820.000	50,00	35,08	18,00	673.757.545	37,50	19,34	Dinas Kesehatan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60,00	55.891.000	15,00	22.875.100	15	24.288.000	6	3.974.000	40,00	16,36	21,00	26.849.100	35,00	48,04	Dinas Kesehatan	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,00	30.817.000	100,00	6.490.000	100	6.500.000	0	-	0,00	0,00	100,00	6.490.000	100,00	21,06	Dinas Kesehatan	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	30.817.000	1,00	6.490.000	1	6.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	6.490.000	25,00	21,06	Dinas Kesehatan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,00	351.730.000	97,65	1.077.203.603	100	61.115.000	15	9.000.000	15,00	14,73	112,65	1.086.203.603	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	10.146.000	1,00	1.955.000	1	2.340.000	0	-	0,00	0,00	1,00	1.955.000	25,00	19,27	Dinas Kesehatan	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	313.137.000	15,00	1.069.981.103	25	53.495.000	4	9.000.000	16,00	16,82	19,00	1.078.981.103	31,67	100,00	Dinas Kesehatan	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320,00	28.447.000	80,00	5.267.500	80	5.280.000	0	-	0,00	0,00	80,00	5.267.500	25,00	18,52	Dinas Kesehatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,00	2.078.795.000	101,15	535.574.347	100	438.035.000	37	129.166.400	37,00	29,49	138,15	664.740.747	100,00	31,98	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	53.355.000	1,00	21.808.485	1	12.379.000	0	1.263.000	0,00	10,20	1,00	23.071.485	25,00	43,24	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00	464.995.000	1,00	91.598.000	1	7.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	91.598.000	25,00	19,70	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4,00	276.407.000	1,00	59.863.000	1	61.870.000	1	22.938.000	100,00	37,07	2,00	82.801.000	50,00	29,96	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	71.117.000	1,00	19.088.180	1	20.071.000	0	4.995.000	0,00	24,89	1,00	24.083.180	25,00	33,86	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00	94.443.000	1,00	24.962.250	1	29.820.000	0	8.460.000	0,00	28,37	1,00	33.422.250	25,00	35,39	Dinas Kesehatan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,00	1.118.478.000	80,00	318.254.432	60	306.395.000	30	91.510.400	50,00	29,87	110,00	409.764.832	34,38	36,64	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,00	779.270.000	99,97	140.745.000	100	236.200.000	42	97.632.105	42,00	41,33	141,97	238.377.105	100,00	30,59	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	777.949.000	12,00	140.250.000	12	236.200.000	6	97.632.105	50,00	41,33	18,00	237.882.105	37,50	30,58	Dinas Kesehatan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,00	1.105.623.000	99,14	240.682.256	100	263.270.000	40	114.836.000	40,00	43,62	139,14	355.518.256	100,00	32,16	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32,00	46.411.000	8,00	8.720.256	8	10.000.000	0	-	0,00	0,00	8,00	8.720.256	25,00	18,79	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32,00	919.978.000	8,00	208.872.000	6	230.180.000	4	108.096.000	66,67	46,96	12,00	316.968.000	37,50	34,45	Dinas Kesehatan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112,00	139.234.000	28,00	23.090.000	28	23.090.000	12	6.740.000	42,86	29,19	40,00	29.830.000	35,71	21,42	Dinas Kesehatan	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM terhadap layanan puskesmas dan RS	295,00	588.484.452.000	57,00	125.262.845.518	73,40	129.554.859.800	15	50.638.791.771		39,09	72,00	175.901.637.289	24,41	29,89	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	3,20	83.357.148.000	112,81	9.809.921.311	80	10.875.223.261	38	2.631.595.786	47,50	24,20	150,81	12.441.517.097	100,00	14,93	Dinas Kesehatan	
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4,00	938.883.000	1,00	33.696.000	1	3.148.464.480	1	240.743.350		7,65	2,00	274.439.350	50,00	29,23	Dinas Kesehatan	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10,00	8.953.663.000	1,00	36.061.125	3	1.098.900.000	1	58.447.600	33,33	5,32	2,00	94.508.725	20,00	1,06	Dinas Kesehatan	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19,00	45.141.737.000	4,00	1.280.950.000	5	2.436.858.920	2	648.728.000	40,00	26,62	6,00	1.929.678.000	31,58	4,27	Dinas Kesehatan	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar					2	58.095.000	0	-								
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					4	3.612.536.361	2	1.548.336.336								

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan, obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,00	2.236.000.000	1,00	541.061.100	2	520.368.500	1	99.340.500	50,00	19,09	2,00	640.401.600	50,00	28,64	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,77	504.927.569.000	90,70	115.417.752.207	100	118.373.799.839	20	47.962.760.985	20,00	40,52	110,70	163.380.513.192	100,00	32,36	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27830	237.057.000	6308,00	1.842.172.425	6000	441.245.000	400	36.710.000	6,67	8,32	6708,00	1.878.882.425	24,10	792,59	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26838	237.057.000	6059,00	358.417.073	6880	310.902.000	550	34.080.000	7,99	10,96	6609,00	392.497.073	24,63	165,57	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25218	237.057.000	6032,00	250.335.536	6656	225.135.039	450	3.950.000	6,76	1,75	6482,00	254.285.536	25,70	107,27	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121983	237.057.000	28840,00	1.135.475.048	14880	42.660.000	7.440	28.527.500	50,00	66,87	36280,00	1.164.002.548	29,74	491,02	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242857	142.234.000	61111,00	344.911.565	31323	1.001.819.000	13.545	67.275.000	43,24	6,72	74656,00	412.186.565	30,74	289,79	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1047524	333.207.000	#####	1.924.828.860	62059	64.665.000	2.271	30.845.500	3,66	47,70	153449,00	1.955.674.360	14,65	586,92	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225137	142.234.000	40903,00	564.565.250	26752	99.126	13.650	40.813.500	51,02	41173,36	54553,00	605.378.750	24,23	425,62	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320710	803.684.000	30622,00	115.391.500	13951	155.475.000	1.400	11.131.000	10,04	7,16	32022,00	126.522.500	9,98	15,74	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20260	179.288.000	68888,00	33.401.750	4183	439.109.800	1.997	394.370.350	47,74	89,81	70885,00	427.772.100	349,88	238,59	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2823	169.038.000	876,00	175.400.000	691	60.559.000	0	560.000	0,00	0,92	876,00	175.960.000	31,03	104,09	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86	754.295.000	9695,00	239.056.460	601	1.374.986.900	200	148.750.000	33,28	10,82	9895,00	387.806.460	100,00	51,41	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30868	157.545.000	6589,00	161.291.870	7785	129.580.000	0	4.659.000	0,00	3,60	6589,00	165.950.870	21,35	105,34	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48	326.247.000	5,00	2.954.000	13	60.400.000	2	5.985.000	15,38	9,91	7,00	8.939.000	14,58	2,74	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00	21.551.000	0,00		1	35.000.000	0	9.175.500	0,00	26,22	0,00	9.175.500	0,00	42,58	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16,00	568.937.000	4,00	2.667.532.635	4	3.436.292.000	2	64.735.000	50,00	1,88	6,00	2.732.267.635	37,50	480,24	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8,00	26.112.000	2,00	67.807.800	2	5.482.800	0	-	0,00	0,00	2,00	67.807.800	25,00	259,68	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16,00	426.264.000	4,00	1.281.931.000	4	748.050.000	2	83.845.000	50,00	11,21	6,00	1.365.776.000	37,50	320,41	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan	1,00	258.558.000	1,00	250.624.000	13	282.303.000	3	85.257.200	23,08	30,20	4,00	335.881.200	400,00	129,91	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4,00	106.712.000	1,00	30.517.080	1	39.592.000	1	17.000.000	100,00	42,94	2,00	47.517.080	50,00	44,53	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00	595.538.000	1,00	235.579.960	2	608.254.900	1	64.206.500	50,00	10,56	2,00	299.786.460	50,00	50,34	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dilayani sesuai standar	2695,00	93.436.000	18736,00	155.886.875	691	55.878.000	200	666.000	28,94	1,19	18936,00	156.552.875	702,63	167,55	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan edukasi napza di sekolah	48,00	81.038.000	12,00	13.488.500	12	102.507.000	3	28.474.000	25,00	27,78	15,00	41.962.500	31,25	51,78	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20,00	1.319.440.000	4,00	123.347.415	5	7.000.000	0	-	0,00	0,00	4,00	123.347.415	20,00	9,35	Dinas Kesehatan	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8,00	1.352.357.000	1,00	1.764.586.385	2	3.283.577.600	1	553.534.650	50,00	16,86	2,00	2.318.121.035	25,00	171,41	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,00	55.301.838.000	1,00	21.366.324.200	1	16.734.902.700	1	14.709.844.048	100,00	87,90	2,00	36.076.168.248	50,00	65,24	Dinas Kesehatan	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan							0	-								

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	36	1.557.984.000	8,00	13.764.000	9	6.000.000	2	900.000	22,22	15,00	10,00	14.664.000	27,78	0,94	Dinas Kesehatan	
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8	280.788.819.000	2,00	59.871.245.051	2	65.000.000.000	1	24.810.720.469	50,00	38,17	3,00	84.681.965.520	37,50	30,16	Dinas Kesehatan	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8	85.361.044.000	2,00	17.291.615.144	2	21.821.274.000	1	6.516.666.768	50,00	29,86	3,00	23.808.281.912	37,50	27,89	Dinas Kesehatan	
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	71.557.875.000	2,00	2.398.888.325	2	63.612.000	0	-	0,00	0,00	2,00	2.398.888.325	25,00	3,35	Dinas Kesehatan	
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	391.600.000	1,00	561.861.000	12	114.450.000	3	4.350.000	25,00	3,80	4,00	566.211.000	100,00	144,59	Dinas Kesehatan	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	1.162.466.000	1,00	33.450.000	1	36.000.000	1	18.000.000	100,00	50,00	2,00	51.450.000	50,00	4,43	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2400	357.240.000	1616,00	66.900.000	605	49.200.000	38	34.670.000	6,28	70,47	1654,00	101.570.000	68,92	28,43	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	364	19.440.000	107,00	4.835.000	91	26.910.000	40	3.582.000	43,96	13,31	147,00	8.417.000	40,38	43,30	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria							0	-								
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	28	292.800.000	3,00	69.366.500	3	94.000.000	2	26.110.000	66,67	27,78	5,00	95.476.500	17,86	32,61	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar							0	-								
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							0	-								
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	4,00	7.089.000	100,00	4.675.000	100	260.741.700	15	38.000.000	15,00	14,57	115,00	42.675.000	2875,00	601,99	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12,00	7.089.000	3,00	4.675.000	3	260.741.700	1	38.000.000	33,33	14,57	4,00	42.675.000	33,33	601,99	Dinas Kesehatan	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit yang dibina	3,85	192.646.000	94,39	30.497.000	85	45.095.000	10	6.435.000	11,76	14,27	104,39	36.932.000	100,00	19,17	Dinas Kesehatan	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	28,00	47.411.000	7,00	9.089.000	7	9.095.000	1	300.000	14,29	3,30	8,00	9.389.000	28,57	19,80	Dinas Kesehatan	
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	8,00	50.610.000	2,00	6.144.000	2	12.000.000	0	-	0,00	0,00	2,00	6.144.000	25,00	12,14	Dinas Kesehatan	
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28,00	50.609.000	7,00	6.144.000	7	24.000.000	2	6.135.000	28,57	25,56	9,00	12.279.000	32,14	24,26	Dinas Kesehatan	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar	346,00	156.418.000	98,50	36.396.000	69,2	5.756.753.600	26	438.865.080	37,57	7,62	124,50	475.261.080	35,98	303,84	Dinas Kesehatan	
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga kesehatan memiliki izin praktik tenaga kesehatan	398,50	47.411.000	100,00	10.700.000	99	18.500.000	20	5.400.000	100,00	29,19	120,00	16.100.000	30,11	33,96	Dinas Kesehatan	
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	210,00	47.411.000	45,00	10.700.000	50	18.500.000	20	5.400.000	40,00	29,19	65,00	16.100.000	30,95	33,96	Dinas Kesehatan	
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar	100,00	61.596.000	100,00	17.515.000	69	105.364.000	35	15.120.000	100,00	14,35	135,00	32.635.000	135,00	52,98	Dinas Kesehatan	
					Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,00	14.185.000	2,00	2.968.000	2	2.980.000	1	1.520.000	50,00	51,01	3,00	4.488.000	37,50	31,64	Dinas Kesehatan	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan minimal tenaga fungsional kesehatan di UPT Puskesmas Sesuai Standar	52,00	47.411.000	10,00	5.397.000	12	5.397.000	6	2.270.000	50,00	42,06	16,00	7.667.000	30,77	16,17	Dinas Kesehatan	
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,00	43.301.000	1,00	9.150.000	1	96.987.000	0	11.330.000	0,00	11,68	1,00	20.480.000	25,00	47,30	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya	3,54	47.411.000	94,78	8.181.000	88,53	5.632.889.600	5	418.345.080	5,65	7,43	99,78	426.526.080	100,00	899,64	Dinas Kesehatan	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100,00	47.411.000	25,00	8.181.000	25	5.632.889.600	10	418.345.080	40,00	7,43	35,00	426.526.080	35,00	899,64	Dinas Kesehatan	
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar	307,00	363.362.000	84,72	82.107.150	70	101.116.000	15	32.496.500	21,43	32,14	99,72	114.603.650	32,48	31,54	Dinas Kesehatan	
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki Izin	272,00	135.122.000	4,00	23.361.100	75	40.530.000	25	3.300.000	33,33	8,14	29,00	26.661.100	10,66	19,73	Dinas Kesehatan	
							320,00	61.635.000	12,00	10.084.000							12,00	10.084.000	3,75	16,36	Dinas Kesehatan	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16,00	135.122.000	4,00	23.361.100	4	40.530.000	2	3.300.000	50,00	8,14	6,00	26.661.100	37,50	19,73	Dinas Kesehatan	
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yg sudah melaksanakan usaha sesuai ketentuan yg berlaku perusahaan rumah tangga	3,30	116.417.000	53,43	19.477.450	75	23.196.000	54	12.521.500	72,00	53,98	107,43	31.998.950	100,00	27,49	Dinas Kesehatan	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2320,00	116.417.000	265,00	19.477.450	310	23.196.000	60	12.521.500	19,35	53,98	325,00	31.998.950	14,01	27,49	Dinas Kesehatan	
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	2,20	46.937.000	36,59	3.600.000	40	9.840.000	0	-	100,00	0,00	36,59	3.600.000	100,00	7,67	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4,00	46.937.000	1,00	3.600.000	1	9.840.000	0	-	0,00	0,00	1,00	3.600.000	25,00	7,67	Dinas Kesehatan	
					Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2,20	47.411.000	100,00	9.950.000	40	9.950.000	95	9.475.000	100,00	95,23	195,00	19.425.000	100,00	40,97	Dinas Kesehatan	
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4,00	47.411.000	1,00	9.950.000	1	9.950.000	1	9.475.000	100,00	95,23	2,00	19.425.000	50,00	40,97	Dinas Kesehatan	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Post Market	2,60	12.734.000	50,00	7.860.000	80	17.600.000	41	7.200.000	51,25	40,91	91,00	15.060.000	100,00	118,27	Dinas Kesehatan	
					Persentase pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Persentase pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	3,45	12.734.000	280,00	6.690.050							280,00	6.690.050	8115,94	52,54	Dinas Kesehatan	
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	320,00	47.411.000	80,00	7.860.000	80	17.600.000	40	7.200.000	50,00	40,91	120,00	15.060.000	37,50	31,76	Dinas Kesehatan	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prersentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	400,00	1.280.280.000	89,22	1.487.805.130	100	442.409.800	5	77.764.000	5,00	17,58	94,22	1.565.569.130	23,55	122,28	Dinas Kesehatan	
					Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanya GERMAS yang terlaksana	12,00	535.084.000	88,28	1.261.203.230	3	139.350.000	0	33.300.000	0,00	23,90	88,28	1.294.503.230	735,68	241,93	Dinas Kesehatan	
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12,00	535.084.000	3,00	1.261.203.230	3	139.350.000	1	33.300.000	33,33	23,90	4,00	1.294.503.230	33,33	241,93	Dinas Kesehatan	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3952,00	685.117.000	96,53	38.051.900	45	303.059.800	10	44.464.000	22,22	14,67	106,53	82.515.900	2,70	12,04	Dinas Kesehatan	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	180,00	685.117.000	45,00	38.051.900	45	303.059.800	18	44.464.000	40,00	14,67	63,00	82.515.900	35,00	12,04	Dinas Kesehatan	
					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																DINAS PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	56.879.444.035	BB	10.202.541.448	BB	11.663.049.112	43,83%	5.082.919.970		43,58		15.285.461.418		26,87	Dinas PUPR	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100,00	564.385.008	1,00	181.825.020	100,00	180.909.000	8,39%	60.706.600	0,08	33,56	1,08	242.531.620	1,08	42,97	Dinas PUPR	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	102.323.230	5,00	29.703.600	5,00	23.536.000	1,00	17.388.000	20,00	73,88	6,00	47.091.600	30,00	46,02	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	30.598.320	1,00	32.388.000	0,00	10.175.400	0,00	31,42	1,00	40.773.720	25,00	38,05	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.758.100	1,00	27.257.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	26.758.100	25,00	24,97	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.445.200	1,00	27.290.000	1,00	16.963.200	100,00	62,16	2,00	43.408.400	50,00	40,51	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.831.700	1,00	27.265.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	26.831.700	25,00	25,04	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	33.462.948	1,00	41.488.100	1,00	43.173.000	1,00	16.180.000	100,00	37,48	2,00	57.668.100	50,00	172,33	Dinas PUPR	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	49.532.229.071	100,00%	8.950.935.219	100,00	10.226.962.112	14,95%	4.645.815.960	0,15	45,43	1,15	13.596.751.179	1,15	27,45	Dinas PUPR	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	548,00	43.776.876.920	137,00	8.255.149.219	78,00	9.360.120.112	67,00	4.389.525.960	100,00	46,90	204,00	12.644.675.179	37,23	28,88	Dinas PUPR	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168,00	5.731.561.124	42,00	690.720.000	42	861.660.000	1,00	256.290.000	100,00	29,74	43,00	947.010.000	25,60	16,52	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	23.791.028	0,80	5.066.000	1	5.182.000	0,00	-	0,00	0,00	0,80	5.066.000	20,00	21,29	Dinas PUPR	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah	100,00	4.626.147.482	100,00%	624.941.852	100	682.145.000	20,46%	124.150.140	0,20	18,20	1,20	749.091.992	1,20	16,19	Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48,00	34.989.595	12,00	7.600.000	12	7.600.000	0,00	1.700.000	0,00	22,37	12,00	9.300.000	25,00	26,58	Dinas PUPR	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	1.829.434.280	12,00	160.652.000	12	151.800.000	0,00	-	0,00	0,00	12,00	160.652.000	25,00	8,78	Dinas PUPR	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48,00	486.244.889	12,00	130.152.750	12	132.229.000	1,00	51.832.950	8,33	39,20	13,00	181.985.700	27,08	37,43	Dinas PUPR	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang Disediakan	48,00	144.100.355	12,00	38.337.875	12	42.226.000	0,00	11.555.900	0,00	27,37	12,00	49.893.775	25,00	34,62	Dinas PUPR	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen men Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48,00	127.441.776	12,00	28.440.000	12	42.000.000	2,00	15.550.000	16,67	37,02	14,00	43.990.000	29,17	34,52	Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00	2.003.936.587	12,00	259.759.227	12	306.210.000	0,00	43.511.290	0,00	14,21	12,00	303.270.517	25,00	15,13	Dinas PUPR	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	648.113.496	100,00%	101.281.737	100	119.095.000	64,24%	50.431.707	0,64	42,35	1,64	151.713.444	1,64	23,41	Dinas PUPR	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	568.936.500	12,00	83.656.737	12	96.420.000	3,00	41.131.707	100,00	42,66	15,00	124.788.444	31,25	21,93	Dinas PUPR	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	79.176.996	12,00	17.625.000	12	22.675.000	3,00	9.300.000	25,00	41,01	15,00	26.925.000	31,25	34,01	Dinas PUPR	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	1.508.568.977	100,00%	343.557.620	100	453.938.000	69,68%	183.915.563	0,70	40,52	1,70	527.473.183	1,70	34,97	Dinas PUPR	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48,00	599.680.216	12,00	96.727.200	5,00	115.770.000	1	41.868.000	20,00	36,16	13,00	138.595.200	27,08	23,11	Dinas PUPR	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20,00	908.888.760	5,00	246.830.420	5,00	338.168.000	2	183.915.563	40,00	54,39	7,00	430.745.983	35,00	47,39	Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	85,00	55.406.946.092	69,13%	5.420.673.434	77,00	11.556.276.000	138,26%	1.130.862.730	1,80	9,79	2,07	6.551.536.164	2,44	11,82	Dinas PUPR	
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Air Baku untuk pemenuhan kebutuhan Irigasi yang tersedia	100,00	4.802.961.933	1,00	402.158.887	100,00	1.019.500.000	33,33%	11.410.567	0,33	1,12	1,33	413.569.454	1,33	8,61	Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12,00	1.476.615.422	1,00	9.926.380	3,00	-	0	-	0,00		1,00	9.926.380	8,33	0,67	Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,60	2.307.256.785	1,00	9.926.380	2,00	913.004.000	1	114.671.227	50,00	12,56	2,00	124.597.607	55,56	5,40	Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4,00		1,00%	392.232.507	1,00	106.496.000	1,00%	11.410.567	100,00	10,71	2,00	403.643.074	50,00	39,61	Dinas PUPR	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi	100,00	50.603.984.159	100,00%	5.018.514.547	100,00	10.536.776.000	43,16%	1.119.452.163	0,43	10,62	1,43	6.137.966.710	1,43	12,13	Dinas PUPR	
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2,80	173.543.886	1,00	147.054.008	0,05	7.500.000	0	7.446.849	0,00	99,29	1,00	154.500.857	35,71	89,03	Dinas PUPR	
					Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi yang Dibangun	0,00	4.268.471.665	2,00	296.471.450	0,00	-	0	-			2,00	296.471.450		6,95	Dinas PUPR	
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	9,52	154.086.969	2,00	296.471.450	0,00	-	0	-			2,00	296.471.450	21,01	192,41	Dinas PUPR	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,08	30.155.905.505	1,00	1.105.687.537	3	6.037.248.000	0,00	519.459.534	0,00	8,60	1,00	1.625.147.071	24,51	5,39	Dinas PUPR	
					Rehabilitasi Bendung Irigasi (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	8,00	5.525.817.091	2,00	2.254.780.695	9	2.833.491.000	0,00	264.271.180	0,00	9,33	2,00	2.519.051.875	25,00	45,59	Dinas PUPR	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	284,00	4.268.471.665	71,00	863.119.800	71	996.445.000	33,00	328.274.600	46,48	32,94	104,00	1.191.394.400	36,62	27,91	Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	40,00	6.057.687.378	1,00%	351.401.057	5	662.092.000	5	553.578.238							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga memiliki akses air bersih	87,00	49.815.293.219	69,55%	2.565.258.698	81,5	2.503.605.000	40,00%	12.577.300	0,49	0,50	1,10	2.577.835.998	1,26	5,17	Dinas PUPR	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM	84446,00	49.815.293.219	#####	2.565.258.698	200	2.503.605.000	0,00	12.577.300	0,00	0,50	70503,00	2.577.835.998	83,49	5,17	Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					150	93.293.000	50,00	26.534.000							Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					1	110.104.000	0,00	6.384.800							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan □	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					6	1.740.104.000	0,00	6.192.500							Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	79,00	934.230.121			15	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan □	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					50	560.104.000	0,00%	-							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	prosentase penangan Sampah	70,00	24.131.423.347	47,69%	2.775.370.112	59	1.596.629.000	20,00%	71.235.075	0,34	4,46	0,68	2.846.605.187	0,97	11,80	Dinas PUPR	
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	2,00	24.131.423.347	1,00	2.775.370.112	1	1.596.629.000	100,00	71.235.075	#####	4,46	101,00	2.846.605.187	5050,00	11,80	Dinas PUPR	
					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS □	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3 R/TPS yang dibangun					1	1.350.104.000	0,00	383.760.650							Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan □	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan					100	136.421.000	100,00	65.070.975							Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan □	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun					3	110.104.000	0,00	6.164.100							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Layanan Air Limbah (SR)	95,00	12.367.996.502	79,41%	957.801.542	89	758.895.000	0,00	5.464.300	0,00	0,72	0,79	963.265.842	0,84	7,79	Dinas PUPR	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	200,00	12.367.996.502	0,00	957.801.542	100	758.895.000	0,00	5.464.300	0,00	0,72	0,00	963.265.842	0,00	7,79	Dinas PUPR	
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat □	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			0,00%		100	560.104.000	0,00	9.910.605							Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) □	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			6,00%	218.287.547	150	88.687.000	50,00	6.000.000							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) □	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	12,00	2.030.198.601	3,00%	110.702.700	1	110.104.000	0,00	5.464.300							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase drainase lingkungan perkotaan dalam kondisi baik (tidak Tersumbat)	84,00	10.141.395.142	70,18%	1.884.282.673	82,4	793.046.000	1001,00	385.533.070	100,00	48,61	1001,70	2.269.815.743	100,00	22,38	Dinas PUPR	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	350,00	10.141.395.142	332,00	1.884.282.673	3000	793.046.000	1001,00	385.533.070	100,00	48,61	1333,00	2.269.815.743	100,00	22,38	Dinas PUPR	
					Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	0,00	-	4,00	483.301.907	-	-	0,00	-			4,00	483.301.907			Dinas PUPR	
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan □	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					2000	370.104.000	1000,00	202.493.670							Dinas PUPR	
					Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan □	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi					500	382.838.000	0,00	149.572.600							Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan □	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun					1	40.104.000	1,00	33.466.800							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Gedung Negara yang Terpelihara dengan Baik	103,00	6.580.512.808	75,00	6.827.514.010	93	1.781.904.925	40,00	749.165.170	43,01	42,04	115,00	7.576.679.180	111,65	115,14	Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya kegiatan bangunan gedung negara	103,00	6.580.512.808	75,00	6.827.514.010	93	1.781.904.925	40,00	749.165.170	43,01	42,04	115,00	7.576.679.180	111,65	115,14	Dinas PUPR	
					Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota □	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala dan yang akan dibangun					3	260.104.000	0,00	2.000.000							Dinas PUPR	
					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota □	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1	1.122.492.000	0,00	582.441.670							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung □	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya					300	133.244.925	30,00	75.543.500							Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG□	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					46	266.064.000	10,00	89.180.000							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	presentase Fasilitas Publik yang terpelihara dengan baik	87,00	8.960.195.892	0,78	6.537.422.115	80	7.936.569.000	0,00	1.735.500.410	0,00	21,87	0,78	8.272.922.525	0,90	92,33	Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Gedung Negera yang Terpelihara dengan Baik	100,00	8.960.195.892	1,00	6.537.422.115	4	7.936.569.000	0,00	1.735.500.410	0,00	21,87	1,00	8.272.922.525	1,00	92,33	Dinas PUPR	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	-	1,00	6.537.422.115	0	-	0,00	-			1,00	6.537.422.115			Dinas PUPR	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya □	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					9	7.936.569.000	0,00	1.735.500.410							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi	39,82	207.753.403.578	0,37	49.751.241.778	37,82	32.474.446.087	40,00	4.816.432.225	105,76	14,83	40,37	54.567.674.003	101,38	26,27	Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Sarana Kebinamargaan dalam kondisi baik	39,82	207.753.403.578	0,37	49.751.241.778	37,82	32.474.446.087	40,00	4.816.432.225	105,76	14,83	40,37	54.567.674.003	101,38	26,27	Dinas PUPR	
					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	600,00	-	8,00	1.315.689.733	600	-	0,00	-	0,00		8,00	1.315.689.733	1,33		Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan□	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					8	878.820.000	7,00	512.693.665							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Des	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya					7	893.205.000	0,00	6.412.200							Dinas PUPR	
					Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,08	17.697.059.279	10,00	35.991.360.474	0,6	1.225.025.990	0,00	170.820.575	0,00	13,94	10,00	36.162.181.049	13333,33	204,34	Dinas PUPR	
					Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10,00	156.359.426.913	3,00	6.316.571.300	9	27.409.735.480	0,00	3.130.499.885	0,00	11,42	3,00	9.447.071.185	30,00	6,04	Dinas PUPR	
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					8	1.010.046.000	0,00	259.144.000							Dinas PUPR	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,63	19.561.092.660	1,00	-	248	1.057.613.617	6,00	736.861.900	100,00	69,67	7,00	736.861.900	100,00	3,77	Dinas PUPR	
					Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	1,00	-	8,00	1.376.531.046	1	-	0,00	-	0,00		8,00	1.376.531.046	800,00		Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	17,64	2.133.511.875	10,98%	668.369.297	13,18	600.000.100	0,00	49.145.434	0,00	8,19	0,11	717.514.731	0,62	33,63	Dinas PUPR	
						Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100,00		100,00%	100	0,00		0,00	1,00	1,00		Dinas PUPR					
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100,00	1.478.621.871	100,00%	414.959.165	100	460.550.900	13,00	15.593.195	13,00	3,39	14,00	430.552.360	14,00	29,12	Dinas PUPR	
					Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	0,00	-	100,00	414.959.165	0	-	0,00	-			100,00	414.959.165			Dinas PUPR	
					Penyiapan Instruktur / Asesor / Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	0,00	-			0	-	0,00	-			0,00	-			Dinas PUPR	
					Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	4,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	
					Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100,00	-			10	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya					13	36.541.300	13,00	15.593.195							Dinas PUPR	
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					200	424.009.600	0,00	15.368.265							Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah	100,00	458.777.706	100,00%	12.659.800	100	25.206.000	0,00	17.345.700	0,00	68,82	1,00	30.005.500	1,00	6,54	Dinas PUPR	
					Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	4,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	4,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	0,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	
					Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	4,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan / Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	0,00	-			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	
					Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	0,00	-	15,00	31.452.295	0	-	0,00	-			15,00	31.452.295			Dinas PUPR	
					Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	0,00	-		209.298.037	0	-	0,00	-			0,00	209.298.037			Dinas PUPR	
					pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikat Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	0,00	-		26.375.375	0	-	0,00	-			0,00	26.375.375			Dinas PUPR	
					Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	0,00	-			1		0,00	-	0,00		0,00	-			Dinas PUPR	
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan					1	25.206.000	1,00	17.345.700							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan jasa konstruksi	100,00	196.112.298	100,00%	209.298.037	100	219.357.200	0,00	16.206.539	0,00	7,39	1,00	225.504.576	1,00	114,99	Dinas PUPR	
					Penyusunan SOP / Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	-	-	182.922.662	1	-	0,00	-	0,00		0,00	182.922.662			Dinas PUPR	
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan					1	24.620.300	0,00	8.502.579							Dinas PUPR	
					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk					3	89.622.900	0,00	7.703.960							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	94,00	13.031.631.348	97,73%	2.376.207.983	91,25	1.250.000.000	17,66%	128.569.770	0,19	10,29	1,15	2.504.777.753	1,23	19,22	Dinas PUPR	
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Eyaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000	0,48	84.644.415	1	-	0,00	-	0,00		0,48	84.644.415		16,93	Dinas PUPR	
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3,00	1.500.000.000			-	-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0,00	-			0	-	0,00	-			0,00	-			Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100,00	3.812.660.665	100,00%	1.312.251.669	100	519.538.000	0,00	33.593.565	0,00	6,47	1,00	1.345.845.234	1,00	35,30	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0,00	-	6,00	1.312.251.669	2	143.060.000	0,00	33.593.565	0,00	0,00	6,00	1.345.845.234	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	4,00	400.000.000			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota					1	376.478.000	0,00	67.163.060							Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	70,00	4.380.000.000	62,00%	861.290.879	100	547.923.300	0,00	163.640.440	0,00	29,87	0,62	1.024.931.319	0,89	23,40	Dinas PUPR	
					Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang					16	359.640.000	37	23.385.040							Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang □	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku					20	94.880.500	37	29.425.460							Dinas PUPR	
					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang □	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					26	93.402.800	32	28.519.720							Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	100,00	2.213.970.683	142,00%	118.021.020	100	182.538.700	7,48%	13.645.985	0,07	7,48	1,49	131.667.005	1,49	5,95	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0,00		1	10,00	0		0,00	-			10,00	118.021.020	#####		Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0,00		1		0		0,00	-			0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0,00		1		0		0,00	-			0,00	-	0,00		Dinas PUPR	
					Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					2	182.538.700	0,00	13.645.985							Dinas PUPR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,95	4.573.608.046	95,80%	643.397.986	8,34	245.249.000	60,00%	5.934.715	7,19	2,42	1,56	649.332.701	1,62	14,20	Dinas PUPR	
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan rumah korban bencana atau relokasi program	100,00	4.502.222.099	100,00%	643.397.986	100	245.249.000	0,60	5.934.715	0,00	2,42	1,60	649.332.701	1,60	14,42	Dinas PUPR	
					Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2,00	1.125.555.525			0		0,00	128.459.096			0,00	128.459.096	0,00	11,41	Dinas PUPR	
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumenokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2,00	1.125.555.525			0		0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	2,00	1.125.555.525			0		0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Yang Tersedia	1,00	6.346.487			0		0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	15,00	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	15,00	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15,00	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,00	46.000.000			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	#####	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15,00	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15,00	2.115.496			1	- 0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	15,00	2.115.496			0	- 0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					2	245.249.000	0,00	5.934.715							Dinas PUPR	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Ketersediaan Permukiman Kumuh Yang Tertata	100,00	45.883.270.219	100,00%	1.477.716.417	36,67	200.434.000	9,17%	54.194.378	0,25	27,04	1,09	1.531.910.795	1,09	3,34	Dinas PUPR	
						Persentase Ketersediaan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Diterbitkan	1 dokumen	182.500.000		1.172.582.890	1	- 0,00	-	0,00			0,00	1.172.582.890		642,51	Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1,00	984.497.202		1.172.582.890	1	-	0,00	-	0,00		0,00	1.172.582.890	0,00	119,10	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3,00	1.212.960.765			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	3,00	1.212.960.765			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	200,00	12.083.267.774			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4,00	3.427.863.748			0	-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4,00	3.427.863.748			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100,00	24.564.316.984	100,00%	305.133.527	100	282.207.000	25,00%	54.194.378	0,25	19,20	1,25	359.327.905	1,25	1,46	Dinas PUPR	
					Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1,00	984.497.202	0,00	-	1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3,00	1.212.960.765	0,00	-	0	750.000	0,00	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	200,00	12.083.267.774	1,00	305.133.527	1	199.684.000	0,27	54.194.378	27,00	27,14	1,27	359.327.905	0,64	2,97	Dinas PUPR	
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	4,00	3.427.863.748			2500	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4,00	3.427.863.748			1	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	4,00	3.427.863.748			35	750.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	50,00	1.000.000.000			50	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	50,00	1.000.000.000			50	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4,00	3.427.863.748			50	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Ketersediaan Kepenghunan Perumahan yang Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas	50,00	3.254.495.284	12,50%	565.743.422	100	1.564.317.000	40,00%	251.598.182	0,40	16,08	0,53	817.341.604	1,05	25,11	Dinas PUPR	
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase capain PSU	100,00	3.254.495.284	100,00%	565.743.422	100	1.564.317.000	40,00%	251.598.182	0,40	16,08	1,40	817.341.604	1,40	25,11	Dinas PUPR	
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6,00	1.084.831.761	2,00	159.023.562	4	222.980.000	2,00	214.616.532	50,00	96,25	4,00	373.640.094	66,67	34,44	Dinas PUPR	
					Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	6,00	1.084.831.761	2,00	240.910.910	5	1.145.174.000	0,00	18.830.150	0,00	1,64	2,00	259.741.060	33,33	23,94	Dinas PUPR	
					Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6,00	1.084.831.761	1,00	165.808.950	1	196.163.000	0,00	18.151.500	0,00	9,25	1,00	183.960.450	16,67	16,96	Dinas PUPR	
					SATPOL PP																SATPOL PP	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Perkantoran	NILAI SAKIP	B	16.816.967.998	BB	13.041.564.632	BB	13.173.546.919	BB	6.920.693.938	100,00	100,00		19.962.258.570		118,70	Satpol PP	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian realisasi kinerja dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	40,00	32.200.000	10	26.551.910	10	28.000.000	6	17.638.210	100,00	100,00	16,00	44.190.120	40,00	137,24	Satpol PP	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	16.100.000	5	13.273.390	5	14.000.000	3	8.720.480	100,00	100,00	8,00	21.993.870	40,00	136,61	Satpol PP	
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	16.100.000	5	13.278.520	5	13.278.520	3	8.917.730	100,00	100,00	8,00	22.196.250	40,00	137,86	Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12,00	15.560.832.910	12	12.301.286.152	12	12.301.286.152	6	6.605.955.491	100,00	100,00	18,00	18.907.241.643	150,00	121,51	Satpol PP	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	295,00	15.272.123.204	295	12.084.479.622	295	12.245.519.919	6	6.497.401.346	2,03	100,00	301,00	18.581.880.968	102,03	121,67	Satpol PP	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	277.324.706	12	208.891.730	12	221.630.000	6	108.554.145	100,00	100,00	18,00	317.445.875	37,50	114,47	Satpol PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,00	11.385.000	0	7.914.800	5	9.000.000	0	-	0	0	0	7.914.800	0,00	69,52	Satpol PP	
					Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	1236,00	413.478.189	18	56.020.000	14	90.492.000	0	1.155.500	0,00	1,28	18	57.175.500	1,46	13,83	Satpol PP	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1180,00	322.287.500	0	8.670.000	0	-	0	-			0	8.670.000	0,00	2,69	Satpol PP	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56,00	91.190.689	14	47.350.000	14	90.492.000	0	1.155.500	0,00	1,28	14	48.505.500	25,00	53,19	Satpol PP	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	290,00	280.821.339	241	317.785.006	239	317.785.006	85	88.947.167	35,56	27,99	326	406.732.173	112,41	144,84	Satpol PP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	6.255.425	1	2.085.000	1	2.600.000	0	444.000	0,00	17,08	1	2.529.000	25,00	40,43	Satpol PP	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,00	58.076.150	0	110.540.000	5	33.800.000	0	13.000.000	0,00	38,46	0	123.540.000	0,00	212,72	Satpol PP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32,00	64.063.898	8	41.269.215	8	30.573.000	2	7.701.000	25,00	25,19	10	48.970.215	31,25	76,44	Satpol PP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4,00	6.615.950	3	7.639.250	1	4.400.000	0	3.417.000	0,00	77,66	3	11.056.250	75,00	167,12	Satpol PP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Daerah	222,00	30.360.000	170	24.000.000	222	24.000.000	0	8.000.000	0,00	33,33	170	32.000.000	76,58	105,40	Satpol PP	
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	8,00	115.449.916	2	132.251.541	2	96.018.000	0	56.385.167	0,00	58,72	2	188.636.708	25,00	163,39	Satpol PP	
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase Tersedianya pengadaan barang milik daerah	4,00	32.748.320	0	9.650.000	1	11.500.000	0	-	0,00	0,00	0	9.650.000	0,00	29,47	Satpol PP	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,00	32.748.320	0	9.650.000	1	11.500.000	0	-	0,00	0,00	0	9.650.000	0,00	29,47	Satpol PP	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan telepon/ faximile, listrik, air dan posko damkar yang disediakan	20,00	53.199.690	5	34.381.567	5	48.750.000	3	23.853.900	60,00	48,93	8	58.235.467	40,00	109,47	Satpol PP	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	1.150.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	2	2.000.000	50,00	173,91	Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16,00	52.049.690	4	33.381.567	4	47.750.000	2	22.853.900	50,00	47,86	6	56.235.467	37,50	108,04	Satpol PP	
					Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	104,00	443.687.550	29	295.889.997	29	327.264.000	1	183.143.670	3,45	55,96	30	479.033.667	28,85	107,97	Satpol PP	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00	378.576.550	12	249.301.497	12	283.220.000	0	141.317.670	0,00	49,90	12	390.619.167	100,00	103,18	Satpol PP	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88,00	9.361.000	16	5.890.000	16	4.060.000	0	2.030.000	0,00	50,00	16	7.920.000	18,18	84,61	Satpol PP	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4,00	55.750.000	1	40.698.500	1	39.984.000	0	39.796.000	0,00	99,53	1	80.494.500	25,00	144,38	Satpol PP	
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan perda dan perbup	90,00	1.061.628.212	84,00%	791.415.690	84	603.923.000	84	122.781.060	100,00	20,33	8484,00%	914.196.750	94,27	86,11	Satpol PP	
					Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban UmumPersentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1796,00	520.239.301	86	476.040.090	1012	329.857.300	12	56.515.200	1,19	17,13	98	532.555.290	5,46	102,37	Satpol PP	
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20,00	121.482.916	5	80.525.490	5	78.595.500	3	34.816.500	60,00	44,30	8	115.341.990	40,00	94,95	Satpol PP	
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	48,00	30.876.596	12	14.330.300	12	15.725.800	3	3.726.000	25,00	23,69	15	18.056.300	31,25	58,48	Satpol PP	
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	72,00	38.265.169	18	52.107.000	18	43.668.000	6	12.003.700	33,33	27,49	24	64.110.700	33,33	167,54	Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24,00	220.668.690	6	22.508.000	6	73.822.000	0	1.531.000	0,00	2,07	6	24.039.000	25,00	10,89	Satpol PP	
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1468,00	35.075.000	0	274.972.300	930	85.213.000	0	-	0,00	0,00	0	274.972.300	0,00	783,96	Satpol PP	
					Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan-ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	28,00	47.420.930	7	25.425.500	7	25.872.000	0	4.438.000	0,00	17,15	7	29.863.500	25,00	62,98	Satpol PP	
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	72,00	17.250.000	18	6.171.500	18	4.961.000	0	-	0,00	0,00	18	6.171.500	25,00	35,78	Satpol PP	
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	64,00	9.200.000	0	-	16	2.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP	
					Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota	Presentase penegakan perda	104,00	207.186.239	26	166.825.600	26	118.613.200	0	5.333.860	0,00	4,50	26	172.159.460	25,00	83,09	Satpol PP	
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	8,00	45.784.462	2	58.956.600	2	16.569.000	0	-	0,00	0,00	2	58.956.600	25,00	128,77	Satpol PP	
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16,00	50.599.807	0	29.528.500	4	22.900.200	0	-	0,00	0,00	0	29.528.500	0,00	58,36	Satpol PP	
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	80,00	110.801.970	20	78.340.500	20	79.144.000	0	5.333.860	0,00	6,74	20	83.674.360	25,00	75,52	Satpol PP	
					Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kaPembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota	Persentase PPNS yang AktifPersentase PPNS yang Aktif	16,00	334.202.672	4	148.550.000	4	155.425.500	2	60.932.000	50,00	39,20	6	209.482.000	37,50	62,68	Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	16,00	334.202.672	4	148.550.000	4	155.452.500	2	60.932.000	50,00	39,20	6	209.482.000	37,50	62,68	Satpol PP	
					BPBD																BPBD	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Perkantoran	NILAI SAKIP	BB	20.505.493.000		4.964.951.913	B	5.414.958.281		2.545.305.469		47,01	0,00	7.510.257.382		36,63	BPBD	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian realisasi kinerja dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	36,00	120.000.000	9	14.270.140	9,00	16.94.9800	3,00	7.039.200	33,33		12,00	21.309.340	33,33	17,76	BPBD	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	60.000.000	4	7.052.050	4,00	8.449.800	1,00	2.781.200	25,00	32,91	5,00	9.833.250	31,25	16,39	BPBD	
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	60.000.000	5	7.218.090	5,00	8.500.000	2,00	4.258.000	40,00	50,09	7,00	11.476.090	35,00	19,13	BPBD	
					Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	48,00	19.300.000.000	12	4.521.339.770	12,00	4.837.339.155	6,00	2.349.169.687	50,00	48,56	18,00	6.870.509.457	37,50	35,60	BPBD	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3168,00	18.500.000.000	792	4.367.279.770	792,00	4.680.379.133	446,00	2.292.329.687	56,31	48,98	1238,00	6.659.609.457	39,08	36,00	BPBD	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200,00	800.000.000	300	154.060.000	300,00	156.960.000	107,00	56.840.000	35,67	36,21	407,00	210.900.000	33,92	26,36	BPBD	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	4,00	28.500.000	0	-	12,00	6.500.000	6,00	79.173.389	100,00	1218,05	6,00	79.173.389	150,00	277,80	BPBD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	661.493.000	12	73.830.843	12,00	160.799.026	6,00	79.173.389	50,00	49,24	18,00	153.004.232	37,50	23,13	BPBD	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	52,00	37.500.000	6	1.541.000	6,00	7.393.528	0,00	-	0,00	0,00	6,00	1.541.000	11,54	4,11	BPBD	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	109,00	114.000.000	24	15.476.900	4,00	45.300.000		27.220.000	0,00	60,09	24,00	42.696.900	22,02	37,45	BPBD	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	91,00	79.993.000	20	6.367.425	22,00	8.210.500	0,00	-	0,00	0,00	20,00	6.367.425	21,98	7,96	BPBD	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Daerah	1200,00	100.000.000	300	24.600.000	300,00	24.600.000	100,00	8.200.000	33,33	33,33	400,00	32.800.000	33,33	32,80	BPBD	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	132,00	330.000.000	30	25.845.518	35,00	53.430.000	21,00	33.275.889	60,00	62,28	51,00	59.121.407	38,64	17,92	BPBD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan telepon/ faximile, listrik, air dan posko damkar yang disediakan	48,00	230.000.000	12	22.943.360	12,00	36.600.300	6,00	9.973.193	50,00	27,25	18,00	32.916.553	37,50	14,31	BPBD	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144,00	230.000.000	28	22.943.360	36,00	36.600.300	12,00	9.973.193	33,33	27,25	40,00	32.916.553	27,78	14,31	BPBD	
				Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	37,00	165.500.000	19	332.567.800	19,00	363.270.000	4,00	99.950.000	21,05	27,51	23,00	432.517.800	62,16	261,34	BPBD	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Perizinannya	7,00	630.000.000	9	74.143.800	13,00	23.500.000	2,00	3.811.000	15,38	16,22	11,00	77.954.800	157,14	12,37	BPBD	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	850.000.000	9	256.464.000	13,00	335.870.000	2,00	95.084.00	15,38		11,00		110,00		BPBD	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	48.000.000	1	1.960.000	1,00	3.900.000	0,00	1.055.000	0,00	27,05	1,00	3.015.000	0,00	6,28	BPBD	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rasio desa tangguh bencana	28,24	320.000.000	16,57	62.487.000	20,00		0,00		0,00	0,00	16,57	62.487.000	58,68	19,53	BPBD	
					Cakupan Pelayanan Pasca bencana sesuai standar	100,00	462.000.000	100		100,00	171.960.000	5,00	4.950.000	5,00	0,00	105,00	4.950.000	105,00	1,07	BPBD	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga masyarakat yang mendapat kan informasi kebencanaan	60,00	70.000.000	45	8.320.000	45,00	9.000.000	0,00	-	0,00	0,00	45,00	8.320.000	75,00	11,89	BPBD	
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	14000,00	70.000.000	3000	8.320.000	3000,00	9.000.000	0,00		0,00	0,00	3000,00	8.320.000	21,43	11,89	BPBD	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pembentukan Desa Siaga Bencana	50,00	320.000.000	0	24.524.500	35,00	68.580.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	24.524.500	0,00	7,66	BPBD	
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13,00	320.000.000	0	24.524.500	3,00	68.580.000	0,00		0,00	0,00	0,00	24.524.500	0,00	7,66	BPBD	
				PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Prosentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana	100,00	392.000.000	100	29.642.500	100,00	94.380.000	-	4.950.000	5,24			34.592.500	8,82		BPBD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,Ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	94,00	94.000.000	25		25,00	12.960.000										
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	392.000.000	5	29.642.500	5,00	81.420.000	1,00	4.950.000	20,00	6,08	6,00	34.592.500	6,00	8,82	BPBD	
					PROGRAM PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layananan Kebakaran	40,90	120.000.000	38,1	27.159.500	39,50	89.736.000	3,00	74.738.000	7,59	83,29	41,10	101.897.500	100,49	84,91	BPBD	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran	75,00	120.000.000	57,4	27.159.500	60,00	89.736.000	88,00	74.738.000	146,67	83,29	145,40	101.897.500	193,87	84,91	BPBD	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100,00	120.000.000	25	27.159.500	90,00	89.736.000	74,00	74.738.000	82,22	83,29	99,00	101.897.500	99,00	84,91	BPBD	
					DINAS SOSIAL																DINAS SOSIAL	
					URUSAN SOSIAL			9.176.840.945		7.397.894.524		6.732.543.576	0,00	2136339188,00		31,73		9.534.233.712		103,89		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	BB (70)	4.400.883.945		3.326.328.651	BB	3.602.473.256	0,00	1.766.076.688		49,02	0,00	5.092.405.339		115,71	Dinas Sosial	
						Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang Mengikuti Diklat/ Bimtek	2500,00				3,00		3,00		100,00		3,00	-	0,12		Dinas Sosial	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat capaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	38.228.300	100,00	17.957.400	100,00	19.011.380	5,00	2.700.000	5,00	14,20	105,00	20.657.400	105,00	54,04	Dinas Sosial	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	4,00	19.848.300	4,00	8.195.700	4,00	8.808.180	0,00	-	0,00	0,00	4,00	8.195.700	100,00	41,29	Dinas Sosial	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	4.011.100	2,00	3.449.500	2,00	3.703.200	1,00	1.200.000	50,00	32,40	3,00	4.649.500	150,00	115,92	Dinas Sosial	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	14.368.900	3,00	6.312.200	2,00	6.500.000	1,00	1.500.000	50,00	23,08	4,00	7.812.200	100,00	54,37	Dinas Sosial	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja keuangan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	100,00	3.231.572.645	50,00	2.634.384.262	100,00	2.846.326.576	30,00	1.420.307.571	30,00	49,90	80,00	4.054.691.833	80,00	125,47	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	2.992.086.245	28,00	2.460.654.262	27,00	2.664.866.576	28,00	1.335.987.571	100,00	50,13	56,00	3.796.641.833	100,00	126,89	Dinas Sosial	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	234.291.000	12,00	173.730.000	12,00	179.360.000	6,00	82.820.000	50,00	46,18	18,00	256.550.000	150,00	109,50	Dinas Sosial	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	5.195.400	0,00	-	1,00	2.100.000	1,00	1.500.000	100,00	71,43	1,00	1.500.000	100,00	28,87	Dinas Sosial	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	8.277.000	100,00	5.799.500	100,00	6.500.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	5.799.500	100,00	70,07	Dinas Sosial	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	8.277.000	1	5.799.500	1,00	6.500.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	5.799.500	100,00	70,07	Dinas Sosial	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur terlatih yang meningkat kompetensinya	100,00	25.000.000	100	5.000.000	100,00	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	20,00	Dinas Sosial	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	25.000.000	1	5.000.000	2,00	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	5.000.000	20,00	20,00	Dinas Sosial	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	365.573.000	100,00	243.497.639	100,00	298.602.300	30,00	137.028.510	30,00	45,89	130,00	380.526.149	130,00	104,09	Dinas Sosial	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	5.094.000	12,00	3.991.000	12,00	3.990.000	6,00	1.918.000	50,00	48,07	18,00	5.909.000	150,00	116,00	Dinas Sosial	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	12.681.000	2,00	9.800.000	12,00	1.500.000	1,00	1.050.000	8,33	70,00	3,00	10.850.000	25,00	85,56	Dinas Sosial	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor, jasa, bahan, alat kebersihan kantor, dan logistik bahan bakar unit mesin generator set.	12,00	88.637.000	12,00	64.218.500	12,00	73.151.900	6,00	29.385.900	50,00	40,17	18,00	93.604.400	150,00	105,60	Dinas Sosial	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	25.621.000	12,00	18.785.000	12,00	23.843.400	6,00	11.008.000	50,00	46,17	18,00	29.793.000	150,00	116,28	Dinas Sosial	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300,00	31.835.000	300,00	25.000.000	300,00	25.000.000	150,00	12.450.000	50,00	49,80	450,00	37.450.000	150,00	117,64	Dinas Sosial	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	201.705.000	50,00	121.703.139	60,00	171.117.000	35,00	81.216.610	58,33	47,46	85,00	202.919.749	141,67	100,60	Dinas Sosial	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan kantor untuk sarana prasarana penunjang kinerja	100,00	188.805.000	100,00	123.900.000	100,00	88.200.000	25,00	60.000.000	25,00	68,03	125,00	183.900.000	125,00	97,40	Dinas Sosial	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12,00	188.805.000	8,00	123.900.000	8,00	88.200.000	2,00	60.000.000	25,00	68,03	10,00	183.900.000	83,33	97,40	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	100,00	156.564.000	100,00	41.045.000	100,00	55.770.000	50,00	17.335.117	50,00	31,08	150,00	58.380.117	150,00	37,29	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24,00	29.224.000	24,00	32.300.000	24,00	49.800.000	12,00	15.075.117	50,00	30,27	36,00	47.375.117	150,00	162,11	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,00	127.340.000	10,00	8.745.000	10,00	5.970.000	3,00	2.260.000	30,00	37,86	13,00	11.005.000	130,00	8,64	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	90,00	386.864.000	100,00	254.744.850	95,00	278.063.000	47,50	128.705.490	50,00	46,29	147,50	383.450.340	163,89	99,12	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00	339.749.000	2,00	225.122.500	2,00	238.810.000	2,00	101.009.000	100,00	42,30	4,00	326.131.500	200,00	95,99	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00	15.535.000	7,00	9.850.000	7,00	12.700.000	0,00	1.415.000	0,00	11,14	7,00	11.265.000	100,00	72,51	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	31.580.000	12,00	19.772.350	10,00	26.553.000	2,00	26.281.490	20,00	98,98	14,00	46.053.840	140,00	145,83	Dinas Sosial	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	90,00	1.124.734.000	82,50	665.554.000	82,50	642.843.000	2,00	153.424.500	2,42	23,87	84,50	818.978.500	93,89	72,82	Dinas Sosial	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kompetensinya.	90,00	1.124.734.000	82,50	665.554.000	82,50	642.843.000	2,00	153.424.500	2,42	23,87	84,50	818.978.500	93,89	72,82	Dinas Sosial	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	131,00	500.648.000	131,00	281.884.500	131,00	312.141.000	131,00	98.862.000	100,00	31,67	262,00	380.746.500	200,00	76,05	Dinas Sosial	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	9,00	52.718.000	9,00	26.545.500	9,00	28.809.000	9,00	9.450.000	100,00	32,80	18,00	35.995.500	200,00	68,28	Dinas Sosial	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya.	10,00	457.795.000	5,00	308.824.000	5,00	261.615.000	0,00	31.162.500	0,00	11,91	5,00	339.986.500	50,00	74,27	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1,00	113.573.000	1,00	48.300.000	1,00	40.278.000	1,00	13.950.000	100,00	34,63	2,00	62.250.000	200,00	54,81	Dinas Sosial	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS).	92,50	355.967.000	84,60	175.455.995	85,00	332.707.200	2,50	13.800.000	2,94	4,15	87,10	189.255.995	94,16	53,17	Dinas Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang menerima layanan rehabilitasi sosial	90,00	222.351.000	85,00	170.955.995	85,00	305.407.200	2,50	4.050.000	2,94	1,33	87,50	175.005.995	97,22	78,71	Dinas Sosial	
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	150,00	65.987.000	66,00	44.654.140	86,00	63.350.000	0,00	1.800.000	0,00	2,84	66,00	46.454.140	44,00	70,40	Dinas Sosial	
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50,00	53.470.000	11,00	36.617.700	3,00	12.750.000	0,00	-	0,00	0,00	11,00	36.617.700	22,00	68,48	Dinas Sosial	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	15,00	93.021.000	10,00	60.055.855	120,00	229.307.200	0,00	2.250.000	0,00	0,98	10,00	62.305.855	66,67	66,98	Dinas Sosial	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	200,00	9.873.000	144,00	29.628.300	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	29.628.300	0,00	300,09	Dinas Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial	82,50	133.616.000	57,98	4.500.000	77,25	27.300.000	0,00	9.750.000	0,00	35,71	57,98	14.250.000	70,28	10,66	Dinas Sosial	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0,00	-	0,00	-	20,00	22.800.000		9.750.000								
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15,00	7.640.000	9,00	4.500.000	9,00	4.500.000	0,00	-	0,00	0,00	9,00	4.500.000	60,00	58,90	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	63.669.000									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5,00	62.307.000			0,00	-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mendapat bantuan perlindungan dan jaminan sosial	77,50	2.878.858.000	66,12	3.124.101.678	72,50	2.043.922.040	20,12	173.474.800	27,75	8,49	86,24	3.297.576.478	111,28	114,54	Dinas Sosial	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	67,50	2.878.858.000	#####	99.728.800	62,50	2.043.922.040	12,62	173.474.800	20,19	8,49	240012,62	273.203.600	#####	9,49	Dinas Sosial	
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	240000,00	152.600.000	105,00	2.754.910.000	240000,00	105.319.640	#####	44.635.800	100,00	42,38	240105,00	2.799.545.800	100,04	1834,56	Dinas Sosial	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapat Pengetasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100,00	2.097.253.000	105,00	2.754.910.000	100,00	1.617.013.700	105,00	25.495.000	105,00	1,58	105,00	2.780.405.000	105,00	132,57	Dinas Sosial	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21000,00	463.216.000	21000,00	260.620.078	21000,00	262.908.700	21000,00	103.344.000	100,00	39,31	42000,00	363.964.078	200,00	78,57	Dinas Sosial	
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	165.789.000	10,00	8.842.800	10,00	58.680.000	0,00	-	0,00	0,00	10,00	8.842.800	50,00	5,33	Dinas Sosial	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat.	100,00	416.398.000	100,00	106.454.200	100,00	110.598.080	5,00	29.563.200	5,00	26,73	105,00	136.017.400	105,00	32,67	Dinas Sosial	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan perlindungan sosial pasca bencana dan selama masa tanggap darurat	100,00	25.468.000	100,00	9.775.000	100,00	10.600.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	9.775.000	100,00	38,38	Dinas Sosial	
					Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	12.734.000	0,00	-	10,00	5.600.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	12.734.000	11,00	9.775.000	10,00	5.000.000	0,00	-	0,00	0,00	11,00	9.775.000	22,00	76,76	Dinas Sosial	
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan Taruna Siaga Bencana yang berperan aktif dalam kesiapsiagaan bencana	100,00	390.930.000	100,00	96.679.200	100,00	99.998.080	20,00	29.563.200	20,00	29,56	120,00	126.242.400	120,00	32,29	Dinas Sosial	
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	241.944.000									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Sosial	
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	148.986.000	20,00	96.679.200	20,00	99.998.080	20,00	29.563.200	100,00	29,56	40,00	126.242.400	200,00	84,73	Dinas Sosial	
					TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI																DISNAKERTRANS	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB	13.784.000.000		2.428.907.976	BB	3.187.199.181	-	1.218.334.686		38,23		3.647.242.662		26,46	Disnakertrans	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,00	103.445.000	4,00	10.000.000	5	10.000.000	0	1.419.000	0,00	14,19	4,00	11.419.000	20,00	11,04	Disnakertrans	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	16,00	67.676.000	4,00	5.000.000	4	5.000.000	1	1.419.000	25,00	28,38	5,00	6.419.000	31,25	9,48	Disnakertrans	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4,00	35.769.000	0,00	5.000.000	1	5.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	13,98	Disnakertrans	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tenaga pendukung kegiatan yang terbayar honoraria	100,00	12.022.078.000	60,00%	2.143.356.651	100	2.829.199.181	30	1.027.682.338	30,00	36,32	30,60	3.171.038.989	30,60	26,38	Disnakertrans	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbavarkan gaji nya	104,00	11.233.623.000	26,00	1.998.642.651	26	2.663.419.181	26	956.829.338	100,00	35,92	52,00	2.955.471.989	50,00	26,31	Disnakertrans	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4,00	764.749.000	1,00	139.720.000	1	160.780.000	0	67.410.000	0,00	41,93	1,00	207.130.000	25,00	27,08	Disnakertrans	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	23.706.000	1,00	4.994.000	1	5.000.000	0	3.443.000	100,00	68,86	1,00	8.437.000	25,00	35,59	Disnakertrans	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang di asuransikan	100,00	30.818.000	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disnakertrans	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4,00	30.818.000	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disnakertrans	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100,00	666.293.000	30,00%	119.825.080	100	151.058.000	30	91.542.640	30,00	60,60	30,30	211.367.720	30,30	31,72	Disnakertrans	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	20.216.000	0,00	-	1	4.646.000	0	2.101.000	0,00	0,00	0,00	2.101.000	0,00	10,39	Disnakertrans	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4,00	212.689.000	0,00	33.859.700	1	50.000.000	0	20.923.500	0,00	41,85	0,00	54.783.200	0,00	25,76	Disnakertrans	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4,00	29.771.000	0,00	3.549.800	1	4.000.000	0	1.265.000	0,00	31,63	0,00	4.814.800	0,00	16,17	Disnakertrans	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1000,00	146.975.000	0,00	24.900.000	250	25.000.000	50	8.300.000	20,00	33,20	50,00	33.200.000	5,00	22,59	Disnakertrans	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64,00	256.642.000	4,00	57.515.580	16	67.412.000	4	58.953.140	25,00	87,45	8,00	116.468.720	12,50	45,38	Disnakertrans	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100,00	235.166.000	30,00%	59.488.120	100	80.692.000	30	43.012.203	30,00	53,30	30,30	102.500.323	30,30	43,59	Disnakertrans	
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang disediakan	4,00	16.595.000	-	-	1	4.050.000	0	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Disnakertrans	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12,00	218.571.000	1,00	59.488.120	3	76.642.000	1	43.012.203	33,33	56,12	2,00	102.500.323	16,67	46,90	Disnakertrans	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	100,00	214.157.000	65,00%	14.210.000	100	21.760.000	0	10.795.000	0,00	49,61	0,65	25.005.000	0,65	11,68	Disnakertrans	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4,00	214.157.000	1,00	14.210.000	1	21.760.000	0	10.795.000	0,00	49,61	1,00	25.005.000	25,00	11,68	Disnakertrans	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100,00	512.043.000	0,60	82.028.125	100	94.490.000	30	43.883.505	30,00	46,44	30,60	125.911.630	30,60	24,59	Disnakertrans	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan nya	16,00	512.043.000	2,00	82.028.125	4	94.490.000	1	43.883.505	25,00	46,44	3,00	125.911.630	18,75	24,59	Disnakertrans	
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	73,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	70	400.000.000	0	11.460.000	0,00	2,87	25,00	182.728.500	34,25	14,93	Disnakertrans	
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	290,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	100	400.000.000	0	11.460.000	0,00	2,87	25,00	182.728.500	8,62	14,93	Disnakertrans	
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	290,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	100	400.000.000	0	11.460.000	0,00	2,87	25,00	182.728.500	8,62	14,93	Disnakertrans	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	73,60	213.532.000	30,00%	147.268.000	80	50.000.000	0	15.240.500	0,00	30,48	0,30	162.508.500	100,00	76,10	Disnakertrans	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	73,60	213.532.000	30,00%	147.268.000	80	50.000.000	0	15.240.500	0,00	30,48	0,30	162.508.500	100,00	76,10	Disnakertrans	
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	4330,00	213.532.000	200,00	147.268.000	1050	50.000.000	0	15.240.500	0,00	30,48	200,00	162.508.500	4,62	76,10	Disnakertrans	
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	10,00	231.238.000	0,00	225.514.000	10,1	40.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	225.514.000	0,00	97,52	Disnakertrans	
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Hubungan Industrial	46,00	231.238.000	0,00	225.514.000	11	40.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	225.514.000	0,00	97,52	Disnakertrans	
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	4,00	231.238.000	0,00	225.514.000	1	40.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	225.514.000	0,00	97,52	Disnakertrans	
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	50,00	759.707.000	0,00	53.930.266	60	99.968.000	0	-	0,00	0,00	0,00	53.930.266	0,00	7,10	Disnakertrans	
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan transmigran	24,00	759.707.000	0,00	53.930.266	6	99.968.000	0	-	0,00	0,00	0,00	53.930.266	0,00	7,10	Disnakertrans	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	4,00	151.262.000	1,00	53.930.266	0	-	0	-			1,00	53.930.266	25,00	35,65	Disnakertrans	
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	24,00	608.445.000	0,00	-	1	99.968.000	0	6.146.000	0,00	0,00	0,00	6.146.000	0,00	1,01	Disnakertrans	
					P3AP2KB																P3AP2KB	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Dinas P3AP2KB	100,00	7.929.612.969		3.736.869.560	100,00	4.084.255.720	BB	5.744.465.307		140,65		9.481.334.867		119,57	P3AP2KB	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pada Perangkat daerah	100,00	22.595.200	98.05%	25.635.800	100,00	26.541.100	0,00	5.426.500	0,00	20,45		31.062.300		137,47	P3AP2KB	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	2.770.000	1,00	6.206.200	1,00	6.320.100	0,00	1.360.500	0,00	21,53	1,00	7.566.700	20,00	273,17	P3AP2KB	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,00	5.849.500	2,00	5.816.500	3,00	5.850.000	0,00	1.125.000	0,00	19,23	2,00	6.941.500	28,57	118,67	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00	8.876.000	3,00	8.854.500	3,00	8.876.000	0,00	841.000	0,00	9,47	3,00	9.695.500	100,00	109,23	P3AP2KB	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Eyaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	5.099.700	1,00	4.758.600	4,00	5.495.000	0,00	969.900	0,00	17,65	1,00	5.728.500	20,00	112,33	P3AP2KB	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi keuangan	100,00	6.848.435.489	91,06	3.028.099.298	100,00	3.456.540.120	100,00	2.062.275.712	100,00	59,66	191,06	5.090.375.010	191,06	74,33	P3AP2KB	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	6.416.276.489	14,00	2.846.558.398	14,00	3.256.640.820	orang/bu	1.957.531.712		60,11		4.804.090.110		74,87	P3AP2KB	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	421.660.000	12,00	176.500.000	12,00	194.400.000	3 Dokumen	73.774.000		37,95		250.274.000		59,35	P3AP2KB	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00	10.499.000	1,00	5.040.900	3,00	5.499.300	0,00	1.054.000	0,00	19,17	1,00	6.094.900	20,00	58,05	P3AP2KB	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan					1,00	6.500.000	0,00	-								
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kendaraan yang diasuransikan					1,00	6.500.000	0,00	-								
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	6,00	5.000.000	1,00	6.625.000	100,00	7.000.000	0,00	35.146.223	0,00	0,00	1,00	41.771.223	16,67	835,42	P3AP2KB	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6,00	5.000.000	1,00	6.625.000	1,00	7.000.000	10 Paket	-		0,00		6.625.000		132,50	P3AP2KB	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi umum	94,70	222.532.000		122.165.650	13,00	124.954.500	1 Paket	41.097.500		32,89		163.263.150		73,37	P3AP2KB	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	10.696.000	10,00	3.264.000	6,00	2.864.000	0,00	-	0,00	0,00	10,00	3.264.000	58,82	30,52	P3AP2KB	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	25.820.500	13,00	23.981.000	6,00	27.033.000	0,00	-	0,00	100,00	13,00	23.981.000	13,00	100,00	P3AP2KB	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15,00	50.050.500	11,00	10.240.500	3,00	16.517.500	0,00	-	0,00	100,00	11,00	10.240.500	73,33	20,46	P3AP2KB	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	566,00	59.700.000	388,00	29.750.000	13,00	34.000.000	0,00	-	0,00	0,00	388,00	29.750.000	68,55	49,83	P3AP2KB	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,00	76.265.000	20,00	54.930.150	12,00	44.540.000	0,00	-	0,00	0,00	20,00	54.930.150	76,92	72,03	P3AP2KB	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi umum	94,70	144.655.000	37,74	116.231.524	1,00	139.010.000	1 Laporan	112.807.147		81,15		229.038.671		158,33	P3AP2KB	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,00	61.880.000	12,00	52.611.524	12,00	99.010.000	0,00	52.807.147	0,00	53,34	12,00	105.418.671	600,00	170,36	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	82.775.000	1,00	63.620.000	22,00	40.000.000	2 Unit	60.000.000		100,00		123.620.000		149,34	P3AP2KB	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	22,00	679.895.280	11,59	438.112.288	22,00	323.710.000	3 Unit	66.230.000		20,46		504.342.288		74,18	P3AP2KB	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25,00	587.940.000	22,00	290.529.000	36,00	272.710.000	5,00	61.600.000	13,89	22,59	27,00	352.129.000	108,00	59,89	P3AP2KB	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	53,00	32.400.000	22,00	8.263.288	6,00	15.400.000	0,00	-	0,00	0,00	22,00	8.263.288	41,51	25,50	P3AP2KB	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53,00	9.678.440	36,00	56.750.000	2,00	6.130.000	2 Unit	-		0,00		56.750.000		586,35	P3AP2KB	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	20.900.000	2,00	60.800.000	2,00	15.000.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	60.800.000	100,00	290,91	P3AP2KB	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12,00	28.976.840	12,00	21.770.000	2,00	14.470.000	0,00	4.630.000	0,00	32,00	12,00	26.400.000	100,00	91,11	P3AP2KB	
					PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi angkatan kerja perempuan	66,00	2.390.965.800	2,24	1.252.401.988	62,00	888.969.300	1,60	38.377.800	2,58	4,32	3,84	1.290.779.788	5,82	53,99	P3AP2KB	
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase OPD yang melaksanakan PPRG	6,00	43.298.000	0,00	19.539.000	6,00	11.879.400	0,00	-	0,00	0,00	0,00	19.539.000	0,00	45,13	P3AP2KB	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	6,00	43.298.000		19.539.000	6,00	11.879.400	0,00	-	0,00	0,00	0,00	19.539.000	0,00	45,13	P3AP2KB	
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum,Ekonomi,Sosial pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase Kelompok Ekonomi Produktif Terampil	95,00	2.303.399.800	2,28	1.232.862.988	83,63	851.089.900	1,70	38.377.800	2,03	4,51	3,98	1.271.240.788	4,19	55,19	P3AP2KB	
					Sosialisasi Peningkatan partisipasi Perempuan Bidang politik, Hukum Sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	65,00	477.488.800	5,00	200.420.850	10 Dokumen	134.182.900	2,00	28.573.800		21,29	7,00	228.994.650	10,77	47,96	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	100,00	1.759.509.000	50,00	1.032.442.138	6 Organisasi	716.907.000	10,00	-	0,00	60,00	1.032.442.138	60,00	58,68	P3AP2KB		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Angka)		44.268.000	-	9 orang	26.000.000		38.850.000	0,00	0,00	0,00	38.850.000	0,00	87,76	P3AP2KB		
					Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)				9 orang	26.000.000	3,00	38.850.000									
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,01	257.724.000		17.100.918	0,01	113.673.700		8.705.000	0,00	7,66	0,00	25.805.918	0,00	10,01	P3AP2KB	
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100,00	188.472.000		17.100.918	0,01	101.500.000		-	0,00	0,00	0,00	17.100.918	0,00	9,07	P3AP2KB	
					Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pecehan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	47.118.000		17.100.918	1 Dokumen	101.500.000	0,00	-	0,00	0,00	17.100.918	0,00	36,29	P3AP2KB		
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat pendampingan					0,01	12.173.700	39,60	10.393.400								
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					15 orang	12.173.700	2 Orang	10.393.400								
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat pendampingan	10,00	47.118.000		17.100.918	0,01	22.134.000		-	0,00	0,00	0,00	17.100.918	0,00	36,29	P3AP2KB	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	47.118.000		17.100.918	20,00	22.134.000		-	0,00	0,00	0,00	17.100.918	0,00	36,29	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabup	Jumlah fasilitas perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan (Kali)		22.134.000		-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6,00	22.134.000		-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak	100,00	116.170.900		88.040.247	4 dokumen	59.367.000	0,00	-		0,00	0,00	88.040.247	0,00	75,79	P3AP2KB	
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana KIE pengendalian penduduk dan KB	100,00	116.170.900		88.040.247	4 dokumen	59.367.000	0,00	-		0,00	0,00	88.040.247	0,00	75,79	P3AP2KB	
					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10,00	116.170.900	4,00	88.040.247	100,00	59.367.000	0,00	-	0,00	0,00	4,00	88.040.247	40,00	75,79	P3AP2KB	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terbentuknya data terpilah Gender dan Anak	1,00	21.547.700		20.115.200	2,00	11.444.500	0,00	-	0,00	0,00	0,00	20.115.200	0,00	93,35	P3AP2KB	
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,00	21.547.700		20.115.200	2 Dokumen	11.444.500	0,00	-		0,00	0,00	20.115.200	0,00	93,35	P3AP2KB	
					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3,00	21.547.700	3,00	20.115.200	100,00	11.444.500	0,00	-	0,00	0,00	3,00	20.115.200	100,00	93,35	P3AP2KB	
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Kecamatan yang telah membentuk Forum Anak	100,00	212.117.400	33,75	81.116.605	3,00	127.834.600	30,20	80.577.000	1006,67	63,03	63,95	161.693.605	63,95	76,23	P3AP2KB	
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase forum anak yang aktif (melakukan kegiatan minimal 3 kali dalam 1 tahun)	10,00	60.627.300	79,17	23.742.755	20 organisasi	84.625.000	Organisasi	79.057.000	100,00	100,00		102.799.755	100,00	169,56	P3AP2KB	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5,00	60.627.300	28,00	26.592.200	100,00	84.625.000	45,60	79.057.000	45,60	100,00	73,60	105.649.200	100,00	174,26	P3AP2KB	
					Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase kecamatan layak anak		151.490.100	14,96	57.373.850	28,00	43.209.600	14,96	-	53,41	0,00	29,91	57.373.850	0,00	37,87	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	37.594.200	5,00	15.815.650	3 dokumen	17.499.600	0,00	-	0,00	5,00	15.815.650	166,67	42,07	P3AP2KB		
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	113.895.900	5,00	41.558.200	4 dokumen	25.710.000	20,55	-	100,00	0,00	25,55	41.558.200	100,00	36,49	P3AP2KB	
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat perlindungan	100,00	1.194.008.600		141.737.000	5 Dokumen	322.608.000	0,81	-	0,00	0,81	141.737.000	0,81	11,87	P3AP2KB		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100,00	1.194.008.600		141.737.000	1,00	69.020.000	0,00	-	0,00	0,00	141.737.000	0,00	11,87	P3AP2KB		
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	268.405.000	1,00	141.737.000	38 orang	253.588.000	2 Orang	6.195.000	2,44		147.932.000		55,12	P3AP2KB		
					Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	20,00	579.197.600			1,00	253.588.000	1,00	6.195.000	100,00	2,44	1,00	6.195.000	5,00	1,07	P3AP2KB	
					Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					20 laporan	69.020.000										
					Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ko	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (Orang)	10,00	294.406.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	83,00	990.199.700	0,09	312.655.870	10 Dokumen	975.847.000	0,00	-	0,00	0,09	312.655.870	0,11	31,58	P3AP2KB		
					Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase dokumen perencanaan pengendalian penduduk yang tersedia	1,00	142.247.700	0,00	48.766.280	-	24.768.000	0,00	-	0,00	0,00	48.766.280	0,00	34,28	P3AP2KB		
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1,00	120.732.600	0,00	40.812.180	1 dokumen	15.677.000	0,00	-	0,00	0,00	40.812.180	0,00	33,80	P3AP2KB		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	44,00	21.515.100	35,00	7.954.100	9 kegiatan	9.091.000	0,00	-		0,00	35,00	7.954.100	79,55	36,97	P3AP2KB	
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen kajian kependudukan	1,00	847.952.000	0,10	263.889.590	1,05	951.079.000	0,10	-	9,22	0,00	0,19	263.889.590	19,36	31,12	P3AP2KB	
					Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1,00	19.676.200	1,00	3.803.200	1,00	7.676.200	0,00	-	0,00	0,00	1,00	3.803.200	100,00	19,33	P3AP2KB	
					Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1,00	18.989.500	0,00	-	3,00	9.096.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan					6 unit	933.031.000	0,00	-								
					Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	10,00	797.286.300	6,00	260.086.390	6,00	747.385.300	0,00	-	0,00	0,00	6,00	260.086.390	60,00	32,62	P3AP2KB	
					Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	1,00	12.000.000			1 Dokumen	8.952.000			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BENCA NA (KB)	Prosentase peserta KB aktif	83,00	9.455.753.423	0,00	1.950.999.978	8,00	1.948.094.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.950.999.978	0,00	20,63	P3AP2KB	
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana KIE pengendalian penduduk dan KB	100,00	9.153.942.200	0,00	1.808.954.978	1 Laporan	1.845.330.000	0,00	-		0,00	0,00	1.808.954.978	0,00	19,76	P3AP2KB	
					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)		2.340.610.550			1 Dokumen	207.730.000			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,00	71.135.000	7,00	42.192.000	1 dokumen	24.504.000	0,00	-		0,00	7,00	42.192.000	7,00	59,31	P3AP2KB	
					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			1.774.269.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100,00	4.967.927.650	69,00	1.766.762.978	6 Unit	1.820.826.000	0,00	-	0,00	69,00	1.766.762.978	69,00	35,56		P3AP2KB		
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) yang melakukan pembinaan lini lapangan	100,00	147.584.000	0,00	42.583.000	80,00	47.563.000	0,00	-	0,00	0,00	42.583.000	0,00	28,85		P3AP2KB		
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100,00	63.105.000	3,00	24.314.000	9 organisasi	16.332.000	0,00	-	0,00	3,00	24.314.000	3,00	38,53		P3AP2KB		
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100,00	84.479.000	543,00	18.269.000	80,00	31.231.000	0,00	-	0,00	0,00	18.269.000	543,00	21,63		P3AP2KB		
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	100,00	154.227.223	0,00	99.462.000	7 unit	55.201.000	0,00	-	0,00	0,00	99.462.000	0,00	64,49		P3AP2KB		
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100,00	154.227.223	100,00	99.462.000	100 org	55.201.000	0,00	-	0,00	100,00	99.462.000	100,00	64,49		P3AP2KB		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio ketergantungan penduduk	100,00	2.984.634.500	0,02	2.354.368.999	69 Laporan	2.415.889.000	0,02	-	0,00	0,04	2.354.368.999	0,04	78,88		P3AP2KB		
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase angka kelahiran	100,00	2.984.634.500	0,02	2.354.368.999	546,00	2.415.889.000	0,02	-	0,00	0,00	0,04	2.354.368.999	0,04	78,88		P3AP2KB	
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	19,00	74.985.500	19,00	33.322.500	19 kelompok	21.449.000	0,00	-	0,00	19,00	33.322.500	100,00	44,44		P3AP2KB		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Kesejahteraan Keluarga (BKBB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	462,00	2.415.286.000	462,00	2.302.676.499	462 laporan	2.306.089.000	0,00	-	0,00	462,00	2.302.676.499	100,00	95,34	P3AP2KB		
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	420,00	158.780.000		40.585.000	1 laporan	15.927.000	-		0,00	0,00	40.585.000	0,00	25,56	P3AP2KB		
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1,00	335.583.000	0,00	-	3 laporan	72.424.000	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB		
					DINAS KETAHANAN PANGAN															DINAS KETAHANAN PANGAN		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	17.764.715.500		3.163.732.279	BB	3.588.750.478		1.601.191.929		44,62	0,00	4.764.924.208	26,82	Dinas Ketahanan Pangan		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20,00	66.000.000		12.863.500	100	13.010.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12.863.500	0,00	19,49	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	12,00	50.000.000	2	9.959.000	2	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	9.959.000	16,67	19,92	Dinas Ketahanan Pangan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	16.000.000	2	2.904.500	2	3.010.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2.904.500	25,00	18,15	Dinas Ketahanan Pangan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah	48,00	15.918.230.000		2.816.942.060	100	3.228.989.378		1.495.618.537	0,00	46,32	0,00	4.312.560.597	0,00	27,09	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31,00	15.000.000.000	31	2.661.325.060	31	3.074.909.378	31,00	1.420.948.537	100,00	46,21	62,00	4.082.273.597	200,00	27,22	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4,00	910.980.000	1	154.240.000	1	152.580.000	2,00	74.670.000	200,00	48,94	3,00	228.910.000	75,00	25,13	Dinas Ketahanan Pangan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	20,00	7.250.000	4	1.377.000	4	1.500.000	0,00	-	0,00	0,00	4,00	1.377.000	20,00	18,99	Dinas Ketahanan Pangan	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas yang diasuransi	4,00	32.500.000		6.251.280	1	6.500.000		6.371.080	0,00	98,02	0,00	12.622.360	0,00	38,84	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	32.500.000	1	6.251.280	1	6.500.000	1,00	6.371.080	100,00	98,02	2,00	12.622.360	50,00	38,84	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Administrasi UmumPerangkat daerah	48,00	673.148.000		139.808.806	12	128.621.100		19.702.312	0,00	15,32	0,00	159.511.118	0,00	23,70	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,00	17.000.000	12	3.733.000	12	2.200.000	0,00	-	0,00	0,00	12,00	3.733.000	100,00	21,96	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,00	95.000.000	5	41.550.000	5	20.000.000	5,00	-	0,00	0,00	10,00	41.550.000	125,00	43,74	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	12,00	215.000.000	12	40.514.600	12	48.000.000	0,00	-	0,00	0,00	12,00	40.514.600	100,00	18,84	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4,00	41.768.000	10	7.573.600	10	6.363.100	0,00	-	0,00	0,00	10,00	7.573.600	250,00	18,13	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	48,00	81.900.000	12	16.560.000	12	17.160.000	0,00	-	0,00	0,00	12,00	16.560.000	25,00	20,22	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	232,00	222.480.000	30	29.877.606	30	34.898.000	5,00	19.702.312	16,67	56,46	35,00	49.579.918	15,09	22,29	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran tagihan telp/faxmle, listrik dan kouta yang disediakan	100,00	300.337.500	22	60.000.000	29	63.060.000	0,00	30.000.000	0,00	47,57	22,00	90.000.000	22,00	29,97	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,00	96.337.500	12	19.200.000	12	22.260.000	0,00	-	0,00	0,00	12,00	19.200.000	25,00	19,93	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,00	54.000.000	16	10.800.000	16	10.800.000	0,00	-	0,00	0,00	16,00	10.800.000	33,33	20,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4,00	150.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1,00	30.000.000	100,00	100,00	2,00	60.000.000	50,00	40,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	72,00	774.500.000	8	127.866.633	8	148.570.000	8,00	49.500.000	100,00	33,32	16,00	177.366.633	22,22	22,90	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau layanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	72,00	774.500.000	8	127.866.633	8	148.570.000	9,00	49.500.000	112,50	33,32	17,00	177.366.633	23,61	22,90	Dinas Ketahanan Pangan	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Infrastruktur pendukung Kemandirian pangan	100,00	505.000.000	100	520.024.000	100	42.195.000	100,00	-	100,00	0,00	200,00	520.170.000	200,00	103,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,00	505.000.000		520.024.000	5	42.195.000		-	0,00	0,00	0,00	520.024.000	0,00	102,98	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	5,00	360.000.000	5	500.000.000	5	-	4,00	-	80,00		9,00	500.000.000	180,00	138,89	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	5,00	95.000.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Panean	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	5,00	50.000.000	1	20.024.000	1	42.195.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	20.024.000	20,00	40,05	Dinas Ketahanan Pangan	
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Penganeragaman ketersediaan pangan dan ketahanan pangan masyarakat	100,00	2.070.000.000	84,75	282.488.222	84,75	337.150.500	0,00	8.775.000	0,00	2,60			0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	20,00	180.000.000	0	77.296.622	1	166.660.000	0,00	8.775.000	0,00	3,00	0,00	86.071.622	0,00	47,82	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyusunan neraca bahan makanan	informasi neraca bahan makanan	5,00	55.000.000	1	42.574.647	1	37.170.000	1,00	8.775.000	100,00	23,61	2,00	51.349.647	40,00	93,36	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	pangan berbasis Sumber daya lokal yang tersedia	5,00	55.000.000	1	22.526.125	1	21.040.000	1,00	-	100,00	0,00	2,00	22.526.125	40,00	40,96	Dinas Ketahanan Pangan	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5,00	40.000.000	1	7.995.850	0	-	0,00	-			1,00	7.995.850	20,00	19,99	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan harga pangan	5,00	30.000.000	1	4.200.000	0	-	0,00	-			1,00	4.200.000	20,00	14,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (100 ton ekuivalen beras)	90000,00	1.670.000.000		7.920.000	19000	92.380.000		-	0,00	0,00	0,00	7.920.000	0,00	0,47	Dinas Ketahanan Pangan	
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	rencana kebutuhan pangan lokal	9,00	45.000.000	1	7.920.000	1	13.880.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	7.920.000	11,11	17,60	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah kab/kota	90000,00	1.625.000.000	0	-	10	78.500.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87,00	220.000.000		197.271.600	84,75	78.110.500		-	0,00	0,00	0,00	197.271.600	0,00	89,67	Dinas Ketahanan Pangan	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4,00	180.000.000	0	190.426.000	1	62.110.500	0,00	-	0,00	0,00	0,00	190.426.000	0,00	105,79	Dinas Ketahanan Pangan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5,00	40.000.000	1	6.845.600	1	16.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	6.845.600	20,00	17,11	Dinas Ketahanan Pangan	
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Jumlah Daerah Rawan Pangan	5,00	140.000.000	1	228.606.000	1	160.627.000	1,00	10.699.478	100,00	7,00	2,00	239.305.478	40,00	170,93	Dinas Ketahanan Pangan	
					PENYUSUNAN Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	5,00	170.000.000		48.321.324	1	100.000.000			0,00	0,00	0,00	48.321.324	0,00	28,42	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangnggjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyusunan , pemuktahiran dan analisis dan kerentanan pangan	Peta dan Analis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang dimuktahirkan	5,00	170.000.000	1	48.321.324	1	100.000.000	1		100,00	0,00	2,00	48.321.324	40,00	28,42	Dinas Ketahanan Pangan	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan kerawanan pangan kewenagan kab/kota	12,00	140.000.000		176.713.364	12	60.627.000		10.699.478	0,00	17,65	0,00	187.412.842	0,00	133,87	Dinas Ketahanan Pangan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	41,00	50.000.000	0	10.803.364	1	23.270.000	0	10.699.478	0,00	45,98	0,00	21.502.842	0,00	43,01	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,00	90.000.000	2	165.910.000	-	-	0	-	# REF1		2,00	165.910.000	40,00	184,34	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi					1	24.510.000									Dinas Ketahanan Pangan	
				Penyusunan peta situs kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah peta situs kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota					1	12.847.000									Dinas Ketahanan Pangan	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Industri pangan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan	100,00	125.000.000	100	4.756.100	100	24.703.000	100	-	100,00	0,00	200,00	4.756.100	200,00	3,80	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen makanan segar asal tumbuhan yang diuji	100,00	125.000.000		4.716.100	40	24.703.000		-	0,00	0,00	0,00	4.716.100	0,00	3,77	Dinas Ketahanan Pangan	
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5,00	45.000.000	15	995.000	0	-		-			15,00	995.000	300,00	2,21	Dinas Ketahanan Pangan	
				Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	5,00	35.000.000	1	490.000	0	-	1	-			2,00	490.000	40,00	1,40	Dinas Ketahanan Pangan	
				Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota					1	6.250.000									Dinas Ketahanan Pangan	
				Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					90	8.400.000									Dinas Ketahanan Pangan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5,00	45.000.000	1	3.231.100	1	10.053.000	1	-	100,00	0,00	2,00	3.231.100	40,00	7,18	Dinas Ketahanan Pangan	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP																DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	22.280.967.900		10.035.820.678	100,00	5.305.515.458	0	2.731.210.797	0,00	51,48	0,00	12.767.031.475		57,30	DLH	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	4,00	17.805.086.294	24	8.760.825.209	12,00	4.477.285.558	6	2.349.226.952	100,00	52,47	30,00	11.110.052.161	100,00	62,40	DLH	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,00	16.964.400.000	12	8.445.843.409	14,00	4.300.525.558	6	2.270.686.952	42,86	52,80	18,00	10.716.530.361	100,00	63,17	DLH	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dn pengujian verifikasi keuangan SKPD	4,00	840.686.294	12	314.981.800	1,00	176.760.000	0	78.540.000	0,00	44,43	12,00	393.521.800	100,00	46,81	DLH	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	4,00	30.817.394	1	6.206.200	1,00	6.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	6.206.200	25,00	20,14	DLH	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4,00	30.817.394	1	6.206.200	1,00	6.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	6.206.200	25,00	20,14	DLH	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1535,00	1.234.339.157	51	341.332.913	12,00	249.740.300	17	114.775.640	100,00	45,96	68,00	456.108.553	4,43	36,95	DLH	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	36,00	14.264.187	3	2.656.000	1,00	3.356.000	1	-	100,00	0,00	4,00	2.656.000	11,11	18,62	DLH	
					penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	341.000.000	12	5.880.000	2,00	24.555.700	2	21.500.000	100,00	87,56	14,00	27.380.000	14,00	8,03	DLH	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	420,00	291.341.164		99.219.200	7,00	48.686.500	7	20.868.000	100,00	42,86	7,00	120.087.200	1,67	41,22	DLH	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	125,00	255.531.784	12	89.639.000	3,00	59.305.100	3	12.910.000	100,00	21,77	15,00	102.549.000	12,00	40,13	DLH	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	162,00	118.623.260	12	33.825.550	1,00	25.020.000	1	10.675.000	100,00	42,67	13,00	44.500.550	8,02	37,51	DLH	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	692,00	213.578.762	12	110.113.163	3,00	88.817.000	3	48.822.640	100,00	54,97	15,00	158.935.803	2,17	74,42	DLH	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72,00	151.704.000	12	44.877.037	12,00	38.579.600	1	1.817.000	8,33	4,71	13,00	46.694.037	18,06	30,78	DLH	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72,00	151.704.000	12	44.877.037	1,00	38.579.600	1	1.817.000	100,00	4,71	13,00	46.694.037	18,06	30,78	DLH	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	318,00	2.896.938.755	173	882.579.319	12,00	533.410.000	26	265.391.205	100,00	49,75	199,00	1.147.970.524	62,58	39,63	DLH	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannva	132,00	2.567.952.460	70	813.379.319	17,00	468.310.000	3	261.189.205	17,65	55,77	73,00	1.074.568.524	55,30	41,85	DLH	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6,00	266.687.749	8	45.000.000	23,00	65.100.000	23	4.202.000	100,00	6,45	31,00	49.202.000	516,67	18,45	DLH	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	180,00	62.298.546	95	24.200.000	0,00	-	0	-			95,00	24.200.000	52,78	38,85	DLH	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase izin lingkungan (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yang dilaksanakan dengan baik	75,00	1.613.000.000	1	402.450.000	1,00	337.478.000	1	81.616.091	100,00	24,18	2,00	484.066.091	2,67	30,01	DLH	
					Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota dan dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3,00	53.000.000	1	-	1,00	-	1	-	100,00		2,00	-	66,67	0,00	DLH	
					Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan rpplhKabupaten/Kota yang disusun	3,00	275.000.000	0	-	1,00	-	0	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	DLH	
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen KLHS	1,00	1.560.000.000	1	402.450.000	1,00	337.478.000	1	81.616.091	100,00	24,18	2,00	484.066.091	100,00	31,03	DLH	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1,00	1.560.000.000	1	402.450.000	1,00	337.478.000	1	81.616.091	100,00	24,18	2,00	484.066.091	100,00	31,03	DLH	
					PROGRAM PENGEENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	75,00	1.429.381.268	1	53.590.015		121.933.200	0	49.398.100	0,00	40,51	1,00	102.988.115	1,33	7,21	DLH	
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6,00	356.491.268	1	53.590.015	22,00	113.017.600	0	48.273.100	0,00	42,71	1,00	101.863.115	16,67	28,57	DLH	
					Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1,00	336.424.404	1	71.176.000	1,00	86.777.600	1	36.507.600	100,00	42,07	2,00	107.683.600	100,00	32,01	DLH	
					pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	20,00	26.000.000	17	41.686.000	20,00	3.650.000	20	1.042.500	100,00	28,56	37,00	42.728.500	100,00	164,34	DLH	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah air udara dan laut	40,00	356.491.268	1	53.590.015	2,00	22.590.000	0	10.723.000	0,00	47,47	1,00	64.313.015	2,50	18,04	DLH	
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembersihan sungai dan penyediaan sarana petugas pembersih	12,00	1.072.890.000	0	5.632.000	2,00	8.915.600	1	1.125.000	50,00	12,62	1,00	6.757.000	8,33	0,63	DLH	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	jumlah dokumen hasil koordinsi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	12,00	1.072.890.000	0	5.632.000	1,00	8.915.600	1	1.125.000	100,00	12,62	1,00	6.757.000	8,33	0,63	DLH	
					PROGRAM PENGEENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pencemaran status mutu air	20,00	34.432.512	1	450.000	3,00	10.800.000	1	-	33,33	0,00	2,00	450.000	10,00	1,31	DLH	
					Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi pengelolaan TPS limbah B3	45,00	34.432.512	1	450.000	3,00	10.800.000	1	-	33,33	0,00	2,00	450.000	4,44	1,31	DLH	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45,00	34.432.512	1	450.000	1,00	10.800.000	1	-	100,00	0,00	2,00	450.000	4,44	1,31	DLH	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase ketersediaan data/informasi SDA dan LH yang dapat diakses	100,00	451.086.659	115	21.254.611	187,00	43.737.000	187	9.330.000	100,00	21,33	302,00	30.584.611	100,00	6,78	DLH	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan dan kegiatan pengawasan lingkungan hidup	310,00	451.086.659	115	21.254.611	187,00	43.737.000	187	9.330.000	100,00	21,33	302,00	30.584.611	97,42	6,78	DLH	
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi ya ng diberikan	60,00	69.090.861	51	12.250.000	110,00	20.400.000	110	4.905.000	100,00	24,04	161,00	17.155.000	268,33	24,83	DLH	
					pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi ya ng diberikan	100,00	215.506.250	1	5.254.611	2,00	12.437.000	2	-	100,00	0,00	3,00	5.254.611	3,00	2,44	DLH	
					Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi oleh pemerintah kabupaten/kota	100,00	39.436.545	12	2.100.000	0,00	-	0	-			12,00	2.100.000	12,00	5,33	DLH	
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi pengawasan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD	250,00	127.053.003	51	1.650.000	75,00	10.900.000	75	4.425.000	100,00	40,60	126,00	6.075.000	50,40	4,78	DLH	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	75,00	379.125.060	4	10.550.000	75,00	62.045.000	6	33.055.000	5,33	53,28	10,00	43.605.000	13,33	11,50	DLH	
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	111,00	379.125.060	4	10.550.000	75,00	62.045.000	6	33.055.000	5,33	53,28	10,00	43.605.000	9,01	11,50	DLH	
					Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat dunia usaha dunia pendidikan filantrophie yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	111,00	379.125.060	4	10.550.000	6,00	62.045.000	6	33.055.000	100,00	53,28	10,00	43.605.000	9,01	11,50	DLH	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah	52,50	4.368.189.243		860.692.250	37,00	974.950.400	32	478.343.441	86,49	49,06	32,00	1.339.035.691	60,95	30,65	DLH	
					Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan persampahan	52,00	4.368.189.243	801	860.692.250	37,00	974.950.400	32	478.343.441	86,49	49,06	833,00	1.339.035.691	1601,92	30,65	DLH	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang dipilih dikumpulkan diangkut diolah diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	52,00	2.675.323.151	800	752.597.250	31,00	638.986.400	31,00	305.395.941	100,00	47,79	801,00	1.057.993.191	1540,38	39,55	DLH	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan pengumpulan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir	25,00	1.692.866.092	1	108.095.000	1,00	323.364.000	1	170.547.500	100,00	52,74	2,00	278.642.500	8,00	16,46	DLH	
					Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	12,00	26.372.578	1	2.002.000	5,00	12.600.000	5	2.400.000	100,00	19,05	6,00	4.402.000	50,00	16,69	DLH	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	DISDUKCAPIL
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Saktip	BB	23.312.000.000	BB	5.226.239.066	BB	5.657.647.185	BB	2.346.356.307	BB	41,47	BB	7.572.595.373	BB	32,48	Disdukcapil	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100,00	40.460.000	100	4.246.000	100	4.753.000	12,5	1.180.250	12,50	24,83	112,50	5.426.250	112,50	13,41	Disdukcapil	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	21.298.000	5	2.267.500	5	2.550.000	0	-	0,00	0,00	5,00	2.267.500	25,00	10,65	Disdukcapil	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	19.162.000	3	1.978.500	2	2.203.000	2	1.180.250	100,00	53,57	5,00	3.158.750	41,67	16,48	Disdukcapil	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan	100,00	18.240.340.000	100	3.770.155.699	100	4.353.121.885	70,14	1.918.486.131	70,14	44,07	170,14	5.688.641.830	170,14	31,19	Disdukcapil	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288,00	17.680.000.000	72	3.631.738.699	72	4.204.722.585	36	1.857.928.131	50,00	44,19	108,00	5.489.666.830	37,50	31,05	Disdukcapil	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480,00	555.000.000	120	137.620.000	120	147.560.000	60	60.080.000	50,00	40,72	180,00	197.700.000	37,50	35,62	Disdukcapil	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	5.340.000	1	797.000	1	839.300	1	478.000	100,00	56,95	2,00	1.275.000	50,00	23,88	Disdukcapil	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	52.000.000	100	12.989.760	100	6.500.000	100	6.389.600	100,00	98,30	200,00	19.379.360	200,00	37,27	Disdukcapil	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	52.000.000	2	12.989.760	1	6.500.000	1	6.389.600	100,00	98,30	3,00	19.379.360	37,50	37,27	Disdukcapil	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	95,00	40.000.000	100	2.875.000	-	-	0	-			100,00	2.875.000	105,26	7,19	Disdukcapil	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00	40.000.000	1	2.875.000	-	-	0	-			1,00	2.875.000	12,50	7,19	Disdukcapi	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	99,00	3.161.480.000	100	968.836.148	98	909.212.300	28,87	298.717.753	29,46	32,85	128,87	1.267.553.901	130,17	40,09	Disdukcapi	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	47.480.000	1	6.151.000	1	6.420.000	0	-	0,00	0,00	1,00	6.151.000	25,00	12,95	Disdukcapi	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20,00	2.490.000.000	5	651.076.200	7	816.003.300	2	231.632.000	28,57	28,39	7,00	882.708.200	35,00	35,45	Disdukcapi	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16,00	117.000.000	4	30.610.060	3	9.715.000	1	1.890.000	33,33	19,45	5,00	32.500.060	31,25	27,78	Disdukcapi	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	208,00	117.000.000	53	22.230.000	60	25.150.000	29	18.615.000	48,33	74,02	82,00	40.845.000	39,42	34,91	Disdukcapi	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00	390.000.000	12	258.768.888	12	51.924.000	6	46.580.753	50,00	89,71	18,00	305.349.641	37,50	78,29	Disdukcapi	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,00	85.000.000	100	110.622.500	96	13.000.000	50	1.800.000	52,08	13,85	150,00	112.422.500	151,52	132,26	Disdukcapi	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22,00	85.000.000	6	110.622.500	2	13.000.000	1	1.800.000	50,00	13,85	7,00	112.422.500	31,82	132,26	Disdukcapi	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,00	816.000.000	100	172.456.789	98	181.210.000	50	73.182.573	51,02	40,39	150,00	245.639.362	151,52	30,10	Disdukcapi	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	545.000.000	12	120.606.789	12	133.880.000	6	65.116.573	50,00	48,64	18,00	185.723.362	37,50	34,08	Disdukcapi	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48,00	271.000.000	12	51.850.000	12	47.330.000	6	8.066.000	50,00	17,04	18,00	59.916.000	37,50	22,11	Disdukcapi	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,00	876.720.000	100	184.057.170	98	189.850.000	20,26	46.600.000	20,67	24,55	120,26	230.657.170	121,47	26,31	Disdukcapi	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20,00	25.600.000	5	2.794.700	5	4.500.000	0	-	0,00	0,00	5,00	2.794.700	25,00	10,92	Disdukcapi	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	589.120.000	5	107.903.000	5	126.510.000	5	43.850.000	100,00	34,66	10,00	151.753.000	50,00	25,76	Disdukcapi	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80,00	172.000.000	26	48.519.470	26	37.120.000	5	2.750.000	19,23	7,41	31,00	51.269.470	38,75	29,81	Disdukcapi	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	48.000.000	1	11.822.000	1	12.720.000	0	-	0,00	0,00	1,00	11.822.000	25,00	24,63	Disdukcakil	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	88,00	42.000.000	27	13.018.000	23	9.000.000	0	-	0,00	0,00	27,00	13.018.000	30,68	31,00	Disdukcakil	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase lembaga yang memanfaatkan data/dokumen kependudukan	80,00	250.000.000	75	26.288.864	70,25	8.622.000	21,62	612.000	30,78	7,10	96,62	26.900.864	120,78	10,76	Disdukcakil	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standar	100,00	250.000.000	100	26.288.864	100	8.622.000	25	612.000	25,00	7,10	125,00	26.900.864	125,00	10,76	Disdukcakil	
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	48,00	250.000.000	12	26.288.864	12	8.622.000	3	612.000	25,00	7,10	15,00	26.900.864	31,25	10,76	Disdukcakil	
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan	100,00	356.000.000	100	296.743.000	100	25.425.000	0	-	0,00	0,00	100,00	296.743.000	100,00	83,35	Disdukcakil	
					Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan	100,00	356.000.000	100	296.743.000	100	25.425.000	0	-	0,00	0,00	100,00	296.743.000	100,00	83,35	Disdukcakil	
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	8,00	356.000.000	2	296.743.000	2	25.425.000	0	-	0,00	0,00	2,00	296.743.000	25,00	83,35	Disdukcakil	
					DINAS PMP																DINAS PMP	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	BB	15.068.048.000		4.244.791.498	1.148	3.157.574.489	1	-	0,09		1,00				Dinas PMP	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80,00	124.366.000	16	28.718.780	16	26.399.883	-	-							Dinas PMP	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16,00	35.313.000	4	2.564.000	4	5.389.083	-	-							Dinas PMP	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	16,00	61.621.000	4	13.348.900	4	13.850.000	-	-							Dinas PMP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48,00	27.432.000	11	8.115.880	12	7.153.500	-	-							Dinas PMP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai reuvi saki	144,00	11.193.755.000	27	2.598.895.003	27	2.755.816.068	13	1.410.738.254	48,15	51,19	40,00	4.009.633.257	27,78	35,82	Dinas PMP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78,00	10.317.373.000	14	2.417.270.603	14	2.558.917.068	8	1.320.418.254	57,14	51,60	22,00	3.737.688.857	28,21	36,23	Dinas PMP	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	62,00	854.000.000	12	176.270.000	12	190.640.000	6	90.320.000	50,00	47,38	18,00	266.590.000	29,03	31,22	Dinas PMP	
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran skpd	4,00	22.382.000	1	5.354.400	1	6.259.000	0	-	0,00	0,00	1,00	5.354.400	25,00	23,92	Dinas PMP	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	894,00	1.256.260.000	98	175.250.482	321	147.597.340	115	76.098.896	35,83	51,56	213,00	251.349.378	23,83	20,01	Dinas PMP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60,00	25.000.000	6	12.586.500	6	10.001.000	1	1.757.250	16,67	17,57	7,00	14.343.750	11,67	57,38	Dinas PMP	
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	24,00	48.000.000	6	9.805.500	6	7.660.000	4	4.916.500	66,67	64,18	10,00	14.722.000	41,67	30,67	Dinas PMP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	350,00	299.135.000	20		20	106.909.340	2	15.506.000	10,00	14,50	22,00	15.506.000	6,29	5,18	Dinas PMP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	65,00	100.000.000	4	25.462.200	4	23.009.000	2	11.572.800	50,00	50,30	6,00	37.035.000	9,23	37,04	Dinas PMP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	220,00	130.000.000	240	33.720.000	240	42.500.000	100	18.490.000	41,67	43,51	340,00	52.210.000	154,55	40,16	Dinas PMP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175,00	654.125.000	45	108.766.116	45	124.649.000	6	23.856.346	13,33	19,14	51,00	132.622.462	29,14	20,27	Dinas PMP	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	130,00	749.000.000	7	604.475.000	7	71.762.000	4	17.833.667	57,14	24,85	11,00	622.308.667	8,46	83,09	Dinas PMP	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		247.000.000	2	47.250.000	2	41.900.000	-	-							Dinas PMP	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	75,00	502.000.000	5	259.840.000	5	29.862.000	4	17.833.667	80,00	59,72	9,00	277.673.667	12,00	55,31	Dinas PMP	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	105,00	290.000.000	16	30.680.539	24	59.300.000	9	23.379.159	37,50	39,43	25,00	54.059.698	23,81	18,64	Dinas PMP	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	60,00	240.000.000	9	23.080.444	12	46.900.000	3	1.830.000	25,00	3,90	12,00	24.910.444	20,00	10,38	Dinas PMP	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45,00	50.000.000	7	7.550.000	12	12.400.000	6	21.549.159	50,00	173,78	13,00	29.099.159	28,89	58,20	Dinas PMP	
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	74,00	660.990.000	6	75.467.075	5	96.717.500	2	44.293.000	40,00	45,80	8,00	119.760.075	10,81	18,12	Dinas PMP	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30,00	580.740.000	1	668.000	2	2.200.000	-	-							Dinas PMP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	15,00	16.250.000	2	98.749.075	2	94.527.500	1	34.451.000	50,00	36,45	3,00	133.200.075	20,00	819,69	Dinas PMP	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	25,00	64.000.000	1	9.950.000	1	9.990.000	1	9.842.000	100,00	98,52	2,00	19.792.000	8,00	30,93	Dinas PMP	
					PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah pekan yang berkinerja baik	15,00	646.775.000	0	109.506.843	4	125.520.000	1	4.787.710	25,00	3,81	1,00	114.294.553	6,67	17,67	Dinas PMP	
					Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah pekan mandiri	15,00	646.775.000	0	109.506.843	4	125.520.000	1	4.787.710	25,00	3,81	1,00	114.294.553	6,67	17,67	Dinas PMP	
					Pembentukan ,penghapusan,penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah dokumen pembentukan,penghapusan,penggabungan dan perubahan satatus desa	8,00	200.000.000		19.268.843	2	25.520.000	1	4.787.710	50,00	18,76	1,00	24.056.553	12,50	12,03	Dinas PMP	
					Fasilitasi sarana dan prasarana desa	jumlah sarana dan prasarana desa yang terbangun	8,00	446.775.000		90.238.000	2	100.000.000	-	-							Dinas PMP	
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah pekan yang berkinerja baik	21,00	457.000.000	1	73.635.000	0	30.000.000	0	-	0,00	1,00	73.635.000	4,76	16,11	Dinas PMP		
					Fasilitasi kerja sama antar desa	jumlah pekan maju	21,00	457.000.000	1	73.635.000	0	30.000.000	0	-	0,00	1,00	73.635.000	4,76	16,11	Dinas PMP		
					Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten /kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa	4,00	357.000.000	1	51.255.000		15.000.000	0	-	0,00	1,00	51.255.000	25,00	14,36	Dinas PMP		
					Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak kevtiga dalam kabupaten /kota	jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten /kota	4,00	100.000.000		3.000.000		15.000.000	0	-	0,00	0,00	3.000.000	0,00	3,00	Dinas PMP		
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pekan yang berkinerja baik	90,00	6.745.027.000	331	357.525.949	772	1.180.578.450	224	117.225.448	29,02	9,93	555,00	474.751.397	616,67	7,04	Dinas PMP	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah pekan berkembang	3447,00	6.745.027.000	331	357.525.949	772	1.180.578.450	224	117.225.448	29,02	9,93	555,00	474.751.397	16,10	7,04	Dinas PMP	
					Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	504,00	357.420.000	92	226.510.043	126	255.811.300	22	42.773.448	17,46	16,72	114,00	269.283.491	22,62	75,34	Dinas PMP	
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	630,00	1.057.337.000	126	56.931.899	126	60.000.000	12	8.235.000	9,52	13,73	138,00	65.166.899	21,90	6,16	Dinas PMP	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	630,00	268.065.000	61	132.349.750	63	90.000.000	13	12.530.000	20,63	13,92	74,00	144.879.750	11,75	54,05	Dinas PMP	
					Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas aparatur	252,00	268.065.000	63	128.800.300	63	48.919.400	0	-	0,00	0,00	63,00	128.800.300	25,00	48,05	Dinas PMP	
						jumlah bumdes yang aktif	70,00	852.700.000	10	109.093.500	70	81.318.000	10	3.898.000	14,29	4,79	20,00	112.991.500	28,57	13,25	Dinas PMP	
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	jumlah bumdes yang aktif	225,00	852.700.000	10	109.093.500	70	81.318.000	10	3.898.000	14,29	4,79	20,00	112.991.500	8,89	13,25	Dinas PMP	
					Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	jumlah kepala desa					63	123.875.000	3	900.000								
					Fasilitasi manajemen pemerintah desa	jumlah dokumen manajemen pemerintah desa	252,00	600.000.000	60	151.893.258	63	158.642.400	3	2.880.000	4,76	1,82	63,00	154.773.258	25,00	25,80	Dinas PMP	
					Fasilitasi pengelolaan aset desa	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	252,00	265.065.000	60	38.150.000	63	29.922.000	3	1.620.000	4,76	5,41	63,00	39.770.000	25,00	15,00	Dinas PMP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	504,00	446.775.000	126	73.313.925	126	38.554.400	120	27.164.875	95,24	70,46	246,00	100.478.800	48,81	22,49	Dinas PMP	
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	36,00	1.218.432.000	9	291.001.500	9	293.535.750	8	164.349.000	88,89	55,99	17,00	455.350.500	47,22	37,37	Dinas PMP	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	30,00	6.033.834.860	292	853.344.369	292	2.206.168.127	11	399.132.490	3,77	18,09	303,00	1.252.476.859	1010,00	20,76	Dinas PMP	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan		12.247.111.000	292	853.344.369	292	2.206.168.127	11	399.132.490	3,77	18,09	303,00	1.252.476.859		10,23	Dinas PMP	
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan ,pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu ,LPM dan karang taruna),lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	5,00	4.903.065.000	1	1.087.478.500	1	1.089.768.500	-	3.930.000		0,36		1.091.408.500		22,26	Dinas PMP	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW ,PKK,Posyandu ,LPM,dan karang taruna),lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	600,00	1.116.826.000	150	156.777.575	150	180.000.000	-	-							Dinas PMP	
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu ,LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarkat hukum adat	2,00	402.097.000	64	166.150.500	64	117.190.027	4	14.010.000	6,25	11,95	68,00	180.160.500	3400,00	44,81	Dinas PMP	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan hasil desa	450,00	1.376.067.000	64	163.711.000	64	90.682.000	-	-							Dinas PMP	
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfatatan teknologi tepat guna	5,00	982.905.000	3	133.565.600	3	153.527.600	1	25.052.500	33,33	16,32	4,00	158.618.100	80,00	16,14	Dinas PMP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	36,00	268.065.000	1	63.133.544	1	70.000.000	1	25.621.870	100,00	36,60	2,00	88.755.414	5,56	33,11	Dinas PMP	
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	9,00	2.948.086.000	9	544.430.719	9	500.000.000	6	330.518.120	66,67	66,10	15,00	874.948.839	166,67	29,68	Dinas PMP	
					DINAS PERHUBUNGAN																DINAS PERHUBUNGAN	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	29.409.257.500		6.428.988.353	BB	7.435.173.238		3.460.954.176		46,55	0,00	9.889.942.529		33,63	Dinas Perhubungan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,00	27.728.000	11	6.202.700	11	6.376.000	0	256.000	0,00	4,02	11,00	6.458.700	55,00	23,29	Dinas Perhubungan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	5.948.000	3	1.319.650	3	1.341.000	0	-	0,00	0,00	3,00	1.319.650	25,00	22,19	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	4.800.000	1	1.103.600	1	1.105.000	0	-	0,00	0,00	1,00	1.103.600	25,00	22,99	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	4.800.000	1	1.006.800	1	1.105.000	0	-	0,00	0,00	1,00	1.006.800	25,00	20,98	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	1.800.000	1	445.700	1	450.000	0	-	0,00	0,00	1,00	445.700	25,00	24,76	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan DPA-SKPD perubahan	4,00	1.800.000	1	446.450	1	450.000	0	256.000	0,00	56,89	1,00	702.450	25,00	39,03	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	4.180.000	2	915.100	2	955.000	0	-	0,00	0,00	2,00	915.100	25,00	21,89	Dinas Perhubungan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	4.400.000	2	965.400	2	970.000	0	-	0,00	0,00	2,00	965.400	25,00	21,94	Dinas Perhubungan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	523,00	24.940.072.000	124	5.417.447.767	124	6.438.666.638	124	3.082.489.022	100,00	47,87	248,00	8.499.936.789	47,42	34,08	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	511,00	24.932.872.000	121	5.415.858.067	121	6.437.026.638	121	3.081.703.522	100,00	47,87	242,00	8.497.561.589	47,36	34,08	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	3.200.000	1	775.700	1	800.000	0	-	0,00	0,00	1,00	775.700	25,00	24,24	Dinas Perhubungan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8,00	4.000.000	2	814.000	2	840.000	1	785.500	50,00	93,51	3,00	1.599.500	37,50	39,99	Dinas Perhubungan	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,00	80.460.000	3	13.977.550	3	14.019.900	4	13.430.320	133,33	95,79	7,00	27.407.870	58,33	34,06	Dinas Perhubungan	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan barang milik daerah SKPD	8,00	76.000.000	2	12.967.400	2	13.000.000	2	12.721.350	100,00	97,86	4,00	25.688.750	50,00	33,80	Dinas Perhubungan	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4,00	4.460.000	1	1.010.150	1	1.019.900	2	708.970	200,00	69,51	3,00	1.719.120	75,00	38,55	Dinas Perhubungan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	8,00	40.000.000	1	5.000.000	2	14.000.000	1	-	50,00		2,00		25,00		Dinas Perhubungan	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasrkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8,00	40.000.000	1	5.000.000	2	14.000.000	1	-	50,00		2,00		25,00		Dinas Perhubungan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1456,00	1.274.779.000	360	268.482.034	350	215.635.900	82	41.095.065	23,43	19,06	442,00	309.577.099	30,36	24,28	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang sediakan	32,00	10.600.000	8	2.565.000	8	2.640.000	2	791.000	25,00	29,96	10,00	3.356.000	31,25	31,66	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20,00	322.000.000	5	51.867.700	5	50.785.500	2	11.749.000	40,00	23,13	7,00	63.616.700	35,00	19,76	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	44,00	235.000.000	11	46.130.800	11	36.404.400	2	4.758.100	18,18	13,07	13,00	50.888.900	29,55	21,65	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang unangan yang disediakan	1104,00	111.000.000	276	27.750.000	276	27.750.000	69	7.200.000	25,00	25,95	345,00	34.950.000	31,25	31,49	Dinas Perhubungan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256,00	596.179.000	60	140.168.534	50	98.056.000	7	16.596.965	14,00	16,93	67,00	156.765.499	26,17	26,30	Dinas Perhubungan	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di adakan	25,00	257.850.000	5	35.635.000	55	49.600.000	50	21.750.000	90,91	43,85	55,00	57.385.000	220,00	22,26	Dinas Perhubungan	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11,00	149.200.000	0	-	54	36.600.000	50	21.750.000	92,59	59,43	50,00	21.750.000	454,55	14,58	Dinas Perhubungan	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14,00	108.650.000	5	35.635.000	1	13.000.000			0,00	0,00	5,00	35.635.000	35,71	32,80	Dinas Perhubungan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	56,00	1.028.748.500	14	256.185.579	14	203.269.800	8	123.215.261	57,14	60,62	22,00	379.400.840	39,29	36,88	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	48,00	994.210.500	12	247.779.279	12	124.651.800	6	46.918.561	50,00	37,64	18,00	294.697.840	37,50	29,64	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,00	34.538.000	2	8.406.300	2	78.618.000	2	76.296.700	100,00	97,05	4,00	84.703.000	50,00	245,25	Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	156,00	1.759.620.000	36	426.057.723	35	493.700.000	14	178.718.508	40,00	36,20	50,00	604.776.231	32,05	34,37	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	52,00	880.840.000	13	211.456.468	13	254.420.000	7	92.117.508	53,85	36,21	20,00	303.573.976	38,46	34,46	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	786.440.000	5	184.006.255	5	196.760.000	2	64.910.000	40,00	32,99	7,00	248.916.255	35,00	31,65	Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	84,00	43.040.000	17	18.270.000	17	15.920.000	4	3.700.000	23,53	23,24	21,00	21.970.000	25,00	51,05	Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4,00	49.300.000	1	12.325.000	1	26.600.000	1	17.991.000	100,00	67,64	2,00	30.316.000	50,00	61,49	Dinas Perhubungan	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan titik rawan kecelakaan	82,00	43.511.877.428		9.909.474.725	81	8.902.405.500		5.519.750.328	0,00	62,00	0,00	15.429.225.053	0,00	35,46	Dinas Perhubungan	
					Persentase Uji Kir kendaraan	88,00				87,25				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	83,00	38.523.084.500	255	9.357.773.125	81,5	8.306.693.000	217	5.270.448.628	266,26	63,45	472,00	14.628.221.753	568,67	37,97	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang di jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1255,00	2.900.000.000	250	549.562.800	215	590.000.000	215	503.103.520	100,00	85,27	465,00	1.052.666.320	37,05	36,30	Dinas Perhubungan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	20,00	35.623.084.500	5	8.808.210.325	5	7.716.693.000	2	4.767.345.108	40,00	61,78	7,00	13.575.555.433	35,00	38,11	Dinas Perhubungan	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pringsewu					87,5	290.046.000	7.000	175.000.000								
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemenuhan Fasilitas Terminal Tipe C	67,50	595.000.000	3	40.147.000	63	41.340.000	2	29.187.000	3,17	70,60	5,00	69.334.000	7,41	11,65	Dinas Perhubungan	
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana Terminal yang dilakukan pengembangan	6,00	300.000.000	1	14.652.000	1	15.000.000	1	14.652.000	100,00	97,68	2,00	29.304.000	33,33	9,77	Dinas Perhubungan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan di pelihara	14,00	295.000.000	2	25.495.000	2	26.340.000	1	14.535.000	50,00	55,18	3,00	40.030.000	21,43	13,57	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pringsewu	88,00	1.819.240.000	7010	292.541.000	87,5	290.046.000	50	175.000.000	57,14	60,34	7060,00	467.541.000	8022,73	25,70	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	3,00	454.100.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	2.500.000	33,33	0,55	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32500,00	837.500.000	7000	175.000.000	7000	175.000.000	7000	175.000.000	100,00	100,00	14000,00	350.000.000	43,08	41,79	Dinas Perhubungan	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	36,00	527.640.000	9	115.041.000	9	115.046.000	-	0,00	0,00	9,00	115.041.000	25,00	21,80	Dinas Perhubungan		
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Laporan pengawasan,pengendalian efektifitas, dan forum lalu lintas	8,00	32.720.000	2	13.412.300	2	14.330.000	-	0,00	0,00	2,00	13.412.300	25,00	40,99	Dinas Perhubungan		
					Pegawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	4,00	18.000.000	1	4.400.000	1	3.185.000	-	0,00	0,00	1,00	4.400.000	25,00	24,44	Dinas Perhubungan		
					Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4,00	14.720.000	1	9.012.300	1	11.145.000	-	0,00	0,00	1,00	9.012.300	25,00	61,22	Dinas Perhubungan		
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi andalalin yang terawasi	4,00	13.500.000	1	3.280.000	1	2.750.000	-	0,00	0,00	1,00	3.280.000	25,00	24,30	Dinas Perhubungan		
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi andalalin yang terawasi	4,00	13.500.000	1	3.280.000	1	2.750.000	-	0,00	0,00	1,00	3.280.000	25,00	24,30	Dinas Perhubungan		
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Pelaksanaan Inspeksi, audit, dan Pemantauan	28,00	2.492.332.928	8	194.732.300	8	283.591.500	2	72.711.700	25,00	25,64	10,00	267.444.000	35,71	10,73	Dinas Perhubungan	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota	4,00	80.000.000	1	17.055.800	1	18.240.000	-	0,00	0,00	1,00	17.055.800	25,00	21,32	Dinas Perhubungan		
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan angkutan umum	24,00	2.412.332.928	7	177.676.500	7	265.351.500	2	72.711.700	28,57	27,40	9,00	250.388.200	37,50	10,38	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	8,00	36.000.000	2	7.589.000	2	4.995.000	1	1.590.000	50,00	31,83	3,00	9.179.000	37,50	25,50	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota daam 1 (satu) KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	8,00	36.000.000	2	7.589.000	2	4.995.000	1	1.590.000	50,00	31,83	3,00	9.179.000	37,50	25,50	Dinas Perhubungan	
					DINAS KOMINFO																DISKOMINFO	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	13.862.000.000	B	3.608.850.106	BB	3.561.179.860	B	1.845.271.664		51,82		5.454.121.770		39,35	DISKOMINFO	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	100,00	47.581.000	100	16.762.965	100	16.749.100	50,00	7.644.330	50,00	45,64	150,00	24.407.295	150,00	51,30	DISKOMINFO	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	33.931.000	5	13.576.165	5	13.738.100	2,00	4.745.330	40,00	34,54	7,00	18.321.495	35,00	54,00	DISKOMINFO	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	13.650.000	4	3.186.800	4	3.011.000	1,00	2.899.000	25,00	96,28	5,00	6.085.800	125,00	44,58	DISKOMINFO	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi keuangan	100,00	11.057.896.000	100	2.664.351.422	100	2.918.171.760	50,00	1.506.628.550	50,00	51,63	150,00	4.170.979.972	150,00	37,72	DISKOMINFO	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72,00	10.150.976.000	19	2.454.270.422	18	2.706.723.760	20,00	1.414.698.550	100,00	52,27	39,00	3.868.968.972	54,17	38,11	DISKOMINFO	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800,00	883.550.000	200	207.320.000	200	208.920.000	102,00	91.930.000	51,00	44,00	302,00	299.250.000	37,75	33,87	DISKOMINFO	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,00	23.370.000	2	2.761.000	2	2.528.000	1,00	-	50,00	0,00	3,00	2.761.000	37,50	11,81	DISKOMINFO	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah	100,00	223.450.000	100	60.446.683	100	36.000.000	50,00	25.201.780	50,00	70,00	150,00	85.648.463	150,00	38,33	DISKOMINFO	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31,00	223.450.000	7	60.446.683	8	36.000.000	2,00	25.201.780	25,00	70,00	9,00	85.648.463	29,03	38,33	DISKOMINFO	
					Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi Pendapatan daerah Kewenangan perangkat daerah	100,00	98.950.000	100	15.941.400	-	-	0,00	-	-		100,00	15.941.400	100,00	16,11	DISKOMINFO	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48,00	98.950.000	12	15.941.400	-	-	0,00	-	-		12,00	15.941.400	25,00	16,11	DISKOMINFO	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	85.000.000	27	5.750.000	-	-	0,00	-	-		27,00	5.750.000	27,00	6,76	DISKOMINFO	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,00	85.000.000	2	5.750.000	-	-	0,00	-			2,00	5.750.000	13,33	6,76	DISKOMINFO	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	758.623.000	100	265.709.491	100	236.810.900	50,00	135.207.923	50,00	57,10	150,00	400.917.414	150,00	52,85	DISKOMINFO	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16,00	9.000.000	1	8.980.000	1	4.500.000	1,00	4.250.000	100,00	94,44	2,00	13.230.000	12,50	147,00	DISKOMINFO	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24,00	373.133.000	12	68.350.200	6	75.738.900	6,00	25.997.300	100,00	34,32	18,00	94.347.500	75,00	25,29	DISKOMINFO	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20,00	32.090.000	5	7.163.325	5	7.484.000	5,00	7.057.150	100,00	94,30	10,00	14.220.475	50,00	44,31	DISKOMINFO	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,00	344.400.000	18	181.215.966	18	149.088.000	9,00	97.903.473	50,00	65,67	27,00	279.119.439	34,62	81,05	DISKOMINFO	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	100,00	130.400.000	100	71.240.000	100	-	0,00	-	0,00		100,00	71.240.000	100,00	54,63	DISKOMINFO	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8,00	42.500.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8,00	43.500.000	1	8.400.000	0	-	0,00	-			1,00	8.400.000	12,50	19,31	DISKOMINFO	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12,00	44.400.000	8	62.840.000	0	-	0,00	-			8,00	62.840.000	66,67	141,53	DISKOMINFO	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	595.600.000	100	180.203.895	100	131.724.100	50,00	61.504.356	50,00	46,69	150,00	241.708.251	150,00	40,58	DISKOMINFO	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	595.600.000	12	180.203.895	12	131.724.100	6,00	61.504.356	50,00	46,69	18,00	241.708.251	37,50	40,58	DISKOMINFO	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	864.500.000	100	328.444.250	100	221.724.000	50,00	109.084.725	50,00	49,20	150,00	437.528.975	150,00	50,61	DISKOMINFO	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya	6,00	738.500.000	6	159.464.250	6	182.380.000	6,00	84.334.725	100,00	46,24	12,00	243.798.975	100,00	33,01	DISKOMINFO	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1,00	40.000.000	14	139.700.000	1	10.064.000	1,00	9.620.000	100,00	95,59	15,00	149.320.000	1500,00	373,30	DISKOMINFO	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25,00	86.000.000	25	29.280.000	25	29.280.000	13,00	15.130.000	52,00	51,67	38,00	44.410.000	152,00	51,64	DISKOMINFO	
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65,00	13.801.573.187	15	3.079.749.813	60	1.755.351.800	15,00	1.160.150.397	25,00	66,09	30,00	4.239.900.210	46,15	30,72	DISKOMINFO	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65,00	13.801.573.187	15	3.079.749.813	60	1.755.351.800	15,00	1.160.150.397	25,00	66,09	30,00	4.239.900.210	46,15	30,72	DISKOMINFO	
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48,00	301.820.813	12	356.874.400	12	1.120.000	6,00	-	50,00	0,00	18,00	356.874.400	37,50	118,24	DISKOMINFO	
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	48,00	531.955.627	12	196.325.200	12	95.972.000	6,00	6.610.000	50,00	6,89	18,00	202.935.200	37,50	38,15	DISKOMINFO	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48,00	1.818.625.000	12	330.373.138	12	311.005.000	6,00	-	50,00	0,00	18,00	330.373.138	37,50	18,17	DISKOMINFO	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	48,00	689.171.747	12	142.340.000	12	143.080.000	6,00	70.274.000	50,00	49,12	18,00	212.614.000	37,50	30,85	DISKOMINFO	
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	920,00	10.460.000.000	185	2.053.837.075	225	1.204.174.800	189,00	1.083.266.397	100,00	89,96	374,00	3.137.103.472	40,65	29,99	DISKOMINFO	
					Program aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,25	16.593.981.250	2,97	1.933.751.315	2,45	1.431.144.600	2,97	657.405.989	121,22	45,94	5,94	2.591.157.304	182,77	15,62	DISKOMINFO	
					Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,25	16.593.981.250	2,97	1.933.751.315	2,45	1.431.144.600	2,97	657.405.989	121,22	45,94	5,94	2.591.157.304	182,77	15,62	DISKOMINFO	
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1,00	2.155.062.500	1	354.438.145	1	241.517.000	1,00	120.000.000	100,00	49,69	2,00	474.438.145	100,00	22,02	DISKOMINFO	
					Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48,00	12.930.375.000	12	1.452.554.570	12	1.060.730.000	6,00	497.688.149	50,00	46,92	18,00	1.950.242.719	37,50	15,08	DISKOMINFO	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	48,00	1.508.543.750	12	126.758.600	12	128.897.600	6,00	39.717.840	50,00	30,81	18,00	166.476.440	37,50	11,04	DISKOMINFO	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.489.044.313		115.434.000		1.003.000		-	0,00	0,00	0,00	115.434.000	0,00	7,75	DISKOMINFO	
					Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	37,00	1.489.044.313	15	115.434.000	18	1.003.000	18,00	-	100,00	0,00	33,00	115.434.000	89,19	7,75	DISKOMINFO	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	37,00	1.489.044.313	15	115.434.000	18	1.003.000	18,00	-	100,00	0,00	33,00	115.434.000	89,19	7,75	DISKOMINFO	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48,00	1.489.044.313	12	115.434.000	12	1.003.000	6,00	-	50,00	0,00	18,00	115.434.000	37,50	7,75	DISKOMINFO	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			4.064.671.857	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO	
					Program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi	100,00	4.064.671.857	0,71759	-	81,08	-	100,00	-	123,33	0,00	100,72	-	100,72	0,00	DISKOMINFO	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengamanan informasi	100,00	3.633.659.357	0,71759	-	81,08	-	100,00	-	123,33	0,00	100,72	-	100,72	0,00	DISKOMINFO	
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	6,00	1.487.980.000	2	-	2	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	33,33	0,00	DISKOMINFO	
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,00	284.468.250	3	-	12	-	3,00	-	0,00	0,00	6,00	-	12,50	0,00	DISKOMINFO	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48,00	352.667.357	3	-	12	-	3,00	-	25,00	0,00	6,00	-	12,50	0,00	DISKOMINFO	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37,00	1.508.543.750	37	-	37	-	37,00	-	100,00	0,00	74,00	-	200,00	0,00	DISKOMINFO	
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengamanan informasi	100,00	431.012.500	0	-	81,08	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO	
					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37,00	431.012.500	0	-	27	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO	
					DINAS KOPERASI DAN UMKM																DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	100,00	21.828.284.000	BB	4.656.259.460		4.883.095.916		3.199.068.603		65,51		7.855.328.063		35,99	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,00	41.602.000	3	11.684.725	3	18.901.000	6	21.161.000	200,00	111,96	9,00	32.845.725	56,25	78,95	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	22.695.000	2	5.698.725	2	5.664.600	4	11.324.200	200,00	199,91	6,00	17.022.925	50,00	75,01	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	18.907.000	1	5.986.000	1	13.236.400	2	9.836.800	200,00	74,32	3,00	15.822.800	75,00	83,69	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	48,00	19.109.300.000	1	3.866.743.473	1	4.343.809.716	2	2.842.336.037	200,00	65,43	3,00	6.709.079.510	6,25	35,11	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan honor selama 1 tahun	50,00	17.915.775.000	12	3.629.583.098	12	4.125.466.916	6	2.671.793.437	50,00	64,76	18,00	6.301.376.535	36,00	35,17	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.171.724.000	12	232.205.000	12	213.320.000	6	160.500.000	50,00	75,24	18,00	392.705.000	450,00	33,52	DISKOP,UMKM, PERINDAG	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	4,00	21.801.000	1	4.955.375	1	5.022.800	2	10.042.600	200,00	199,94	3,00	14.997.975	75,00	68,79	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.069.478.000	12	274.341.631	12	292.033.200	24	171.059.193	200,00	58,58	36,00	445.400.824	75,00	41,65	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39,00	25.132.000	12	4.951.000	12	5.835.000	2	11.670.000	16,67	200,00	14,00	16.621.000	35,90	66,13	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan kebutuhan bahan logistik kantor	48,00	318.245.000	13	83.526.900	13	76.494.500	6	46.068.000	46,15	60,22	19,00	129.594.900	39,58	40,72	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	48,00	101.998.000	34	21.250.000	34	22.555.700	41	12.817.300	120,59	56,83	75,00	34.067.300	156,25	33,40	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlahsurat kabardan bahan bacaan	136,00	132.846.000	34	27.200.000	34	28.020.000	27	7.600.000	79,41	27,12	61,00	34.800.000	44,85	26,20	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	48,00	491.257.000	12	137.413.731	12	159.128.000	6	92.903.893	50,00	58,38	18,00	230.317.624	37,50	46,88	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	32,00	233.382.000	1	96.080.000	1	-	0	-	0,00		1,00	96.080.000	3,13	41,17	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32,00	233.382.000	1	96.080.000	1	-	0	-	0,00		1,00	96.080.000	3,13	41,17	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	398.255.000	12	58.333.544	12	69.292.000	6	51.797.373	50,00	74,75	18,00	110.130.917	37,50	27,65	DISKOP UMKM , PERINDAG	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	398.255.000	12	58.333.544	12	69.292.000	6	51.797.373	50,00	74,75	18,00	110.130.917	37,50	27,65	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	976.267.000	3	345.791.332	3	159.060.000	6	112.715.000	200,00	70,86	9,00	458.506.332	18,75	46,97	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	684.735.000	3	109.954.025	3	133.120.000	6	91.435.000	200,00	68,69	9,00	201.389.025	45,00	29,41	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	189.645.000	1	217.097.307	1	-	0	-	0,00		1,00	217.097.307	100,00	114,48	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20,00	101.887.000	20	18.740.000	20	25.940.000	5	21.280.000	25,00	82,04	25,00	40.020.000	125,00	39,28	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Usaha Menengah		270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	2	3.000.000	25,00	5,51	10,00	26.166.000		9,69	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Berkembang/ meningkatnya kualitas Koperasi kabupaten Pringsewu	32,00	270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	2	3.000.000	25,00	5,51	10,00	26.166.000	31,25	9,69	DISKOP,UMKM , PERINDAG	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		32,00	270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	2	3.000.000	25,00	5,51	10,00	26.166.000	31,25	9,69	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Usaha Menengah	400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100	-	0	-	0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya pengelola/pengurus Koperasi dan wirausahawan baru	400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100	-	0	-	0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100	-	0	-	0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah	99,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	60	36.260.300	200,00	74,37	90,00	93.240.469	90,91	31,08	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan terdatanya UMKM	30,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	60	36.260.300	200,00	74,37	90,00	93.240.469	300,00	31,08	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		120,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	35	36.260.300	116,67	74,37	65,00	93.240.469	54,17	31,08	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah		1.400.000.000	25	227.694.578	25	166.027.000	25	-	100,00	0,00	50,00	227.694.578		16,26	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kenentingan	Terbina dan terdatanya UMKM	6,12	1.400.000.000	25	227.694.578	25	166.027.000	25	-	100,00	0,00	50,00	227.694.578	816,99	16,26	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		120,00	1.100.000.000	25	162.204.943	25	-	0	-	0,00		25,00	162.204.943	20,83	14,75	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		100,00	300.000.000	30	65.489.635	30	166.027.000	0	-	0,00	0,00	30,00	65.489.635	30,00	21,83	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah					25	150.281.500	50	10.010.000								
					Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terbina dan terdatanya UMKM					25	150.281.500	50	10.010.000								
					Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						25	150.281.500	-	10.010.000								

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket	
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal		5.290.250.000	4	151.075.006	4	64.936.500	8	102.141.400	200,00	157,29	12,00	253.216.406		4,79	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangun/terawat/terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan daerah		5.290.250.000	4	151.075.006	4	64.936.500	8	102.141.400	200,00	157,29	12,00	253.216.406		4,79	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5.290.250.000	4	151.075.006	4	64.936.500	0	102.141.400	0,00	157,29	4,00	253.216.406		4,79	DISKOP,UMKM, PERINDAG		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib ukur	7,00	5.842.434.000	7	554.480.645	7	118.942.000	14	87.073.000	200,00	73,21	21,00	641.553.645	300,00	10,98	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan atas barang dan jasa yang beredar	7,00	5.842.434.000	7	554.480.645	7	118.942.000	14	87.073.000	200,00	73,21	21,00	641.553.645	300,00	10,98	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		7,00	552.186.000	7	195.034.545	7	118.942.000	1	87.073.000	14,29	73,21	8,00	282.107.545	114,29	51,09	DISKOP,UMKM, PERINDAG		
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		7,00	5.290.248.000	7	359.446.100	7	-	0	-	0,00		7,00	359.446.100	100,00	6,79	DISKOP,UMKM, PERINDAG		
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib ukur	97,00		9	148.088.214	9	25.698.800	18	27.260.000	200,00	106,07	27,00	175.348.214		27,84	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksana dan terawasinya pelaksanaan kemetrologian	997,00	853.670.000	9	148.088.214	9	25.698.800	18	27.260.000	200,00	106,07	27,00	175.348.214	2,71	20,54	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	9,00	443.704.000	557	62.735.214	557	-	0	-	0,00		557,00	62.735.214	6188,89	14,14	DISKOP,UMKM, PERINDAG		
				Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	9,00	409.966.000	557	85.353.000	557	25.698.800	0	27.260.000	0,00	106,07	557,00	112.613.000	6188,89	27,47	DISKOP,UMKM, PERINDAG		
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	2	113.478.600	200,00	31,50	3,00	633.836.421		18,75	59,80	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terpromosikannya produk dalam negeri	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	2	113.478.600	200,00	31,50	3,00	633.836.421		18,75	59,80	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Cakupan Produk yang dipromosikan, Jumlah Kelembagaan dan kerjasama kemitraan yang dikembangkan	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	0	113.478.600	0,00	31,50	1,00	633.836.421		6,25	59,80	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase sentra industri kecil yang berkembang	100,00	5.341.950.000	9	1.867.612.228	9	719.539.000	18	250.968.665	200,00	34,88	27,00	2.118.580.893		27,00	39,66	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan IKM yang mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan daya saing dan omset usaha IKM	9,00	5.341.950.000	9	1.867.612.228	9	719.539.000	18	250.968.665	200,00	34,88	27,00	2.118.580.893	300,00	39,66	DISKOP,UMKM , PERINDAG		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan IKM yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan	521,00	743.926.000	110	154.654.000	110	169.539.000	0	22.224.000	0,00	13,11	110,00	176.878.000	21,11	23,78	DISKOP,UMKM, PERINDAG		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan IKM yang mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	32,00	272.276.000	3	89.957.000	3	100.000.000	0	42.394.500	0,00	42,39	3,00	132.351.500	9,38	48,61	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Promosi/Pameran Industri dagang Kecil dan Menengah dan Kegiatan Pembinaan Promosi Kerajinan Daerah (Dekranasda)	36,00	4.325.748.000	1	1.623.001.228	1	450.000.000	0	186.350.165	0,00	41,41	1,00	1.809.351.393	2,78	41,83	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan bina kelompok pengrajin	9,00	4.467.984.000	9	263.410.432	9	330.461.000	18	494.660.436	200,00	149,69	27,00	758.070.868	300,00	16,97	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya promosi dan pendataan kerajinan dan IKM Kabupaten Pringsewu	9,00	4.467.984.000	9	263.410.432	9	330.461.000	18	494.660.436	200,00	149,69	27,00	758.070.868	300,00	16,97	DISKOP,UMKM , PERINDAG	
					Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Cakupan jumlah Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9,00	4.467.984.000	200	263.410.432	200	330.461.000	101	494.660.436	50,50	149,69	301,00	758.070.868	3344,44	16,97	DISKOP,UMKM, PERINDAG	
					DINAS PMPTSP																PMPTSP	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	17.814.000.000	BB	4.694.695.026	BB	4.273.712.401	0	2.000.076.765		46,80		6.694.771.791		37,58	PMPTSP	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	78.000.000	2	16.849.435	2	23.298.000	1	4.767.050	50,00	20,46	3,00	21.616.485	37,50	27,71	PMPTSP	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	8.685.000	1	4.767.050								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	78.000.000	2	16.849.435	2	14.613.000	0	-	0,00	0,00	2,00	16.849.435	25,00	21,60	PMPTSP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan selama 1 Tahun	56,00	15.151.000.000	12	3.287.095.123	1	3.225.564.517	6	1.590.855.870	600,00	49,32	18,00	4.877.950.993	32,14	32,20	PMPTSP	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1586,00	15.106.000.000	336	3.272.868.483	392	3.214.337.517	192	1.587.738.120	48,98	49,40	528,00	4.860.606.603	33,29	32,18	PMPTSP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	45.000.000	1	14.226.640	1	11.227.000	1	3.117.750	100,00	27,77	2,00	17.344.390	50,00	38,54	PMPTSP	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan selama 1 Tahun	4,00	40.000.000	1	6.412.000	0	-	0	-			1,00	6.412.000	25,00	16,03	PMPTSP	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	40.000.000	1	6.412.000	0	-	0	-			1,00	6.412.000	25,00	16,03	PMPTSP	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.432.000.000	12	1.147.218.285	12	246.497.800	6	88.952.638	50,00	36,09	18,00	1.236.170.923	37,50	86,32	PMPTSP	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48,00	136.000.000	12	7.736.000	2	7.456.000	0	-	0,00	0,00	12,00	7.736.000	25,00	5,69	PMPTSP	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60,00	467.000.000	15	932.704.000	1	39.634.000	0	-	0,00	0,00	15,00	932.704.000	25,00	199,72	PMPTSP	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					10	11.849.000	0	-								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48,00	111.000.000	12	49.485.050	10	25.730.000	4	6.416.000	40,00	24,94	16,00	55.901.050	33,33	50,36	PMPTSP	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48,00	113.000.000	12	49.596.800	15	28.273.800	10	9.097.500	66,67	32,18	22,00	58.694.300	45,83	51,94	PMPTSP	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960,00	107.000.000	240	27.100.000	240	28.000.000	60	3.980.000	25,00	14,21	300,00	31.080.000	31,25	29,05	PMPTSP	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	498.000.000	15	80.596.435	15	105.555.000	11	69.459.138	73,33	65,80	26,00	150.055.573	43,33	30,13	PMPTSP	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	485.000.000	12	113.554.773	12	650.662.084	6	245.313.207	50,00	37,70	18,00	358.867.980	37,50	73,99	PMPTSP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	431.000.000	12	79.754.773	12	452.970.780	4	170.333.079	33,33	37,60	16,00	250.087.852	33,33	58,03	PMPTSP	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	54.000.000	12	33.800.000	4	26.270.000	1	1.320.000	25,00	5,02	13,00	35.120.000	81,25	65,04	PMPTSP	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	171.421.304	6	73.660.128								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	921.000.000	12	123.565.410	12	127.690.000	6	70.188.000	50,00	54,97	18,00	193.753.410	37,50	21,04	PMPTSP	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	641.000.000	6	118.065.410	6	127.690.000	6	70.188.000	100,00	54,97	12,00	188.253.410	50,00	29,37	PMPTSP	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	280.000.000	1	5.500.000	0	-	0	-			1,00	5.500.000	12,50	1,96	PMPTSP	
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan persetujuan nilai investasi	7000,00	394.000.000	17,375	47.395.300	1.700	20.000.000	3.492	-	205,41	0,00	3509,38	47.395.300	50,13	12,03	PMPTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	7000,00	394.000.000	17,375	47.395.300	1.700	-	3.492	-	205,41		3509,38	47.395.300	50,13	12,03	PMPTSP	
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4,00	394.000.000	1	47.395.300	0	-	0	-			1,00	47.395.300	25,00	12,03	PMPTSP	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					1	20.000.000	0	-								
					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1	20.000.000	0	-								
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	22,92	1.824.000.000	1.758,958	283.132.974	5,42	180.000.000	342,01	85.927.500	6310,15	47,74	2100,97	369.060.474	9168,53	20,23	PMPTSP	
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan realisasi investasi	40,00	1.824.000.000	245,68	283.132.974	5	180.000.000	6.316	85.927.500	100,00	47,74	6561,68	369.060.474	100,00	20,23	PMPTSP	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4,00	1.577.000.000	1	263.175.724	1	180.000.000	0	85.927.500	0,00	47,74	1,00	349.103.224	25,00	22,14	PMPTSP	
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan atau non perizinan secara online	380,00	1.111.000.000	95,04	348.951.983	95	182.270.500	39	70.435.376	41,05	38,64	134,04	419.387.359	35,27	37,75	PMPTSP	
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu sesuai SOP	380,00	1.111.000.000	95,04	348.951.983	95	182.270.500	39	70.435.376	41,05	38,64	134,04	419.387.359	35,27	37,75	PMPTSP	
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6800,00	497.000.000	1818	284.836.870	1.700	125.698.200	1.122	44.098.030	66,00	35,08	2940,00	328.934.900	43,24	66,18	PMPTSP	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60,00	614.000.000	38	64.115.113	15	56.572.300	9	26.337.346	60,00	46,56	47,00	90.452.459	78,33	14,73	PMPTSP	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio kepatuhan pelaku usaha	360,00	2.595.000.000	94,48	23.222.000	90	448.000.000	9	41.700.000	10,00	9,31	103,48	64.922.000	28,74	2,50	PMPTSP	
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase izin dan non izin yang sesuai peruntukannya	360,00	2.595.000.000	94,48	23.222.000	90	448.000.000	9	41.700.000	10,00	9,31	103,48	64.922.000	28,74	2,50	PMPTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					415	382.000.000	0	15.900.000								
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					50	66.000.000	27	25.800.000								
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA dan PMDN	120,00	226.000.000	37	44.439.550	25	20.000.000	18	-	72,00	0,00	55,00	44.439.550	45,83	19,66	PMPTSP	
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data dan informasi investasi yang tersaji pada system/aplikasi	4,00	226.000.000	1	44.439.550	1	20.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	44.439.550	25,00	19,66	PMPTSP	
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan data dan informasi investasi yang tersaji pada system/aplikasi	1,00	226.000.000	1	44.439.550	1	20.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	44.439.550	100,00	19,66	PMPTSP	
					PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																DISPORAPAR	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	5.276.984.256		3.998.211.831	BB	4.649.439.737	0	2.286.021.957		49,17	0,00	6.284.233.788		119,09	DISPORAPAR	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6,00	41.287.000	4	2.836.425	6	5.100.000	3	3.959.190	50,00	77,63	7,00	6.795.615	116,67	16,46	DISPORAPAR	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	8.870.000	4	1.361.425	3	2.100.000	2	1.995.020	66,67	95,00	6,00	3.356.445	150,00	37,84	DISPORAPAR	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	32.417.000	0	1.475.000	2	3.000.000	1	1.964.170	50,00	65,47	1,00	3.439.170	50,00	10,61	DISPORAPAR	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48,00	4.747.166.256	6	3.573.608.753	12	3.996.184.437	3	1.974.484.301	25,00	49,41	9,00	5.548.093.054	18,75	116,87	DISPORAPAR	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	4.499.144.256	39	3.394.832.653	38	3.815.252.637	78	1.891.564.301	205,26	49,58	117,00	5.286.396.954	69,64	117,50	DISPORAPAR	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	245.970.000	3	177.800.000	12	179.160.000	6	82.920.000	50,00	46,28	9,00	260.720.000	300,00	106,00	DISPORAPAR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	2.052.000	0	976.100	1	1.771.800	0	-	0,00	0,00	0,00	976.100	0,00	47,57	DISPORAPAR	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas yang Diasuransi	1,00	8.690.000	1	6.490.000	1	-	0	-	0,00		1,00	6.490.000	100,00	74,68	DISPORAPAR	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	8.690.000	1	6.490.000	1	-	0	-	0,00		1,00	6.490.000	100,00	74,68	DISPORAPAR	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	275.036.000	9	276.945.579	12	487.985.500	3	232.967.087	25,00	47,74	12,00	509.912.666	25,00	185,40	DISPORAPAR	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7,00	2.940.000	7	2.387.000	1	4.965.000	1	3.521.000	100,00	70,92	8,00	5.908.000	114,29	200,95	DISPORAPAR	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	53.479.000	1	68.599.000	1	246.510.000	1	136.239.000	100,00	55,27	2,00	204.838.000	200,00	383,03	DISPORAPAR	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00	56.079.000	3	61.206.600	3	54.455.500	2	29.205.400	66,67	53,63	5,00	90.412.000	166,67	161,22	DISPORAPAR	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	18.224.000	2	22.837.850	1	35.871.000	1	17.743.565	100,00	49,46	3,00	40.581.415	150,00	222,68	DISPORAPAR	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	324,00	33.118.000	225	33.550.000	1	33.565.000	1	16.500.000	100,00	49,16	226,00	50.050.000	69,75	151,13	DISPORAPAR	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,00	111.196.000	7	88.365.129	20	112.619.000	8	29.758.122	40,00	26,42	15,00	118.123.251	187,50	106,23	DISPORAPAR	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48,00	48.134.000	9	38.803.354	12	50.979.800	3	20.180.159	25,00	39,58	12,00	58.983.513	25,00	122,54	DISPORAPAR	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	48.134.000	9	38.803.354	12	50.979.800	6	20.180.159	50,00	39,58	15,00	58.983.513	31,25	122,54	DISPORAPAR	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	16,00	156.671.000	8	99.527.720	4	109.190.000	4	54.431.220	100,00	49,85	12,00	153.958.940	75,00	98,27	DISPORAPAR	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16,00	5.082.000	2	7.627.720	4	5.000.000	0	265.220	0,00	5,30	2,00	7.892.940	12,50	155,31	DISPORAPAR	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	139.589.000	3	79.740.000	4	89.490.000	2	45.566.000	50,00	50,92	5,00	125.306.000	31,25	89,77	DISPORAPAR	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16,00	12.000.000	3	12.160.000	8	14.700.000	2	8.600.000	25,00	58,50	5,00	20.760.000	31,25	173,00	DISPORAPAR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan peningkatan daya saing kepemudaan	57,00	3.665.652.000	44	512.365.650	49	450.000.000	0	105.200.000	0,00	23,38	44,00	617.565.650	77,19	16,85	DISPORAPAR	
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda KaderKabupaten/Kota	Peningkatan Kelompok Pemuda,Organisasi Pemuda dan Pemuda yang ada di kabupaten Pringsewu	40,00	3.665.652.000	46	512.365.650	260	450.000.000	0	105.200.000	0,00	23,38	46,00	617.565.650	115,00	16,85	DISPORAPAR	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	160,00	224.652.000	0	-	40	100.000.000	40	90.850.000	100,00	0,00	40,00	90.850.000	25,00	40,44	DISPORAPAR	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	24,00	222.524.000	6	10.000.000	170	250.000.000	170	-	100,00	0,00	176,00	10.000.000	733,33	4,49	DISPORAPAR	
					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40,00	560.000.000	40	117.586.000	50	100.000.000	0	14.350.000	0,00	14,35	40,00	131.936.000	100,00	23,56	DISPORAPAR	
					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	144,00	2.658.476.000	36	384.779.650	0	-	0	-			36,00	384.779.650	25,00	14,47	DISPORAPAR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi	30,00	7.931.855.500	18	2.782.033.000	25	1.300.000.000	0	1.087.472.300	0,00	83,65	18,00	3.869.505.300	60,00	48,78	DISPORAPAR	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Club Club Olahraga Tingkat SD/SMP/SMA yang ada di Kabupaten Pringsewu	4,00	894.889.000	1	243.899.000	1	50.000.000	0	49.345.300	100,00	98,69	1,00	293.244.300	25,00	32,77	DISPORAPAR	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4,00	373.364.000	1	117.899.000	1	-	0	-	0,00		1,00	117.899.000	25,00	31,58	DISPORAPAR	
					Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8,00	521.525.000	2	144.980.000	3	50.000.000	1	49.345.300	33,33	98,69	3,00	194.325.300	37,50	37,26	DISPORAPAR	
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	5,00	1.712.670.500	9	276.419.000	1	500.000.000	1	288.127.000	100,00	57,63	10,00	564.546.000	100,00	32,96	DISPORAPAR	
					Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1,00	419.633.000	1	237.438.000	1	500.000.000	1	288.127.000	100,00	57,63	2,00	525.565.000	200,00	125,24	DISPORAPAR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					50	-		-								
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Olahragawan dan Pelatih yang ada di Kabupaten Pringsewu	50,00	646.518.750		38.981.000	50	-	0	-	0,00		0,00	38.981.000	0,00	6,03	DISPORAPAR	
					Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50,00	646.518.750	50	2.073.690.000	50	-	0	-	0,00		50,00	2.073.690.000	100,00	320,75	DISPORAPAR	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Organisasi Olahraga yang ada Di Kabupaten Pringsewu	40,00	4.892.853.000	62	781.990.000	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00	100,00	68,00	1.531.990.000	170,00	31,31	DISPORAPAR	
					Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	40,00	4.892.853.000	62	781.990.000	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00	100,00	68,00	1.531.990.000	170,00	31,31	DISPORAPAR	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Atlet Berprestasi yang ada di Kabupaten Pringsewu	4,00	431.443.000	0	387.445.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	387.445.000	0,00	89,80	DISPORAPAR	
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4,00	431.443.000	1	387.445.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	387.445.000	25,00	89,80	DISPORAPAR	
					Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi					1	-	0	-								
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Organisasi Kepramukaan tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR	
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR	
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	jumlah peningkatan kunjungan wisatawan	60000,00	556.027.000	173593	32.500.000	70	350.000.000	0	-	0,00	0,00	173593,00	32.500.000	289,32	5,85	DISPORAPAR	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4,00	556.027.000	1	32.500.000	1	350.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	32.500.000	25,00	5,85	DISPORAPAR	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4,00	556.027.000	1	32.500.000	1	350.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	32.500.000	25,00	5,85	DISPORAPAR	
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	penguatan promosi melalui media cetak ,elektronik dan media lainnya	6,00	1.186.654.000	6	483.687.637	6	270.299.600	0	158.342.001	0,00	58,58	6,00	642.029.638	100,00	54,10	DISPORAPAR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan Promosi Pariwisata	4,00	1.186.654.000	1	483.687.637	1	270.299.600	0	158.342.001	0,00	58,58	1,00	642.029.638	25,00	54,10	DISPORAPAR	
					Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4,00	755.642.000	0	-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORAPAR		
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4,00	431.012.000	1	279.085.687	1	270.299.600	1	158.342.001	100,00	58,58	2,00	437.427.688	50,00	101,49	DISPORAPAR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6,00	431.014.000	6	123.728.650	6	41.096.000	0	-	0,00	0,00	6,00	123.728.650	100,00	28,71	DISPORAPAR	
					Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan	100,00	431.014.000	100	123.728.650	100	41.096.000	0	-	100,00	0,00	100,00	123.728.650	100,00	28,71	DISPORAPAR	
					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100,00	431.014.000	100	123.728.650	100	41.096.000	0	-	0,00	0,00	100,00	123.728.650	100,00	28,71	DISPORAPAR	
					PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															PERPUSARSIP		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	14.302.141.500		2.885.888.763	BB	3.379.693.920	BB	1.257.262.806		37,20		4.143.151.569		28,97	PERPUSARSIP	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	BB	43.101.250	BB	9.229.000	BB	8.363.500	BB	-		0,00		9.229.000		21,41	PERPUSARSIP	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,00	21.550.625	5	4.762.000	5	5.081.500	0	-	0,00	0,00	5,00	4.762.000	23,81	22,10	PERPUSARSIP	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja tersedia	16,00	21.550.625	4	4.467.000	4	3.282.000	0	-	0,00	0,00	4,00	4.467.000	25,00	20,73	PERPUSARSIP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	100,00	12.094.210.750	100	2.429.764.914	100	2.792.207.420	45,4	1.130.039.613	45,40	40,47	145,40	3.559.804.527	145,40	29,43	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	11.361.489.500	27	2.279.414.914	30	2.635.267.420	24	1.064.869.613	80,00	40,41	51,00	3.344.284.527	170,00	29,44	PERPUSARSIP	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	732.721.250	12	150.350.000	12	156.940.000	6	65.170.000	50,00	41,53	18,00	215.520.000	37,50	29,41	PERPUSARSIP	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	39.000.000	80	6.412.000	100	8.250.000	100	6.382.600	100,00	77,36	180,00	12.794.600	180,00	32,81	PERPUSARSIP	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,00	39.000.000	1	6.412.000	1	8.250.000	1	6.382.600	100,00	77,36	2,00	12.794.600	33,33	32,81	PERPUSARSIP	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00	100.000.000			100	14.000.000	-									

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	100.000.000			2	14.000.000		-								
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100,00	881.570.375	100	156.587.948	100	201.333.000	24	49.520.400	24,00	24,60	124,00	206.108.348	124,00	23,38	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	43.101.250	1	2.237.000	1	2.332.000		-	0,00	0,00	1,00	2.237.000	25,00	5,19	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	265.222.500	1	44.103.200	1	68.905.000	1	23.756.100	100,00	34,48	2,00	67.859.300	50,00	25,59	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	107.753.125	1	8.891.325	1	9.110.000		-	100,00	0,00	1,00	8.891.325	25,00	8,25	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80,00	77.582.250	20	17.100.000	20	17.400.000	20	5.720.000	100,00	32,87	40,00	22.820.000	50,00	29,41	PERPUSARSIP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	387.911.250	15	84.256.423	15	103.586.000	4	20.044.300	26,67	19,35	19,00	104.300.723	31,67	26,89	PERPUSARSIP	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan Barang dalam satu tahun anggaran.					100	111.650.000		-								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					33	111.650.000		-								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100,00	369.303.750	100	147.135.594	100	85.600.000	50	20.950.193	50,00	24,47	150,00	168.085.787	150,00	45,51	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	129.303.750	12	30.835.594	12	25.600.000	6	5.998.400	50,00	23,43	18,00	36.833.994	37,50	28,49	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	240.000.000	2	116.300.000	2	60.000.000	0	14.951.793	0,00	24,92	2,00	131.251.793	25,00	54,69	PERPUSARSIP	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100,00	874.955.375	100	136.759.307	100	158.290.000	43,3	50.370.000	43,30	31,82	143,30	187.129.307	143,30	21,39	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	775.822.500	6	117.110.000	6	131.530.000	6	46.930.000	100,00	35,68	12,00	164.040.000	50,00	21,14	PERPUSARSIP	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva	24,00	34.481.000	6	3.299.307	6	6.650.000	0	-	0,00	0,00	6,00	3.299.307	25,00	9,57	PERPUSARSIP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	64.651.875	10	16.350.000	10	20.110.000	3	3.440.000	30,00	17,11	13,00	19.790.000	32,50	30,61	PERPUSARSIP	
					Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat	65,00	1.099.081.875	50	169.541.229	55	569.741.300	29,78	369.542.000	54,15	64,86	79,78	539.083.229	122,74	49,05	PERPUSARSIP	
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	2,44	387.911.250	0,5	22.890.000	0,57	399.805.000	0,267	353.352.000	46,84	88,38	0,77	376.242.000	31,43	96,99	PERPUSARSIP	
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					20	367.960.000	20	350.052.000								
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2,00	387.911.250	2	22.890.000	2	31.845.000	2	3.300.000	100,00	10,36	4,00	26.190.000	200,00	6,75	PERPUSARSIP	
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Budaya baca	65,00	711.170.625	50	146.651.229	55	169.936.300	0	16.190.000	0,00	9,53	50,00	162.841.229	76,92	22,90	PERPUSARSIP	
					Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	8,00	280.158.125	1	26.757.475	8	71.971.500	0	6.820.000	0,00	9,48	1,00	33.577.475	12,50	11,99	PERPUSARSIP	
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40,00	215.506.250	10	72.075.254	20	97.964.800	0	9.370.000	0,00	9,56	10,00	81.445.254	25,00	37,79	PERPUSARSIP	
					KEARSIPAN								0								PERPUSARSIP	
					Program Pengelolaan Arsip	Prosentase perangkat daerah, kelurahan dan pekon yang telah menerapkan arsip sesuai standar	21,39	711.170.625	5,68	232.687.801	10,7	203.418.100	0	53.256.967	0,00	26,18	5,68	285.944.768	26,55	40,21	PERPUSARSIP	
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	94,00	495.664.375	79,47	96.778.354	88	107.069.800	0	31.693.442	0,00	29,60	79,47	128.471.796	84,54	25,92	PERPUSARSIP	
					Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	550,00	280.158.125	100	52.991.681	150	38.480.000	0	15.450.000	0,00	40,15	100,00	68.441.681	18,18	24,43	PERPUSARSIP	
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	4,00	215.506.250	1	43.786.673	1	68.589.800	0	16.243.442	0,00	23,68	1,00	60.030.115	25,00	27,86	PERPUSARSIP	
					Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Prosentase Arsip Yang Tersedia pada JIKN	83,30	215.506.250	0	135.909.447	66,7	96.348.300	26	21.563.525	38,98	22,38	26,00	157.472.972	31,21	73,07	PERPUSARSIP	
					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	4,00	215.506.250	2	135.909.447	2	96.348.300	1	21.563.525	50,00	22,38	3,00	157.472.972	75,00	73,07	PERPUSARSIP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara	83,00	172.405.000	60		78	41.799.500	0	1.440.000							PERPUSARSIP	
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pelaksanaan, Penilaian Dan Pemusnahan Arsip	85,00	172.405.000	80,3		85	41.799.500	0	1.440.000							PERPUSARSIP	
					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2400,00	172.405.000			100	41.799.500	0	1.440.000							PERPUSARSIP	
					DINAS PERTANIAN																Dinas Pertanian	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	B	56.867.789.000		13.347.621.928	B	14.137.297.971		7.021.226.677	49,66	0,00	20.368.848.605				Dinas Pertanian	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	431.013.000		123.340.940		84.399.000		27.392.500	32,46	0,00	150.733.440	0,00	34,97		Dinas Pertanian	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00	43.101.000	2	13.641.000	2	10.000.000	1	7.618.500	50,00	76,19	3,00	21.259.500	50,00	49,32	Dinas Pertanian	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	215.506.000	1	49.179.660	2	34.200.000	1	11.430.000	50,00	33,42	2,00	60.609.660	50,00	28,12	Dinas Pertanian	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	64.652.000	4	38.538.000	4	40.199.000	1	8.344.000								
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	52.820.582.000				13.500.153.971	0	6.725.064.734		49,81	0,00	6.725.064.734	0,00	12,73	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500,00	51.721.500.000	125	12.036.016.846	125	13.280.993.971	125	6.627.084.734	100,00	49,90	250,00	18.663.101.580	50,00	36,08	Dinas Pertanian	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.077.531.000	1	217.260.000	1	214.160.000	0	97.980.000	0,00	45,75	1,00	315.240.000	25,00	29,26	Dinas Pertanian	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,00	21.591.000	2	4.973.000	2	5.000.000	0	-	0,00	0,00	2,00	4.973.000	25,00	23,03	Dinas Pertanian	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	77.582.000	0	17.563.350		17.590.000		12.511.800	0,00	71,13	0,00	30.075.150	0,00	38,77	Dinas Pertanian	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	56.032.000	2	12.638.350	2	13.000.000	4	12.511.800	200,00	96,24	6,00	25.150.150	75,00	44,89	Dinas Pertanian	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,00	21.551.000	5	4.925.000	5	4.590.000	0	-	0,00	0,00	5,00	4.925.000	25,00	22,85	Dinas Pertanian	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	991.329.000		402.991.258		188.455.000	0	91.898.340		48,76	0,00	494.889.598	0,00	49,92	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	43.101.000	1	8.824.750	1	5.105.000	0	-	0,00	0,00	1,00	8.824.750	25,00	20,47	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	431.013.000	3	157.397.000	3	87.475.000	0	36.715.000	0,00	41,97	3,00	194.112.000	25,00	45,04	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	86.203.000	2	22.891.000	2	14.345.000	0	3.840.000	0,00	26,77	2,00	26.731.000	25,00	31,01	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200,00	107.753.000	300	22.164.000	300	25.000.000	150	12.180.000	50,00	48,72	450,00	34.344.000	37,50	31,87	Dinas Pertanian	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,00	323.259.000	10	191.714.508	10	56.530.000	7	39.163.340	70,00	69,28	17,00	230.877.848	32,69	71,42	Dinas Pertanian	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	538.766.000		114.913.000		26.000.000	0	15.600.000		60,00	0,00	130.513.000	0,00	24,22	Dinas Pertanian	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12,00	215.506.000	3	49.428.000	3	10.000.000	0	-	0,00	0,00	3,00	49.428.000	25,00	22,94	Dinas Pertanian	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54,00	323.259.000	12	65.485.000	12	16.000.000	12	15.600.000	100,00	97,50	24,00	81.085.000	44,44	25,08	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	590.487.000	0	120.818.456		119.800.000	0	60.313.853		50,35	0,00	181.132.309	0,00	30,68	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	590.487.000	12	120.818.456	12	119.800.000	4	60.313.853	33,33	50,35	16,00	181.132.309	33,33	30,68	Dinas Pertanian	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100,00	1.310.278.000		309.745.078	90	200.900.000	90	88.445.450	100,00	44,02	90,00	398.190.528	90,00	30,39	Dinas Pertanian	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180,00	818.924.000	45	194.047.078	45	170.040.000	7	74.800.950	15,56	43,99	52,00	268.848.028	28,89	32,83	Dinas Pertanian	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52,00	60.342.000	10	22.700.000	10	9.960.000	3	3.000.000	30,00	30,12	13,00	25.700.000	25,00	42,59	Dinas Pertanian	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12,00	431.013.000	3	92.998.000	3	20.900.000	2	10.644.500	66,67	50,93	5,00	103.642.500	41,67	24,05	Dinas Pertanian	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi (ton)	507308,00	2.647.000.000	124652		125117		0		0,00		124652,00		24,57		Dinas Pertanian	
						Jumlah produksi jagung (ton)	154408,00		44105		37852		0		0,00		44105,00		28,56		Dinas Pertanian	
						Jumlah produksi bawang merah (kuintal)	13564,00		1496	428.164.300	3241	641.847.000	0	232.904.000	0,00	36,29	1496,00	661.068.300	11,03	24,97	Dinas Pertanian	
						Jumlah produksi kakao (ton)	11930,00		2497		2838		0		0,00		2497,00		20,93		Dinas Pertanian	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangnggjawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah produksi tembakau (ton)	407,00			99		91		0		0,00		99,00		24,32		Dinas Pertanian	
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	24,00	888.131.000	6	280.437.300		505.687.000	0	162.949.300		32,22	6,00	443.386.600	25,00	49,92	Dinas Pertanian		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	12,00	495.664.000	3	193.937.300	3	323.537.000	1	110.530.500	33,33	34,16	4,00	304.467.800	33,33	61,43	Dinas Pertanian		
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12,00	392.467.000	3	86.500.000	3	182.150.000	1	52.418.800	33,33	28,78	4,00	138.918.800	33,33	35,40	Dinas Pertanian		
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	12,00	636.605.000	3	115.620.000	3	99.960.000	0	36.100.000	0,00	36,11	3,00	151.720.000	25,00	23,83	Dinas Pertanian		
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,00	593.504.000	1	115.620.000	1	99.960.000	0	36.100.000	0,00	36,11	1,00	151.720.000	25,00	25,56	Dinas Pertanian		
					Peningkatan Muju dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan Ternak serta Pekan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,00	-	1	-	1	10.930.000	0	10.509.700									
					Pengawaasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala kecil		1,00	-	1	-	1	10.930.000	1	10.509.700									
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	8,00	323.259.000	2	32.107.000	2	25.270.000	0	23.345.000	0,00	92,38	2,00	55.452.000	25,00	17,15	Dinas Pertanian		
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	40,00	215.506.000	10	32.107.000	10	25.270.000	9	23.345.000	90,00	92,38	19,00	55.452.000	47,50	25,73	Dinas Pertanian		
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ketersediaan daging (ton)	16532,00	1.781.569.000	4773	685.708.300	3833	64.230.000		50.696.400	0,00	78,93	4773,00	736.404.700	28,87	41,33	Dinas Pertanian		
				Jumlah ketersediaan telur (ton)		33096,00	9144	8124			0,00		9144,00		27,63		Dinas Pertanian						
				Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)		21300,00	5282	5175			0,00		5282,00		24,80		Dinas Pertanian						
				Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kali)		17040,00	4951	4185			0,00		4951,00		29,06		Dinas Pertanian						
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4,00	260.332.000	1	52.212.000	1	39.940.000	0	35.548.400	0,00	89,00	1,00	87.760.400	25,00	33,71	Dinas Pertanian		
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4,00	260.332.000	1	52.212.000	1	39.940.000	1	35.548.400	100,00	89,00	2,00	87.760.400	50,00	33,71	Dinas Pertanian		
					Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	8,00	271.301.000	2	36.361.900	2	24.290.000	0	15.148.000	0,00	62,36	2,00	51.509.900	25,00	18,99	Dinas Pertanian		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4,00	185.098.000	1	36.361.900	1	24.290.000	0	15.148.000	0,00	62,36	1,00	51.509.900	25,00	27,83	Dinas Pertanian	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	prosentase lahan yang mendapat pengendalian dan panangngulangan bencana pertanian	300,00	1.683.966.000	75	113.786.100	72	29.448.000	0	1.360.000	0,00	4,62	75,00	115.146.100	25,00	6,84	Dinas Pertanian	
					Pengendalian dan Penangngulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian dan Penangngulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	120,00	1.683.966.000	30	113.786.100	30	29.448.000	0	1.360.000	0,00	4,62	30,00	115.146.100	25,00	6,84	Dinas Pertanian	
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80,00	271.107.000	20	76.350.000	20	29.448.000	0	1.360.000	0,00	4,62	20,00	77.710.000	25,00	28,66	Dinas Pertanian	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan penyuluhan pertanian	33156,00	2.506.553.000	85	690.388.830	81,39	130.500.900	0	10.595.900	0,00	8,12	85,00	700.984.730	0,26	27,97	Dinas Pertanian	
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	124,00	2.506.553.000	31	690.388.830	31	130.500.900	1	10.595.900	3,23	8,12	32,00	700.984.730	25,81	27,97	Dinas Pertanian	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36,00	1.148.864.000	9	155.657.500	9	113.521.900	1	10.595.900	11,11	9,33	10,00	166.253.400	27,78	14,47	Dinas Pertanian	
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36,00	172.405.000	9	168.553.030	9	16.979.000	0	-	0,00	0,00	9,00	168.553.030	25,00	97,77	Dinas Pertanian	
					DINAS PERIKANAN																Perikanan	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	A	15.917.000.000		3.865.484.793	BB	4.266.919.823	0	1.987.478.785		46,58	0,00	5.852.963.578		36,77	Perikanan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	24,00	112.000.000	6	15.469.525	4	5.000.000	2	1.700.000	50,00	34,00	8,00	17.169.525	33,33	15,33	Perikanan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	72.000.000	4	7.922.425	4	5.000.000	2	1.700.000	50,00	34,00	6,00	9.622.425	37,50	13,36	Perikanan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	40.000.000	2	7.547.100	0	-	0	-			2,00	7.547.100	25,00	18,87	Perikanan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	56,00	12.962.000.000	14	3.425.527.052	14	3.708.925.423	7	1.688.430.514	50,00	45,52	21,00	5.113.957.566	37,50	39,45	Perikanan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	160,00	12.112.000.000	37	3.263.832.817	37	3.545.005.423	18	1.619.982.514	48,65	45,70	55,00	4.883.815.331	34,38	40,32	Perikanan	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	830.000.000	12	158.411.235	12	160.920.000	6	66.480.000	50,00	41,31	18,00	224.891.235	37,50	27,10	Perikanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,00	20.000.000	2	3.283.000	2	3.000.000	1	1.968.000	50,00	65,60	3,00	5.251.000	37,50	26,26	Perikanan	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	4,00	26.000.000	0	-	0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	26.000.000	0	-	0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi kantor	48,00	1.089.000.000	9	155.040.382	12	182.524.400	6	91.832.610	50,00	50,31	15,00	246.872.992	31,25	22,67	Perikanan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12,00	480.000.000	3	70.494.700	3	88.870.000	1	28.767.500	33,33	32,37	4,00	99.262.200	33,33	20,68	Perikanan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	8,00	20.000.000	2	6.680.400	2	5.301.400	1	2.948.000	50,00	55,61	3,00	9.628.400	37,50	48,14	Perikanan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	112,00	124.000.000	25	25.200.000	27	25.200.000	6	6.300.000	22,22	25,00	31,00	31.500.000	27,68	25,40	Perikanan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,00	405.000.000	36	52.665.282	48	63.153.000	42	53.817.110	87,50	85,22	78,00	106.482.392	36,11	26,29	Perikanan	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Diadakan	136,00	240.000.000	4	37.320.800	20	27.100.000	16	21.700.000	80,00	80,07	20,00	59.020.800	14,71	24,59	Perikanan	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120,00	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12,00	80.000.000	3	6.200.000	20	27.100.000	16	21.700.000	80,00	80,07	19,00	27.900.000	158,33	34,88	Perikanan	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	80.000.000	1	31.120.800	0	-	0	-			1,00	31.120.800	25,00	38,90	Perikanan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	48,00	120.000.000	12	21.137.749	12	33.650.000	6	12.014.051	50,00	35,70	18,00	33.151.800	37,50	27,63	Perikanan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	120.000.000	12	21.137.749	12	33.650.000	6	12.014.051	50,00	35,70	18,00	33.151.800	37,50	27,63	Perikanan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum	95,00	1.248.000.000	73	210.989.285	85	309.720.000	73	171.801.610	85,56	55,47	145,46	382.790.895	153,11	30,67	Perikanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64,00	1.000.000.000	16	201.449.285	16	273.180.000	8	138.151.610	50,00	50,57	24,00	339.600.895	37,50	33,96	Perikanan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12,00	48.000.000	4	9.540.000	14	9.340.000	10	6.540.000	71,43	70,02	14,00	16.080.000	116,67	33,50	Perikanan	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8,00	200.000.000	0	-	2	27.200.000	2	27.110.000	100,00	0,00	2,00	27.110.000	25,00	13,56	Perikanan	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	52327,00	1.733.000.000	12350	436.284.225	12530	481.897.500	8600	377.714.275	68,64	78,38	20950,00	813.998.500	40,04	46,97	Perikanan	
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20,00	143.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha-nya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha-nya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	20,00	143.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pelatihan/ Sosialisasi pembudidaya	52,00	450.000.000	10	90.957.750	12	358.500.000	10	331.545.025	83,33	92,48	20,00	422.502.775	38,46	93,89	Perikanan	
					Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	32,00	250.000.000	5	82.102.750	7	203.850.000	5	177.528.920	71,43	87,09	10,00	259.631.670	31,25	103,85	Perikanan	
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20,00	200.000.000	5	8.855.000	5	154.650.000	5	154.016.105	100,00	99,59	10,00	162.871.105	50,00	81,44	Perikanan	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Data Informasi Pembudidayaan Ikan	260,00	1.140.000.000	29	345.326.475	59	123.397.500	20	46.169.250	33,90	37,42	49,00	391.495.725	18,85	34,34	Perikanan	
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	140,00	300.000.000	0	-	30	79.497.500	19	44.669.250	0,00	0,00	19,00	44.669.250	13,57	14,89	Perikanan	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	80,00	600.000.000	20	325.154.325	20	37.700.000	0	900.000	0,00	2,39	20,00	326.054.325	25,00	54,34	Perikanan	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	36,00	120.000.000	9	20.172.150	9	6.200.000	1	600.000	11,11	9,68	10,00	20.772.150	27,78	17,31	Perikanan	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	21,63	950.000.000	-9	280.097.348	5	141.358.000	0	107.827.800	0,00	76,28	-8,70	387.925.148	-40,22	40,83	Perikanan	
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Diterbitkan	73,00	270.000.000	13	23.431.000	8	24.883.000	6	18.361.500	75,00	73,79	19,00	41.792.500	26,03	15,48	Perikanan	
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	73,00	270.000.000	13	23.431.000	8	24.883.000	6	18.361.500	75,00	73,79	19,00	41.792.500	26,03	15,48	Perikanan	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8,00	120.000.000	2	61.551.948	2	28.565.000	2	27.116.400	100,00	94,93	4,00	88.668.348	50,00	73,89	Perikanan	
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8,00	120.000.000	2	61.551.948	2	28.565.000	2	27.116.400	100,00	94,93	4,00	88.668.348	50,00	73,89	Perikanan	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia dan Tersalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2968,67	560.000.000	725	195.114.400	735	87.910.000	439	62.349.900	59,69	70,92	1164,36	257.464.300	39,22	45,98	Perikanan	
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)	2968,67	440.000.000	725	140.825.400	735	63.770.000	439	41.459.900	59,69	65,01	1164,36	182.285.300	39,22	41,43	Perikanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	12,00	120.000.000	3	54.289.000	5	24.140.000	5	20.890.000	100,00	86,54	8,00	75.179.000	66,67	62,65	Perikanan	
					BKPSDM																BKPSDM	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB Skala	23.171.328.687	BB	3.983.627.834	BB	6.293.052.323		2.367.859.555		37,63		6.351.487.389		27,41	BKPSDM	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Jasa Administrasi Perencanaan	28,00	91.901.000	7	12.335.400	7	16.431.800	6	2.717.900	85,71	16,54	13,00	15.053.300	46,43	16,38	BKPSDM	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	47.298.000	4	7.795.800	4	9.313.800	3	1.517.900	75,00	16,30	7,00	9.313.700	43,75	19,69	BKPSDM	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	44.603.000	3	4.539.600	3	7.118.000	3	1.200.000	100,00	16,86	6,00	5.739.600	50,00	12,87	BKPSDM	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	220,00	17.894.785.000	55	3.230.176.784	104	5.563.662.523	88	2.007.116.185	84,62	36,08	143,00	5.237.292.969	65,00	29,27	BKPSDM	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	16.735.008.000	42	3.037.315.884	91	5.353.442.523	81	1.919.932.935	89,01	35,86	123,00	4.957.248.819	73,21	29,62	BKPSDM	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	1.099.422.000	12	190.200.000	12	204.786.000	6	84.780.000	50,00	41,40	18,00	274.980.000	37,50	25,01	BKPSDM	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	60.355.000	1	2.660.900	1	5.434.000	1	2.403.250	100,00	44,23	2,00	5.064.150	50,00	8,39	BKPSDM	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	8,00	84.866.000	2	12.476.250	2	17.900.000	1	7.691.240	50,00	42,97	3,00	20.167.490	37,50	23,76	BKPSDM	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	84.866.000	2	12.476.250	2	17.900.000	1	7.691.240	50,00	42,97	3,00	20.167.490	37,50	23,76	BKPSDM	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256,00	670.076.687	64	88.742.069	81	109.518.000	1	79.696.035	1,23	72,77	65,00	168.438.104	25,39	25,14	BKPSDM	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16,00	237.057.000	4	4.240.500	1	5.580.000	1	2.495.000	100,00	44,71	5,00	6.735.500	31,25	2,84	BKPSDM	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	240,00	433.019.687	60	84.501.569	80	103.938.000	0	77.201.035	0,00	74,28	60,00	161.702.604	25,00	37,34	BKPSDM	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	748,00	2.867.151.000	174	433.313.231	90	369.236.800	74	183.480.362	82,22	49,69	248,00	616.793.593	33,16	21,51	BKPSDM	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	64,00	79.751.000	17	16.861.000	16	17.388.500	8	5.012.000	50,00	28,82	25,00	21.873.000	39,06	27,43	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	136,00	1.116.040.000	20	187.100.000	3	52.000.000	3	51.700.000	100,00	99,42	23,00	238.800.000	16,91	21,40	BKPSDM	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160,00	507.809.000	62	71.453.700	7	80.449.600	5	32.057.500	71,43	39,85	67,00	103.511.200	41,88	20,38	BKPSDM	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48,00	222.056.000	12	45.705.300	2	58.601.700	2	21.535.200	100,00	36,75	14,00	67.240.500	29,17	30,28	BKPSDM	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120,00	185.853.000	45	33.630.000	50	38.100.000	50	18.600.000	100,00	48,82	95,00	52.230.000	79,17	28,10	BKPSDM	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,00	755.642.000	18	78.563.231	12	122.697.000	6	54.575.662	50,00	44,48	24,00	133.138.893	10,91	17,62	BKPSDM	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	170.681.000	12	63.000.000	12	82.955.200	6	31.007.833	50,00	37,38	18,00	94.007.833	37,50	55,08	BKPSDM	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	170.681.000	12	63.000.000	12	82.955.200	6	31.007.833	50,00	37,38	18,00	94.007.833	37,50	55,08	BKPSDM	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152,00	1.391.868.000	28	143.584.100	28	133.348.000	28	56.150.000	100,00	42,11	56,00	199.734.100	36,84	14,35	BKPSDM	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	482.648.000	4	81.647.750	4	97.890.000	4	45.500.000	100,00	46,48	8,00	127.147.750	50,00	26,34	BKPSDM	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	804.678.000	1	38.251.350	1	10.608.000	0	-	0,00	0,00	1,00	38.251.350	25,00	4,75	BKPSDM	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	132,00	104.542.000	23	23.685.000	37	24.850.000	34	10.650.000	91,89	42,86	57,00	34.335.000	43,18	32,84	BKPSDM	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit	0,32	21.320.901.000		2.991.488.280	0,34	2.764.525.500	0	759.612.686	0,00		0,00		0,00		BKPSDM	
						Indeks Kepuasan ASN	77,00			-	79%		0		0,00	27,48	0,00	3.751.100.966	0,00	17,59	BKPSDM	
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen/laporan terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	268,00	4.081.900.000	66	427.007.922	19	710.067.000	11	176.160.797	57,89	24,81	77,00	603.168.719	28,73	14,78	BKPSDM	
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20,00	3.122.612.000	4	318.514.679	19	551.624.000	3	133.082.051	15,79	24,13	7,00	451.596.730	35,00	14,46	BKPSDM	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48,00	410.883.000	12	39.363.687	12	57.249.000	6	26.377.347	50,00	46,07	18,00	65.741.034	37,50	16,00	BKPSDM	
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	192,00	341.644.000	48	52.712.403	1	62.751.000	0	15.941.399	0,00	25,40	48,00	68.653.802	25,00	20,10	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangnggjab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	8,00	206.761.000	2	16.417.153	2	38.443.000	2	760.000	100,00	1,98	4,00	17.177.153	50,00	8,31	BKPSDM	
					Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	9600,00	3.296.543.000	2918	807.980.509	10	1.220.762.000	5	325.567.365	50,00	26,67	2923,00	1.133.547.874	30,45	34,39	BKPSDM	
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200,00	349.256.000	25	89.289.008	3	99.291.400	5	22.458.300	166,67	22,62	30,00	111.747.308	15,00	32,00	BKPSDM	
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8000,00	265.651.000	2561	60.106.460	3	79.669.200	2	55.430.614	66,67	69,58	2563,00	115.537.074	32,04	43,49	BKPSDM	
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1400,00	2.681.636.000	332	658.585.041	4	1.041.801.400	2	247.678.451	50,00	23,77	334,00	906.263.492	23,86	33,80	BKPSDM	
					Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen/laporan atau orang terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	440,00	12.048.973.000	198	1.387.610.269	103	453.281.500	26	141.611.771	25,24	31,24	224,00	1.529.222.040	50,91	12,69	BKPSDM	
					Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40,00	11.875.024.000	26	1.340.638.459	3	405.539.900	2	123.125.590	100,00	30,36	28,00	1.463.764.049	70,00	12,33	BKPSDM	
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	400,00	173.949.000	172	46.971.810	100	47.741.600	24	18.486.181	24,00	38,72	196,00	65.457.991	49,00	37,63	BKPSDM	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah orang/ dokumen/laporan terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4092,00	1.893.485.000	1018	368.889.580	1015	380.415.000	1008	116.272.753	100,00	30,56	2026,00	485.162.333	49,51	25,62	BKPSDM	
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8,00	354.618.000	2	32.894.352	2	42.983.000	2	18.803.817	100,00	43,75	4,00	51.698.169	50,00	14,58	BKPSDM	
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	4064,00	766.846.000	1011	176.256.632	2	185.995.000	1002	43.344.004	100,00	23,30	2013,00	219.600.636	49,53	28,64	BKPSDM	
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	12,00	362.748.000	3	97.874.301	3	114.449.000	3	40.382.455	100,00	35,28	6,00	138.256.756	50,00	38,11	BKPSDM	
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8,00	409.273.000	2	61.864.295	3	36.988.000	1	13.742.477	33,33	37,15	3,00	75.606.772	37,50	18,47	BKPSDM	
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesional ASN	50,00	3.098.225.000		34.066.600	55	169.841.500	0	1.520.000	0,00	0,89	0,00	35.586.600	0,00	1,15	BKPSDM	
					Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	75,00	513.938.000	0	1.462.000	2	126.216.800	0	-	0,00	0,00	0,00	1.462.000	0,00	0,28	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	75,00	513.938.000	0	1.462.000	2	126.216.800	0	-	0,00	0,00	0,00	1.462.000	0,00	0,28	BKPSDM	
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4,00	2.584.287.000	1	32.604.600	1	43.624.700	0	1.520.000	0,00	3,48	1,00	34.124.600	25,00	1,32	BKPSDM	
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4,00	2.584.287.000	1	32.604.600	1	43.624.700	0	1.520.000	0,00	3,48	1,00	34.124.600	25,00	1,32	BKPSDM	
					BAPENDA																BAPENDA	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	28.039.064.138		5.272.643.151	BB	6.363.611.563		2.166.509.667		34,05	0,00	7.439.152.818	26,53		BAPENDA	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20,00	82.571.164	5,00	9.789.115	5	9.825.000	2	4.712.840	40,00	47,97	7,00	14.501.955	35,00	17,56	BAPENDA	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersaji	16,00	27.695.168	4,00	5.441.775	4	5.450.000	2	2.891.700	50,00	53,06	6,00	8.333.475	37,50	30,09	BAPENDA	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja perangkat Daerah	4,00	54.875.996	1,00	4.347.340	1	4.375.000	0	1.821.140	0,00	41,63	1,00	6.168.480	25,00	11,24	BAPENDA	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	48,00	25.171.850.686	6,00	4.709.216.710	12	5.711.519.663	6	1.916.970.042	50,00	33,56	12,00	6.626.186.752	25,00	26,32	BAPENDA	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140,00	23.364.777.963	35,00	4.470.889.710	12	5.472.358.663	6	1.796.792.642	50,00	32,83	41,00	6.267.682.352	29,29	26,83	BAPENDA	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.772.133.363	1,00	233.560.000	12	230.880.000	6	113.340.000	50,00	49,09	7,00	346.900.000	175,00	19,58	BAPENDA	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	34.939.361	1,00	4.767.000	1	8.281.000	0	6.837.400	0,00	82,57	1,00	11.604.400	25,00	33,21	BAPENDA	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Keikutsertaan Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek Pelatihan	20,00	102.102.000	0,00	-	4	5.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPENDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	102.102.000	0,00	-	4	5.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPENDA	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.532.616.993	6,00	239.445.011	12	260.666.900	6	102.959.108	50,00	39,50	12,00	342.404.119	25,00	22,34	BAPENDA	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	217.168.401	0,59	5.981.100	1	8.095.000	0	3.841.000	0,00	47,45	0,59	9.822.100	14,75	4,52	BAPENDA	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	62.486.424	4,00	19.765.000	1	34.995.000	0	13.670.000	0,00	39,06	4,00	33.435.000	25,00	53,51	BAPENDA	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	666.790.119	3,06	117.669.350	1	122.102.600	0	28.059.500	0,00	22,98	3,06	145.728.850	25,53	21,86	BAPENDA	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	170.060.453	1,04	19.102.440	1	22.974.300	0	5.349.800	0,00	23,29	1,04	24.452.240	26,00	14,38	BAPENDA	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,00	160.810.650	1,00	31.140.000	1	22.500.000	0	5.625.000	0,00	25,00	1,00	36.765.000	25,00	22,86	BAPENDA	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	255.300.946	15,00	45.787.121	6	50.000.000	6	46.413.808	100,00	92,83	21,00	92.200.929	35,00	36,11	BAPENDA	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48,00	421.170.750	6,00	80.525.800	12	97.400.000	6	48.478.677	50,00	49,77	12,00	129.004.477	25,00	30,63	BAPENDA	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	421.170.750	12,00	80.525.800	12	97.400.000	6	48.478.677	50,00	49,77	18,00	129.004.477	37,50	30,63	BAPENDA	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	80,00	728.752.545	30,00	233.666.515	15	279.200.000	30	93.389.000	100,00	33,45	60,00	327.055.515	75,00	44,88	BAPENDA	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60,00	440.957.638	15,00	192.636.515	15	236.260.000	0	83.414.000	0,00	35,31	15,00	276.050.515	25,00	62,60	BAPENDA	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16,00	217.936.719	4,57	30.155.000	4	32.860.000	1	9.375.000	25,00	28,53	5,57	39.530.000	34,81	18,14	BAPENDA	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	69.858.188	3,00	10.875.000	1	10.080.000	0	600.000	0,00	5,95	3,00	11.475.000	75,00	16,43	BAPENDA	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Realisasi Pajak Daerah	98,00	16.683.634.118	13,64	3.551.870.059	96,75	2.024.867.500	13	558.782.909	13,44	27,60	26,64	4.110.652.968	27,18	24,64	BAPENDA	
						% Realisasi Retribusi Daerah	80,00		10,71		75,25		10,71		14,23		21,42		26,78		BAPENDA	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	100,00	16.683.634.118	13,64	3.551.870.059	100	2.024.867.500	13,64	558.782.909	100,00	27,60	27,28	4.110.652.968	27,28	24,64	BAPENDA	
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak daerah	8,00	1.192.102.433	1,00	423.363.726	2	223.544.000	0	108.222.363	0,00	48,41	1,00	531.586.089	12,50	44,59	BAPENDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil analis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	464.100.000	1,00	8.761.020	1	4.093.000	0	2.974.000	0,00	72,66	1,00	11.735.020	25,00	2,53	BAPENDA		
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	573.174.760	1,00	132.017.100	1	204.626.300	0	62.707.300	0,00	30,64	1,00	194.724.400	25,00	33,97	BAPENDA		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	52,00	1.224.589.936	6,00	770.167.500	13	272.500.500	5	87.750.000	38,46	32,20	11,00	857.917.500	21,15	70,06	BAPENDA		
					Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Dearah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8,00	5.175.878.592	3,00	683.880.600	2	6.647.100	0	4.772.100	0,00	71,79	3,00	688.652.700	37,50	13,31	BAPENDA		
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12,00	677.175.434	3,00	124.894.250	3	53.100.000	0	12.838.000	0,00	24,18	3,00	137.732.250	25,00	20,34	BAPENDA		
					Penilaian Pajak Bumi danBangunan Perdesaan danPerkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	4000,00	362.133.806	1000,00	18.168.400	100	7.268.300	0	5.187.400	0,00	71,37	1000,00	23.355.800	25,00	6,45	BAPENDA		
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4,00	37.522.485	1,00	3.721.500	1	2.472.500	0	1.650.000	0,00	66,73	1,00	5.371.500	25,00	14,32	BAPENDA		
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40,00	764.687.824	10,00	49.314.800	10	32.651.000	10	25.023.500	100,00	76,64	20,00	74.338.300	50,00	9,72	BAPENDA		
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4,00	775.617.843	1,00	160.000.000	1	8.380.000	0	-	0,00	0,00	1,00	160.000.000	25,00	20,63	BAPENDA		
					Penagihan pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pajak Daerah	4,00	3.756.455.434	1,00	885.454.829	1	771.381.300	0	209.203.646	0,00	27,12	1,00	1.094.658.475	25,00	29,14	BAPENDA		
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4,00	43.709.866	1,00	7.075.000	1	3.439.500	0	-	0,00		1,00		25,00		BAPENDA		
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4,00	921.808.865	1,00	187.604.400	1	293.796.000	0	15.173.000	0,00	5,16	1,00	202.777.400	25,00	22,00	BAPENDA		
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,00	574.676.839	1,00	77.673.900	1	121.688.000	0	16.238.200	0,00	13,34	1,00	93.912.100	25,00	16,34	BAPENDA		
					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4,00	140.000.000	1,00	19.773.034	1	19.280.000	0	7.043.400	0,00	36,53	1,00	26.816.434	25,00	19,15	BAPENDA		
					BPKAD																BPKAD		
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	35,00		25.800.131.481	7,0	30.497.763.899	0,00	12.232.686.345	0,00	40,11	0,00	38.032.817.826	0,00			BPKAD		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKAD	35,00		97,54%	48.951.714	7,0	50.186.500	#####	15.905.000	452,74	31,69	32,67	64.856.714	93,33			BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,00		97,93%	34.410.954	2,0	35.137.500	#####	9.044.000	1286,95	25,74	26,72	43.454.954	333,98		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00		0	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4,00		0	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00				1,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00				1,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja BPKAD	4,00		97,36%	6.717.640	1,0	6.900.000	#####	3.406.000	4239,78	49,36	43,37	10.123.640	1084,28		BPKAD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4,00		96,00%	7.823.120	1,0	8.149.000	#####	3.455.000	4239,78	42,40	43,36	11.278.120	1083,95		BPKAD	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	60,00		86,90%	24.006.217.893	12,0	28.871.217.099	#####	11.356.484.871	327,79	39,33	40,20	35.362.702.764	67,01		BPKAD	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayar	184,00		86,61%	23.036.957.503	46,0	28.092.196.099	39,23%	11.019.745.871	0,85	39,23	1,26	34.056.703.374	0,68		BPKAD	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00		94,24%	955.650.000	1,0	763.800.000	42,44%	324.120.000	42,44	42,44	1,37	1.279.770.000	34,17		BPKAD	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	16,00				4,0	-	1,00	-	25,00		1,00	-	6,25		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4,00		98,36%	13.610.390	1,0	15.221.000	82,91%	12.619.000	82,91	82,91	1,81	26.229.390	45,32		BPKAD	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Perangkat Daerah	0,95		60,08%	6.007.750	90,0	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0,60	6.007.750	63,57		BPKAD	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	8,00		60,08%	6.007.750	2,0	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0,60	6.007.750	7,51		BPKAD	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang Mengikuti Diklat/ Bimtek	1400,00		7,16%	400.040.000	350,0	200.000.000	1,00	200.000.000	0,29	100,00	1,07	600.040.000	0,08		BPKAD	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat	20,00		97,70%	29.310.000	5,0	-	0,00	-	0,00		0,98	29.310.000	4,89		BPKAD	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600,00		0,00%	0	150,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek	600,00		0,00%	370.730.000	150,0	200.000.000	100,00%	200.000.000	0,67	100,00	1,00	570.730.000	0,17		BPKAD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	0,95		96,26%	734.086.770	90,0	812.808.300	65,02%	528.450.790	0,72	65,02	1,61	1.262.537.560	170,66		BPKAD	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Penerangan Kantor	16,00		100,00%	10.015.000	4,0	10.019.500	33,54%	3.360.500	8,39	33,54	1,34	13.375.500	8,35		BPKAD	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer dan komponen komputer	16,00		97,58%	218.650.000	4,0	214.950.000	97,83%	210.286.700	24,46	97,83	1,95	428.936.700	12,21		BPKAD	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16,00				4,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	16,00		98,38%	297.493.050	4,0	291.843.000	54,97%	160.427.000	13,74	54,97	1,53	457.920.050	9,58		BPKAD	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	16,00		94,71%	30.532.495	4,0	34.526.800	25,84%	8.922.000	6,46	25,84	1,21	39.454.495	7,53		BPKAD	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang undangan yang tersisa	16,00		99,94%	74.755.000	4,0	74.800.000	25,84%	24.935.000	6,46	33,34	1,26	99.690.000	7,86		BPKAD	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka kordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dibutuhkan	48,00		86,16%	102.641.225	12,0	186.669.000	64,56%	120.519.590	5,38	64,56	1,51	223.160.815	3,14		BPKAD	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	94,50		100,00%	6.000.000	90,0	36.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	6.000.000	1,06		BPKAD	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,00				1,0	30.000.000			0,00	0,00	0,00	-	0,00		BPKAD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16,00		100,00%	6.000.000	4,0	6.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	6.000.000	6,25		BPKAD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	98,00		78,58%	114.315.984	95,0	147.282.000	37,07%	54.593.080	0,39	37,07	1,16	168.909.064	1,18		BPKAD	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telekomunikasi, dan listrik	8,00		78,58%	114.315.984	2,0	145.482.000	37,53%	54.593.080	18,77	37,53	1,16	168.909.064	14,51		BPKAD	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00				1,0	1.800.000			0,00	0,00	0,00	-	0,00		BPKAD	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	94,50		95,79%	484.511.370	90,0	370.270.000	20,86%	77.252.604	0,23	20,86	1,17	561.763.974	1,23		BPKAD	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	52,00		92,64%	173.827.451	13,0	293.720.000	22,80%	66.967.604	1,75	22,80	1,15	240.795.055	2,22		BPKAD	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12,00				2,0	-			0,00	0,00	0,00	-	0,00		BPKAD	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara	40,00		99,98%	48.140.000	10,0	71.110.000	14,46%	10.285.000	1,45	14,46	1,14	58.425.000	2,86		BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4,00		41,11%	262.543.919	1,0	5.440.000	0,00	-	0,00	0,00	0,41	262.543.919	10,28		BPKAD	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang menyusun DPA sesuai Renja	100,00				100,0	195.764.494.481	0,00	92.911.274.734	0,00		0,00		0,00		BPKAD	
						Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah	90,00				95,5		0,00		0,00		0,00		0,00		BPKAD	
						Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100,00			189.822.281.331	100,0		0,00		0,00	47,46	0,00	282.733.556.065	0,00		BPKAD	
						Prosentase penyerapan Belanja (Hibah, Bansos, Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah	100,00				2,5		0,00		0,00		0,00		0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Penganggaran Pemda Kab. Pringsewu	1,00		96,19%	933.927.148	100,0	1.198.934.400	36,03%	431.921.470	0,36	36,03	1,32	1.365.848.618	132,22		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Buku KUA dan PPAS	4,00		98,20%	35.340.045	1,0	44.979.800	1,33%	600.000	1,33	1,33	1,00	35.940.045	24,88		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Buku KUA dan PPAS Perubahan	4,00		98,24%	36.295.725	1,0	45.937.300	0,00	-	0,00	0,00	0,98	36.295.725	24,56		BPKAD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD	148,00		35,39%	10.176.770	1,0	18.552.800	3,56%	660.000	3,56	3,56	0,39	10.836.770	0,26		BPKAD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD Perubahan	148,00		88,40%	15.854.370	1,0	17.934.900	3,35%	600.000	3,35	3,35	0,92	16.454.370	0,62		BPKAD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	148,00		96,52%	41.327.140	1,0	42.817.400	95,71%	40.981.360	95,71	95,71	1,92	82.308.500	1,30		BPKAD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	148,00		97,48%	41.738.864	1,0	42.817.400	97,25%	41.641.360	97,25	97,25	1,95	83.380.224	1,32		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan eraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda, Raperbup, Perbup tentang APBD TA. 2022 dan DPA OPD TA. 2021	8,00		99,58%	359.530.590	1,0	400.058.500	84,00%	336.038.750	84,00	84,00	1,84	695.569.340	22,95		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda, Raperbup, Perbup tentang APBD-P TA. 2021 dan DPA OPD TA. 2021	8,00		97,30%	341.602.544	1,0	382.266.500	0,00	-	0,00	0,00	0,97	341.602.544	12,16		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku Perbup tentang Pedoman dan Teknis Penyusunan APBD	8,00		97,18%	52.061.100	1,0	203.569.800	5,60%	11.400.000	5,60	5,60	1,03	63.461.100	12,85		BPKAD	
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya laporan penyerapan anggaran belanja daerah	96,00		76,13%	187.337.125	90,0	246.060.765	18,09%	44.515.737	0,20	18,09	0,94	231.852.862	0,98		BPKAD	
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku Laporan Pengelolaan KASDA	20,00		73,05%	100.148.200	5,0	136.521.000	21,82%	29.790.737	4,36	21,82	0,95	129.938.937	4,74		BPKAD	
					Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,00				1,0	15.026.100			0,00	0,00	0,00	-	0,00		BPKAD	
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Buku Rekapitulasi SPD dan Anggaran Kas	8,00		74,50%	26.714.425	2,0	33.451.345	0,00	-	0,00	0,00	0,75	26.714.425	9,31		BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Administrasi / Pembayaran Gaji ASN Kab. Pringsewu	16,00		78,95%	6.481.000	4,0	9.030.400	0,00	-	0,00	0,00	0,79	6.481.000	4,93		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Buku Pungut Setor Pajak Pihak Ketiga	4,00		83,40%	22.297.500	1,0	13.832.620	0,00	-	0,00	0,00	0,83	22.297.500	20,85		BPKAD	
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Penerbitan dan Pengelolaan SP2D Secara Prima	4,00		83,05%	31.696.000	1,0	38.199.300	38,55%	14.725.000,00	38,55	38,55	1,22	46.421.000	30,40		BPKAD	
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4,00				1,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen LKPD dan Perda Pertanggungjawaban APBD	100,00		85,34%	386.908.361	100,0	453.382.600	17,29%	78.410.358	0,17	17,29	1,03	465.318.719	1,03		BPKAD	
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	32,00				8,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4,00		73,56%	29.138.040	1,0	36.700.000		5.320.000	0,00	14,50	0,74	34.458.040	18,39		BPKAD	
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku LKPD Kab. Pringsewu	28,00		84,68%	290.098.631	7,0	335.020.500	0,00	46.437.500	0,00	13,86	0,85	336.536.131	3,02		BPKAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	8,00		93,18%	51.546.000	2,0	62.785.900	13,86%	26.652.858	6,93	42,45	1,07	78.198.858	13,38		BPKAD	
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	4,00		0,00%	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4,00		0,00%	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BA Monitoring dan Evaluasi LK SKPD	300,00		101,62%	16.125.690	75,0	18.876.200	0,00	-	0,00	0,00	1,02	16.125.690	0,34		BPKAD	
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurinya Belanja BTL (Hibah, Bansos, Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	100,00		82,78%	188.314.108.697	100,0	193.866.116.716	47,64%	92.356.427.169	0,48	47,64	1,30	280.670.535.866	1,30		BPKAD	
					Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4,00				1,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Analisis Perencanaan dan Penyaturan Bantuan Keuangan	Tersedianya penyaluran bantuan keuangan	4,00		84,00%	183.078.638.516	1,0	185.335.782.900	48,40%	89.696.620.360	48,40	48,40	1,32	272.775.258.876	33,10		BPKAD	
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Bantuan Keuangan Tidak Terduga	4,00		17,68%	574.708.004	1,0	3.000.000.000	1,80%	54.000.000	1,80	1,80	0,19	628.708.004	4,87		BPKAD	
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota ke Desa	Tersedianya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota ke Desa	4,00		80,72%	4.660.762.177	1,0	5.530.333.816	47,12%	2.605.806.809	47,12	47,12	1,28	7.266.568.986	31,96		BPKAD	
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase penatausahaan aset daerah yang baik	94,50		44,40%	908.938.081	90,0	809.951.900	35,64%	288.653.271	0,40	35,64	0,80	1.197.591.352	0,85		BPKAD	
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	94,50		94,06%	908.938.081	90,0	809.951.900	35,64%	288.653.271	0,40	35,64	1,30	1.197.591.352	1,37		BPKAD	
					Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku penentuan harga dan jenis barang	4,00		99,21%	198.452.280	1,0	201.036.000	50,07%	100.651.417,00	50,07	50,07	1,49	299.103.697	37,32		BPKAD	
					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standart BMD dan Standart Kebutuhan BMD	4,00		0,00%	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Rencana Kebutuhan BMD	8,00		98,09%	4.603.350	2,0	8.900.000	0,00	-	0,00	0,00	0,98	4.603.350	12,26		BPKAD	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Data BMD	8,00		87,87%	144.770.756	2,0	7.677.300	100,00%	7.677.300	50,00	100,00	1,88	152.448.056	23,48		BPKAD	
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah Pemda Bersertifikat	8,00		99,78%	366.956.170	2,0	393.080.100	37,18%	146.158.050	18,59	37,18	1,37	513.114.220	17,12		BPKAD	
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4,00				1,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Ketertiban administrasi Kekayaan daerah	16,00		96,19%	59.524.225	4,0	27.381.500	53,73%	14.710.825	13,43	53,73	1,50	74.235.050	9,37		BPKAD	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang di Rekonsiliasi	16,00		6,75%	1.998.000	4,0	21.532.000	48,52%	10.447.000	12,13	48,52	0,55	12.445.000	3,45		BPKAD	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8,00				2,0	-			0,00		0,00	-	0,00		BPKAD	
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Kegiatan Monev	160,00		96,40%	132.633.300	40,0	150.345.000	5,99%	9.008.679	0,15	5,99	1,02	141.641.979	0,64		BPKAD	
					BAPPEDA																BAPPEDA	
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		52.101.268.000		9.517.087.753		8.653.949.329	0	4.086.102.144		47,22	0,00	13.603.189.897		26,11		BAPPEDA	
					PERENCANAAN		48.888.697.000	100	8.838.832.336		7.934.006.079	0	3.918.389.299		49,39	100,00	12.757.221.635		26,09		BAPPEDA	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip	BB	27.580.611.000	3	4.933.098.398	BB	5.256.881.979	0	2.811.325.054		53,48	3,00	7.744.423.452		28,08	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	32,00	127.172.000	2	26.625.000	100	24.168.000	50	13.056.400	50,00	54,02	52,00	39.681.400	162,50	31,20	BAPPEDA	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	56.562.000	3	11.864.000	3	9.275.000	1	3.100.750	33,33	33,43	4,00	14.964.750	33,33	26,46	BAPPEDA	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	30.320.000	100	6.318.000	2	6.395.000	2	6.314.400	100,00	98,74	102,00	12.632.400	1275,00	41,66	BAPPEDA	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumla Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	40.290.000	39	8.443.000	3	8.498.000	1	3.641.250	33,33	42,85	40,00	12.084.250	333,33	29,99	BAPPEDA	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	48,00	23.686.240.000	100	4.302.468.065	100	4.521.819.679	50	2.366.990.856	50,00	52,35	150,00	6.669.458.921	312,50	28,16	BAPPEDA	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	19.233.933.000	39	3.785.306.165	39	4.106.853.248	39	2.110.872.356	100,00	51,40	78,00	5.896.178.521	46,43	30,66	BAPPEDA	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00	2.631.924.000	2	246.350.000	1	245.468.000	1	136.500.000	100,00	55,61	3,00	382.850.000	75,00	14,55	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.764.912.000	1	259.210.000	1	245.220.000	1	108.110.000	100,00	44,09	2,00	367.320.000	50,00	20,81	BAPPEDA	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,00	55.471.000	5	11.601.900	5	11.700.000	5	11.508.500	100,00	98,36	10,00	23.110.400	50,00	41,66	BAPPEDA	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	4,00	30.817.000	100	6.490.000	100	6.500.000	0	-	0,00	0,00	100,00	6.490.000	2500,00	21,06	BAPPEDA	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	30.817.000	1	6.490.000	1	6.500.000	0	-	0,00	0,00	1,00	6.490.000	25,00	21,06	BAPPEDA	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	212,00	211.393.000	68,93	26.250.000	95	20.650.000	0	1.220.000	0,00	5,91	68,93	27.470.000	32,51	12,99	BAPPEDA	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12,00	96.596.000	6	26.250.000	3	20.650.000	0	1.220.000	0,00	5,91	6,00	27.470.000	50,00	28,44	BAPPEDA	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200,00	114.797.000	0	0	0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDA	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.794.923.000	99,99	288.902.451	95	323.406.300	80	210.573.169	84,21	65,11	179,99	499.475.620	374,98	27,83	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	44.745.000	1	9.430.000	1	9.430.000	1	4.526.000	100,00	48,00	2,00	13.956.000	50,00	31,19	BAPPEDA	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	86.289.000	1	12.500.000	1	45.700.000	1	41.165.000	100,00	90,08	2,00	53.665.000	25,00	62,19	BAPPEDA	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	600.014.000	2	77.532.300	3	98.841.300	1	38.113.100	33,33	38,56	3,00	115.645.400	25,00	19,27	BAPPEDA	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	153.015.000	1	29.385.000	1	26.870.000	-	14.728.000	100,00	54,81		44.113.000		28,83	BAPPEDA	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,00	208.551.000	1	50.550.000	1	41.860.000	-	11.780.000		28,14		62.330.000		29,89	BAPPEDA	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232,00	702.309.000	58	109.505.151	58	100.705.000	58	100.261.069	100,00	99,56	116,00	209.766.220	50,00	29,87	BAPPEDA	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	28,00	509.672.000	100	41.229.000	100	116.260.000	100	115.710.000	100,00	99,53	200,00	156.939.000	714,29	30,79	BAPPEDA	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	8,00	237.057.000	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDA	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20,00	272.615.000	7	41.229.000	5	116.260.000	5	115.710.000	100,00	99,53	12,00	156.939.000	60,00	57,57	BAPPEDA	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48,00	395.980.000	100	104.468.532	100	101.998.000	50	50.375.629	50,00	49,39	150,00	154.844.161	312,50	39,10	BAPPEDA	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	395.980.000	12	104.468.532	12	101.998.000	6	50.375.629	50,00	49,39	18,00	154.844.161	37,50	39,10	BAPPEDA	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secar Rutin	180,00	824.414.000	99,66	136.665.350	95	142.080.000	50	53.399.000	100,00	37,58	149,66	190.064.350	83,14	23,05	BAPPEDA	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	588.827.000	6	93.004.600	6	104.330.000	6	41.364.000	100,00	39,65	12,00	134.368.600	50,00	22,82	BAPPEDA	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152,00	188.176.000	38	33.841.000	38	27.850.000	15	12.035.000	39,47	43,21	53,00	45.876.000	34,87	24,38	BAPPEDA	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	47.411.000	1	9.819.750	1	10.000.000	-	-		0,00		9.819.750		20,71	BAPPEDA	
					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Indikator Kinerja PD yang Dievaluasi	100,00	4.978.195.000	97,5	1.114.315.040	97.78	766.583.500	45,81	351.135.017		45,81	143,31	1.465.450.057	143,31	29,44	BAPPEDA	
						Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100,00	2.014.044.000	97,5	282.505.418	97.78	77.138.600	31,98	24.671.000		31,98	129,48	307.176.418	129,48	15,25	BAPPEDA	
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Disusun	44,00	4.008.417.000	100,00	949.834.240	100	677.321.000	46,15	328.075.017	46,15	48,44	146,15	1.277.909.257	332,17	31,88	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4,00	237.057.000	1	58.473.750	0	-	0	-			1,00	58.473.750	25,00	24,67	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4,00	280.158.000	2	201.059.380	1	44.745.800	1	40.809.800	100,00	91,20	3,00	241.869.180	75,00	86,33	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	112,00	193.956.000	28	40.623.000	28	37.790.000	28	36.416.000	100,00	96,36	56,00	77.039.000	50,00	39,72	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4,00	646.519.000	1	75.450.500	1	131.711.000	1	101.288.000	100,00	76,90	2,00	176.738.500	50,00	27,34	BAPPEDA	
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi Oleh Kecamatan	532,00	280.158.000	133	45.953.810	133	36.487.200	133	35.537.200	100,00	97,40	266,00	81.491.010	50,00	29,09	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditapkan (RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditapkan (RPJMD/RKPD)	24,00	2.370.569.000	7	528.273.800	8	426.587.000	2	114.024.017	25,00	26,73	9,00	642.297.817	37,50	27,09	BAPPEDA	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4,00	323.259.000	1	107.093.600	0	-	0	-			1,00	107.093.600	25,00	33,13	BAPPEDA	
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4,00	323.259.000	1	107.093.600	0	-	0	-			1,00	107.093.600	25,00	33,13	BAPPEDA	
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32,00	2.014.044.000	7	282.505.418	95	77.138.600	20	24.671.000	21,05	31,98	27,00	307.176.418	84,38	15,25	BAPPEDA	
					Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8,00	246.893.000	1	10.289.000	1	-	0	-	0,00		1,00	10.289.000	12,50	4,17	BAPPEDA	
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24,00	1.767.151.000	6	272.216.418	5	77.138.600	2	23.060.000	40,00	29,89	8,00	295.276.418	33,33	16,71	BAPPEDA	
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	8,00	646.519.000	2	57.387.200	100	89.262.500	100	23.060.000	100,00	25,83	102,00	80.447.200	1275,00	12,44	BAPPEDA	
					Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4,00	387.911.000	1	44.966.400	1	76.692.000	1	23.060.000	100,00	30,07	2,00	68.026.400	50,00	17,54	BAPPEDA	
					Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4,00	258.608.000	1	12.420.800	1	12.570.500	0	-	0,00	0,00	1,00	12.420.800	25,00	4,80	BAPPEDA	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	98,00	7.255.586.000	97,6	1.417.410.560	97,8	1.045.591.700	56,23	587.931.836	57,49	56,23	153,83	2.005.342.396	156,97	27,64	BAPPEDA	
						Capaian Sasaran Perangkat Daerah	98,00	7.060.261.000	97,6	1.091.502.920	97,8	787.810.300	18,19	143.326.392	18,60	18,19	115,79	1.234.829.312	118,15	17,49	BAPPEDA	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,00	334.425.000	99,49	70.321.400	97,8	65.719.000	16,7	10.992.000	17,08	16,73	116,19	81.313.400	118,56	24,31	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembangunan Manusia	Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,00	4.847.511.000	92,96	695.670.873	97,8	444.688.700	18,53	82.404.340	18,95	18,53	111,49	778.075.213	113,77	16,05	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	64.707.000	1	14.266.000	1	12.389.000	1	3.881.000	100,00	31,33	2,00	18.147.000	50,00	28,04	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00	47.221.000	1	11.215.400	1	9.935.000	1	670.000	100,00	6,74	2,00	11.885.400	50,00	25,17	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00	51.911.000	1	9.592.600	1	9.175.000	1	655.000	100,00	7,14	2,00	10.247.600	50,00	19,74	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	14,00	2.645.003.000	4	485.226.493	4	379.042.000	1	61.892.340	25,00	16,33	5,00	547.118.833	35,71	20,68	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	62.562.000	1	14.030.500	1	12.474.000	0	4.406.000	0,00	35,32	1,00	18.436.500	100,00	29,47	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16,00	54.012.000	1	12.127.000	1	10.108.000	0	700.000	0,00	6,93	1,00	12.827.000	6,25	23,75	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4,00	54.012.000	1	9.089.900	1	11.638.000	0	680.000	0,00	5,84	1,00	9.769.900	25,00	18,09	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	21,00	2.202.508.000	4	210.444.380	4	65.646.700	2	20.512.000	50,00	31,25	6,00	230.956.380	28,57	10,49	BAPPEDA	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	98,00	2.244.925.000	71,39	361.882.198	97,8	310.990.000	36,97	114.960.430	37,80	36,97	108,36	476.842.628	110,57	21,24	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
					SDA (Sumber Daya Alam)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	98,00	1.214.594.000	98,15	212.938.137	97,8	302.867.300	15,49	46.899.534	15,84	15,49	113,64	259.837.671	115,96	21,39	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	1.241.229.000	2	223.054.898	1	190.990.000	1	114.960.430	100,00	60,19	3,00	338.015.328	75,00	27,23	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,00	119.390.000	1	4.317.000	1	3.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	4.317.000	6,25	3,62	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,00	121.761.000	1	7.275.500	1	3.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	7.275.500	6,25	5,98	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4,00	1.090.462.000	1	205.472.137	1	294.867.300	1	44.107.534	100,00	14,96	2,00	249.579.671	50,00	22,89	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	523.945.000	1	116.385.300	1	100.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	116.385.300	25,00	22,21	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,00	119.300.000	1	5.483.500	1	7.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	5.483.500	8,33	4,60	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,00	119.300.000	1	5.366.000	1	7.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	5.366.000	8,33	4,50	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4,00	124.132.000	1	7.466.000	1	8.000.000	0	2.792.000	0,00	34,90	1,00	10.258.000	25,00	8,26	BAPPEDA	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,00	4.676.236.000	98,24	985.206.962	97,8	668.882.700	69,07	461.979.406	70,62	69,07	167,31	1.447.186.368	170,72	30,95	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kewilayahan	Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,00	998.156.000	97,81	182.893.910	97,8	40.254.300	34,83	14.022.518	35,61	34,83	132,64	196.916.428	135,35	19,73	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,00	1.808.587.000	3	34.769.177	3	139.968.000	1	106.110.317	33,33	75,81	4,00	140.879.494	33,33	7,79	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12,00	31.892.000	1	7.053.400	1	7.399.000	1	3.903.000	100,00	52,75	2,00	10.956.400	16,67	34,35	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12,00	35.831.000	1	7.455.200	1	8.348.000	1	1.174.000	100,00	14,06	2,00	8.629.200	16,67	24,08	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1,00	37.635.000	1	7.666.200	1	7.906.000	1	749.000	100,00	9,47	2,00	8.415.200	200,00	22,36	BAPPEDA	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28,00	2.731.029.000	4	920.986.785	7	497.868.700	4	346.978.589	57,14	69,69	8,00	1.267.965.374	28,57	46,43	BAPPEDA	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28,00	31.262.000	1	6.610.100	1	7.253.000	1	3.624.500	100,00	49,97	2,00	10.234.600	7,14	32,74	BAPPEDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28,00	37.635.000	1	8.332.300	1	8.046.000	1	189.000	100,00	2,35	2,00	8.521.300	7,14	22,64	BAPPEDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	28,00	960.521.000	7	175.227.710	1	32.348.300	5	13.273.518	500,00	41,03	12,00	188.501.228	42,86	19,62	BAPPEDA	
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.212.571.000		678.255.417		719.943.250		167.712.845		23,30		845.968.262		26,33	BAPPEDA	
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Perangkat Daerah	100,00	3.212.571.000	100	678.255.417	100	719.943.250	60	167.712.845	60,00	23,30	160,00	845.968.262	160,00	26,33	BAPPEDA	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Kelitbangan	4,00	237.057.000	1	52.984.500	100	171.780.250	100	65.934.495	100,00	38,38	101,00	118.918.995	2525,00	50,16	BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawa b	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4,00	237.057.000	1	52.984.500	2	171.780.250	1	65.934.495	50,00	38,38	2,00	118.918.995	50,00	50,16	BAPPEDA	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Jurnal Kelitbangan	100,00	2.975.514.000	8	625.270.917	100	548.163.000	18,57	101.778.350	18,57	18,57	26,57	727.049.267	26,57	24,43	BAPPEDA	
					Penelitian, Pengembangan dan Prekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	12,00	695.501.000	1	158.833.706	1	77.635.000	0	9.514.600	0,00	12,26	1,00	168.348.306	8,33	24,21	BAPPEDA	
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8,00	1.106.989.000	2	216.054.022	1	195.331.000	1	40.540.000	100,00	20,75	3,00	256.594.022	37,50	23,18	BAPPEDA	
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	84,00	299.709.000	3	67.999.897	21	74.891.000	0	9.398.000	0,00	12,55	3,00	77.397.897	3,57	25,82	BAPPEDA	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8,00	693.249.000	1	147.199.292	1	155.118.250	0	37.660.750	0,00	24,28	1,00	184.860.042	12,50	26,67	BAPPEDA	
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4,00	180.066.000	1	35.184.000	1	45.187.750	0	4.665.000	0,00	10,32	1,00	39.849.000	25,00	22,13	BAPPEDA	
					INSPEKTORAT																INSPEKTORAT	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	50.001.633.000	BB	9.974.600.252	BB	10.304.602.119	-	5.333.157.210		51,76		15.307.757.462		30,61	INSPEKTORAT	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	206.696.000	100	26.941.000	100	21.995.000	64,29	17.099.000	64,29	77,74	164,29	44.040.000	164,29	21,31	INSPEKTORAT	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	44.804.000	2	5.817.000	2	5.820.000	1,00	3.780.000	50,00	64,95	3,00	9.597.000	37,50	21,42	INSPEKTORAT	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16,00	59.492.000	4	11.735.000	4	5.775.000	1,00	3.714.000	25,00	64,31	5,00	15.449.000	31,25	25,97	INSPEKTORAT	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	29.153.000	4	3.414.000	4	4.100.000	4,00	4.080.000	100,00	99,51	8,00	7.494.000	50,00	25,71	INSPEKTORAT	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,00	73.247.000	4	5.975.000	4	6.300.000	3,00	5.525.000	75,00	87,70	7,00	11.500.000	43,75	15,70	INSPEKTORAT	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	42.528.981.000	100	8.370.153.167	100	9.307.058.619	50,00	4.817.672.201	50,00	51,76	150,00	13.187.825.368	150,00	31,01	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3248,00	41.753.022.000	812	8.216.577.057	812	9.155.942.619	203,00	4.744.841.201	25,00	51,82	1015,00	12.961.418.258	31,25	31,04	INSPEKTORAT	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	733.293.000	1	148.470.000	1	147.400.000	0,00	69.120.000	0,00	46,89	1,00	217.590.000	25,00	29,67	INSPEKTORAT	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	42.666.000	1	5.106.110	1	3.716.000	1,00	3.711.000	100,00	99,87	2,00	8.817.110	50,00	20,67	INSPEKTORAT	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,00	1.137.873.000	50	102.920.128	-	-	-	-							INSPEKTORAT	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200,00	1.137.873.000	50	102.920.128	-	-	41,00	-			91,00		45,50		INSPEKTORAT	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	3.051.084.000	98,96	925.504.371	100	560.239.000	37,37	321.457.119	37,37	57,38	136,33	1.246.961.490	136,33	40,87	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,00	62.028.000	2	20.364.000	2	5.990.000	1,00	3.190.000	50,00	53,26	3,00	23.554.000	37,50	37,97	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24,00	253.936.000	6	207.200.000	1	200.000	1,00	200.000	100,00	100,00	7,00	207.400.000	29,17	81,67	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	212,00	880.344.000	53	165.186.800	53	137.785.000	48,00	125.641.900	90,57	91,19	101,00	290.828.700	47,64	33,04	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28,00	150.527.000	7	37.980.925	7	22.024.000	4,00	11.989.000	57,14	54,44	11,00	49.969.925	39,29	33,20	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200,00	117.770.000	295	21.745.000	300	24.840.000	84,00	7.020.000	28,00	28,26	379,00	28.765.000	31,58	24,42	INSPEKTORAT	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,00	1.586.479.000	20	473.027.646	20	369.400.000	10,00	166.893.768	50,00	45,18	30,00	639.921.414	37,50	40,34	INSPEKTORAT	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	395.430.000	100	14.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	14.750.000	100,00	3,73	INSPEKTORAT	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	36,00	395.430.000	9	14.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	9,00	14.750.000	25,00	3,73	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	842.501.000	100	149.742.839	100	136.559.500	51,49	59.929.950	51,49	43,89	151,49	209.672.789	151,49	24,89	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	617.296.000	12	85.552.839	12	97.539.500	5,00	38.939.950	41,67	39,92	17,00	124.492.789	35,42	20,17	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	356,00	225.205.000	89	64.190.000	89	39.020.000	47,00	20.990.000	52,81	53,79	136,00	85.180.000	38,20	37,82	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.234.498.000	100	384.588.747	100	278.750.000	38,46	123.521.391	38,46	44,31	138,46	508.110.138	138,46	22,74	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4,00	42.196.000	1	7.090.000	1	7.900.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	7.090.000	25,00	16,80	INSPEKTORAT	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44,00	1.452.685.000	11	234.956.790	11	270.850.000	5,00	123.521.391	45,45	45,61	16,00	358.478.181	36,36	24,68	INSPEKTORAT	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	99.564.000	1	142.541.957	-	-	0,00	-			1,00	142.541.957	25,00	143,17	INSPEKTORAT	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	640.053.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100,00	13.613.509.000	100	1.825.402.308	100	2.025.550.000	34,66	798.175.000	34,66	39,41	134,66	2.623.577.308	134,66	19,27	INSPEKTORAT	
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja	100,00	11.076.256.000	100	1.412.157.500	100	1.561.300.000	29,31	627.825.000	29,31	40,21	129,31	2.039.982.500	129,31	18,42	INSPEKTORAT	
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	328,00	4.807.016.000	82	929.977.500	82	979.950.000	33,00	400.350.000	40,24	40,85	115,00	1.330.327.500	35,06	27,67	INSPEKTORAT	
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40,00	1.253.116.000	10	15.240.000	10	12.100.000	0,00	-	0,00	0,00	10,00	15.240.000	25,00	1,22	INSPEKTORAT	
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	328,00	5.016.124.000	82	466.940.000	82	569.250.000	18,00	227.475.000	21,95	39,96	100,00	694.415.000	30,49	13,84	INSPEKTORAT	
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP	100,00	2.537.253.000	100	413.244.808	100	464.250.000	40,00	170.350.000	40,00	36,69	140,00	583.594.808	140,00	23,00	INSPEKTORAT	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4,00	1.139.992.000	1	64.464.808	1	66.150.000	-	23.350.000		35,30		87.814.808		7,70	INSPEKTORAT	
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,00	1.397.261.000	4	348.780.000	4	398.100.000	2,00	147.000.000	50,00	36,93	6,00	495.780.000	37,50	35,48	INSPEKTORAT	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100,00	6.671.130.000	100	1.550.913.500	100	637.800.000	46,43	268.800.000	46,43	42,14	146,43	1.819.713.500	146,43	27,28	INSPEKTORAT	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00	5.595.947.000	100	1.316.729.500	100	537.600.000	42,86	218.700.000	42,86	40,68	142,86	1.535.429.500	142,86	27,44	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16,00	4.520.764.000	4	959.629.500	4	339.600.000	2,00	119.700.000	50,00	35,25	6,00	1.079.329.500	37,50	23,87	INSPEKTORAT	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	12,00	1.075.183.000	3	357.100.000	3	198.000.000	1,00	99.000.000	33,33	50,00	4,00	456.100.000	33,33	42,42	INSPEKTORAT	
					Pendampingan dan Asistensi	Persentase Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	8,00	1.075.183.000	3	234.184.000	2	100.200.000	50,00	50.100.000	2500,00	50,00	53,00	284.284.000	662,50	26,44	INSPEKTORAT	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8,00	1.075.183.000	2	234.184.000	2	100.200.000	1,00	50.100.000	50,00	50,00	3,00	284.284.000	37,50	26,44	INSPEKTORAT	
					SEKRETARIAT DAERAH																	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																Sekretariat Daerah	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																Sekretariat Daerah	
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah	25,00	99.564.000	15	11.264.975	15	8.359.000	0	-	0,00	0,00	15,00	11.264.975	60,00	11,31	Sekretariat Daerah	
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan tanah	25,00	99.564.000	15	11.264.975	15	8.359.000	0	-	0,00	0,00	15,00	11.264.975	60,00	11,31	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4,00	33.188.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	4,00	33.188.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4,00	33.188.000	1	11.264.975		8.359.000	0	-	0,00	0,00	1,00	11.264.975	25,00	33,94	Sekretariat Daerah	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	B	146.832.783.000	BB	28.346.114.963	B	26.531.875.382	BB	12.698.091.287	0,00	47,86		41.044.206.250		27,95	ekretariat Daerah	
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pelaporan, perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	85,00	247.243.000	85	99.917.234	2,0	106.269.000	45	17.554.950	2250,00	16,52	130,00	117.472.184	152,94	47,51	ekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	51.133.000	1	19.160.224	2,0	26.541.000	-	8.479.950		31,95		27.640.174		54,06	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	33.188.000	0	6.870.750	1,0	6.005.000	0	-	0,00	0,00	0,00	6.870.750	0,00	20,70	Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	49.988.000	1	5.548.650	1,0	6.005.000	0	-	0,00	0,00	1,00	5.548.650	25,00	11,10		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	33.188.000	1	4.662.400	1,0	5.384.000	1	5.338.500	100,00	99,15	2,00	10.000.900	50,00	30,13		Sekretariat Daerah
					Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	33.188.000	0	4.646.000	1,0	5.384.000	0	-	0,00	0,00	0,00	4.646.000	0,00	14,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	18.206.000	1	3.267.500	2,0	3.755.000	1	3.736.500	50,00	99,51	2,00	7.004.000	50,00	38,47		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	28.352.000	0	55.761.710	1,0	53.195.000	0	-	0,00	0,00	0,00	55.761.710	0,00	196,68		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan keuangan	100,00	78.627.579.000	1	16.340.589.771	100	17.992.598.755	50	9.019.642.820	50,00	50,13	51,00	25.360.232.591	51,00	32,25		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123,00	73.274.620.000	207	12.331.788.571	207,0	13.765.854.755	414	6.942.230.020	200,00	50,43	621,00	19.274.018.591	504,88	26,30		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	40,00	5.251.163.000	1	3.989.474.600	1,0	4.210.870.000	1	2.062.820.300	100,00	48,99	2,00	6.052.294.900	5,00	115,26		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	101.796.000	1	19.326.600	1,0	15.874.000	1	14.592.500	100,00	91,93	2,00	33.919.100	50,00	33,32		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang mendapat jaminan pengamanan	100,00	2.367.250.000	50	385.648.264	100	367.000.000	50	196.436.593	50,00	53,52	100,00	582.084.857	100,00	24,59		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40,00	1.137.873.000	10	385.648.264	10,0	367.000.000	5	196.436.593	50,00	53,52	15,00	582.084.857	37,50	51,16		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	32,00	590.983.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	32,00	638.394.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	100,00	960.549.000	55	223.252.000	76	145.000.000	40	18.105.000	52,63	12,49	95,00	241.357.000	95,00	25,13		ekretariat Daerah
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24,00	68.746.000	0	64.252.000	6,0	19.000.000	6	18.105.000	100,00	95,29	6,00	82.357.000	25,00	119,80		Sekretariat Daerah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	180,00	165.470.000	-				0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	40,00	80.599.000	0	-	0,0		0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200,00	189.646.000	0	89.000.000	20,0	63.000.000	-	-	0,00	0,00		89.000.000		46,93		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50,00	204.338.000	0	-			0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	260,00	251.750.000	0	70.000.000	65,0	63.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	70.000.000	0,00	27,81		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah pada Sekretariat Daerah	80,00	94.823.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Distribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Rettibusi Daerah	32,00	94.823.000	0	-			0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan paket pelayanan administrasi umum	100,00	11.278.647.000	75,00%	3.047.286.770	75,0	1.130.508.400	40	447.439.422	53,33	39,58	40,75	3.494.726.192	40,75	30,99		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	16,00	909.421.000	15	241.280.250	3,0	157.930.000	1	5.967.000	33,33	3,78	16,00	247.247.250	100,00	27,19		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20,00	2.336.812.000	24	919.987.875			-	-	100,00			919.987.875		39,37		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4,00	237.057.000	1	87.129.750	1,0	130.000.000	-	26.940.000		20,72		114.069.750		48,12		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,00	2.760.212.000	4	433.438.988	4,0	290.139.400	-	104.847.050		36,14		538.286.038		19,50		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	12,00	1.854.027.000	36	440.812.600	36,0	215.695.000	-	123.461.900		57,24		564.274.500		30,44		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12,00	94.823.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	20,00	47.411.000	0	-			0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3476,00	2.910.874.000	254	924.637.307	869,0	336.744.000	254	186.223.472	29,23	0,00	508,00	1.110.860.779	14,61	38,16		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60,00	80.599.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	40,00	47.411.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Sekretariat Daerah

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100,00	2.698.182.000	54,00%	754.941.271	78,0		0	-	0,00		0,54	754.941.271	0,54	27,98	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	13,00	449.697.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8,00	449.697.000	3	330.600.000			0	-			3,00	330.600.000	37,50	73,52	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	8,00	449.697.000	3	47.100.000			0	-	0,00		3,00	47.100.000	37,50	10,47	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32,00	449.697.000	8	377.241.271			0	-			8,00	377.241.271	25,00	83,89	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4,00	449.697.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,00	449.697.000	0	-			0	-			0,00	-	0,00	0,00	sekretariat Daerah	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	7.220.041.000	75	1.418.372.770	100	1.418.372.770	50	605.527.454	50,00	42,69	125,00	2.023.900.224	125,00	28,03	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	48,00	3.539.259.000	12	579.834.420	12,0	579.834.420	-	283.995.654		48,98		863.830.074		24,41	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	48,00	3.633.371.000	14	838.538.350	14,0	838.538.350	7	321.531.800	50,00	38,34	21,00	1.160.070.150	43,75	31,93	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	40,00	47.411.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00	sekretariat Daerah	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	16.881.992.000	75%	1.942.980.705	100,0	2.300.796.000	50	866.277.304	50,00	37,65	50,75	2.809.258.009	50,75	16,64	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	8,00	928.789.000	2	302.049.673	2,0	94.670.000	2	26.646.440	100,00	28,15	4,00	328.696.113	50,00	35,39	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	920,00	13.360.872.000	113	1.059.160.989	230,0	1.772.400.000	85	658.782.564	36,96	37,17	198,00	1.717.943.553	21,52	12,86	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	1000,00	237.057.000	3	38.859.000	3,0	25.040.000	-	-		0,00		38.859.000		16,39	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	184,00	568.415.000	46	148.560.978	46,0	103.350.000	23	44.145.300	50,00	42,71	69,00	192.706.278	37,50	33,90	sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	4,00	720.103.000	21	244.685.065	21,0	212.336.000	5	77.957.000	23,81	36,71	26,00	322.642.065	650,00	44,80	sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4,00	165.940.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	20,00	900.816.000	5	149.665.000	5,0	93.000.000	2	58.746.000	40,00	0,00	7,00	208.411.000	35,00	23,14		sekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	3.564.322.000	75%	678.684.806	100,0	633.628.457	50	330.480.089	50,00	52,16	50,75	1.009.164.895	50,75	28,31		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	2.582.907.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	531.007.000	2	46.884.806	2,0	20.250.000	-	18.076.000		89,26		64.960.806		12,23		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	379.291.000	0	45.000.000	2,0	25.500.000	-	19.004.089		74,53		64.004.089		16,87		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	71.117.000	0	586.800.000	2,0	587.878.457	-	293.400.000		49,91		880.200.000		1237,68		sekretariat Daerah
					Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100,00	47.411.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	12,00	47.411.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00		sekretariat Daerah
					Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan rumah tangga KDH, WKDH dan Sekretariat	100,00	16.153.335.000	75	1.972.284.153	100	1.507.025.000	50	743.917.306	50,00	49,36	125,00	2.716.201.459	125,00	16,82		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	24,00	8.119.132.000	0	1.251.090.853	6,0	877.795.000	-	460.748.306		52,49		1.711.839.159		21,08		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang di sediakan	24,00	4.952.464.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-		0,00		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di sediakan	304,00	3.081.739.000	0	721.193.300	12,0	629.230.000	-	283.169.000		45,00		1.004.362.300		32,59		sekretariat Daerah
					Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase organisasi yang telah dilakukan penataan	100,00	3.362.249.000	100	676.579.928	100	438.707.000	50	226.943.293	50,00	51,73	150,00	903.523.221	150,00	26,87		sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16,00	1.456.469.000	4	275.791.576	4,0	117.440.000	2	58.561.077	50,00	49,86	6,00	334.352.653	37,50	22,96		sekretariat Daerah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12,00	934.647.000	3	159.184.298	3,0	105.881.500	-	43.131.096		40,74		202.315.394		21,65		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4,00	308.786.000	1	108.881.674	1,0	100.282.500	-	39.593.000		39,48		148.474.674		48,08		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8,00	87.675.000	2	35.810.300	2,0	15.384.000	-	6.488.500		42,18		42.298.800		48,24		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8,00	574.672.000	2	96.912.080	2,0	99.719.000	-	79.169.620		79,39		176.081.700		30,64		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	95,00	3.329.160.000	80,00	805.577.291	95	491.970.000	50	225.767.056	52,63	45,89	130,00	1.031.344.347	136,84	30,98		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96,00	1.175.124.000	0	345.107.391	24,0	160.013.000	0	75.907.556	0,00	47,44	0,00	421.014.947	0,00	35,83		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	96,00	925.598.000	0	267.813.500	24,0	172.807.000	0	94.271.500	0,00	54,55	0,00	362.085.000	0,00	39,12		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	64,00	1.228.438.000	0	192.656.400	12,0	159.150.000	0	55.588.000	0,00	34,93	0,00	248.244.400	0,00	20,21		Sekretariat Daerah
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	75,00	58.191.570.000	75	9.490.166.194	75	8.319.321.000	40	3.072.269.769	53,33	36,93	115,00	12.562.435.963	153,33	21,59		ekretariat Daerah
					Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan administrasi tata pemerintahan	80,00	3.432.564.000	80	616.811.217	80	480.515.000	40	259.932.583	50,00	54,09	120,00	876.743.800	150,00	25,54		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8,00	1.160.597.000	2	219.544.467	2,0	196.723.000	-	80.718.609		41,03		300.263.076		25,87		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4,00	767.270.000	1	127.271.925	1,0	73.153.000	1	30.153.422	100,00	41,22	2,00	157.425.347	50,00	20,52		Sekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12,00	1.504.697.000	0	269.994.825	3,0	210.639.000	3	149.060.552	100,00	70,77	3,00	419.055.377	25,00	27,85		Sekretariat Daerah
					Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	90,00	49.499.846.000	57	7.865.809.881	75	7.087.393.000	38	2.492.473.070	50,67	35,17	95,00	10.358.282.951	105,56	20,93		ekretariat Daerah
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	39,00	44.995.765.000	7	7.544.845.816	3,0	6.711.053.000	-	2.353.933.070		35,08		9.898.778.886		22,00		Sekretariat Daerah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,Kesehatan ,Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB	11,00	1.896.455.000	0	-			-	-	0,00	0,00		-	0,00		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan, Kebudayaan, Keperpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4,00	1.659.398.000	1	320.964.065		376.340.000	-	138.540.000		36,81		459.504.065	27,69		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar Keluarga,Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga,warga, dan kelompok masyarakat	400,00	474.114.000	0	-			-		0,00	0,00		-	0,00		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	400,00	474.114.000	0				-		0,00	0,00		-	0,00		Sekretariat Daerah	
					Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketersediaan dokumen fasilitasi dan kordinasi hukum	70,00	4.756.570.000	60%	925.684.386		699.149.000	-	275.634.396		39,42		1.201.318.782	25,26		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang di susun	2124,00	2.419.718.000	531	264.173.457	531,0	275.556.000	-	95.022.426		34,48		359.195.883	14,84		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	40,00	1.374.138.000	1	373.695.179		211.829.000	-	87.649.170		41,38		461.344.349	33,57		Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasikan	2124,00	962.714.000	531	287.815.750	531,0	211.764.000	-	92.962.800		43,90		380.778.550	39,55		Sekretariat Daerah	
					Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama daerah	100,00	502.590.000	75%	81.860.710	100	52.264.000	50	44.229.720	50,00	84,63	50,75	126.090.430	50,75	25,09	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4,00	167.530.000	10	81.860.710	10,0	52.264.000	6	44.229.720	60,00	84,63	16,00	126.090.430	400,00	75,26	Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Kerjasama luar negeri	4,00	167.530.000	0				0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	4,00	167.530.000	0				0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaku perekonomian dan pembangunan yang taat kebijakan	80,00	11.379.335.000	80	2.162.590.855	60	1.416.439.000	30	636.808.161	50,00	44,96	110,00	2.799.399.016	137,50	24,60	Sekretariat Daerah	
						Persentase kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100,00		100		90		45		50,00	0,00	145,00		145,00	Sekretariat Daerah		
					Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	75,00	4.083.543.000	75	749.525.826	75	479.447.000	25	100.224.033	33,33	20,90	100,00	849.749.859	133,33	20,81	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	14,00	1.916.842.000	7	379.593.774	7,0	237.196.000	0	37.994.203	0,00	16,02	7,00	417.587.977	50,00	21,79	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20,00	836.337.000	5	181.579.152	5,0	112.377.000	0	61.569.830	0,00	54,79	5,00	243.148.982	25,00	29,07	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	12,00	382.136.000	6	188.352.900	10,0	129.874.000	0	660.000	0,00	0,51	6,00	189.012.900	50,00	49,46	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12,00	474.114.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12,00	474.114.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan pembangunan	100,00	2.531.039.000	90%	488.144.233	90	301.900.000	23	163.558.152	25,56	54,18	23,90	651.702.385	23,90	25,75	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	8,00	353.487.000	2	72.357.500	2,0	97.949.000	1	33.433.000	50,00	34,13	3,00	105.790.500	37,50	29,93	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24,00	1.831.430.000	4	168.460.821	4,0	89.856.000	1	39.056.052	25,00	43,47	5,00	207.516.873	20,83	11,33	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	346.122.000	4	247.325.912	4,0	114.095.000	1	91.069.100	25,00	79,82	5,00	338.395.012	31,25	97,77	Sekretariat Daerah	
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100,00	4.063.245.000	85%	731.729.496	85,0	504.290.000	50	346.033.651	58,82	68,62	50,85	1.077.763.147	50,85	26,52	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48,00	373.507.000	12	48.399.050	12,0	49.443.400	5	40.343.397	41,67	81,60	17,00	88.742.447	35,42	23,76	Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	48,00	2.850.071.000	12	510.283.346	12,0	382.078.600	5	283.408.595	41,67	74,18	17,00	793.691.941	35,42	27,85	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200,00	839.667.000	300	173.047.100		72.768.000	-	22.281.659	0,00	30,62		195.328.759		23,26	Sekretariat Daerah	
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber daya alam	80,00	701.508.000	0,8	193.191.300	80	130.802.000	40	26.992.325	50,00	20,64	40,80	220.183.625	51,00	31,39	ekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan,Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perdagangan,Perindustrian,KUKM, Penanaman Modal,Tenaga Kerja	4,00	284.468.000	1	112.175.900	1,0	70.168.000	-	8.273.400		11,79		120.449.300		42,34	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,kominfo,perhubungan,statistik, persandian	4,00	85.160.000	0				-		0,00	0,00		-		0,00	Sekretariat Daerah	
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanianahan	12,00	331.880.000	1	81.015.400	3,0	60.634.000	1	18.718.925	33,33	30,87	2,00	99.734.325	16,67	30,05	Sekretariat Daerah	
					SEKRETARIAT DEWAN																Sekretariat Dewan	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB Skala	133.487.604.996		32.238.359.105	BB Skala	30.840.508.395	BB Skala	15.205.065.407		49,30		47.443.424.512		35,54	Sekretariat Dewan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	531.340.572	10	18.494.100	10	18.676.336	2	4.832.500	20,00	25,87	12,00	23.326.600	30,00	4,39	ekretariat Dewan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16,00	54.394.856	4	11.993.500	4	12.175.000	1	2.919.900	25,00	23,98	5,00	14.913.400	31,25	27,42	Sekretariat Dewan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,00	476.945.716	6	6.500.600	6	6.501.336	1	1.912.600	16,67	29,42	7,00	8.413.200	29,17	1,76	Sekretariat Dewan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan administrasi keuangan yg akuntabel	288,00	16.186.686.987	72	3.714.658.755	72	3.988.161.789	50	2.065.677.857	69,44	51,80	122,00	5.780.336.612	42,36	35,71	ekretariat Dewan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	188,00	14.494.089.952	47	3.349.558.255	47	3.597.874.039	47	1.897.253.357	100,00	52,73	94,00	5.246.811.612	50,00	36,20	Sekretariat Dewan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	48,00	1.622.150.670	12	349.400.000	12	374.520.000	6	162.580.000	50,00	43,41	18,00	511.980.000	37,50	31,56	Sekretariat Dewan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD & Laporan Hasil Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	25.768.865	1	5.700.900	1	5.767.750	0	5.219.600	0,00	90,50	1,00	10.920.500	25,00	42,38	Sekretariat Dewan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	48,00	44.677.500	12	9.999.600	12	10.000.000	0	624.900	0,00	6,25	12,00	10.624.500	25,00	23,78	Sekretariat Dewan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang baik	100,00	737.178.750	25	255.000.000	25	244.097.000	25	176.538.509	100,00	72,32	50,00	431.538.509	50,00	58,54	Sekretariat Dewan	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarakan tugas & Fungsi yang mengikuti pendidikan & Pelatihan	100,00	737.178.750	25	255.000.000	25	244.097.000	25	176.538.509	100,00	72,32	50,00	431.538.509	50,00	58,54	Sekretariat Dewan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3224,00	10.697.967.731	698	3.606.164.410	806	2.458.410.880	569,00	1.481.150.632	70,60	60,25	1267,00	5.087.315.042	39,30	47,55	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88,00	177.593.063	21	87.191.300	22	96.131.380	20,00	73.757.000	90,91	76,73	41,00	160.948.300	46,59	90,63	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12,00	2.076.163.425	3	892.350.155	3	130.000.000	1	477.756.210	33,33	367,50	4,00	1.370.106.365	33,33	65,99	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4,00	343.273.540	1	74.489.000	1	85.491.000	1	66.258.000	100,00	77,50	2,00	140.747.000	50,00	41,00	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	1.429.505.088	1	298.559.600	1	342.086.500	1	137.675.800	100,00	40,25	2,00	436.235.400	50,00	30,52	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang disediakan	12,00	1.192.277.838	3	249.542.100	3	263.025.000	2	160.552.500	66,67	61,04	5,00	410.094.600	41,67	34,40	Sekretariat Dewan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Per-UU yang disediakan	2976,00	3.703.764.750	637	1.187.775.000	744	800.705.000	530	320.850.000	71,24	40,07	1167,00	1.508.625.000	39,21	40,73	Sekretariat Dewan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48,00	44.677.500	12	32.836.480	12	54.500.000	-	-							Sekretariat Dewan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,00	1.730.712.527	20	783.420.775	20	686.472.000	15	682.249.402	75,00	99,38	35,00	1.465.670.177	43,75	84,69	Sekretariat Dewan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	884,00	89.355.000	216	98	213	464.850.000	154	241.000.000	72,30	51,84	370,00	241.000.098	41,86	269,71	Sekretariat Dewan	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	800,00	22.338.750	196	98	200	100.000.000	150	98.000.000	75,00	98,00	346,00	98.000.098	43,25	438,70	Sekretariat Dewan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32,00	22.338.750	7	88	8	200.000.000	0	-	0,00	0,00	7,00	88	21,88	0,00	Sekretariat Dewan	
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	32,00	22.338.750	8	100	8	184.850.000	3	143.000.000	37,50	77,36	11,00	143.000.100	34,38	640,14	Sekretariat Dewan	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan	20,00	22.338.750	5	100	5	180.000.000	0	-	0,00	0,00	5,00	100	25,00	0,00	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,00	1.051.663.673	20	1.377.373.743	22	440.005.500	8	131.137.256	36,36	29,80	28,00	1.508.510.999	31,82	143,44	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik yang disediakan	48,00	714.840.000	11	326.900.000	12	300.005.500	5	87.386.256	41,67	29,13	16,00	414.286.256	33,33	57,96	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang disediakan	40,00	336.823.673	9	390.000.000	10	140.000.000	3	43.751.000	30,00	31,25	12,00	433.751.000	30,00	128,78	Sekretariat Dewan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	244,00	3.173.176.654	54	1.023.070.418	61	765.770.000	35	241.466.265	57,38	31,53	89,00	1.264.536.683	36,48	39,85	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64,00	89.355.000	16	12.564.424	16	41.300.000	5	8.333.015	31,25	20,18	21,00	20.897.439	32,81	23,39	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64,00	2.547.691.654	11	422.960.862	16	433.820.000	14	191.942.000	87,50	44,24	25,00	614.902.862	39,06	24,14	Sekretariat Dewan	
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20,00	268.065.000	5	80.625.000	5	100.650.000	2	21.456.250	40,00	21,32	7,00	102.081.250	35,00	38,08	Sekretariat Dewan	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48,00	178.710.000	10	487.638.132	12	170.000.000	2	17.070.000	16,67	10,04	12,00	504.708.132	25,00	282,42	Sekretariat Dewan	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48,00	89.355.000	12	19.282.000	12	20.000.000	0	2.665.000	0,00	13,33	12,00	21.947.000	25,00	24,56	Sekretariat Dewan	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	324,00	99.387.541.069	81	21.613.689.372	81	21.996.836.890	81	10.771.423.388	100,00	48,97	162,00	32.385.112.760	50,00	32,58	Sekretariat Dewan	
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	160,00	98.730.781.818	40	21.404.115.332	40	21.731.566.890	40	10.742.744.388	100,00	49,43	80,00	32.146.859.720	50,00	32,56	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4,00	510.440.438	1	201.770.000	1	202.270.000	1	28.679.000	100,00	14,18	2,00	230.449.000	50,00	45,15	Sekretariat Dewan	
					Pelaksanaan Medical Cek Up	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	160,00	146.318.813	40	7.804.040	40	63.000.000	-	-							Sekretariat Dewan	
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan administrasi DPRD	184,00	1.632.694.560	48	265.343.000	46	463.700.000	6	91.839.000	13,04	19,81	54,00	357.182.000	29,35	21,88	Sekretariat Dewan	
					Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	48,00	22.338.750	20	5.000.000	12	5.000.000	0	-	0,00	0,00	20,00	5.000.000	41,67	22,38	Sekretariat Dewan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	32,00	22.338.750	8	5.000.000	8	5.000.000	0	-	0,00	0,00	8,00	5.000.000	25,00	22,38	Sekretariat Dewan	
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100,00	1.565.678.310	19	207.168.000	25	358.200.000	4	59.205.000	16,00	16,53	23,00	266.373.000	23,00	17,01	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4,00	22.338.750	1	48.175.000	1	105.500.000	0	32.634.000	0,00	30,93	1,00	80.809.000	25,00	361,74	Sekretariat Dewan	
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap peran legislatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	464,00	96.207.595.189	149	19.531.044.450	121	19.103.075.100	33	10.189.471.299	27,27	53,34	182,00	29.720.515.749	39,22	30,89	Sekretariat Dewan	
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan daerah dan Peraturan DPRD yang dihasilkan dan disahkan	52,00	9.928.113.421	11	1.280.754.843	13	1.838.928.000	0	607.364.145	0,00	33,03	11,00	1.888.118.988	21,15	19,02	Sekretariat Dewan	
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	32,00	9.066.284.446	6	1.181.204.843	8	1.471.328.000	0	605.299.145	0,00	41,14	6,00	1.786.503.988	18,75	19,70	Sekretariat Dewan	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Peyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	20,00	861.828.975	5	99.550.000	5	118.000.000	0	-	0,00	0,00	5,00	99.550.000	25,00	11,55	Sekretariat Dewan	
					Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1	249.600.000		2.065.000								
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	32,00	8.818.543.241	10	1.078.350.875	8	1.691.031.000	9	605.723.605	112,50	35,82	19,00	1.684.074.480	59,38	19,10	Sekretariat Dewan	
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA & PPAS	4,00	1.852.280.005	2	212.409.039	1	381.741.000	3	276.298.000	300,00	72,38	5,00	488.707.039	125,00	26,38	Sekretariat Dewan	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Perubahan KUA & Perubahan PPAS	4,00	1.852.280.005	2	205.451.801	1	433.263.000	-	-							Sekretariat Dewan	
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	16,00	1.660.836.917	2	202.096.496	4	47.538.000	-	-							Sekretariat Dewan	
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan	4,00	1.661.444.531	1	206.455.797	1	394.879.000	-	-							Sekretariat Dewan	
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4,00	1.791.701.783	1	251.937.742	1	433.610.000	1	329.425.605	100,00	75,97	2,00	581.363.347	50,00	32,45	Sekretariat Dewan	
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	148,00	14.343.432.587	69	8.698.840.011	42	5.724.925.600	29	2.429.015.833	69,05	42,43	98,00	11.127.855.844	66,22	77,58	Sekretariat Dewan	
					Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					6	664.360.000										
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24,00	8.699.115.815	6	3.449.369.213	6	3.572.822.000	3	1.906.887.833	50,00	53,37	9,00	5.356.257.046	37,50	61,57	Sekretariat Dewan	
					Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk hukum daerah, publikasi & dokumentasi Dewan	48,00	2.100.110.565	12	788.000.000	12	601.950.000	4	147.000.000	33,33	24,42	16,00	935.000.000	33,33	44,52	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	28,00	872.223.642	7	195.226.500	7	195.226.500	7	63.000.000	100,00	32,27	14,00	258.226.500	50,00	29,61	Sekretariat Dewan	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	32,00	1.810.779.075	8	470.898.000	8	474.898.000	16	120.000.000	200,00	25,27	24,00	590.898.000	75,00	32,63	Sekretariat Dewan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Humas	4,00	35.742.000	1	3.667.140.420	1	4.211.618.000	0	-	0,00	0,00	1,00	3.667.140.420	25,00	10260,03	Sekretariat Dewan	
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12,00	825.461.490	2	128.205.878	3	184.760.000	1	1.328.000	33,33	0,72	3,00	129.533.878	25,00	15,69	Sekretariat Dewan	
					Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					12	632.859.000	2	337.800.000								
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Laporan Hasil Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	64,00	15.428.389.487	14	2.363.772.855	16	1.890.232.500	10	1.239.137.930	62,50	65,55	24,00	3.602.910.785	37,50	23,35	Sekretariat Dewan	
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunker DPRD	48,00	9.500.232.536	9	1.144.811.045	12	1.038.360.000	7	884.306.530	58,33	85,16	16,00	2.029.117.575	33,33	21,36	Sekretariat Dewan	
					Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokir DPRD yang disusun	12,00	978.247.371	2	129.911.910	3	30.572.500	2	9.153.400	66,67	29,94	4,00	139.065.310	33,33	14,22	Sekretariat Dewan	
					Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reses	4,00	4.949.909.580	1	1.089.049.900	1	821.300.000	0	345.678.000	0,00	42,09	1,00	1.434.727.900	25,00	28,98	Sekretariat Dewan	
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD	8,00	1.218.520.732	4	161.121.461	2	207.143.000	1	132.220.678	50,00	63,83	5,00	293.342.139	62,50	24,07	Sekretariat Dewan	
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8,00	1.218.520.732	2	161.121.461	2	207.143.000	1	132.220.678	50,00	63,83	3,00	293.342.139	37,50	24,07	Sekretariat Dewan	
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	160,00	46.470.595.721	41	5.949.704.405	40	7.750.815.000	18	5.176.009.108	45,00	66,78	59,00	11.125.713.513	36,88	23,94	Sekretariat Dewan	
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60,00	40.227.942.678	15	5.025.252.852	15	6.552.031.000	7	4.412.821.258	46,67	67,35	22,00	9.438.074.110	36,67	23,46	Sekretariat Dewan	
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4,00	248.384.561	1	54.212.900	1	55.660.000	0	1.199.000	0,00	2,15	1,00	55.411.900	25,00	22,31	Sekretariat Dewan	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48,00	4.834.663.969	12	602.003.653	12	914.124.000	6	610.475.100	50,00	66,78	18,00	1.212.478.753	37,50	25,08	Sekretariat Dewan	
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48,00	1.159.604.513	12	268.235.000	12	229.000.000	4	151.513.750	33,33	66,16	16,00	419.748.750	33,33	36,20	Sekretariat Dewan	
					KESBANGPOL																KESBANGPOL	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	14.373.534.204	BB	3.127.178.630	BB	3.172.809.268	0	1.563.344.991		49,27		4.690.523.621		32,63	Kesbangpol	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	100,00	43.101.250	87,5	11.112.730	100	12.699.600	7	910.665	7,00	7,17	94,50	12.023.395	94,50	27,90	Kesbangpol	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,00	21.550.625	5	5.826.500	5	6.362.500	0	-	0,00	0,00	5,00	5.826.500	23,81	27,04	Kesbangpol	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja tersedia	16,00	21.550.625	4	5.286.230	4	6.337.100	0	-	0,00	0,00	4,00	5.286.230	25,00	24,53	Kesbangpol	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48,00	11.741.846.315	9	2.644.418.177	12	2.855.010.368	6	1.432.322.555	50,00	50,17	15,00	4.076.740.732	31,25	34,72	Kesbangpol	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92,00	10.883.178.903	21	2.422.873.177	16	2.625.815.368	16	1.324.262.555	100,00	50,43	37,00	3.747.135.732	40,22	34,43	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	858.667.413	12	221.545.000	12	229.195.000	6	108.060.000	50,00	47,15	18,00	329.605.000	150,00	38,39	Kesbangpol	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pembayaran jasa asuransi barang milik daerah.	100,00	94.822.750		6.453.625	100	13.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	6.453.625	0,00	6,81	Kesbangpol	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	94.822.750	0	6.453.625	50	13.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	6.453.625	0,00	6,81	Kesbangpol	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek	100,00	129.303.750		2.560.000	100	5.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	2.560.000	0,00	1,98	Kesbangpol	
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00	129.303.750	0	2.560.000	6	5.000.000	0	-		0,00	0,00	2.560.000	0,00	1,98	Kesbangpol	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi Umum	100,00	1.189.817.462	51	270.987.448	100	154.798.300	47	72.532.371	47,00	46,86	98,00	343.519.819	98,00	28,87	Kesbangpol	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28,00	31.443.224	3	6.350.000	7	6.925.000	0	-	0,00	0,00	3,00	6.350.000	10,71	20,20	Kesbangpol	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120,00	348.459.942	22	57.489.240	30	67.670.000	10	24.969.000	33,33	36,90	32,00	82.458.240	26,67	23,66	Kesbangpol	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32,00	144.163.768	5	23.430.835	8	14.443.300	4	7.747.690	50,00	53,64	9,00	31.178.525	28,13	21,63	Kesbangpol	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120,00	118.054.324	16	27.195.000	30	27.390.000	0	-	0,00	0,00	16,00	27.195.000	13,33	23,04	Kesbangpol	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	547.696.204	1	156.522.373	1	38.370.000	0,6	27.609.781	60,00	71,96	1,60	184.132.154	40,00	33,62	Kesbangpol	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	351.059.681	69	75.743.050	100	30.901.000	3	5.129.400	3,00	16,60	72,00	80.872.450	72,00	23,04	Kesbangpol	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	92.452.181	10	30.643.050	12	30.901.000	6	5.129.400	50,00	16,60	16,00	35.772.450	33,33	38,69	Kesbangpol	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100,00	823.582.995	50	115.903.600	100	101.400.000	21	52.450.000	21,00	51,73	71,00	168.353.600	71,00	20,44	Kesbangpol	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	540.963.789	4	81.975.600	6	93.890.000	4	51.230.000	66,67	54,56	8,00	133.205.600	33,33	24,62	Kesbangpol	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72,00	92.973.706	18	7.510.000	18	7.510.000	4	1.220.000	22,22	16,25	22,00	8.730.000	30,56	9,39	Kesbangpol	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	100,00	545.179.651	37,21	102.261.500	100	367.764.000	8,27	30.430.350	8,27	8,27	45,48	132.691.850	45,48	24,34	Kesbangpol	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Bela Negara, Jumlah Rapat FKUB dan FPK, Jumlah Sosialisasi Bahaya Paham Radikalisme	100,00	545.179.651	37,21	102.261.500	100	367.764.000	8,27	30.430.350	8,27	8,27	45,48	132.691.850	45,48	24,34	Kesbangpol	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	16,00	545.179.651	4	97.451.500	4	15.908.000	0	-	0,00	0,00	4,00	97.451.500	25,00	17,88	Kesbangpol	
					Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka					36	345.691.000	8	30.430.350								
					Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila					36	6.165.000	0	-								
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik	84,00	2.955.391.379	62,69	1.107.468.020	84	794.621.400	48,98	463.371.328	100,00	58,31	111,67	1.570.839.348	132,94	53,15	Kesbangpol	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Dan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Verifikasi Bantuan Parpol, Sosialisasi LPJ Bantuan Parpol	84,00	2.955.391.379	62,69	1.107.468.020	84	794.621.400	48,98	463.371.328	100,00	58,31	111,67	1.570.839.348	132,94	53,15	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1070,00	2.955.391.379	308	1.107.468.020	620	794.621.400	355	463.371.328	57,26	58,31	663,00	1.570.839.348	61,96	53,15	Kesbangpol	
					ROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Cakupan Ormas Sinergi	74,30	9.943.215.737	8,07	16.762.333.000	72,34	24.935.396.000	3,19	1.098.880.000	4,41	4,41	11,26	17.861.213.000	15,15	179,63	Kesbangpol	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	74,30	9.943.215.737	8,07	16.762.333.000	72,34	24.935.396.000	3,19	1.098.880.000	4,41	4,41	11,26	17.861.213.000	15,15	179,63	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	520,00	9.943.215.737	150	16.762.333.000	150	24.935.396.000	40	1.098.880.000	26,67	4,41	190,00	17.861.213.000	36,54	179,63	Kesbangpol	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kemitraan Ketahanan Masyarakat	3,00	1.037.881.034	2	142.193.610	3	56.236.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	142.193.610	66,67	13,70	Kesbangpol	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3,00	1.037.881.034	2	142.193.610	2	84.595.900	0,00	-	0,00	0,00	2,00	142.193.610	66,67	13,70	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200,00	432.795.386	50	47.505.590	50	54.596.000	0	-	0,00	0,00	50,00	47.505.590	25,00	10,98	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00	605.085.648	140	94.688.020	140	1.640.000	0	-	0,00	0,00	140,00	94.688.020	25,00	15,65	Kesbangpol	
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka Konflik	85,71	3.275.493.782	77,82	755.137.578	85	300.000.000	77,00	271.774.400	90,59	90,59	154,82	1.026.911.978	180,63	31,35	Kesbangpol	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi TIM RAD, TIM WASDIN dan FKDM	85,71	3.275.493.782	77,82	755.137.578	85	300.000.000	77,00	271.774.400	90,59	90,59	154,82	1.026.911.978	180,63	31,35	Kesbangpol	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	164,00	124.665.366	41	27.557.000	41	9.561.000	0	-	0,00	0,00	41,00	27.557.000	25,00	22,10	Kesbangpol	
					Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400,00	3.150.828.416	62	727.580.578	100	180.182.200	60	172.561.600	60,00	95,77	122,00	900.142.178	30,50	28,57	Kesbangpol	
					Pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12	110.256.800	9	99.212.800								
					KECAMATAN PRINGSEWU																Kec. Pringsewu	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	B	24.585.961.177	B	5148667575	B	5.813.424.496	B	2.592.195.377		44,59		7.740.862.952		31,48	Kec. Pringsewu	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	10,00	17.058.613	0	0	10	3.600.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pringsewu	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	5.689.365	0	0	10	1.200.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pringsewu	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	11.369.248	0	0	10	2.400.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pringsewu	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	56,00	22.249.303.413	12	4770802569	26	5.493.174.596	3	2.503.653.296	11,54	45,58	15,00	7.274.455.865	26,79	32,70	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43,00	19.897.082.865	41	4402602569	14	5.040.014.596	7	2.262.973.296	50,00	44,90	48,00	6.665.575.865	111,63	33,50	Kec. Pringsewu	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12,00	2.352.220.548	12	368200000	12	453.160.000	6	240.680.000	50,00	53,11	18,00	608.880.000	150,00	25,89	Kec. Pringsewu	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.379.478.996	3	195761125	12	189.282.500	3	62.833.500	25,00	33,20	6,00	258.594.625	12,50	18,75	Kec. Pringsewu	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,00	62.149.201	1	13605000	12	13.252.000	1	1.945.000	8,33	14,68	2,00	15.550.000	14,29	25,02	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	188.365.393	1	16550000	6	12.780.000	1	4.220.000	16,67	33,02	2,00	20.770.000	25,00	11,03	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	395.368.197	1	72121125	4	67.140.500	1	27.207.500	25,00	40,52	2,00	99.328.625	50,00	25,12	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	125.166.030	1	7349000	4	8.200.000	1	1.211.000	25,00	14,77	2,00	8.560.000	50,00	6,84	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	136,00	90.176.435	20	18960000	22	19.010.000	6	7.900.000	27,27	41,56	26,00	26.860.000	19,12	29,79	Kec. Pringsewu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	518.253.740	12	67176000	15	68.900.000	7	20.350.000	46,67	29,54	19,00	87.526.000	31,67	16,89	Kec. Pringsewu	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	20,00	592.642.188	5	102850000	55	32.500.000	2	-	3,64		7,00		35,00		Kec. Pringsewu	
					Pengadaan Peratalan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20,00	592.642.188	5	102850000	55	32.500.000	0	-	0,00		5,00		25,00		Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota serta tagihan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	48,00	56.893.650	12	33400461	12	44.897.400	3	12.008.581	25,00	26,75	15,00	45.409.042	31,25	79,81	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	56.893.650	12	33400461	12	44.897.400	6	12.008.581	50,00	26,75	18,00	45.409.042	37,50	79,81	Kec. Pringsewu	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	13,00	290.584.317	13	45853420	9	49.970.000	3	13.700.000	33,33	27,42	16,00	59.553.420	123,08	20,49	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13,00	282.050.270	12	44150000	5	47.370.000	5	13.700.000	100,00	28,92	17,00	57.850.000	130,77	20,51	Kec. Pringsewu	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00	8.534.048	1	1703420	4	2.600.000	0	-	0,00	0,00	1,00	1.703.420	7,69	19,96	Kec. Pringsewu	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	100,00	22.865.474.965	18	3644467790	100	3.770.284.900	13	1.269.849.160	13,00	33,68	31,00	4.914.316.950	31,00	21,49	Kec. Pringsewu	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kecamatan	40,00	3.547.710.221	10	319457790	10	439.140.900	2	162.349.160	20,00	36,97	12,00	481.806.950	30,00	13,58	Kec. Pringsewu	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40,00	94.822.750	10	12600000	10	13.816.000	10	8.825.000	100,00	63,88	20,00	21.425.000	50,00	22,59	Kec. Pringsewu	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40,00	3.452.887.471	10	306857790	10	425.324.900	4	153.524.160	40,00	36,10	14,00	460.381.950	35,00	13,33	Kec. Pringsewu	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	20,00	19.317.764.744	15	3325010000	5	3.331.144.000	5	1.107.500.000	100,00	33,25	20,00	4.432.510.000	100,00	22,95	Kec. Pringsewu	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20,00	28.446.825	5	9010000	5	15.144.000	0	-	0,00		5,00		25,00		Kec. Pringsewu	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20,00	8.296.990.625	10	1000000000	5	1.000.000.000	0	-	0,00	0,00	10,00	1.000.000.000	50,00	12,05	Kec. Pringsewu	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20,00	10.992.327.294	5	2316000000	5	2.316.000.000	5	1.107.500.000	100,00	47,82	10,00	3.423.500.000	50,00	31,14	Kec. Pringsewu	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka kriminalitas Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekan	90,00	1.252.252.942	53	240000000	90	246.125.000	4	115.000.000	4,44	46,72	57,00	355.000.000	63,33	28,35	Kec. Pringsewu	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	60,00	1.252.252.942	10	240000000	15	246.000.000	0	115.000.000	0,00	46,75	10,00	355.000.000	16,67	28,35	Kec. Pringsewu	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	60,00	1.252.252.942	10	240000000	15	246.000.000	6	115.000.000	40,00	46,75	16,00	355.000.000	26,67	28,35	Kec. Pringsewu	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	118.528.438	1	5660000	100	17.960.000	0	-	0,00		1,00		1,00		Kec. Pringsewu	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	1,00	118.528.438	250	5660000	1	17.960.000	0	-	0,00		250,00		#####		Kec. Pringsewu	
					Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250,00	118.528.438	250	5660000	1	17.960.000	0	-	0,00		250,00		100,00		Kec. Pringsewu	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	31.528.564	10	2450000	100	16.350.000	0	-	0,00		10,00		10,00		Kec. Pringsewu	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,00	31.528.564	10	2450000	10	16.350.000	0	-	0,00		10,00		25,00		Kec. Pringsewu	
				Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40,00	31.528.564	10	2450000	1	16.350.000	0	-	0,00		10,00		25,00		Kec. Pringsewu	
				KECAMATAN GADINGREJO																Kec. Gadingrejo	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	10.271.277.261			B	2.441.537.125		1.158.214.705		47,44	0,00	1.158.214.705		11,28	Kec. Gadingrejo	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100,00%	13.381.600			100,00%	3.109.700	0	875.750	0,00	28,16	0,00	875.750	0,00	6,54	Kec. Gadingrejo	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	4.423.481			2	1.026.400	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	8,00	4.421.111			2	1.025.750	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	4.537.008			2	1.057.550	2	875.750	100,00	82,81	2,00	875.750	25,00	19,30	Kec. Gadingrejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	8.963.555.939			100	2.200.647.275	49,54	1.090.193.064	49,54	49,54	49,54	1.090.193.064	4954,00	12,16	Kec. Gadingrejo	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	76,00	8.108.483.020			19	2.003.240.475	19	1.000.584.764	100,00	49,95	19,00	1.000.584.764	25,00	12,34	Kec. Gadingrejo	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	850.948.604			12	196.450.500	6	89.608.300	50,00	45,61	6,00	89.608.300	12,50	10,53	Kec. Gadingrejo	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	4.124.316			2	956.300	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Gadingrejo	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,00	1.498.838.670			100	-	0	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4,00	44.755.000			1	-	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Gadingrejo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	1,00	827.034.461			95	124.810.150	29,91	37.332.850	31,48	29,91	29,91	37.332.850	2991,00	4,51	Kec. Gadingrejo	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	19.471.334			1	4.518.750	2	1.122.500	200,00	24,84	2,00	1.122.500	50,00	5,76	Kec. Gadingrejo	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	147.664.883			1	10.500.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	385.714.190			1	69.657.500	2	22.622.250	200,00	32,48	2,00	22.622.250	50,00	5,87	Kec. Gadingrejo	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4,00	74.198.802			1	10.485.000	2	3.693.100	200,00	35,22	2,00	3.693.100	50,00	4,98	Kec. Gadingrejo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	144,00	34.136.190			144	13.320.000	72	5.730.000	50,00	43,02	72,00	5.730.000	50,00	16,79	Kec. Gadingrejo	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	92,00	165.849.063			23	16.328.900	0,09309	4.165.000	0,40	25,51	0,09	4.165.000	0,10	2,51	Kec. Gadingrejo	
					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	1,00	86.202.500			100	6.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					Pengadaan Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	16,00	86.202.500			1	6.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	128.098.424			100	41.600.000	16,02	6.663.041	16,02	16,02	16,02	6.663.041	1602,00	5,20	Kec. Gadingrejo	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	56.033.134			12	22.600.000	6	6.663.041	50,00	29,48	6,00	6.663.041	12,50	11,89	Kec. Gadingrejo	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,00	72.065.290			5	19.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	339.206.838			100	65.370.000	35,41	23.150.000	35,41	35,41	35,41	23.150.000	3541,00	6,82	Kec. Gadingrejo	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	16,00	311.234.126			4	49.510.000	3	15.350.000	75,00	31,00	3,00	15.350.000	18,75	4,93	Kec. Gadingrejo	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20,00	27.972.711			5	9.740.000	5	1.680.000	100,00	17,25	5,00	1.680.000	25,00	6,01	Kec. Gadingrejo	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4,00	42.239.225			1	6.120.000	0	6.120.000	0,00	100,00	0,00	6.120.000	0,00	14,49	Kec. Gadingrejo	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	83.142.311			90	25.805.000	0	12.640.000	100,00	48,98	0,00	12.640.000	0,00	15,20	Kec. Gadingrejo	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1,00	83.142.311			90	12.640.000	100	12.640.000	100,00	100,00	100,00	12.640.000	10000,00	15,20	Kec. Gadingrejo	
					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92,00	83.142.311			23	12.640.000	23	12.640.000	100,00	100,00	23,00	12.640.000	25,00	15,20	Kec. Gadingrejo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat					100	13.165.000										
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha Yang Dilaksanakan					25	6.582.500										
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan					7	6.582.500										
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	81.892.375			90	7.087.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	1,00	81.892.375			90	7.087.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,00	81.892.375			23	7.087.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	1,00	1.238.212.710			90	255.742.500	0	105.000.000	0,00	41,06	0,00	105.000.000	0,00	8,48	Kec. Gadingrejo	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,00	1.238.212.710			90	255.742.500	0	105.000.000	0,00	41,06	0,00	105.000.000	0,00	8,48	Kec. Gadingrejo	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	92,00	1.238.212.710			23	255.742.500	23	105.000.000	100,00	41,06	23,00	105.000.000	25,00	8,48	Kec. Gadingrejo	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,00	69.586.968			90	9.800.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Gadingrejo	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,00	69.586.968			90	9.800.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Gadingrejo	
					Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	232,00	69.586.968			58	9.800.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Gadingrejo	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	84.478.450				8.835.000	25	2.625.000		29,71	25,00	2.625.000	2500,00	3,11	Kec. Gadingrejo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	92,00	84.478.450			23	8.835.000	23	2.625.000	100,00	29,71	23,00	2.625.000	25,00	3,11	Kec. Gadingrejo	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23,00	84.478.450			23	8.835.000	23	2.625.000	100,00	29,71	23,00	2.625.000	100,00	3,11	Kec. Gadingrejo	
					KECAMATAN PAGELARAN																Kec. Pagelaran	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	B	2.698.766.593			B	1.979.298.639		476.542.383		24,08	0,00	476.542.383		17,66	Kec. Pagelaran	
					Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	B	3.183.469			10	2.887.500	10	2.887.500		100,00	10,00	2.887.500		90,70	Kec. Pagelaran	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	3.183.469			10	2.887.500	10	2.887.500	100,00	100,00	10,00	2.887.500	100,00	90,70	Kec. Pagelaran	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	2.341.880.067			95	1.704.328.689	23	413.818.923	24,21	24,28	23,00	413.818.923	2300,00	17,67	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	10,00	1.751.832.816			19	1.440.808.689	20	381.898.923	105,26	26,51	20,00	381.898.923	200,00	21,80	Kec. Pagelaran	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	587.008.485			12	260.520.000	6	31.920.000	50,00	12,25	6,00	31.920.000	50,00	5,44	Kec. Pagelaran	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	3.038.766			1	3.000.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,00	9.188.891			1	2.650.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1,00	9.188.891			1	2.650.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	0,95	202.496.974			100	165.112.450	200	36.735.700	200,00	22,25	200,00	36.735.700	#####	18,14	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1,00	13.122.258			1	3.545.000	2	1.370.000	200,00	38,65	2,00	1.370.000	200,00	10,44	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1,00	9.232.059			1	6.025.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1,00	100.543.204			1	87.859.650	2	22.975.700	200,00	26,15	2,00	22.975.700	200,00	22,85	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1,00	18.545.616			1	17.217.800	1	2.145.000	100,00	12,46	1,00	2.145.000	100,00	11,57	Kec. Pagelaran	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	237,00	12.912.149			20	15.815.000	11	6.045.000	55,00	38,22	11,00	6.045.000	4,64	46,82	Kec. Pagelaran	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	22,00	48.141.688			88	34.650.000	22	4.200.000	25,00	12,12	22,00	4.200.000	100,00	8,72	Kec. Pagelaran	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	0,95	40.516.875			100	27.900.000	30	8.450.000	30,00	30,29	30,00	8.450.000	3157,89	20,86	Kec. Pagelaran	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	23.152.500			53	9.900.000	1	3.750.000	1,89	37,88	1,00	3.750.000	100,00	16,20	Kec. Pagelaran	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2,00	17.364.375			53	18.000.000	1	4.700.000	1,89	26,11	1,00	4.700.000	50,00	27,07	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	11.460.488			95	15.800.000	52	2.440.260	54,74	15,44	52,00	2.440.260	5200,00	21,29	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00	11.460.488			1	15.800.000	3	2.440.260	300,00	15,44	3,00	2.440.260	25,00	21,29	Kec. Pagelaran	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,95	90.856.198			95	60.620.000	20	12.210.000	21,05	20,14	20,00	12.210.000	2105,26	13,44	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ang tersedia dan dibayarkan pajaknya	5,00	73.410.789			3	41.070.000	3	4.200.000	100,00	10,23	3,00	4.200.000	60,00	5,72	Kec. Pagelaran	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	3,00	1.910.081			3	2.450.000	3	4.800.000	100,00	195,92	3,00	4.800.000	100,00	251,30	Kec. Pagelaran	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15,00	9.168.390			15	7.920.000	5	3.210.000	33,33	40,53	5,00	3.210.000	33,33	35,01	Kec. Pagelaran	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3,00	6.366.938			3	9.180.000		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	16.616.549			1	11.490.000	100	11.490.000	10000,00	100,00	100,00	11.490.000	10000,00	69,15	Kec. Pagelaran	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1,00	16.616.549			65	13.620.000	100	11.490.000	153,85	84,36	100,00	11.490.000	10000,00	69,15	Kec. Pagelaran	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1,00	16.616.549			22	11.490.000	22	11.490.000	100,00	100,00	22,00	11.490.000	2200,00	69,15	Kec. Pagelaran	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	14.817.600			85	4.980.000	38	1.920.000	44,71	38,55	38,00	1.920.000	3800,00	12,96	Kec. Pagelaran	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	1,00	14.817.600			85	4.980.000	38	1.920.000	44,71	38,55	38,00	1.920.000	3800,00	12,96	Kec. Pagelaran	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	22,00	14.817.600			22	4.980.000	22	1.920.000	100,00	38,55	22,00	1.920.000	100,00	12,96	Kec. Pagelaran	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekan	1,00	291.427.463			80	213.000.000	50	106.000.000	62,50	49,77	50,00	106.000.000	5000,00	36,37	Kec. Pagelaran	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,00	291.427.463			80	213.000.000	50	106.000.000	62,50	49,77	50,00	106.000.000	5000,00	36,37	Kec. Pagelaran	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksanadi Wilayah Kecamatan	22,00	291.427.463			22	213.000.000	44	106.000.000	200,00	49,77	44,00	106.000.000	200,00	36,37	Kec. Pagelaran	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,00	22.895.507			80	10.620.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,00	22.895.507			80	10.620.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kehadiran peserta Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,00	22.895.507			1	10.620.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	12.386.588			1	5.300.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1,00	12.386.588			100	5.300.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pagelaran	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asert Desa	22,00	12.386.588			22	5.300.000	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Kec. Pagelaran	
					KECAMATAN BANYUMAS																Kec. Banyumas	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	8.829.846.000			BB Skala	1.870.478.044	36	829.004.698		44,32	36,00	829.004.698		9,39	Kec. Banyumas	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100	36.514.000			100	5.990.000	3	2.137.400	3,00	35,68	3,00	2.137.400	3,00	5,85	Kec. Banyumas	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	21.383.000			3	3.140.000	3	2.137.400	100,00	68,07	3,00	2.137.400	25,00	10,00	Kec. Banyumas	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	15.131.000			3	2.850.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Banyumas	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.461.514.000			100	1.632.261.144	22	735.650.698	22,00	45,07	22,00	735.650.698	22,00	9,86	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	76,00	6.502.770.000			19	1.414.787.044	19	630.843.598	100,00	44,59	19,00	630.843.598	25,00	9,70	Kec. Banyumas	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	944.308.000			36	213.958.100	6	104.807.100	16,67	48,98	6,00	104.807.100	12,50	11,10	Kec. Banyumas	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00	14.436.000			3	3.516.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tigas Pokok dan Fungsi	Prosentase Administrasi Kepegawain Perangkat daerah	100	32.396.000			100	7.840.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4,00	32.396.000			1	7.840.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	717.473.000			100	105.737.000	38	63.762.100	38,00	60,30	38,00	63.762.100	38,00	8,89	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	16.219.000			1	3.951.000	0	3.200.000	0,00	80,99	0,00	3.200.000	0,00	19,73	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	55.355.000			1	10.551.500	1	3.526.000	100,00	33,42	1,00	3.526.000	25,00	6,37	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	405.703.000			1	57.704.000	1	39.161.100	100,00	67,87	1,00	39.161.100	25,00	9,65	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4,00	83.526.000			1	6.933.000	1	4.890.000	100,00	70,53	1,00	4.890.000	25,00	5,85	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28,00	35.274.000			7	9.240.000	7	2.080.000	100,00	22,51	7,00	2.080.000	25,00	5,90	Kec. Banyumas	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	320,00	121.396.000			198	20.690.000	35	10.905.000	17,68	52,71	35,00	10.905.000	10,94	8,98	Kec. Banyumas	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	100	67.002.000			100	29.454.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	8,00	56.893.000			5	15.120.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	12,00	10.109.000			3	14.334.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	70.547.000			100	23.797.000	0	2.512.500	0,00	10,56	0,00	2.512.500	0,00	3,56	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	34.989.000			12	15.475.000	3	2.512.500	25,00	16,24	3,00	2.512.500	6,25	7,18	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	35.558.000			6	8.322.000	6	-	100,00		6,00		50,00		Kec. Banyumas	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	444.400.000			100	65.398.900	12	24.942.000	12,00	38,14	12,00	24.942.000	12,00	5,61	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	12,00	369.966.000			4	57.100.000	4	23.522.000	100,00	41,19	4,00	23.522.000	33,33	6,36	Kec. Banyumas	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Yang terbayarkan Pajaknya	4,00	7.111.000			1	2.072.900	1	-	100,00		1,00		25,00		Kec. Banyumas	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40,00	34.136.000			10	6.226.000	2	1.420.000	20,00	22,81	2,00	1.420.000	5,00	4,16	Kec. Banyumas	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8,00	33.187.000			0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	41.194.304			100	5.450.000	0	3.500.000	0,00	64,22	0,00	3.500.000	0,00	8,50	Kec. Banyumas	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	41.194.304			100	5.450.000	0	3.500.000	0,00	64,22	0,00	3.500.000	0,00	8,50	Kec. Banyumas	
					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44,00	41.194.304			11	5.450.000	3	3.500.000	27,27	64,22	3,00	3.500.000	6,82	8,50	Kec. Banyumas	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	64.641.800			100	12.093.000	11	12.013.000	11,00	99,34	11,00	12.013.000	1100,00	18,58	Kec. Banyumas	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	64.641.800			100	12.093.000	11	12.013.000	11,00	99,34	11,00	12.013.000	11,00	18,58	Kec. Banyumas	
				Peningkatan Partisipi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80,00	64.641.800			11	12.093.000	11	12.013.000	100,00	99,34	11,00	12.013.000	13,75	18,58	Kec. Banyumas	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekan	1,00	789.094.000			100	140.077.000	33	46.000.000	33,00	32,84	33,00	46.000.000	3300,00	5,83	Kec. Banyumas	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	789.094.000			100	140.077.000	33	46.000.000	33,00	32,84	33,00	46.000.000	33,00	5,83	Kec. Banyumas	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	80,00	789.094.000			80	140.077.000	35	46.000.000	43,75	32,84	35,00	46.000.000	43,75	5,83	Kec. Banyumas	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,00	40.767.000			100	26.237.000	8,57568	2.250.000	8,58	8,58	8,58	2.250.000	857,57	5,52	Kec. Banyumas	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	40.767.000			100	26.237.000	0	2.250.000	0,00	8,58	0,00	2.250.000	0,00	5,52	Kec. Banyumas	
				Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	175,00	40.767.000			25	26.237.000	10	2.250.000	40,00	8,58	10,00	2.250.000	5,71	5,52	Kec. Banyumas	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	39.211.000			100	7.650.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100	39.211.000			100	7.650.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44,00	39.211.000			11	7.650.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas	
				KECAMATAN ADILUWIH																Kec. Adiluwih	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB	12.295.391.467			BB	2.154.598.481		1.045.166.038		48,51	0,00	1.045.166.038	8,50		Kec. Adiluwih	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,00	17.273.123			8	3.610.500	8	3.523.600	100,00	97,59	8,00	3.523.600	25,00	20,40	Kec. Adiluwih	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	8.841.010			4	1.848.000	4	1.761.100	100,00	95,30	4,00	1.761.100	25,00	19,92	Kec. Adiluwih	
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	8.432.113			4	1.762.500	4	1.762.500	100,00	100,00	4,00	1.762.500	25,00	20,90	Kec. Adiluwih	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12,00	9.688.545.146			12	1.914.621.481	6	944.030.608	50,00	49,31	6,00	944.030.608	50,00	9,74	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	8.462.739.110			14	1.697.102.481	6	828.030.608	42,86	48,79	6,00	828.030.608	50,00	9,78	Kec. Adiluwih	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,00	1.218.346.434			5	215.960.000	3	116.000.000	60,00	53,71	3,00	116.000.000	13,64	9,52	Kec. Adiluwih	
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,00	7.459.602			4	1.559.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	1168,00	740.172.045			209	152.487.200	92	63.291.830	44,02	41,51	92,00	63.291.830	7,88	8,55	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32,00	28.158.616			12	5.885.500	12	5.885.500	100,00	100,00	12,00	5.885.500	37,50	20,90	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	91.800.000			5	13.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16,00	368.808.258			6	78.708.000	2	30.754.000	33,33	39,07	2,00	30.754.000	12,50	8,34	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24,00	66.567.280			13	14.363.700	7	7.923.830	53,85	55,17	7,00	7.923.830	29,17	11,90	Kec. Adiluwih	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48,00	30.943.535			13	15.600.000	6	7.800.000	46,15	50,00	6,00	7.800.000	12,50	25,21	Kec. Adiluwih	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1032,00	153.894.356			160	24.930.000	65	10.928.500	40,63	43,84	65,00	10.928.500	6,30	7,10	Kec. Adiluwih	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	8,00	66.307.576			4	7.100.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	33.153.788			2	3.500.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	33.153.788			2	3.600.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	12,00	49.730.681			12	13.499.300	6	6.700.000	50,00	49,63	6,00	6.700.000	50,00	13,47	Kec. Adiluwih	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	49.730.681			12	13.499.300	6	6.700.000	50,00	49,63	6,00	6.700.000	50,00	13,47	Kec. Adiluwih	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	80,00	457.245.986			18	63.280.000	10	27.620.000	55,56	43,65	10,00	27.620.000	12,50	6,04	Kec. Adiluwih	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16,00	419.671.693			4	3.700.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	11.603.826			4	47.060.000	2	20.600.000	50,00	43,77	2,00	20.600.000	12,50	177,53	Kec. Adiluwih	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	20.444.836			8	7.020.000	8	7.020.000	100,00	100,00	8,00	7.020.000	20,00	34,34	Kec. Adiluwih	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	5.525.631			2	5.500.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Tingkat Pelayanan Publik	56,00	29.047.500			4	10.166.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56,00	29.047.500			4	10.166.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56,00	29.047.500			4	10.166.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	14,00	62.163.352			4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	4,00	11.564.000	28,57	18,60	Kec. Adiluwih	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah tingkat Kecamatan	14,00	62.163.352			4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	4,00	11.564.000	28,57	18,60	Kec. Adiluwih	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilaya Kecamatan	14,00	62.163.352			4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	4,00	11.564.000	28,57	18,60	Kec. Adiluwih	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka kriminalitas	52,00	961.459.838			14	162.000.000	6	81.000.000	42,86	50,00	6,00	81.000.000	11,54	8,42	Kec. Adiluwih	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52,00	961.459.838			14	162.000.000	6	81.000.000	42,86	50,00	6,00	81.000.000	11,54	8,42	Kec. Adiluwih	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52,00	961.459.838			14	162.000.000	6	81.000.000	42,86	50,00	6,00	81.000.000	11,54	8,42	Kec. Adiluwih	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	4,00	171.294.569			21	15.094.500	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4,00	171.294.569			21	15.094.500	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4,00	171.294.569			21	15.094.500	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Adiluwih	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan kantor pemerintahan kelurahan/pekon yang baik.	56,00	81.199.151			4	11.904.500	1	1.089.500	25,00	9,15	1,00	1.089.500	1,79	1,34	Kec. Adiluwih	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan	56,00	81.199.151			4	11.904.500	1	1.089.500	25,00	9,15	1,00	1.089.500	1,79	1,34	Kec. Adiluwih	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	56,00	81.199.151			4	11.904.500	1	1.089.500	25,00	9,15	1,00	1.089.500	1,79	1,34	Kec. Adiluwih	
					KECAMATAN AMBARAWA																Kec. Ambarawa	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.619.526.393		714.126.681		44,09	0,00	714.126.681			Kec. Ambarawa	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	1.349.412.793	64	647.358.789	64,00	47,97	64,00	647.358.789			Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14,00				13	1.176.792.793	13	567.508.789	100,00	48,23	13,00	567.508.789	92,86		Kec. Ambarawa	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00				12	172.620.000	12	79.850.000	100,00	46,26	12,00	79.850.000	100,00		Kec. Ambarawa	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	220,00				100	145.438.200	63	38.045.000	63,00	26,16	63,00	38.045.000	28,64		Kec. Ambarawa	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11,00				1	7.350.000	3	3.287.000	300,00	44,72	3,00	3.287.000	27,27		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5,00				1	12.290.000	3	-	300,00	0,00	3,00	-	60,00		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	56,00				1	78.877.000	1	22.848.000	100,00	28,97	1,00	22.848.000	1,79		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12,00				1	17.121.200	1	4.880.000	100,00	28,50	1,00	4.880.000	8,33		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12,00				6	9.660.000	30	4.830.000	500,00	50,00	30,00	4.830.000	250,00		Kec. Ambarawa	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	124,00				12	20.140.000	24	2.200.000	200,00	10,92	24,00	2.200.000	19,35		Kec. Ambarawa	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	17,00				100	24.290.000	9	4.950.000	9,00	20,38	9,00	4.950.000	52,94		Kec. Ambarawa	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	11,00				4	9.200.000	6	-	150,00	0,00	6,00	-	54,55		Kec. Ambarawa	
					Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	11,00				2	15.090.000	0	4.950.000	0,00	32,80	0,00	4.950.000	0,00		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,00				100	23.665.400	24	4.744.892	24,00	20,05	24,00	4.744.892	133,33		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00				12	16.885.400	12	2.714.892	100,00	16,08	12,00	2.714.892	100,00		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,00				12	6.780.000	12	2.030.000	100,00	29,94	12,00	2.030.000	200,00		Kec. Ambarawa	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,00				100	71.000.000	24	19.028.000	24,00	26,80	24,00	19.028.000	100,00		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	12,00				6	62.120.000	6	19.028.000	100,00	30,63	6,00	19.028.000	50,00		Kec. Ambarawa	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Yang terbayarkan Pajaknya	4,00				6	3.200.000	1	-	16,67	0,00	1,00	-	25,00		Kec. Ambarawa	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4,00				8	5.680.000	5	-	62,50	0,00	5,00	-	125,00		Kec. Ambarawa	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2,00				2	-	2	-	100,00		2,00	-	100,00		Kec. Ambarawa	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2,00				0	-			0,00	0,00	0,00	-	# REF!	# REF!	Kec. Ambarawa	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4,00				100	11.910.000	0	10.920.000	0,00	91,69	0,00	10.920.000	0,00		Kec. Ambarawa	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4,00				100	11.910.000	1	10.920.000	11,11	91,69	1,00	10.920.000	0,00		Kec. Ambarawa	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,00				9	11.910.000	1	10.920.000	1,00	168,52	1,00	10.920.000	25,00		Kec. Ambarawa	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	3,00				100	6.480.000	9	2.100.000	9,00	32,41	9,00	2.100.000	33,33		Kec. Ambarawa	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3,00				100	6.480.000	9	2100000					300,00		Kec. Ambarawa	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,00				1	6.480.000	9	2.100.000	900,00	32,41	9,00	2.100.000	300,00		Kec. Ambarawa	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	13,00				100	179.371.000	90	70.000.000	90,00	39,03	90,00	70.000.000	692,31		Kec. Ambarawa	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18,00				100	179.371.000	90	70.000.000	90,00	39,03	90,00	70.000.000	500,00		Kec. Ambarawa	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	12,00				1	174.600.000	90	70.000.000	9000,00	40,09	90,00	70.000.000	750,00		Kec. Ambarawa	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	6,00				1	4.771.000	1	-	100,00	0,00	1,00	-	16,67		Kec. Ambarawa	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100	22.380.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-			Kec. Ambarawa	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100	22.380.000	1	-							Kec. Ambarawa	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama Ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regionaldan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					1	22.380.000	1	-	100,00	0,00	1,00	-			Kec. Ambarawa	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9				100	8.730.000	9	-	9,00	0,00	9,00	-	100,00		Kec. Ambarawa	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	9				100	8.730.000	9	-	9,00	0,00	9,00	-	100,00		Kec. Ambarawa	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9				9	8.730.000	9	-	100,00	0,00	9,00	-	100,00		Kec. Ambarawa	
					KECAMATAN PARDASUKA																	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	9.428.637.000			BB Skala	1.978.987.297		765.637.494		38,69	0,00	765.637.494		8,12	Kec. Pardasuka	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100	10.453.000			100	3.231.900	0	765.637.494	0,00	#####	0,00	765.637.494	0,00	7324,57	Kec. Pardasuka	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	3.342.000			4	1.731.900	0	750.000	0,00	43,31	0,00	750.000	0,00	22,44	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	7.111.000			4	1.500.000	0	500.000	0,00	33,33	0,00	500.000	0,00	7,03	Kec. Pardasuka	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.903.678.000			100	1.752.150.498	42	720.114.254	42,00	41,10	42,00	720.114.254	42,00	9,11	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	56	6.945.828.000			14	1.528.318.647	0	651.994.254	0,00	42,66	0,00	651.994.254	0,00	9,39	Kec. Pardasuka	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	953.110.000			12	188.720.000	0	68.120.000	0,00	36,10	0,00	68.120.000	0,00	7,15	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	4.740.000			4	1.155.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pardasuka	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	47.411.000			100	4.962.200	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4	47.411.000			1	4.962.200	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	996.642.000			100	157.999.550	14	21.523.740	14,00	13,62	14,00	21.523.740	14,00	2,16	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	21.857.000			1	5.325.000	0	1.120.000	0,00	21,03	0,00	1.120.000	0,00	5,12	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	284.551.000			1	34.045.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	317.159.000			1	50.703.750	0	9.103.740	0,00	17,95	0,00	9.103.740	0,00	2,87	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	110.416.000			1	30.975.800	0	5.590.000	0,00	18,05	0,00	5.590.000	0,00	5,06	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	40	56.894.000			10	12.000.000	0	3.000.000	0,00	25,00	0,00	3.000.000	0,00	5,27	Kec. Pardasuka	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	420	205.765.000			292	24.950.000	0	2.710.000	0,00	10,86	0,00	2.710.000	0,00	1,32	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	133.644.000			100	31.340.000	37	11.519.500	37,00	36,76	37,00	11.519.500	37,00	8,62	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	48.303.000			12	10.550.000	0	5.309.500	0,00	50,33	0,00	5.309.500	0,00	10,99	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	85.341.000			12	20.790.000	0	6.210.000	0,00	29,87	0,00	6.210.000	0,00	7,28	Kec. Pardasuka	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	336.809.000			100	63.260.000	18	11.230.000	18,00	17,75	18,00	11.230.000	18,00	3,33	Kec. Pardasuka	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Yang terbayarkan Pajaknya	12	289.446.000			4	51.785.000	6	11.230.000	150,00	21,69	6,00	11.230.000	50,00	3,88	Kec. Pardasuka	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12	47.363.000			3	11.475.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Pardasuka	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	107.454.000			100	12.000.000	0	6.210.000	0,00	51,75	0,00	6.210.000	100,00	5,78	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	107.454.000			13	12.000.000	51,75	6.210.000	398,08	51,75	51,75	6.210.000	51,75	5,78	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	107.454.000			13	12.000.000	0	6.210.000	0,00	51,75	0,00	6.210.000	0,00	5,78	Kec. Pardasuka	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	62.625.000			100	16.782.000	33	5.500.000	33,00	32,77	33,00	5.500.000	100,00	8,78	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	62.625.000			13	16.782.000	13	5.500.000	100,00	32,77	13,00	5.500.000	13,00	8,78	Kec. Pardasuka	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	62.625.000			13	16.782.000	0	5.500.000	0,00	32,77	0,00	5.500.000	0,00	8,78	Kec. Pardasuka	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekan	1	957.688.000			100	222.000.000	32	72.000.000	32,00	32,43	32,00	72.000.000	100,00	7,52	Kec. Pardasuka	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	957.688.000			12	222.000.000	0	72.000.000	0,00	32,43	0,00	72.000.000	0,00	7,52	Kec. Pardasuka	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	52	957.688.000			12	222.000.000	0	72.000.000	0,00	32,43	0,00	72.000.000	0,00	7,52	Kec. Pardasuka	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	195.113.000			100	23.740.000	0	-	0,00		0,00		62,95		Kec. Pardasuka	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	195.113.000			1	23.740.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	
					Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4	195.113.000			1	23.740.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	87.496.000			100	8.949.900	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100	87.496.000			13	8.949.900	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44	87.496.000			13	8.949.900	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pardasuka	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					KECAMATAN SUKOHARJO																Kec. Sukoharjo	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip	BB	9.602.927.174			BB	1.854.534.693		834.420.145		44,99	0,00	834.420.145		8,69	Kec. Sukoharjo	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	24	18.631.564			5	3.625.800	5	2.173.000	100,00	59,93	5,00	2.173.000	20,83	11,66	Kec. Sukoharjo	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	7.272.898			3	1.452.800	3	-	100,00	0,00	3,00	-	25,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	11.358.666			2	2.173.000	2	2.173.000	100,00	100,00	2,00	2.173.000	16,67	19,13	Kec. Sukoharjo	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	8.473.672.516			12	1.557.796.693	6	718.667.095	50,00	46,13	6,00	718.667.095	12,50	8,48	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	7.530.444.181			12	1.349.684.693	24	612.225.095	200,00	45,36	24,00	612.225.095	42,86	8,13	Kec. Sukoharjo	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	24	935.467.847			6	206.720.000	2	105.200.000	33,33	50,89	2,00	105.200.000	8,33	11,25	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	7.760.488			4	1.392.000	4	1.242.000	100,00	89,22	4,00	1.242.000	16,67	16,00	Kec. Sukoharjo	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	603.132.329			12	144.603.250	6	48.079.000	50,00	33,25	6,00	48.079.000	12,50	7,97	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	41.290.567			1	7.863.000	2	2.690.000	200,00	34,21	2,00	2.690.000	5,56	6,51	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	471.500.793			3	85.585.750	6	30.609.000	200,00	35,76	6,00	30.609.000	50,00	6,49	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	50.360.718			1	11.656.500	2	1.770.000	200,00	15,18	2,00	1.770.000	5,00	3,51	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	39.980.251			10	12.000.000	2	6.000.000	20,00	50,00	2,00	6.000.000	4,17	15,01	Kec. Sukoharjo	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-				4	27.498.000	4	7.010.000	100,00	25,49	4,00	7.010.000			Kec. Sukoharjo	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12	31.544.354			3	56.300.000	3	39.155.000	100,00	69,55	3,00	39.155.000	25,00	124,13	Kec. Sukoharjo	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	31.544.354			3	56.300.000	3	39.155.000	100,00	69,55	3,00	39.155.000	25,00	124,13	Kec. Sukoharjo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDP s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48	124.824.071			8	35.222.700	6	5.393.250	75,00	15,31	6,00	5.393.250	12,50	4,32	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	76.486.587			2	13.272.700	6	5.939.250	300,00	44,75	6,00	5.939.250	12,50	7,77	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	48.337.484			6	21.950.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secar Rutin	28	351.122.340			7	56.986.250	3	19.500.000	42,86	34,22	3,00	19.500.000	10,71	5,55	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	296.558.152			2	41.070.000	6	19.250.000	300,00	46,87	6,00	19.250.000	75,00	6,49	Kec. Sukoharjo	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	6.874.650			3	2.250.000	3	250.000	100,00	11,11	3,00	250.000	25,00	3,64	Kec. Sukoharjo	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	47.689.538			2	13.666.250	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IKM)	98	72.521.444			98	10.100.000	26,1386	2.640.000	26,78	26,14	26,14	2.640.000	26,67	3,64	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase sasaran Koordinasi Kegiatan Musrenbang	4	72.521.444			1	10.100.000	2	2.640.000	200,00	26,14	2,00	2.640.000	50,00	3,64	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	55.642.995			1	10.100.000	2	2.640.000	200,00	26,14	2,00	2.640.000	50,00	4,74	Kec. Sukoharjo	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	16.878.449			0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	63.921.019			100	11.416.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4	63.921.019			2	11.416.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	63.921.019			2	11.416.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	943.012.249			100	180.000.000	50	90.000.000	50,00	50,00	50,00	90.000.000	50,00	9,54	Kec. Sukoharjo	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	1120	943.012.249			2	180.000.000	4	90.000.000	200,00	50,00	4,00	90.000.000	0,36	9,54	Kec. Sukoharjo	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	943.012.249			2	180.000.000	4	90.000.000	200,00	50,00	4,00	90.000.000	22,22	9,54	Kec. Sukoharjo	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	98	158.510.827			100	16.134.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Sasaran Kegiatan MTQ dan FKUB	10	158.510.827			50	16.134.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	130	158.510.827			50	16.134.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Pembinaan Kepada Aparatur Pemerintahan Kecamatan	98	80.889.188			100	4.800.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Realisasi ADD	12	80.889.188			2	4.800.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	80.889.188			2	4.800.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo	
					KECAMATAN PAGELARAN UTARA																Kec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	2.216.565.832			B	1.587.702.690		764.616.536		48,16	0,00	764.616.536		34,50	ec. Pagelaran Utara	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	1,00	3.980.609			100	2.763.000	36	1.005.000	36,00	36,37	36,00	1.005.000	3600,00	25,25	ec. Pagelaran Utara	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	2.037.420			4	1.005.000	4	1.005.000	100,00	100,00	4,00	1.005.000	100,00	49,33	ec. Pagelaran Utara	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	1.943.189			4	1.758.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	1.879.191.879			100	1.336.549.990	51	682.477.836	51,00	51,06	51,00	682.477.836	5100,00	36,32	ec. Pagelaran Utara	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangggjawab		Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	154,00	1.460.871.351			154	1.119.744.990	70	574.377.836	45,45	51,30	70,00	574.377.836	45,45	39,32	ec. Pagelaran Utara		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	416.602.728			212	215.030.000	140	108.100.000	66,04	50,27	140,00	108.100.000	60,87	25,95	ec. Pagelaran Utara		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00	1.717.800			5	1.775.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,00	8.373.102			100	2.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1,00	8.373.102			1	2.000.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	1,00	206.411.835			95	146.218.600	38%	55.753.700	0,40	38,13	0,38	55.753.700	38,00	27,01	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1,00	15.662.666			1	8.076.000	1	5.811.200	100,00	71,96	1,00	5.811.200	100,00	37,10	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1,00	18.438.651			1	13.500.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1,00	102.612.926			1	84.504.000	1	32.287.500	100,00	38,21	1,00	32.287.500	100,00	31,47	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1,00	16.979.349			1	14.162.600	1	6.230.000	100,00	43,99	1,00	6.230.000	100,00	36,69	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10,00	14.516.618			10	11.400.000	1	4.750.000	10,00	41,67	1,00	4.750.000	10,00	32,72	ec. Pagelaran Utara		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	92,00	38.201.625			154	14.576.000	1	6.675.000	0,65	45,79	1,00	6.675.000	1,09	17,47	ec. Pagelaran Utara		
					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	1,00	13.491.541			100	17.900.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara		
					Pengadaan Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1,00	13.491.541			1	17.900.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	23.874.743			100	26.740.100	0	8.430.000	0,00	31,53	0,00	8.430.000	0,00	35,31	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00	12.732.602			12	19.800.100	5	6.600.000	41,67	33,33	5,00	6.600.000	41,67	51,84	ec. Pagelaran Utara		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	11.142.141			12	6.940.000	1	1.830.000	8,33	26,37	1,00	1.830.000	8,33	16,42	ec. Pagelaran Utara		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	81.242.123			100	55.531.000	31	16.950.000	31,00	30,52	31,00	16.950.000	3100,00	20,86	ec. Pagelaran Utara	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perhitungannya	4,00	79.077.364			4	44.770.000	2	16.950.000	50,00	37,86	2,00	16.950.000	50,00	21,43	ec. Pagelaran Utara	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4,00	2.164.759			4	3.900.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2,00	12.706.115			4	6.861.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	20.374.200			90	15.695.000	97	15.185.000	107,78	96,75	97,00	15.185.000	9700,00	74,53	ec. Pagelaran Utara	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1,00	20.374.200			90	15.695.000	97	15.185.000	107,78	96,75	97,00	15.185.000	9700,00	74,53	ec. Pagelaran Utara	
					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,00	20.374.200			10	15.695.000	10	15.185.000	100,00	96,75	10,00	15.185.000	100,00	74,53	ec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	14.817.600			90	14.025.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	1,00	14.817.600			90	14.025.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,00	14.817.600			10	14.025.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	ec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekan	1,00	214.241.080			90	153.000.000	43	66.000.000	47,78	43,14	43,00	66.000.000	4300,00	30,81	ec. Pagelaran Utara	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,00	214.241.080			90	153.000.000	6	66.000.000	6,67	43,14	6,00	66.000.000	600,00	30,81	ec. Pagelaran Utara	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	10,00	214.241.080			12	153.000.000	6	66.000.000	50,00	43,14	6,00	66.000.000	60,00	30,81	ec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,00	25.467.750			90	5.050.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penangngjawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	1,00	25.467.750			90	5.050.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara	
					Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	85,00	25.467.750			275	5.050.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	12.351.859			100	6.772.000		-							Kec. Pagelaran Utara	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	92,00	12.351.859			23	6.772.000	0	-	100,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	10,00	12.351.859			10	6.772.000	0	-	0,00		0,00		0,00		Kec. Pagelaran Utara	

2.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat 6 (enam) bidang pelayanan dasar yang wajib memiliki SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang sosial serta bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pada dasarnya rencana pencapaian SPM sebagian besar telah tergambar dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dalam bidang pendidikan misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebagai pengampu SPM bidang pendidikan dasar telah memasukkan rencana pencapaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Adapun Kinerja terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib, sebagai berikut:

A. SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan diatur di dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapaun Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2. 51 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		20.505	10.096	10.409	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	71,67	28,33	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	43,04	56,96	
	• Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	68,56	31,44	
	• Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0,5	99,5	
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	100	
	• Indeks distribusi guru	%	100	0,21	99,79	
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	100	31,5	68,5	
	• Proporsi PTK penggerak	%	100	0,05	99,95	
	• Pengalaman pelatihan guru	%	100	0,33	99,67	
2	Pendidikan Dasar					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		74.029	69.337	4.692	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					
	Sekolah Dasar (SD)					
	• Angka partisipasi kasar	%	100	91,33	8,67	
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	99,99	0,01	
	• Angka partisipasi murni	%	100	84,77	15,23	
	• Kemampuan literasi	Nilai	100	67,94	32,06	
	• Kemampuan numerasi	Nilai	100	48,06	51,94	
	• Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	3,14	96,86	
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	1,63	9837	
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67,88	32,12	
	• Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	68,29	31,71	
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	100	30,5	69,5	
	• Indeks distribusi guru	%	100	0,41	99,59	
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91,85	8,15	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Proporsi PTK penggerak	%	100	0,06	99,94	
	• Pengalaman pelatihan guru	%	100	76,9	23,1	
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	• Angka partisipasi kasar	%	100	107,44	0	
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	96,53	3,47	
	• Angka partisipasi murni	%	100	80,6	19,4	
	• Kemampuan literasi	Nilai	100	64,25	35,75	
	• Kemampuan numerasi	Nilai	100	39,37	60,63	
	• Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	2,71	97,29	
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	1,19	98,81	
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	100	65,1	34,9	
	• Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	65,74	34,26	
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	100	26,5	73,5	
	• Indeks distribusi guru	%	100	0,35	99,65	
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	100	88,15	11,85	
	• Proporsi PTK penggerak	%	100	0,18	99,82	
	• Pengalaman pelatihan guru	%	100	54	46	
3	Pendidikan Kesenjangan					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		1.000	921	79	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					
	• Angka partisipasi kasar	%	100	7,15	92,85	
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	67,94	32,06	
	• Angka partisipasi murni	%	100	79,09	20,91	
	• Kemampuan literasi	Nilai	100	63,33	36,67	
	• Kemampuan numerasi	Nilai	100	56,67	43,33	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0	0	0	
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	100	56,63	43,37	
	• Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	63,03	36,97	
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	
	• Indeks distribusi guru	%	0	0	0	
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	
	• Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	
	• Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	

Dari paparan tabel diatas ada indikator yang menjadi urusan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018, namun terdapat beberapa indikator yang belum tercapai 100% sebagaimana yang telah di tetapkan hingga tahun 2023. Adapun indikator tersebut antara lain:

- a. Angka partisipasi kasar
- b. Angka partisipasi sekolah
- c. Angka partisipasi murni
- d. Kemampuan literasi
- e. Kemampuan numerasi
- f. Perbedaan Skor Literasi
- g. Perbedaan Skor numerasi
- h. Indeks iklim keamanan
- i. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
- j. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
- k. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV
- l. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD
- m. Kecukupan formasi guru ASN

- n. Indeks distribusi guru
- o. Proporsi PTK bersertifikat
- p. Proporsi PTK penggerak
- q. Pengalaman pelatihan guru

Faktor yang mempengaruhi/menghambat optimalisasi pelaksanaan SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Pringsewu antara lain adalah :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah salah satu faktor yang berasal dari dalam lingkungan SKPD pelaksana SPM yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten Pringsewu ini adalah :

- a. Keterbatasannya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor.
- c. belum terpenuhi sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang yang sesuai dengan standar nasional pendidikan khususnya SD.
- d. tidak terakomodirnya program/kegiatan penerapan SPM dalam proses perencanaan ataupun penganggaran.
- e. Keterbatasannya SDM perencana SPM.
- f. Terbatasnya alokasi anggaran.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah permasalahan dari luar SKPD yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun adalah:

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang kegiatan pendidikan luar biasa terutama bagi anak-anak yang memiliki kelainan khusus dari anak-anak normal lainnya serta adanya kondisi masyarakat tertentu yang tidak mendukung proses/kegiatan penerapan SPM.
- b. Tidak tersinkronisasi antara data pendukung yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu dengan data Disdukcapil dan Kemenag Kab. Pringsewu sehingga penghitungan pencapaian SPM kurang maksimal.

B. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Adapun Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyedia Mutu Layanan Dasar			Indeks Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6980	6308	90,4	100%	99,2%	99	92,14
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6662	6059	90,9	100%	100%	100	92,76
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6345	6032	95,1	100%	100%	100	96,05
4	Pelayanan Kesehatan Balita	30728	28840	93,9	100%	100%	100	95,08
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	61135	59918	98,0	100%	100%	100	98,41
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	260795	151336	58,0	100%	100%	100	66,37
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	53417	40903	76,6	100%	100%	100	81,26
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	79181	30.683	38,8	100%	100%	100	50,94
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5027	5027	100,0	100%	100%	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyedia Mutu Layanan Dasar			Indeks Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	700	700	100,0	100%	100%	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	6079	6079	100,0	100%	100%	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	6007	6007	100,0	100%	100%	100	100,00

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, terdapat beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang targetnya tidak tercapai. Indikator SPM yang tidak mencapai target yaitu pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (38,80)%, pelayanan kesehatan pada usia produktif (58,0)% dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (76,6)% yang sangat jauh dari target. Berikut kendala dan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM Kesehatan yang belum tercapai :

Tabel 2. 53 Kendala dan Rencana Tindaklanjut Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 Yang Belum Tercapai

No	Uraian Indikator	Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM	Strategi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kurangnya pemeriksaan HB untuk Ibu Hamil	ANC Terpadu Mobile
		Ada beberapa puskesmas	Pengadaan USG untuk semua puskesmas, pengadaan HB untuk Bumil
		Belum disiplin tenaga kesehatan untuk menginput data di e kohort	Peningkatan peran dokter dan bidan dalam

No	Uraian Indikator	Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM	Strategi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian SPM
			pelayanan KIA dengan Pelatihan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Belum semua puskesmas terlatih PONED	Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan RS dalam pelayanan KIA
		Masih ada ibu bersalin yang belum mempunyai jaminan kesehatan	Peningkatan Kapasitas tenaga puskesmas dalam pelatihan PONED
		Tenaga kesehatan belum disiplin untuk menggunakan ekohort	Pelaksanaan Kalakarya pada tim PONED Yang lain
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kertas Saring SHK yang terbatas	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan BBL
		Belum maksimal pelaksanaan MTBM	Peningkatan Kapasitas nakes dalam pelaksanaan SHK
		Pelaksanaan KN yang belum maksimal	Publikasi pelaksanaan SHK
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Masih ada Posyandu/PAUD yang belum mempunyai alat pengukuran sesuai standar	Peningkatan pelayanan SDIDTK di PAUD dan Posyandu
		Tim yang ke Posyandu dan PAUD untuk pelaksanaan SDIDTK masih kurang	Penerbitan surat Edran terkait Pelaksanaan Tumbuh Kembang
		Di dalam pelaksanaan SDIDTK kuisioner yang digunakan belum lengkap	Peningkatan Kapasitas Kader dan Guru PAUD dalam pelaksanaan SDIDTK
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tim penjangkaran yang ke sekolah masih sedikit sehingga pelaksanaan menjadi lama	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penjangkaran
		Masih ada yang belum mempunyai alat ukur	Sosialisasi dalam pelaksanaan Penjangkaran Kesehatan
		Pelaksanaan penjangkaran belum secara komprehensif	Advokasi ke dinas pendidikan dan kemenag dalam pelaksanaan penjangkaran

No	Uraian Indikator	Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM	Strategi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian SPM
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak adanya pencatatan lengkap mengenai pemeriksaan screening yang dilakukan	Melibatkan seluruh FKTP, BPM, Klinik, RS, Institusi Pendidikan untuk melakukan screening penyakit tidak menular di masing-masing wilayah kerja
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum dilaksanakan skrining lansia secara komprehensif	Sosialisasi pelaksanaan Skrining Kesehatan pada lansia
		Alat ukur P3G banyak istilah medis yang sulit dipahami kader	Sosialisasi Pelaksanaan P3G ke Tenaga kesehatan dan Kader Lansia serta prakteknya
		Lansia yang datang ke posyandu tidak semua nya	Pengintegrasian Posyandu Lansia dan Posbindu
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penambahan Kasus di wilayah kerja masing-masing sangat sedikit atau banyak yang tidak tercatat	Mendata Penderita Hipertensi (Kasus baru dan lama) sesuai wilayah puskesmas masing-masing
		Pencatatan dan pelaporan Kasus Hipertensi yang tidak lengkap	Melakukan MOU untuk pengumpulan data kasus hipertensi yang ada di klinik, RS ataupun BPM
		Belum adanya anggaran puskesmas untuk kunjungan kesemua penderita Hipertensi di wilayah kerja masing-masing.	Melakukan Pemantauan minum obat rutin sesuai dengan standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Penambahan Kasus di wilayah kerja masing-masing sangat sedikit atau banyak yang tidak tercatat	Mendata Penderita Diabetes Mellitus (Kasus baru dan lama) sesuai wilayah puskesmas masing-masing
		Pencatatan dan pelaporan Kasus Diabetes Mellitus yang tidak lengkap	Melakukan MOU untuk pengumpulan data kasus diabetes Mellitus yang ada di klinik, RS ataupun BPM
		Belum adanya anggaran puskesmas untuk kunjungan kesemua penderita Diabetes Mellitus di wilayah kerja masing-masing.	Melakukan Pemantauan minum obat rutin sesuai dengan standar

No	Uraian Indikator	Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM	Strategi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian SPM
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Obat program yang sering tidak tersedia (CPZ) di provinsi maupun di pusat	Mendata pasien ODGJ (Kasusbaru dan lama) sesuai wilayah Puskesmas masing masing
		Pencatatan dan pelaporan pogram keswa yang kurang tepat dan kurang tepat waktu	Melakukan pengobatan sesuaistandar (konseling dan edukasi)
		Keterbatasan anggaran puskesmas untuk melakukan kunjungan ke rumah semua pasien ODGJ di wilayah kerjapuskesmas masing-masing	Melakukan kunjungan ke rumahODGJ
11	Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis (TB)	SDIDTK/ skrining TBC pada PAUD belum terintegrasi dengan Program TB	Skrining TB pada pasien suspekdengan gejala batuk
		Linsek belum terlibat dalam penanggulangan TBC	Skrining TB pada pasien komorbid (HIV dan diabetes)
		Terdapat delay report pada pelaporan SITB (baik pasien suspek ataupun pasien TB SO)	Skrining TB pada Balita Stunting
		Belum dilakukan pemeriksaan suspek pada kelompok khusus (ponpes, sekolah, UMKM)	Maksimaliasai Investigasi Kontak
			Pengembangan menuju desabebas TBC
12	Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Masih ada yang belum dibuat data per byname byadres di wilayah kerja puskesmas, sehingga tidak bisadilakukan sweeping	Mendata sasaran ibu hamil perbyname by adres sesuai wilayah kerja puskesmas
		Keterbatasan anggaran puskesmas untuk melakukan pemetaan populasi kunci sehingga tidak bisa dilakukan	Melakukan pemetaan populasi kunci per wilayah kerja puskesmas

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang kesehatan kabupaten Pringsewu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang kesehatan
kabupaten Pringsewu tahun 2023**

No	Bidang Urusan/Indikator	2023		Keterangan
		Target Capaian	Capaian	
1	Angka kematian ibu	139/100.000 KH	16/100.000 KH	Sudah terpenuhi
2	Angka kematian bayi	7/1.000 KH	7/1.000 KH	Sudah terpenuhi
3	Angka prevalensi stunting	6,54%	5,17%	Sudah terpenuhi
4	Angka kesakitan	44%	30,1%	Sudah terpenuhi
5	Rumah tangga ber PHBS	55%	60%	Sudah terpenuhi
6	Universal health coverage jaminan kesehatan	65%	96,71%	Sudah terpenuhi
7	Kategori Nilai Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	Sudah terpenuhi
8	Presentase Puskesmas Akreditasi Utama/Paripurna	50%	100%	Semua puskesmas sudah terakreditasi utama / paripurna
9	Kategori Kabupaten Kota Sehat	3	3	Tatanan terpenuhi

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah. Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 adalah 0%, hal ini disebabkan pada Tahun 2021 tidak ada rumah warga Kabupaten Pringsewu yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah daerah. Sedangkan Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah 100%. Rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 55 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	104.551	92.002	12.549	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	100	130	0	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	3	3	0	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	100	100	0	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	100	100	0	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	104.551	86.853	17.698	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	104.551	104.551	0	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	39.619	39.619	0	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memilikikepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	64.932	64.932	0	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	104.551	104.551	0	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	64.932	64.932	0	
3	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak HuniBagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		0	0	0	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan(dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	0	0	0	

D. SPM Bidang Sosial

Penanganan masalah sosial sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia produktif dan berdaya saing. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga teknis daerah yang harus berkoordinasi dengan pihak pihak lain dalam rangka menampung aspirasi untuk penanganan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 56 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial
Kabupaten Pringsewu Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.303	1.755	548	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					
	Layanan data dan pengaduan		1.755	1.755	0	
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	1	0	
	Penyediaan permakanan		201	201	0	
	Penyediaan sandang		179	179	0	
	Penyediaan alat bantu		231	231	0	
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		116	116	0	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		110	110	0	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		110	110	0	
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		1.755	1.755	0	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	
	Layanan rujukan		1.755	1.755	0	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		47.990	45.914	2.076	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Layanan data dan pengaduan		45.914	45.914	0	
	• Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	1	0	
	• Penyediaan permakanaan		55	55	0	
	• Penyediaan sandang		3	3	0	
	• Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		55	55	0	
	• Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		376	376	0	
	• Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		376	376	0	
	• Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	
	• Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		45.914	45.914	0	
	• Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	
	• Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	
	• Layanan rujukan		45.914	45.914	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		26.471	25.311	1.160	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					
	• Layanan data dan pengaduan		25.311	25.311	0	
	• Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	1	0	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Penyediaan permakanan		2.003	2.003	0	
	• Penyediaan sandang		225	225	0	
	• Penyediaan alat bantu		79	79	0	
	• Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		226	226	0	
	• Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		84	84	0	
	• Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		84	84	0	
	• Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	
	• Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		25.311	25.311	0	
	• Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	
	• Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	
	• Layanan rujukan		25.311	25.311	0	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		12	12	0	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					
	• Layanan data dan pengaduan		12	12	0	
	• Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		12	12	0	
	• Penyediaan permakanan		12	12	0	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Ket
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Penyediaan sandang		12	12	0	
	• Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		12	12	0	
	• Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		12	12	0	
	• Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		12	12	0	
	• Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		12	12	0	
	• Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		1	1	0	
	• Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	
	• Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		12	12	0	
	• Layanan rujukan		12	12	0	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		54	54	0	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM					
	• Penyediaan permakanan		54	54	0	
	• Penyediaan sandang		54	54	0	
	• Penyediaan tempat penampungan pengungsi		0	0	0	
	• Penanganan khusus bagi kelompok rentan		54	54	0	
	• Pelayanan dukungan Psikososial		1	1	0	

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti skala Kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

E. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Permendagri RI Nomor Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas mencakup 4 (Empat) pelayanan dasar yaitu:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 2) Peayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 57 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pringsewu 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Indikator Kinerja Pencapaian			Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2470	2455	2%	98%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1758	974	45%	55%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	259	98	63%	37%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	73	73	0%	100%

2.4 Permasalahan Pembangunan

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.58 Permasalahan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah
	Adanya ancaman inflasi daerah yang belum mampu di kendalikan
	Makin mengecilnya cadangan pangan daerah
	Indeks Pangan Harapan masih rendah
	Keterbatasan lahan menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Pringsewu
	Hasil pertanian dan perikanan, masih dijual dalam bentuk mentah sehingga belum mampu menghasilkan nilai tambah
Indeks Pembangunan Manusia	Masih adanya anak putus sekolah
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu masih berada di bawah Nasional
Indeks Rasa Aman	Masih terjadinya kekerasan perempuan dan anak di masyarakat
	Masih banyaknya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum tertangani
	Masih adanya keluarga yang rentan terhadap masalah sosial
	Masih tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pringsewu
Indeks Pendidikan	Belum berfungsi secara optimalnya

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
	keberadaan Perpustakaan di Sekolah dan di Pekon
	Masih adanya anak putus sekolah
Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kabupaten Pringsewu masih relatif rendah
	Masih sedikitnya status pekon mandiri di Kabupaten Pringsewu
Angka Pengangguran Terbuka	Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka kemiskinan	Masih terdapat 4.530 warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
Indeks Kesehatan	Masih terdapat angka prevalensi stunting
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pringsewu masih rendah (B)
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Pringsewu masih Rendah (CC)
	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pringsewu masih masuk kategori Kurang
Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu masuk masuk kategori Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pringsewu masih dalam kategori Cukup
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih relatif rendah
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Masih banyaknya kondisi jalan rusak di Pringsewu, sementara itu anggaran yang tersedia sangat terbatas.
	Kondisi Infrastruktur Ibukota Kabupaten belum tertata dengan rapih
	Belum semua Perangkat Daerah memiliki gedung kantor sendiri yang representatif, dan saat ini masih menyewa rumah penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Masih terdapatnya kawasan kumuh yang belum tertangani
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum semua program unggulan dan prioritas daerah, dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	Masih adanya pencemaran limbah, akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
Indeks Risiko Bencana	Masih adanya ancaman bencana banjir, puting beliung dan kebakaran
	Belum seluruh Pekon ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana

Sumber: Analisis, 2023

2.4.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kabupaten. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 59 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Kurangnya jumlah pendidik pada jenjang TK, SD dan SMP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, dari segi kuantitas maupun kualitas.
	Masih kurangnya prasarana dan sarana pendidikan
	Kurang optimalnya sistem zonasi pada waktu PPDB

Urusan	Permasalahan
	Meningkatnya kasus kenakalan remaja akibat penerapan pendidikan karakter belum optimal
	Masih adanya angka putus sekolah
	Kurangnya fasilitas kelas dalam kondisi baik di setiap jenjang pendidikan
	Menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir
	Masih adanya balita gizi buruk dan kasus stunting
	Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, ISPA, dan diare)
	Masih adanya kasus stunting
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
	Banyaknya jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan
	Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang disabilitas dan lansia
	Penanganan limbah medis belum optimal
Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Berkembangnya/masih adanya penyakit tidak menular
	Masih rendahnya kondisi jalan mantab kabupaten
	Masterplan drainase belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu
	Belum optimalnya pengelolaan PSU di lingkungan permukiman

Urusan	Permasalahan
	Kurangnya peralatan pemeliharaan jalan
	Sebagian besar jalan aspal belum memenuhi ketentuan yang ada (seperti lebar aspal, <i>street furniture</i> , dan lain-lain)
	Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak
	Tingginya limpasan di tepi jalan kabupaten
	Banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak
	Masih banyaknya pelanggaran sempadan oleh masyarakat, baik sempadan jalan, irigasi maupun sungai
	Belum optimalnya pemantauan terhadap kualitas air bersih atau air minum bagi masyarakat
	Terbatasnya instalasi pengolahan air limbah komunal
	Ada beberapa Perangkat Daerah yang belum mempunyai gedung perkantoran yang representatif
	Masih kurangnya kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi
	Belum optimalnya penyediaan data spasial hasil pembangunan
	Belum adanya kajian kebutuhan perumahan MBR
	Tingginya alih fungsi lahan
Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu ditangani
	Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi MBR
	Tingginya nilai indeks resiko bencana

Urusan	Permasalahan
	Masih tingginya jumlah penduduk sebanding dengan tingginya kebutuhan areal pemakaman
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga
	Belum sepenuhnya pengembang perumahan yang memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Tingginya potensi kerawanan dan konflik sosial karena tingkat kemajemukan masyarakat serta perubahan sosial
	Maraknya penyakit masyarakat baik yang menular maupun tidak menular
	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana walaupun sudah bertambah, namun dari sisi keamanan dan keselamatan masih perlu diperhatikan. Solusi yang dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan
	Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit)
	Masih adanya pelanggaran perda oleh masyarakat
	Masih kurangnya kapasitas linmas dalam pencegahan tindak kriminal
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Data PMKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat
	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) terlatih dan PSKS lainnya belum optimal melaksanakan kegiatan penanganan PMKS
	Kurangnya kepedulian dari sebagian masyarakat terhadap permasalahan

Urusan	Permasalahan
	sosial (kondisi anak terlantar, penyandang disabilitas)
	Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertitban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia
	Meningkatnya peredaran dan penyalahan NAPZA
	Masyarakat miskin belum maksimal dalam mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS)
	Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal
	Masih terdapat 38.180 jiwa penduduk yang tergolong miskin
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	
Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	Serapan tenaga kerja masih rendah
	Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
	Kesesuaian antara kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi, kemampuan dan harapan pencari kerja masih kurang
	Kurangnya minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi pengembangan kewirausahaan
	Belum dipahami secara menyeluruh aturan ketenagakerjaan oleh tenaga kerja maupun perusahaan

Urusan	Permasalahan
	Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi terutama untuk disabilitas
	Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya update data pilah, data gender, perempuan dan anak
	Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak
	Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Masih kurangnya sharing dana desa untuk keberlanjutan P2WKSS
	Belum optimalnya lembaga penyedia dan jejaring dalam rangka penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
	Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia
Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Belum optimalnya kelembagaan PUG
	Berkurangnya luas lahan pertanian
	Kurang meratanya keterjangkauan pangan karena distribusi yang panjang
	Rendahnya konsumsi keberagaman pangan
Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan, terutama untuk pelaku usaha dengan usia lanjut
	Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa

Urusan	Permasalahan
	Masih rendahnya Bukti Hak Milik Tanah berupa sertifikat
	Kurangnya data/administrasi pertanahan
	Belum adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi
Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
	Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LH masih rendah
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan terutama di kawasan perkotaan
	Adanya kerusakan kawasan resapan dan lindung sempadan sungai akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan yang tidak berizin
	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Ketergantungan dengan pemerintah pusat sangat tinggi, terutama dalam jaringan komunikasi data dan ketersediaan blanko
	Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal
	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pencatatan sipil yang terintegrasi
	Belum akuratnya <i>database</i> kependudukan (masih adanya data anomali) sebagai akibat kurang tertibnya pelaporan
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang sangat dinamis
	Belum optimalnya penyelesaian siklus tahunan desa, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas
	Masih terjadi hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa dan lembaga desa kurang harmonis
	Pelaksanaan siskudes belum maksimal, baik dari jaringan internet maupun kualitas SDM-nya
	Kedisiplinan perangkat desa kurang, terutama dalam pelayanan masyarakat
	Sulitnya mendapat data yang valid tentang profil desa
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih tingginya angka perkawinan usia dini
	Masih lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Tingginya angka <i>unmetneed</i> KB
	Kesadaran KB bagi pria masih rendah
	Kurangnya regenerasi kader IMP
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Keterbatasan anggaran dalam operasional kegiatan perlengkapan jalan maupun pengadaan terkait program bidang perhubungan
	Masih belum seimbangny realisasi perlengkapan jalan (LPJU, RPPJ, APILL, rambu, guardrail, halte) dengan kebutuhan
	Rendahnya kesadaran berlalu lintas di jalan
	Menurunnya kualitas dan kuantitas angkutan umum yang beroperasi
	Maraknya parkir liar dan pungutan tidak sesuai tarif

Urusan	Permasalahan
	Belum adanya pelayanan bidang perhubungan berbasis IT
	Masih banyaknya kendaraan yang belum memenuhi syarat kelaikan jalan
	Terdapat permasalahan di lapangan terkait retribusi parkir dimana pendapatan yang tercatat dengan yang disetorkan berbeda
Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Sumber daya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi
	Infrastruktur komunikasi dan informatika sudah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu, namun kinerjanya belum memadai khususnya di wilayah pedesaan
	Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola pemerintahan maupun layanan publik
Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi dalam manajemen koperasi, penguasaan teknologi, inovasi pengembangan produk
	Motivasi generasi muda untuk berkoperasi rendah
	Belum adanya fungsional penyuluh koperasi
	Loyalitas anggota koperasi masih rendah
Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Keterbatasan lahan bagi investor
	Belum tersedianya fasilitas atau insentif bagi pelaku usaha
	Belum adanya data dan informasi potensi investasi
	Kebijakan online single submission (OSS) masih belum mencakup semua layanan perizinan

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya penguatan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Kurangnya jiwa <i>enterpreneurship</i> di kalangan pemuda
	Prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional belum maksimal
	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana cabang olahraga
	Pembibitan dari usia dini belum maksimal
Urusan Pemerintah Bidang Statistik	Masih terjadinya beberapa kasus kenakalan pelajar dan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, yang disinyalir akibat pengaruh pergaulan dan pengaruh media sosial yang kurang terkontrol
	Sampai saat ini, penyajian data statistik dasar masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja pemerintah daerah sehingga akan menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisis data untuk keperluan pembangunan
Urusan Pemerintah Bidang Persandian	Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar persandian adalah belum optimalnya dalam pelaksanaannya. Hal ini karena regulasi pendukung pengamanan informasi belum ada, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
	Lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	dalam masyarakat akibat perkembangan zaman
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
	Seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat masih bersifat hiburan beum sampai pada penanaman nilai kehidupan
	Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreaitifitas dan berekspresi
Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi
	Prasarana dan sarana perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan
	Kerja sama perpustakaan belum optimal
	Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai
Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	Belum semua Perangkat Daerah mengelola arsip dengan baik
	Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai
	Kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip belum memadai
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip belum optimal
Urusan Pemerintah Pilihan	
Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	Destinasi wisata belum mampu menarik wisatawan mancanegara
	Masih kurang kuatnya pencitraan yang mampu membuat destinasi lebih unggul. Misalkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan sadar wisata sebagai tuan rumah yang baik sehingga

Urusan	Permasalahan
	meningkatkan minat berkunjung kembali (<i>repeater</i>) maupun lama tinggal wisatawan
	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata masih konvensional, belum optimal memanfaatkan teknologi informasi
	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata belum secara terarah dikembangkan untuk berbagai segmen wisatawan
	Regulasi kawasan pariwisata belum terintegrasi antar pemangku kepentingan
	SDM bidang pariwisata belum berstandar nasional/internasional
	Produk dan usaha pariwisata belum bervariasi
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	Alih fungsi lahan meningkat
	Kandungan unsur hara semakin menipis
	Keterbatasan penyuluh dari segi kualitas dan kuantitas
	Generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian
	Masih kurangnya ketersediaan benih dan pupuk
	Tingginya biaya produksi
Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Belum optimalnya kualitas hasil produksi pertanian
	Tidak adanya sanksi bagi distributor barang yang melanggar ketentuan pengawasan
	Sulitnya mengendalikan distribusi bahan pangan antar daerah

Urusan	Permasalahan
	Kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengenali produk dengan kandungan bahan berbahaya
Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Masih sulitnya menembus perizinan untuk usaha ekspor
	Belum optimalnya pemantauan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan bimtek
	Belum adanya pemetaan pelaku usaha tentang tolok ukur standarisasi produk dan proses produksi
	Belum optimalnya intensivitas penguatan modal
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran
	Masih minimnya sarana penampungan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat kabupaten
Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Menurunnya produksi ikan pada musim kemarau, yang disebabkan jumlah air yang tersedia menurun maupun banyak bermunculan penyakit ikan
	Menurunnya ketersediaan benih ikan pada musim kemarau
	Masih banyak pembudidaya yang pemahaman teknologi rendah, karena usaha budidaya ikan hanya sampingan
	Tingginya harga pakan ikan
	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan Kabupaten Pringsewu apabila dibandingkan tingkat konsumsi ikan nasional
	Masih kurangnya permodalan bagi kelompok pembudidaya ikan
	Masih kurangnya permodalan bagi kelompok pengolah dan pemasaran

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Penunjang	
Urusan Penunjang Perencanaan	Belum ada instrumen yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program yang satu dengan program lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran maupun misi daerah
	Belum ada instrumen yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program dan kegiatan PD sehingga sulit mengukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran PD maupun sasaran daerah
	Masih adanya program dan kegiatan yang belum terakomodir pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
	Masih belum optimalnya kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Urusan Penunjang Keuangan	Beberapa regulasi teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis
	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi
	Masih terjadinya penyerapan anggaran diakhir tahun, sehingga daya dukungnya terhadap perkenomian daerah menjadi kurang
	Integrasi perencanaan dengan penganggaran masih terkendala dengan kemampuan SDM terhadap aplikasi yang diberlakukan oleh Kemendagri
	Masih belum selesainya pengadministrasian aset daerah melalui penerbitan sertifikat
	Masih rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung belanja daerah
	Belum optimalnya upaya inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah

Urusan	Permasalahan
	yang mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah
Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi
	Pengangkatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan <i>talent tool</i> atau berdasarkan kompetensi, mengingat keterbatasan SDM
	Belum seluruh pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama, mengikuti Diklatpim sesuai ketentuan
	Masih belum terpadunya data kepegawaian sehingga proses kenaikan pangkat, masih dilakukan secara manual
	Belum tersedianya dokumen sistem merit berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
	Urusan penelitian dan pengembangan masih dikelola oleh pejabat eselon IV di Bappeda, sehingga jangkauannya masih terbatas
	Sistem Inovasi Daerah belum terkelola dengan baik
	Belum tersedianya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah
Urusan Penunjang Pengawasan	Belum seluruh personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya
	Tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan

Urusan	Permasalahan
	kerugian dan kewajiban setor masih lambat progresnya
	Belum semua personil memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
	Belum semua SKPD mendapatkan pembinaan ZIWBK/WBBM
	Masih rendahnya ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi para pengawas
Urusan Penunjang Sekretariat Daerah	Belum adanya regulasi tentang tata cara kerja sama daerah sebagai turunan dari aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
	Belum ada regulasi tentang batas wilayah Kabupaten Pringsewu serta penetapan nama dan batas wilayah desa
	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
	Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan tugas antar bagian, sebagai unsur staf dalam mendukung tugas pimpinan
Urusan Penunjang Sekretariat Dewan	Belum adanya dukungan perencanaan kerja dari masing-masing alat kelengkapan dewan
	Masih adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah
	Masih rendahnya capaian target Program Legislasi Daerah
	Belum optimalnya hasis reses anggota dewan yang mampu untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai akibat belum optimalnya penyampaian pokok-pokok pikiran anggota dewan melalui aplikasi SIPD

Sumber: Analisis, 2023

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pringsewu. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.	1. Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan. 2. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat. 3. Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.
2.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktivitas potensi daerah.	1. Optimalisasi sistem pendukung peningkatan produksi dan pasca panen hasil pertanian dan perikanan. 2. Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal. 3. Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal dan promosi pariwisata.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 tersebut serta issue permasalahan yang

dihadapi daerah pada saat sekarang, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah.

Hal ini dilakukan melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan pada sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya melalui peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan dan fasilitasi promosi produk-produk industri.

2. Peningkatan pemerataan distribusi pendapatan.

Hal tersebut dilakukan melalui penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah dan pengembangan kawasan-kawasan khusus. Seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial dan percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi. Selain itu juga peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas program pembangunan yang berbasis masyarakat, serta pengembangan produk unggulan di bidang agribisnis dan industri manufaktur.

3. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita.

Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi adalah melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perizinan,

membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

4. Peningkatan kemampuan perekonomian daerah.

Kebijakan yang dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin pada pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung pekon untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.

5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.

Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

6. *Penataan kawasan ekonomi potensial secara tegas dan konsisten dalam rangka untuk menjamin kelangsungan usaha.*

Kebijakan yang dilakukan antara lain peningkatan penataan dan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa, melakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional, pembangunan kawasan industri kecil menengah, perencanaan kawasan pengembangan kota, pengembangan sentra pemasaran hasil-hasil pertanian, perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan dan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi, penerapan teknologi informasi, pengembangan industri dan kerajinan rakyat, membangun koneksi jalur-jalur pemasukan dan pengeluaran ekonomi daerah, dan membangun pencitraan terhadap keamanan serta kenyamanan dalam berinvestasi.

7. *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.*

Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi tanah, pemberian kemudahan dalam akses modal, dan pengembangan kerjasama melalui pola kemitraan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, dimana semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu di sisi lain, perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.** Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran. Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran. Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan prioritas, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sesuai dengan realita di lapangan. Dalam konteks ini maka arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa juga ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD.
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk Pendapatan Transfer mencakup Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat itu sendiri, meliputi dana perimbangan (dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam; dana alokasi umum; dana alokasi khusus fisik; dan dana alokasi khusus non fisik), dana insentif daerah, dan dana desa. Sedangkan untuk Transfer Antar Daerah, meliputi pendapatan bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan daerah; dan bantuan keuangan yang di terima dari daerah lain. Selanjutnya untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah, mencakup hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam hal ini adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dana darurat dalam hal ini adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 meliputi :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan reward dalam bentuk undian bagi wajib pajak di setiap kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - e. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
 - f. Mendayagunakan aset daerah.

2. Optimalisasi data pendukung pendapatan transfer, yang meliputi : a. Memperhitungkan celah fiskal secara seksama, sebagai bahan perhitungan dana alokasi umum. b. Menjaga kondusifitas dan kepatuhan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan secara baik dan terukur, terutama terhadap pelayanan masyarakat. d. Melaksanakan berbagai inovasi dalam rangka mendukung penerimaan dana insentif daerah. e. Menyediakan data secara lengkap dan proaktif menyusun laporan dalam rangka penerimaan dana alokasi khusus fisik dan non fisik. f. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa/pekon dalam rangka pengelolaan dana desa. g. Memberikan dukungan sarana dan prasarana terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan pajak yang menjadi kewenangan provinsi. h. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
3. Optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui : a. Melakukan upaya-upaya yang terstruktur untuk mendapatkan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah. c. Memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penerapan standar pelayanan minimal, sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan dana operasional sekolah dan dana operasional pelayanan kesehatan. d. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah dan mengoptimalkan penerimaan dari dana desa. e. Membuka ruang untuk bekerjasama antar pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama.

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya diimplementasikan melalui analisis penerimaan pendapatan secara logis terhadap realisasi pendapatan pada tahun-tahun yang lalu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proyeksi pendapatan di tahun yang akan datang. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Untuk Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	1.197.952.212.131,52	1.336.197.145.570,00	1.228.420.328.517,00	1.250.420.328.517,00	1.250.420.328.517,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.105.650.568,52	128.007.624.570,00	147.894.817.517,00	153.894.817.517,00	153.894.817.517,00
4.1.1	Pajak Daerah	27.500.000.000,00	35.469.630.320,00	48.000.000.000,00	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.072.685.000,00	6.726.494.250,00	7.303.338.162,00	7.303.338.162,00	7.303.338.162,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.315.330.440,00	2.362.500.000,00	3.861.479.355,00	3.861.479.355,00	3.861.479.355,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.217.635.128,52	83.449.000.000,00	88.730.000.000,00	88.730.000.000,00	88.730.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.039.178.361.563,00	1.154.608.021.000,00	1.080.525.511.000,00	1.096.525.511.000,00	1.096.525.511.000,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	973.753.967.111,00	1.064.608.021.000,00	998.525.511.000,00	1.023.525.511.000,00	1.023.525.511.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	65.424.394.452,00	90.000.000.000,00	82.000.000.000,00	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah digunakan diantaranya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, aktivitas belanja daerah bersifat fleksibel dengan tetap konsisten pada prioritas dan tujuan daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara luas.

Kebijakan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pringsewu mengacu pada prinsip *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi anggaran belanja untuk program dan kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pringsewu. Keluaran dari Belanja Daerah harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Secara lebih operasional lagi, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam hal ini belanja

operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah. Belanja modal tersebut meliputi :

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah keperluan mendesak untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal ketersediaan belanja tidak terduga tersebut, tidak mencukupi untuk pengembalian kelebihan pembayaran, maka menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. Untuk belanja bagi hasil, dalam penganggaran belanjanya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk belanja bantuan keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan ini terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, dan bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa atau pekon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah sebagaimana dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

4. Mengalokasikan belanja untuk bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD, bidang kesehatan minimal 10% dari APBD, dan transfer dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya.
8. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.
9. Mendukung program strategis terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, mengacu pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemanfaatan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

12. Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program program pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
14. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung seperti belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
15. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta mendukung capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya diimplementasikan melalui analisis pengelolaan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi dan proyeksi belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022 (N-3)	REALISASI TAHUN 2023 (N-2)	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2024)	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026 (N+1)
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	1.210.975.533.778,51	1.192.339.898.255,41	1.255.920.328.517,00	1.269.420.328.517,00	1.269.420.328.517,00
5.1	BELANJA OPERASI	870.959.308.393,51	885.292.662.811,92	954.550.310.778,00	932.790.310.778,00	932.790.310.778,00
5.1.1	Belanja Pegawai	522.463.712.881,00	518.692.552.094,00	610.510.170.696,00	621.563.170.696,00	621.563.170.696,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.498.432.050,51	322.753.571.217,92	296.544.145.682,00	285.431.145.682,00	285.431.145.682,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00		
5.1.4	Belanja Subsidi	194.025.000,00	193.572.600,00	0,00		
5.1.5	Belanja Hibah	21.136.938.462,00	41.019.566.900,00	45.995.994.400,00	23.795.994.400,00	23.795.994.400,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.666.200.000,00	2.633.400.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	151.191.253.835,00	118.733.126.746,49	107.503.901.023,00	139.613.901.023,00	139.613.901.023,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	247.841.445,00	1.487.633.605,00	568.000.000,00	1.318.000.000,00	1.318.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.103.637.390,00	19.322.519.067,02	20.863.650.166,00	23.763.650.166,00	23.763.650.166,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.183.569.128,00	20.355.794.313,35	25.886.698.280,00	37.946.698.280,00	37.946.698.280,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.022.060.318,00	73.227.717.935,12	53.574.178.087,00	68.574.178.087,00	68.574.178.087,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.634.145.554,00	4.339.461.826,00	6.611.374.490,00	8.011.374.490,00	8.011.374.490,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.991.391.035,00	574.708.004,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.991.391.035,00	574.708.004,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	186.833.580.515,00	187.739.400.693,00	190.866.116.716,00	194.016.116.716,00	194.016.116.716,00
5.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.092.908.601,00	4.660.762.177,00	5.530.333.816,00	6.130.333.816,00	6.130.333.816,00

5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	182.740.671.914,00	183.078.638.516,00	185.335.782.900,00	187.885.782.900,00	187.885.782.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.414.291.296,01)	(8.389.407.733,34)	(27.500.000.000,00)	(19.000.000.000,00)	(19.000.000.000,00)

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan hanya akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan, yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan melakukan penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diluar yang telah ditetapkan pada point 1 dan point 2 diatas, hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Kemudian berdasarkan arah kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan tersebut, maka realisasi dan proyeksi pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2026

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2022 (N-3)	ANGGARAN TAHUN 2023 (N-2)	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2024)	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026 (N+1)
1	2	3	4	5	6	7
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.217.253.572,00	50.131.544.868,07	35.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.	49.217.253.572,00	50.131.544.868,07	35.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.217.253.572,00	50.131.544.868,07	35.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		45.717.253.572,00	47.631.544.868,07	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026. Tujuan pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif.
4. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Kemudian syarat utama dalam menentukan tujuan adalah harus bersifat Measurable atau terukur. Berikut ini adalah indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil reformasi birokrasi.	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01	
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Ekonomi.	70.45	71.05	71.40	71.90	72.45	72.45	
3.	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi tahunan pertumbuhan ekonomi	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48	
4.	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Indeks komposit dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan.	N/A	70.00	70.10	70.20	70.30	70.30	
5.	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Survey indeks rasa aman	indeks	0.084	0.083	0.070	0.062	0.062	

Sumber : RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Berdasarkan tujuan diatas, diperlukannya sebuah sasaran untuk menjadi tolak ukur dan arahan yang jelas serta memberikan gambaran yang spesifik dari hasil yang akan dicapai dari tujuan tersebut. Sasaran adalah hasil atau target spesifik yang diinginkan untuk dicapai sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tertentu. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dan mengukur kemajuan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- A. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- B. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
 - 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3. Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.
 - 4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
- C. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.
 - 2. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.
- D. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan.
 - 2. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup.
- E. Meningkatkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan, yaitu :

1. Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.
2. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, diketahui indikator target kinerja sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Indikator Target Kinerja Sasaran Yang Akan Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
								2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil reformasi birokrasi	Indeks	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01
				Nilai SAKIP	Nilai evaluasi pelaksanaan SAKIP	Nilai	63.27	67.01	70.01	72.01	74.01	74.01
				Opini BPK RI	Opini BPK atas LKPD Tahun	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pembobotan kualitas SDM, sarpras, transparansi, pengaduan dan inovasi	Persen	N/A	3.51	3.53	3.60	3.65	3.65
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai perhitungan dari BPS	Indeks	0.636	0.650	0.655	0.660	0.665	0.665

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
								2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai perhitungan dari BPS	Indeks	0.773	0.779	0.783	0.786	0.789	0.789
			Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan keset. gender.	Indeks Desa Membangun	Indeks komposit ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi	Indeks	0.72	0.77	0.79	0.81	0.83	0.83
				Indeks Pembangunan Pemuda	Penjumlahan komposit aspek Pendidikan, kesehatan kesejahteraan . Lapangan, kesempatan kerja, kepemimpinan & gender/5	Indeks	40.98	52.00	54.00	55.00	57.00	57.00
				Indeks Pembangunan Gender	Angka indeks pemberdayaan gender hasil perhitungan	Indeks	92.33	92.63	92.71	92.79	92.83	92.83

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
								2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja.	Angka Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100	Persen	4.85	4.72	4.58	4.33	4.13	4.13
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi.	PDRB harga konstan tahun ke t, dibagi PDRB harga konstan tahun k t-1 x 100	Persen	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48
				Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di Pringsewu pada tahun (n) (dengan 2 digit di belakang koma) Sumber BPS	Persen	10.11	9.68	9.47	9.25	9.04	9.04
				Gini Rasio	Angka indeks gini yang bersumber dari perhitungan BPS	Indeks	0.310	0.309	0.308	0.307	0.306	0.306

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
								2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah.	Nilai survey atas daya saing daerah	Indeks	3.05	3.20	3.58	3.78	3.98	3.98
4.	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pembobotan dari 8 indikator infrastruktur	Persen	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas penanganan pemukiman kumuh/luas wilayah permukiman kumuh	Persen	N/A	0.38	0.76	1.14	1.52	1.52

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir
								2023	2024	2025	2026	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (30\%IK A) + (30\%IK U) + (40\%I KTL)$	Indeks	62.16	63.26	63.80	64.35	64.90	64.90
5.	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial	Survey solidaritas social, toleransi & stabilitas/ ketertiban umum	Indeks	N/A	60.0	61.30	61.85	62.05	62.05
			Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Rasio desa Tangguh bencana + cakupan pelayanan pasca bencana sesuai standar)/2	Persen	95.20	94.30	93.40	92.50	91.60	91.60

Sumber : RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 diselaraskan dengan Rancangan Awal Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 yang sedang disusun yang selanjutnya diintegrasikan dengan dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Terpilih.

Penyelarasan Rancangan Awal Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 mengacu pada RPJP Nasional tahun 2025-2045 dengan visi “Indonesia Emas 2025-2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Guna terwujudnya 8 (delapan) sasaran di atas, tahapan perencanaan dalam RPJP Nasional tahun 2025-2045 terbagi menjadi 4 tahap pelaksanaan sebagai berikut :

1. Tahap 1 Perkuatan Fondasi Transformasi
2. Tahap 2 Akselerasi Transformasi
3. Tahap 3 Ekspansi Global
4. Tahap 4 Perwujudan Indonesia Emas

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Tahap 1 Perkuatan Fondasi Transformasi. Pada Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi meliputi transformasi di beberapa bidang antara lain :

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan

5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Pertimbangan isu pada Rancangan Awal Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 meliputi risiko global dan isu jangka menengah diantaranya :

1. Isu Global

- a. Risiko kegagalan climate action
- b. Cuaca ekstrem sering
- c. Perubahan iklim
- d. Deglobalisasi
- e. Krisis lapangan pekerjaan
- f. Krisis utang
- g. Konfrontasi geoekonomi
- h. Risiko kegagalan cybersecurity
- i. Biodiversity loss
- j. Asset bubble rust

2. Isu Jangka Menengah

- a. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi ekonomi Indonesia
- b. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral
- c. Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global
- d. Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan
- e. Aging population negara maju

Adapun tentang tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025, yaitu :

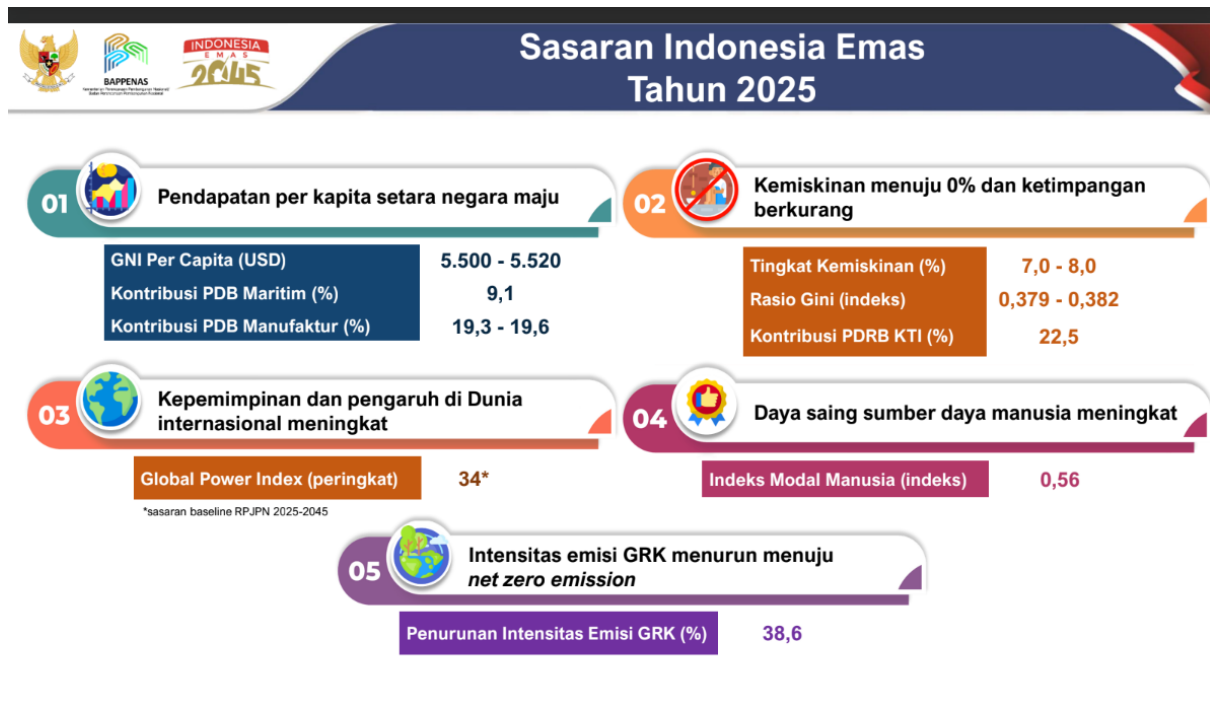
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) penekanan kebijakan prioritas pembangunan, yaitu :

- 1.** SDM Berkualitas, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
- 2.** Infrastruktur Berkualitas, yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah
- 3.** Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Adapun sasaran Indonesia Emas Tahun 2025 dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ditampilkan dalam gambar 4.1 dan 4.2.

Gambar 4.1
Sasaran Indonesia Emas Tahun 2025



Gambar 4.2
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 ^{a)}	4,5 – 5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36 ^{b)}	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388 ^{b)}	0,379 – 0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09 ^{c)}	38,6

Keterangan: ^{a)} Agustus
^{b)} Maret
^{c)} Angka Sementara per Oktober

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025. Namun demikian,

Pelaksanaan penyusunan tema, prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2025 juga mempertimbangkan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung tahun 2020-2045.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045 adalah :

“SEJAHTERA, MAJU, MERATA DAN BERKELANJUTAN”

SEJAHTERA (masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan). Kehidupan masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan meningkatkan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat, oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut, di samping itu berbagai upaya juga dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.

MAJU (perubahan positif secara inklusif dan berdaya saing). Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah

pada kisaran 6-7 persen yang didorong dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif.

Maju pada Aspek Sosial dan Budaya; Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak). **Maju pada Aspek Ekonomi;** Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industri; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. **Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi;** Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab). **Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan;** Ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektifitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. **Aspek Lingkungan;** Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan. Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan

dan kekayaan daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warga negara.

MERATA (Pemerataan pembangunan wilayah merupakan salah satu pilar Menyongsong Indonesia Emas 2045). Tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga bagaimana pembangunan itu bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga harus bisa membawa peningkatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Pembangunan juga bukan hanya peningkatan kapasitas produksi di industri dalam negeri, namun bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan Indonesia juga menitikberatkan pada aspek sosial seperti kesehatan, gizi dan pendidikan juga aspek kelembagaan, seperti politik, hukum, pertahanan dan kemananan

BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus dimasa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan dimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antarpihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antarjenjang pemerintahan dan antargenerasi.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu :

1. **Pendapatan per Kapita** penduduk Provinsi Lampung masuk pada level *High Income*, pada kisaran Rp. 328-384 juta (21.867-25.600 US Dolar), dengan kontribusi sektor industri dalam PDRB sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 250,73;
2. **Pengentasan Kemiskinan** akan terus ditekan pada kisaran 3,0-2,5 persen; dan tingkat **Ketimpangan yang rendah** pada angka Indeks Gini di level 0,202-0,197 dan PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,5 persen; serta persentase Desa Mandiri 30-33 persen.
3. **Daya Saing Daerah** di level nasional mencapai 4,0
4. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat**, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68-0,70 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada rentang 83,51-85,13;
5. **Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** menuju *Net Zero Emission* dengan penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 93,17%.

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Mandiri, Maju dan Berkelanjutan” akan ditempuh melalui (draft) 8 Misi Pembangunan

1. Transformasi Sosial

Misi ke 1 : Menciptakan SDM yang Unggul, Adaptif dan Produktif

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan competitiveness human capital dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai adanya kemajuan teknologi yang disruptif. Untuk dapat survive, unggul dan

sukses dimasa depan, sumber daya manusia (SDM) di Lampung harus sehat, berpengetahuan (knowledge) dan berketerampilan (skills) serta berkarakter positif yang kuat.

2. Transformasi Ekonomi;

Misi ke-2 : Pendapatan Penduduk dalam kategori “High Income”

Misi ini bertujuan : (1) Meningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi. (2) Membangun ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah (3) Meningkatkan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4) Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan (5) Mewujudkan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan.

3. Transformasi Tata Kelola;

Misi ke-3 : Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta Kemiskinan dan ketimpangan yang Rendah.

Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas serta kemiskinan dan ketimpangan yang rendah. Misi ini diarahkan kepada peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) yang efektif dan akuntabel serta efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Tata kelola pemerintahan pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

4. Keluarga Berkualitas, Generasi Tangguh, Masyarakat Religius dan Berbudaya;

Misi ke-4 : Keluarga Berkualitas, Pemuda Tangguh serta Masyarakat Religius, Rukun dan Berbudaya Misi ini bertujuan meningkatkan

ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai modal dasar dan modal sosial pembangunan. Sebagai landasan transformasi diperlukan ketangguhan pada tataran keluarga dan masyarakat agar terwujud pranata sosial yang ideal. Kedepan, optimalisasi peran keluarga dan aktualisasi peran pemuda menjadi hal yang sangat penting. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tidak dipungkiri akan memberikan pengaruh terhadap tergerusnya nilai-nilai religiusitas dan budaya yang selama ini menjadi modal berharga bangsa.

5. Kehidupan Demokratis dan Supremasi Hukum;

Misi ke-5 : Kehidupan Demokratis dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

Misi ini bertujuan mewujudkan demokrasi yang mengemban amanah rakyat

Arah Kebijakan Misi ke-5 Proses demokrasi dan penegakan hukum yang adil perlu terus diperkuat sehingga Provinsi Lampung dapat terus bergerak maju dan berkeadilan. Perkembangan kualitas demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998 menunjukkan kemajuan secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pelaksanaan pemilihan umum secara teratur, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokratisasi institusi publik, serta kebebasan pers dan ekspresi yang semakin terbuka. Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung terus membaik, bahkan capaiannya selalu naik seperti tahun 2020 sebesar 72,79 menjadi 80,18 di tahun 2021 dan 2022.

6. Pemerataan dan Pengembangan Wilayah;

Misi ke-6 : Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonomi dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja

dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

7. Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan; dan

Misi ke-7 : Sarana, Prasarana Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berkualitas menjadi kebutuhan setiap masyarakat khususnya Lampung. Dilain sisi, lingkungan yang aman dan keberlanjutan telah terimplementasi dalam kebijakan-kebijakan dan menjadikan Provinsi Lampung tangguh dalam menghadapi bencana yang disebabkan perubahan iklim.

8. Kestinambungan Pembangunan.

Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antar waktu, antar periode dan antar jenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan yang mencirikan kemandirian.

Arah kebijakan Provinsi Lampung Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 dengan prioritas sebagai berikut :

Prioritas :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas hidup SDM;
3. Penanggulangan Kemiskinan ;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Pemantapan Kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Sasaran Makro Pembangunan yang hendak dicapai Provinsi Lampung pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi, berkisar 4,9 – 5,3 %
2. Tingkat Inflasi, berkisar 1,5 – 3,5 %
3. PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah), sebesar 52,6 – 54,6 Jt
4. Tingkat Pengangguran Terbuka, 3,8 – 3,5%
5. Tingkat Kemiskinan, 9,5 – 10%
6. Indeks Pembangunan Manusia, 72,97
7. Indeks Gini, 0,282 - 0,293
8. Nilai Tukar Petani, 109 - 110
9. Pertumbuhan PAD, 2,0
10. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, 78,0%
11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 13

4.2.3 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, maka tema pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2025 ditujukan untuk “Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah”. Dengan arah kebijakan meliputi :

1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berbasis elektronik
2. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidik serta tenaga kependidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan minat baca masyarakat.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
5. Penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat pekon
6. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar
8. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat.
9. Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.
10. Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal
11. Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kawasan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
12. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.
13. Optimalisasi penataan perumahan dan kawasan permukiman yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah.
14. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
15. Penguatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya gangguan, keamanan dan ketertiban.
16. Penguatan kapasitas masyarakat menuju pekon mandiri tangguh bencana

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2025 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah

**“Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan
Infrastruktur Daerah”**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025:

1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM.
- Meningkatnya keamanan dan cadangan pangan masyarakat.
- Meningkatnya iklim berusaha dan investasi;
- Meningkatnya produksi hasil pertanian;
- Meningkatnya produksi hasil perikanan.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi.	4,78	4.70 – 5,00
2	Gini Rasio.	0.306	0.305 – 0,30

2. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- Peningkatan minat baca masyarakat.
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat yang inovatif.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Indeks Daya Saing Daerah.	3.15	3.78
2	Indeks Pembangunan Manusia	73.11	73.15-75,00
3	Indeks Pembangunan Pemuda	40.98	55.00
4	Indeks Pembangunan Gender	92.50	92.79
5	Indeks Desa Membangun	0.72	0.81

3. Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS.
- Menurunnya angka kemiskinan.
- Menurunnya prevelansi stunting.
- Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Angka kemiskinan	9.14	9,10 – 9,00
2	Angka Pengangguran Terbuka	4.66	4,5 - 4.33
3	Prevelansi Stunting (SSGI)	15,8	10,5

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.
- Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
2	Nilai SAKIP	B	B
3	Opini BPK RI	WTP	WTP
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25	4.30

5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten.
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman masyarakat.
- Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	46,04	100
2	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman.	N/A	0.76
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,34	63.80
4	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	N/A	70.10

6. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	61.30
2	Indeks Resiko Bencana	95.20	93.40
3	Indeks rasa aman	N/A	0.083

Sedangkan untuk sasaran dan target makro sosial ekonomi Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,75 - 5,00%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditekan menjadi 4,5 - 4,3%;
3. Angka Kemiskinan ditekan menjadi 9,10-9,0%;
4. Gini rasio ditekan pada kisaran 0,305-0,300;
5. PDRB Per Kapita ADHB meningkat menjadi 33,50 – 34,50 juta rupiah;
6. Indeks daya saing daerah berada pada kisaran 3,78;
7. Indeks pembangunan manusia berada pada kisaran 73,15 – 75,00 (SP2020);
8. Angka rata-rata lama sekolah adalah 8,45 - 8,8 tahun;
9. Angka harapan lama sekolah adalah 12,95 – 13,00 tahun;
10. Angka harapan hidup adalah 74,35 – 74,55 tahun;

Tabel 4.03
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2025
Terhadap RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026

RPD 2023-2026				RKPD 2025		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan • Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik.	Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.			
			Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berbasis elektronik.			
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	Pemerataan dan kemudahan akses pendidikan secara berkualitas.	Peningkatan kualitas aparatur pengelola pelayanan publik	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	• Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. • Peningkatan minat baca masyarakat. • Meningkatnya
			Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidik serta tenaga kependidikan yang berkualitas			

RPD 2023-2026				RKPD 2025		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Peningkatan minat baca masyarakat			kualitas kesehatan masyarakat. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. • Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat yang inovatif.
	Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat pekon			
			Peningkatan produktivitas pemuda dan prestasi olah raga			
			Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan akses kesehatan.	Peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Menurunkan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting	• Menurunnya angka kemiskinan • Menurunnya prevalensi stunting • Meningkatnya partisipasi angkatan kerja. • Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS. • Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif			
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Menurunkan angka pengangguran.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar			

RPD 2023-2026				RKPD 2025		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Penguatan komitmen dengan investor untuk penyerapan tenaga kerja lokal			kesetaraan gender
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.	Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan.	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	• Meningkatkan kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM. • Meningkatkan keamanan dan cadangan pangan masyarakat. • Meningkatkan iklim berusaha dan investasi. • Meningkatkan produksi hasil pertanian • Meningkatkan produksi hasil perikanan.
			Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat.			
			Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.			
	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktifitas potensi daerah	Optimalisasi sistem pendukung peningkatan produksi dan pasca panen hasil pertanian dan perikanan.			
			Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal.			
			Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal dan promosi pariwisata			

RPD 2023-2026				RKPD 2025		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
4. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastuktur pendukung performa kawasan.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai.	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kawasan untuk mendukung perekonomian masyarakat.	Infrastuktur dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	• Meningkatkan kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten • Meningkatkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar • Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman masyarakat. • Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
			Penyediaan sasrana dan prasarana perhubungan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah			
	Meingkatnya kualitas permukaan dan lingkungan hidup	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup.	Optimalisasi penataan perumahan dan kawasan permukiman yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah.			
			Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup			
5. Meningkatkan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang nyaman	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya gangguan, keamanan dan ketertiban	Ketertiban dan Kenyamanan	Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Bermasyarakat.	• Meningkatkan ketertiban dalam kehidupan Masyarakat • Meningkatnya

RPD 2023-2026				RKPD 2025		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Penguatan peran FKUB dan lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis.			stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana
	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.	Penguatan kapasitas masyarakat menuju pekon mandiri tangguh bencana.			
			Penanganan pasca bencana secara cepat sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).			

Tabel 4.04
Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025

RKP		RKPD Provinsi Lampung		RKPD Kabupaten Pringsewu	
Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro
1. SDM Berkualitas 2. Infrastruktur Berkualitas 3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	• Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,6 • Tingkat Kemiskinan (%) 7 - 8 • TPT 4,5-5 • Rasio Gini 0,379 - 0,382 • Indeks Modal Manusia 0,56 • Penurunan Emisi GRK (%) 38,6	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan 2. Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. Pembangunan Infrastruktur 5. Reformasi Birokrasi 6. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Pertumbuhan Ekonomi, berkisar 4,9 - 5,3 % • Tingkat Inflasi, berkisar 1,5 ± 3,5% • PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah), sebesar 52,6 - 54,6 Jt • Tingkat Pengangguran Terbuka, 3,8 - 3,5% • Tingkat Kemiskinan, 9,5 - 10% • Indeks Pembangunan Manusia, 72,49 • Indeks Gini, 0,282 - 0,293 • Nilai Tukar Petani, 109 - 110 • Pertumbuhan PAD, 2,0 • Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, 78,0% • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 13	1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah yang berorientasi Nasional dan Global 2. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi 3. Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah 6. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan masyarakat	• Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,7 - 5,00 % • Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 9,10 - 9,0% • Tingkat Pengangguran ditekan menjadi 4,5 - 4,3% • IPM naik menjadi 73,15 - 75,00 • Angka Harapan Hidup pada kisaran 74,35 - 74,55 tahun • Rata-Rata Lama Sekolah, 8,45 - 8,8 tahun • Angka harapan lama sekolah 12,95 - 13,00 • Gini Rasio pada kisaran 0,305-0,30 • PDRB per Kapita ADHB sebesar 33,5 - 34,50 juta rupiah per Kapita

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang dapat digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai target prioritas pembangunan daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

Oleh karena itu dalam menganalisis kerangka pendanaan daerah, maka terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan atau struktur APBD. Data-data berkaitan perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Adapun hasil analisis kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.01
Kerangka Pendanaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.

KODE	URAIAN	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
4	PENDAPATAN	1.250.420.328.517,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.894.817.517,00
4.1.1	Pajak Daerah	54.000.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	7.303.338.162,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	3.861.479.355,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.730.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.525.511.000,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.023.525.511.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	73.000.000.000,00
5	BELANJA	1.269.420.328.517,00
5.1	BELANJA OPERASI	932.790.310.778,00
5.1.1	Belanja Pegawai	621.563.170.696,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.431.145.682,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-
5.1.5	Belanja Hibah	23.795.994.400,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	139.613.901.023,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.318.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.763.650.166,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.946.698.280,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.574.178.087,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.011.374.490,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	194.016.116.716,00
5.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.130.333.816,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	187.885.782.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN	

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya.	25.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan prioritas merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Program dan prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, perkiraan capaian pembangunan tahun 2024 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026. Selain itu, program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan rencana perwujudan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2025.

Dalam penentuan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian program dan

kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

5.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Wajib Pelayanan

A. Dasar Pendidikan.

1. Program pengelolaan pendidikan.
2. Program pengembangan kurikulum.
3. Program pendidikan dan tenaga kependidikan.

B. Kesehatan.

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
4. *Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.*

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA).
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. *Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*
4. *Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah*
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
6. Program pengembangan permukiman.
7. Program penataan bangunan gedung.
8. *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*
9. Program penyelenggaraan jalan.
10. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*
11. Program penyelenggaraan penataan ruang.

D. Perumahan dan kawasan permukiman

1. Program pengembangan perumahan.
2. Program kawasan permukiman.
3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

E. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Program penanggulangan bencana.
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

F. Sosial.

1. Program pemberdayaan sosial.
2. Program rehabilitasi sosial.
3. Program perlindungan dan jaminan sosial.
4. *Program penanganan bencana*

5.2.2 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja.

1. Program perencanaan tenaga kerja.
2. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja.
3. Program penempatan tenaga kerja.
4. Program hubungan industrial.

B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Program perlindungan perempuan.
3. *Program peningkatan kualitas keluarga.*
4. *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.*
5. Program pemenuhan hak anak.
6. Program perlindungan khusus anak.

C. Pangan.

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
3. Program penanganan kerawanan pangan.
4. Program pengawasan keamanan pangan.

D. Pertanian

1. Program pengelolaan izin lokasi.

E. Lingkungan hidup.

1. *Program perencanaan lingkungan hidup*
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. *Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).*
4. *Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*
5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
8. Program pengelolaan persampahan.

F. Kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Program pendaftaran penduduk.
2. Program pencatatan sipil.
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*

G. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Program penataan desa
2. *Program peningkatan kerjasama desa*
3. Program administrasi pemerintahan desa.
4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1. Program pengendalian penduduk.
2. Program pembinaan keluarga berencana.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

I. Perhubungan

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

J. Komunikasi dan informatika.

1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Program pengelolaan aplikasi informatika.

K. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*
3. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

L. Penanaman modal.

1. Program pengembangan iklim penanaman modal.
2. Program promosi penanaman modal.
3. Program pelayanan penanaman modal.
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. *Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*

M. Kepemudaan dan olahraga

1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
3. *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*

N. Statistik

1. Program penyelenggaraan statistik sektoral.

O. Persandian

1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

P. Kebudayaan

1. Program pengembangan kebudayaan.
2. Program pengembangan kesenian tradisional.

Q. Perpustakaan

1. Program pembinaan perpustakaan.

R. Kearsipan.

1. Program pengelolaan arsip.
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

5.2.3 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan.

1. Program pengelolaan perikanan budidaya.
2. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Pariwisata

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
2. Program pemasaran pariwisata.
3. *Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif*

c. Pertanian

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
4. *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian*
5. Program penyuluhan pertanian.

d. Perdagangan.

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
2. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
3. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
4. *Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.*

e. Perindustrian.

1. Program perencanaan dan pembangunan industri.
2. *Program Pengendalian Izin Usaha Industri*
3. *Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*

f. Transmigrasi

- Program pembangunan kawasan transmigrasi.

5.2.4 Program dan Kegiatan Urusan Penunjang

- a) Sekretariat Daerah.
 - 1. Program administrasi umum
 - 2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - 3. Program perekonomian dan pembangunan.
- b) Sekretariat DPRD
 - 1. Program administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten.
 - 2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c) Perencanaan.
 - 1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
- d) Keuangan
 - 1. Program pengelolaan keuangan daerah.
 - 2. Program pengelolaan barang milik daerah.
 - 3. Program pengelolaan pendapatan daerah.
- e) Kepegawaian
 - Program kepegawaian daerah.
- f) Pendidikan dan pelatihan
 - Program pengembangan sumber daya manusia.
- g) Penelitian dan pengembangan
 - Program Penelitian dan pengembangan daerah.
- h) Pengawasan
 - 1. Program penyelenggaraan pengawasan.
 - 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

5.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Infrastruktur

- Upaya peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah

2) Pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan

- Revitalisasi/peremajaan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan, serta mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan terkait kemudahan investasi bagi para investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan

3) Peningkatan ketertiban dan keamanan

- memfasilitasi pihak aparat keamanan untuk memperbanyak membangun pos-pos keamanan di wilayah yang rawan dalam masalah keamanan.

4) Pendidikan

- Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)

5) Kesehatan

- meningkatkan akses pelayanan kesehatan, peningkatan status dan fasilitas RSUD maupun PUSKESMAS agar dapat memenuhi standar kualitas

6) Kemandirian pangan dan kesejahteraan petani

- Lahan pertanian harus terus diperluas dan yang sudah ada tidak boleh dialihfungsikan menjadi peruntukan lain.
- menjamin kelancaran distribusinya dan stabilitas harga yang menguntungkan petani.

7) Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Penanaman hutan kembali karena degradasi hutan
- Memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS)

- Menyelamatkan hutan dengan skema perhutanan sosial. Masyarakat perlu diberi akses untuk mengelola hutan sembari melestarikannya.
- 8) Pembangunan Pariwisata
 - 9) Investasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - 10) Revitalisasi koperasi, akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM, serta menjalankan fungsi intermediasi perbankan
 - 11) Pengembangan industri berbasis agro yaitu menjamin kelancaran distribusi dan stabilitas harga yang menguntungkan petani.

Tabel 5.02
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1 1	Pendidikan	4	13	55	431.023.485.511
1 1 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	13	55	431.023.485.511
1 2	Kesehatan	5	24	88	223.179.612.805
1 2 01	Dinas Kesehatan	5	24	88	223.179.612.805
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	23	67	75.824.420.224
1 3 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	12	23	67	75.824.420.224
1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	4	9	3.100.000.000
1 4 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	4	9	3.100.000.000
1 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	22	53	19.780.664.200,00
1 5 01	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	14.027.469.919,00
1 5 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	12	20	5.753.194.281,00
1 6	Sosial	5	14	36	6.935.193.576,00
1 6 01	Dinas Sosial	5	14	36	6.935.193.576,00
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
2 7	Tenaga Kerja	4	9	16	3.801.361.181,00
2 7 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	9	16	3.801.361.181,00

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
2 8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	18	34	5.668.152.820
2 8 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	18	34	5.668.152.820
2 9	Pangan	5	13	33	4.187.425.978,00
2 9 01	Dinas Ketahanan Pangan	5	13	33	4.187.425.978,00
2 11	Lingkungan Hidup	7	15	31	6.856.459.058,00
2 11 01	Dinas Lingkungan Hidup	7	15	31	6.856.459.058,00
2 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	5.801.713.185,00
2 12 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	5.801.713.185,00
2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	46	7.116.990.066,00
2 13 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5	11	46	7.116.990.066,00
2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	5.547.560.000
2 14 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	5.547.560.000
2 15	Perhubungan	2	15	39	16.898.578.738,00
2 15 01	Dinas Perhubungan	2	15	39	16.898.578.738,00
2 16	Komunikasi dan Informatika	3	10	26	7.276.573.705,00
2 16 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	10	26	7.276.573.705,00
2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	10	20	5.287.626.216
2 17 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	10	20	5.287.626.216
2 18	Penanaman Modal	6	12	28	5.148.982.901,00
2 18 01	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal	6	12	28	5.148.982.901,00
2 19	Kepemudaan dan Olahraga	4	14	28	6.529.438.817
2 19 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4	14	28	6.529.438.817
2 20	Statistik	1	1	1	1.003.000
2 20 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1.003.000
2 21	Persandian	1	2	5	1.102.000
2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2	5	1.102.000
2 22	Kebudayaan	2	4	5	1.559.826.000
2 22 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	4	5	1.559.826.000
2 23	Perpustakaan	2	10	22	4.002.250.520
2 23 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	10	22	4.002.250.520
2 24	Kearsipan	2	3	4	292.402.300
2 24 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	3	4	292.402.300
3	URUSAN PILIHAN				

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
3 25	Kelautan dan Perikanan	3	14	30	5.090.175.323,00
3 25 01	Dinas Perikanan	3	14	30	5.090.175.323,00
3 26	Pariwisata	3	4	6	661.395.600
3 26 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3	4	6	661.395.600
3 27	Pertanian	6	24	60	15.353.323.871,00
3 27 01	Dinas Pertanian	6	24	60	15.353.323.871,00
3 28	Kehutanan				
3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral				
3 30	Perdagangan	4	4	6	594.818.400
3 30 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	4	6	594.818.400
3 31	Perindustrian	3	3	5	1.350.000.000
3 31 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	3	5	1.350.000.000
3 32	Transmigrasi	1	1	3	200.806.000
3 32 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	3	200.806.000
4	UNSUR PENDUKUNG				
4 1	Sekretariat Daerah	3	20	66	38.555.371.612,00
4 1 01	Sekretariat Daerah	3	20	66	38.555.371.612,00
4 2	Sekretariat DPRD	2	17	73	50.043.583.495,00
4 2 01	Sekretariat DPRD	2	17	73	50.043.583.495,00
5	UNSUR PENUNJANG				
5 1	Perencanaan	3	15	54	7.794.765.329,00
5 1 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	54	7.794.765.329,00
5 2	Kuangan	5	20	98	243.979.732.603,00
5 2 02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	67	234.523.890.870,00
5 2 03	Badan Pendapatan Daerah	2	7	31	9.455.841.733,00
5 3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	13	33	10.010.619.323
5 3 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	33	10.010.619.323
5 4	Penelitian dan Pengembangan	1	2	6	1.259.184.000
5 4 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	6	1.259.184.000
6	UNSUR PENGAWASAN				
6 1	Inspektorat	3	11	29	14.317.951.294,00
6 1 01	Inspektorat Kabupaten	3	11	29	14.317.951.294,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 1	Kecamatan	53	101	198	27.384.953.158,00
7 1 01	Kecamatan Pringsewu	5	11	22	10.014.019.396,00

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
	Kecamatan Gadingrejo	6	13	27	2.748.806.625,00
	Kecamatan Pagelaran	6	12	23	2.224.688.639,00
	Kecamatan Banyumas	6	9	15	2.061.985.044,00
	Kecamatan Sukoharjo	6	11	21	2.076.984.693,00
	Kecamatan Adiluwih	6	11	23	2.365.367.481,00
	Kecamatan Pagelaran Utara	6	12	23	1.782.244.690,00
	Kecamatan Ambarawa	6	11	23	1.848.397.393,00
	Kecamatan Pardasuka	6	11	21	2.262.459.197,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8 1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	26	7.002.825.708,00
8 1 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	26	7.002.825.708,00
JUMLAH					1.269.420.328.517,00

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil/pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau tujuan dan sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu kegiatan, program, atau tujuan dan sasaran. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa kegiatan, program, atau tujuan dan sasaran. Indikator, dalam hal ini menyajikan informasi yang konkret dan terukur yang membantu dalam evaluasi pencapaian dan efektivitas suatu inisiatif. Dengan bersifat kuantitatif atau kualitatif, indikator kinerja menjadi instrumen yang signifikan dalam memantau dan mengelola hasil, serta memberikan landasan bagi pengambilan keputusan atau penyusunan program ke depannya lebih akurat.

Dalam pembangunan daerah, indikator kinerja berperan sangat penting sebagai parameter dan kerangka kerja evaluatif yang obyektif untuk mengukur dan mengetahui pencapaian tujuan pembangunan. Indikator kinerja melibatkan berbagai aspek dalam penyediaan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan, memfasilitasi perbaikan dan penyesuaian kebijakan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan merinci capaian dan dampak kebijakan, indikator kinerja mendorong adanya perencanaan yang lebih terarah, implementasi yang terukur, serta evaluasi yang mendalam terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Tentunya, hal ini akan memberikan pemahaman yang holistik terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selain itu, indikator kinerja juga membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan merumuskan keputusan strategis yang didasarkan pada data dan fakta. Dengan demikian, indikator kinerja daerah menjadi instrumen kunci dalam mendukung perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta menjadi landasan bagi pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tahapan dan kriteria penetapan indikator kinerja melibatkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tahap awal mencakup identifikasi tujuan pembangunan daerah yang jelas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berikutnya, penetapan indikator dilakukan dengan merinci parameter yang terkait dengan masing-masing tujuan tersebut. Kriteria penetapan indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah mencakup kejelasan definisi, kesesuaian dengan tujuan, keterukuran, keterkaitan dengan kebijakan, serta kemampuan untuk diukur secara objektif dan reliabel atau yang biasa dikenal dengan kriteria SMART. Adapun kriteria SMART antara lain sebagai berikut.

1. *Spesific*: Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*: Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Penjabat Bupati Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023- 2026. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah yang mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026. Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada IKU daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target 2025
A Indikator Tujuan			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,01
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,15 – 75,00
3.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,7-5,0
4.	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Indeks	70,20
5.	Indeks rasa aman	Indeks	0,070
B Indikator Sasaran			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,01
2.	Nilai SAKIP	Nilai	72,01
3.	Opini BPK RI	Opini	WTP
4.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,60
5.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,660
6.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,786
7.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,81
8.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55,00
9.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,79
10.	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	4,5-4,3
11.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,7-5,0

No.	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target 2025
12.	Angka kemiskinan	Persen	9,10 - 9,0
13.	Gini Rasio	Indeks	0,305 – 0,300
14.	Indeks Daya Saing Daerah.	Indeks	3,78
15.	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	Indeks	100
16.	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	1,14
17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,35
18.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	61,85
19.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92,50

Sumber: RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Unsur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja makro tersebut meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Kemudian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Dalam penetapan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Melihat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang telah dianalisis dimana telah dirumuskan secara runtut dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Memetakan alat ukur keberhasilan urusan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Alat ukur tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perumusan indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Perumusan program pembangunan dalam mencapai keberhasilan. Nomenklatur program menggunakan nomenklatur yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi 2 (dua) indikator pada akhir periode masa jabatan, salah satunya Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator atau ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, baik yang terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maupun urusan

pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Target ukuran IKK merupakan sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Indikator Kinerja Kunci secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Kunci terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, sebagaimana di uraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,7-5,0
2	Gini Rasio	Indeks	0,305 – 0,300
3	PDRB Per Kapita	Juta	33,50-34,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,15 – 75,00
5	Angka kemiskinan	Persen	9,10 - 9,0
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5-4,3
II	Aspek Pelayanan Umum		
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Indeks pendidikan	Indeks	0,66
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,45 - 8,8
1.3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,95-13,00
2	Kesehatan		
2.1	Indeks kesehatan	Indeks	0,786
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,07
2.5	Angka prevalensi stunting	Persen	3,30
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah	Persen	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
3.2	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	81,00
3.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	84,00
3.4	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	96,00
3.5	Rasio Konektivitas Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Km	434,2
3.6	Persentase Gedung Negara yang terpelihara dengan baik	Persen	85,00
3.7	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	38.82
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman		
4.1	Persentase Penurunan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persen	1,14
4.2	Persentase Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Yang Tertata	Persen	1,14
4.3	Persentase Perumahan Sehat dan Aman Yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Persen	37,50
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.		
5.1	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persen	50,22
5.2	Persentase penanganan gangguan K3	Persen	80,50
5.3	Tingkat Respon Time	Persen	100,00
6	Sosial		
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	49,00
6.2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Persen	62,25
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	69,75
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,79
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,82
3	Pangan		
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,4
3.2	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Persen	14,00
4	Pertanahan		
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah	Persen	93,60
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,37
5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,20
5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	31,81
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Persentase Kepemilikan Dokumen	Persen	98,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
	Kependudukan		
6.2	Persentase Kepemilikan KTP El, Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	98,75
6.2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Persen	62,25
6.3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th), Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian	Persen	98,00
6.4	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data / Dokumen Kependudukan	Persen	85,00
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	82,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Cakupan pekon mandiri	Pekon	13
7.2	Cakupan pekon berkembang ke maju	Pekon	29
7.3	Cakupan pekon maju ke mandiri	Pekon	84
7.4	Persentase Badan usaha milik pekon	Persen	60,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Angka ketergantungan penduduk	Rasio	46,30
8.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,76
9	Perhubungan		
9.1	Persentase penurunan titik rawan kecelakaan	Persen	79,75
9.2	Persentase sarpras jalan yang berfungsi dengan baik	Persen	81,00
9.3	Persentase Uji KIR Kendaraan	Persen	78,50
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik,	Indeks	63,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.1	Jumlah Koperasi Aktif	Persen	106,00
11.2	Persentase Peningkatan UMKM	Persen	0,50
12	Penanaman Modal		
12.1	Nilai investasi daerah	Rp. Milyar	5.956
12.2	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	9,10
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95,00
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55,00
13.1	Jumlah atlit berprestasi	Atlet	27
14	Statistik		
14.1	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	Unit Kerja	22
15	Persandian		
15.1	Cakupan Pengamanan Informasi	Persen	91,89
16	Kebudayaan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
16.1	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Persen	52,50
17	Perpustakaan		
17.1	Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	33,00
17.2	Nilai pembangunan literasi masyarakat	Persen	5,40
18	Kearsipan		
18.1	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan perangkat daerah, kelurahan dan pekon	Nilai	CC
C	Urusan Pilihan		
1	Perikanan dan Kelautan		
1.1	PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4,90
1.2	Indeks berantai produksi perikanan budidaya	Indeks	104,18
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapi/th	29,03
2	Pariwisata		
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	55.000
3	Pertanian		
3.1	Kontribusi PDRB sektor pertanian	Persen	19,22
3.2	Indeks Pertanaman	Indeks	1,83
3.3	Produksi hasil peternakan (daging)	Ton	4.233
3.4	Produksi hasil peternakan (telur)	Ton	8.324
4	Perdagangan		
4.1	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Persen	14,18
5	Perindustrian		
5.1	Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	15,3
5.2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	Persen	0,20
6	Transmigrasi		
6.1	Persentase warga transmigran yang produktif	Persen	50,00
D	Urusan Penunjang		
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Persen	76,00
1.2	Capaian kinerja sasaran daerah	Persen	97,75
1.3	Capaian kinerja sasaran perangkat daerah	Persen	97,75
1.4	Keselaran perencanaan pembangunan daerah	Persen	97,75
2	Keuangan		
2.1	Indeks tata kelola keuangan dan aset daerah	Persen	83,50
2.2	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Persen	74,00
2.3	Indeks pengelolaan asset daerah	Persen	93,00
2.4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,95
2.5	Persentase peningkatan pajak daerah	Persen	12,00
2.6	Persentase peningkatan retribusi daerah	Persen	2,00
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
3.1	Indeks Sistem Merit	Poin	0,60
3.2	Indeks Profesional ASN	Persen	37,60
4	Penelitian dan Pengembangan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
4.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,92
5	Pengawasan		
5.1	Nilai Maturitas SPIP	Level	3
5.2	Level APIP	Level	3
5.3	Persentase Nilai SAKIP OPD yang bernilai baik	Persen	100,00
6	Pemerintahan Umum		
6.1	Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100,00
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	100
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,78
3	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92,50
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	80,50
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,01
6	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,60
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,35
8	Indeks SPBE	Indeks	3,35
9	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,81
10	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	61,85

Sumber: RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026. RKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun ketiga atas RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, disusun dengan memperhatikan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Selain itu dapat disampaikan juga dalam penyusunan dokumen ini, masih berada di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian global dan nasional, yang juga turut berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan. Karena itu, ketika dalam proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD nanti, situasi ekonomi nasional sudah stabil, maka hal itu juga akan menjadi pedoman penting dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi terhadap target pendapatan dan belanja yang telah dirumuskan.

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Lampung. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. PRINGSEWU

TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						432.583.311.511,00							426.910.461.511,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						431.023.485.511,00							425.235.643.511,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						431.023.485.511,00							425.235.643.511,00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-			-	330.972.860.511,00						-	325.053.468.891,00	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-			-	530.133.600,00				Peningkatan kualitas hidup	-	-	548.394.300,00	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan					9 Dokumen	59.673.000,00	Kab. Pringsewu, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	-		Peningkatan kualitas hidup	-	59.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja					2 Laporan	115.813.600,00	Kab. Pringsewu, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	-		Peningkatan kualitas hidup	-	115.813.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	354.647.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	372.907.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	329.797.961.411,00				Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	323.884.601.091,00	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	329.314.579.961,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	323.398.579.641,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	466.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	468.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	17.181.450,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	17.181.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	124.108.000,00				Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	124.108.000,00	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					287 Orang	124.108.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	124.108.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	292.982.500,00				Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	282.280.500,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	12.245.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	12.245.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	60.704.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	66.754.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket	27.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	27.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	24.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	167.483.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	150.731.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	95.355.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	95.355.000,00	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	95.355.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	95.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	132.320.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	118.730.000,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	9 Unit	116.080.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	102.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	10 Unit	16.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	16.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	99.945.663.000,00			-		-	-	100.084.762.620,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	52.370.105.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	52.265.188.000,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	2 Ruang	438.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	438.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	1 Ruang	215.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	215.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	5 Unit	964.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	723.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	-	-	46 Paket	1.187.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.187.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	25 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	-	-	70 Peserta Didik	255.305.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	151 Orang	190.754.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	-	-	256 Satuan Pendidikan	59.834.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	59.834.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				256 Satuan Pendidikan	35.716.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.716.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				256 Orang	265.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar															
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	2.083.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.083.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				256 Orang	132.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		132.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	140.212.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				256 Orang	350.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		318.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				256 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		132.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	132.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		132.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				256 Komunitas	465.913.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	132.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		132.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				20 Buku	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				750 Paket	427.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		427.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	455.754.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		455.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	156.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		156.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				256 Orang	314.083.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				256 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		256.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				29 Ruang	6.256.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.256.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	400.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	29.559.439.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	30.542.601.620,00	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	534.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		534.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	793.579.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		837.620.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Ruang	4.117.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	789.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		789.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	169.256.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		169.256.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				30 Paket	1.184.625.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.194.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	225.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				70 Peserta Didik	233.075.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				27 Orang	46.142.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	19.733.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		19.733.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									-		-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	75.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				40 Paket	940.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1480 Orang	2.664.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.664.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	46.142.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				245 Satuan Pendidikan	175.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				245 Satuan Pendidikan	5.888.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.888.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				245 Orang	150.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	132.752.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				245 Orang	191.721.850,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		191.721.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	136.346.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		136.346.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	207.096.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		207.096.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				245 Komunitas	329.394.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	450.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.03	0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					2500 Paket	2.004.787.150,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.564.128.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.03	0046		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia					30 Paket	1.600.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.03	0047		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					245 Satuan Pendidikan	123.023.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		43.023.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2.026.226.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.826.027.100,00						
1	01	02	2.04	0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
						Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					9 Peserta Didik	1.708.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.708.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.04	0027		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	270.221.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		70.022.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.04	0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					9 Peserta Didik	47.405.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		47.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	82.550.000,00					-		75.000.000,00						
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	82.550.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	75.000.000,00						
1	01	04	2.01	0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Dokumen	32.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	04	2.01	0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
4	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-			-	22.412.000,00					-		22.412.000,00						
1	01	05	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	22.412.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	22.412.000,00						
1	01	05	2.02	0001		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					30 Dokumen	22.412.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.412.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.559.826.000,00							1.674.818.000,00						
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.559.826.000,00							1.674.818.000,00						
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.510.319.000,00					-		1.625.311.000,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	483.329.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	483.329.000,00		
2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																				
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					3 Objek	483.329.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		483.329.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	598.234.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	598.234.000,00		
2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																				
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					3 Objek	300.959.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.959.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																				
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					1 Laporan	297.275.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		297.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	428.756.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	543.748.000,00		
2 22 02 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi					40 Unit	428.756.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		543.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	49.507.000,00			-			-	49.507.000,00		
	2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	49.507.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	49.507.000,00		
2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																				
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					1 Objek	49.507.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		49.507.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
											191.850.962.805,00							186.976.005.000,00		
											191.850.962.805,00								186.976.005.000,00	
											191.850.962.805,00								186.976.005.000,00	
7	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				88 Skala	83.324.561.605,00			-			-	80.656.433.000,00		
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100 %	154.110.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	152.595.000,00		
1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	13.920.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		14.128.000,00	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					14 Dokumen	83.954.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		81.388.000,00	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	39.816.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		40.413.000,00	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	16.420.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		16.666.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			100 %	81.944.531.605,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	79.442.234.000,00		
1 02 01 2.02 0001 Penediaan Gaii dan Tunjangan ASN																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/bulan	81.611.723.605,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		79.079.587.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	308.520.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		337.995.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	24.288.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.652.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	6.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	6.597.000,00	
	1	02	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.597.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	61.115.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	62.031.000,00	
	1	02	01	2.05	0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.340.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	53.495.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		54.297.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	5.280.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.359.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	533.765.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	444.603.000,00	
	1	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.379.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.564.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	70.500.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		7.612.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.870.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		62.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.071.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		20.372.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	29.820.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		30.267.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	339.125.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		310.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	236.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	239.743.000,00	
	1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	236.200.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		239.743.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	388.340.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	308.630.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6628 Orang	225.135.039,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		228.512.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30527 Orang	42.660.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		43.299.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60840 Orang	155.669.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		158.004.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				261695 Orang	64.665.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		65.634.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55706 Orang	99.126.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.612.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79985 Orang	240.475.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		257.807.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus															
							Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5080 Orang	439.109.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		445.696.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				705 Orang	60.559.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		61.467.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5055 Orang	1.115.936.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.163.125.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6943 Orang	114.805.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		116.527.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	60.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		61.306.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.525.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	198.893.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		201.876.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	5.482.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			5.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	573.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			581.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					13 Dokumen	282.303.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			286.537.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					13 Dokumen	39.592.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			40.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	219.265.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			292.103.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					261695 Orang	55.878.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			56.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					705 Orang	102.507.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			104.044.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			7.105.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					7 Dokumen	915.885.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			985.448.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					4 Dokumen	20.734.902.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-		Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			16.985.926.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	8.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			8.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					19 Unit	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			6.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					2 Dokumen	65.000.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-			65.975.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	15.228.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.456.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	70.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		71.523.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	36.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		36.540.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1555 Orang	49.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		49.938.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				154 Orang	4.860.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		4.932.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10.335.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.490.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok															
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				3 Tatanan	90.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		53.998.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	143.668.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		145.823.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	56.060.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	56.900.000,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				13 Dokumen	56.060.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		56.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Rumah Sakit yang dibina	-			95 %	45.095.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	45.771.000,00	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				7 Unit	9.095.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.231.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				49 Unit	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.180.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				43 Unit	24.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		24.360.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-			92,30 %	5.689.953.600,00			-		-		5.843.101.000,00	
	1	02	03		2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-			100 %	18.500.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	18.777.000,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				50 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.777.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03		2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			92.3 %	105.364.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	106.942.000,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2.980.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.024.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	5.397.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	96.987.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		98.441.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03		2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			88.59 %	5.566.089.600,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.717.382.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				25 Orang	5.566.089.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.717.382.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-			80 %	101.116.000,00					-		102.630.000,00	
	1	02	04		2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			80 % 69 %	40.530.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	41.137.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	40.530.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		41.137.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04		2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			85 %	23.196.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	23.543.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	23.196.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.543.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki Sertifikat laik higiene sanitasi	-			60 %	9.840.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	9.987.000,00				
	1	02	04	2.04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	9.840.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.987.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-			60 %	9.950.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	10.099.000,00				
	1	02	04	2.05	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	9.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.099.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan post market Persentase pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	-			70 % 90 %	17.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	17.864.000,00				
	1	02	04	2.06	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				80 Unit	17.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		17.864.000,00	DINAS KESEHATAN			
11	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	362.188.900,00						-	408.971.000,00				
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dua usaha yg memanfaatkan CSR untuk program kesehatan	-			22 organisasi	39.350.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	41.350.000,00				
	1	02	05	2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	39.350.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		41.350.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye Germas yang terlaksana	-			3 kampanye	100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	141.440.000,00				
	1	02	05	2.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		141.440.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	222.838.900,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	226.181.000,00				
	1	02	05	2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				45 Dokumen	222.838.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		226.181.000,00	DINAS KESEHATAN			
					Puskesmas Banyuwilas						1.891.389.000,00						1.942.600.000,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.891.389.000,00										
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.891.389.000,00							1.942.600.000,00			
12	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	1.889.589.000,00				-	1.940.600.000,00			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	1.877.589.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	1.926.600.000,00			
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				369 Orang	9.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	12.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				353 Orang	35.574.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	38.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	79.725.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	83.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				265 Orang	7.650.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	8.500.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				387 Orang	600.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	800.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	254.161.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	270.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	9.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	29.574.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	31.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	151.350.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	153.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.233.230.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	1.250.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.650.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	1.800.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				41 Orang	300.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	500.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS		
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	38.475.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS			
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	27.900.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		29.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS			
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-				100 %	12.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	14.000.000,00				
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		14.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS			
13	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-				100 %	1.800.000,00					-	-	2.000.000,00				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-				988 UKBM	1.800.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	2.000.000,00				
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS			
					Puskesmas Pagelaran							2.516.487.000,00							2.606.480.000,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	2.606.480.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.516.487.000,00							2.606.480.000,00				
14	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-				74 %	2.516.487.000,00					-	-	2.606.480.000,00				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-				80 %	2.504.486.800,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	2.593.480.000,00				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				453 Orang	37.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		42.800.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				433 Orang	17.280.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.280.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3992 Orang	66.600.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		72.600.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				332 Orang	27.600.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.600.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				476 Orang	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.800.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	195.048.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		215.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	42.834.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		47.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	191.224.800,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		210.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1.787.950.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.800.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.400.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 Orang	1.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	99.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		110.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-		100 %	12.000.200,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	13.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	12.000.200,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	PUSKESMAS PAGELARAN
						Puskesmas Fajar Mulia					1.822.080.958,00							1.926.425.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.822.080.958,00							1.926.425.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.822.080.958,00							1.926.425.000,00	
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-		74 %	1.822.080.958,00						-	1.926.425.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-		80 %	1.810.066.958,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.913.425.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			258 Orang	54.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		59.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			246 Orang	9.072.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.900.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2295 Orang	45.600.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		50.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			191 Orang	25.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		28.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA
	1	02	02	2.02	0012	Penezelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denean Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Orang Terdaftar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				271 Orang	150.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	201.489.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		220.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	17.850.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	38.844.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		42.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	99.375.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		109.375.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.201.636.958,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.250.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		19.800.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	150.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		250.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		11.800.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	87.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		95.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.014.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00			
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	12.014.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA		
						Puskesmas Gadingrejo															3.561.500.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															3.561.500.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															3.561.500.000,00	
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	3.492.176.759,00					-		3.539.500.000,00			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	3.465.371.659,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.511.500.000,00			
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				929 Orang	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO		
1	02	02	2.02	0002		Penzeelolan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	19.500.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		21.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8136 Orang	73.800.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		75.300.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				676 Orang	20.100.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		21.600.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				977 Orang	450.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		600.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	296.894.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	14.550.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		16.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	35.625.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		38.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	212.649.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		220.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.677.967.759,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.700.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	17.010.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	300.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		400.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				977 Orang	525.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		600.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	31.575.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		33.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	50.925.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		52.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	26.805.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		28.000.000,00	
1	02	02	2.03	0002		Peneelolan Sistem Informasi Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	26.805.100,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		28.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO					
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	20.925.000,00			-		-	22.000.000,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	20.925.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	22.000.000,00							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	20.925.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO					
						Puskesmas Adiluwih						1.839.646.462,00							1.897.915.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.839.646.462,00							1.897.915.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.839.646.462,00							1.897.915.000,00						
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	1.830.046.462,00						-	1.887.315.000,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	1.817.916.362,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.872.315.000,00						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				338 Orang	29.760.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		39.760.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	35.280.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		45.280.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2967 Orang	83.400.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		85.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				247 Orang	9.300.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				355 Orang	600.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		700.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	274.610.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		276.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.600.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	40.740.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		42.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	178.224.900,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		180.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.077.666.462,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.100.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.500.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				355 Orang	375.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		475.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	48.960.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		50.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.130.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	
3	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	12.130.100,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	9.600.000,00			-			-	10.600.000,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	9.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.600.000,00	
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.600.000,00	PUSKESMAS ADILUWIH
							Puskesmas Pringsewu					3.243.675.000,00							3.370.800.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.243.675.000,00						3.370.800.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.243.675.000,00						3.370.800.000,00	
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	3.241.875.000,00						-	3.365.800.000,00	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang terlaksana	-			80 %	18.900.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.900.000,00	
1	02	02	2.01	0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Unit	18.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.900.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	3.194.485.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.306.400.000,00	
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				766 Orang	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				731 Orang	46.320.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		51.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0005		Penzeelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Penderitaan Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6680 Orang	37.050.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		44.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				555 Orang	9.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		14.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				806 Orang	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.600.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	287.434.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		289.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4.725.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	34.791.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	182.925.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		188.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.445.165.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.500.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	600.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	900.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.800.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	99.975.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		110.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	28.490.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	35.500.000,00		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	28.490.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	1.800.000,00					-	-	5.000.000,00		
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	1.800.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
						Puskesmas Ambarawa					2.745.133.143,00							3.281.624.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.745.133.143,00							3.281.624.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.745.133.143,00							3.281.624.000,00		
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-		74 %	2.745.133.143,00			-			-	3.281.624.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-		80 %	2.733.093.143,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	3.241.624.000,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				622 Orang	24.624.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		34.624.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		592 Orang	12.567.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		5462 Orang	93.600.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		103.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		454 Orang	450.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		35.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		655 Orang	2.700.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		1 Dokumen	290.557.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		400.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		1 Dokumen	13.650.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		1 Dokumen	11.586.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-		1 Dokumen	151.500.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		1 Dokumen	1.934.660.143,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.000.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		1 Orang	6.750.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA	
	1	02	02	2.02	0046	Peneleloalan upaya kesehatan ibu dan Anak														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	175.449.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		250.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA					
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.040.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	40.000.000,00						
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	12.040.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA					
							Puskesmas Sukoharjo					3.194.130.964,00							3.258.600.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		3.258.600.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		3.258.600.000,00	
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	3.184.506.064,00					-		3.247.600.000,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	3.168.905.964,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	3.231.600.000,00						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				855 Orang	57.600.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		67.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				817 Orang	7.020.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				774 Orang	68.700.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		78.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3743 Orang	10.500.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7458 Orang	2.400.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.500.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	368.118.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		370.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	14.511.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		16.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	125.325.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		128.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.374.076.964,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.400.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO					
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.600.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				899 Orang	6.300.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.500.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	92.955.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Meneyeleenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	15.600.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	16.000.000,00		
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	15.600.100,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		16.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	9.624.900,00					-	-	11.000.000,00		
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	9.624.900,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	11.000.000,00		
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	9.624.900,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		11.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO	
							Puskesmas Bandung Baru					1.240.633.544,00							1.368.500.000,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.240.633.544,00							1.368.500.000,00		
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	1.223.677.544,00					-	-	1.348.500.000,00		
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	1.211.677.444,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.333.500.000,00		
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				278 Orang	36.000.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		41.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				265 Orang	34.560.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2444 Orang	36.000.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		41.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				203 Orang	15.300.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				292 Orang	450.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	152.896.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		175.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	11.775.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	34.668.900,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	159.975.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		175.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	618.437.544,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		650.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	6.300.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	225.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		500.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	19.050.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	86.040.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.000.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	15.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12.000.100,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	16.956.000,00					-	-	20.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	16.956.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	20.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	16.956.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU
						Puskesmas Bumi Ratu						1.791.273.217,00							1.834.900.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.791.273.217,00							1.834.900.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.791.273.217,00							1.834.900.000,00	
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	1.790.028.217,00						-	1.831.150.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	1.777.825.217,00				Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.816.150.000,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					434 Orang	41.250.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		43.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					414 Orang	8.685.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3816 Orang	67.350.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		70.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					317 Orang	21.825.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					456 Orang	1.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	211.634.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		214.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	6.525.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.750.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	35.097.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		38.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	145.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		148.750.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1.100.909.217,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Bumi Ratu	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.100.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	450.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.850.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					456 Orang	2.100.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.800.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	25.350.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		28.500.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					1 Dokumen	109.950.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		120.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatorif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatorif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.203.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	
1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	12.203.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	1.245.000,00					-		3.750.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	1.245.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.750.000,00	
1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	1.245.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.750.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU
						Puskesmas Rejosari						2.506.510.211,00							2.927.700.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.506.510.211,00							2.927.700.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.506.510.211,00							2.927.700.000,00	
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	2.503.480.211,00					-		2.914.700.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.478.238.211,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.879.700.000,00	
1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					644 Orang	2.100.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					615 Orang	4.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		16.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					580 Orang	48.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		68.300.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang	10.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.500.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2805 Orang	1.050.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	258.057.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		300.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		19.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	36.933.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		46.900.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	284.625.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		484.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.766.449.211,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.800.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	12.474.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	1.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		11.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	21.150.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		31.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	18.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		28.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	25.242.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.000.000,00	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	25.242.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	3.030.000,00			-		-		13.000.000,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	3.030.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.030.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
						Puskesmas Wates						2.518.465.617,00							2.729.000.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.518.465.617,00							2.729.000.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.518.465.617,00							2.729.000.000,00	
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	2.503.225.617,00					-		2.709.000.000,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.491.171.517,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.694.000.000,00	
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				403 Orang	11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0002		Penzelol														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	18.480.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3527 Orang	74.400.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		80.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				293 Orang	36.600.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				425 Orang	675.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	165.141.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		200.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	7.050.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	47.481.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		55.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	213.117.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		250.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.822.062.617,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.900.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	675.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	11.634.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	76.935.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		80.000.000,00	PUSKESMAS WATES
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.054.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	15.000.000,00	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12.054.100,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	PUSKESMAS WATES

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	15.240.000,00					-	-	20.000.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	15.240.000,00		-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	20.000.000,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	15.240.000,00		Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			20.000.000,00	PUSKESMAS WATES	
						Puskesmas Pardasuka						2.506.123.125,00							2.597.999.400,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
												2.506.123.125,00							2.597.999.400,00		
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74 %	2.506.123.125,00					-	-	2.597.999.400,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.494.020.125,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	2.584.686.100,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				594 Orang	16.491.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			18.491.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				567 Orang	4.752.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			5.227.200,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5277 Orang	71.625.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			78.787.500,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				438 Orang	34.125.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			37.537.500,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	600.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			660.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	281.360.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			309.577.400,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	30.825.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			33.907.500,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	16.305.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			17.935.500,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	217.200.000,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			238.920.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.781.062.125,00		Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			1.800.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1.950.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.145.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					625 Orang	750.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		825.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									-					
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									-					
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		4.950.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									-					
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	32.475.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		35.722.500,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	12.103.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.313.300,00	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									-					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	12.103.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.313.300,00	PUSKESMAS PARDASUKA
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						78.924.420.224,00							84.319.054.228,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						78.924.420.224,00							84.319.054.228,00	
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						75.824.420.224,00							80.740.834.528,00	
34	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	11.800.000.277,00			-				-	11.663.049.112,00
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	379.099.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	180.909.000,00	
1	03	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah								-					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	223.536.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									-					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	32.388.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		32.388.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									-					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	27.257.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		27.257.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									-					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	27.290.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		27.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD									-					
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	27.265.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		27.265.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	41.363.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		43.173.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	10.215.888.777,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	10.226.962.112,00	
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaii dan Tunjangan ASN									-					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	9.360.246.777,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		9.360.120.112,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42 Dokumen	850.460.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		861.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.182.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		5.182.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	621.385.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	665.358.500,00					
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.422.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		7.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	116.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		174.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	103.180.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		137.685.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	44.466.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		41.101.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	306.517.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		262.472.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	119.095.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	150.911.500,00					
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.420.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		128.236.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	22.675.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		22.675.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	464.532.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	438.908.000,00					
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	121.170.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		100.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	03	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	343.362.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		338.168.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
35	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	9.656.276.000,00					-	-	12.711.903.600,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	957.946.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	3.252.145.600,00	
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,05 KM	44.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		2.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya														
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				2 Unit	707.525.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	206.171.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		117.145.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.698.330.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	9.459.758.000,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,6 KM	815.925.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
							yang Ditingkatkan				1 KM	1.309.425.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,65 KM	2.596.211.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		4.115.367.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				4 Bendung	2.291.816.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		2.090.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				71 KM	1.022.030.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.096.089.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	662.923.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		728.301.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
36	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	2.125.171.000,00					-	-	2.753.965.500,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.125.171.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	2.753.965.500,00	
	1	03	03	2.01	0024	Pembiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penediaan Air Minum (SPAM)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150 Orang	144.964.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		102.622.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	310.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		121.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																				
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				6 Liter/Detik	1.110.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.914.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																				
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	560.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		616.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
37	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	1.030.984.000,00					-		1.756.291.900,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.030.984.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.756.291.900,00	
1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																				
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	785.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.485.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																				
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				100 Orang	135.846.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		150.063.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 04 2.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	110.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		121.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
38	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	1.215.102.000,00					-		834.784.500,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.215.102.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		834.784.500,00	
1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																				
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	560.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		616.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 05 2.01 0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																				
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Orang	144.964.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		97.555.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																				
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	510.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		121.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
39	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	3.405.207.000,00					-		872.350.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.405.207.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	872.350.600,00	
1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																				
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					20000 M	610.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		407.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 06 2.01 0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan																				
						Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi					500 M	2.085.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		421.121.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																				
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun					1 Dokumen	710.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		44.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
40	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	768.115.900,00						-	1.960.095.417,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	768.115.900,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	1.960.095.417,00	
1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala					3 Bangunan Gedung	260.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		286.114.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	111.968.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.234.741.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																				
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya					300 Orang	110.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		146.569.417,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																				
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					46 Dokumen	286.009.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		292.670.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
41	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	8.726.069.000,00						-	8.730.225.900,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.726.069.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	8.730.225.900,00	
1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																				
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					9 Kawasan	8.726.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		8.730.225.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
42	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	34.597.495.299,00						-	37.345.612.999,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	34.597.495.299,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	37.345.612.999,00	
1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					8 Dokumen	1.028.820.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.010.643.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				5 KM	698.205.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DBH SAWIT	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.027.185.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun				0,25 KM	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.408.779.888,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	26.193.982.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DBH SAWIT	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		31.521.195.802,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				689,52 KM	1.010.046.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.161.552.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	5.666.442.099,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.216.255.659,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	749.999.748,00			-		-		737.555.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	654.999.748,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	500.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				21` Lembaga	204.999.748,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	450.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	50.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	45.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	187.555.000,00	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				3 Lembaga	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				21 Badan Usaha	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.555.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
44	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	1.750.000.000,00					-		1.375.000.000,00	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	839.760.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		571.491.800,00	
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	839.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		571.491.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	751.153.300,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		596.775.630,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				20 Dokumen	552.551.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		389.664.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				20 Layanan	101.190.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		104.368.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				20 Sistem Informasi	97.411.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		102.743.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	159.086.700,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		206.732.570,00	
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	159.086.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		206.732.570,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.100.000.000,00							3.578.219.700,00	
45	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	207.881.000,00					-		269.773.900,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	207.881.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		269.773.900,00	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	207.881.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		269.773.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
46	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	862.071.000,00					-		952.705.600,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	666.412.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		733.053.200,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	408.162.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		448.978.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	258.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		284.075.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	195.659.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		219.652.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	-	-	12 Laporan	195.659.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	219.652.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
47	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	-	2.030.048.000,00						-	-	2.355.740.200,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	-	2.030.048.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	2.355.740.200,00		
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	-	-	1 Dokumen	309.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	340.395.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-	-	-	7 Lokasi	1.635.969.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	1.799.565.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	-	-	10 Laporan	84.629.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	215.779.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						5.753.194.281,00							6.239.557.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.753.194.281,00							6.239.557.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.753.194.281,00							6.239.557.000,00	
48	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	5.449.395.281,00						-	-	5.934.557.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	16.205.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	kantor BPBD	-	-	30.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	4 Dokumen	8.120.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	kantor BPBD	-	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	5 Laporan	8.085.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	kantor BPBD	-	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	4.817.143.781,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	administrasi keuangan	-	-	5.200.000.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	792 Orang/bulan	4.684.790.281,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	administrasi keuangan	-	5.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	150 Dokumen	125.820.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	administrasi keuangan	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	6.533.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	administrasi keuangan	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	219.167.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	sarana dan prasarana BPBD	-	-	380.557.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	16 Paket	3.416.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	sarana dan prasarana BPBD	-	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	68.580.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		-	110.636.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Masyarakat	-	100.000.000,00				
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				7 Dokumen	47.756.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				25 Orang	62.880.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
50	1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-		-	89.820.000,00						-	30.000.000,00				
	1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		-	89.820.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	30.000.000,00				
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				25 Orang	89.820.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					14.027.469.919,00							14.728.864.415,00				
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.027.469.919,00							14.728.864.415,00				
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.027.469.919,00							14.728.864.415,00				
51	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	13.356.147.919,00						-	13.960.976.315,00				
	1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	28.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	29.400.000,00				
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		14.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		14.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	12.529.632.519,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	13.099.957.415,00				
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				288 Orang/bulan	12.297.202.519,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.857.795.915,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	223.430.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		232.711.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90.492.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	95.016.600,00				
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	90.492.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		95.016.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.395.500,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	254.494.800,00				
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.730.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	106.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		81.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	30.626.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		32.101.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				222 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		25.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	103.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		108.573.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.200.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	24.255.000,00				
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	21.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.255.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.750.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	51.187.500,00				
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		1.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	47.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		50.137.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	366.677.900,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	406.665.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	311.920.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		297.381.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	4.845.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.284.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.912.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
52	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	671.322.000,00			-		-	-	767.888.100,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	347.485.300,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	364.859.565,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				18 Dokumen	51.296.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		53.860.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	73.822.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		77.513.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				930 Orang	85.213.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		89.473.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				7 Dokumen	25.872.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		27.165.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				18 Dokumen	4.961.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.209.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					5 laporan	88.595.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		93.025.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					12 Laporan	15.725.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		16.512.090,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					16 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	-	-	168.384.200,00				-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	176.803.410,00			
1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 Laporan	61.340.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		64.407.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					20 Laporan	84.144.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		88.351.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4 Laporan	22.900.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.045.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	155.452.500,00				-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	226.225.125,00			
1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda					4 Laporan	155.452.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		226.225.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
												6.935.193.576,00									6.867.548.779,00	
												6.935.193.576,00									6.867.548.779,00	
												6.935.193.576,00									6.867.548.779,00	
53	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	3.621.394.776,00						-		3.669.250.029,00			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	16.500.000,00				-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	20.500.000,00			
1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																						
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL		
1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.500.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.848.034.476,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.875.187.029,00					
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.664.874.476,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.691.387.029,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	179.360.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.800.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	6.500.000,00					
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.500.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	10.000.000,00					
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	304.940.300,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	319.000.000,00					
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.006.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	72.129.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.804.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	27.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	177.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	100.000.000,00					
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	75.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.900.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	60.000.000,00					
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	49.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	4.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	306.020.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	278.063.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	245.420.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		238.810.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	47.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		26.553.000,00	DINAS SOSIAL
54	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	777.241.000,00					-	-	938.268.750,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	777.241.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	938.268.750,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				131 Orang	395.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		440.228.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	39.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		42.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	298.791.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		400.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	44.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
55	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	360.507.300,00					-	-	211.350.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	354.507.300,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	205.350.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				66 Orang	66.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		65.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	30.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	229.307.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Lavanan Data dan Pengaduan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	28.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			6.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	6.000.000,00		
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL	
56	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			2.059.865.500,00						-	1.923.680.000,00		
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			2.059.865.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	1.923.680.000,00		
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	115.821.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				100 Keluarga	1.620.685.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		1.700.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	270.143.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	53.214.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		58.680.000,00	DINAS SOSIAL	
57	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			116.185.000,00						-	125.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			14.500.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.000.000,00		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	7.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	7.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			101.685.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	101.685.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					4.002.167.181,00					4.267.769.000,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.801.361.181,00					4.112.133.000,00				
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.801.361.181,00					4.112.133.000,00				
58	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-		88 Skala	3.311.361.181,00					-		3.548.599.000,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-		5 Dokumen	10.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	11.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.828.860.181,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	3.075.165.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.663.780.181,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.873.483.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	160.080.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		195.618.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.064.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	222.609.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	170.432.000,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.646.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.171.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		54.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		7.615.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		37.595.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	128.963.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		65.647.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	139.742.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	106.245.000,00	
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	8.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		4.245.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	131.642.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		102.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.660.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	54.780.000,00	
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	15.660.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		54.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	94.490.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	130.977.000,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	94.490.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		130.977.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
59	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	400.000.000,00					-	-	450.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	400.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	450.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					320 Orang	400.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
60	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	50.000.000,00					-	-	54.235.000,00	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	54.235.000,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					1100 Orang	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		54.235.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
61	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	40.000.000,00					-	-	59.299.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	59.299.000,00	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		59.299.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						200.806.000,00							155.636.000,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						200.806.000,00							155.636.000,00	
62	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	200.806.000,00					-	-	155.636.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.806.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	155.636.000,00	
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					6 Kepala Keluarga	200.806.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		155.636.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						11.215.712.820,00							12.207.993.688,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.215.712.820,00							12.207.993.688,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.668.152.820,00							6.660.433.688,00	
63	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.144.255.820,00					-	-	5.136.536.588,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	26.541.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	33.273.720,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.864.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.641.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	27.033.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		64.464.711,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	16.517.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		19.932.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		29.892.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	46.428.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		87.474.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	139.010.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	94.460.000,00		
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		58.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		36.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	339.610.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	445.178.916,00		
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	272.710.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		382.722.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	31.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		18.364.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6.130.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.010.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.470.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		23.982.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
64	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-		-	888.969.300,00					-	-	888.969.300,00	
	2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	11.879.400,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	11.879.400,00	
2 08 02 2.01 0005 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																				
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				4 Orang	11.879.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		11.879.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	851.089.900,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	851.089.900,00	
2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	134.182.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		134.182.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Organisasi	716.907.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		716.907.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	26.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	26.000.000,00	
2 08 02 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				15 Orang	26.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
65	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-		-	113.673.700,00					-	-	113.673.700,00	
	2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	101.500.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	101.500.000,00	
2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	12.173.700,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	12.173.700,00	
2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 Orang	12.173.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.173.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
66	2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-		-	59.366.900,00					-	-	59.366.900,00	
	2	08	04	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	59.366.900,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	59.366.900,00	
2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	59.366.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		59.367.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
67	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	11.444.500,00			-		-	-	11.444.500,00		
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.444.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	11.444.500,00		
2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	11.444.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		11.444.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
68	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	127.834.600,00			-		-	-	127.834.600,00		
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	84.625.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	84.625.000,00		
2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	84.625.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		84.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	43.209.600,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	43.209.600,00		
2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17.499.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		17.499.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 08 06 2.02 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	25.710.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
69	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	322.608.000,00			-		-	-	322.608.000,00		
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	253.588.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	253.588.000,00		
2 08 07 2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																					
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				38 Layanan	253.588.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		253.588.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.020.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	69.020.000,00		
2 08 07 2.03 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																					
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				20 Orang	69.020.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												5.547.560.000,00								5.547.560.000,00	
70	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	975.847.000,00			-		-	-	975.847.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	14	02	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	24.768.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		24.768.000,00		
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.677.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.677.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
						Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				9 Kegiatan	9.091.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.091.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	951.079.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	951.079.000,00		
	2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
						Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	9.096.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.096.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				6 Unit	933.031.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		933.031.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB														
						Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	8.952.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		8.952.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
71	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-		-	2.155.824.000,00			-			-	2.155.824.000,00		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-		-	2.053.060.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	2.053.060.000,00		
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	207.730.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		207.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				20 Laporan	1.820.826.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.820.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	24.504.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		24.504.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-		-	47.563.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	47.563.000,00		
	2	14	03	2.02	0004	Pengergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				131 Orang	31.231.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		31.231.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																				
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				9 Organisasi	16.332.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		16.332.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.201.000,00			-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	55.201.000,00							
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																				
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2000 Laporan	55.201.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		55.201.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
72	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	2.415.889.000,00			-		-	-	2.415.889.000,00							
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	2.415.889.000,00			-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.415.889.000,00							
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																				
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	72.424.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		72.424.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																				
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	15.927.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan	-		15.927.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																				
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				2 Laporan	2.306.089.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.306.089.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																				
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				4 Kelompok	21.449.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungan Kemiskinan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		21.449.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
						DINAS KETAHANAN PANGAN																			4.331.489.378,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			4.331.489.378,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			4.331.489.378,00	
73	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.608.922.878,00			-		-	-	3.606.489.378,00							
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.010.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	13.010.000,00							
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN						
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-			2 Laporan	3.050.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.010.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.250.129.628,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	3.228.989.378,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	3.074.909.628,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.074.909.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	173.540.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		152.580.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1.680.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	6.500.000,00	
	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.113.250,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	146.360.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.406.250,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	17.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	45.758.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		17.160.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	35.299.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	63.060.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	63.060.000,00	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	22.260.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		22.260.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.070.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	148.570.000,00	
2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	150.070.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		148.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
74	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	50.000.000,00			-			-	50.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	50.000.000,00	
2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																				
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
75	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	339.840.100,00			-			-	425.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	169.356.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	220.000.000,00	
2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																				
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	22.280.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																				
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	109.170.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																				
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	37.906.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	93.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	120.000.000,00	
2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																				
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Ton	75.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	09	03	2.04	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-	-	77.484.100,00	-	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	85.000.000,00	-
2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	62.301.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																			
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	15.183.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
76	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	-	-	164.179.000,00					-	-	215.000.000,00	
	2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	-	-	-	100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	150.000.000,00	
2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																			
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	64.179.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	65.000.000,00	
2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	23.303.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																			
						Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12.876.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
77	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	-	-	24.484.000,00					-	-	35.000.000,00	
	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	24.484.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	35.000.000,00	
2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.514.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																			
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	8.685.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	10.285.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu											590.482.000,00								
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											590.482.000,00								
SEKRETARIAT DAERAH											590.482.000,00								
78	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	590.482.000,00					-	-	590.482.000,00	
	4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	590.482.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	590.482.000,00	
4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Peneadaan Barane dan Jasa																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Nasional	Daerah																		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	52.731.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.731.400,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12 Dokumen	399.652.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		399.652.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			300 Orang	138.098.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		138.098.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					523.553.000,00						523.553.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					523.553.000,00						523.553.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					523.553.000,00						523.553.000,00		
79	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	523.553.000,00						-	523.553.000,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	523.553.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	523.553.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4 Dokumen	147.862.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		147.862.500,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3 Laporan	114.665.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		114.665.500,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	117.839.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		117.839.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	30.855.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.855.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			3 Dokumen	112.331.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		112.331.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					576.031.000,00						576.031.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					576.031.000,00						576.031.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					576.031.000,00						576.031.000,00		
80	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-		88 Skala	576.031.000,00						-	576.031.000,00	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	-		95 Persen	576.031.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	576.031.000,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	220.584.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.584.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	190.369.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		190.369.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	165.078.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		165.078.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					819.052.000,00						819.052.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					819.052.000,00						819.052.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					819.052.000,00						819.052.000,00		
81	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-		-	819.052.000,00						-	819.052.000,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	819.052.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	819.052.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			531 Produk Hukum Dokumen	376.564.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		376.564.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			1 Kasus	230.324.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		230.324.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			531 Produk Hukum Dokumen	212.164.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		212.164.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					26.433.778.612,00						29.583.296.440,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					26.433.778.612,00						29.583.296.440,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
82	4	01			SEKRETARIAT DAERAH	-	-			-	26.433.778.612,00									
	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.433.778.612,00						-	29.583.296.440,00		
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.551.694.883,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.310.214.300,00		
4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				114 Non ASN dan 93 A Orang/bulan	13.302.900.883,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.660.795.900,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				101 orang Dokumen	4.232.920.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.631.957.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	15.874.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.461.400,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
	4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	376.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	403.700.000,00		
4 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen Dokumen	376.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		403.700.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	145.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	159.500.000,00		
4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket Paket	19.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.900.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Pegawai Orang	63.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		69.300.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang Orang	63.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		69.300.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.345.481.600,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.553.559.240,00		
4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket Paket	157.930.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		173.723.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket Paket	217.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		310.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket Paket	127.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		143.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket Paket	290.139.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		319.153.340,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket Paket	216.188.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		237.264.500,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan Laporan	336.524.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	370.418.400,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	330.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	550.000.000,00		
4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket Unit	229.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		440.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit Unit	101.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU	
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.162.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.331.666.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	27.999.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													7.855.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.805.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.855.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													7.855.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.805.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.855.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													5.189.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.189.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.189.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													5.189.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.189.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.189.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													4.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.605.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													53.195.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	53.195.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		53.195.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
84	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaku perekonomian dan pembangunan yang taat kebijakan	-			75 persen	384.747.000,00						-	470.000.000,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan pembangunan	-			100 Persen	384.747.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		470.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													120.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	125.029.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													150.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	116.426.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													200.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	143.292.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu						714.774.000,00						714.774.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						714.774.000,00						714.774.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						714.774.000,00						714.774.000,00		
85	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	714.774.000,00			-			-	714.774.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	556.534.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		556.534.500,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													264.633.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				8 Dokumen	264.633.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		264.633.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													158.757.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	158.757.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		158.757.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													133.144.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				8 Dokumen	133.144.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.144.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	158.239.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		158.239.500,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	90.453.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.453.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				4 Dokumen	67.786.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.786.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
					Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu													7.768.462.000,00				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													7.768.462.000,00				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													7.768.462.000,00				
86	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	7.768.462.000,00					-	7.768.462.000,00				
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	7.768.462.000,00			Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.768.462.000,00				
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3.029.473.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.029.473.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	4.365.013.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		373.976.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	373.976.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.365.013.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
					Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu													633.705.000,00				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													633.705.000,00				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													633.705.000,00				
87	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	633.705.000,00					-	633.705.000,00				
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	567.941.000,00			Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	567.941.000,00				
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	252.723.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		252.723.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	91.079.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		91.079.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	224.139.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		224.139.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
4	01	02	2.04			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	65.764.000,00			Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	65.764.000,00				
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	65.764.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.764.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP													7.198.184.010,00				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													7.198.184.010,00				
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													7.198.184.010,00				
88	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	5.375.933.858,00					-	5.487.072.703,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																					Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.513.007.258,00		10	11	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	4.610.036.768,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	4.344.407.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.421.918.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	168.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		188.118.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00				-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.825.000,00	
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	245.167.000,00				-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	283.788.435,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	3.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.788.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	20.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	48.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.110.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.098.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	25.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.271.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	96.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.370.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	29.579.600,00				-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	26.229.000,00	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	29.579.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.229.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	581.680.000,00				-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	560.193.500,00	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	514.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		496.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.797.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	17.689.350,00		
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH															
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				100 Dokumen	8.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.977.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup															
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	5.277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.561.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				75 Badan Usaha	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
93	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	0,00			-		-	-	3.150.000,00		
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	0,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	3.150.000,00		
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				15 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
94	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	51.509.000,00			-		-	-	76.392.225,00		
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.509.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	76.392.225,00		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				7 Entitas	51.509.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		76.392.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
95	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	929.106.400,00			-		-	-	1.011.614.887,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	929.106.400,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.011.614.887,00		
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	291.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		313.742.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan															
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				11605 Ton	628.920.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		645.372.787,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan															
							Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				2 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.801.713.185,00							5.771.713.185,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		2 Unit	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.340.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	181.210.000,00	
2	12	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	134.060.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		133.880.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	52.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		47.330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	189.810.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	189.850.000,00	
2	12	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5 Unit	4.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	126.510.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		126.510.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26 Unit	37.120.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		37.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	12.680.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					22 Unit	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
97	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	64.500.000,00			-		-	-	64.500.000,00	
2	12	02	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	64.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	64.500.000,00	
2	12	02	2.03	0002		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					10000 Dokumen	64.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		64.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
98	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	15.519.000,00			-		-	-	15.519.000,00	
2	12	03	2.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	15.519.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	15.519.000,00	
2	12	03	2.02	0004		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					1 Laporan	15.519.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		15.519.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
99	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	3.672.000,00			-		-	-	8.622.000,00	
2	12	04	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	3.672.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	8.622.000,00	
2	12	04	2.03	0007		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					1 Laporan	3.672.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.622.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
100	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	25.425.000,00			-		-	-	25.425.000,00	
2	12	05	2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	25.425.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	25.425.000,00	
2	12	05	2.01	0002		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proveysi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									-					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun					2 Dokumen	25.425.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		25.425.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON						7.116.990.066,00							8.345.648.623,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.116.990.066,00							8.345.648.623,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.116.990.066,00							8.345.648.623,00	
101	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.407.323.489,00						-	3.463.391.566,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	26.811.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		33.069.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	5.783.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.033.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					4 Dokumen	13.875.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		15.762.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	7.153.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.274.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.759.529.149,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.786.079.066,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang/bulan	2.558.917.149,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.558.917.066,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					16 Dokumen	194.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		220.951.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	6.212.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.211.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	313.920.940,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	359.388.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	10.001.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		11.665.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	7.660.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		14.322.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket	98.382.940,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		136.799.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	22.369.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		29.065.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					240 Dokumen	42.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		42.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					45 Laporan	133.008.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		125.037.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	120.738.000,00						
	2	13	01	2.07	0005 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	39.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	88.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		75.738.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	71.440.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	67.400.000,00		
	2	13	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	54.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	16.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	107.321.500,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	96.717.500,00		
	2	13	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	4.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	92.957.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		84.527.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.064.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
102	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi penatanya	-				97 Desa	125.520.000,00						-	140.520.000,00		
	2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataanya	-				97 pekon	125.520.000,00				-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	140.520.000,00	
	2	13	02	2.01	0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																
						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					2 Desa	25.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		25.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	02	2.01	0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi					2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
103	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Prosentase desa yang melaksanakan kerja sama antar desa	-				100 %	60.000.000,00						-	60.000.000,00		
	2	13	03	2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah lembaga ekonomo pekon	-				1 lembaga	60.000.000,00				-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	60.000.000,00	
	2	13	03	2.01	0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					1 dokumen Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	03	2.01	0002 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 dokumen Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
104	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1.298.078.450,00					-	-	1.641.376.057,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	1.298.078.450,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.641.376.057,00	
2 13 04 2.01 0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				126 Dokumen	268.311.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		268.311.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				126 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				100% Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																				
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				63 Orang	48.919.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		48.919.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				126 Dokumen	81.318.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		252.945.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				12 Laporan	123.875.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0012 Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				126 Dokumen	158.642.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		192.824.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				63 Dokumen	29.922.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		69.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																				
							0				126 0	38.554.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		87.738.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa																				
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				126 Desa	92.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				9 Dokumen	306.035.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masvarakat	-		321.337.537,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															12	13							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.105.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		1.160.250,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		1.060.500,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		472.500,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		472.500,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	955.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		472.500,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	970.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		1.018.500,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 persen	6.619.807.238,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	6.648.351.609,00				
2	15	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	6.618.167.238,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		6.646.629.609,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	840.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		882.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				100 persen	14.019.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	14.720.895,00				
2	15	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		13.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.019.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		1.070.895,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-				100 persen	14.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	14.700.000,00				
2	15	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	14.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		14.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	-			100 persen	225.105.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	200.956.140,00	
215012060001Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2.640.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		2.709.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012060004Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.283.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		53.324.775,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012060005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	37.190.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		39.049.815,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012060006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				276 Dokumen	27.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		2.913.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012060009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	99.242.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		102.958.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-			100 persen	18.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	52.080.000,00	
215012070005Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		38.430.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012070006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		13.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	-			100 persen	127.319.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	145.182.900,00	
215012080002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	123.701.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		141.384.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012080003Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.618.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		3.798.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-			100 persen	490.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan	-	518.385.000,00	
215012090001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	254.420.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		267.141.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012090002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	196.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		206.598.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012090006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															12	13				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nasional	Daerah	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	17.320.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		16.716.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215012090009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	21.540.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	ASN Dinas Perhubungan		27.930.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
107	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan titik rawan kecelakaan Presentase uji KIR Kendaraan	-			81.7 % 87.75 %	9.383.074.700,00					-		9.569.995.050,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang di jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-			100 persen	8.879.027.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat	-	9.031.910.750,00	
215022.02.0002Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				105 Unit	279.294.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat		520.248.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
215022.02.0004Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																				
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	8.599.733.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat		8.511.662.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			100 persen	290.271.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat	-	320.798.300,00	
215022.05.0001Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
215022.05.0004Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				7000 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
215022.05.0007Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	115.271.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Masyarakat		120.798.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-			100 persen	14.330.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat	-	15.046.500,00	
215022.06.0004Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	3.185.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		3.344.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
215022.06.0015Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	11.145.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		11.702.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi	-			100 persen	2.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat	-	2.887.500,00	
215022.07.0006Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin																				
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi				5 Laporan	2.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		2.887.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan	-			100 persen	191.701.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat	-	194.152.000,00	
215022.08.0004Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	7.489.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.858.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					19 Laporan	147.816.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		156.542.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	0,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00			
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	164.972.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		138.310.305,00			
2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	164.972.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		138.310.305,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	222.524.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		232.307.000,00			
2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	183.180.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		191.499.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.064.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.064.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					25 Unit	29.280.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	1.509.387.800,00			-			-	1.845.119.390,00			
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	1.509.387.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.845.119.390,00			
2 16 02 2.01 0014 Relasi Media																						
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					100 Laporan	957.234.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.264.383.540,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																						
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					2 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik																						
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					12 Permohonan	1.031.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.234.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																						
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					12 Rekomendasi	1.065.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.176.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik																						
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis					1 Media	454.085.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		326.555.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten																						
						Jumlah Konten Informasi Publik					150 Konten	95.972.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.770.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
110	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	1.981.166.600,00			-			-	1.449.359.350,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1 Laporan	5.022.800,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.311.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	249.940.200,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	258.168.000,00					
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			10 Paket	5.835.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.122.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	76.494.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		77.528.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			13 Paket	22.555.700,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.848.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			30 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	116.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		119.670.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.024.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	39.458.000,00					
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			5 Unit	38.024.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		39.458.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	97.020.000,00					
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			2 Laporan	59.100.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		97.020.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.060.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	191.630.000,00					
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			3 Unit	125.120.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		166.810.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			5 Unit	25.940.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.820.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
114	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	54.466.500,00						-	73.000.000,00					
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	54.466.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	73.000.000,00					
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-			8 Unit Usaha	54.466.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
115	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	48.755.300,00						-	75.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	75.000.000,00					
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernalai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-		30 Unit Usaha	48.755.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
116	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	166.027.000,00			-	320.000.000,00				
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	166.027.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	320.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	-		30 Unit Usaha / Orang	166.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	320.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
117	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	150.281.500,00			-	150.281.500,00				
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	150.281.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	150.281.500,00	
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	-	-		25 Orang	150.281.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	150.281.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.944.818.400,00				4.545.000.000,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						594.818.400,00				2.066.000.000,00				
118	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	64.936.500,00			-	1.289.000.000,00				
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	64.936.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	1.289.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-		7 Unit	64.936.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	1.289.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
119	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	118.942.000,00			-	384.000.000,00				
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	118.942.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	384.000.000,00	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-		7 Laporan	118.942.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	134.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		-	-											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
120	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	50.698.800,00					-		135.000.000,00		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	50.698.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	135.000.000,00		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang															
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				100 Unit	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal															
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				3 Orang	25.698.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
121	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	360.241.100,00					-		258.000.000,00		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	360.241.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	258.000.000,00		
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	360.241.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		258.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
122	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	1.019.539.000,00					-		2.479.000.000,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	1.019.539.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	1.391.000.000,00		
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	169.539.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		181.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				9 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Yogyakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		1.144.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
123	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	330.461.000,00					-		1.088.000.000,00		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.456.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		8.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	74.312.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		44.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.849.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		13.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.710.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	28.273.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		31.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	113.960.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	306.091.304,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	717.000.000,00		
2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	103.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	26.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		29.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	176.421.304,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		188.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	127.990.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	140.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	127.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan persetujuan nilai investasi	-			1800 Izin	0,00						-	44.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang terbit	-			1800 Izin	0,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	22.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	22.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
126	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi investasi	-			5,956 Milyar Rupiah	180.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan realisasi nvestasi	-			5,956 Milyar	180.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
127	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	202.270.500,00						-	178.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	202.270.500,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	178.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	56.572.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah		62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1800 Pelaku Usaha	145.698.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah		116.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
															Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
																					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
128	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio kepatuhan pelaku usaha	-			90 Persen	448.669.000,00					-	-	492.000.000,00							
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin dan nonizin yang sesuai peruntukannya	-			90 Persen	448.669.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	492.000.000,00							
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																				
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				35 Kegiatan Usaha.	66.000.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			72.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																				
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				415 Kegiatan Usaha	382.669.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-			420.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
129	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA dan PMDN	-			35 Investor	20.000.000,00					-	-	22.000.000,00							
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data dan informasi investasi yang tersaji pada system/aplikasi	-			1 Dokumen	20.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	22.000.000,00							
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																				
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	20.000.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
						Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata															7.190.834.417,00			7.236.224.937,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															6.529.438.817,00				6.574.624.937,00	
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															6.529.438.817,00				6.574.624.937,00	
130	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.829.438.817,00					-	-	4.744.624.937,00							
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.100.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.600.000,00							
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.100.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			2.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen Laporan	3.000.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			3.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						
2	19	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.388.517,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	4.082.188.437,00							
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.815.256.717,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			3.900.252.637,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	183.360.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			180.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.771.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.775.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-		-	6.500.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	6.500.000,00					
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		-	657.280.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		489.336.500,00					
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.965.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	284.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		245.010.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.455.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		55.455.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.871.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		36.871.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	33.565.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		34.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	244.114.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		113.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		-	50.979.800,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	51.000.000,00					
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	50.979.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		-	109.190.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	110.000.000,00					
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	89.490.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		89.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	14.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
131	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	cakupan peningkatan daya saing kepemudaan	-			55 %	450.000.000,00					-		455.000.000,00		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelompok Pemuda,Organisasi Pemuda dan Pemuda yang ada Di Kabupaten Pringsewu	-			1 Dokumen	450.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	455.000.000,00		
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirusaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota															
							Jumlah Wirusaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penvelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota															
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penvelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota															
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/kota Yang Difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
132	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	1.250.000.000,00					-		1.375.000.000,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	75.000.000,00		
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota															
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	500.000.000,00		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	500.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	800.000.000,00		
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan /atau berjasa dalam memajukan Olahraga															
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				100 Orang	700.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						661.395.600,00							661.600.000,00		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						661.395.600,00							661.600.000,00		
133	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	350.000.000,00					-		350.000.000,00		
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	350.000.000,00		
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
134	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	270.299.600,00					-		270.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	270.299.600,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	270.500.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	270.299.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		270.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
135	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	41.096.000,00					-	-	41.100.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	41.096.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	41.100.000,00	
	3	26	05	2.01	0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	41.096.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		41.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						4.294.652.820,00							4.866.762.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.294.652.820,00							4.866.762.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.002.250.520,00							4.441.762.000,00	
136	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			88 Skala	3.412.521.220,00					-	-	3.956.762.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	-			88 skala	8.128.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	11.566.250,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	4.864.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.778.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.264.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.788.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	-			95 %	2.792.748.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.248.295.750,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.635.268.220,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.051.499.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	157.480.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		196.796.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	-			95 %	8.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	8.250.000,00	
	2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		8.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			100 %	14.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	28.000.000,00	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	14.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran "	-			95 %	189.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	244.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.910.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.879.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.110.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	105.086.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan Barang dalam satu tahun anggaran.	-		95 %	136.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	180.000.000,00	
2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	55.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	81.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	-		95 %	80.240.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	65.000.000,00	
2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	-		100 %	182.820.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	171.650.000,00	
2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	131.530.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	9.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		6.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	21.390.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.400.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
137	2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat	-		60 %	589.729.300,00						-	485.000.000,00	
	2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	-		0.65 %	419.793.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat	-	380.000.000,00	
2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpustakaan	387.960.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																				
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	31.833.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	0016		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	0017		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan				2 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	0018		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	0020		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Budaya baca	-			60 %	169.936.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat	-	105.000.000,00	
2	23	02	2.02	0006		Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	0007		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	97.964.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	0009		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				2 Orang	71.971.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
138	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-			16 %	244.792.800,00						-	285.000.000,00	
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	-			91 %	122.970.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	155.000.000,00	
2	24	02	2.01	0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				30 Berkas	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.01	0002		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				30 Berkas	63.862.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.01	0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	59.108.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah	-			91 %	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	35.000.000,00	
2	24	02	2.02	0004		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				30 Arsip	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Arsip Yang Tersedia pada JIKN	-			75 %	121.822.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	95.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	121.822.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
139	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara	-			81 %	47.609.500,00						-	140.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Pelaksanaan, Penilaian Dan Pemusnahan Arsip	-			85 %	47.609.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	35.000.000,00	
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				300 Arsip	47.609.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Prosentase Arsip Yang Terdada	-			89 %	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	70.000.000,00	
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Daftar	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				100 Arsip	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Daftar Arsip Yang Tersimpan Di Unit Kerja	-			1 daftar	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD	-	35.000.000,00	
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				30 Arsip	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	3					DINAS PERIKANAN						5.090.175.323,00							5.352.033.673,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.090.175.323,00							5.352.033.673,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.090.175.323,00							5.352.033.673,00	
140	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			A Skala	4.325.467.823,00						-	4.512.033.673,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	-			6 Dokumen	8.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	32.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	-			14 Laporan	3.720.190.323,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	3.694.533.673,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	3.545.710.323,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		3.474.533.673,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	171.480.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		215.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	-				1 Dokumen	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	6.500.000,00			
3	25	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		6.500.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terselenggaranya administrasi kantor	-				12 Bulan	181.764.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	332.000.000,00			
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	86.436.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				29 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		37.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	62.928.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Diadakan	-			34 Unit	62.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	70.000.000,00	
3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	32.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa kantor	-			12 Bulan	31.865.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	40.000.000,00	
3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.865.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Dipelihara	-			90 Persen	321.198.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan	-	337.000.000,00	
3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	284.130.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	12.180.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.888.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Pegawai Dinas Perikanan		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
141	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			13145 ton	514.137.500,00						-	490.000.000,00	
3	25	04	2.01			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	-			5 Rekomendasi	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	40.000.000,00	
3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangan Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	-			5 Rekomendasi	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	40.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
	3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				14 Kelompok	358.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	160.000.000,00				
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				9 Kelompok	133.247.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	225.253.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
3	25	04	2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				60 ; 10 Unit ; Dokumen	155.637.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	290.000.000,00				
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit	82.967.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				9 Dokumen	6.770.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN			
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	65.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	350.000.000,00				
142	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN Pamen Perikanan	-			5,65 persen	250.570.000,00						-	350.000.000,00				
	3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-			20 Dokumen	32.975.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	70.000.000,00				
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				20 Dokumen	32.975.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	70.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-			2 Unit usaha	84.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	80.000.000,00					
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	84.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan ikan yang Tersedia dan Tersalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			746,47 Ton	133.095.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu	-	200.000.000,00					
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				746,47 Ton	113.715.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 Pelaku Usaha	19.380.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Masyarakat Perikanan Kabupaten Pringsewu		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
							DINAS PERTANIAN					15.353.323.871,00						16.918.100.000,00						
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					15.353.323.871,00						16.918.100.000,00						
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.353.323.871,00						16.918.100.000,00						
143	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			88 Skala	14.104.047.971,00					-	14.972.000.000,00						
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	49.390.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	64.000.000,00					
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		17.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	17.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.451.871,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	14.306.000.000,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	13.281.291.871,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		14.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32 Dokumen	214.160.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.590.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	19.000.000,00	
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	4.590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	3.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	174.515.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	207.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.105.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				64 Paket	70.115.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	14.345.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	59.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	40.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	60.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	20.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	20.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	119.800.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	120.000.000,00	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	119.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.301.100,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	193.000.000,00	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	187.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		172.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.601.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
144	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi tembakau (ton) jumlah produksi padi (ton) jumlah produksi kakao (ton) jumlah produksi bawang merah (kuintal) jumlah produksi jagung (ton)	-			105 ton 127397 ton 3030 ton 3441 kuintal 38852 ton	433.097.000,00						-		585.600.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			6 Laporan	305.537.000,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	445.600.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi															
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	123.537.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		325.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian															
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	182.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	-			3 Dokumen	99.960.000,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	100.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman															
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	99.960.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.600.000,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	14.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	10.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	-	15.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	26.000.000,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN
145	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio pembangunan prasarana pertanian.	-			1,03 rasio	574.000.000,00			-		-		1.105.500.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	308.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	356.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				10 Ha	300.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	266.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	749.500.000,00	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																				
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																				
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																				
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																				
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas																				
							Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		4.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																				
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
146	3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	jumlah ketersediaan daging (ton) jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kali) jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali) jumlah ketersediaan telur (ton)	-		4233 ton 4285 kali 5375 kali 8324 ton	74.230.000,00					-		76.000.000,00	
	3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	39.940.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	40.000.000,00	
3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	39.940.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	24.290.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	25.000.000,00	
3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	24.290.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	11.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
147	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	prosentase lahan yang mendapat pengendalian dan pananggulangan bencana pertanian	-			76 persen	31.448.000,00						-	-	33.000.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-			30 Ha	31.448.000,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	33.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				20 Ha	29.448.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
148	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan penyuluhan pertanian	-			83,39 persen	136.500.900,00						-	-	146.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	136.500.900,00			-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	146.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	113.521.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa															
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	16.979.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		17.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				9 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah			15		16
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				150 Orang	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
						SEKRETARIAT DPRD						50.043.583.495,00							52.361.118.946,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.043.583.495,00							52.361.118.946,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						50.043.583.495,00							52.361.118.946,00		
149	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.940.508.395,00						-	32.557.342.816,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.676.336,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	19.610.153,00		
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	12.175.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.783.750,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6.501.336,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.826.403,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.988.161.789,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	4.187.569.879,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	3.597.874.039,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.777.767.741,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	374.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		393.246.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.767.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.056.138,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	244.097.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	256.301.850,00		
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	244.097.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		256.301.850,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.458.410.880,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.686.331.424,00		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	96.131.380,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		100.937.949,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	130.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		136.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	85.491.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		89.765.550,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	342.086.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		359.190.825,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	263.025.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		276.176.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		744 Dokumen	800.705.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		840.740.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	54.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		162.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	686.472.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		720.795.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	464.850.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	488.092.500,00	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		200 Unit	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		8 Unit	184.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		194.092.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	180.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		189.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	440.005.500,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	462.005.775,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	300.005.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		315.005.775,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Laporan	140.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		147.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	865.770.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	873.867.500,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit	41.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		43.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	473.360.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		473.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	100.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		105.682.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	230.460.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		230.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	21.731.566.890,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		22.818.145.235,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	202.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		212.383.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	63.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		66.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	-	463.700.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	486.885.000,00		
4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				25 Laporan	358.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		376.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	105.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		110.775.000,00	SEKRETARIAT DPRD
150	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	-	19.103.075.100,00						-	19.803.776.130,00		
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	1.838.928.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.930.874.400,00		
4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1.471.328.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	1.544.894.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	118.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	123.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD																				
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	249.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	262.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	1.691.031.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.775.582.550,00		
4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	381.741.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	400.828.050,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	433.263.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	454.926.150,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	47.538.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	49.914.900,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	394.879.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	414.622.950,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	433.610.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	455.290.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	5.138.595.600,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	5.212.982.780,00		
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3.650.852.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	3.650.852.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04 0004 Penvediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	195.226.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		204.987.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	474.898.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		498.642.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				3 Dokumen	184.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		193.998.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	632.859.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		664.501.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-		-	2.476.562.500,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.528.480.500,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	1.038.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		1.090.278.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	261.702.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		261.702.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses													
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.176.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		1.176.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-		-	207.143.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	217.500.150,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	207.143.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		217.500.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-		-	7.750.815.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	8.138.355.750,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	6.552.031.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.879.632.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD													
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	55.660.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		58.443.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	914.124.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		959.830.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	229.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		240.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					9.053.949.329,00							12.107.823.850,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.053.949.329,00							12.107.823.850,00	
	5	01				PERENCANAAN					7.644.765.329,00							11.286.070.850,00	
151.	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP BAPPEDA	-		88 Skala	5.367.641.229,00						-	7.025.267.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-		8 Dokumen	24.168.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-	32.230.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	9.275.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		14.168.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.395.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		7.756.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.498.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		10.306.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	4.635.787.029,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-	6.058.775.000,00	
	5	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		4.919.906.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	245.468.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		673.228.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan				1 Dokumen	245.220.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		451.452.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	11.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		14.189.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Unit	6.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-	7.883.000,00	
	5	01	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		7.883.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			3 Orang	20.650.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-	24.709.000,00	
	5	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang	20.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA		24.709.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	338.706.300,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	459.130.000,00	
	5	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi				1 Paket	9.430.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		11.446.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	61.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		22.072.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3 Paket	98.841.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		153.480.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	26.870.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		39.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Dokumen	41.860.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		53.346.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	100.705.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		179.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-				7 Unit	97.560.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-		130.371.000,00	
	5	01	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	97.560.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA			130.371.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang disediakan	-				12 Laporan	100.989.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-		101.289.000,00	
	5	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	100.989.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA			101.289.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	-				45 Unit	143.280.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-		210.880.000,00	
	5	01	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	105.530.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-			150.618.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					38 Unit	27.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-			48.134.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-			12.128.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
152	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja PD yang Dievaluasi	-				97.80 %	843.722.100,00						-		1.582.089.000,00	
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	-				7 Dokumen	677.321.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-		964.689.000,00	
	5	01	02	2.01	0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik																
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	44.748.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			71.663.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					28 Berita Acara	37.790.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			49.613.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																
						0					2 0	125.620.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			165.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006 Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					133 Usulan	36.485.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			71.663.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)					7 Dokumen Dokumen	432.678.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			606.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				5 Dokumen	77.138.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA	-		452.025.000,00	
	5	01	02	2.03	0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					5 Laporan	77.138.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	BAPPEDA			452.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-				2 Dokumen	89.262.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-		165.375.000,00	
	5	01	02	2.04	0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					1 Dokumen	76.692.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah			99.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	12.570.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		66.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
153	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	-			97.90 %	1.433.402.000,00						-	2.678.714.850,00		
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			97.90 %	510.407.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-	554.005.135,00		
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	12.368.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		17.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					1 Laporan	9.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		12.079.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					1 Laporan	9.197.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		13.384.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					4 Laporan	379.038.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		397.994.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	12.481.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		16.173.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	10.106.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		14.082.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	11.638.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		14.082.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					4 Laporan	65.679.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		68.929.035,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			97.90 % 97.90 %	613.857.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-	884.968.000,00		
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	190.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		317.498.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		30.539.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		31.146.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	294.867.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		278.933.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		134.022.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		30.539.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		30.539.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		31.752.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-			97,90 %	309.137.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.239.741.715,00		
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	39.968.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		462.624.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	7.399.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		8.158.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	8.348.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		9.165.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	7.906.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		9.627.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	197.868.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		698.578.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				1 Laporan	7.253.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		7.997.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				1 Laporan	8.046.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		9.627.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah				1 Laporan	32.348.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		33.965.715,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.409.184.000,00							821.753.000,00	
154		5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							1.409.184.000,00						-	821.753.000,00	
		5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							1 Laporan	203.845.500,00		-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	60.638.000,00	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	203.845.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		60.638.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase Jurnal Kelitbangan	-			100 %	1.205.338.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah	-	761.115.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				4 Dokumen	535.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		177.904.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	364.268.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		283.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	74.891.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		76.663.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	155.117.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		177.328.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	76.062.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Perangkat Daerah		46.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH					9.455.841.733,00							8.807.867.250,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.455.841.733,00							8.807.867.250,00		
	5	02				KEUANGAN					9.455.841.733,00							8.807.867.250,00		
155	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.731.586.233,00					-		6.680.368.250,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.825.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	10.366.250,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.772.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.375.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.593.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.998.627.533,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	5.988.557.500,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	5.753.106.533,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat			5.725.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	237.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		254.362.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	8.281.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.695.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	12.000.000,00				-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	10.500.000,00	
	S	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									-					
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	12.000.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	329.533.700,00				-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	291.644.500,00	
	S	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									-					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.095.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	107.760.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.019.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									-					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	118.167.600,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		155.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									-					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.979.100,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		19.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									-					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	22.500.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		33.075.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	50.032.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		63.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	106.400.000,00				-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	87.300.000,00	
	S	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									-					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.400.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		87.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	275.200.000,00				-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	292.000.000,00	
	S	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	232.260.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		238.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	32.860.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		34.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.080.000,00		Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		19.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
156	S	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		-	2.724.255.500,00				-			-	2.127.499.000,00	
	S	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-		-	2.724.255.500,00				-	Reformasi Birokrasi S. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	2.127.499.000,00	
	S	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									-					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.349.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8.149.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.860.290,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.930.743.489,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	31.856.002.977,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	32.197.922.489,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		26.452.729.827,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	717.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.369.786.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		16.743.375,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.221.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		16.743.375,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	12.100.000,00	
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	92.557.000,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	201.912.990,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		36.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		96.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	62.557.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		68.812.990,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	812.974.500,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	703.946.827,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.019.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		12.118.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	214.975.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		15.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		90.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	292.661.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		361.444.941,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.850.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		38.545.046,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	74.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		90.508.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	186.669.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		94.850.690,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.000.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	43.560.000,00		
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		36.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		7.260.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.282.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	178.233.000,00		
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145.482.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		176.055.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		2.178.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	369.701.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	339.647.552,00		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	293.151.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		260.362.302,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		18.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	71.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		55.055.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.080.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
158	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	199.264.494.481,00	-				-	-	196.541.173.049,00		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					1 Laporan	13.832.620,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		32.348.594,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					1 Dokumen	38.199.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		46.177.230,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		125.370.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	453.382.600,00	-	-	-	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	804.981.328,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					8 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					1 Laporan	36.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					7 Laporan	335.020.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		398.380.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	62.785.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		43.042.120,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		98.387.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					75 Orang	18.876.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		23.171.288,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		-	197.516.116.716,00	-	-	-	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	193.860.346.300,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah					1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penerimaan Bantuan Keuangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	187.885.782.900,00	-	DANA DESA	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		183.886.021.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	6.130.333.816,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.624.325.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
159	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		-	-	809.951.900,00					-	-	1.109.936.676,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		-	-	809.951.900,00				Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.109.936.676,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	201.036.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		127.843.155,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		54.735.270,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	8.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		7.466.633,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	7.677.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.074.395,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	393.080.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		321.161.895,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		50.451.667,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	27.381.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		169.236.421,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	21.532.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		39.410.910,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		50.451.667,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	150.345.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		280.104.663,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						10.010.619.323,00							0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.010.619.323,00							0,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						9.840.778.023,00							0,00	
160	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	6.695.866.823,00					-	-	0,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	16.431.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.313.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	7.118.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	5.933.931.023,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	5.723.711.023,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	204.786.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.434.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	17.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
5	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	17.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	109.518.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.580.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	103.938.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8	401.182.800,00		10	11	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	14	-	15	0,00	16		17	
5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi																										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					16 Paket	17.388.500,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	84.000.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					7 Paket	80.449.600,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	58.601.700,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					50 Dokumen	38.100.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	122.643.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		82.955.200,00				-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-				0,00			
5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	82.955.200,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		133.948.000,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-				0,00			
5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	98.490.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.608.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-				0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					37 Unit	24.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
161	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	3.144.911.200,00						-	0,00					
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	710.667.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00					
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					4 Dokumen	552.224.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	57.249.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					1 Dokumen	62.751.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					321 Laporan	38.443.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	1.220.762.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00					
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					3 Dokumen	99.291.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					3 Dokumen	79.669.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					4 Dokumen	1.041.801.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	833.067.200,00				Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat		-	0,00					
	5	03	02	2.03	0005	Koordniasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					3 Dokumen	785.325.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	47.741.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	380.415.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	42.983.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1007 Orang	185.995.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				2 Dokumen	114.449.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	36.988.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						169.841.300,00							0,00	
162	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	169.841.300,00						-	0,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	126.216.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	126.216.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Seluruh ASN Kabupaten Pringsewu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	43.624.500,00			-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	0,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	43.624.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6					INSPEKTORAT						14.317.951.294,00							0,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						14.317.951.294,00							0,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						14.317.951.294,00							0,00	
163	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran Inspektorat	-			100 %	11.568.351.294,00						-	0,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	17.440.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.030.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.665.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.745.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	10.481.400.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				812 Orang/bulan	10.322.210.444,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	155.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.390.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			50 Orang	48.069.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	48.069.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	533.474.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				53 Paket	163.824.350,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	20.455.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	24.840.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	319.855.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	134.489.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	97.539.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				89 Laporan	36.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	353.478.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	7.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	274.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	71.128.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
164	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	-			100 %	2.012.850.000,00						-	0,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja	-			100 %	1.550.050.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				82 Laporan	979.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				10 Laporan	7.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				82 Dokumen	562.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP	-			100 %	462.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	-	0,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	69.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	393.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT
165	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	-			100 %	736.750.000,00						-	0,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-			100 %	619.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	0,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				82 Rekomendasi	348.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				50 Rekomendasi	271.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	-			2 Laporan	117.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Nilai SAKIP OPD di Kabupaten Pringsewu	-	0,00	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 perangkat daerah	117.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Nilai SAKIP OPD di Kabupaten Pringsewu		0,00	INSPEKTORAT			
						KECAMATAN PRINGSEWU						6.219.249.396,00						6.234.189.596,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.219.249.396,00							6.234.189.596,00				
	7	01				KECAMATAN						6.219.249.396,00							6.234.189.596,00				
166	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.906.579.396,00						-	5.923.589.596,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	3.800.000,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.300.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		2.500.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.508.189.596,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.515.014.596,00				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	5.039.549.596,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.045.014.596,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20 Dokumen	468.640.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		470.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.482.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	226.775.000,00				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	13.252.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.255.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	44.980.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		45.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	68.340.500,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		69.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		9.500.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	19.010.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		20.020.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	68.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		70.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																					Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	66.050.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	69.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	66.050.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		69.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.177.300,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	47.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	46.177.300,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		47.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.080.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	62.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	55.580.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		58.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		4.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
167	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	33.160.000,00			-			-	-	29.100.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	13.816.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	13.900.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	13.816.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		13.900.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	19.344.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	15.200.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	19.344.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.200.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
168	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	246.000.000,00			-			-	-	247.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	246.000.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	247.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	246.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		247.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
169	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	17.160.000,00			-			-	-	18.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	17.160.000,00			-		Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	18.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beraeama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KELURAHAN PRINGSEWU UTARA
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	555.505.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		560.500.000,00	KELURAHAN PRINGSEWU UTARA
						KELURAHAN PAJARESUK						598.448.800,00							400.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						598.448.800,00							400.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						598.448.800,00							400.000.000,00	
175	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	598.448.800,00						-	400.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	598.448.800,00				Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KELURAHAN PAJARESUK
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	398.448.800,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	KELURAHAN PAJARESUK
						KECAMATAN GADINGREJO						2.748.806.625,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.748.806.625,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						2.748.806.625,00							0,00	
176	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.440.945.125,00						-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.115.800,00				-	-	-	0,00	
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	1.027.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.025.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.062.550,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.202.447.325,00				-	-	-	0,00	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.003.240.525,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	198.250.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	956.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	122.630.400,00				-	-	-	0,00	
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.661.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				80 Dokumen	13.320.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					92 Laporan	16.328.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	6.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50 Unit	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	41.851.600,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.851.600,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	22.851.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	19.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Laporan	19.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	64.900.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-				-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	50.260.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	8.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	8.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.120.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
177	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	25.805.000,00			-	-	-	-	0,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-				-	-	-	-	0,00	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.640.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					23 Laporan	12.640.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-	13.165.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	13.165.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	02	2.04	0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					23 Dokumen	6.582.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Laporan	6.582.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	02	2.04	0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					-	7.017.000,00			-	-	-	-	0,00	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				-	7.017.000,00			-	-	-	-	0,00	
178	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	7.017.000,00			-	-	-	-	0,00	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-				-	-	-	-	0,00	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.017.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	03	2.01	0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					23 Laporan	7.017.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	257.410.500,00			-	-	-	-	0,00	
179	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	257.410.500,00			-	-	-	-	0,00	
							Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	257.410.500,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	04	2.01	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					-				-	-	-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			23 Laporan	257.410.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
180	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	8.794.000,00					-	-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	8.794.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-			60 Orang	8.794.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
181	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.835.000,00					-	-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.835.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			23 Dokumen	8.835.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
						KECAMATAN PAGELARAN						2.224.688.639,00							2.805.318.468,93	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.224.688.639,00							2.805.318.468,93	
	7	01				KECAMATAN						2.224.688.639,00							2.805.318.468,93	
182	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.979.298.639,00					-	-	2.555.818.468,93	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.885.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	3.031.875,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		10 Dokumen	2.885.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	3.031.875,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.707.909.839,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.258.314.205,93	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-		19 Orang/bulan	1.440.809.839,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.668.412.205,93	KECAMATAN PAGELARAN
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		12 Dokumen	264.720.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	587.008.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		1 Laporan	2.380.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.894.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.000.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	161.605.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	177.472.388,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-		1 Paket	3.545.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.497.388,00	KECAMATAN PAGELARAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		1 Paket	6.025.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.975.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-		1 Paket	84.394.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	88.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.217.800,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.815.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	34.609.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73.098.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	64.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	47.060.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12.910.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.928.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
183	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	11.490.000,00					-	-	12.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	11.490.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	12.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22 Laporan	11.490.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		12.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.980.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	4.980.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				22 Lembaga Kemasyarakatan	4.980.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
185	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	213.000.000,00					-	-	215.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	213.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	215.000.000,00					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																215.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				22 Laporan	213.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		215.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN				
186	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	10.620.000,00					-	-	11.500.000,00					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.620.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	11.500.000,00					
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																11.500.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	10.620.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		11.500.000,00	KECAMATAN PAGELARAN				
187	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.300.000,00					-	-	6.000.000,00					
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.300.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	6.000.000,00					
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																6.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		6.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN				
					KECAMATAN BANYUMAS						2.061.985.044,00							2.099.314.144,00					
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						2.055.575.044,00							2.090.964.144,00					
	7	01			KECAMATAN						2.055.575.044,00							2.090.964.144,00					
188	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.859.260.044,00					-	-	1.880.114.144,00					
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.003.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.990.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																3.140.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.153.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.140.000,00	KECAMATAN BANYUMAS				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																2.850.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2.850.500,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.850.000,00	KECAMATAN BANYUMAS				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.632.678.044,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.632.261.144,00					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																1.414.787.044,00	KECAMATAN BANYUMAS
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.414.787.044,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.414.787.044,00	KECAMATAN BANYUMAS				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																213.958.100,00	KECAMATAN BANYUMAS
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	214.375.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		213.958.100,00	KECAMATAN BANYUMAS				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																3.516.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	3.516.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.516.000,00	KECAMATAN BANYUMAS				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	7.940.000,00	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.840.000,00	-	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	4 Orang	-	7.940.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.840.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	105.054.500,00	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	105.737.000,00	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	-	3.959.500,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.951.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	6 Paket	-	7.200.500,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.219.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	24 Paket	-	58.064.500,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	57.704.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	6 Paket	-	6.940.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.933.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	12 Dokumen	-	8.580.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.240.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	155 Laporan	-	20.310.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.690.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	21.800.000,00	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	29.454.000,00	-	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	-	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.334.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	-	11.800.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.120.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	26.669.000,00	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	33.332.000,00	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	-	15.409.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	6 Laporan	-	11.260.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.332.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	59.115.000,00	-	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	65.500.000,00	-	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	5 Unit	-	57.100.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	62.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	2 Unit	-	2.015.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	5.450.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.452.800,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.800.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.173.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	1.557.796.693,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.982.600.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.349.684.693,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.780.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	206.720.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.600.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1.392.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	144.603.250,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	164.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.863.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	85.585.750,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		94.300.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.656.500,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	27.498.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.200.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	56.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	56.300.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.222.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	39.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	13.272.700,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	21.950.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.986.250,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	77.385.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	41.070.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.641.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2.250.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	13.666.250,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.244.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
196	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.100.000,00			-		-	-	11.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.200.000,00	
7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-			1 Laporan	10.100.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.200.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	11.416.000,00			-		-		12.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.416.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-			2 Laporan	11.416.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
198	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	180.000.000,00			-		-		180.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	180.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		180.000.000,00	
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-			2 Laporan	180.000.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		180.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
199	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	16.134.000,00			-		-		17.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	16.134.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	
7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-			50 Orang	16.134.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
200	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	4.800.000,00			-		-		5.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	4.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	
7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-			2 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
						KECAMATAN ADILUWIH						2.365.367.481,00							2.469.595.855,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.365.367.481,00							2.469.595.855,00	
	7	01				KECAMATAN						2.365.367.481,00							2.469.595.855,00	
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.151.598.481,00			-		-		2.248.288.405,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.610.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.791.025,00	
7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-			4 Dokumen	1.848.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.940.400,00	KECAMATAN ADILUWIH
7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-			4 Laporan	1.762.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		1.850.625,00	KECAMATAN ADILUWIH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			2 Laporan	13.499.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		14.174.265,00	KECAMATAN ADILUWIH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.670.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	66.444.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			4 Unit	3.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		3.885.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			4 Unit	47.060.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		49.413.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			8 Unit	6.410.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		7.371.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			2 Unit	5.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.775.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
202	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.166.000,00			-		-		10.674.300,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.166.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	10.674.300,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			2 Laporan	10.166.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		10.674.300,00	KECAMATAN ADILUWIH
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	11.604.000,00			-		-		12.184.200,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.604.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	12.184.200,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			4 Laporan	11.604.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.184.200,00	KECAMATAN ADILUWIH
204	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	165.000.000,00			-		-		170.100.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	165.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	170.100.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			14 Laporan	165.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		170.100.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	15.094.500,00			-		-		15.849.225,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	15.094.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	15.849.225,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umak Beraeama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewulidkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				21 Orang	15.094.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		15.849.225,00	KECAMATAN ADILUWIH
206	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	11.904.500,00					-		12.499.725,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	11.904.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	12.499.725,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	11.904.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		12.499.725,00	KECAMATAN ADILUWIH
						KECAMATAN PAGELARAN UTARA							1.782.244.690,00						2.244.625.026,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.782.244.690,00						2.244.625.026,00	
	7	01				KECAMATAN							1.782.244.690,00						2.244.625.026,00	
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.595.574.690,00					-		1.971.051.227,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.198.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.791.057,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.235.500,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.940.400,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.963.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.850.657,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.339.926.790,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.627.803.313,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.119.644.790,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.391.306.148,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	218.840.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		234.861.165,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1.442.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.636.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.974.383,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.974.383,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.429.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	196.582.701,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.952.500,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.916.825,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.250.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.560.620,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.356.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		97.726.597,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.320.900,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.170.809,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.825.350,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				154 Laporan	13.150.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.382.500,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.849.086,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.849.086,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	29.405.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.737.850,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.605.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.126.287,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.611.563,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.615.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	92.312.837,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	52.080.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.311.775,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.900.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6.635.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.101.062,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
208	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	14.020.000,00					-		19.404.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	14.020.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.404.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	14.020.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.404.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
209	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	15.300.000,00					-		14.112.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.300.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.112.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	15.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.112.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
210	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	147.000.000,00					-		204.039.124,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	147.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	204.039.124,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	147.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		204.039.124,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
211	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	4.290.000,00					-	-	24.255.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	4.290.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	24.255.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembiinan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	4.290.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.255.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
212	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	6.060.000,00					-	-	11.763.675,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	6.060.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.763.675,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	6.060.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.763.675,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
						KECAMATAN AMBARAWA						1.848.397.393,00							1.848.397.393,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.848.397.393,00							1.848.397.393,00	
	7	01				KECAMATAN						1.848.397.393,00							1.848.397.393,00	
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.615.627.393,00					-	-	1.619.526.393,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.349.412.993,00			-	-	-	-	1.349.412.793,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.176.792.993,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.176.792.793,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	172.620.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.620.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.720.000,00			-	-	-	-	5.720.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.720.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.720.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.499.000,00			-	-	-	-	145.438.200,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.350.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.350.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.290.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.290.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	78.037.500,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.877.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.121.500,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.121.200,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	9.660.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.660.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.040.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.140.000,00	KECAMATAN AMBARAWA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	23.700.000,00			-	-	-	-	24.290.000,00		
	7	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	9.200.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.200.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	14.500.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.090.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	23.295.400,00			-	-	-	-	23.665.400,00		
	7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	16.885.400,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.885.400,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	6.410.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.780.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	71.000.000,00			-	-	-	-	71.000.000,00		
	7	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 Unit	62.120.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.120.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	3.200.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.200.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
	7	01	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	5.680.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.680.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
214	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	12.040.000,00					-		11.910.000,00		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	12.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		11.910.000,00		
	7	01	02	2.01	0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			9 Laporan	12.040.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Ambarawa Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		11.910.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
215	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	6.480.000,00					-		6.480.000,00		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	6.480.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	6.480.000,00		
	7	01	03	2.01	0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	6.480.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		6.480.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	
216	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	181.340.000,00					-		179.371.000,00		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	181.340.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	179.371.000,00		
	7	01	04	2.01	0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	177.600.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masvarakat.	-		174.600.000,00	KECAMATAN AMBARAWA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	3.740.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.771.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
217	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	22.380.000,00					-	-	22.380.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	22.380.000,00			-	-	-	-	22.380.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				9 Orang	22.380.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.380.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
218	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	10.530.000,00					-	-	8.730.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	10.530.000,00			-	-	-	-	8.730.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	10.530.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.730.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
						KECAMATAN PARDASUKA						2.262.459.197,00							2.296.416.048,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.262.459.197,00							2.296.416.048,00	
	7	01				KECAMATAN						2.262.459.197,00							2.296.416.048,00	
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.978.987.297,00					-	-	2.012.944.148,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.238.750,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.238.850,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	738.750,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		738.850,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.718.194.947,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.752.150.498,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/bulan Orang/bulan	1.528.319.947,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.562.430.898,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan Dokumen	188.720.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		188.720.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1.155.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		999.600,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	5.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		5.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	164.251.600,00			-	Pembangunan Infrastruktur 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	158.954.800,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.325.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.325.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.790.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-		35.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	48.226.600,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-		50.704.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.810.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		30.975.800,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34 Laporan	30.100.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-		24.950.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.210.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	31.340.000,00		
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	15.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		10.550.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.410.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		20.790.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.092.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	63.260.000,00		
7	01	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	47.060.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		51.785.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.032.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		11.475.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
220	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	12.000.000,00			-		-	-	12.000.000,00		
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.000.000,00		
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	16.782.000,00			-		-	-	16.782.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	16.782.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	16.782.000,00	
7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-		12 Lembaga Kemasyarakatan	16.782.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	-	-	16.782.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
222	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	-	222.000.000,00			-		-	-	222.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	222.000.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	222.000.000,00	
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-		12 Laporan	222.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	222.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
223	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	-	23.740.000,00			-		-	-	23.740.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	23.740.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	23.740.000,00	
7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-		30 Orang	23.740.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	-	-	23.740.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
224	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	-	8.949.900,00			-		-	-	8.949.900,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	8.949.900,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	8.949.900,00	
7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-		12 Dokumen	8.949.900,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	8.949.900,00	KECAMATAN PARDASUKA
						Kesatuan Bangsa Dan Politik						7.002.825.708,00							32.587.993.135,00	
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.002.825.708,00							32.587.993.135,00	
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.002.825.708,00							32.587.993.135,00	
225	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakib	-			BB Skala	3.496.604.908,00						-	5.287.555.968,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-			100 %	38.548.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpenuhinya Capaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	41.908.680,00	
8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		5 Dokumen	19.087.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpenuhinya Capaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	20.996.250,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		4 Laporan	19.461.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpenuhinya Capaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	20.912.430,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	2.837.845.608,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpenuhinya Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	-	3.280.175.608,00	
8 01 01 2.02 0001 Penvediaan Gali dan Tuntianan ASN																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	28.305.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		186.027.600,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	46.385.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		22.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		22.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		187.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	35.401.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	-	421.612.000,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	35.401.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah		70.162.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah		351.450.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-				100 %	138.310.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpeliharanya barang Milik daerah	-	433.279.000,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	96.290.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpeliharanya barang Milik daerah		103.279.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpeliharanya barang Milik daerah		110.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	14.820.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Terpeliharanya barang Milik daerah		220.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
226	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kemitraan wawasan Kebangsaan	-				100 %	358.100.400,00						-	2.409.299.750,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rapat FKUB dan FPK Jumlah Sosialisasi Bahaya Paham Radikalisme	-				100 %	358.100.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara kepada masyarakat di Kabuapten pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi Baya Paham Radikalisme	-	2.409.299.750,00	
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	94.449.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara kepada masyarakat di Kabuapten pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi Baya Paham Radikalisme		359.676.900,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				360 Orang	17.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara kepada masyarakat di Kabuapten pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi Baya Paham Radikalisme		510.945.600,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	2.01	0008		Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				36 Orang	229.741.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara kepada masyarakat di Kabuapten pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi Baya Paham Radikalisme		1.333.982.650,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	2.01	0011		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																	
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				36 Orang	16.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara kepada masyarakat di Kabuapten pringsewu, Jumlah Peserta Sosialisasi Baya Paham Radikalisme		204.694.600,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
227	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Partisipasi Politik	-			84 %	588.010.400,00						-	1.100.000.000,00				
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan parpol, Sosialisasi LPJ Bantuan Parpol	-			84 persen	588.010.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	-	1.100.000.000,00				
8	01	03	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	588.010.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		1.100.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
228	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Ormas Sinergi	-			73,02 %	2.150.885.500,00						-	22.160.027.057,00				
8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	-			73,02 persen	2.150.885.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Cakupan Ormas Sinergi	-	22.160.027.057,00				
8	01	04	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	2.150.885.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Cakupan Ormas Sinergi		22.160.027.057,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
229	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kemitraan Ketahanan Masyarakat	-			3 Lokasi	100.562.000,00						-	597.657.940,00		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			3 lokasi	100.562.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas hidup SDM 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	597.657.940,00		
801052.010003Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	98.922.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas hidup SDM 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		235.919.750,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
801052.010004Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				350 Orang	1.640.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas hidup SDM 1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		361.738.190,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
230	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka Konflik	-			86 %	308.662.500,00						-	1.033.452.420,00		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pesrta Rapat koordinasi Tim RAD,Tim Wasdin dan FKDM	-			86 persen	308.662.500,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	1.033.452.420,00		
801062.010003Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				41 Orang	9.561.000,00		Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		165.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
801062.010004Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orane Asine, Tenaga Kerja Asine dan Lembaga Asine, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	179.602.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup SDM 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		468.019.420,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	119.499.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		400.433.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	J U M L A H											1.269.420.328.517,00											
													1.280.681.878.996,93										